RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Darah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijak bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD Tahun 2022 meliputi:

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c. arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; dan
d. rencana kerja dan pendanaan daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2022 berfungsi sebagai:
    a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
    b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota; dan
    c. pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Provinsi.
(2) Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan musrenbang;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian mengenai dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2022.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah berpedoman pada RPJMD Provinsi serta mengacu pada RKP 2022;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dilakukan untuk menilai daya serap anggaran dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2022.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022.

(5) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada tahun 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 16
SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum APBD 2022 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2022.

Pangkalpinang, 30 Juni 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022 .....

BAB I PENDAHULUAN I.1
- 1.1. Latar Belakang I.1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I.7
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen I.9
- 1.4. Maksud dan Tujuan I.10
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD I.10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
- 2.1. Kondisi Umum Daerah II.1
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.33
    - 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi II.33
    - 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.46
    - 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.53
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II.58
    - 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib II.58
    - 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II.68
    - 2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan II.89
    - 2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum II.100
    - 2.1.3.5. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan II.102
    - 2.1.3.6. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan II.104
    - 2.1.3.7. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II.108
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II.109
    - 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.109
    - 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.112
    - 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II.115
    - 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II.118
  - 2.1.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II.120
  - 2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) II.135
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD II.141
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II.314

Halaman

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II.314
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah II.317

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III.1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi III.2
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III.2
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi III.5
3.1.1.3. PDRB Perkapita III.6
3.1.1.4. Struktur Perekonomian Daerah III.7
3.1.1.5. Struktur Pengeluaran dalam PDRB III.8
3.1.1.6. Tingkat Inflasi III.9
3.1.1.7. Tingkat Investasi III.10
3.1.1.8. Ekspor dan Impor III.11
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan III.12
3.1.2.1. Pengangguran III.12
3.1.2.2. Kemiskinan III.12
3.1.2.3. Ketimpangan Regional III.13
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan III.14
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022 ..... III.15
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2021 dan 2022 ..... III.15
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022 ..... III.16
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 ..... III.17
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.18
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.19
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III.21
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.24
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III.24
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III.26
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III.31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1. Tema, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 ..... IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.7
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah IV.12
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran pembangunan IV.18

Halaman

4.2.1. Prioritas Pembangunan daerah tahun 2022 ..... IV.18
4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah IV.162
4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional IV.164
4.2.4. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah IV.167
4.2.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) IV.187
4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) IV.207

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V.1
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan V.1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang V.2
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka V.3
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat V.6
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah V.8
5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan V.10
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung V.12
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur V.14
5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) V.16
5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 ..... V.16

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI.1
6.1. Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional VI.1
6.2. Dukungan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya VI.25
6.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD VI.27
6.4. Pagu Indikatif Perangkat Daerah VI.142

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII.1
7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) VII.1
7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) VII.3

BAB VIII PENUTUP VIII.1

LAMPIRAN
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... II.3
Tabel II.2 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.5
Tabel II.3 Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.8
Tabel II.4 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA II.10
Tabel II.5 Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.11
Tabel II.6 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.12
Tabel II.7 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 ..... II.13
Tabel II.8 Luas Lahan (ha) menurut Penggunaan Lahan Per-Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ..... II.19
Tabel II.9 Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)..... II.23
Tabel II.10 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)..... II.23
Tabel II.11 Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.24
Tabel II.12 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.28
Tabel II.13 Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 II.30
Tabel II.14 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019 ..... II.30
Tabel II.15 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 ..... II.31
Tabel II.16 Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 ..... II.32
Tabel II.17 PDRB Tahun 2015 –2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)..... II.33
Tabel II.18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019..... II.35
Tabel II.19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015–2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)..... II.36
Tabel II.20 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019 ..... II.37
Tabel II.21 Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019 ..... II.38
Tabel II.22 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019 ..... II.38

Halaman

Tabel II.23 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 ..... II.40
Tabel II.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional..... II.42
Tabel II.25 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung II.42
Tabel II.26 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.43
Tabel II.27 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.44
Tabel II.28 Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.44
Tabel II.29 Data Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.45
Tabel II.30 Data Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.45
Tabel II.31 Angka Harapan Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.46
Tabel II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.47
Tabel II.33 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.48
Tabel II.34 Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/KotaTahun 2014-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49
Tabel II.35 Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.49
Tabel II.36 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.50
Tabel II.37 Perkembangan Persentase Balita Stunting Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.51
Tabel II.38 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.52
Tabel II.39 Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.52
Tabel II.40 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020..... II.53
Tabel II.41 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.54
Tabel II.42 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.55
Tabel II.43 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.56
Tabel II.44 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.56
Tabel II.45 Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.57
Tabel II.46 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.57

Halaman

Tabel II.47 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.110
Tabel II.48 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 ..... II.111
Tabel II.49 Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019..... II.111
Tabel II.50 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 ..... II.112
Tabel II.51 Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang) II.113
Tabel II.52 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.113
Tabel II.53 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.114
Tabel II.54 Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.114
Tabel II.55 Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.116
Tabel II.56 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... II.118
Tabel II.57 Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan Terhadap Target/Indikator TPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.120
Tabel II.58 SPM Urusan Pendidikan..... II.135
Tabel II.59 SPM Urusan Kesehatan II.136
Tabel II.60 SPM Urusan Pekerjaan Umum II.137
Tabel II.61 SPM Urusan Perumahan Rakyat II.138
Tabel II.62 SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II.139
Tabel II.63 SPM Urusan Sosial II.140
Tabel II.64 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 ..... II.142
Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021 (juta rupiah) III.2
Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun2018-2022(Juta rupiah) III.4
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022..... III.6
Tabel III.4 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (milyar) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022 ..... III.7
Tabel III.5 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2022 (dalam persen) III.8
Tabel III.6 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2022 (dalam persen) III.9
Tabel III.7 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2019 (dicari data infestasi 2020) III.10

Halaman

Tabel III.8 Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2020 (dalam juta US$) III.11
Tabel III.9 Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2019 (dalam juta US$) III.12
Tabel III.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019 (dalam persen) III.12
Tabel III.11 Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2021 ..... III.14
Tabel III.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 s.d. Tahun 2022 ..... III.23
Tabel III.13 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 s.d. Tahun 2022 ..... III.29
Tabel III.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d. Tahun 2022 ..... III.32
Tabel IV.1 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... IV.8
Tabel IV.2 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022 ..... IV.10
Tabel IV.3 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022 ..... IV.11
Tabel IV.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022..... IV.11
Tabel IV.5 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ..... IV.13
Tabel IV.6 Strategi dan Program Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (Utama) RKPD 2022 ..... IV.21
Tabel IV.7 Strategi dan Program Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (Utama) RKPD 2022 ..... IV.22
Tabel IV.8 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Penunjang dengan Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan pada RKPD 2022 ..... IV.77
Tabel IV.9 Arah Kebijakan dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Pembangunan II (penunjang) RKPD 2022..... IV.79
Tabel IV.10 Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022..... IV.162
Tabel IV.11 Keselarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ..... IV.165
Tabel IV.12 Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ..... IV.167
Tabel IV.13 Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 ..... IV.168
Tabel IV.14 Strategi dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)..... IV.188
Tabel IV.15 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Pendidikan IV.208
Tabel IV.16 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Kesehatan..... IV.209

Halaman

Tabel IV.17 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV.210
Tabel IV.18 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman IV.211
Tabel IV.19 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV.212
Tabel IV.20 Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Sosial IV.213
Tabel V.1 Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ..... V.3
Tabel V.2 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2022 ..... V.4
Tabel V.3 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 ..... V.7
Tabel V.4 Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 ..... V.9
Tabel V.5 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 ..... V.11
Tabel V.6 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2022 ..... V.13
Tabel V.7 Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 ..... V.15
Tabel V.8 Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034 ..... V.18
Tabel V.9 Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah V.45
Tabel VI.1 Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 ..... VI. 2
Tabel VI.2 Dukungan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya ..... VI. 25
Tabel VI.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... VI. 29
Tabel VI.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ..... VI. 142
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ..... VII. 1
Tabel VII.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ..... VII. 4
Tabel VII.3 Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 ..... VII. 13

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi	I.6
Gambar I.2	Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	I.10
Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II.2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.2
Gambar II.4	*Traffic Flow* pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.7
Gambar II.5	Pengembangan Jalur Pelayaran Laut	II.8
Gambar II.6	Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung	II.9
Gambar II.7	Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)	II.10
Gambar II.8	Energi Baru dan Terbarukan	II.11
Gambar II.9	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.14
Gambar II.10	Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.17
Gambar II.11	Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034	II.18
Gambar II.12	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.20
Gambar II.13	Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040	II.21
Gambar II.14	Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.22
Gambar II.15	Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.25
Gambar II.16	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.26
Gambar II.17	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.27
Gambar II.18	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.29
Gambar IV.1	7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	IV.2
Gambar IV.2	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2022 Terhadap RPJPD dan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022	IV.2
Gambar IV.3	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2022 Terhadap RPJMD Tahun 2017-2022	IV.3
Gambar IV.4	Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	IV.5
Gambar IV.5	Prioritas Pembangunan Daerah I (Utama) Tahun 2022	IV.19
Gambar IV.6	Prioritas Pembangunan Daerah II (Penunjang) Tahun 2022	IV.75
Gambar V.1	Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	V.1
Gambar V.2	Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022	V.2
Gambar V.3	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2022	V.4
Gambar V.4	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	V.7
Gambar V.5	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021	V.8

Halaman

Gambar V.6	Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021	V.10
Gambar V.7	Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2022	V.12
Gambar V.8	Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022	V.14

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik	II.1	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	II.31
Grafik	II.2	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020	II.33
Grafik	II.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019	II.34
Grafik	II.4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019	II.39
Grafik	II.5	Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019	II.39
Grafik	II.6	Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2015 – 2019	II.40
Grafik	II.7	Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019	II.41
Grafik	II.8	Indeks Ketimpangan Williamson Tahun 2010 – 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.43
Grafik	II.9	Persentase Bayi kurus dan Stunting Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.50
Grafik	II.10	APK dan APM SMA/SMK/SLB	II.58
Grafik	II.11	APK SMA, SMK, dan SLB	II.59
Grafik	II.12	SMA, SMK, SLB Terakreditasi A	II.59
Grafik	II.13	Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	II.60
Grafik	II.14	Rumah Sakit Terakreditasi	II.61
Grafik	II.15	PROPORSI PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP	II.62
Grafik	II.16	Rasio Irigasi	II.62
Grafik	II.17	Penyediaan Air Baku dan Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air	II.63
Grafik	II.18	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	II.64
Grafik	II.19	Akses Sanitasi Layak	II.64
Grafik	II.20	Indeks Risiko Bencana	II.65
Grafik	II.21	Indeks Ketahanan Daerah	II.66
Grafik	II.22	Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti	II.66
Grafik	II.23	Indeks Pembangunan Sosial	II.67
Grafik	II.24	Data PMKS dan PSKS 2015-2019	II.68
Grafik	II.25	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	II.69
Grafik	II.26	Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan	II.69
Grafik	II.27	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	II.70
Grafik	II.28	Persentase Tenaga KErja yang Ditempatkan	II.71
Grafik	II.29	Skor PPH Ketersediaan dan PPh Konsumsi	II.72
Grafik	II.30	Prevalence of Undernourishment	II.72
Grafik	II.31	Penyelesaian Kasus Tanah	II.73

Halaman

Grafik	II.32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II.74
Grafik	II.33	Pengaduan/Kasus Lingkungan Hidup	II.75
Grafik	II.34	Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan PPLH	II.75
Grafik	II.35	Izin Lingkungan yang Dikeluarkan Provinsi	II.76
Grafik	II.36	KampungKeluarga Berencana (KB)	II.77
Grafik	II.37	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.77
Grafik	II.38	Badan Usaha Milik Desa	II.78
Grafik	II.39	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	II.79
Grafik	II.40	Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	II.80
Grafik	II.41	Nilai Investasi	II.80
Grafik	II.42	Jumlah Perizinan	II.81
Grafik	II.43	Indeks Pembangunan Pemuda	II.82
Grafik	II.44	Indeks Pembangunan Olahraga	II.82
Grafik	II.45	Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis e-Government	II.83
Grafik	II.46	Data dan Informasi Statistik yang Digunakan untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan	II.84
Grafik	II.47	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKK)	II.85
Grafik	II.48	Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola	II.85
Grafik	II.49	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	II.86
Grafik	II.50	Koleksi Buku di Perpustakaan	II.87
Grafik	II.51	Penyelenggaraan Kearsipak Sesuai Standar Baku	II.87
Grafik	II.52	Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.88
Grafik	II.53	Jumlah UMKM yang Diberdayakan	II.89
Grafik	II.54	Laju Perumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	II.89
Grafik	II.55	Pertumbuhan Produksi Perikanan	II.90
Grafik	II.56	Perumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	II.91
Grafik	II.57	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	II.91
Grafik	II.58	SDM Pariwisata Tersertifikasi	II.92
Grafik	II.59	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	II.93
Grafik	II.60	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura	II.93
Grafik	II.61	Produksi Lada dan Karet	II.94
Grafik	II.62	Populasi Ternak Sapi dan Ayam	II.95
Grafik	II.63	Kawasan Perhutanan Sosial	II.96
Grafik	II.64	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kritis	II.97
Grafik	II.65	Rasio Elektrifikasi	II.97
Grafik	II.66	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$)	II.98
Grafik	II.67	Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	II.99
Grafik	II.68	Kawasan Transmigrasi	II.100
Grafik	II.69	Nilai Kebebasan Sipil	II.101
Grafik	II.70	Nilai Lembag Demokrasi	II.101
Grafik	II.71	Nilai Hak-Hak Politik	II.102
Grafik	II.72	Nilai Sakip	II.103

Halaman

Grafik II.73 Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan II.103
Grafik II.74 Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD II.104
Grafik II.75 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 ..... II.105
Grafik II.76 Indeks Profesionalitas ASN II.106
Grafik II.77 Opini BPK II.106
Grafik II.78 PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD II.107
Grafik II.79 Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang Terlaksana II.108
Grafik II.80 Indeks Reformasi Birokrasi II.108
Grafik II.81 Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD II.109
Grafik II.82 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 ..... II.110
Grafik II.83 Angka Kriminalitas II.115
Grafik II.84 Jumlah Demo II.116
Grafik II.85 Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah II.118
Grafik II.86 Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II.119
Grafik III.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020 III.5
Grafik III.2 Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ..... III.7
Grafik III.3 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2022 ..... III.9
Grafik III.4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2022 ..... III.13
Grafik III.5 Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2022 ..... III.145

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pambangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuh kembangkan rasa memiliki. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2022, Penyusunan RKPD 2022 dengan prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan

penganggaran yang terintegrasi. Penguatan implementasi *Money Follow Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan. Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain sebagai berikut:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
3. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi:
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. orientasi mengenai RKPD;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi:
   a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
      1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
      2) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
      4) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
      5) perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
      7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
      8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
      9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
      10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
      11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

1) pendahuluan;
2) gambaran umum kondisi daerah;
3) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
4) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5) arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
6) rancangan kerja dan pendanaan daerah;
7) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
8) penutup.

3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)

Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan:

a. rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
b. hasil penelahaan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
2) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
3) menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
4) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
5) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
6) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kabupaten/kota.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Kepala daerah (Perkada) tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai:

   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;

   b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan

   c. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.

2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Serta pelaksanaan tahun kelima RPJMD 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar I.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

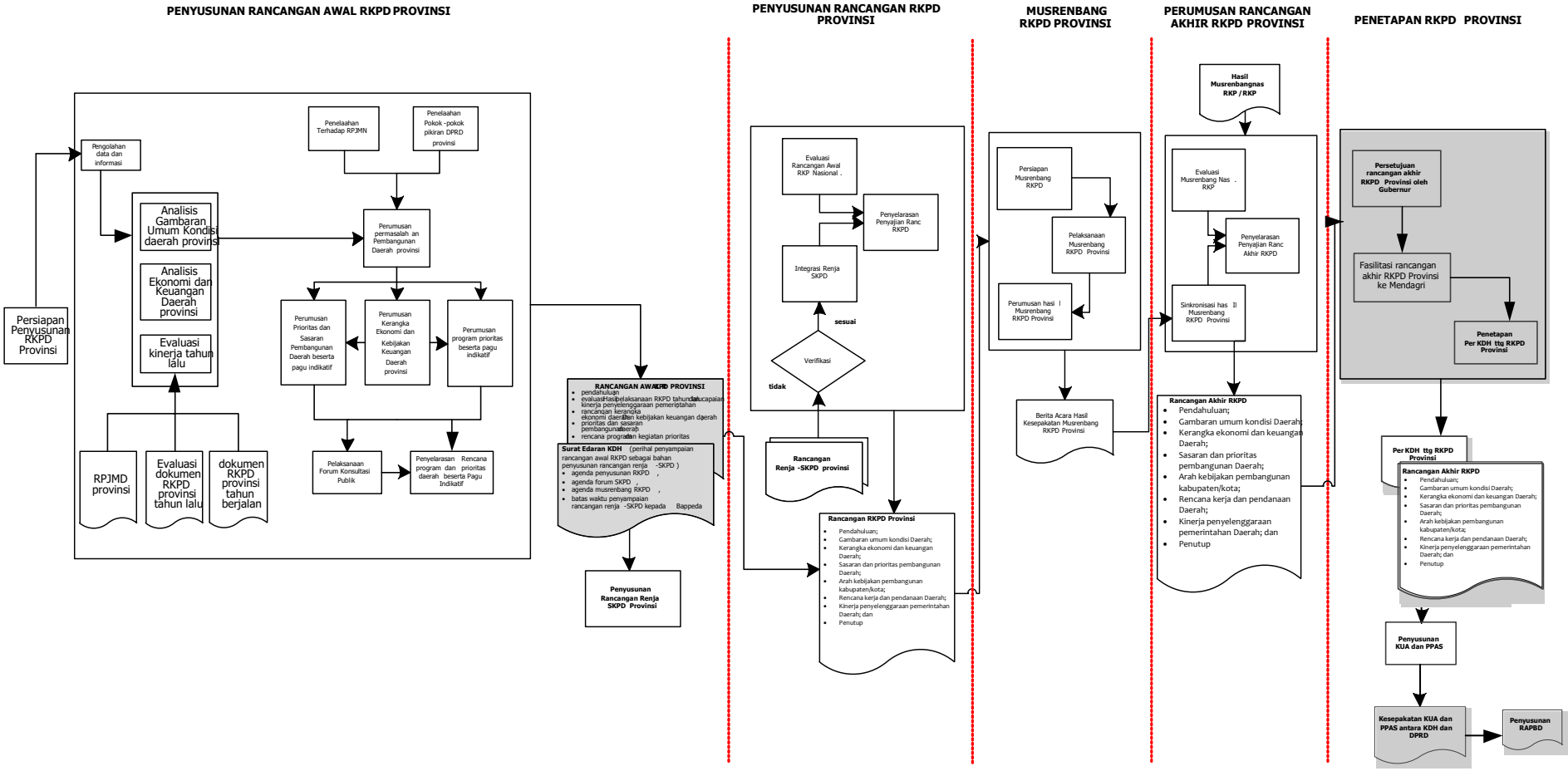

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama-sama diacu oleh RKPD.

Berdasarkan kondisi di atas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.2 berikut:

Gambar I.2
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

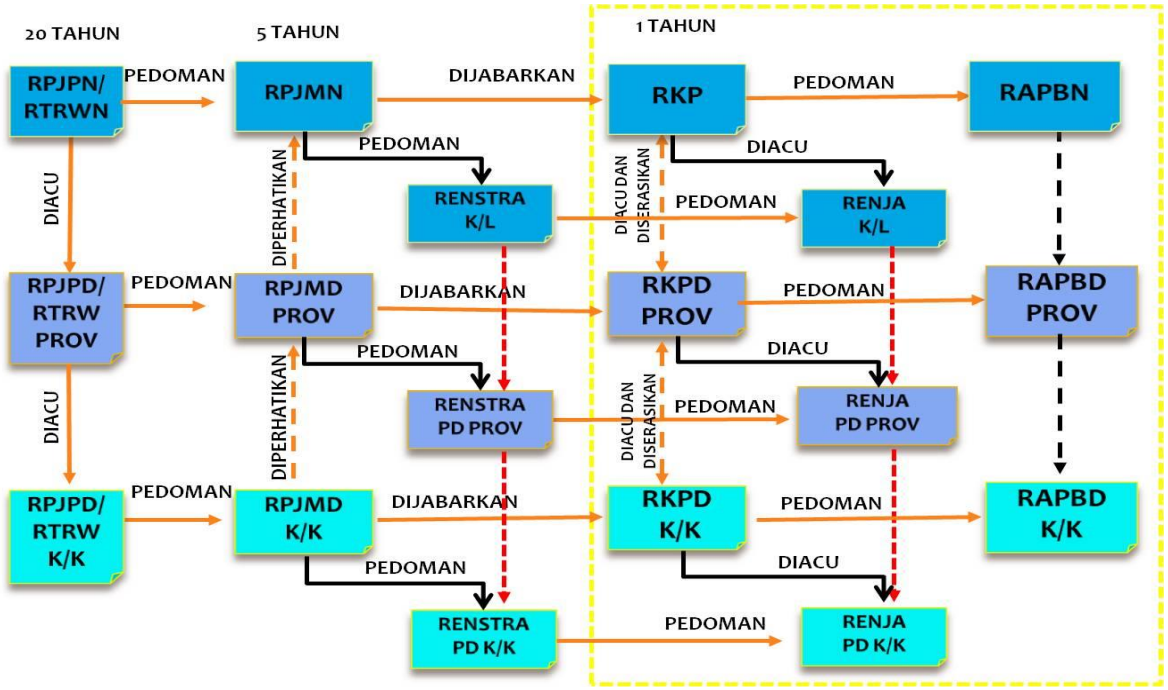

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (diolah)

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/ Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana

pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan, realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2021), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahun 2022 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (tahun 2020) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana program dan kegitan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi Daerah

1. Kondisi Astronomis dan Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ Bujur Timur dan 0°50’ sampai 4°10’ Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini,

Gambar II.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

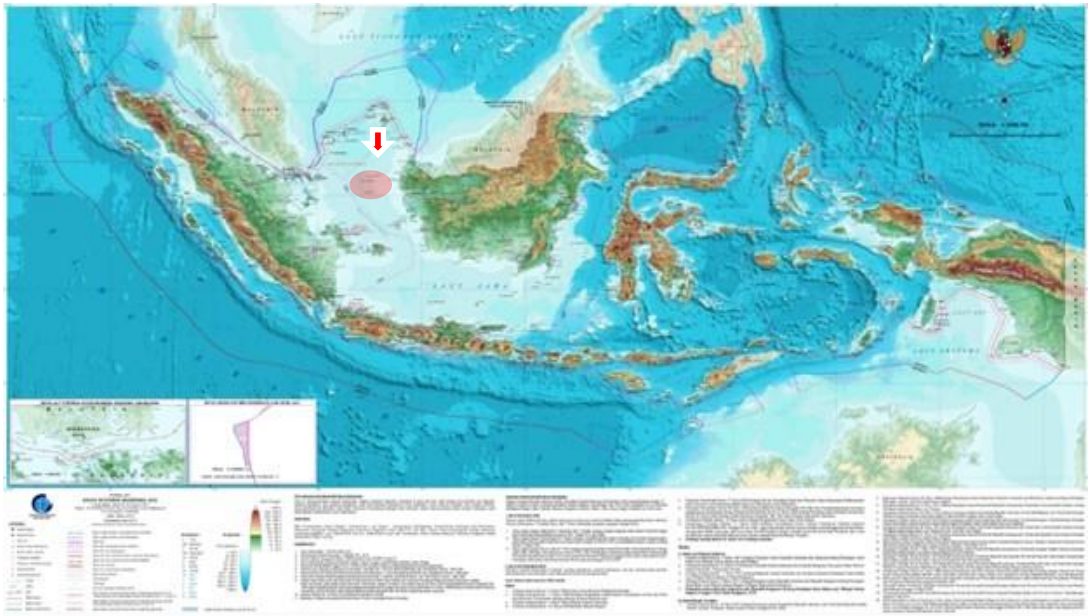

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

Gambar II.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman, terutama apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar II.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

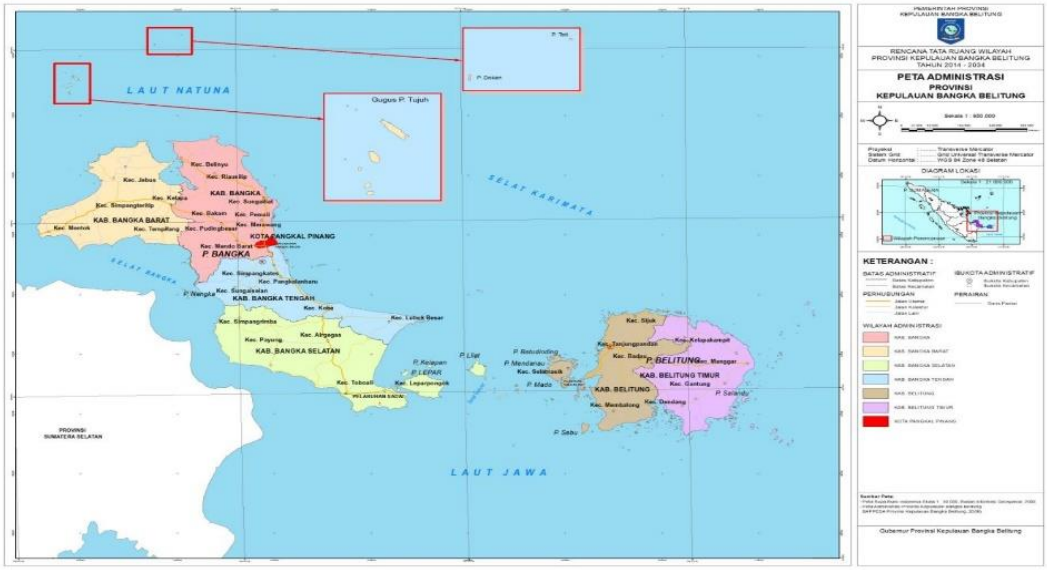

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2. Luas dan Daerah Administratif

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km^2 dan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,80 km^2.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km^2. Terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km^2 atau 20,10 persen dari total wilayah, dan wilayah laut seluas 65.301,00 km^2 atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara terperinci dapat dilihat pada data Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Bangka	Sungailiat	2.950,69	8	19	62
2	Bangka Barat	Muntok	2.820,61	6	4	60
3	Bangka Tengah	Koba	2.126,36	6	7	56
4	Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	8	3	50
5	Belitung	Tanjung Pandan	2.293,69	5	7	42
6	Belitung Timur	Manggar	2.507,00	7	0	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	7	42	0
	Provinsi Kep. Bangka Belitung		**81.725,23**	**47**	**82**	**309**
	Luas Daratan		16.424,23			
	Luas Laut		65.301,00			

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2020

Total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah Administrasi Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan. Sedangkan wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi desa adalah Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari "*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*" dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey* dan *Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* ($ZrSiO_4$), *Monazite* ((Ce, La, Dy)PO_4 (ThSi)O_2), *Hematite* (Fe_2O_3), Pyrite (FeS_2), *Ilmenite* ($FeTiO_3$), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granitebelt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama "satam"). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda *Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

4. Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Berdasarkan data BPS yang dirilis dari BMKG selama tahun

2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 ˚C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

5. Kondisi Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel dibawah ini,

Tabel II.2
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Pertanian Sawah	15.719	22.771	25.058	25.093
Tegalan	113.105	117.376	99.038	97.930
Ladang	30.348	28.147	27.435	30.416
Perkebunan	441.152	367.848	391.064	394.408
Hutan Rakyat	47.753	42.637	43.315	43.661
Tambak	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*
Pengembalaan	1.815	2.263	3.232	3.232
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	76.588	67.415	55.987	59.174
Lain-Lain (pekarangan)	397.806	538.195	529.810	519.497
Permukiman	517.741	455.762	489.080	490.607
Hutan Negara	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*
JUMLAH	**1.642.027**	**1.642.414**	**1.664.019**	**1.664.018**

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

(: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)*

Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

Luas penggunaan lahan tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 519.497 Ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 490.607 ha dan perkebunan sebesar 394.408 Ha, serta luas penggunaan lahan paling kecil diperuntukan pada pengembalaan sebesar 3.232Ha.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjung Pandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi:Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalan Baru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan dimana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Gambar. II.4
Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi
pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

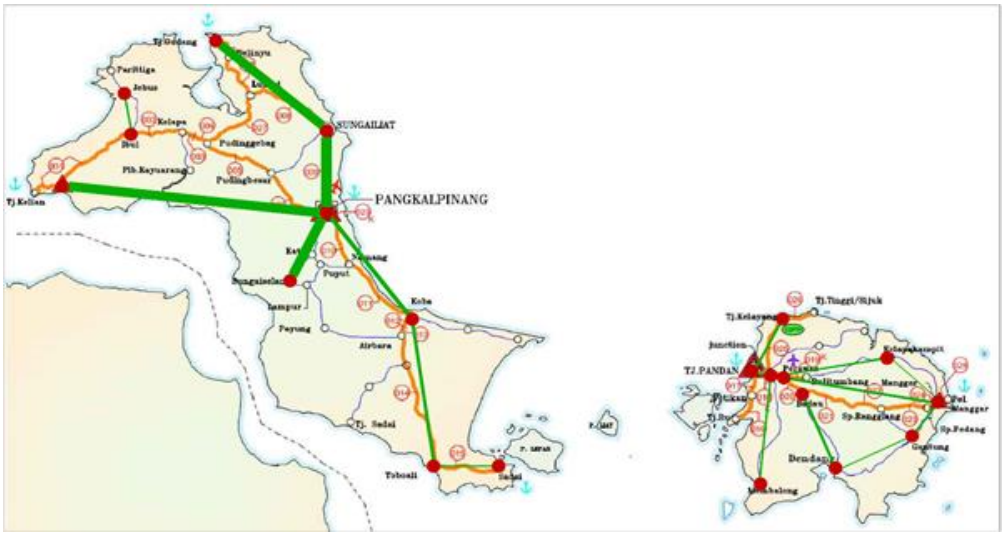

Sumber : *Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

b. Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul *(hub)*; dan b) bandar udara pengumpan *(spoke).* Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Gambar. II.5
Pengembangan Jalur Pelayaran Laut

Sumber : *Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
(1)	*(2)*	*(3)*
A	**Pelabuhan Utama**	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	**Pelabuhan Pengumpul**	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	**Pelabuhan Pengumpan**	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kalian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
A	**Pelabuhan Utama**	
D	**Pelabuhan Khusus (Wisata)**	
1	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat)-Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat)-Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

3. Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berjumlah 472.186 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 352.917 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.218.892.656 KWh (Babel Dalam Angka, 2020).

Gambar. II.6

Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung

Sumber : *Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana

pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di kabupaten/kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomassa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi istrik dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini,

Tabel II.4

Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkalpinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
JUMLAH		**477.159**	**507.309**	**553.487**	**603.875**	**654.842**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
JUMLAH		**146.283**	**152.588**	**161.327**	**170.566**	**181.919**
JUMLAH TOTAL		**623.442**	**659.897**	**714.814**	**774.441**	**836.761**

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Proyeksi kebutuhan Kebutuhan Daya Listrik 2010 sebesar 2030 KVA pada tahun 2010 sebanyak 623.442 KK. Dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 477.159 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 146.283 KK. Pada tahun 2030 kebutuhan daya listrik semakin meningkat dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 454.842 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 836.761 KK. Artinya dari tahun 2010 kebutuhan daya listrik 2010 sebesar 2030 KVA semakin meningkat sampai dengan tahun 2030 mendatang.

Gambar. II.7

Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)

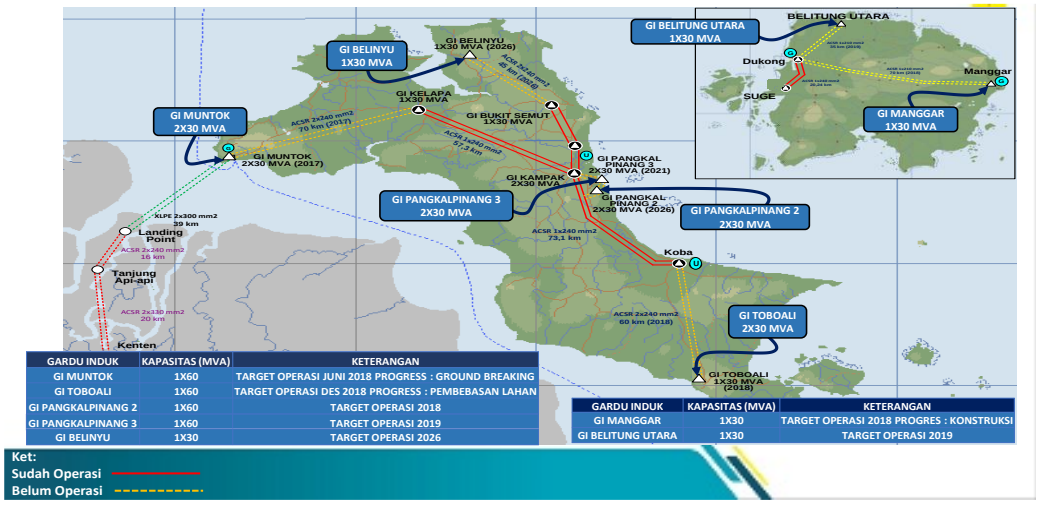

Sumber : *Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Gambar. II.8
Energi Baru dan Terbarukan

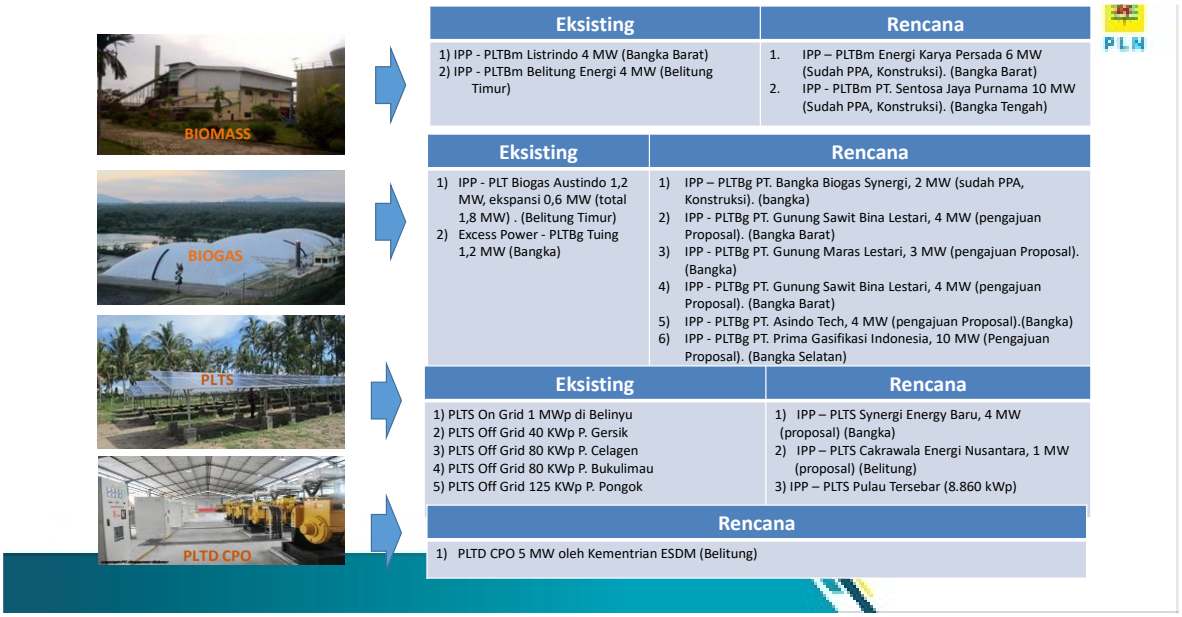

Sumber : *Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

Tabel II.5
Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa	Desa Berlistrik PLN	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(%)*
1	Bangka	71	71	100
2	Bangka Barat	64	64	100
3	Bangka Tengah	63	63	100
4	Pangkalpinang	42	42	100
5	Bangka Selatan	53	53	100
6	Belitung Timur	39	39	100
7	Belitung	49	49	100
Bangka Belitung		**381**	**381**	**100**

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan

budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Tabel II.6
Potensi Energi Baru dan Terbarukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)	POTENSI
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Energi Surya	220 MW
2	Bio Massa	72,45 MW
3	Energi Angin	1,67 MW
4	Energi Air	-
5	Energi Biogas POME	9,4 MW
6	Energi Biodiesel	5 MW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT.PLN (Persero) telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. Saat ini kedua PLTU tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, hingga tahun 2019 dari 6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi. Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW.

4. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel II.7
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkalpinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	JUMLAH	**112.683**	**124.942**	**136.315**	**148.724**	**158.861**
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	JUMLAH	**33.451**	**34.830**	**36.825**	**38.934**	**40.986**
	JUMLAH TOTAL	**146.134**	**159.772**	**173.140**	**187.658**	**199.847**

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi. Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847 sambungan telelpon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya.

5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis (WS) Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;

b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;

c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;

d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempadan sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;

e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai.

6. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik; sistem drainase; Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

Gambar II.9
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

7. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1) Hutan lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, dimana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (37.583 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

3) Kawasan perlindungan setempat

a) **Sempadan Pantai**. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

b) **Sempadan Sungai**. Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

c) **Sempadan Kolong**. Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya

a) **Kawasan Cagar Alam**. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam yaitu

Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

b) **Taman Wisata Alam Laut**. Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

c) **Kawasan Suaka Alam Laut** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat Mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

5) Kawasan rawan bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

a) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);

b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungai Liat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan

c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

b. Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Gambar II.10
Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

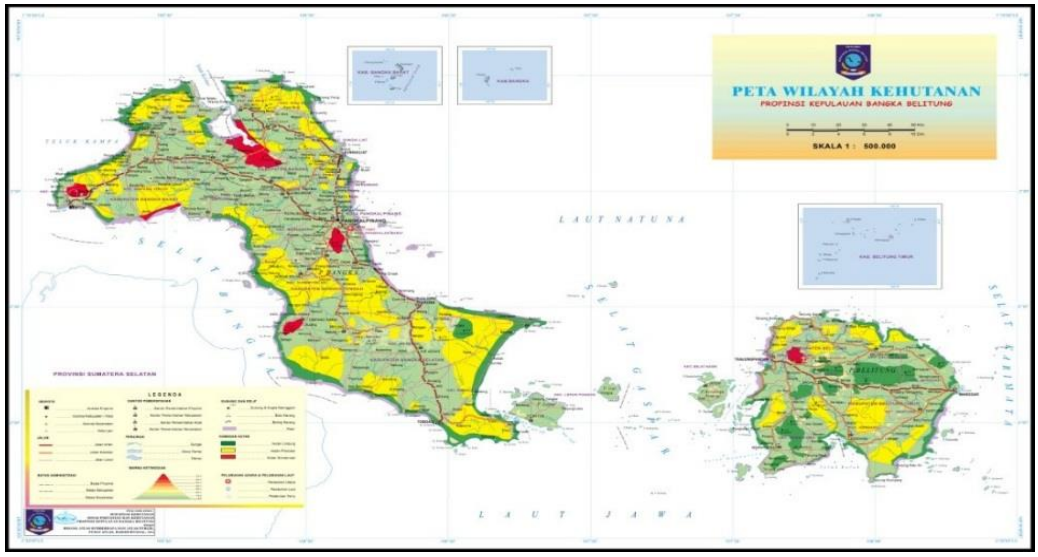

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten Bangka (HP 67.083,52ha; HPK 11,32 ha), Kota Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha) Kabupaten Bangka Selatan (HP 106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah (HP 85.497,75 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67 ha), Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha). Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

a) Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.

b) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.

d) Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme izin pinjam pakai.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi.

Gambar II.11
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP
Tahun 2014-2034

Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, rotan, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema

izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai *Geopark* Nasional.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Di wilayah kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih kurang 903.450 ha kawasan pertanian dengan rincian kawasan pertanian tanaman pangan seluas (355.453 ha), pertanian hortikultura seluas (221.512 Ha), perkebunan seluas (316.383 Ha) dan kawasan peternakan seluas (10.102 Ha). Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Bangka Belitung yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat agraris, terus berkurang dengan cepat karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat.

Tabel II.8
Luas Lahan (ha) menurut Penggunaan Lahan Per-Kabupaten
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Penggunaan Lahan		Kabupaten							Luas Total (Ha)
		Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung	Belitung Timur	Pangkal Pinang	
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
I	**LAHAN PERTANIAN**	**236.227**	**195.684**	**168.131**	**231.830**	**195.777**	**143.655**	**2.108**	**1.173.412**
	1.1 Lahan Sawah	**3.645**	**2.542**	**306**	**14.789**	**1.159**	**2.832**	**-**	**25.053**
	a. Irigasi	1.078	200	53	1.600	1.061	974	-	4.966
	b. Tadah hujan	943	2.342	253	11.687	98	1.858	-	17.181
	c. Pasang surut	390	-	-	-	-	-	-	390
	d. Lebak	1.054	-	-	1.502	-	-	-	2.556
		232.672	**193.142**	**167.825**	**217.041**	**194.618**	**140.824**	**2.108**	**1.148.319**
	a. Tegal	37.690	2.365	12.655	17.976	10.950	15.383	901	97.930
	b. Ladang	12.818	4.087	1.798	1.985	9.175	593	-	30.416
	c. Perkebunan	108.041	60.982	24.444	72.764	61.608	66.092	478	394.408
	d. Hutan rakyat	13.702	3.468	-	1.448	12.976	12.059	8	43.661
	e. Pengembalaan	-	1.049	-	557	417	1.208	1	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	27.544	15.820	-	5.590	2.502	7.309	410	59.174
	g. Lain-lain	32.697	105.371	128.918	116.689	96.990	38.180	311	519.497
II	**LAHAN NON PERTANIAN**	**58.841**	**92.747**	**597.80**	**128.878**	**33.592**	**107.036**	**9.732**	**490.607**
II.1	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	58.841	92.747	59.780	128.878	33.592	107.036	9.732	490.607
	Jumlah	**295.068**	**228.431**	**227.911**	**360.708**	**229.369**	**250.691**	**11.840**	**1.664.018**

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Sedangkan berdasarkan penggunaan lahan/*land use* atau *existing area* menurut data Statistik BPS tahun 2016 adalah luas lahan pertanian yang diusahakan 683.717 ha dari total luas lahan pertanian 1.186.652 ha. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub-sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/*land use* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar berikut,

Gambar II.12
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

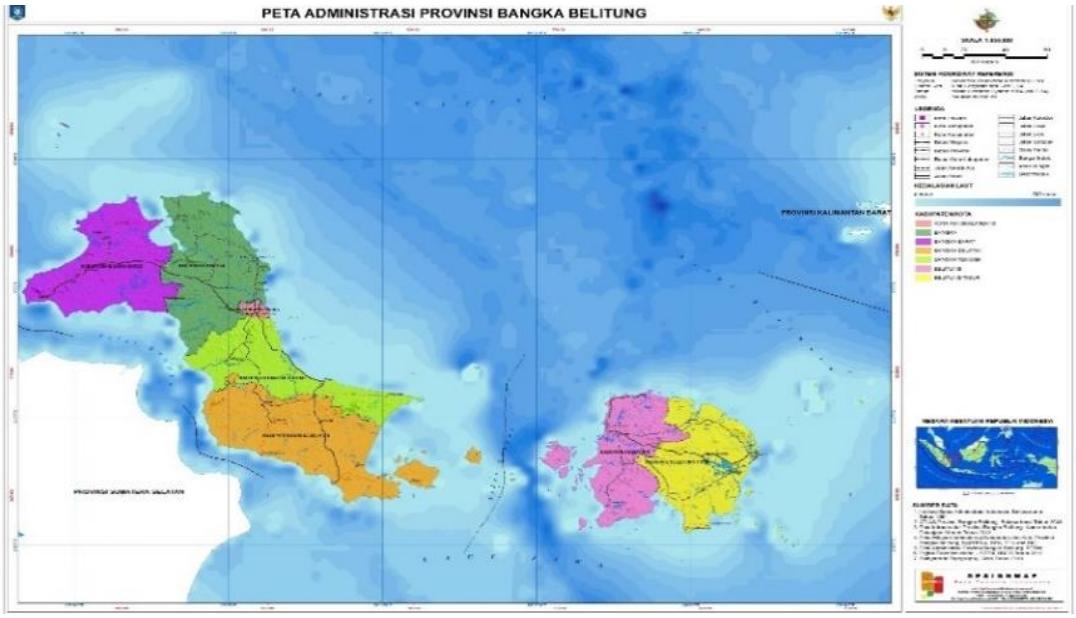

Sumber : *Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2018*

3) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2022 disesuaikan dengan penataan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kebijakan RZWP3K adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kebijakan RZWP3K tersebut, dilakukan beberapa strategi dalam pemanfaatan perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu: mendorong pengembangan usaha; memberikan kemudahan dalam berusaha; mempercepat proses perizinan berusaha; melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang; serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mengacu pada Rencana Alokasi Ruang pada RZWP3K, maka kawasan peruntukan perikanan termasuk ke dalam kawasan pemanfaatan umum (KPU), dimana alokasi ruang lainnya merupakan Kawasan Konservasi (KK), dan Alur Laut (AL) sebagaimana pada gambar dibawah ini,

Gambar II.13
Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

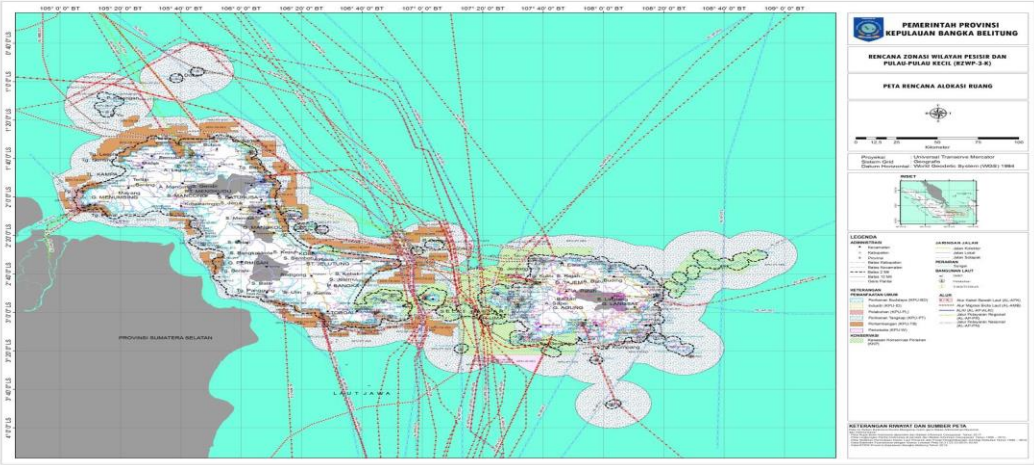

Sumber : Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040

Peruntukan kawasan perikanan berdasarkan rencana alokasi ruang dibagi menjadi:

1) Zona Perikanan Budi daya (KPU-BD), yang terdiri dari: sub zona budi daya laut (KPU-BD-BL); dan sub zona budi daya air payau (KPU-BD-BP). Selanjutnya sub zona ini memiliki arah pengembangan mulai dari perairan Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.
2) Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT) memiliki sub zona yang terdiri dari sub zona pelagis (KPU-PT-P) yang memiliki arah pengembangan pada perairan Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Pangkalpinang; dan sub zona demersal (KPU-PT-D) yang memiliki arah pengembangan pada perairan Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung.

Dalam pengembangannya, kawasan peruntukan perikanan telah didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPN Sungailiat, PPN Tanjung Pandan, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), PPP Muara Sungai Baturusa, PPI Kurau, PPI Manggar, PPI Sungai Selan, PPI Sadai, PPI Selat Nasik, dan PPI Gantung.

Selain kawasan peruntukan perikanan, rencana alokasi ruang pada RZWP3K juga diperuntukkan untuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP memiliki arah pengembangan pada wilayah perairan Kabupaten Bangka yaitu Perairan Tuing; Kabupaten Bangka Selatan yaitu Perairan Kecamatan Tukak Sadai, Lepar Pongok, dan Kepulauan Pongok; Kabupaten Bangka Tengah yaitu Perairan Pulau Ketawai, Perairan Pulau Gusung Ketugar, Perairan Pulau Bebuar, Perairan Pulau Ketugar, Perairan Kecamatan Perlang; Kabupaten Belitung yaitu Perairan Membalong dan Sekitarnya, Perairan Timur Selat Nasik, Selat Gaspar, Pulau Keluang; dan Kabupaten Belitung Timur yaitu Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya.

Kawasan konservasi perairan (KKP) yang telah dikelola baru mencapai 447.785,25 ha meliputi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Tahun 2017

   a. Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur. SK Nomor 52/KEPMEN-KP/2017 Tanggal 22 Desember 2017, dengan status penetapan.

   b. Kawasan Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. 188.45/268/DKP /2007 Tanggal 17 Juli 2017, dengan status pencadangan.

2. Tahun 2018

   Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka 188.44/739/DKP/2018 Tanggal 27 September 2018 dengan status pencadangan.

3. Tahun 2019

   Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung 188.44/927/DKP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Reviu Pencadangan). Status masih dalam proses penetapan.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan ekplorasi peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha diwilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Gambar. II.14
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

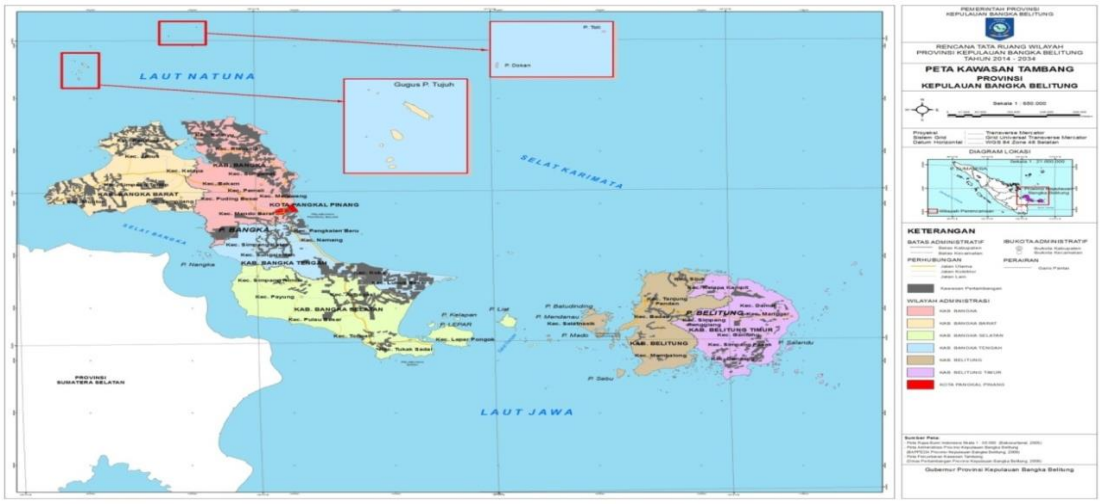

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu

sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Potensi pertambangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel II.9
Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Tipe	Potensi Sumber Daya dan Cadangan					
			Timah	Bauksit	Monasit	Xenotim	Diabas	Titan Plaser
1	Logam	Sumber daya	2.564.388,929		181.735,62	20.734,223		515.188,8
		Cadangan	2.068.069,829	868.000	3.311	0,058		562
2	Biji	Sumber daya	9.970.982.968		6.384.384.512	970.843.849		6.869.184
		Cadangan	2.010.642.708,109	3.100.000	1.084	0,089		
			Titan Plaser	Besi Primer	Seng	Timbal	Perak	
1	Logam	Sumber daya	515.188,8	18.524.967,611	1.679.138	1.027.076	1.531,67	
		Cadangan	562	14,781				
2	Biji	Sumber daya	6.869.184	36.629.375,54	25.610.000	25.610.000	25.610.000	
		Cadangan		328.465,96				

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah biji timah sebesar 9.970.982.967,54 ton, disusul biji monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton. Sedangkan untuk logam perak merupakan potensi yang paling sedikit sebesar 1.531,67 ton. Sumber daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 528.553.883 ton. Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.10
Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Potensi Sumber Daya dan Cadangan	Potensi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Kaolin	Sumber Daya	376.687.532
		Cadangan	5.990.630
2	Pasir kuarsa	Sumber Daya	690.424.868
		Cadangan	18.389.856
3	Diabas	Sumber Daya dan Cadangan	-
4	Granit	Sumber Daya	528.553.883
		Cadangan	-

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

5) Kawasan peruntukan industri

Kawasan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7 kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, (5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7) Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.11
Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bidang Kewenangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kawasan Peruntukan Industri Pangkalpinang (Ketapang)	Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030	± 440	Kota Pangkalpinang
2	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka Barat (Tanjung Ular dan sekitar Tanjung Kalian)	Perda Kab. Bangka Barat No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Barat 2014-2034	± 1.414	Kabupaten Bangka Barat
3	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka (Jelitik, Sungailiat)	Perda Kab. Bangka No. 15 Tahun 2014 ttg RDTR Sungailiat 2014-2034	± 253	Kabupaten Bangka
4	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Selatan (Sadai)	Perda Kab. Bangka Selatan No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Selatan 2014-2034	± 3.086	Kabupaten Bangka Selatan
5	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Belitung (Suge)	Perda Kab. Belitung No.3 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034	± 1.414	Kabupaten Belitung
6	Kawasan industri Kabupaten Belitung Timur (Air Kelik)	Perda Kab. Belitung Timur No.13 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Beltim 2014-2034	± 1.532	Kabupaten Beltim
7	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Tengah (Tanjung Berikat-Lubuk Besar)	Perda Kab. Bangka Tengah No.48 Tahun 2011 ttg RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	± 7.019	Kabupaten Bangka Tengah
	Total Luas Kawasan		**± 15.158**	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

6) Kawasan peruntukan pariwisata

Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah memiliki daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Daya Tarik Wisata (DTW) tersebar disemua kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki

81 DTW, Kabupaten Belitung Timur 120 DTW, Kabupaten Bangka Barat 47 DTW, Kabupaten Bangka Tengah 42 DTW, Kabupaten Bangka Selatan 66 DTW, dan Pangkal pinang 25 DTW. Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar di bawah ini,

.Gambar II.15

Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

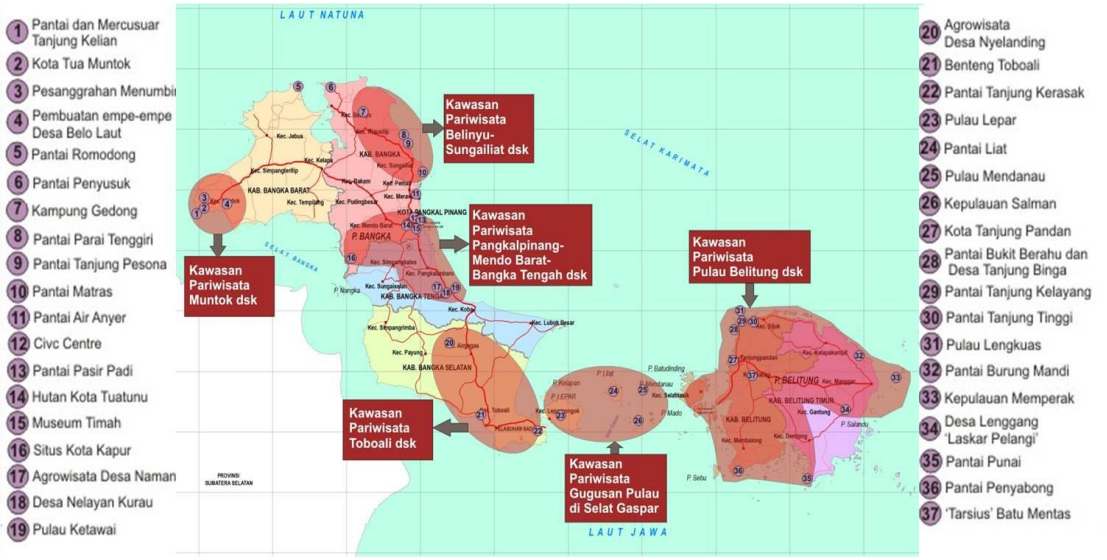

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengatur kawasan peruntukan pariwisata di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, terdiri dari:

a) Wisata alam, meliputi:
   a. Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
   b. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di kabupaten/kota, serta kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
   c. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
   d. Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
   e. Taman wisata laut;
   f. Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
   g. Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di kabupaten/kota.

b) Wisata budaya, meliputi:
   a. Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;

b. Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;

c. Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;

d. Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di kabupaten/kota;

c) Wisata buatan, meliputi:

Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan *resort* serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

7) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas kurang lebih 25.012,7 Ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland* dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

8) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara (*air weapon range*/AWR), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China.

Gambar II.16
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

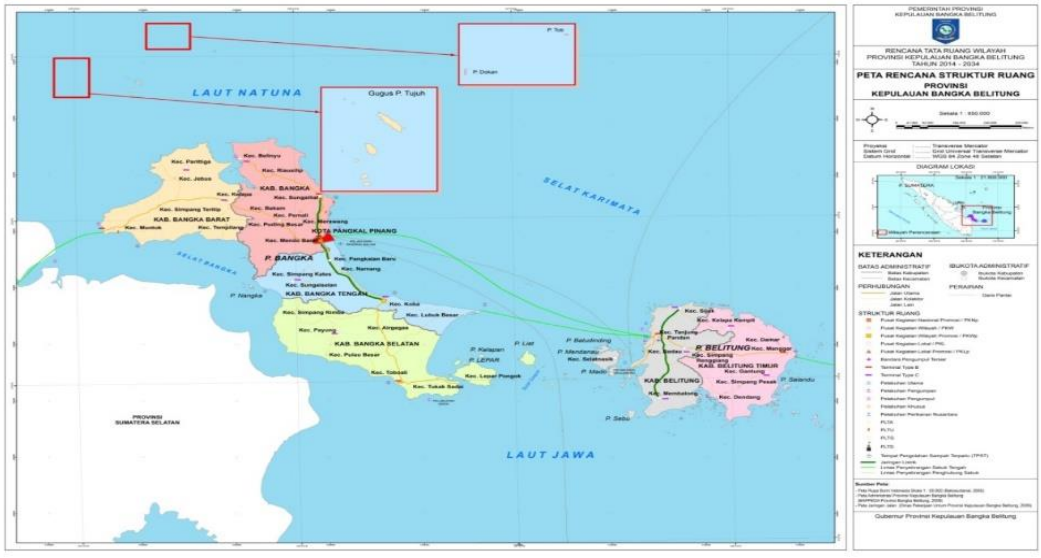

Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

c. Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya; Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Gambar II.17

Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber:RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
   a) Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
   b) Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
   c) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
   d) Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan;
   e) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
   f) Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
   g) Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
   h) Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;

i) Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;

j) Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;

k) Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;

l) Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;

m) Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;

n) Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan

o) Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**,** meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

C. Wilayah Rawan Bencana

Sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrim dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Potensi rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel II.12
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Bangka	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
2	Bangka Tengah	Puting Beliung, Tanah Longsor, Karhutla
3	Bangka Selatan	Puting Beliung Dan Karhutla
4	Bangka Barat	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
5	Belitung	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
6	Belitung Timur	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
7	Pangkalpinang	Banjir, Puting Beliung, Karhutla

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kebupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan
3. Kawasan rawan Karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang Katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggiang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan
4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).

Gambar II.18
Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada tahun 2020 kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) potensi bencana dengan kejadian sebanyak 29 kejadian yaitu 5 banjir, 12 angin puting beliung, 3 tanah longsor dan 9 kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan korban meninggal dunia dan hilang akibat tanah longsor sebanyak 8 jiwa dan korban terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 95 jiwa, angin puting beliung sebanyak 77 jiwa sedangkan rumah terendam akibat banjir sebanyak 95 unit rumah, rusak berat akibat angin puting beliung 3 unit rumah, 23 unit rumah rusak sedang dan 51 unit rumah rusak ringan akibat angin puting beliung sedangkan

untuk fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, peribadatan dan pendidikan tidak ada mengalami kerusakan. data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel II.13
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)			Rumah (unit)				Fasilitas Publik(unit)		
		Meninggal Dunia & Hilang	Luka-luka	Terdampak & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Banjir	5	-	-	95	-	-	-	95	-	-	-
AnginPuting Beliung	12	-	-	77	3	23	51	-	-	-	-
Tanah Longsor	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran Hutan & lahan	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	29	8	3	172	3	23	51	95	-	-	-

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

D. Demografi

Kondisi Demografi Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel II.14
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015-2019

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873	1.488.792
a. Laki-Laki	jiwa	713.223	728.580	743.931	759.255	774.523
b. Perempuan	jiwa	659.590	673.247	686.934	700.318	714.269
2. Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,15	2,11	2,07	2,02	1,98
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km^2	84	86	87	89	91
4. Rasio Jenis Kelamin	persen	108,13	108,22	108,30	108,37	108,40

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 mencapai 1.488.792 jiwa yang terdiri dari 774.523 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 714.269 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108,40. Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 108,40 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Grafik II.1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019

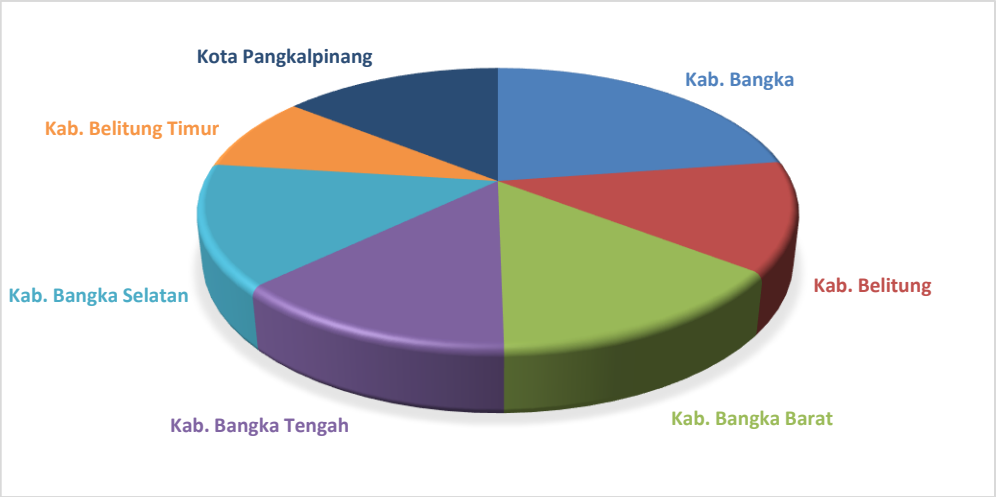

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada tabel dibawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2019 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 337,3 ribu jiwa dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 129,6 ribu jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.791 orang/km^2, dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 52 orang/km^2.

Tabel II.15
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (ribu)		Kepadatan Penduduk (org/km^2)
	Km^2	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Kabupaten Bangka	2.950,69	17,97	337,3	22,66	114
Kabupaten Belitung	2.293,69	13,97%	189,8	12,75	83
Kota Pangkalpinang	118,80	0,72%	212,7	14,28	1.791
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	17,17%	213,2	14,31	76
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	12,95%	196,2	13,18	92
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	21,96%	210,0	14,10	58
Kabupaten Belitung Timur	2.507,0	15,26%	129,6	8,71	52
Luas Daratan	**16.424,23**	**20,10%**			
Luas Perairan	**65.301,00**	**79,90%**			
Bangka Belitung	**81.725,23**	**-**	**1.488,8**	**100**	**91**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2020

Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 89 jiwa per km^2 pada tahun 2018 menjadi 91 jiwa per km^2. Pada tahun 2019 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 390.553, usia 15-64 tahun berjumlah 1.005.214 dan usia 65+ tahun berjumlah 64.106. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi.

Tabel II.16
Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	0-4	68.502	65.831	134.333
2	5-9	67.412	64.768	132.180
3	10-14	65.456	62.258	127.714
4	15-19	63.297	59.906	123.203
5	20-24	63.624	58.835	122.459
6	25-29	67.540	61.455	128.995
7	30-34	67.689	61.220	128.909
8	35-39	65.180	58.312	123.492
9	40-44	60.667	52.062	112.729
10	45-49	52.839	45.168	98.007
11	50-54	42.312	36.691	79.003
12	55-59	32.128	29.570	61.698
13	60-64	24.728	23.238	47.966
14	65-69	31.062	33.044	64.106
15	70-74	9.020	9.325	18.345
16	75+	7.641	9.935	17.576
JUMLAH		**774.523**	**714.269**	**1.488.792**

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (*United Nations Population Fund*), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik II.2
Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020

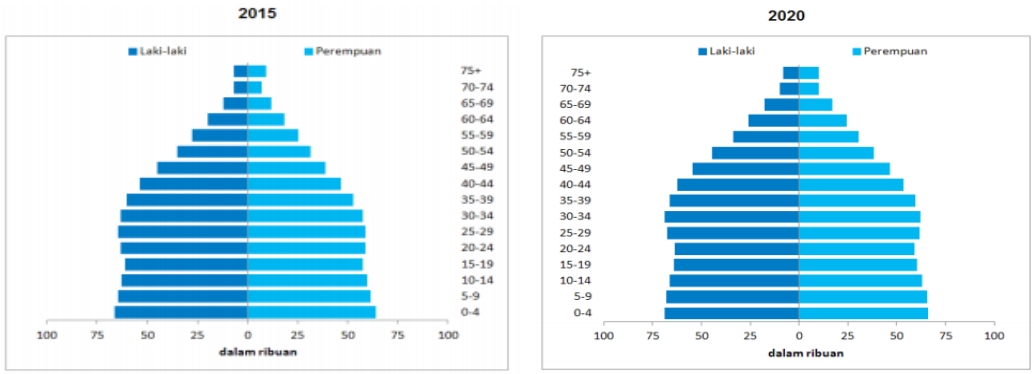

Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO, 2020

Berdasarkan grafik di atas bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi dimana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2015-2019 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

Tabel II.17
PDRB Tahun 2015 –2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

No.	PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069	75.830
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212	53.950

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp75.830 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2019 mencapai Rp53.950 miliar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Sepanjang kurun waktu 2015–2019 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tren nasional bersifat fluktuatif yang dihitung berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010. Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 tumbuh sebesar 3,32 persen, melambat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 4,46 persen. Dari sisi produksi, sumber terbesar berasal dari lapangan usaha konstruksi. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara umum sepanjang waktu lima tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah tingkat capaiannya jika dibandingkan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana diperlihatkan pada Grafik dibawah ini,

Grafik II.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

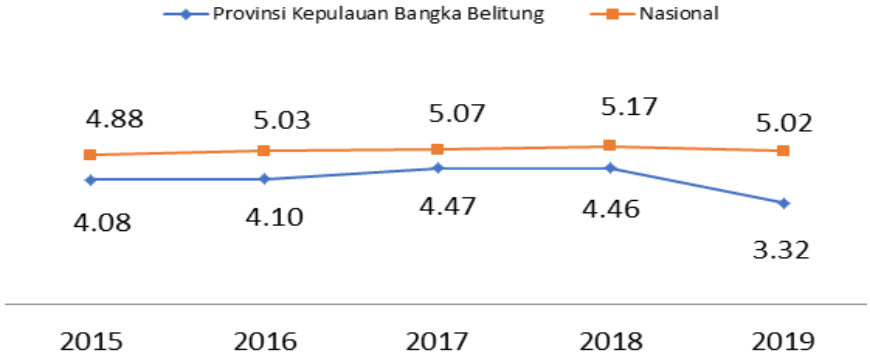

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

.Distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 menjadi sangat dominan. Berdasarkan nilai PDRB ADHB tahun 2019, persentase distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 62,81 persen yakni industri pengolahan (19,59 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (17,49 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (15,79 persen) serta pertambangan dan penggalian (9,49 persen). Tahun 2019 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 13,78 persen, diikuti lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 10,23 persen dan 10,19 persen. Meskipun seluruh lapangan usaha yang ada dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan positif di tahun 2019, namun pada lapangan usaha yang kontribusinya besar, pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2018 yang lalu. Seperti pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,45 persen, namun pada tahun 2019 tumbuh melambat sebesar 2,89 persen. Pada lapangan usaha perkebunan yang merupakan salah satu kontributor terbesar lapangan usaha ini, rendahnya harga komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung seperti kelapa sawit, karet dan lada pada tahun 2019 membuat produktivitas menurun. Demikian juga dengan

lapangan usaha industri pengolahan yang pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4 persen, namun pada 2019 tumbuh melambat sebesar 1,17 persen. Kendala aturan pemerintah membuat perusahaan smelter swasta yang ada di Kepulauan Bangka Belitung berhenti beroperasi karena tidak dapat melakukan ekspor logam timahnya. Pada tahun 2019, hanya beberapa perusahaan smelter swasta yang bisa berproduksi dan melakukan ekspor logam timah.

Tabel II.18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 – 2019

Lapangan Usaha			2015	2016	2017	2018	2019
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		5.93	4.34	-0.36	5.45	2,89
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7.40	4.72	1.07	4.17	1,42
		a. Tanaman Pangan	4.12	7.22	0.38	4,18	8,65
		b. Tanaman Hortikultura	5.98	1.17	0.15	-1.58	0,48
		c. Tanaman Perkebunan	8.13	5.27	0.63	4.83	1,15
		d. Peternakan	5.90	6.54	6.89	9.24	1,97
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	6.49	2.14	3.20	5.71	0,31
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	8.04	2.14	-0.16	5.67	2,81
	3	Perikanan	3.02	3.72	-3.24	8.11	5,87
B	Pertambangan dan Penggalian		1.64	0.50	2.22	(1.08)	0,87
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1.43	1.16	-1.23	(18.84)	1,57
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3	Pertambangan Bijih Logam	1.62	-0.04	2.90	(0.10)	-0,29
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.74	1.95	1.17	0.68	4,15
C	Industri Pengolahan		1.27	2.69	6.22	4.04	1,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas		9.21	12.44	4.85	7.44	6,55
	1	Ketenagalistrikan	10.18	13.58	5.91	8.80	7,29
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	2.83	4.34	-3.26	(4.01)	-0,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		5.75	5.52	9.79	(5.60)	3,41
F	Konstruksi		5.85	6.95	5.64	5.76	7,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		4.28	5.08	7.81	2.65	1,76
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.58	6.72	4.83	5.09	-5,74
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4.85	4.75	8.44	2.15	3,32
H	Transportasi dan Pergudangan		5.82	5.41	7.99	6.82	2,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		3.42	4.99	4.61	6.22	9,26
	1	Penyediaan Akomodasi	1.46	3.06	8.43	8.96	-2,54
	2	Penyediaan Makan Minum	3.54	5.10	4.40	6.06	9,95
J	Informasi dan Komunikasi		7.34	9.18	8.19	10.72	13,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		5.38	6.44	2.48	6.25	8,21
L	Real Estate		2.71	3.65	5.19	8.29	1,36

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
M,N	Jasa Perusahaan	4.02	0.06	5.85	6.69	1,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.71	6.06	5.06	9.18	8,13
P	Jasa Pendidikan	9.75	7.58	3.86	9.00	7,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.65	4.79	8.18	4.56	10,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.12	9.79	6.14	7.39	10,83
Produk Domestik Regional Bruto		4.08	4.10	4.47	4.46	3,32

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilihat dari nilai PDRB ADHB, nilai tambah kategori industri pengolahan pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp14.582,1 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp15.064,4 miliar. Diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari Rp13.607,7 miliar mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar Rp13.163,1 miliar. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha petambangan penggalian masing-masing menjadi Rp11.970 miliar dan Rp7.199,6 miliar di tahun 2019. Dari keempat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tersebut, perkembangan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2019 sebesar Rp 7.199,6 miliar mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar Rp 7.754,4 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Tabel II.19
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2015–2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.060,4	13.117,2	13.143,2	13.163,1	13.607,7
Pertambangan dan Penggalian	7.735,4	7.743,3	8.182,1	7.754,4	7.199,6
Industri Pengolahan	12.888,4	13.074,1	14.229,6	15.064,4	14.582,1
Pengadaan Listrik dan Gas	51,1	66,6	79,4	86,8	94,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,0	13,2	15,0	14,8	15,4
Konstruksi	5.264,2	5.753,8	6.371,9	7.106,9	7.864,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.634,3	9.621,6	10.840,5	11.721,2	11.970,7
Transportasi dan Pergudangan	2.461,8	2.642,1	2.900,1	3.104,7	3.380,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1459,8	1.609,1	1.734,1	1.896,8	2.205,8
Informasi dan Komunikasi	941,7	1.034,0	1.135,4	1.254,8	1.433,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	1095,3	1.198,1	1.280,6	1.415,2	1.509,7
Real Estate	1.964,7	2.104,5	2.281,2	2.517,5	2.625,6
Jasa Perusahaan	169,6	176,4	196,8	217,3	232,3
Administrasi Pemerintahan, Perta hanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.471,6	3.781,6	4.121,1	4.418,2	4.804,2
Jasa Pendidikan	1.639,7	1.859,6	1.960,4	2.128,7	2.324,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	710,7	759,8	845,3	905,8	1.023,1
Jasa lainnya	426,6	493,2	548,5	600,4	691,2
PDRB	**60.987,3**	**65.048,2**	**69.865,2**	**73.121,0**	**75.829,3**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 nilai bruto lapangan usaha industri pengolahan mencapai sebesar Rp10.400,6 miliar pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar Rp11.929,8 miliar pada tahun 2019. Untuk nilai tambah bruto kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp8.743,5 miliar dan meningkat menjadi Rp9.869,5 miliar. Nilai tambah bruto kategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp6.458,1 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp6.627,3 miliar. Begitu juga untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor nilai tambah bruto yang tercipta sebesar Rp6.402,1 miliar meningkat menjadi Rp7.576,2 miliar dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel II.20
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015–2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.743,5	9.123,2	9.095,7	9.591,8	9.869,5
Pertambangan dan Penggalian	6.458,1	6.490,6	6.634,7	6.570,2	6.627,3
Industri Pengolahan	10.400,6	10.680,5	11.337,7	11.791,6	11.929,8
Pengadaan Listrik dan Gas	38,9	43,7	45,9	49,3	52,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,1	8,6	9,4	8,9	9,2
Konstruksi	3.760,1	4.021,6	4.248,5	4.493,1	4.811,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.402,1	6.727,7	7.253,3	7.445,1	7.576,2
Transportasi dan Pergudangan	1.662,1	1.752,3	1.892,2	2.021,3	2.066,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.034,8	1.086,5	1.136,5	1.207,2	1.318,9
Informasi dan Komunikasi	849,0	926,9	1.002,8	1.110,3	1.263,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	807,9	860,0	881,3	941,1	987,8
Real Estate	1.442,0	1.494,6	1.572,2	1.702,5	1.725,7
Jasa Perusahaan	120,3	120,4	127,5	136,0	137,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.337,1	2.478,7	2.604,2	2.843,2	3.074,3
Jasa Pendidikan	1.059,0	1.139,3	1.183,2	1.289,8	1.381,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533,9	559,4	605,2	632,8	697,3
Jasa lainnya	304,6	334,4	354,9	381,2	422,5
PDRB	**45.962,3**	**47.848,4**	**49.985,2**	**52.512,4**	**53.951,1**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Di lihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 0,61 persen pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berasal dari pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sebesar 0,61 persen, diikuti lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib masing-masing sebesar 0,53 persen dan 0,44 persen. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepulauan Bangka Belitung yang masih terus digencarkan ikut mendorong kinerja lapangan usaha konstruksi pada tahun 2019. Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2015–2019 nilai PDRB kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah capaian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar: 1) Kota Pangkalpinang; 2) Kabupaten Bangka Barat; 3) Kabupaten Bangka.

Tabel II.21
Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019

Kab/Kota/Prov/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	11.001,4	11.771,7	12.807,9	13.317,0	13.749,2
Belitung	7.328,1	8.001,0	8.739,9	9.318,3	9.869,7
Bangka Barat	11.473,0	12.249,4	13.221,4	13.822,8	14.168,1
Bangka Tengah	7.056,1	7.469,0	7.972,2	8.216,3	8.579,3
Bangka Selatan	6.947,7	7.541,5	8.165,2	8.460,6	8.676,3
Belitung Timur	6.125,9	6.604,2	7.151,8	7.408,8	7.728,2
Pangkalpinang	10.234,6	11.116,5	12.108,6	12.966,1	13.703,3
Bangka Belitung	60.987,3	65.048,2	69.865,2	73.121,0	75.829,3
Nasional (triliun)	11.526.332,8	12.401.728,5	13.589.825,7	14.838.311,5	15.833.943,4

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini, juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015–2019 besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar: 1) Kota Pangkalpinang; 2) Kabupaten Bangka Barat; 3) Kabupaten Bangka.

Tabel II.22
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2015–2019

Kab/Kota/Prov/ Nasional	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	8.512,4	8.906,2	9.355,3	9.777,0	10.063,1
Belitung	5.400,9	5.669,1	5.969,7	6.290,4	6.505,3
Bangka Barat	8.769,6	9.190,2	9.673,7	10.176,2	10.901,9
Bangka Tengah	5.271,8	5.432,8	5.620,6	5.812,2	5.885,0
Bangka Selatan	5.284,6	5.511,8	5.763,9	6.024,3	6.181,4
Belitung Timur	4.675,2	4.873,9	5.110,3	5.325,5	5.504,0
Pangkalpinang	7.555,0	7.946,0	8.358,5	8.782,6	9.076,3
Bangka Belitung	45.962,3	47.848,4	49.985,2	52.215,4	53.951,1
Nasional (triliun)	8.982.517,1	9.434.613,4	9.912.928,1	10.425.397,3	10.949.243,7

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

2. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2015–2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp44.425.078 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnya menjadi Rp50.933.457. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015–2019, sebagaimana disajikan pada Grafik dibawah ini,

Grafik II.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019

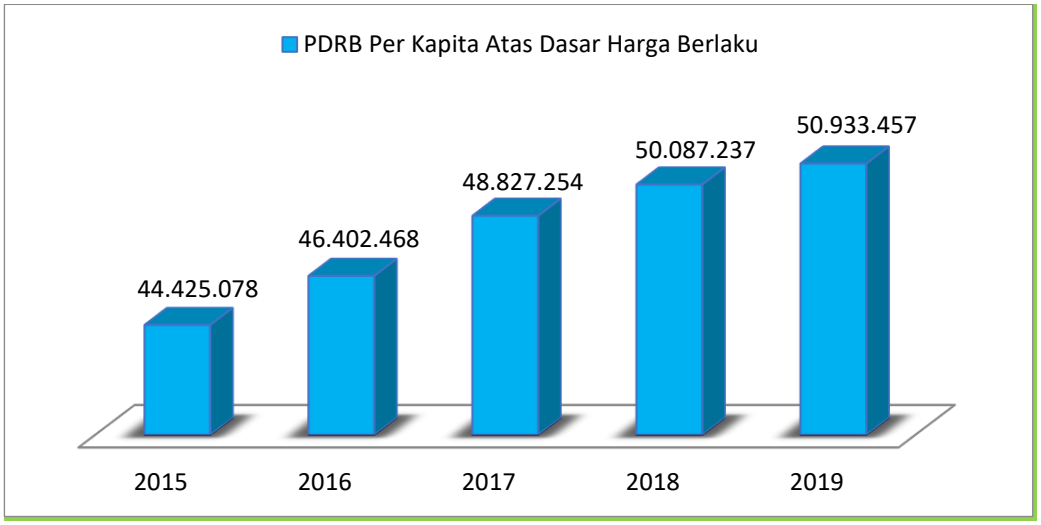

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2020

3. Tingkat Inflasi

Sepanjang tahun 2015–2019 secara keseluruhan tingkat Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tren bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,62 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,18 persen, bisa dilihat dari Grafik di bawah ini:

Grafik II.5
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

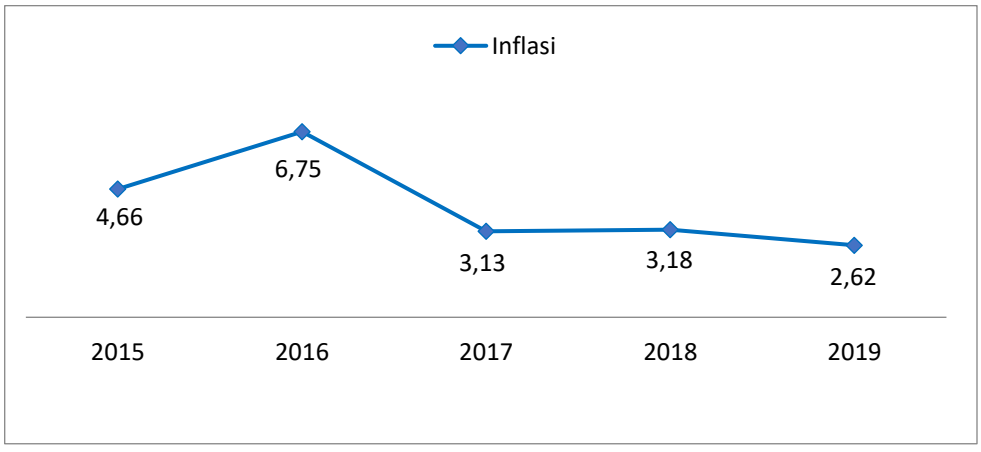

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2015–2019 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Pada tahun 2019, kelompok pengeluaran yang memberi andil sumbangan didominasi oleh bahan makanan sebesar 1,12 persen, diikuti oleh makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,59 persen, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.23
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Umum	**3,27**	**6,75**	**3,13**	**3,18**	**2,62**
1. Bahan Makanan	2,25	11,45	1,66	0,87	1,12
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,77	6,64	2,90	0,67	0,59
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	3,45	2,57	5,63	0,62	0,19
4. Sandang	2,11	5,65	2,06	0,13	0,16
5. Kesehatan	4,92	3,60	3,61	0,11	0,07
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,42	3,78	3,36	0,25	0,25
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-1,13	7,27	2,09	0,53	0,24

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tahun 2019, inflasi Pangkalpinang (2,31 persen) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,62 persen) relatif kecil bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,72. Sementara itu berbeda dengan inflasi Kota Tanjung Pandan tahun 2019 sebesar 3,19 capaiannya lebih tinggi daripada nasional. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada Grafik berikut,

Grafik II.6
Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan,
Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2015 – 2019

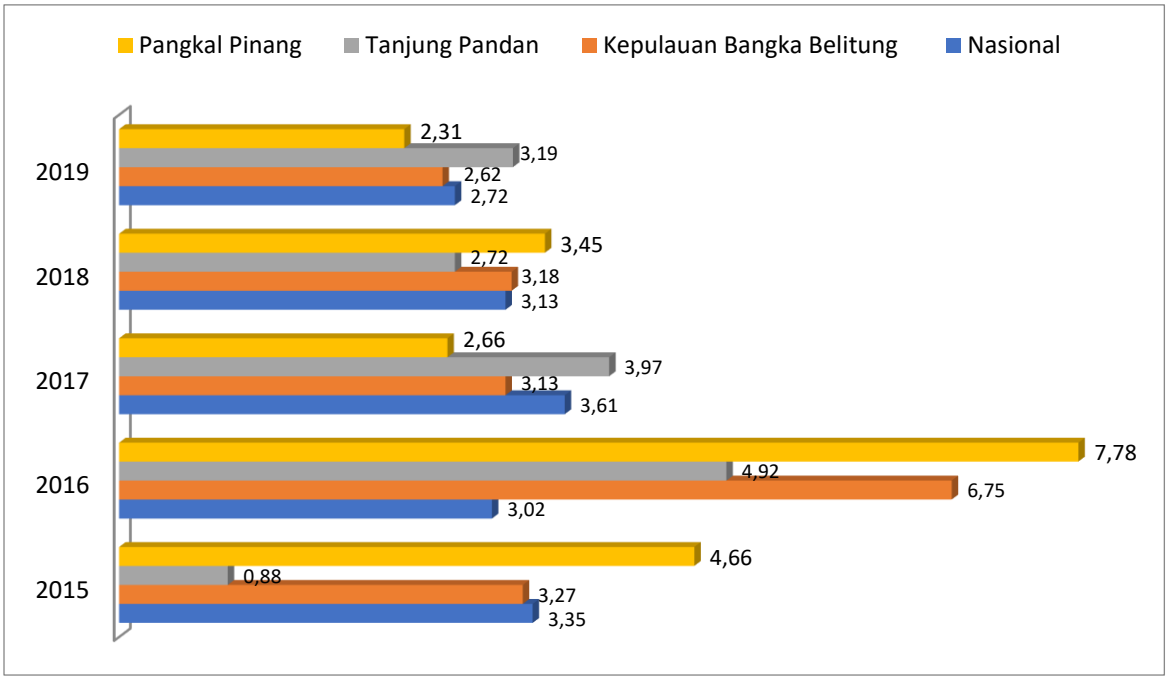

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

4. Indeks Gini

Berdasarkan Grafik II.7 terlihat bahwa nilai rasio gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaiannya lebih rendah daripada nasional. Selama periode 2015-2019 nilai rasio gini mengalami fluktuasi. Sedangkan berbeda dengan capaian nasional nilai rasio gini kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Bangka Belitung yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,262. Sementara itu jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2018 turun sebesar 0,010 poin dari angka 0,272. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai *Gini Ratio* terendah di Indonesia yaitu sebesar 0,262. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai *Gini Ratio* tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,428.

Grafik II.7
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015-2019

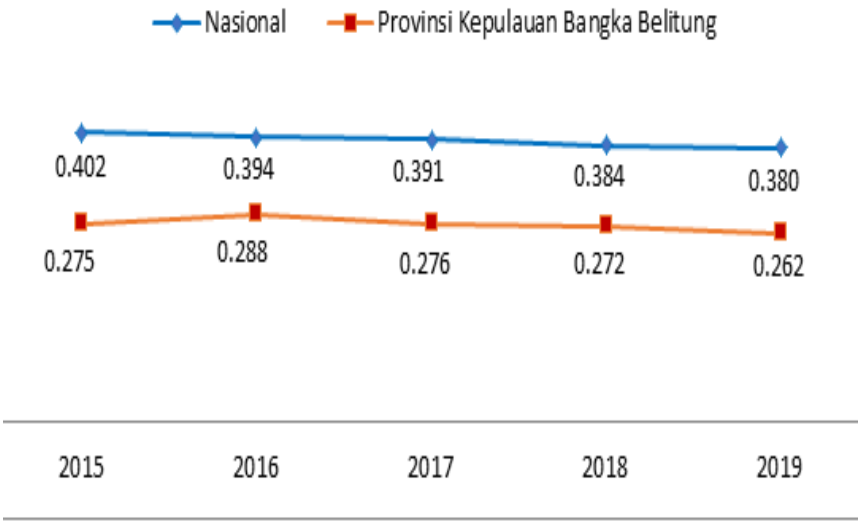

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita atau PNB per kapita.

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 IPM Bangka Belitung selalu diatas nasional, namun pada tahun 2018 dan 2019 masih dibawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung sebagaimana tabel dibawah ini,

Tabel II.24

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka Belitung	69,05	69,99	70,67	71,30	71,30
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

Selama lima tahun terakhir indeks pembangunan manusia di Bangka Belitung mengalami peningkatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh angka IPM tahun 2015 sebesar 69,05, dan terus meningkat dari tahun 2016-2019, yaitu : 69,55 (2016), 69,99 (2017), 70,67 (2018), dan 71,30 (2019). Ini menunjukkan upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Pembangunan manusia yang awalnya berstatus 'sedang" pada tahun 2017 berubah status menjadi "tinggi". Pada tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,97 persen dan melebihi target nasional.

Tabel II.25

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

Indeks Pembangunan Manusia	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	70,03	70,43	71,09	71,80	72,39
Belitung	70,29	70,81	70,93	71,70	72,46
Bangka Barat	67,23	67,60	67,94	68,68	68,05
Bangka Tengah	68,66	68,76	68,99	69,62	70,33
Bangka Selatan	63,89	64,57	65,02	65,98	66,54
Belitung Timur	68,83	69,30	69,57	70,22	70,84
Pangkalpinang	76,61	76,73	76,86	77,43	77,97

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, IPM tertinggi tercatat di Kota Pangkalpinang sebesar 77,43, sebagaimana posisi tahun sebelumnya. Kota Pangkalpinang bersama Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, dan Belitung Timur merupakan daerah dengan IPM berkategori "tinggi". Masih ada dua kabupaten dengan kategori IPM "rendah" yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Tengah yang semula mempunyai IPM berkategori "rendah", mulai tahun 2019 berkategori "sedang" dengan IPM sebesar 70,33.

6. Indeks Ketimpangan *Williamson*

Pada periode 2010-2011, Indeks ketimpangan *williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun. Namun berbeda sepanjang tahun 2011-2019 indeks ketimpangan *Williamson* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa tren mengalami peningkatan, yang menggambarkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik. Tahun 2019 capaiannya sebesar 0,2004, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,1993. Artinya secara keseluruhan pembangunan wilayah semakin

mendekati merata tersaji pada Grafik II.8.

Grafik II.8
Indeks Ketimpangan *Williamson* Tahun 2010 – 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

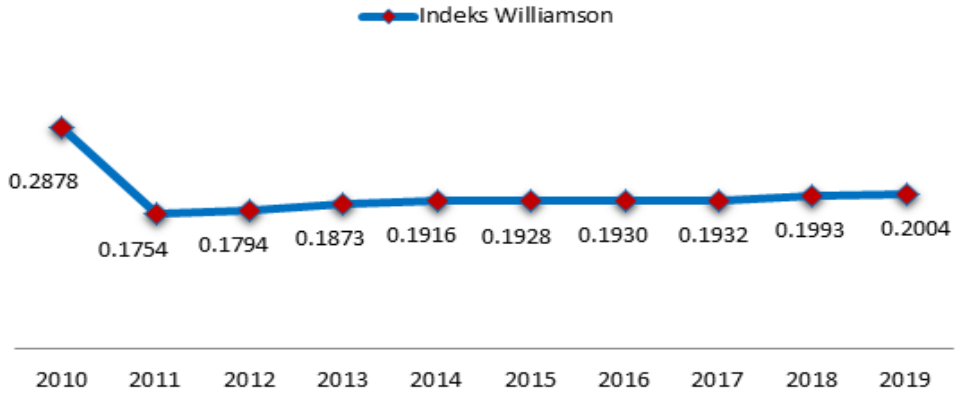

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020 (diolah)

7. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin sebesar 5,40 persen, kemudian mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi sebesar 5,20 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,25 persen dan pada 2019 menurun kembali menjadi 4,50 persen. Penurunan ini menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung cukup baik.

Tabel II.26
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,40	5,22	5,20	5,25	4,50
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	74,1	72,8	74.1	76,3	67,37
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	488.701	534.229	587.530	631.467	677,716
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,67	0,67	0,49	0,69	0,51

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Memperhatikan tabel di bawah ini, sepanjang periode tahun 2015-2019 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan kota sebesar 2,85 persen dan naik dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 2,78 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan desa mengalami penurunan dari 7,16 persen (2018) menjadi 6,79 persen (2019). Menurunnya kemiskinan di

perdesaan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang cukup mempengaruhi menurunnya jumlah penduduk miskin hingga 0,26 persen.

Tabel II.27
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	2,77	2,67	3.00	2,78	2,85
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,83	7,57	7.92	7,16	6,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui pada tahun 2018 persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung sebesar 7,56 persen atau sebanyak 14,00 ribu jiwa. Di Kabupaten Belitung garis kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp704.855 per kapita per bulan dan merupakan yang tertinggi diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian persentase jumlah penduduk miskin cukup tinggi yaitu Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,06 persen atau sebanyak 8,93 ribu jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,05 persen atau sebanyak 6,35 ribu jiwa. Garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat kondisi tahun 2019 sebesar Rp520.462 perkapita perbulan, dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan rata-rata pengeluaran semakin baik di tahun 2018.

Tabel II.28
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47
Belitung	7,36	8,38	7.85	7,77	7,56
Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05
Bangka Tengah	3,27	5,67	5,64	6,07	5,81
Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70
Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06
Kota Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95
Provinsi Kep. Bangka Belitung	**4,97**	**5,40**	**5,22**	**5,20**	**5,25**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Dari tabel dibawah ini, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota yang memiliki TPT melebihi TPT Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, yang tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang sebesar 5,01 %, Kabupaten Bangka Tengah sebesar 4,39%, Kabupaten Bangka 3,8% dan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,87 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,62 % dan secara nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dari rata-rata nasional dimana rata-rata nasional sebesar 5,28 %.

Tabel II.29
Data Tingkat Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kab. Bangka	8,87	n/a	4,29	4,12	3,8
2.	Kab. Belitung	4,57	n/a	2,57	2,93	2,9
3.	Kab. Bangka Barat	5,92	n/a	4,23	3,11	2,85
4.	Kab. Bangka Tengah	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39
5.	Kab. Bangka Selatan	2,01	n/a	2,74	4,35	3,87
6.	Kab. Belitung Timur	2,55	n/a	2,62	1,5	1,71
7.	Kota Pangkalpinang	10,64	n/a	5,8	4,7	5,01
Provinsi Kep. Bangka Belitung		**6,29**	**2,60**	**3,78**	**3,65**	**3,62**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2019 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 6.076 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.197 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 26.871 orang, meningkat dari tahun 2018 yang hanya sebanyak 26.552 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.30
Data Pengangguran Tahun 2015 s.d. 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.	Kab. Bangka	12.805	n/a	6.693	6.410	6.076
2.	Kab. Belitung	4.015	n/a	2.429	2.887	2.853
3.	Kab. Bangka Barat	5.443	n/a	4.244	3.306	2.955
4.	Kab. Bangka Tengah	5.631	n/a	3.161	3.860	4.295
5.	Kab. Bangka Selatan	1.936	n/a	2.553	4.345	3.979
6.	Kab. Belitung Timur	1.550	n/a	1.667	1.035	1.197
7.	Kota Pangkalpinang	10.513	n/a	5.652	4.709	5.516
Provinsi Kep. Bangka Belitung		**41.893**	**18.343**	**26.399**	**26.552**	**26.871**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia *a* pada tahun *t* dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia *a* dan tahun *t*. Angka Harapan Sekolah (HLS) bersama-sama dengan rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan dua indikator penghitung IPM.

Berdasarkan metode perhitungan terbaru yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2020, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 se-nasional masih berada di posisi ke-33 sebagaimana halnya pada tahun 2019. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di antara Provinsi Sumatera Selatan sebagai peringkat ke-32, dan Provinsi Papua sebagai peringkat ke-34. Meskipun memiliki capaian angka HLS di posisi dua terendah secara nasional, pertumbuhan HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi, yakni sebesar 0,92 persen. Capaian pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi keenam, diikuti oleh Sulawesi Utara sebagai peringkat ketujuh dengan pertumbuhan sebesar 0,94 persen dan Nusa Tenggara Barat sebagai tertinggi pertama dengan pertumbuhan sebesar 1,63 persen. Pada level nasional, pertumbuhan HLS di Indonesia tahun 2020 mencapai 0,23 persen, yakni 12,95 pada tahun 2019 menjadi 12,98 pada tahun 2020.

Tabel II.31
Angka Harapan Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					Selisih 2019-2020	%
		2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Bangka	12,37	12,58	12,68	12,76	12,77	0,01	0,08 %
2	Belitung	11,47	11,51	11,83	11,84	11,85	0,01	0,08 %
3	Bangka Barat	11,49	11,50	11,51	11,52	11,53	0,01	0,08 %
4.	Bangka Tengah	11,73	11,74	11,75	11,76	11,81	0,05	0,43 %
5.	Bangka Selatan	11,25	11,34	11,35	11,36	11,37	0,01	0,08 %
6.	Belitung Timur	11,46	11,48	11,49	11,51	11,52	0,01	0,08 %
7.	Pangkalpinang	12,77	12,78	12,83	12,99	13,15	0,16	1,23 %
Bangka Belitung		**11,18**	**11,60**	**11,71**	**11,83**	**11,87**	**0,11**	**0,92 %**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada periode 2019-2020, angka pertumbuhan Harapan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan sebesar 0,92 persen, yaitu 11,94 di tahun 2019 menjadi 12,05 di tahun 2020. Dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang mengalami angka pertumbuhan tertinggi pertama sebesar 1,23 persen, yakni 12,99 di tahun 2019 menjadi 13,15 di tahun 2020. Angka HLS Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 juga berada di atas angka HLS tingkat nasional, yakni 12,98 tahun. Selanjutnya,

angka HLS tertinggi kedua berada di Kabupaten Bangka dengan peningkatan angka pertumbuhan sebesar 0,08 persen, yakni 12,76 di tahun 2019 menjadi 12,77 di tahun 2020, namun angka HLS ini masih berada di bawah angka HLS tingkat nasional.

Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan angka pertumbuhan sebesar 0,43 persen, yakni 11,76 pada tahun 2019 menjadi 11,91 pada tahun 2020. Peningkatan angka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang. Meskipun angka HLS Kabupaten Bangka pada tahun 2020 sebesar 12,77 dan lebih tinggi dari angka HLS Kabupaten Bangka Tengah yang mencapai 11,81, pertumbuhan HLS di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen, dan pertumbuhan ini lebih tinggi dari Kabupaten Bangka dan keempat kabupaten lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08 persen. Dalam periode lima tahun terakhir (2016-2020), Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat sebesar 2,90 persen, yaitu 11,71 pada tahun 2016 menjadi 12,05 pada tahun 2020. Ini menunjukkan anak-anak usia 7 tahun memiliki kesempatan untuk bersekolah selama 12,05 tahun atau lulus SMA/SMK/MA sederajat.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Secara nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada peringkat yang sama pada periode 2019-2020, yakni peringkat kedua puluh empat. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan, yakni 7,98 pada tahun 2019 menjadi 8,06 pada tahun 2020.

Angka rata-rata lama sekolah ini masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional, yaitu 8,48. Dari tujuh (7) kabupaten/kota, pertumbuhan tertinggi untuk rata-rata lama sekolah tahun 2020 dicapai oleh Kota Pangkalpinang sebesar 9,92. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang berada di atas rata-rata lama sekolah tingkat nasional. Kabupaten Belitung berada di peringkat kedua, sebesar 8,46, namun capaian angka ini masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional. Dan sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di Kabupaten Bangka Selatan, sebesar 6,67.

Tabel II.32
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Bangka	7,94	7,96	8,19	8,20	8,23	8,24
2	Belitung	8,09	8,10	8,11	8,15	8,41	8,46
3	Bangka Barat	6,68	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22
4	Bangka Tengah	6,70	6,71	6,79	6,80	7,13	7,19
5	Bangka Selatan	5,88	5,96	6,12	6,36	6,42	6,67
6	Belitung Timur	7,91	7,95	8,00	8,14	8,15	8,22
7	Pangkalpinang	9,75	9,76	9,77	9,78	9,80	9,92
Bangka Belitung		**7,46**	**7,62**	**7,78**	**7,84**	**7,98**	**8,06**

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen, yakni 7,98 pada tahun 2019 menjadi 8,06 pada tahun 2020. Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, meskipun Kabupaten Bangka Selatan memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 6,42 pada tahun 2019 menjadi 6,67 pada tahun 2020, pertumbuhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 3,89 persen, melebihi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang sebagai peraih angka rata-rata lama sekolah tertinggi tumbuh sebesar 1,22 persen, diikuti Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung sebesar 0,84 dan 0,59 persen. Kabupaten Bangka mencapai pertumbuhan rata-rata lama sekolah paling rendah, yaitu sebesar 0,12 persen.

Tabel II. 33
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)			
		2019	2020	Selisih(poin)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Bangka	8,23	8,24	0,01	0,12
2	Belitung	8,41	8,46	0,05	0,59
3	Bangka Barat	7,21	7,22	0,01	0,14
4	Bangka Tengah	7,13	7,19	0,06	0,84
5	Bangka Selatan	6,42	6,67	0,25	3,89
6	Belitung Timur	8,15	8,22	0,07	0,86
7	Pangkalpinang	9,80	9,92	0,12	1,22
Bangka Belitung		**7,98**	**8,06**	**0,08**	**1,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020 (hasil analisis)

Meskipun rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah rata-rata lama sekolah di tingkat nasional, dimana waktu lama belajar siswa usia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 hanya mencapai kelas VII atau SMP kelas 1, maka pada tahun 2020, siswa usia 15 tahun ke atas bisa menempuh pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas 2. Beberapa faktor pendukung peningkatan waktu rata-rata lama sekolah adalah adanya peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah yang bermutu, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebesar 70,50 tahun. UHH tertinggi selama 6 tahun berturut-turut berada di Kota Pangkalpinang yaitu 73,13 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,90 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi prioritas karena angka tersebut masih dibawah target UHH nasional yaitu sebesar 71,34.

Tabel II.34
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/KotaTahun 2014-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Bangka	70,47	70,48	70,52	70,58	70,73	70,99
Belitung	70,22	70,32	69,52	70,44	70,64	70,94
Bangka Barat	69,46	69,47	70,38	69,56	69,73	69,99
Bangka Tengah	69,98	70,28	66,99	70,49	70,78	71,16
Bangka Selatan	66,56	66,86	66,99	67,13	67,47	67,90
Belitung Timur	71,03	71,23	71,30	71,37	71,59	71,90
Pangkalpinang	72,31	72,51	72,57	72,64	72,86	73,17
Bangka Belitung	**69,72**	**69,88**	**69,92**	**69,95**	**70,18**	**70,50**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Berikut ini pada tabel yang menggambarkan jumlah Angka Kematian Ibu dari tahun 2013 sampai dengan 2019, dimana untuk tahun 2019 AKI paling tinggi di Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah kematian 9 orang, jumlah ini merupakan angka tertinggi di Kabupaten Belitung Timur selama 7 tahun terakhir. Sedangkan yang paling rendah di Kota Pangkalpinang dengan jumlah kematian 1 orang. Secara keseluruhan AKI di tingkat provinsi tahun 2019 sebanyak 36 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 44 orang.

Tabel II.35
Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Angka Kematian Ibu (AKI)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Bangka	8	7	12	6	4	9	7
Belitung	6	4	3	4	6	6	4
Bangka Barat	5	6	6	5	4	7	5
Bangka Tengah	3	4	2	2	0	6	6
Bangka Selatan	4	4	3	0	2	7	4
Belitung Timur	2	1	1	2	1	4	9
Pangkalpinang	5	2	4	5	4	5	1
Bangka Belitung	**33**	**28**	**31**	**24**	**21**	**44**	**36**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

c. Angka Kematian Bayi dan Balita

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita diperlihatkan seperti tabel di bawah ini,

Tabel II.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Bangka	7,54	9,58	7,43	8,23	6,27	7,12	3,77	4,56	5,24	6,04
2	Belitung	11,29	12,26	12,17	14,02	10,04	12,12	12,14	13,45	17,77	20,85
3	Bangka Tengah	6,46	7,86	6,46	6,46	6,52	8,35	4,76	6,62	6,30	6,57
4	Bangka Barat	7,37	8,38	6,63	7,14	5,11	6,01	6,04	7,76	3,09	3,37
5	Bangka Selatan	6,28	7,38	5,85	7,52	6,03	6,63	7,43	7,74	9,19	9,80
6	Belitung Timur	8,25	8,25	6,71	8,62	8,95	10,44	13,28	14,71	11,55	13,56
7	Pangkalpinang	3,38	3,38	6,33	6,33	3,11	3,59	3,25	3,72	3,21	3,21
Bangka Belitung		**7,05**	**8,13**	**7,22**	**8,07**	**6,25**	**7,35**	**6,31**	**7,37**	**7,17**	**7,97**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2015–2019 di kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan. Dari 5 (lima) tahun terakhir terlihat kematian bayi dan balita tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung. Dengan angka kematian bayi untuk tahun 2019 sebesar 17,77 dan angka kematian balita 20,85. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana angka kematian bayi tahun ini sebesar 7,17 dan angka kematian balita sebesar 7,97.

d. Persentase *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Persentase Bayi kurus dan *Stunting* Tahun 2018 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana grafik dibawah ini,

Grafik II.9
Persentase Bayi kurus dan *Stunting* Tahun 2018
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Buku Saku Nasional PSG, 2019

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan persentase balita kurus dan *stunting* untuk tahun 2018, dengan balita kurus paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sebesar 7,26 persen dan yang paling rendah di Kabupaten Belitung Timur dengan 0,79 persen. Begitu pula dengan balita *stunting* paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 18,37 persen dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,59 persen. Perkembangan persentase balita *stunting* dari tahun 2015 sampai dengan 2019, dimana untuk tahun 2019 persentase balita *stunting* sebesar 8,61 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 12,05. Adapun persentase balita *stunting* paling banyak terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 16,96 sedangkan *stunting* paling sedikit di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 1,29.

Tabel II.37
Perkembangan Persentase Balita *Stunting* Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Persentase Stunting Menurut Kabupaten/Kota				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Bangka	18,66	27,52	27,66	12,21	4,61
Belitung	23,32	18,87	27,66	13,82	10,76
Bangka Barat	23,21	23,21	25	18,37	16,96
Bangka Tengah	19,02	21,96	25,64	6,91	5,85
Bangka Selatan	16,02	25,48	30,03	16,20	9,47
Belitung Timur	9,69	14,72	29,30	2,59	8,02
Pangkalpinang	22,19	21,71	26,69	7,99	1,29
Bangka Belitung	**18,93**	**21,91**	**27,30**	**12,05**	**8,61**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

3. Ketenagakerjaan

a. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio penduduk yang bekerja stagnan diangka 0,96. Meskipun demikian jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama periode 5 (lima) tahun (2015-2019) diiringi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Ditahun 2016 terjadi peningkatan yang melonjak secara dramatis baik jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja. Namun kembali mengalami penurunan satu poin di tahun 2017 dari 0,97 di tahun 2016 menjadi 0.96 dan terus bertahan sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel II.38
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Penduduk Usia Kerja	998.120	1.022.955	1.047.683	1.073.861	1.097.261
2.	Angkatan Kerja	665.842	705.173	699.017	727.918	742.798
3.	Penduduk Yang Bekerja	623.949	686.830	672.618	701.366	715.927
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	0.94	0,97	0,96	0,96	0,96

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan pola perubahan pada masing-masing sektornya. Di sektor primer terjadi pergeseran, dimana untuk lapangan pekerjaan dibidang pertanian tahun 2019 memberikan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja sebesar 29,09%, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2018. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar ke tiga pada tahun 2019 sebesar 14,14% meningkat dari tahun 2018 yang berada diangka 13,65%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan. Di sektor tersier kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 17,37% merupakan penyerapan tenaga kerja kedua terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019. Sektor sekunder mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2018, dimana kontribusi terbesar ada pada lapangan pekerjaan industri pengolahan sebesar 7,6%.

Tabel II.39
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2015 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Sektor Primer :					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,63	32,13	32,56	*30,99*	*29,09*
2. Pertambangan dan Penggalian	10,47	10,81	13,59	*13,65*	*14,14*
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	5,75	8,17	6,56	*7,05*	*7,6*
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,61	0.91	0,46	*0,53*	*0,54*
5. Bangunan	4,61	3,21	5,28	*5,08*	*5,26*
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan	17,55	19,21	17,48	*18,81*	*17,37*
7. Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,39	2,04	1,74	2,24
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,14	4,07	3,54	3,9	4,62
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate	1,49	1,32	1,7	1,65	1,61

Lapangan Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
10. Jasa Perusahaan	0,98	1,04	0,75	0,97	1,1
11.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,48	5,28	6,37	6,33	6,11
12. Jasa Pendidikan	4,26	5,01	3,75	3,96	4,48
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,64	1,18	1,91	1,54	1,89
14. Jasa Lainnya	2,99	4,6	4,01	3,82	3,95
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional -Sakernas, 2020

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

a. Jumlah Grup Kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya dan dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dan sebagainya. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tabel II.40
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Selisih (poin)	(2016-2019) (%)	2020	Selisih (poin)	(2019-2020) (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	Jumlah grup kesenian	12,47	12,74	12,89	13,17	0,7	5,6	10,79	-2,38	-18,07
2.	Jumlah gedung kesenian	0,0081	0,0081	0,0081	0,0081	0	0	0,0066	-0,0015	-18,52

*Sumber: Disbudpar dan Pora, 2020, Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000*

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, dalam kurun waktu 2016-2019, terjadi pertumbuhan kenaikan kesenian adalah sebesar 5,6 persen, di mana pada tahun 2016 jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk adalah 12,47 meningkat menjadi 13,17 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka pertumbuhan ini menurun sebesar 18,07 persen, yakni dari 13,17 di tahun 2019 turun menjadi 10,79 di tahun 2020. Untuk jumlah gedung kesenian dari periode 2016-2019, jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk masih sama. Pada tahun

2020, jumlah gedung kesenian ini mengalami penurunan sebesar 18,52 persen, yaitu dari 0,0081 di tahun 2019 turun menjadi 0,0066 di tahun 2020.

Tabel II.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020
menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Grup Kesenian		Jumlah Gedung Kesenian		Jumlah Grup Kesenian		Jumlah Gedung Kesenian	
		Per 10.000 penduduk				per 10.000 penduduk			
		2019	2020	2019	2020	Selisih	(%)	Selisih	(%)
1.	Kab. Bangka	11,98	10,01	0	0	-1,97	-16,44	0	0
2.	Kab. Belitung	13,98	11,42	0	0	-2,56	-18,31	0	0
3.	Kab. Bangka Barat	16,96	13,16	0	0	-3,8	-22,41	0	0
4.	Kab. Bangka Tengah	12,16	9,10	0	0	-3,06	-25,16	0	0
5.	Kab. Bangka Selatan	10,84	8,55	0	0	-2,29	-21,13	0	0
6.	Kab. Belitung Timur	18,60	15,52	0	0	-3,08	-16,56	0	0
7.	Kota Pangkal Pinang	11,39	10,19	0	0	-1,2	-10,54	0	0
Jumlah		95,91	77,95	**0**	0	**-17,96**	**-18,73**	**0**	**0**

*Rumus: jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000, Sumber: Disbudpar dan Pora Provinsi, 2020*

Pada tahun 2020, jumlah grup kesenian di Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan tertinggi di tahun 2020, yaitu sebesar 25,16 persen, dimana dari periode 2019-2020, kabupaten ini memiliki pertumbuhan jumlah grup kesenian tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 9,55 persen. Kabupaten yang mengalami penurunan jumlah kesenian tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Bangka Barat, sebesar 22,41 persen, dimana di tahun 2019 adalah 16,96 turun menjadi 13, 16 dan Kabupaten Bangka Selatan, sebesar 21,13 persen, dimana di tahun 2019, jumlah grup kesenian sebesar 10,84 turun menjadi 8,55 di tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 16,56 di tahun 2020, Kabupaten Belitung Timur masih memiliki jumlah grup kesenian tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 15,52. Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah grup kesenian tertinggi kedua, yaitu 13,16 dan Kabupaten Belitung dengan grup kesenian tertinggi ketiga, yaitu 11,42. Jumlah grup kesenian terendah di tahun 2020 berada di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Klub Olahraga

Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, Sepak Bola, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, dan Pencak Silat, sebanyak 1.361 perkumpulan, terdapat 183 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 256 perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 137 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 255 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 194 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 132 perkumpulan di Kota Pangkalpinang.

Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang Sepak Bola (654 perkumpulan), kemudian Bola Voli (452 perkumpulan), Bulu Tangkis (118 perkumpulan), Pencak Silat (95 perkumpulan), Bola Basket (63 perkumpulan), dan Atletik (21 perkumpulan).

Tabel di dibawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik.

Tabel II.42
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	Bangka	2	40	2	64	3	64	3	64	3	64
2.	Belitung	2	110	2	120	3	123	3	123	3	123
3.	Bangka Barat	2	120	2	120	3	120	3	125	3	130
4.	Bangka Tengah	2	56	2	56	2	56	2	56	2	58
5.	Bangka Selatan	2	135	2	135	3	135	3	139	3	142
6.	Belitung Timur	2	75	2	75	2	75	2	80	2	90
7.	Pangkal Pinang	3	32	3	40	5	40	5	45	5	47
Bangka Belitung		**15**	**568**	**15**	**610**	**21**	**613**	**21**	**632**	**21**	**654**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 142 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola mengalami kenaikan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 654 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola dan mengalami kenaikan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 83 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Sedangkan Kota Pangkalpinang memiliki jumlah terkecil yaitu 36 perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebanyak 451

perkumpulan dan tahun 2020 sebanyak 452 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli (bertambah 1 perkumpulan di Kota Pangkalpinang).

Tabel II.43
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	Bangka	25	27	38	28	47	30	47	30	47	30
2.	Belitung	70	4	76	7	83	7	83	7	83	7
3.	Bangka Barat	64	4	75	4	80	4	80	4	80	4
4.	Bangka Tengah	52	7	48	7	43	7	43	7	43	7
5.	Bangka Selatan	76	3	78	3	82	3	82	3	82	3
6.	Belitung Timur	65	5	78	5	81	5	81	5	81	5
7.	Pangkal Pinang	47	10	40	9	35	7	36	7	36	7
Bangka Belitung		**399**	**60**	**433**	**63**	**451**	**63**	**452**	**63**	**452**	**63**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 63 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket.

Tabel II.44
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	13	16	16	16	16
2.	Kab. Belitung	14	18	20	20	20
3.	Kab. Bangka Barat	20	20	21	21	21
4.	Kab. Bangka Tengah	8	16	18	18	18
5.	Kab. Bangka Selatan	10	12	15	15	15
6.	Kab. Belitung Timur	5	9	10	10	10
7.	Kota Pangkal Pinang	15	17	18	18	18
	Bangka Belitung	**85**	**108**	**118**	**118**	**118**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu

Tangkis. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 118 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis.

Tabel II.45
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Kab. Bangka	19	23	23	23	23
2.	Kab. Belitung	10	10	10	10	10
3.	Kab. Bangka Barat	18	18	18	18	18
4.	Kab. Bangka Tengah	7	7	9	9	9
5.	Kab. Bangka Selatan	10	10	10	10	10
6.	Kab. Belitung Timur	6	6	6	6	6
7.	Kota Pangkal Pinang	19	19	19	19	19
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		**89**	**93**	**95**	**95**	**95**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 23 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 95 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat.

2) Jumlah Gedung Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 ha untuk pembangunan *Sport Center,* saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.46
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Gedung Olahraga	10	12	14	14	14
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	1730	1731	1732	1733	1733

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak,

dimana pada tahun 2020, jumlah gedung olahraga sebanyak 14 buah dan lapangan olahraga sebanyak 1.733 buah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/SLB

Angka partisipasi kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Sementara itu, angka partisipasi murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Baik APK maupun APM Sekolah Menengah termasuk SMK, SLB, dan sejak tahun 2007, pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Grafik.II.10

APK DAN APM SMA/SMK/SLB

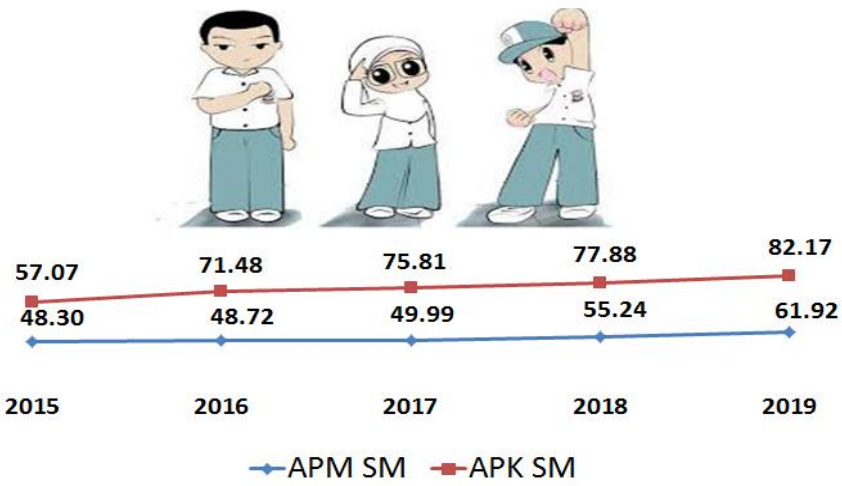

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas baik APK maupun APM Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahun. APK Sekolah Menengah Bangka Belitung pada tahun 2015 hanya sebesar 57,07 persen, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 71,48 persen dan terus meningkat sebesar 75,81 persen (2017), 77,88 persen (2018) serta pada tahun 2019 mencapai 82,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 82,17 persen penduduk yang sekolah sudah mencukupi umur dan atau tidak melebihi umur yang seharusnya.

Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM Bangka Belitung juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 APM Bangka Belitung sebesar 48,30 persen, kemudian meningkat sebesar 48,72 persen (2016), 49,99 persen (2017), 55,24 persen (2018), dan sampai dengan tahun 2019 mencapai 61,92 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa 61,92 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung usia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA/SMK/SLB/sederajat. Secara rinci APK SMA, SMK, dan SLB termasuk pendidikan non formal sebagai berikut:

Grafik. II.11

APK SMA, SMK, DAN SLB

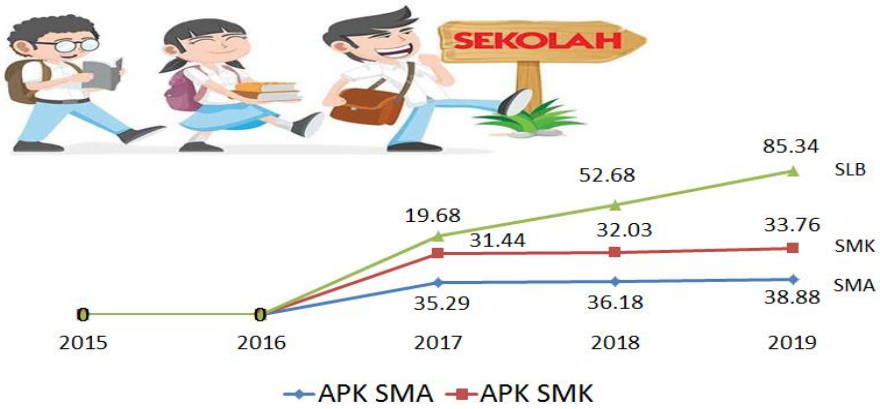

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Secara keseluruhan, capaian APK pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. APK SMA pada tahun 2017 sebesar 35,29 sedangkan 2019 sebesar 38,88. APK SMK tahun 2017 sebesar 31,44 menjadi sebesar 33,76 (2019) begitupun APK SLB dari 19,68 (2017) menjadi sebesar 85,34 (2019). Kondisi ini memberikan gambaran keberhasilan pemerintah daerah untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

b. Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan standar. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah adalah sarana untuk melakukan upaya-upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Secara umum berdasarkan neraca pendidikan akreditasi sekolah SMA dan SMK sebagaimana dibawah ini,

Grafik. II.12

SMA, SMK, SLB TERAKREDITASI A

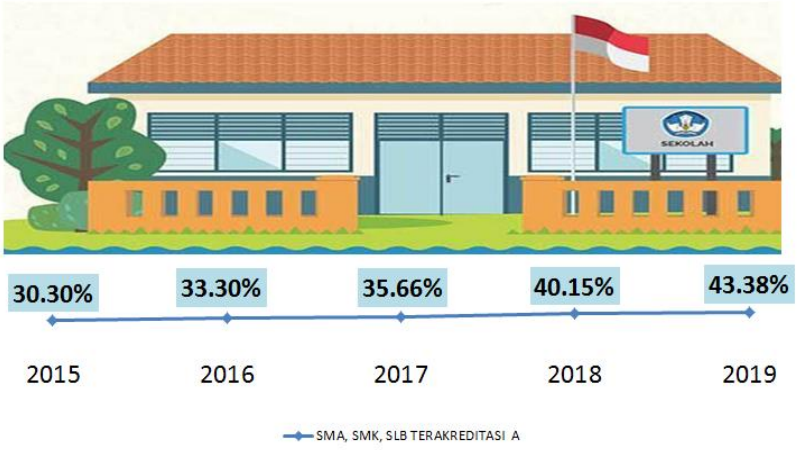

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas dari tahun 2015-2019 akreditasi SMA, SMK, dan SLB selalu naik meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2015 akreditasi SMA, SMK, dan SLB sebesar 30,30 persen kemudian tahun 2016 sebesar 33,30 persen, dan terus naik mencapai 43,38 persen (2019). Beberapa faktor penunjang akreditasi dilihat dari capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), seperti sarana prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Capaian SNP SMA periode 2016-2019 meningkat, dimana pada tahun 2016 sebesar 4,81 dan meningkat menjadi 6,58 (2019). Begitupun dengan SNP SMK dari 4,48 (2016) menjadi 6.60 (2019).

2. Urusan Kesehatan

a. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sebagai salah satu sub sistem dari sistem kesehatan memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Dimana salah satu indikator sasaran meningkatnya kualitas kesehatan adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Berikut disajikan SDM Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana data dibawah ini,

Grafik. II.13

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2015-2017 pendataan SDM Kesehatan masih dilakukan secara manual sehingga jumlah SDM Kesehatan cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dukcapil untuk mendata SDM Kesehatan by NIK. Pada tahun 2018 jumlah SDM Kesehatan sebanyak 5.887 orang dan tahun 2019 sebanyak 7.184 orang. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 1.718 orang dan 2019 sebanyak 2.049 orang atau meningkat sebanyak 331 orang.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Sejak tahun 2015-2019perkembangan Rumah Sakit (RS) cukup pesat. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 18 RS sedangkan 2019 mencapai 28 RS, yang terdiri dari rumah sakit pemerintah 11 (sebelas) RS, rumah sakit swasta 13 (tiga belas) RS dan rumah sakit khusus 4 (empat) RS, dengan klasifikasi kelas B sebanyak 2 RS (pemerintah dan khusus), klasifikasi C berjumlah 15 RS (7 pemerintah, 5 swasta, dan 1 khusus), klasifikasi D sebanyak 6 RS (2 pemerintah dan 4 swasta) dan klasifikasi kelas D Pratama 1 RS.

Grafik.II.14

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sampai dengan tahun 2019 Rumah Sakit (RS) terakreditasi sebanyak 18 RS (72%) yang terdiri dari 10 RS Pemerintah dan 8 RS Swasta. Cakupan RS Pemerintah yang telah terakreditasi mencapai 72 persen. Rumah Sakit terakreditasi Paripurna yaitu RS Jiwa, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah. Yang terakreditasi Madya yaitu RS Jiwa, RS Dr. (HC) Ir. Soekarno, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah, dan RS Dr. H. Marsidi Judono. Sedangkan yang terakreditasi Utama yaitu RS Siloam, RS Bhakti Wara, RS Alma. Yang terakreditasi madya, yaitu RS Depati Hamzah, Kabupaten Bangka Tengah, RS Medika Stania. Sedangkan yang terakreditasi Perdana yaitu Sejiran Setason, RS Belitung Timur, RS Bangka Selatan, RS Eko Maulana Ali, RS Arsani, RSBT Mentok, dan RSIA Muhaya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jalan yang terbentang 600,42 km dengan status sebagai jalan nasional dan 850,99 km dengan status jalan provinsi. Berdasarkan kondisi jalan, pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar sudah memiliki jalan yang berkondisi baik. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, masih ada jalan yang memiliki kondisi rusak berat, yaitu sebesar 1,50 persen (21,75 km), dimana kondisi jalan yang mengalami kerusakan ada pada jalan dengan status jalan provinsi (21,51 km) yaitu jalan umum yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

Selain jalan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dan memiliki banyak sungai sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang kokoh dalam menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain. Terdapat panjang jembatan sebesar 3.508,75 meter yang merupakan kewenangan provinsi dan 2.879,48 meter kewenangan Nasional, dimana konstruksi jembatan tersebut di dominasi beton bertulang dan rangka baja karena lebih kokoh dan tahan lama.

Grafik.II.15
PROPORSI PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP

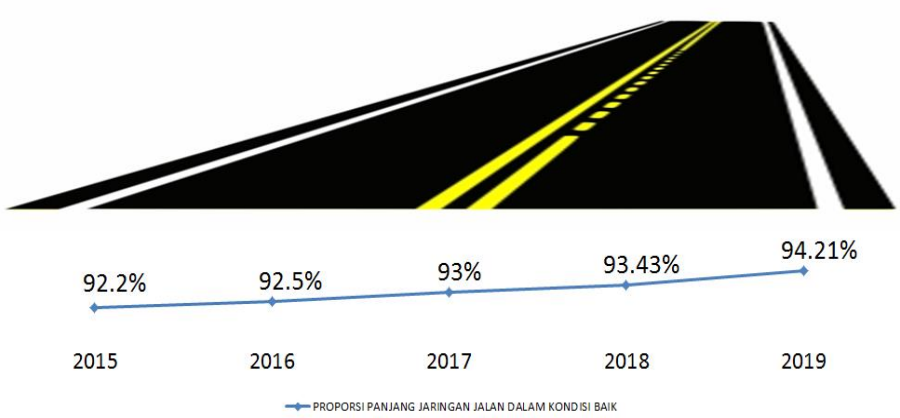

Sumber : Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Secara umum capaian kondisi jalan nasional di Bangka Belitung sudah mencapai 99,79 persen (2019). Sedangkan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bangka Belitung meningkat dari tahun 2015-2019. Dimana pada tahun 2015 sebesar 92,2 persen dan terus meningkat menjadi 92,5 persen (2016), 93 persen (2017), 93,43 persen (2018) dan 94,21% (2019). Hal ini menunjukkan bahwa jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan mempunyai kemampuan dalam memikul beban kendaraan.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder kewenangan provinsi pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha–3000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Grafik.II.16

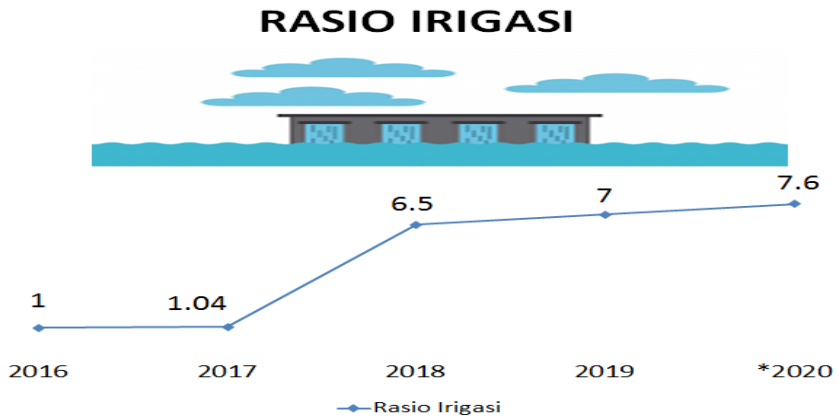

Sumber : Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas potensial jaringan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7.132 ha dan luas fungsional sebesar 2.849 ha dengan panjang jaringan irigasi 133.582.11 m. Jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 46.305.41 meter (34,66%), kondisi sedang 27.680.2 meter (20,7%), dan kondisi rusak sepanjang 98.450.8 meter (73,7%). Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Pada tahun 2016 rasio irigasi hanya sebesar 1 persen yang tertangani atau hanya seluas

28.49 ha. Namun pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan hingga mencapai 7 persen atau seluas 199.43 ha. Daerah jaringan irigasi yang dalam kondisi baik saat yaitu Buleng (3.536.11m), Kimak (754,17 m), Sedang Pergam (3.581.07 m), dan Gadung Bikang Kepoh (38.434.06 m).

c. Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air

Air baku merupakan air yang didistribusikan dalam penyediaan air bersih/ konsumsi yang harus memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan baku untuk air bersih/ konsumsi. Air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air seperti sumber air permukaan, cekungan air tanah dan air hujan. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air sangat penting dan perlu dijaga dari daya rusak air. Pengendalian daya rusak air merupakan upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Salah satu daya rusak air adalah banjir. Luas kawasan banjir di Pulau Bangka mencapai 48.310.16 ha (Pulau Bangka 46.128.98 ha dan Pulau Belitung 2.181.18 ha).

Grafik.II.17

PENYEDIAAN AIR BAKU DAN LUAS KAWASAN TERLINDUNGI DARI DAYA RUSAK AIR

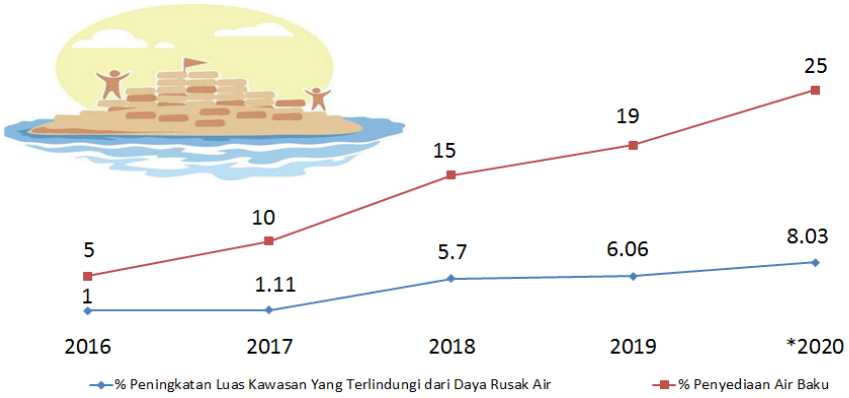

Sumber : Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun 2016-2019. Dimana pada tahun 2016 hanya 5 persen sedangkan tahun 2019 mencapai 19 persen. Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan kolong bekas penambangan timah. Di Pulau Bangka terdapat 635 kolong dan di Pulau Belitung terdapat 66 kolong. Untuk menjaga mutu baku air maka perlindungan terhadap daya rusak air selalu ditingkatkan. Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air sampai dengan tahun 2019 sebesar 6,06 persen. Artinya dari luas kawasan banjir di Pulau Bangka 46.128.98 ha baru 2.793.62 ha yang tertangani ditahun 2019.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk keperluan air minum dibutuhkan air rata-rata sebanyak 5 liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air suatu rumah tangga diperkirakan sebesar 60 liter/hari. Air Minum Layak adalah air ledeng eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/ tinja >= 10 m.

Grafik.II.18
RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK

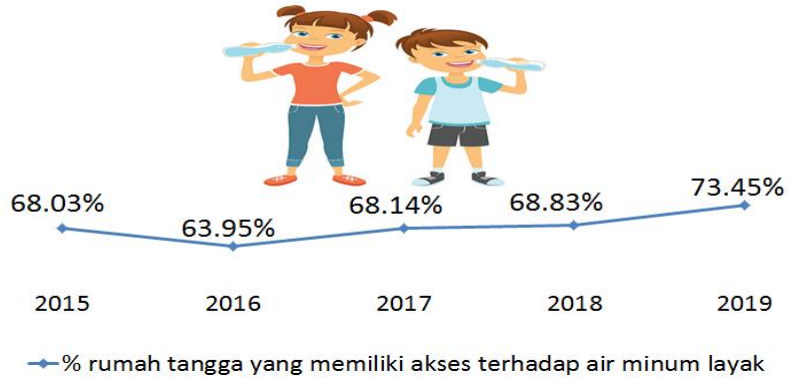

Sumber : BPS, Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 68,03 persen dan menurun di tahun 2016 menjadi sebesar 63,95 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 68,14 persen (2017), 68,83 persen (2018), dan 73,45 persen (2019). Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga pengguna air bersih tertinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 98,50 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 73,93 persen.

b. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL/sistem terpusat).

Grafik.II.19
AKSES SANITASI LAYAK

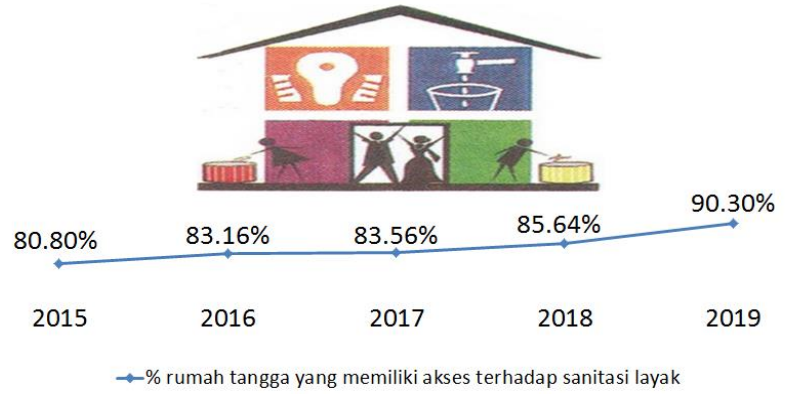

Sumber : Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian akses sanitasi layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 meningkat. Pada tahun 2015 rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,80 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,30 persen. Artinya masih ada 9,70 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak, diantaranya masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Peningkatan akses terhadap sanitasi layak tahun 2018-2019 mencapai 4,66 persen. Artinya untuk menuntaskan 9,70 persen yang belum memiliki akses layak, maka hanya perlu 2-3 tahun untuk menuntaskan yang belum memiliki akses layak.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Selanjutnya kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Grafik.II.20

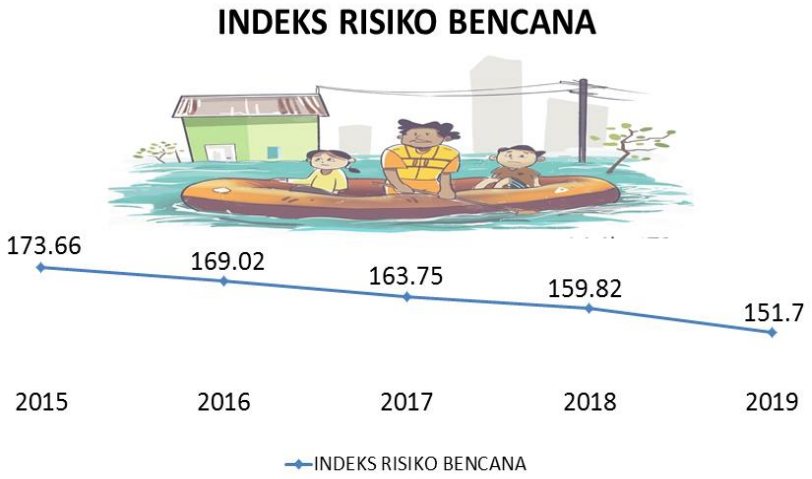

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 173,66, kemudian menurun menjadi 169,02 (2016), 163,75 (2017), 159,82 (2018), dan 151,7 (2019). Meskipun menunjukkan tren penurunan namun IRBI Bangka Belitung masih dalam kategori "tinggi". Masih tingginya risiko bencana hidrometerologi seperti banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Risiko tertinggi berada di Bangka Tengah (214,8) dan Bangka Selatan (214), sedangkan terendah pada Kabupaten Bangka Barat (95,2).

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan daerah tersebut kondisinya tetap dengan 3 hal, yaitu : indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang merupakan komponen penyusun IRBI. IKD dibagi dalam kedalam 3 (tiga) indeks, yaitu rendah (0 – 0,33), sedang (0,34 – 0,66) dan tinggi (0,67 – 1,00). Penghitungan IKD menggunakan aplikasi pusat dengan penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator diantaranya untuk mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar, penyusunan peta risiko bencana dan tren risiko bencana.

Grafik. II.21

INDEKS KETAHANAN DAERAH

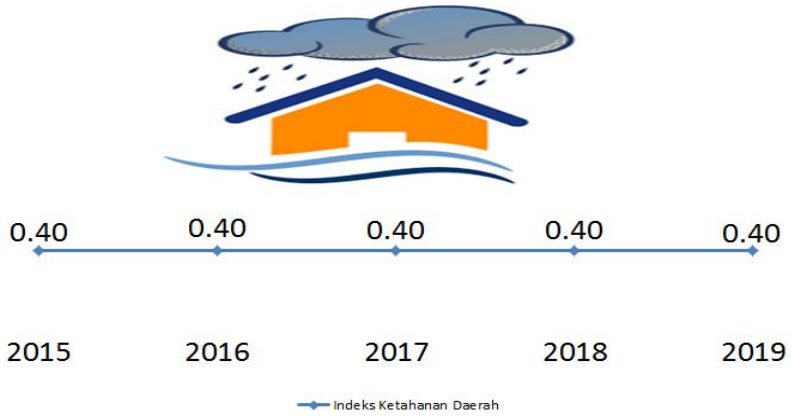

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 sebesar 0,40 atau dalam kategori "sedang". Meskipun setiap tahun terdapat komponen yang berubah namun capaiannya hanya mencapai 0,40 (sedang). Artinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tangguh dalam menghadapi bencana. Tingkat kerentanan dari Potensi kerugian materiil dan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam kategori sedang dan bencana yang ditimbulkan dominan dari gelombang ekstrim dan abrasi.

c. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditindaklanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.449 orang meningkat dari tahun 2017 (1.305 orang) dengan rasio jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 penduduk mencapai 9,93 (2018).

Grafik. II.22

PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA YANG DITINDAKLANJUTI

Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2016 ditemukan 412 pelanggaran Perda dan Perkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 412 pelanggaran ditindaklanjuti. Pada tahun 2017-2019 pelanggaran Perda dan Perkada menunjukkan tren penurunan dari 417 pelanggaran menjadi 169 pelanggaran. Semua pelanggaran Perda dan Perkada ditindaklanjuti atau dengan capaian 100 persen. Pelanggaran terhadap ketentuan Perda dan Perkada tersebut dikenakan tindakan preventif non-yustisial atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sampai proses pengadilan.

6. Urusan Sosial

a. Indeks Pembangunan Sosial (IPS)

Indeks Pembangunan Sosial merupakan suatu alat untuk menyediakan secara holistik, tujuan dan ukuran yang berbasis hasil kesejahteraan yang bebas dari indikator ekonomi. Pengukuran angka Indeks Pembangunan Sosial (IPS) Bangka Belitung tergabung dalam nilai-nilai komponen dan dimensi. Dimensi tersebut merupakan indikator dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), dan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan komponen pengukuran bobot diukur dari jumlah bayi lahir, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah pemuda, jumlah anak, jumlah penduduk usia >10 tahun, dan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indeks Kesejahteraan Sosial Bangka Belitung disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik. II.23

Sumber : Dinas Sosial dan Pemdes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas pada tahun 2016 belum diukur Indeks Pembangunan Sosial (IPS), namun pada tahun 2017 nilai IPS Bangka Belitung mencapai 39,01. Angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 44,04 dan 44,12 (2018). Pada tahun 2020 target IPS Bangka Belitung sebesar 44.20. Rentang nilai IPS : 0-100. Semakin mendekati angka 100, artinya tingkat pembangunan sosial semakin baik. Nilai IPS Bangka Belitung < 65 artinya Tingkat Pembangunan Sosial Bangka Belitung dalam kategori “rendah”.

b. Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak

dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan perlu ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dimana pada tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 48.521 orang, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 391.124 orang, dan tahun 2019 menjadi sebesar 398.970 orang.

Grafik. II.24

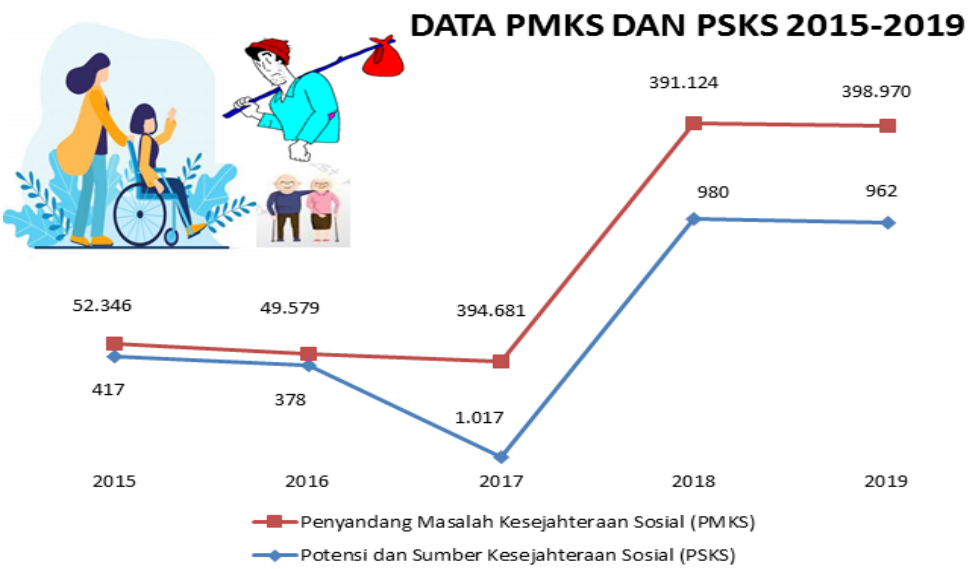

Sumber: Dinas Sosial dan Pemdes *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020*

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap tahun selalu naik. Pada tahun 2017 PMKS Provinsi Bangka Belitung berjumlah 394,681 orang menjadi 398.970 orang ditahun 2019. Naiknya jumlah PMKS dikarenakan naiknya beberapa komponen PMKS seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 berjumlah 1.017 orang menjadi 962 orang. Hal ini dikarenakan berkurangnya beberapa komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial, seperti pekerja sosial profesional, pekerja sosial kemasyarakatan, dan lembaga kesejahteraan sosial.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Gambaran terhadap perkembangan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Grafik. II.25
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

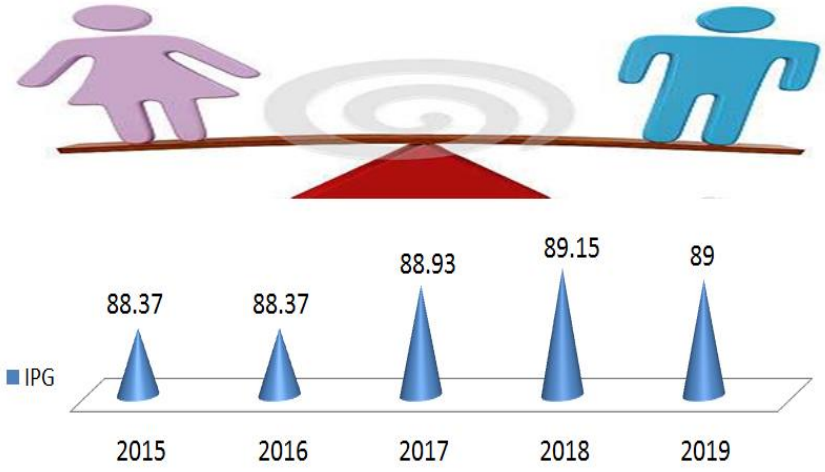

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Saat ini meskipun angka IPG menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya namun secara nasional angka IPG (89.15) masih di bawah angka nasional (90,99). Dengan nilai IPG yang berada di bawah 100, dapat disimpulkan bahwa secara global pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan pembangunan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Bangka Belitung masih di bawah rata-rata nasional, yang tercermin salah satunya dari jumlah keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD mengalami penurunan. Pada periode 2009-2014 keterwakilan itu berjumlah 5 (lima) orang, dan turun menjadi hanya 2 (dua) orang periode 2014-2018.

b. Persentase Industri Rumah (IR) Yang Dibina

Industri Rumahan/IR (*Home Industry*) adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. IR merupakan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.

Grafik. II.26
INDUSTRI RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN

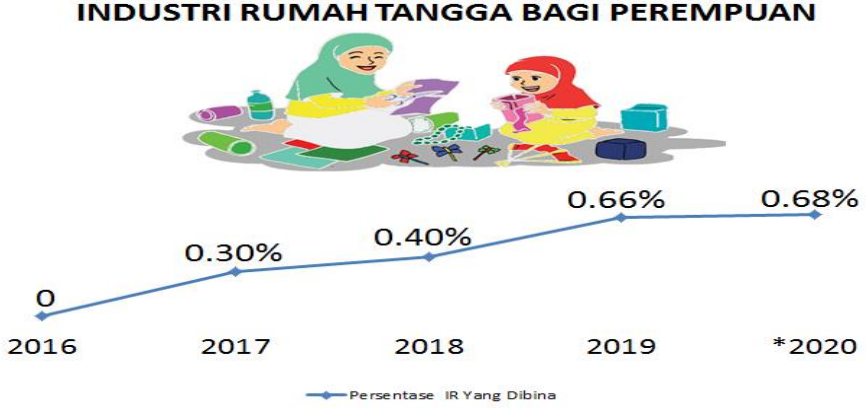

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengembangan Industri Rumahan (IR) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 hanya 0,30 persen IR yang dibina, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,40 persen dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,66 persen. Beberapa indikator atau ukuran keberhasilan pengembangan industri rumahan adalah sebagai berikut : 1). Meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat (khususnya keluarga pelaku usaha mikro); 2). Adanya peningkatan pendapatan perempuan dan anggota keluarga dari hasil usahanya; 3). Terjadi hubungan keluarga yang baik antara suami dan istri, anak dan mungkin dengan keluarga dekat yang lain; 4). Meningkatnya kualitas gizi dalam keluarga dan biaya sekolah; dan 5). Adanya perubahan kategori IR dari IR Pemula ke IR Berkembang. IR Berkembang ke IR Maju.

2. Urusan Tenaga Kerja

a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

Grafik. II.27

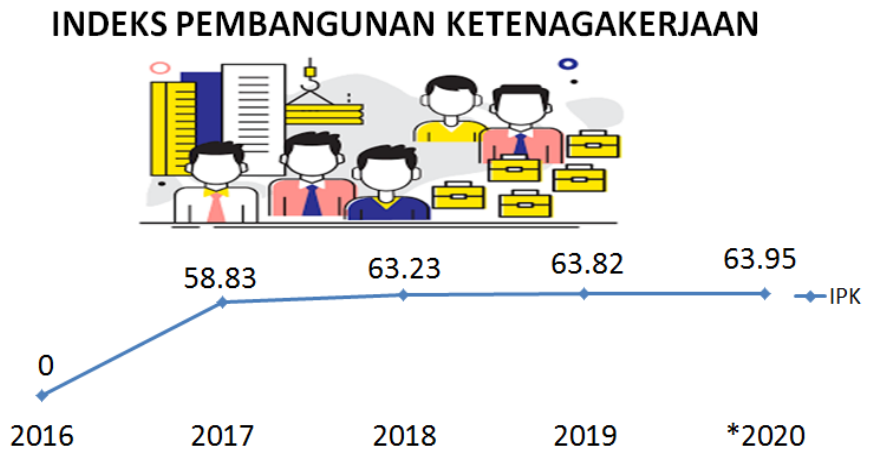

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 58.83 dan meningkat sampai dengan tahun 2019 sebesar 63,82. Meskipun IPK Bangka Belitung naik namun capaian ini masih berada < 65,99 dengan kategori "menengah ke bawah". Mulai tahun 2017 pengukuran IPK menggunakan perspektif baru sehingga hasil pencapaian menengah kebawah diartikan bahwa Provinsi Bangka Belitung masih jauh dari target dan standar *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sesuai standar

yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja setiap tahun dilakukan berbagai jenis pelatihan kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan, diantaranya adalah Pelatihan Otomotif, Las, Listrik, Menjahit, Teknologi Informatika Komputer (TIK) Elektro, Bangunan, Pariwisata, Elektronika/ HP dan Tata Rias.

Grafik. II.28
PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas persentase tenaga kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun 2016 tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 2,7 persen. Artinya dari 15.593 orang pencari kerja hanya 424 orang yang ditempatkan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi sebesar 2,5 persen. Pada tahun 2018 terjadi kembali penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1 persen tenaga kerja yang ditempatkan. Hal ini sebagai dampak krisis moneter yang melanda dunia sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK. Namun seiring dengan perbaikan ekonomi, pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 3 persen tenaga kerja yang ditempatkan atau sebanyak 5.225 pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan. Diharapkan pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan menjadi sebesar 4 persen.

3. Urusan Pangan

a. Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

Skor PPH Ketersediaan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 78, kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 sebesar 87,84. Begitupun dengan skor PHH Konsumsi juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 79,7 dan 2019 mencapai 83,01, sebagaimana grafik di bawah ini,

Grafik. II.29

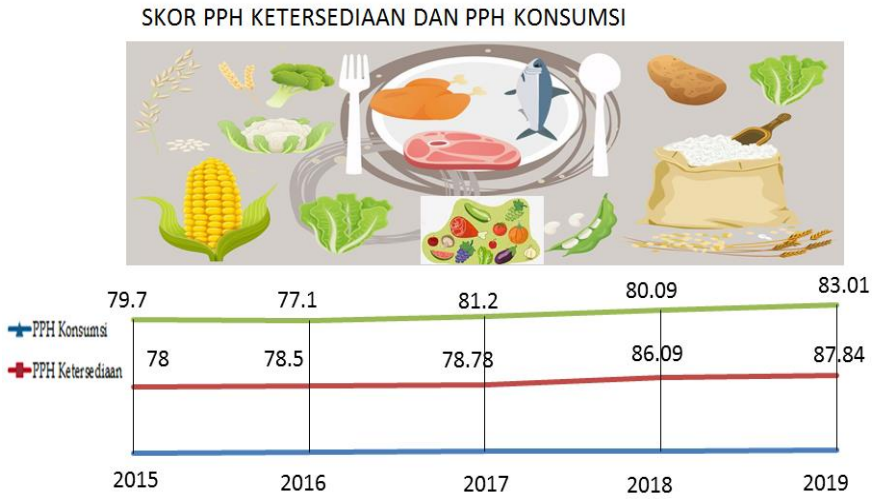

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan grafik di atas skor PPH Kesediaan dan PPH Konsumsi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH).

b. Persentase Penduduk Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau yang dikenal dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu jumlah penduduk yang konsumsi pangannya belum mencukupi standar kecukupan gizi.

Grafik. II.30

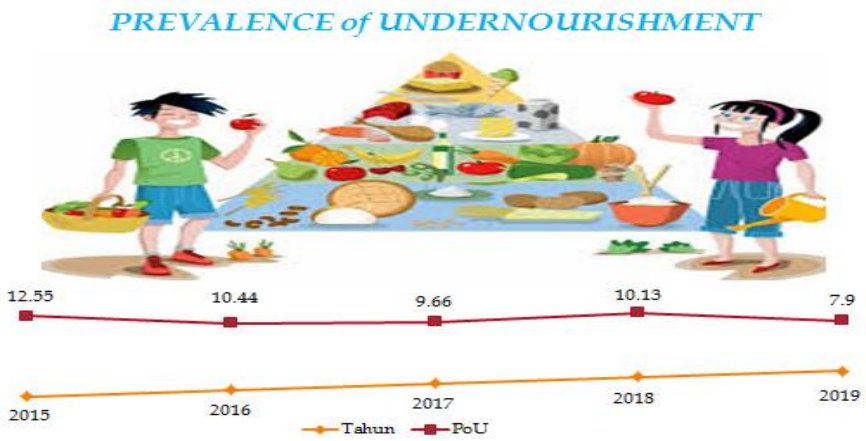

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Prevalence of Undernourishment (PoU) Bangka Belitung sangat berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 sebesar 12,55 persen, kemudian menurun sebesar 10,44 persen (2016) dan 9,66 persen (2017). Namun pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 10,13 persen dan kemudian menurun kembali di tahun 2019 menjadi sebesar 7,90 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan PoU sebesar 7,90 persen maka dengan jumlah penduduk Bangka Belitung yang dihitung sebanyak 1.481.512 jiwa terdapat 117.039 jiwa penduduk yang rawan pangan.

4. Urusan Pertanahan

a. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah

Dengan ditetapkannya urusan pertanahan kedalam tata ruang menjadi satu kesatuan, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini khususnya dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan, "Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas."

Grafik. II.31

PENYELESAIAN KASUS TANAH

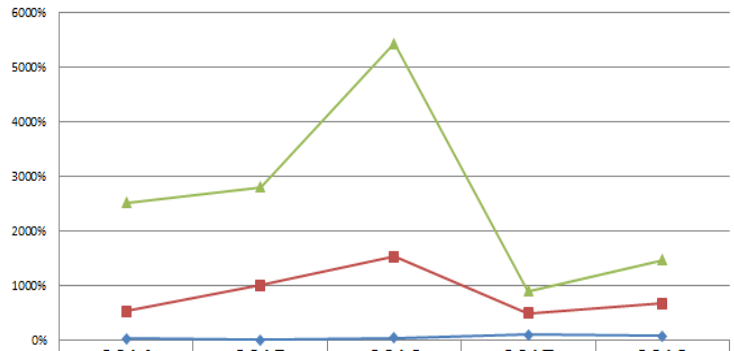

	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kasus Terdaftar	20	18	39	4	8
Jumlah Kasus Terselesaikan	5	10	15	4	6
% Penyelesaian Kasus Tanah	25%	5.50%	38%	100%	75%

Sumber: BPN, Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kasus sengketa tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018 tercatat tahun 2016 mempunyai kasus terbanyak yaitu 39 kasus terdaftar dan hanya 15 kasus yang terselesaikan atau sebesar 38 persen kasus terselesaikan. Pada tahun 2017 tercatat jumlah kasus terdaftar sebanyak 4 kasus yaitu 2 kasus di Kabupaten Bangka dan 2 Kasus di Kota Pangkalpinang dan semua kasus terselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan tahun 2018 ada 8 kasus yang terdaftar yaitu 1 kasus di Kabupaten Bangka, 3 Kasus di Kabupaten Bangka Tengah, 1 Kasus di Kabupaten Bangka Selatan, dan 3 Kasus di Kota Pangkalpinang. Penyelesaian kasus pada tahun 2018 hanya sebesar 75 persen. Kasus ini didominasi oleh kasus sengketa tanah desa dan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan serta pemalsuan sertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Grafik.II.32

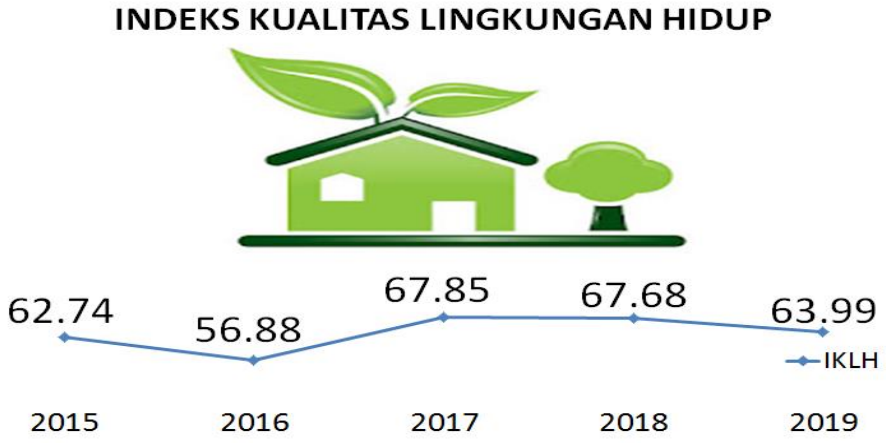

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif, pada tahun 2015 nilai IKLH sebesar 62,74 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 67,85 dan menurun di tahun 2019 sebesar 63,99. Capaian ini masih dibawah capaian nasional yaitu sebesar 66,5. IKA dan IKU Provinsi menurun dibandingkan tahun 2018. Peningkatan terdapat pada Nilai IKTL yaitu dari 40,78 menjadi 41,20, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dengan menyempurnakan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial.

Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya dihitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

b. Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas di sekretariat pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Grafik. II.33

PENGADUAN/KASUS LINGKUNGAN HIDUP

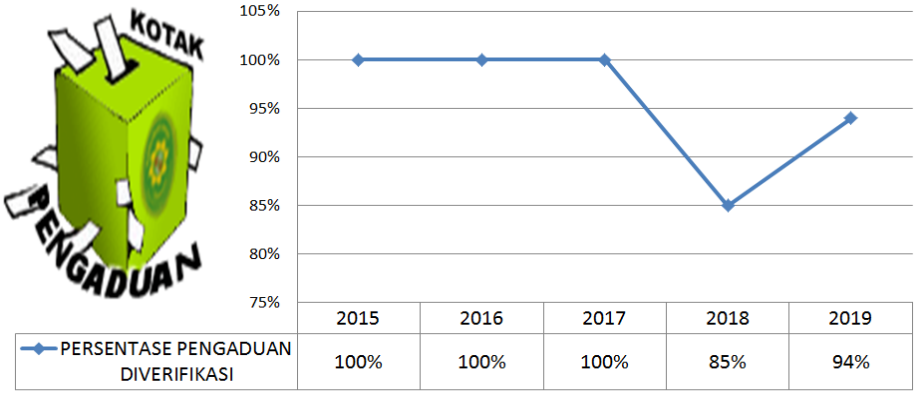

	2015	2016	2017	2018	2019
PERSENTASE PENGADUAN DIVERIFIKASI	100%	100%	100%	85%	94%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang ijin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2015-2018 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

c. Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Grafik. II.34

KETAATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PPLH

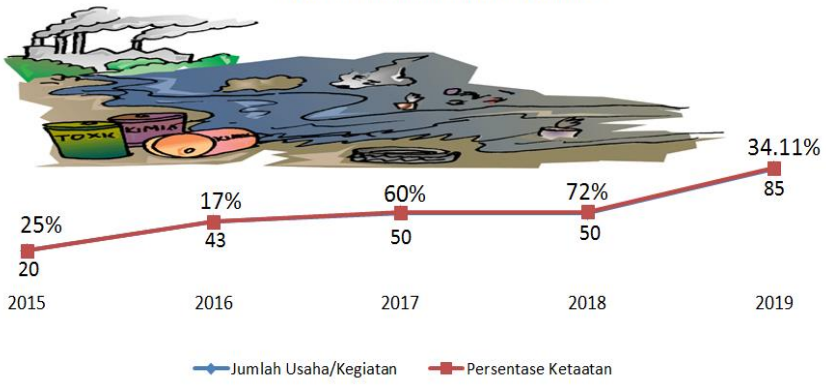

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2015-2018 meningkat dari 25 persen menjadi sebesar 72 persen atau dari 20 menjadi 50 usaha/kegiatan. Namun pada tahun 2019 ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurun dari 72 persen di tahun 2018 menjadi 34,11 persen di tahun 2019. Meskipun jumlah usaha meningkat dari 50 menjadi 85 usaha/kegiatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 dari 50 usaha/kegiatan sebanyak 36 usaha/kegiatan yang masuk dalam kategori "taat" sedangkan pada tahun 2019 dari 85 usaha/kegiatan hanya 29 usaha/kegiatan yang taat.

d. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan yang diterbitkan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Grafik. II.35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 92 usaha/ kegiatan (2015) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 85 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan serta 50 usaha/kegiatan yang menjadi peserta Proper. Proper merupakan program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup.

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Persentase Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Grafik II.36

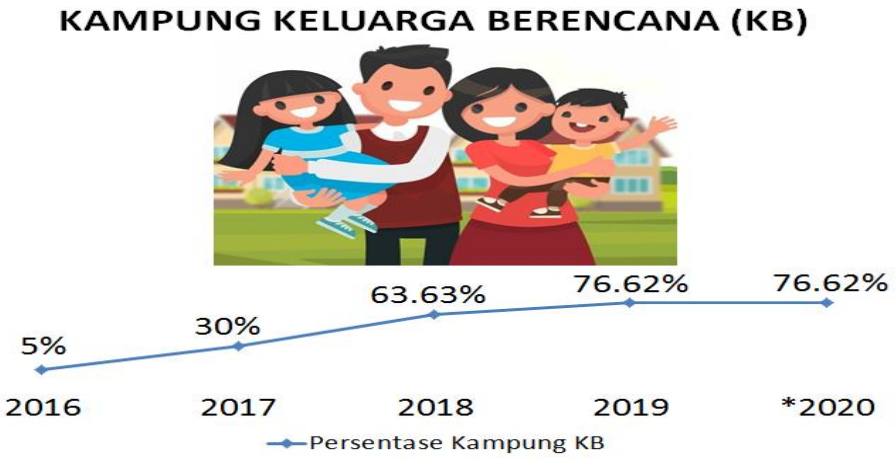

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian kampung KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan cukup tinggi. Pada tahun awal pembentukan Kampung KB hanya tercapai 5 persen atau hanya ada 7 Kampung KB yang terbentuk. Namun pada tahun 2017 mulai terjadi peningkatan pembentukan Kampung KB hingga mencapai 30 persen atau sebanyak 47 Kampung KB yang terbentuk. Pada tahun 2018 capaian mencapai 63,63 persen atau 98 sebanyak Kampung KB dan selanjutnya tahun 2019 mencapai 76,62 persen atau sebanyak 118 Kampung KB. Artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat Bangka Belitung tentang pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk dapat melalui Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak, sedangkan pencatatan sipil melalui Akta Lahir, Akta Mati, dan Akta Perkawinan.

Grafik. II.37

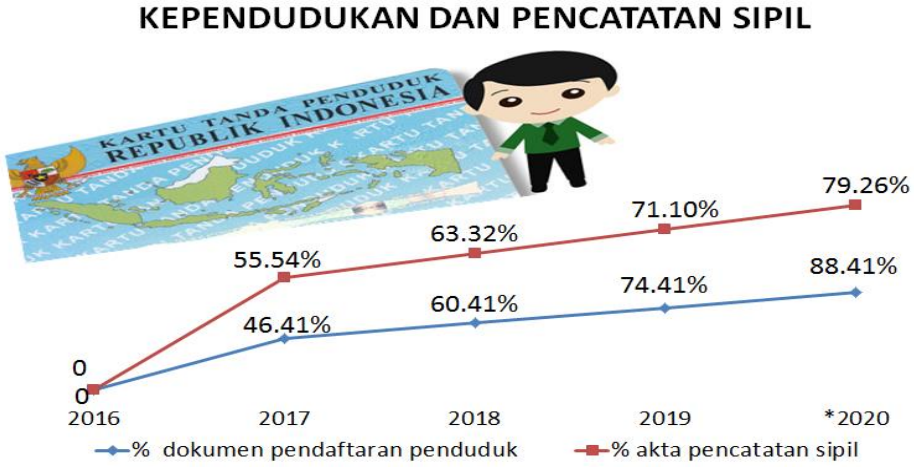

Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dari tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk tercatat pada tahun 2018 sebesar 60,41 persen menjadi 74,41 persen (2019). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 373.274 (2018) menjadi 396.352 (2019) atau terjadi peningkatan dari 85,54% menjadi 89% dari jumlah KK. Begitupun dengan KTP-Elektronik yang diterbitkan dari 922.235 (2018) menjadi 962.937 (2019) atau meningkat dari 95,69% menjadi 98,34% dari jumlah KTP. Untuk jumlah KIA yang diterbitkan tahun 2019 sebanyak 151.553 dan jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 422.141. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil pada tahun 2018 sebesar 63,32 persen meningkat menjadi 71,10 persen (2020), artinya kesadaran masyarakat dalam mengurusi administrasi kependudukan semakin baik.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif.

Grafik. II.38
BADAN USAHA MILIK DESA

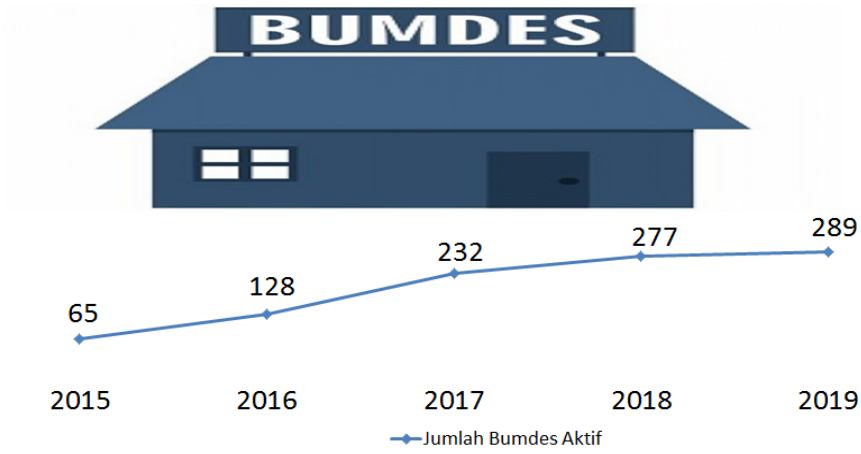

Sumber: Dinas Sosial dan Pemdes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel di diatas menunjukkan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka belitung cenderung meningkat, di mana jumlah BUMDes aktif tahun 2015 berjumlah 65 meningkat menjadi 289 di tahun 2019.Terdapat perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang petunjuk teknis operasional dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan, harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

9. Urusan Perhubungan

a. Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi, penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi); Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional). Sedangkan untuk Perhubungan Udara/Penerbangan dan Perkeretaapian, kewenangan Pemerintah Provinsi relatif sangat terbatas. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional. Gambaran tentang ketersediaan infrastruktur perhubungan di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dibawah ini:

Grafik. II.39

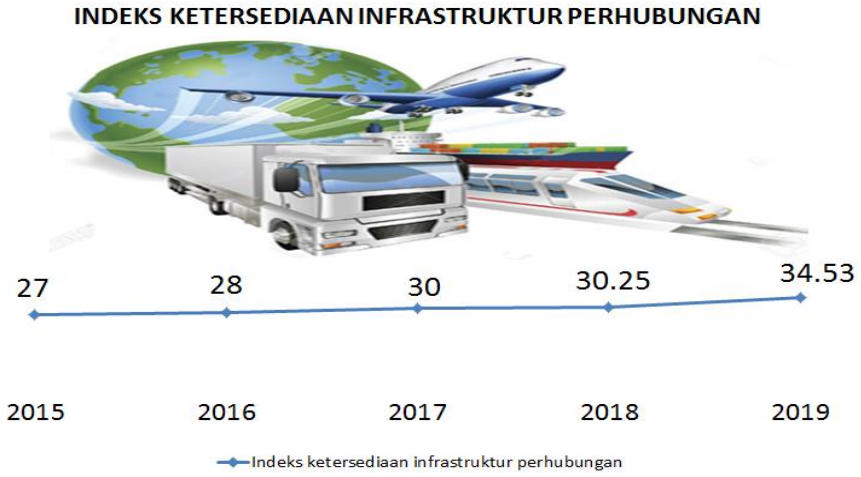

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2020

Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu perhubungan darat, perhubungan laut, dan kebandarudaraan. Dari ketiga komponen tersebut, capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2015 hanya sebesar 27 persen dan tahun 2016 2018 sebesar 30,25% dan pada tahun 2019 sebesar 34,53 %, atau hanya meningkat sebesar 4,28%.

b. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Perlengkapan jalan berperan penting untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perlengkapan jalan raya inilah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terpasang berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.327 Unit, yaitu Marka Jalan 103.911 M, Pagar Pengaman Jalan 3.858 M, *Warning Light* 21 Unit, *Traffic Light* 6 Lokasi, *Delineator* 3.805 Buah, 7 Paku Jalan 3.503 Buah, Pita Penggaduh 426 Buah, Penerangan Jalan Umum 208 M.

Grafik. II.40

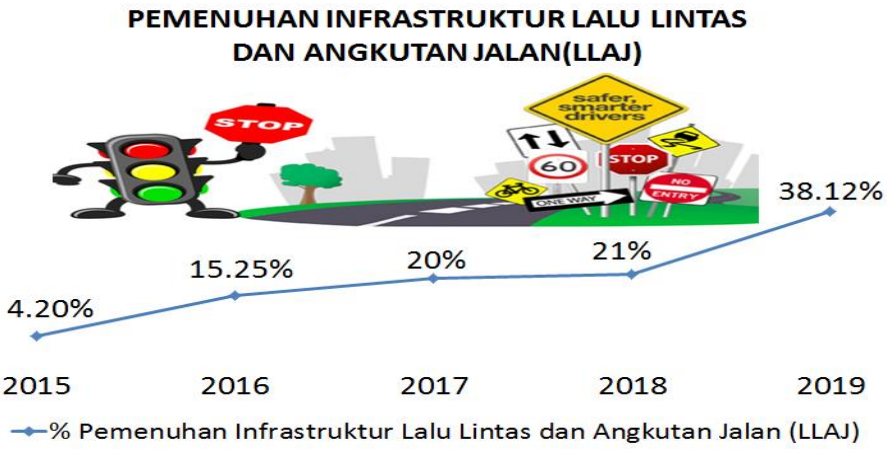

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, 2020

Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Bangka Belitung sejak tahun 2015-2019 meningkat. Pada tahun 2015 infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru terpenuhi sebesar 4,20 persen dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 38,12 persen. Pada tahun 2019 pemenuhan infrastruktur lalu lintas terealisasi sebesar 15,25% persen dengan rincian *guard rail* sepanjang 920m, paku jalan 100 buah, APILL 4 unit, *Warning Light* 10 unit, marka jalan 2640m, rambu-rambu lalu lintas 200 unit, dan lampu penerangan jalan umum 310 unit.

10. Urusan Penanaman Modal

a. Nilai Investasi

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor sumber daya alam, Kedua faktor sumber daya manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Perkembangan Minat Investasi yang dipresentasikan dengan nilai izin prinsip dan nilai realisasi investasi ditunjukkan oleh tabel berikut :

Grafik. II.41

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Investor	104	156	235	266	601
Nilai Investasi	2.057	2.929	3.781	3.733	4.246

Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 meningkat seiring dengan peningkatan jumlah investor. Nilai investasi dari sebesar 2.057 Triliun (2015) menjadi sebesar 4.246 Triliun (2019). Nilai investasi sebesar 4,2 Triliun dengan rincian 2,9 Triliun PMDN dan 1,3 Triliun PMA. Nilai investasi ini meliputi 427 proyek untuk PMDN dan 206 proyek untuk PMA, dengan sektor investasi meliputi telekomunikasi, transportasi, gudang, perkebunan, dan pertambangan. Dominan investasi di bidang perkebunan sedangkan pertambangan hanya 13 persen. Begitupun dengan jumlah investor di tahun 2018 sebanyak 266 yang mengalami peningkatan sebanyak 335 di tahun 2019. Untuk penanaman modal asing, investor terbanyak dari Malaysia 63 persen dan Tiongkok 23 persen.

b. Jumlah Data Perizinan Yang *Update*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Grafik II.42

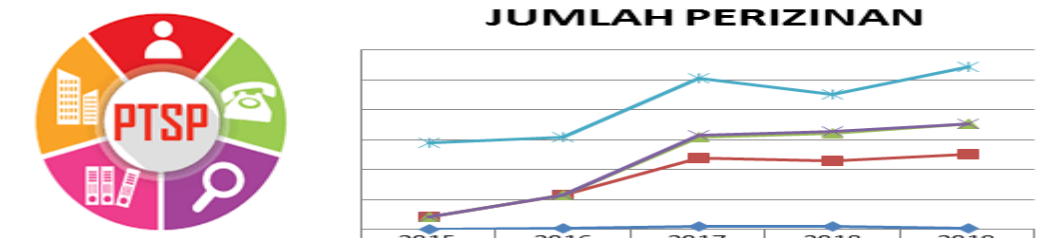

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perijinan sektor lainnya	498	385	387	250	387
Jumlah Perijinan sektor perdagangan	0	0	11	16	0
Jumlah Perijinan sektor Pertambangan	0	0	141	182	203
Jumlah Perijinan sektor perikanan	82	222	455	440	492
Jumlah Perijinan sektor Pertanian	0	8	20	18	9

Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Data perizinan dari tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif. Perizinan didominasi oleh sektor perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Capaian perizinan sektor perikanan meningkat dari tahun 2016-2019, dimana pada tahun 2016 sebanyak perizinan yang terbitkan hingga tahun 2019 mencapai 492 perizinan yang diterbitkan. Perizinan sektor pertambangan mencapai 203 di tahun 2019. Sedangkan perizinan sektor lainnya didominasi oleh perizinan kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya. Jumlah perizinan sektor lainnya mencapai 387 di tahun 2019. Sejak tahun 2018, Semua perizinan telah terlayani menggunakan sistem perizinan tunggal oleh sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam sistem OSS ini syarat pokok ada tiga yaitu izin lokasi, izin IMB, dan izin lingkungan yang wajib bagi pelaku usaha. Dengan OSS perizinan lebih mudah dan tanpa dipungut biaya.

11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Rumusan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi yang telah ditentukan dengan bobot tertentu pula untuk setiap indeksnya. Dimensi

tersebut meliputi domain pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Ketenagakerjaan dan Kesempatan, Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Gender dan Diskriminasi.

Grafik II.43

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam dalam beberapa tahun dengan kenaikan 6,84 poin dari indeks 46,83 di tahun 2015 menjadi 53,67 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif dimana harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu peningkatan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan potensi diri untuk memperkaya *hard skill* dan *soft skill* guna menyiapkan mereka menjadi generasi hebat penerus bangsa.

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Olahraga memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Indeks Pembangunan Olahraga diukur meliputi dimensi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.44

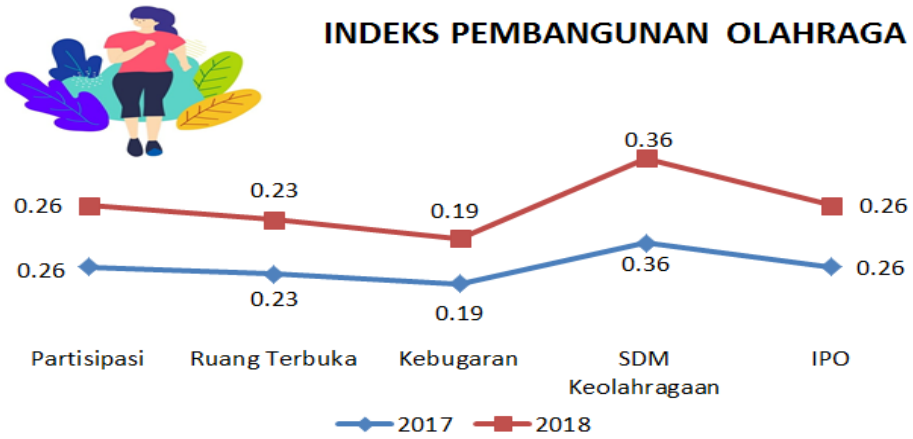

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukkan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga

(IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

12. Urusan Komunikasi dan Informasi

2.1. Persentase Jumlah Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis *e-Government*.

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari layanan akses internet yang diperuntukan pada instansi pemerintah dan instansi pelayanan kepada publik serta infrastruktur jaringan komunikasi data yang sudah terintegrasi pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyediaan Jaringan internet untuk kebutuhan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mensupporting Akses Layanan Aplikasi di antaranya Aplikasi SiRUP, e-Monep, TEPRA, Website seluruh perangkat daerah, email resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan layanan Interaksi tatap muka berbasis video interaktif, serta Layanan *Hotspot* kepada Publik yang diprioritaskan pada tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.45

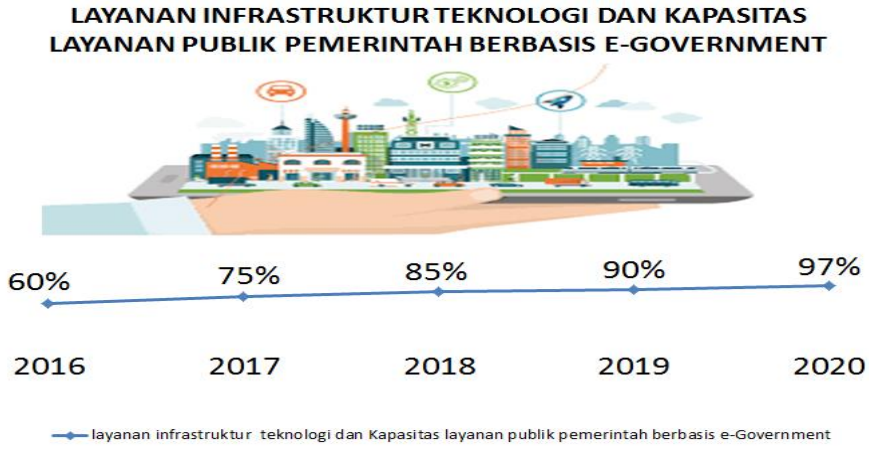

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 hanya sebesar 60%. Layanan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sudah mencapai 75% dan tahun 2018 sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 90%, dan pada tahun 2020 sebesar 97%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan Layanan infrastruktur jaringan data (Data Center) yang fasilitas Ruang Server dengan kapasitas 6 unit rack dengan 60 kVA, Untuk penempatan Server aplikasi Perangkat Daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyediakan Layanan IDC yang terletak pada Duren Tiga Jakarta yang berfungsi sebagai *Back Up* Data pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Urusan Statistik

a. Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang di kelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Grafik II.46
DATA DAN INFORMASI STATISTIK YANG DIGUNAKAN UNTUK PERENCANAAN DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

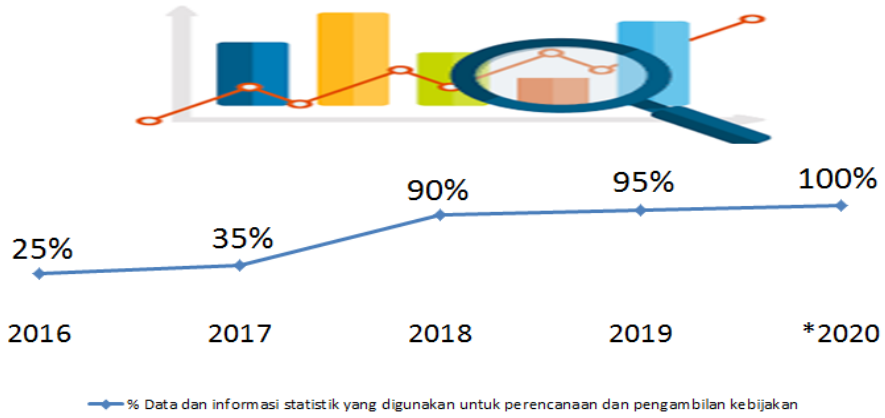

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pemanfaatan data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun 2016 hanya 25 persen. Namun pada tahun 2019 pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen. Data sektoral sudah menjadi pusat data dengan menyajikan data dasar dan informasi terbaru diberbagai bidang dan sektor pembangunan Provinsi Bangka Belitung sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi semakin baik. Data dan informasi ini meliputi data di sektor ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana masyarakat dan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus mengingat data dasar pembangunan merupakan data bergerak yang dapat berubah sewaktu waktu. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti perpindahan penduduk, investasi yang terjadi, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

14. Urusan Persandian

a. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) merupakan agregate nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi terhadap fungsi tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi. Secara umum Indeks Kematangan Keamanan Informasi memiliki 5 (lima) level I-V. Level V merupakan level kematangan paling tinggi sebagai level paling ideal.

Grafik II.47

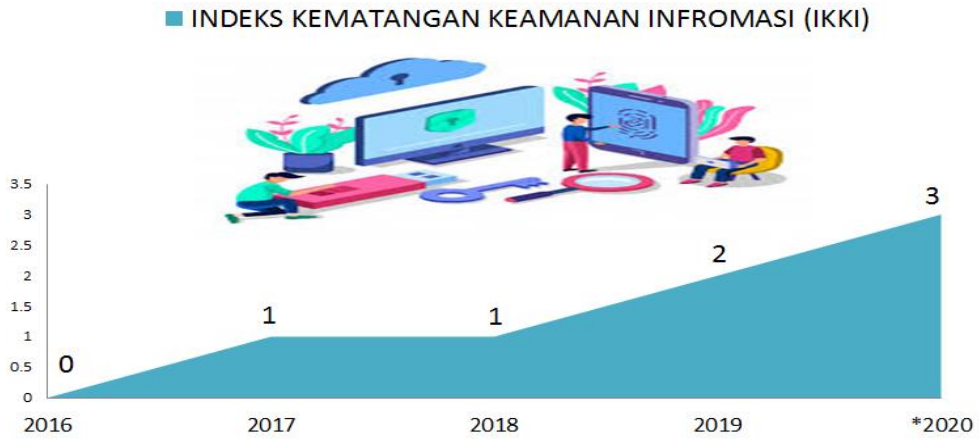

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2017 belum terhitung atau masih nol. Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yaitu 1 atau berada pada level I (sangat kurang/non existent/kondisi awal) serta tahun 2018 dan 2019 meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi.

15. Urusan Kebudayaan

a. Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola

Aspek kebudayaan antara lain meliputi pelayanan berkaitan dengan kesenian dan kepurbakalaan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian seni budaya tradisional, dan memberdayakan kebudayaan tradisional melalui regulasi kegiatan secara berkala. Provinsi Bangka Belitung kaya dengan potensi cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terdata pada tahun 2019 sebanyak 309 potensi objek cagar budaya, diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 33 objek dengan rincian dua objek merupakan cagar budaya peringkat Nasional, dan 31 objek merupakan cagar budaya peringkat Kabupaten.

Grafik II.48

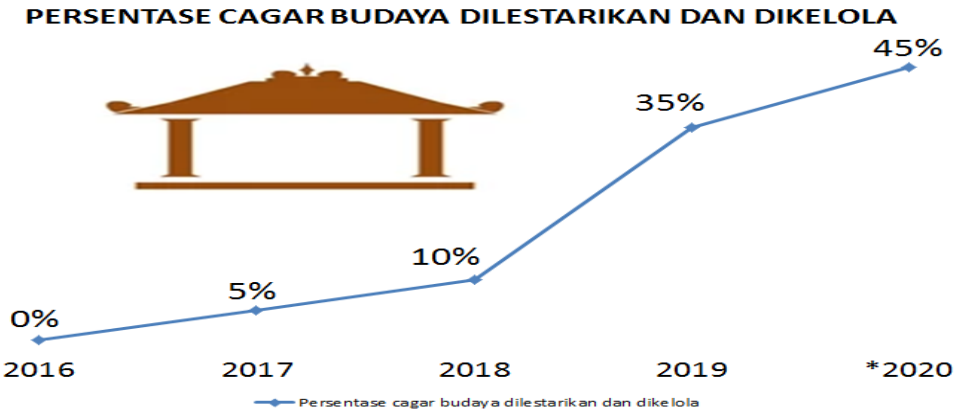

Sumber: Disbudpar dan Pora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas cagar budaya Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 hanya sebesar 5 persen yang dikelola dan dilestarikan. Namun pada tahun 2018 meningkat sebesar 10

persen dan di tahun 2019 sebesar 35 persen. Keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola cagar budaya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya sehingga diharapkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan dalam pengelolaan cagar budaya menjadi sebesar 45 persen.

16. Urusan Perpustakaan

a. Persentase Perpustakaan Yang Dibina

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah.

Grafik II.49
PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DIBINA

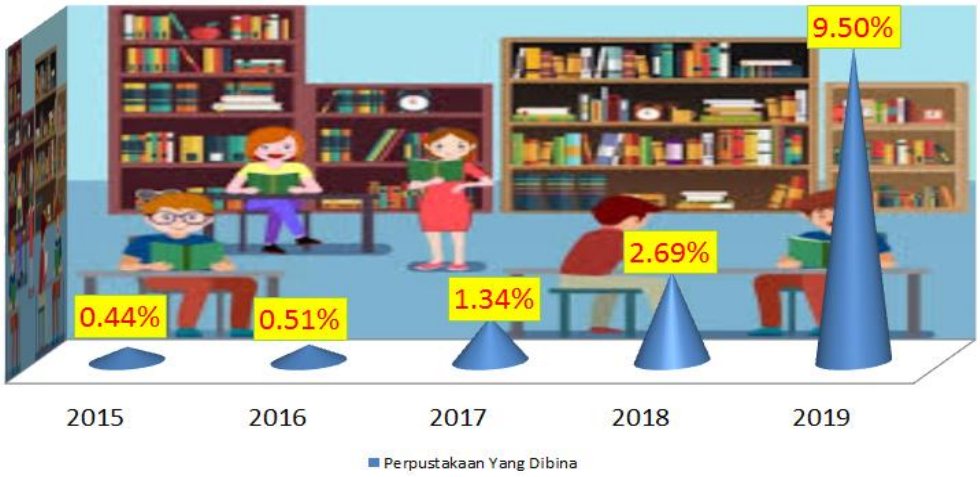

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2019 persentase perpustakaan yang dibina meningkat dari 0.44 persen (2015) menjadi 9,50 persen (2019) dari 1.560 perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

b. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan

Salah satu bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan pemustaka. Jika kebutuhan informasi tinggi, maka tingkat ketersediaan koleksi pun harus tinggi dan selaras dengan kebutuhan informasi tersebut. Kelengkapan koleksi itulah yang menjadi daya tarik pemustaka untuk kemudian kembali berkunjung dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara terus menerus.

Grafik II.50

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2016 berjumlah 21.137, di tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat menjadi 23.055 dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sehingga berjumlah 22.379. Pada tahun 2019 koleksi buku kembali meningkat berjumlah 24.429 dan 2020 juga meningkat dengan jumlah 26.600.

17. Urusan Kearsipan

a. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan

Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek/sub aspek yang menjadi penilaian di antaranya:

1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan (tata naskah dinas; klasifikasi arsip; sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; jadwal retensi arsip; pedoman pengolahan arsip inaktif; pedoman penyusutan arsip);
2. Pedoman pengelolaan arsip vital (Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 tahun, Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip Statis, SDM Kearsipan, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Kearsipan).

Grafik II.51

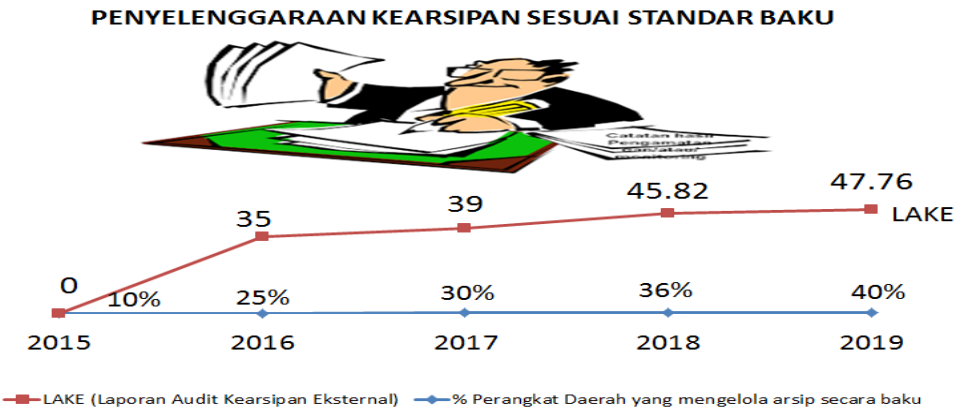

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 belum ada penilaian LAKE. Namun mulai tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Ekternal) sudah dinilai dengan angka 35. Pada tahun 2017 nilai LAKE meningkat sebesar 38 dan terus meningkat menjadi sebesar 45,82 (2018). Sampai dengan tahun 2019 nilai LAKE Bangka Belitung sebesar 47,76 (berpredikat "buruk").

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengambangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnan.

Grafik II.52

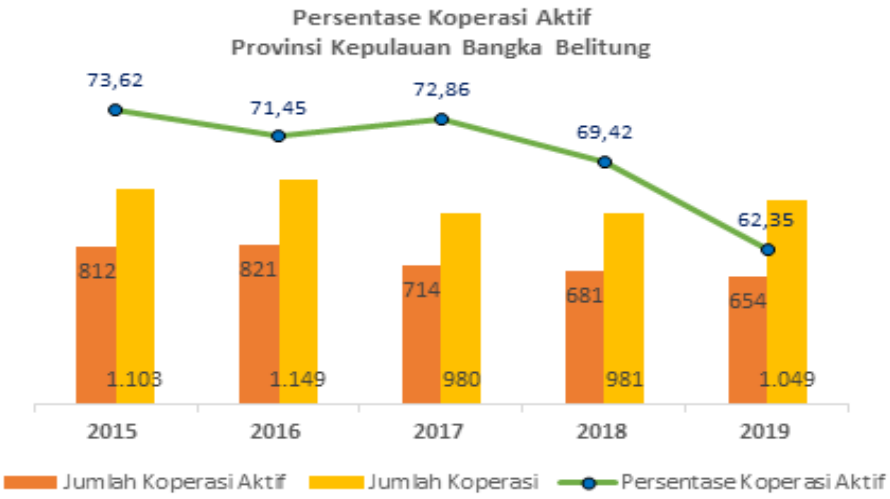

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase koperasi yang aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, akan tetapi kembali meningkat di tahun 2019 dengan total jumlah koperasi sebanyak 1.049 koperasi. Akan tetapi tren jumlah koperasi yang aktif selama periode 5 tahun mengalami penurunan. Terhitung dari tahun 2015 tercatat 812 koperasi yang aktif, yakni sekitar 73,62% dari jumlah koperasi yang ada. Sampai dengan tahun 2018 kembali menurun menjadi 681 koperasi yang aktif, yakni sekitar 69,42% dari jumlah koperasi yang ada. Dan terakhir di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 654 koperasi, dengan persentase 62,35% dari jumlah koperasi yang ada.

b. Jumlah UMKM Yang Diberdayakan

Di samping perannya bagi perekonomian daerah, UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dibawah ini:

Grafik II. 53
JUMLAH UMKM YANG DIBERDAYAKAN

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
2015	256.234	35.387	835	292.456
2016	257.763	35.387	835	293.985
2017	114.648	35.387	835	150.87
2018	114.573	35.514	861	150.948
2019	124.601	35.724	861	161.186

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel di atas, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2017 sampai dengan 2019 yang relatif mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 150.870 UMKM (2017), 150.948 UMKM (2018) dan 161.186 UMKM (2019). Sedangkan pada periode 2016-2017, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat menurun yang dikarenakan proses perbaikan dan pembaharuan kualitas data UKM yang dicatat. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang diberdayakan sebanyak 3.500 UMKM atau sebesar 7% dari jumlah koperasi, sedangkan tahun 2019 sebanyak 4.300 UMKM yang diberdayakan.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil sumberdaya perikanan baik untuk perikanan laut maupun perikanan darat, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Walaupun kontribusi sektor perikanan masih kecil kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Bangka Belitung, tetapi diharapkan terus meningkat bahkan peningkatan termasuk tertinggi diantara sektor yang lain, maka dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan peran yang lebih besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan sebagaimana dibawah ini:

Grafik II. 54
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

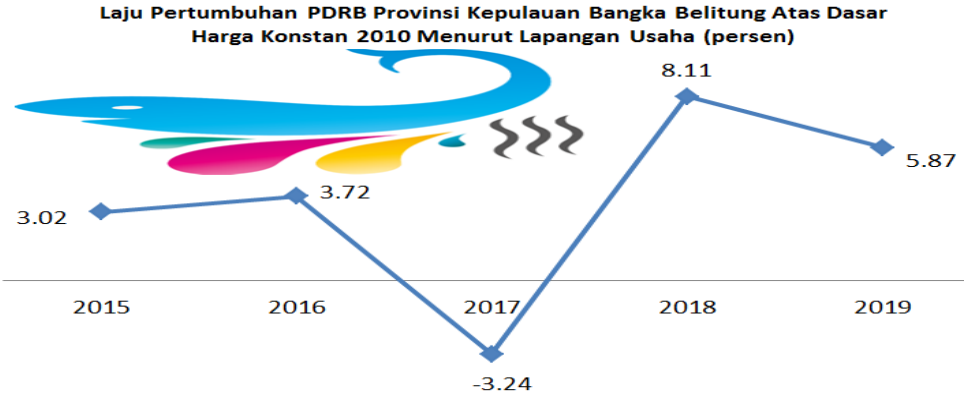

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan cukup fluktualif. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan 3,20 persen, 2016 sebesar 3,72 persen dan pada tahun 2016 laju pertumbuhannya minus 3,24 persen. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 8,11 persen, meskipun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,87 persen. Penurunan tersebut bukan karena tidak berkembangnya subsektor perikanan, namun tingkat perkembangannya kalah cepat dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi lain.

b. Pertumbuhan Produksi Perikanan

Perkembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2019 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 7.150,663 ton, mengalami penurunan dari produksi tahun 2018 yang lalu sebesar 9.340,93 ton. Demikian pula dengan produksi perikanan tangkap yang mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 228.980,33 ton turun menjadi sebesar 223.680,33 ton.

Sedangkan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi yang meningkat secara signifikan berasal dari komoditas udang vaname untuk budidaya air payau, komoditas lele untuk budidaya air tawar dan kerang darah (kekerangan) untuk kegiatan budidaya laut. Peningkatan jumlah Perusahaan pada beberapa kabupaten dan perluasan lahan budidaya vaname berpengaruh terhadap angka produksi yang dihasilkan.

Grafik II. 55

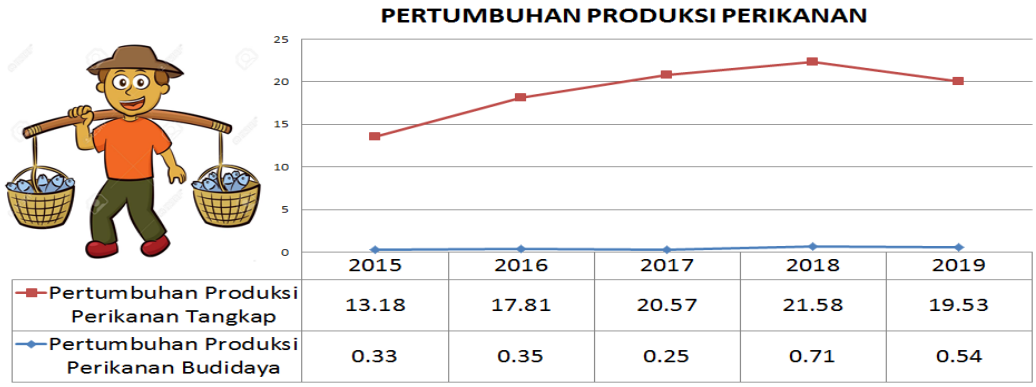

	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	13.18	17.81	20.57	21.58	19.53
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	0.33	0.35	0.25	0.71	0.54

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov. Kep. Babel Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2019 produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 19,53 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,54 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama pembudidaya dan nelayan.

c. Pertumbuhan Produksi Usaha Hasil Pengolahan

Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota baik yang berupa Unit Pengolah Ikan (UPI), *Cold Storage*, Pabrik Es dan rumah kemasan yang secara umum dikelola langsung oleh masyarakat ataupun koperasi.

Grafik II.56

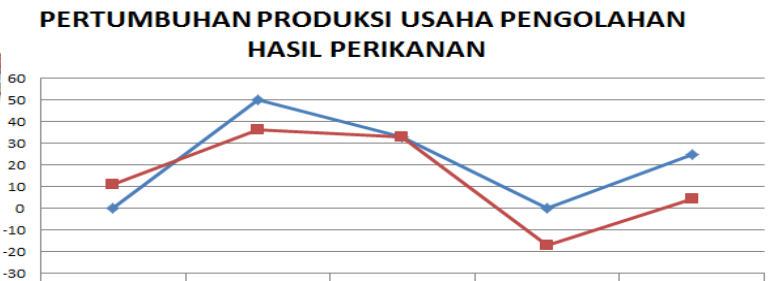

	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap	11.14	-13.96	0.05	-16.94	-20.66
Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Budidaya	0	50	33	0	25

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan tangkap cukup mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan produksi mencapai 11,14 persen. Namun ditahun 2016 menjadi -13,96 persen sampai dengan tahun 2019 menjadi -20,66 persen. Sedangkan pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil budidaya pada tahun 2016 mencapai 50% dan di tahun 2019 sebesar 25 persen. Penurunan produksi usaha pengolahan ikan disebabkan belum optimalnya pengolahan ikan dan pemasaran hasil produksi ikan.

2. Urusan Pariwisata

a. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan wisata ke suatu tempat. Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Sedangkan wisatawan domestik yaitu pengunjung yang berasal dari dalam negeri, namun bukan berasal dari daerah yang dikunjungi.

Grafik. II. 57

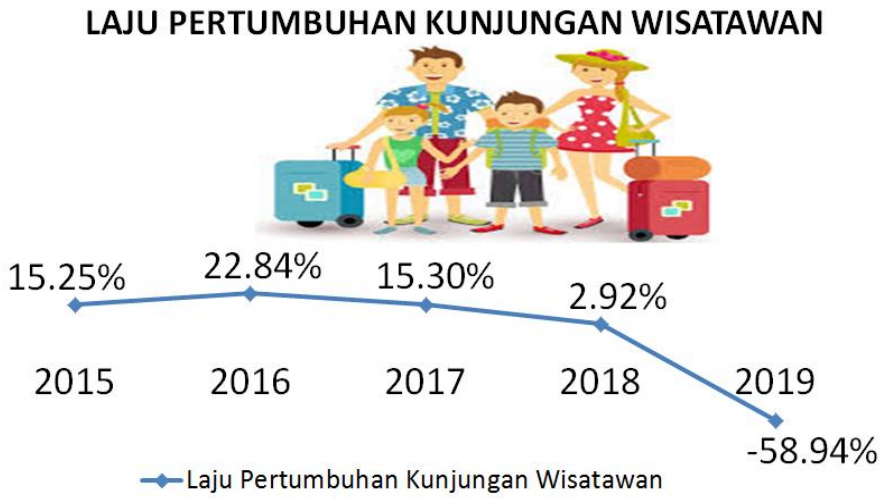

Sumber: Disbudpar dan Pora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan sebesar 15,25 persen (260.930 wisatawan), kemudian naik ditahun 2016 sebesar 22,84 persen (300.725 wisatawan) dan menurun ditahun 2017 menjadi 15,30 persen (369.422 wisatawan), dan di tahun 2018 sebesar 2,92 persen (425.942 wisatawan). Namun pada tahun 2019 kembali menurun di angka minus 58,94 persen (438.373 wisatawan). Meskipun jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dari tahun ke tahun meningkat namun peningkatan tersebut tidak signifikan sehingga pertumbuhan kunjungan wisatawan pun menjadi kecil.

b. Persentase Tenaga Pariwisata yang Tersertifikasi

Peningkatan SDM tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting, baik melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah tinggi vokasi maupun jalur pelatihan seperti kursus-kursus, Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemagangan di tempat kerja. Jenis usaha kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 meliputi 13 jenis usaha yaitu : 1) daya tarik wisata, 2) kawasan pariwisata, 3) jasa transportasi wisata, 4) jasa perjalanan wisata, 5) jasa makanan dan minuman, 6) penyediaan akomodasi, 7) penyelenggaraan pertemuan, 8) penyediaan akomodasi, 9) penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, 10) perjalanan insentif, konferensi dan pameran, 11) jasa informasi pariwisata, 12) jasa konsultan pariwisata, dan 13) jasa pramuwisata, Wisata Tirta, dan SPA.

Grafik. II. 58

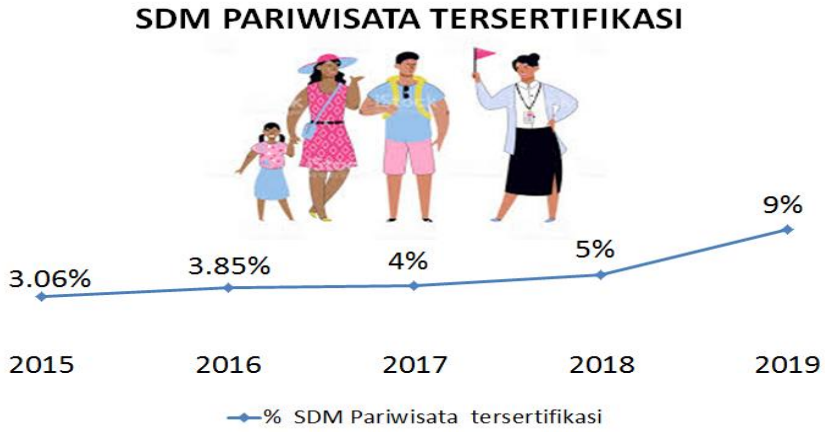

Sumber: Disbudpar dan Pora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga pariwisata. Tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 3,06 persen dan 2017 sebesar 3,85 persen. Pada tahun 2017 tenaga pariwisata terserifikasi sebesar 4 persen atau sebanyak 120 orang dari 2.977 SDM Pariwisata. Kemudian meningkat ditahun 2018 sebesar 5 persen atau sebanyak 154 dari 3.211 SDM Pariwisata dan tahun 2019 sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata.

3. Urusan Pertanian

a. Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Grafik. II. 59

RASIO KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

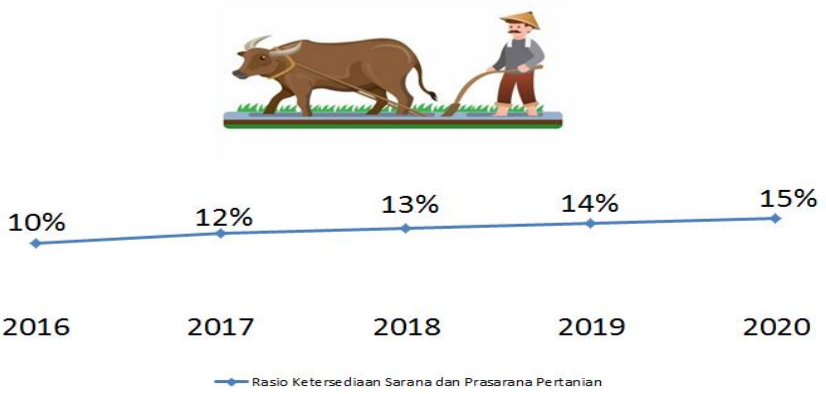

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sarana dan prasarana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 10 persen dan terus meningkat menjadi 14 persen di tahun 2018. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan Saprodi berupa benih unggul dan pupuk kepada setiap Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan CPCL serta penambahan luas panen. Angka Tetap Produksi padi Tahun 2018 mencapai 45.736 Ton, Tahun 2019 sebesar 48.812 Ton dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 produksi padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 68.290.

b. Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman pangan merupakan jumlah produksi padi, sedangkan hortikultura merupakan produksi bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Ketersediaan benih sumber padi, benih pertanian mampu memproduksi sebesar 2 ton pada tahun 2018, 4 ton pada tahun 2019 dan 6 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel sebanyak 1.050.000 polibag, tahun 2019 sebanyak 1.310.000 polibag dan tahun 2020 sebanyak 1.570.000 polibag. Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel pada tahun 2018 sebesar 125 ton, tahun 2019 sebanyak 150 ton dan tahun 2020 sebanyak 175 ton.

Grafik. II. 60

PRODUKSI KOMODITI STRATEGIS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA

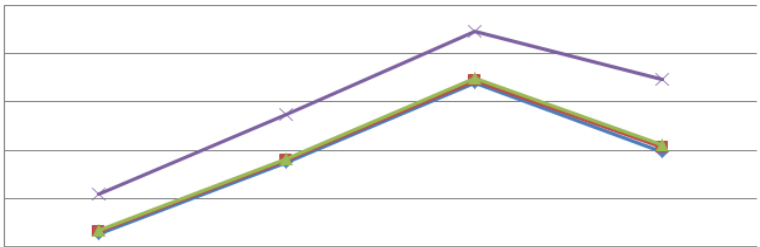

	2017	2018	2019	2020
Padi	37.123	45.736	48.812	68.290
Cabai Rawit	1.729	2.035	2.002	2.546
Cabai Merah	1.993	2.501	2.468	5.386
Bawang Merah	13	87	170	97.94

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Untuk jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel, balai pengawasan dan sertifikasi mutu benih mampu mensertifikasi dan melabeli sebanyak 1.250 polibag pada Tahun 2018, 1.500 polibag pada Tahun 2019 dan 1.750 polibag pada Tahun 2020. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Tanaman Pangan mencapai 92.67 (2017) dan meningkat sebesar 93.09 (2019), sedangkan NTP subsektor Hortikultura menurun dari 99.98 (2017) menjadi 98.82 (2019).

Pada tanaman pangan berdasarkan angka tetap, produksi padi Bangka Belitung tahun 2018 mencapai 45.736 ton, tahun 2019 sebesar 48.812 ton dan berdasarkan angka sementara meningkat di tahun 2020 mencapai sebesar 68.290. Sedangkan pada tanaman hortikultura penurunan produksi cabai besar dan cabai rawit pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan adanya gagal panen dikarenakan bencana banjir dan serangan hama penyakit. Kenaikan produksi kembali meningkat di tahun 2019-2020.

Angka produksi cabai merah meningkat dari 2.468 ton (2018) menjadi sebesar 5.386 ton (2020 angka sementara). Begitupun dengan Produksi cabai rawit sebesar 2.002 ton (2019) meningkat menjadi sebesar 2.546 ton (2020 angka sementara). Angka produksi pada bawang merah tahun 2018 mencapai 87 ton, tahun 2019 sebesar 170 ton dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 produksi bawang merah sebesar 97,94 ton. Bawang merah merupakan kegiatan bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk, masyarakat sama sekali tidak mengeluarkan biaya, sehingga tinggi atau rendahnya produksi sangat tergantung dengan banyaknya bantuan dari pemerintah.

c. Produksi Lada dan Karet

Pada sektor perkebunan, ketersediaan bibit lada pada tahun 2018 di balai benih pertanian sebesar 25.000 polibag, tahun 2019 sebesar 50.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 75.000 polibag. ketersediaan bibit karet di balai benih pertanian pada tahun 2018 sebesar 40.000 polibag, tahun 2019 sebesar 40.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 40.000 polibag. Kawasan lada dan karet rata-rata mencapai 1 ton. Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Perkebunan sebesar 93.82 (2017) dan menurun di tahun 2019 sebesar 69.58 (2019).

Grafik. II. 61

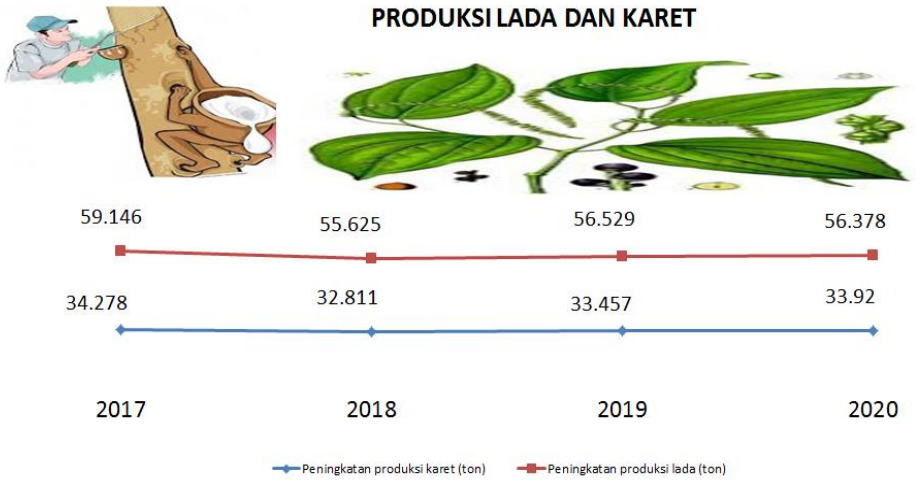

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Produksi lada dan karet Bangka Belitung cukup fluktuatif dimana pada tahun 2017 produksi lada sebesar 59.146 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 mencapai sebesar 55.625 ton. Kemudian sedikit meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 56.529 ton dan 56.378

ton (2020 angka sementara). Tidak tercapainya target pada komoditas lada disebabkan karena banyak tanaman baru ditanam atau masa panen pertama sehingga produktivitas belum maksimal walaupun pada dasarnya produksi naik namun produktivitas memang sedikit turun. Harga lada yang cenderung turun mengakibatkan ketertarikan masyarakat untuk berkebun lada juga menurun jauh.

Begitupun dengan produksi karet tahun 2018 mencapai 32.811 ton, tahun 2019 sebesar 33.457 ton dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 sebesar 33.921 Ton. Tidak tercapainya target pada komoditas karet dikarenakan produksi karet turun karena mengalami "gugur daun" sehingga mempengaruhi produksi. Selain itu harga karet yang sempat turun pada 2018-2019 juga turut berpengaruh terhadap produksi karet, namun pada tahun 2020 harga karet telah naik dari tahun sebelumnya.

d. Produksi Sapi dan Ayam

Pada tahun 2018 ketersediaan bibit ayam sebanyak 5.000 ekor, tahun 2019 sebanyak 6.000 ekor dan tahun 2020 sebanyak 8.000 ekor. untuk ketersediaan anakan sapi tahun 2018 tersedia anakan sapi sebanyak 15 ekor, tahun 2019 sebanyak 20 ekor dan tahun 2020 sebanyak 25 ekor.

Grafik. II. 62

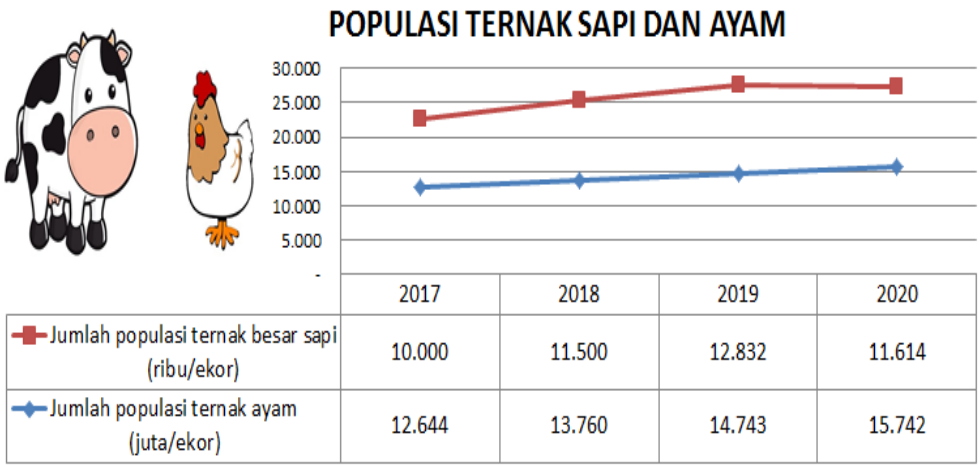

	2017	2018	2019	2020
Jumlah populasi ternak besar sapi (ribu/ekor)	10.000	11.500	12.832	11.614
Jumlah populasi ternak ayam (juta/ekor)	12.644	13.760	14.743	15.742

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas angka populasi Sapi meningkat periode 2017-2019, dimana pada tahun 2017 berjumlah 10.000 ekor dan tahun 2019 mencapai 12.832 ekor sapi. Namun populasi ternak sapi mengalami penurunan ditahun 2020 berjumlah 11.614 ekor sapi. Meningkatnya capaian populasi ternak sapi dikarenakan ada peningkatan kelahiran dan banyak pemasukan sapi dari luar provinsi, sehingga populasi terus meningkat. Ditambah dengan kegiatan Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), petani yang berhasil membuat sapinya bunting dan melahirkan dibayar, serta jika mengalami kematian dibayar ganti rugi oleh dinas.

Sementara itu jumlah populasi ayam meningkat dari tahun ke tahun. Angka tetap populasi ayam tahun 2018 mencapai 13.760 ekor, tahun 2019 sebesar 14.743 ekor dan berdasarkan angka sementara tahun 2020 populasi ayam sebesar 15.742 ekor. Populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi dari data pemasukan ayam ke provinsi. Oleh karena itu, faktor harga ayam menjadi faktor penentu banyak tidaknya permintaan konsumen untuk kebutuhan ayam setiap tahunnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Urusan Kehutanan

a. Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah *sistem pengelolaan Hutan lestari* yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Grafik. II. 63

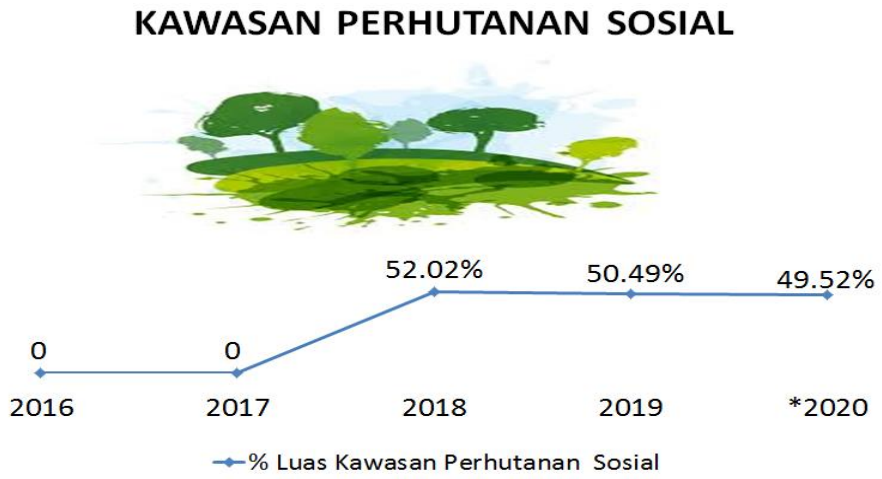

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas kawasan perhutanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 143.503. 32 Ha. Pada tahun 2018-2019 persentase luas kawasan perhutanan sosial menurun dari 52,02 persen menjadi 50,49 persen. Realisasi Perhutanan Sosial (PS) yang aksesnya diberikan kepada masyarakat sudah mencapai luas 38.051 Ha dan jumlah 102 KK dengan total unit 348 Surat Keputusan (SK) Izin/Hak yang telah diserahkan ke masyarakat.

b. Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama. Kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

Grafik. II. 64

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS

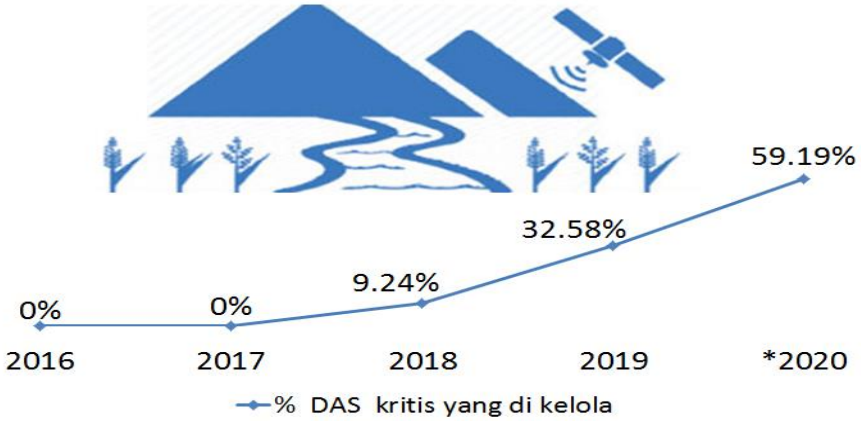

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian daerah aliran sungai kritis yang di kelola pada tahun 2018 sebesar 9,24 persen atau capaian pengelolaan DAS kritis seluas 202,70 Ha. Sedangkan tahun 2019 daerah aliran sungai kritis yang dikelola meningkat menjadi sebesar 32,58 persen atau mencapai 715,11 Ha. Data sementara pada tahun 2020 target capaian sebesar 59,19 persen atau dengan capaian seluas 1.299,11 Ha. Pada tahun 2019 DAS kritis berjumlah 159 DAS. Maraknya aktivitas pertambangan pasir timah menyebabkan sungai tidak mampu manahan debit air sehingga terjadi pendangkalan karena sedimentasi tambang.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktifitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistrik dengan total rumah tangga.

Grafik. II. 65

RASIO ELEKTRIFIKASI

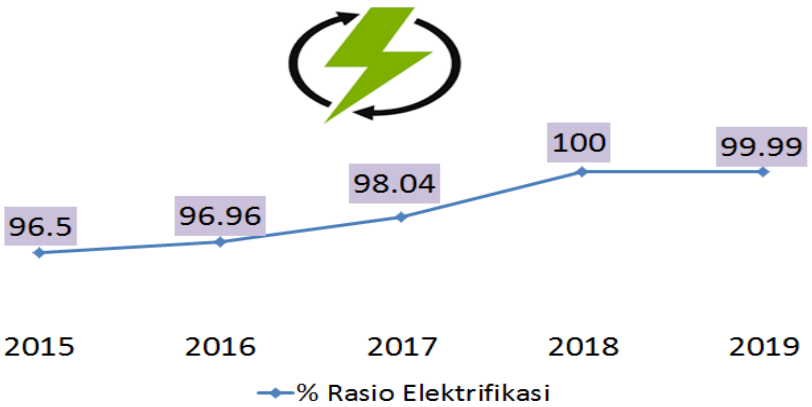

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Rasio elektrifikasi tahun 2018 mencapai 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berjumlah 472.186 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 352.917 KWh dan jumlah produksi listrik sebesar 1.218.892.656 KWh (Babel Dalam Angka 2020).

Pada tahun 2018 rasio elektrifikasi sebesar 100 persen namun pada 2019 rasio elektrifikasi Bangka Belitung sebesar 99,99 persen. Menurunnya rasio elektrifikasi ini dikarenakan adanya pelanggan yang baru mendaftar. Tingginya rasio elektrifikasi artinya seluruh masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati pasokan listrik untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan usaha.

6. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung surplus 1,63 miliar dolar AS pada tahun 2018. Setiap bulan, ekspor Bangka Belitung lebih besar daripada impor. Komoditas ekspor Kepulauan Bangka Belitung dikirim melalui pelabuhan laut dan bandar udara. Untuk daerah Bangka di ekspor melalui pelabuhan laut Muntok, dan Pangkalbalam, serta Bandara Depati Amir. Sementara untuk wilayah Pulau Belitung diekspor melalui pelabuhan laut Tanjung Pandan dan Manggar. Kondisi perkembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II. 66
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U$)

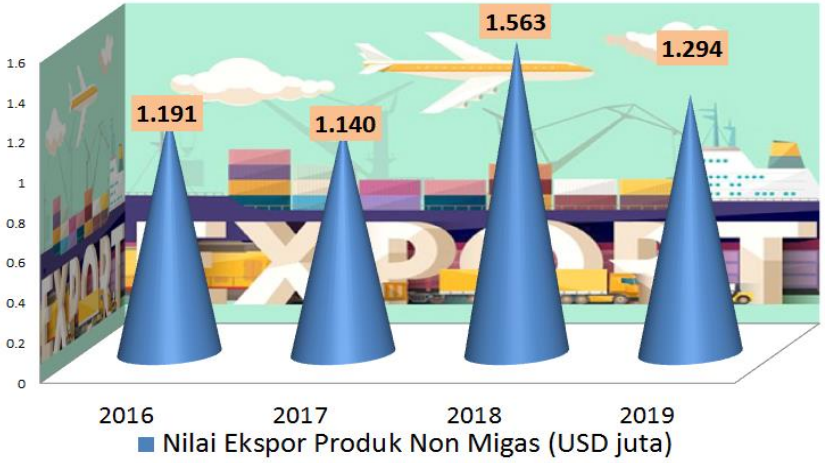

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat di dominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2016, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.191 juta USD atau 360,09 juta ton, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.140 juta USD atau 306.53 juta ton. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan cukup signifikan sampai dengan 1.563 juta USD, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Selama Januari-Agustus 2019, Singapura menyerap 53,74 persen (419,5 juta dolar AS) ekspor timah, sedangkan Australia menyerap 19,46 persen (36,4 juta dolar AS) ekspor nontimah. Nilai ekspor bahan bakar mineral (HS 27) pada Januari-Agustus 2019 mendominasi sebesar 79,2 juta dolar AS atau 42,30 persen dari jumlah ekspor nontimah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Urusan Perindustrian

a. Persentase Laju Pertumbuhan Industri

Rencana pembangunan industri nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019, yang keduanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Rencana pembangunan industri provinsi atau rencana pembangunan industri kabupaten/kota berdasarkan delegasi Undang-Undang tersebut diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Jadi untuk menjadi sebuah acuan daerah masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menetapkan peraturan daerah pada wilayahnya.

Grafik. 67

LAJU PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

	2015	2016	2017	2018	2019
Laju pertumbuhan	0.10	0.05	0.19	0.13	0.09
Industri Kecil	12.094	12.737	15.108	17.024	18.607
Laju pertumbuhan	0.09	-0.05	0.05	-0.11	0.01
Industri Menengah	112	106	111	99	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan industri kecil selama periode 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Laju pertumbuhan Industri kecil tahun 2015 sebesar 0,10 persen dan secara konsisten naik sebesar 0,05 persen ditahun 2016, tahun 2017 naik sebesar 0,19 persen, tahun 2018 naik sebesar 0,13 persen dan tahun 2019 kembali naik sebesar 0,09 persen.

Sementara itu pada kegiatan industri menengah selama rentang waktu 2015 sampai dengan 2019, laju pertumbuhan industri menengah tercatat cenderung fluktuatif. Tahun 2015 tercatat 0,09 persen dan menunjukkan penurunan jumlah di tahun 2016 menjadi -0,56 persen, kembali mengalami perbaikan di tahun 2018 ke angka 0,05 persen, akan tetapi tahun 2018 kembali menurun ke angka -0,11 persen dan di tahun 2019 kembali menunjukkan angka positif ke 0,01 persen.

8. Urusan Transmigrasi

a. Jumlah Satuan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan pemerataan penduduk. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan transmigrasi, Provinsi Bangka Belitung mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan-kawasan transmigrasi salah satunya kawasan Batu Betumpang. Kawasan terpadu mandiri Batu

Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan luas 41.100,3 ha.

Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut No. 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam Area Penggunaan Lain (APL). Perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dibawah ini:

Grafik II. 68

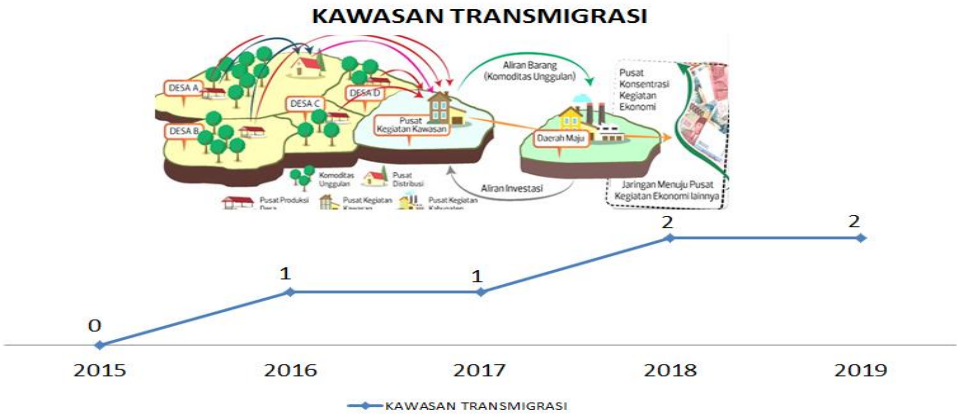

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terdapat 2 kawasan atau sebesar 0,20%. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Luas kawasan Batu Betumpang yaitu 180.278.28 ha dengan jumlah KK sebanyak 8.323 KK. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 menetapkan kawasan Jebus sebagai kawasan transmigrasi seluas 74.015.27 dengan jumlah KK sebanyak 3.600 KK.

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspekdemokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 mencapai angka 73,43. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 80,11. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 turun dari kategori "baik" menjadi kategori "sedang". Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks >80), "sedang" (indeks 60 – 80), dan "buruk" (indeks < 60).

a. Nilai Kebebasan Sipil

Nilai kebebasan sipil dihitung melalui 4 aspek yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. hal ini mengindikasi adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama, serta kebebasan dari diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok.

Grafik II.69

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai kebebasan sipil Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 81,25. Kemudian pada tahun 2016-2017 Kebebasan Sipil turun 4,58 poin (dari 87,65 menjadi 83,07). Sedangkan pada tahun 2018-2019 kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12) dan masuk dalam kategori "sedang". Artinya meningkatnya nilai kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari deskriminasi atau berkurangnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dan ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

b. Nilai Kelembagaan Demokrasi

Nilai Kelembagaan Demokrasi dilihat dari 2 aspek yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil (Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, Kecurangan dalam penghitungan suara), dan Peran DPRD (Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif).

Grafik II. 70

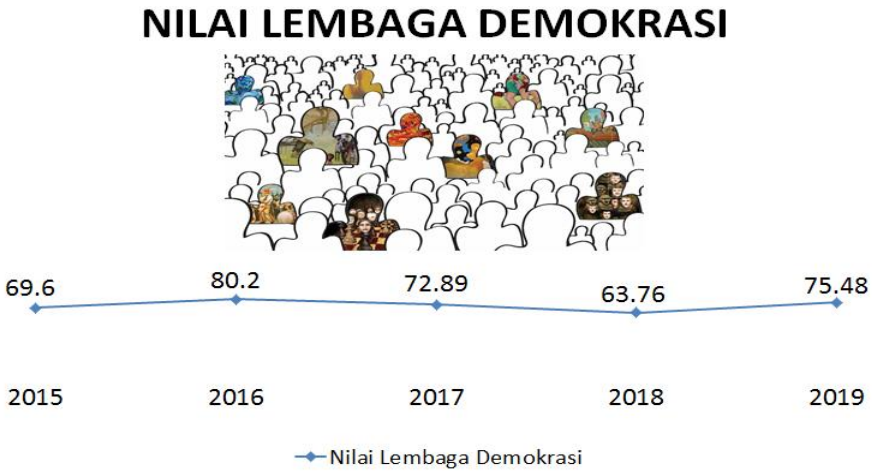

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai kelembagaan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebesar 69,6 persen. pada tahun 2016-2017 turun 7,31 poin (dari 80,20 menjadi 72,89). Sedangkan pada

tahun 2018-2019 lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48) atau dalam kategori "buruk". Artinya menurunnya netralitas penyelenggaraan Pemilu, menurunkan rekomendasi DPRD kepada eksekutif, meningkatnya kecurangan dalam perhitungan suara dan menurunkan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu.

c. Nilai Hak-Hak Politik

Nilai hak-hak politik dihitung melalui 2 aspek yaitu: pertama, Hak Memilih dan Dipilih (hak memilih atau dipilih terhambat, kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), *Vaters Turnout*, dan persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi. Sedangkan yang kedua adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah).

Grafik II. 71

NILAI HAK-HAK POLITIK

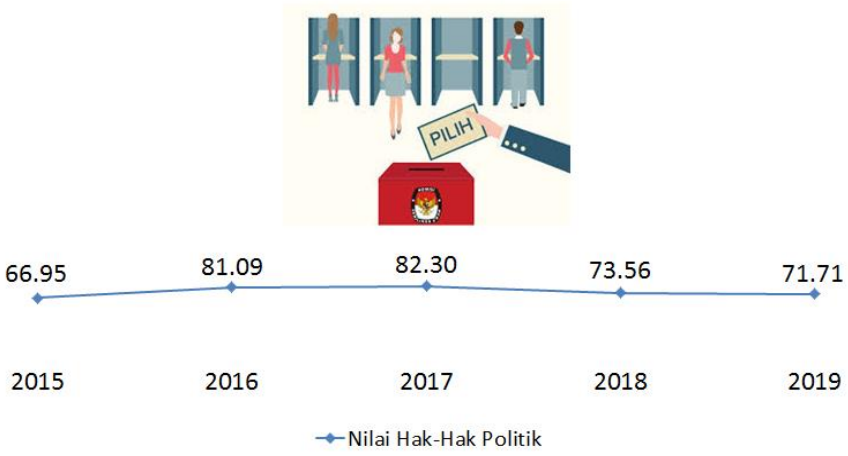

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai hak-hak politik Provinsi Bangka Belitung di tahun 2015 hanya sebesar 66,95. Pada tahun 2016-2017 hak-hak politik naik 1,21 poin (dari 81,09 menjadi 82,30), dan pada tahun 2018-2019 turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71) dan masuk dalam kategori "buruk". Artinya rendahnya terhambatnya hak pilih masyarakat dan rendahnya perempuan terpilih dalam anggota DPRD. Pada tahun 2019 perempuan terpilih dalam DPRD Provinsi hanya berjumlah 2 orang.

2.1.3.5 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori. yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Grafik. II. 72

NILAI SAKIP

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016 nilai Sakip Bangka Belitung sebesar 58,55 atau CC. Namun pada tahun 2019 nilai Sakip Bangka Belitung mencapai 70,29 atau dengan kategori BB. Dengan semakin baiknya Laporan SAKIP ini, kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, efisien, dan fokus kepada kegiatan yang telah direncanakan, dievaluasi, serta didukung dengan aplikasi yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

b. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan

Materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Grafik II. 73

TINGKAT MATERIALITAS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

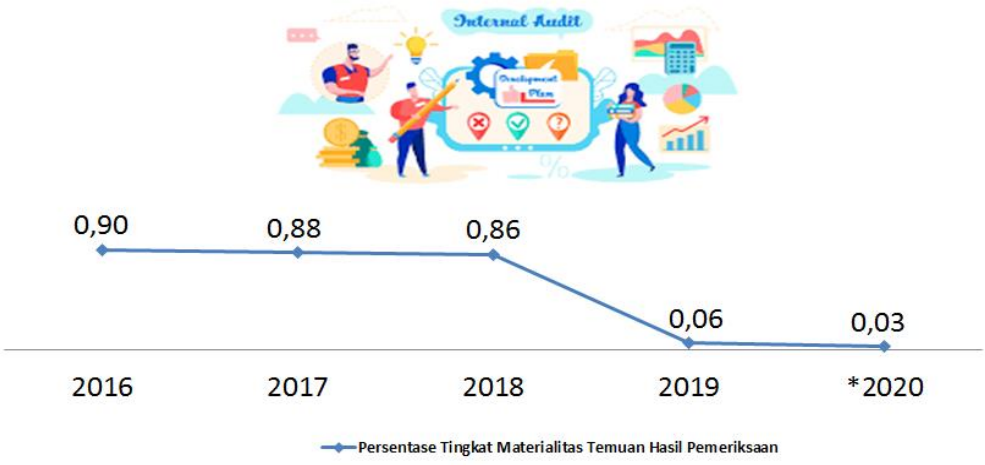

Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun. Pada tahun 2016 tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mencapai 0,90 persen, tahun 2017 sebesar 0,88 persen, tahun 2018 sebesar 0,86 persen dan tahun 2019 sebesar 0,06 persen. Capaian kinerja pada indikator ini sangat tinggi yaitu di bawah satu persen (<1%). Artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan secara wajar dalam semua material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.3.6 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

a. Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Grafik. II. 74
KONSISTENSI PROGRAM PEMBANGUNAN DI RKPD DENGAN RPJMD DAN RENSTRA DENGAN RPJMD

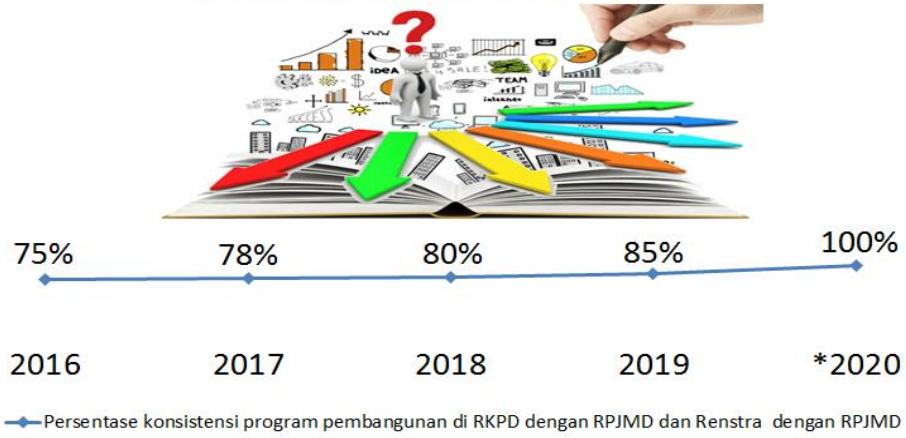

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 tingkat konsistensi hanya mencapai 75 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 78% dan 2018 sebesar 80 persen. Pada tahun 2019 tingkat konsistensi mencapai 85 persen dan diharapkan pada tahun 2020 tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD mencapai 100 persen sehingga semua program dalam Renstra dan RKPD konsisten dengan program yang tertuang dalam RPJMD.

2. Unsur Penelitian dan Pengembangan

a. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mengikuti Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan memasukan 13 (tiga belas) inovasi yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.75
Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

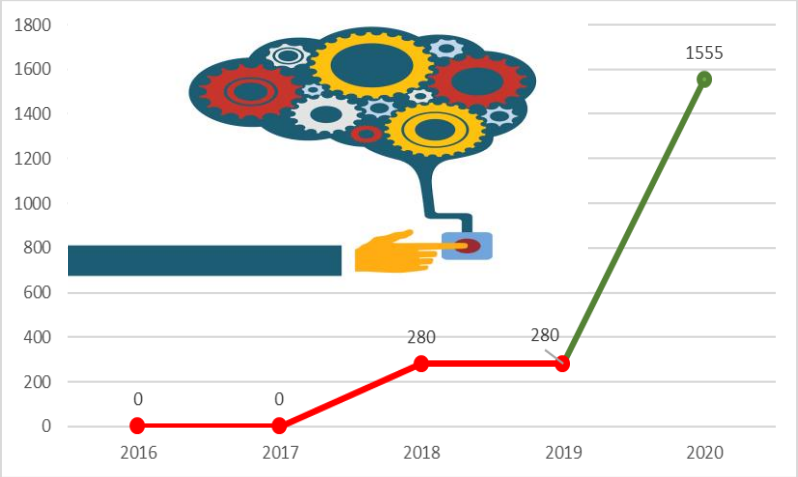

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada Tahun 2020 hasil Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam jumlah skor dan kategori inovasi. Indeks Inovasi Daerah dari 280 (2019) menjadi 1.555 (2020). Hal tersebut sangat dipengaruhi jumlah inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masuk dalam kategori "*Provinsi Sangat Inovatif*".

3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian

a. Nilai Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Beberapa indikator dalam mengukur profesional ASN antara lain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai. Adapun premis indikator dari profesional ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik dan pegawainya semakin bersih. Umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu di dorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Grafik. II. 76

Sumber : BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 hanya sebesar 58. Namun pada tahun 2019 sudah mencapai sebesar 80,6. Artinya semakin meningkatnya pegawai ASN yang sesuai kompetensi baik dari segi penempatan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan yang sudah sesuai dengan jabatan. Selain dari pada itu kompensasi sudah mengarah ke kinerja, tingkat disiplin yang meningkat, serta kinerja yang juga semakin meningkat.

4. Unsur Keuangan

a. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified Opinion*), Opini wajar dengan pengecualian/WDP (*Qualified Opinion*), Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*).

Grafik II. 77

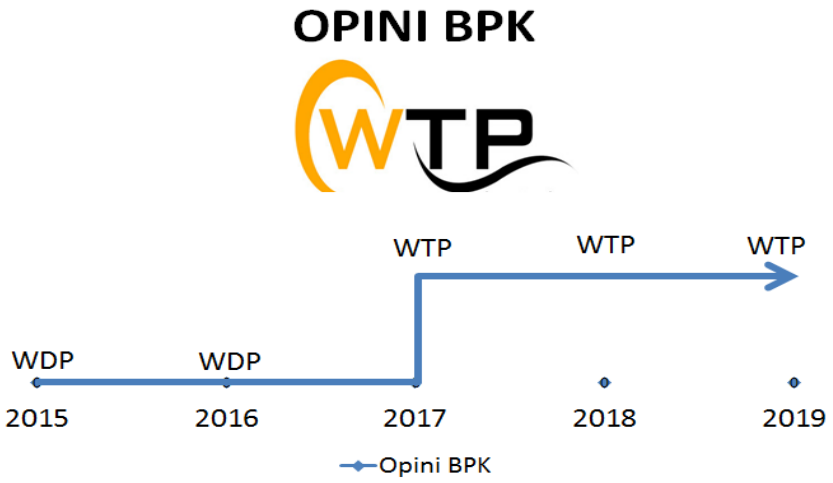

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian opini BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2016 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun pada tahun 2017-2019 capaian opini BPK atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar, semua informasi keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau dapat disimpulkan tata kelola keuangan Pemerintah secara umum telah baik.

b. Persentase Peningkatan Pertumbuhan PAD

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu menunjukkan performa yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan pertumbuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 6 (enam) tahun terakhir. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%.

Grafik II. 78
PERSENTASE KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD

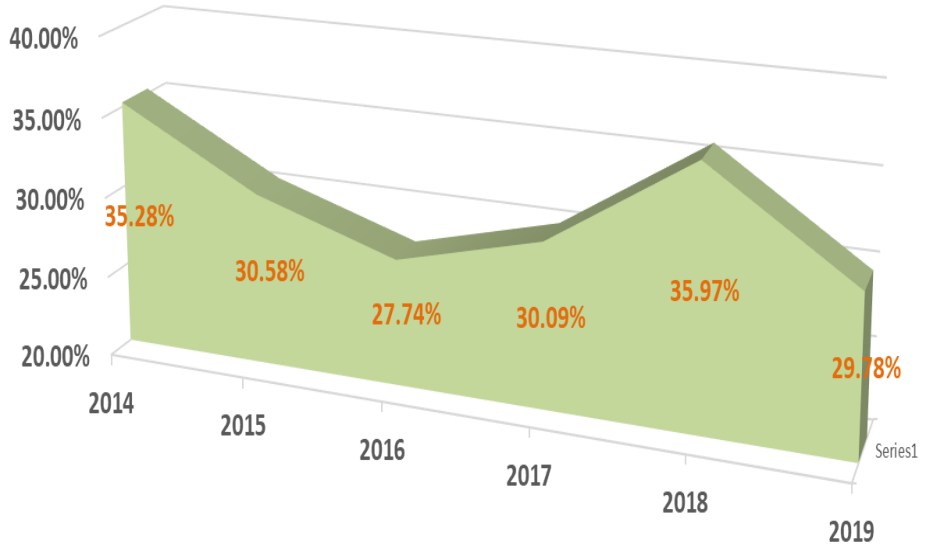

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%. Dalam kurun 2014-2019, dengan kenaikan rata-rata sebesar 54 milyar dari tahun 2014, PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 826.70 milyar pada tahun 2019 atau tumbuh rata-rata sebesar 7,30%.

5. Unsur Penghubung

a. Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung Yang Terlaksana

Pelayanan Penghubung adalah melayani penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam membantu untuk mempermudah komunikasi serta administrasi antara daerah dan pusat, baik penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Daerah di TMII, serta pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Jakarta.

Grafik II. 79

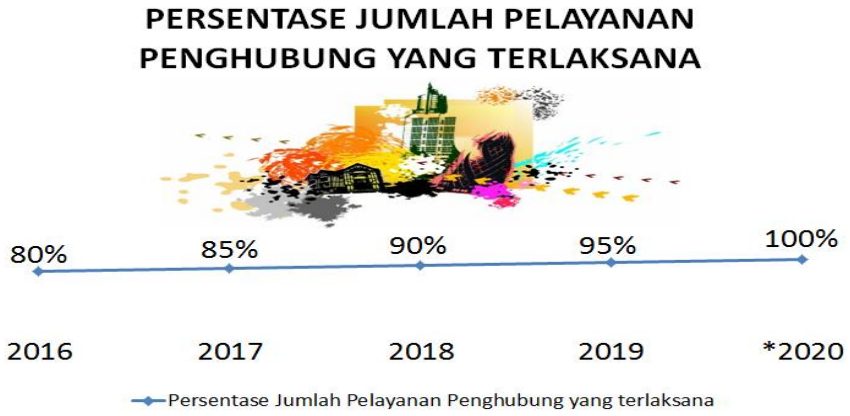

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian kinerja pelayanan penghubung yang terlaksana meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pelayanan penghubung sebesar 80 persen, kemudian tahun 2017 sebesar 85%, 2018 sebesar 90 persen, serta 2019 sebesar 95 persen. Pada tahun 2020 diharapkan pelayanan penghubung sudah paripurna mencapai 100 persen. Salah satu komponen yang paling penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah pelayanan yang salah satunya meliputi pelayanan dan fasilitasi pejabat daerah di Jakarta. Kegiatan pelayanan dilakukan dalam satu kesatuan. Pelayanan Instansi pemerintah adalah pemerintah daerah/pejabat, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga nonstruktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.3.7 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Urusan Kesekretariatan Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (Rb) secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Mental Aparatur, Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan publik.

Grafik II. 80

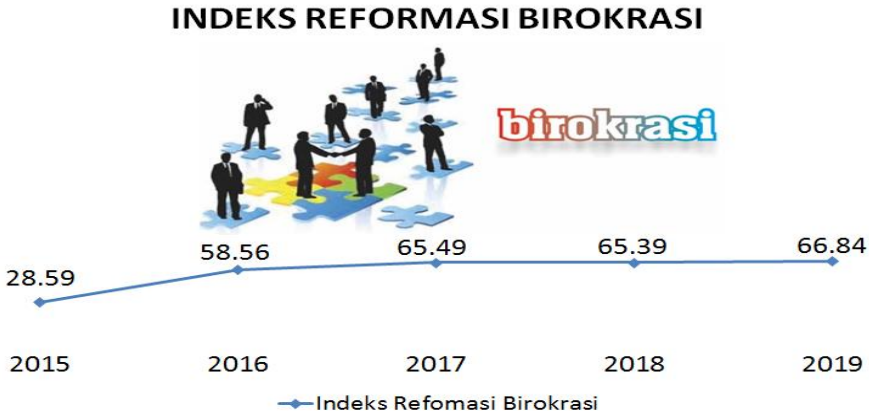

Sumber : Biro Organisasi SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 secara umum meningkat. Pada tahun 2015 nilai Rb hanya sebesar 28,59, namun pada tahun 2019 mencapai 66,84. Nilai pengungkit/proses dari 8 area perubahan sebesar 34,96, sedangkan nilai hasil implementasi (kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kualitas pelayanan publik) sebesar 31,88, sehingga nilai Rb tahun 2019 mencapai 66,84 dengan predikat "B" (Baik). Artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mempu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

2. Urusan Kesekretariatan DPRD

a. Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD

Lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, membentuk Peraturan Daerah bersama-sama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

Grafik II. 81

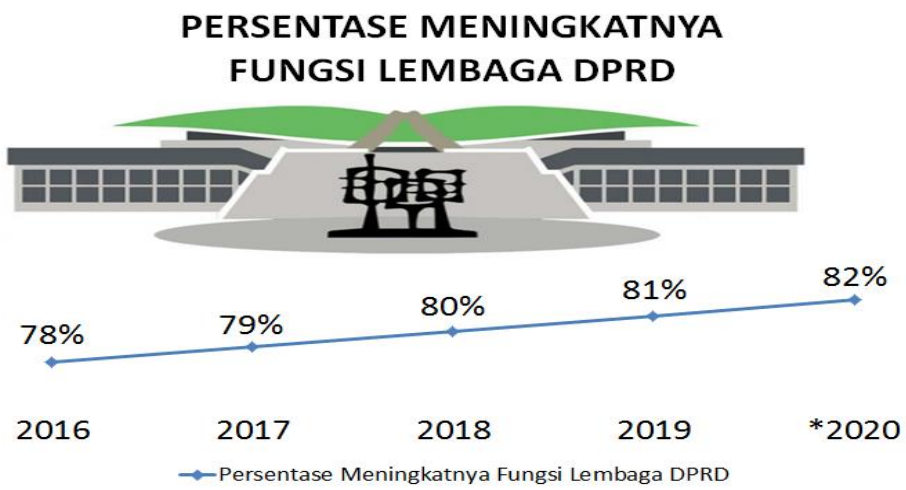

Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase meningkatnya fungsi Lembaga DPRD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 peningkatan fungsi Lembaga DPRD hanya sebesar 78 persen dan meningkat di tahun 2017 sebesar 79 persen. Hal ini semakin terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 80 persen dan 2019 sebesar 81 persen. Artinya semakin meningkatnya inisiasi terhadap rancangan peraturan daerah dan semakin meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga

dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Grafik II.82
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

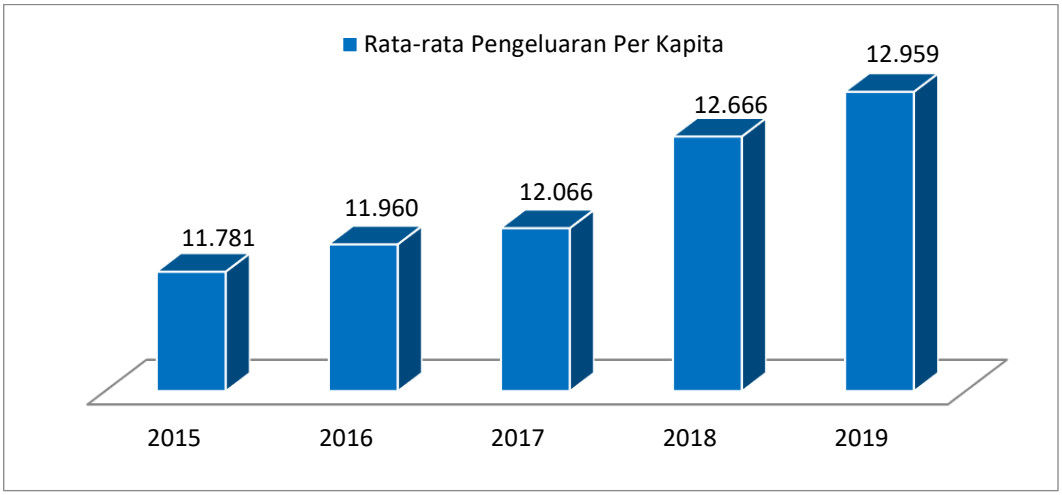

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Hingga pada tahun 2019, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disesuaikan mencapai Rp12.959.000 per tahun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp293.000 per tahun dan menempati peringkat ke lima tertinggi di Indonesia.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. NTP juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel II. 47
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	121,95	120,77	116,43	106,13	103,96
2	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	116,47	119,09	122,09	125,73	129,05
3	Rasio	1,05	1,01	0,96	0,84	0,80

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh kondisi NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan perkembangan yang belum menggembirakan. Sepanjang tahun tahun 2015-2016, menunjukkan indeks yang diterima petani lebih besar daripada indeks yang dibayar

petani. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio NTP mencapai level terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 0,80. Hal ini disebabkan indeks yang diterima petani lebih rendah dari indeks yang dibayar petani, sehingga kondisi ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada dibawah ini dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tahun 2018 yaitu sebesar Rp709.094 dan tahun 2019 menjadi sebesar Rp758.333. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu 2015-2017 adalah menurun. Namun mulai tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan.

Tabel II. 48
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	539.290	615.498	639.949	709.094	758.333
2	Total pengeluaran	1.118.101	1.211.879	1.360.994	1.419.495	1.509.974
3	Rasio	0,482	0,508	0,470	0,500	0,502

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran nonpangan pada setiap kabupaten/kota di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 menunjukkan kondisi dengan angka relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya.

Tabel II.49
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	674.074	1.441.834	0,468
2	Kabupaten Bangka Barat	630.236	1.315.113	0,479
3	Kabupaten Bangka Selatan	584.929	1.302.257	0,449
4	Kabupaten Bangka Tengah	716.195	1.425.107	0,503
5	Kabupaten Belitung	887.524	1.667.213	0,532
6	Kabupaten Belitung Timur	855.459	1.678.367	0,510
7	Kota Pangkalpinang	1.055.919	1.884.819	0,560
	Provinsi	**758.333**	**1.509.974**	**0,502**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Total pengeluaran konsumsi RT pangan dan total pengeluaran serta rasio tertinggi di Kota Pangkalpinang dan terendah di Kabupaten Bangka Selatan.

4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2015-2019 kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 merupakan jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja sebanyak 16.264 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 156. Sementara itu, berbeda dengan potret tahun 2019 jumlah PMA/PMDN yang paling banyak, namun jumlah tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 5.499 dengan rasio sebesar 8,68 sebagaimana disajikan pada tabel berikut,

Tabel II.50
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	8.255	16.264	3.543	4.512	5.499
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	104	156	235	411	633
3	Rasio daya serap tenaga kerja	79,37	104,26	15,07	10,97	8,68

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum baik laut maupun udara, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, Hotel berbintang/non bintang, terminal, bandara, dan pelabuhan.

1. Jumlah Penumpang Angkutan

Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain baik darat, laut dan udara. Penggunaan moda tersebut dapat dilihat dari jumlah penumpang terangkut dalam angkutan sebagaimana tabel di bawah ini,

Tabel II.51
Jumlah Penumpang Angkutan (Jiwa/Orang)

Uraian	Jumlah Penumpang (Orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Angkutan Udara					
b. Embarkasi	1.006.821	1.013.252	1.146.811	1.413.677	1.098.425
b. Debarkasi	995.114	1.004.390	1.117.717	1.411.973	1.101.019
2. Angkutan Laut					
a. Embarkasi	118.266	262.875	136.985	132.326	331.670
b. Debarkasi	108.150	323.337	135.298	141.005	291.830

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan data di atas baik keberangkatan maupun kedatangan angkutan udara cukup berfluktuatif dan mengalami penurunan di tahun 2017. Hal ini menandakan adanya penurunan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang udara melalui indikasi jumlah penumpang yang terus mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Sedangkan angkutan laut pada tahun 2017 mengalami kenaikan baik embarkasi maupun debarkasi, hal ini semakin perlunya penyediaan sarana angkutan laut yang handal dan memadai.

2. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan (km) terhadap jumlah kendaraan (unit). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

Tabel II.52
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Panjang Jalan Provinsi	2. 999,45	1 .499,75	3. 967	3. 967	3. 967
2	Jumlah Kendaraan	875 527	934 354	998.080	1.039.803	1.048.188
3	Rasio	0,0034	0,0016	0,0037	0,0038	0,0039

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas dari tahun 2019-2020 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,0038 dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 0,0039. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan pada tahun 2019 sebanyak 1.039.803 menjadi 1.048.188 atau naik sebanyak 8.385 kendaraan.

3. Penataan Wilayah

Penataan Wilayah dilihat dari Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut,

Tabel II.53
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	233.977 ha	295.068 ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 ha	282.061 ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 ha	360.707 ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 ha	212.677 ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 ha	229.369 ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 ha	250.691 ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 ha	11.840 ha	0,19
Jumlah		**1.186.652 ha**	**1.542.414 ha**	**0,73**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan data diatas Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung dengan rasio sebesar 0,85. Tingginya nilai rasio menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah produktif dikelola dan dikembangkan dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur dapat dilihat dari jumlah pelabuhan laut, udara, terminal, jumlah perbankan, jumlah hotel berbintang/non bintang dalam mendukung aktivitas ekonomi yang berdaya saing.

Tabel II.54
Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah Pelabuhan Udara	2	2	2	2	2
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	10	12	13	17	17
3.	Jumlah Terminal	13	13	13	13	13
4.	Jumlah Perbankan	197	202	257	281	290
5.	Jumlah Hotel Berbintang/ Non Bintang	91	105	170	220	257

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas jumlah pelabuhan udara masih terdapat 2 (dua) bandara yaitu Bandara Depati Amir di Pangkalpinang dan Bandara Hanandjoedin di Belitung. Sedangkan jumlah pelabuhan laut berjumlah 17 pelabuhan dan terdapat 13 terminal. Jumlah Perbankan mengalami kenaikan dari 281 (2018) menjadi 290 (2020). Begitupun dengan jumlah hotel berbintang/non bintang dari 220 (2018) menjadi 257 (2019). Semakin meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjangnya maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdaya saing.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindakan kriminal umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan emosional.

Grafik. 83

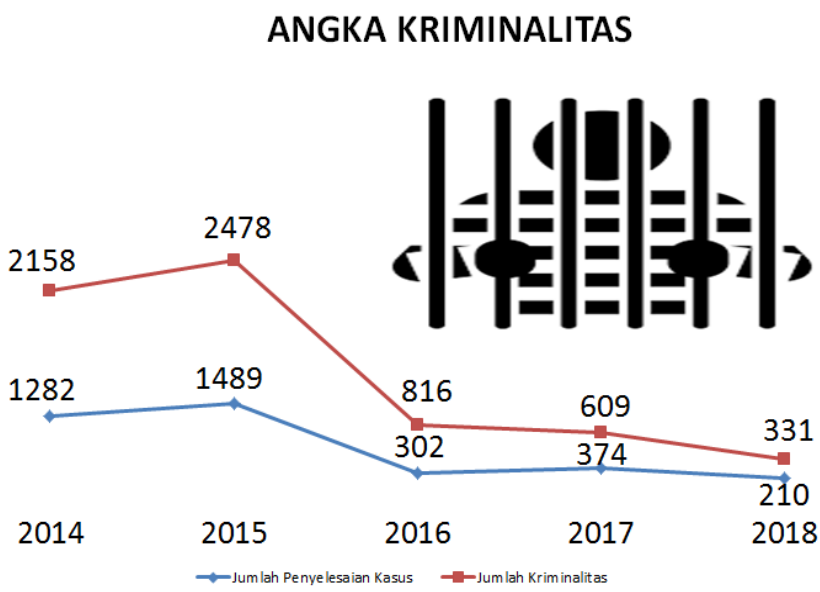

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016 dari 816 kasus menurun menjadi 609 kasus pada 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 45,65 persen atau 331 kasus. Sedangkan data registrasi Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2014-2018 cenderung berfluktuatif. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan.

2. Jumlah Demo

Demonstrasi merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, “agar suara di dengar”. Faktor penyebab demonstrasi kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah ketidakadilan sosial, ketidaksesuaian pendapat, dan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi.

Grafik II. 84

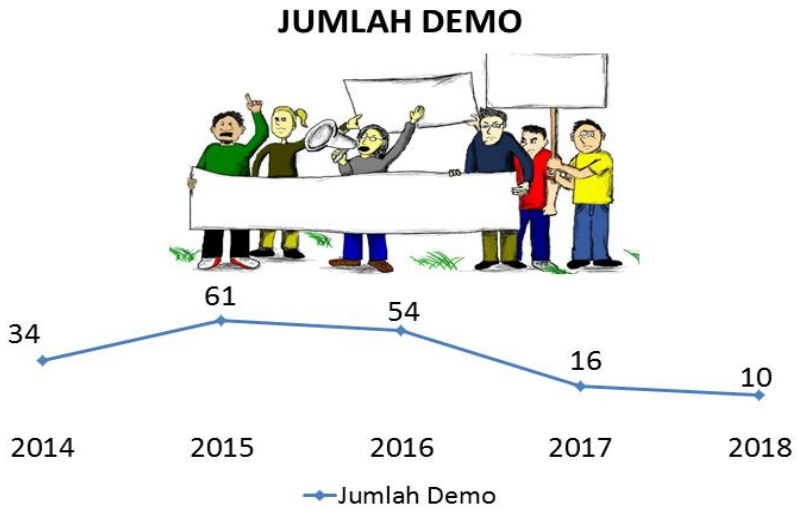

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Demonstrasi di Bangka Belitung di dominasi oleh isu lingkungan dan pertambangan. Jumlah demonstrasi dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dari 60 kasus menjadi 10 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat di Bangka Belitung relatif lebih aman.

3. Jumlah Perda yang mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel II. 55
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2017 jumlah Perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 10 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

4. Kemudahan Perizinan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kini para pelaku usaha PMA-PMDN, baik mikro-kecil, perseorangan maupun non perorangan (Badan Usaha – PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain) kini bisa langsung mendaftarkan usahanya secara online melalui OSS (*Online Single Submission*).

Sebanyak 108 jenis perizinan dan non perizinan dari 15 sektor didelegasikan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 pasal 9, baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu 2014-2018 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan beabalik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar hukum pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Grafik II. 85

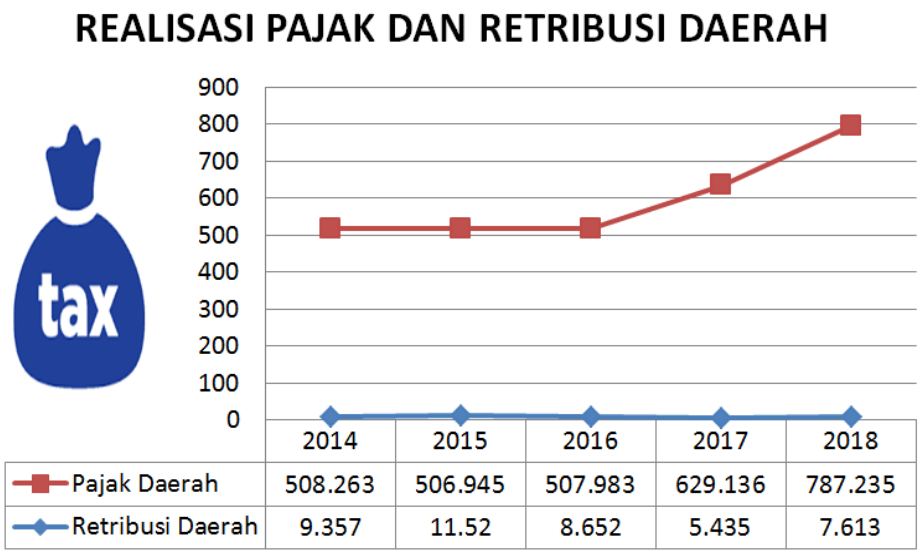

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2017 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp629.136 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp787.235 (dalam juta) atau mengalami kenaikan sebesar 25,12 persen, sedangkan untuk Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2017 jumlah yang diperoleh sebesar Rp5.435 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 40,09 persen menjadi Rp7.613 (dalam juta).

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.56
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per 10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per 10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia< 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya bebanyang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Grafik. II.86
Rasio Ketergantungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2018, angka *dependency ratio* untuk Bangka Belitung sebesar 45,23 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* cukup fluktuatif, namun mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 49,70 yang berarti bahwa semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut pemetaan pencapaian indikator TPB 2014-2018 dengan RPJMD.

Tabel II.57
Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan Terhadap Target/Indikator TPB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase Angka Kemiskinan (Maks 7-8%)	Persen	-	5,40	5,51	5,61	5,72
1.3.	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN (Min 95%)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan JKN Ketenaga kerjaan (62,4 jt formal, 3,5 jt nonformal)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	2,8 juta	Orang	-	-	-	40	252
1.4.	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitas kesehatan	70%	Persen	-	60	60,67	61,33	62
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	Persen	55,62	56,08	56,54	57,01	57,47
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	Persen	56,11	56,67	57,22	57,78	58,33

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak (100%)	Persen	-	60	62,67	68,15	68,52
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memilik akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	Persen	-	-	-	83,56	83,59
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase Rumah layak huni (0%)	Persen	-	5	4,67	4,33	4
	1.4.1.(g) Angka Partisi pasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	94,78%	Persen	96,49	96,82	96,33	96,07	97,71
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat	82,20%	Persen	71,83	69,28	68,57	70,3	73,96
	1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (91,63)	Persen	56,9	44,32	48,63	53,47	57,86
	1.4.1.(j) Persentase pendu duk umur 0-17 tahu dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase pen duduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (77,4%)	Persen	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utama nya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	Persen	100	100	100	100	100
1.5.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tidak Ada Target	Orang					
	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	Lokasi					
2.1.	2.1.1* Prevalensi ketidak cukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Under* nourishment)	Tidak Ada Target						

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (*under weight*) pada anak balita	Prevalensi Kurang Gizi anak balita (17%)	Persen	17	17	17	17	17
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Tidak Ada Target	Persen					
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/ kapita/ hari	8,50%	Persen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.2.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (tidak ada target)	Persen					
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi Stunting pada anak Balita (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2* Prevalensi malnutris (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasar kan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (50%)	Persen	-	20	22	24	26
2.3.	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertain an (rupiah per tenaga kerja) (Tidak Ada Target)	Persen (Rupiah per Tenaga Kerja)	106,84	93,72	109,93	103,37	92,82

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
3.1.	3.1.2* Proporsi perem puan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Proporsi perempu an pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhir nya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (95%)	Persen	95	95	95	95	95
	3.1.2.(a)* Persentase perem puan per nah kawin umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhirnya difasilitas kesehatan	Persentase perem puan pernah kawin umur 15-49 ta hun yang proses melahi kan ter akhirnya di fasilita si kesehatar (85%)	Persen	85	85	85	85	85
3.2.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kema tian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahir an hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kemati an Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hi dup (24 bayi)	Persen	24	24	24	24	24
	3.2.2.(b) Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kab/ ota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (95%)	Persen	95	95	95	95	95
3.3.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang	Kejadian Malaria per 1.000 orang (Tidak Ada Target)						
	3.3.3.(a) Jumlah kab/ kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria (300)						
	3.3.4.(a) Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase kab/ kota yang melaku kan deteksi dini untuk infeksi He patitis B (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memer lukan inter vensi terhadap penyakit tropis yang terabai kan (Filariasis dan Kusta) (Tidak Ada Target)	Persen					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Jumlah Kab/kota dengan eliminasi Kusta (7)	kabupaten/kota	7	7	7	7	7
	3.3.5.(b) Jumlah kab/ kota dengan eli minasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian trans misi tahap I)	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (ber hasil lolos da lam survei penilaian trans misi tahap I) (35)	Kab/Kota					
3.4.	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (5,40%)		-	20	19,03	18,05	17,08
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi tekanan darah tinggi (24,30%)	Persen	-	35	34,27	33,54	32,81
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Prevalensi obe sitas pada pen duduk umur ≥18 tahun (15,40%)	Persen	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.4.2.(a) Jumlah kab/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggaraka upaya kesehatan jiwa (280)	Kab./ Kota					
3.5.	3.5.1(a) Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Tidak Ada Target	Orang					
	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Tidak Ada Target	Orang					
	3.5.1(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	210	Orang	-	-	30	42,86	55,71

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	3.5.1(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	85	Lembaga	-	-	10	15,36	20,71
	3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Tidak Ada Target	Persen					
3.7.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Min 4 jenis 85%)	Persen	85	85	85	85	85
	3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (66%)	Persen	66	66	66	66	66
	3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern (23,50%)	Persen	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) (38)		38	38	38	38	38
	3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) (2,28)		2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
3.8.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	Unmetneed pelayanan kesehatan (9,91%)	Persen	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Tidak Ada Target)	Persen (Jiwa/1000)					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Min 95%)	Persen	-	-	-	60	62,69
3.a.	3.a.1* Persentase me rokok pada pendu duk umur ≥15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
3.b.	3.b.1.(a) Persentase keterse diaan obat dan vak sin di Puskesmas	Tidak Ada Target	Persen					
3.c.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Tidak Ada Target)						
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (84,20%)	Persen					69
	4.1.1.(b) Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B (81%)	Persen					48
	4.1.1.(c) Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B/84,60%	Persen					47,7
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/sederajat (114,09%)	Persen	113,22	111,07	111,75	110,58	111,15
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat (106,94)	Persen	85,52	87,6	84,38	84,53	85,93
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur≥15 tahun	(8,8 tahun)	Tahun	7,76	7,79	7,62	7,78	8,24
4.2.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (77,20%)	Persen	-	28,51	29,13	30,25	39,44
4.3.	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederaja t (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) (36,73%)	Persen	-	20	21,12	22,23	23,35
4.4.	4.4.1. Proporsi remaja dan dewasa dengan keteram pilan teknologi informasi dan komunikasi	Tidak Ada Target	Persen		49,14	55,88	64,4	
4.5.	4.5.1* Rasio angka partisipasi Murni perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi							
	Rasio APM Dan Rasio APK SD/MI		Persen		100,53	100,9	100,92	
	Rasio APM Dan Ra sio APK SMP/ MTS		Persen		104,28	107,59	99,56	
	Rasio APM Dan Rasio APK SMA/MA		Persen		104,02	108,12	105,74	
	Rasio APM Dan Rasio APK PT		Persen		173,03	245,05	134,4	
4.6.	4.6.1(a) Persentase angka melek aksara pen duduk umur ≥15 tahun	Persentase angka melek aksara pen duduk umur ≥15 tahun (96,10%)	Persen	96,1	97,63	97,66	97,79	
	4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun							
	Persentase Angka Melek Aksara Pen duduk Umur 15-24 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Persen		99,88	99,79	99,8	
	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur Umur 15-59 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	Persen		97,98	98,75	98,77	
4.c.	4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifi kat pendidik	Persentase guru SMA yang berserk tifikat pendidik (Tidak Ada Target)	Persen		93	93,4	95,1	96,9

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
5.1.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	16		-	-	1	2	3
5.2.	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi keke rasan terhadap anak perempuan (menurun tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan)		20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terha dap perempuan yang mendapat layanan kompre hensif (70%)	Persen	70	70	70	70	70
5.3.	5.3.1* Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Proporsi Perem puan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perem puan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perem puan pernah kawin umur 25-49 tahun (21)	Tahun	21	21	21	21	21
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Ferti lity*) Rate/ASFR	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility) Rate/ ASFR (38)		38	38	38	38	38
	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederaja t (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
5.5.	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluar ga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Beren cana/KB yang tidak terpenuhi) (9,90%)	Persen	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasa ngan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pa sangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontra sepsi modern (85)	Persen	85	85	85	85	85
5.b.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam (Tidak Ada Target)	Persen					
6.1.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memili ki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (100%)	Persen	64,44	66,67	68,89	87,24	86,88
	6.1.1.(b) Kapasitas prasa rana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (118,6 m3/ dtk; 60 pulau	m3/detik	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
6.2.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasili tas cuci tangan de ngan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasi litas cuci tangan dengan sabun dan air (Tidak Ada Target)	Persen					
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (100%)	persen	76,47	77,94	79,41	84,21	87,11
	6.2.1.(c) Jumlah desa/ kelura han yang melaksana kan Sanitasi Total Berbasis Masyaraka (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Ber basis Masyarakat (STBM) (45.000)	Desa/Kel urahan					
	6.2.1.(d) Jumlah desa/ ke lurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).	Jumlah desa/ kelu rahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembara ngan (SBS) (Tidak Ada Target)	Desa/Kel urahan					
6.4.	6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah (Tidak Ada Target)						

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
6.5.	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	RPDAST	1	1	1	1	1
	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta pening katan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Ha	8.744	8.743	8.744	1.574	4.164
7.1.	7.1.1* Rasio Elektrifikasi	Rasio elektrifikasi (96,60%)	Persen	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita (1.200 KWh)		-	650	686,67	723,33	760
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga (Tidak Ada Target)						
8.1.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita (> 50 juta)		8,22	10,83	13,44	16,06	18,67
	8.1.1.(a) PDB per kapita	PDB per kapita (Tidak Ada Target)						
8.3.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sek tor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sek tor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin (Tidak Ada Target)						
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal (51%)	Persen	15	15	15	15	15
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (Tidak Ada Target)	Persen					
8.5.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja (Tidak Ada Target)	persen					
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarka jenis kelamin dan kelompok umur (Tidak Ada Target)	Persen					
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	Persen					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
8.6.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, beker ja atau mengikuti pelatihan	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak seko lah bekerja atau mengikuti pelatih an (NEET) (Tidak Ada Target)	Persen					
8.9.	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	20 juta	Orang	2.297	3.078	5.037	7.183	8.124
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantar	Tidak Ada Target	Orang	256.393	254.530	295.688	362.992	417.818
8.10.	8.10.1* a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						
	8.10.1* b. Jumlah kantor Bank per 100.000 pendu duk dewasa	Tidak Ada Target						
9.1.	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	4	4	3	3	3
9.2.	9.2.1* Proporsi nilai tam bah sektor industri pengo lahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Proporsi nilai tam bah sektor industri pengola han non migas terhadap PDB dan perka pita (Tidak Ada Target)	Persen					
	9.4.1.(a) Persentase Perubah an Emisi CO2/ Emi si Gas Rumah Kaca	Mendekati 26%	Persen	21,14	21,86	22,18	23,32	24,10
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	(Tidak Ada Target)	Persen					
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	(Tidak Ada Target)	Persen					
10.1.	10.1.1* Koefisien Gini	0,36		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	10.1.1.(a) Persentase pendu duk yang hidup di bawah garis kemis kinan nasional, me nurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	Persen	8	8	8	8	8
10.3.	10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	87	Point	-	81	81,4	81,8	82,2

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
10.4.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	(62,4 jt pekerja formal, 3,5 jt perkerja informal)	Jiwa					
11.1.	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(18,6 juta)	Persen	-	-	-	89,81	90,16
11.2.	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Load Factor	Persen	48	36	36	32	24
11.4.	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metro politan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	(Tidak Ada Target)	kota					
	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	-30%	Indeks Risiko	-30	-30	-30	-30	-30
	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	(Tidak Ada Target)	EWS (titik)					
11.6.	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (80%)	Persen	—	—	—	21,15	34,62
12.4	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	(Tidak Ada Target)	Perusahaan	27	31	33	37	41
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	(150 juta ton)	Ton	-	---	-	---	24.928
12.5.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	(Tidak Ada Target)	Ton	-	-	-	4.899,83	7.705,15
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(Tidak Ada Target)	Orang					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
14.2.	14.2.1 (a) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	(Tidak Ada Target)	Perda					
	14.2.1 (b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	(Tidak Ada Target)	WPP	1	1	1	1	1
14.5.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	(20 juta ha)	Ha	800.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00
14.6.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%	UMKM	87	87	87	87	87
15.1.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	15,45	14,2	13,99	13,5	13,28
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	13	13	13	13	13
15.3.	15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	(5,5 jt Ha)	Persen	8744	8743	8744	1574	4164
16.1.	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	(Tidak Ada Target)	persen					
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	(Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%)	Persen	85	85	85	85	85

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kab/Kota		Skor	55,08	60,69	61	63,65	67,17
	16.6.1.(a) Persentase data dan informasi pengadaan barang/ jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(b) Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang.	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen				90	90
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Persen	8,89	6,67	6,67	4,44	6,67
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	(di atas 12%)	Persen	4,89	5,33	5,78	6,22	6,67
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.8.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	(Tidak Ada Target)	persen					
	17.8.1.(a) Persentase kab 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.18.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(Tidak Ada Target)	Persen					

2.1.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Penerapan dan pencapaian SPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan

SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar untuk Urusan Pendidikan antara lain:

a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;

b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 58
SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	-	37.154 orang/ 62,5%	57.427 Orang/ 81,68%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	-	1.089 orang/ 85,34%	2.239 Orang/ 58,24%
3.	Pendidikan Kejuruan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi	-	0	57.427 Orang/ 81,68%

B. Urusan Kesehatan

SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

2.1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.

2.2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 59
SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	-	47 orang/ 100%	13.930 Orang/ 100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	863 orang/ 100%	330 Orang/ 100%

C. Urusan Pekerjaan Umum

SPM Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 60
SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	0	0	88,33%
2.	Penyediaan pelayan an pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupa ten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota	0	0	89,10%

Realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum ada capaian dikarenakan belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sulit untuk direalisasikan.

D. Urusan Perumahan Rakyat

SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 61
SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,16%	-	-
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0	-	-
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	0	-	-
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	276 Unit/ 100%	0
4.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	-	0	730 Unit/ 100%

Pada tahun 2018 masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga jenis layanan dasar adalah Rumah Layak Huni dan Terjangkau dan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam lampirannya, bahwa ketersediaan rumah layak huni bukan menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan terkait ketersediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Provinsi hanya terbatas pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan 10 – 15 ha dan pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Sedangkan pada tahun 2019 sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada di provinsi.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 62
SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	-	0	-
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	0
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	-	-	22.635 Perda/ 100%

F. Urusan Sosial

SPM Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;

b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga wegara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II. 63
SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk peme nuhan kebutuhan dasar	90,26 %	-	-
2.	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panto sosial skala provinsi	Persentase Panti Sosial skala provinsi yang me laksanakan standar operasi onal pelayanan kesejahtera an sosial	95,12 %	-	-
3	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	99,89 %	-	-
4.	Penyediaan sarana prasarana luar panti skala provinsi	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	100 %	-	-
5.	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	89,35 %	-	-
6.	Evaluasi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	99,00%	-	-
7.	Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	82,36 %	-	-
8.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapat kan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	-	15 Orang/ 75%	18 Orang/ 90%
9.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapat kan rehabilitasi sosial dasar	-	16 Orang/ 106.675	27 Orang/ 112,5%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
		anak telantar di dalam panti			
10.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	-	4 Orang/ 80%	6 Orang/ 100%
11.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabili tasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	0	0
12.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.		Bencana Alam 292 Orang/ 87,43% Bencana sosial 9 Orang/ 100%	18 Orang/100%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal terhadap pelaksanaan pembangunan adalah dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Tahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini yang dilakukan mengetahui sejauhmana capaian target program kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD 2017-2022.

Tabel II.64

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		PENDIDIKAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5.	154,238,220,125	4	40,712,481,825	5	30,207,450,000.00	4	11,834,170,098.00	80.00%	39.00%	4	52,546,651,923.00	80.00%	34.07%	DINAS PENDIDIKAN	
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100		100		100		100				100	-	100.00%			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (%) (bulan)	100	12,078,754,825	100	4,792,704,825	100	2,409,768,942.00	100	2,312,869,253.00	100.00%	100.00%	100	7,105,574,078.00	100.00%	58.83%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	15,392,136,000	100	3,114,876,000	100	1,632,245,705.00	100	1,430,812,600.00	100.00%	87.66%	100	4,545,688,600.00	100.00%	29.53%		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	% aparatur yang meningkat disiplin (%)	100	1,028,800,000	100	198,800,000	0	-	0	-	0.00%	0.00%	100	198,800,000.00	100.00%	19.32%		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)	100	1,977,515,000	100	477,555,000	100	144,534,800.00	100	144,534,800.00	100.00%	100.00%	100	622,089,800.00	100.00%	31.46%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah di atas 85% (dokumen)	12.00	3,102,189,000.00	4	502,189,000.00	2	45,186,000.00	2	44,436,000.00	100.00%	98.34%	6	546,625,000.00	50.00%	17.62%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target di atas 90% (laporan)	30.00	1,705,843,000.00	12	205,843,000.00	6	144,832,000.00	6	144,827,000.00	100.00%	100.00%	18	350,670,000.00	60.00%	20.56%		
		Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Terseleksinya anggota tim lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi (tim)	50.00	37,389,300,300.00	20	11,969,422,000.00	3	675,000,000.00	3	143,121,258.00	100.00%	21.20%	23	12,112,543,258.00	46.00%	32.40%		
		Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/ Maha siswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	Lulusan sekolah menengah yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa (orang)	5359.00	64,915,417,000.00	1984	15,915,417,000.00	737	11,017,598,000.00	737	10,943,126,510.00	100.00%	99.32%	2,721	26,858,543,510.00	50.77%	41.37%		
		Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Jenis Kegiatan Siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Prov. Kep. Babel. (jenis)	7.00	12,491,215,000.00	2	3,291,215,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00%	2	3,291,215,000.00	28.57%	26.35%		
		Pencetakan Majalah Pendidikan	jumlah majalah yang dicetak (paket) (1)	3.00	2,759,550,000.00			1	781,110,000.00	1	766,410,000.00	100.00%	98.12%	1	766,410,000.00	33.33%	27.77%		
		Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	Jumlah triwulan Rekonsiliasi keuangan (triwulan)	16.00	1,397,500,000.00	4	244,460,000.00	4	456,000,000.00	4	296,614,900.00	100.00%	65.05%	8	541,074,900.00	50.00%	38.72%		
		Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasi A (Persen)	60.61	138,529,710,500.00	56.50	25,048,148,500.00	50	42,540,800,000.00	61.4	20,289,900,840.00	122.80%	47.70%		45,338,049,340.00		32.73%	DINAS PENDIDIKAN	
			APK SMA Perempuan (Persen)	46.16		42.44		43.52		43.52									
			Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (Persen)	100.00		100.00		100		100									
			Rata-rata nilai UN SMA (point)	7.30		5.30		6.8		0									
			APK SMA Laki-Laki (%)	41.85		35.52		37.91		37.91									
			APK SMA, (Persen)	43.94		38.88		40.63		39.04									
		Peningkatan Sarana/Prasarana dan	Tersedianya Meubelair SMA (unit)	1066	46,952,956,000.00	166.00	10,952,956,000.00	288	7,092,204,500.00	288	6,817,978,676.00	100%	96.13%	454	17,770,934,676.00	42.59%	37.85%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kelembagaan SMA	jumlah Lab SMA Terbangun (ruang)	28		3.00		3		3		100%		6		21.43%			
			Jumlah RKB SMA Terbangun (ruang)	49		4.00		1		1		100%		5		10.20%			
			jumlah Pagar Sekolah terbangun (unit)	18		6.00		5		5		100%		11		61.11%			
			jumlah Ruang SMA yang Direhab (unit)	27		8.00		6		6		100%		14		51.85%			
			jumlah pengadaan sumur BOR (unit)	18		6.00		6		6		100%		12		66.67%			
			jumlah kantin yang dibangun (unit)	15		3.00		3		3		100%		6		40.00%			
			jumlah wc yang dibangun; (unit)	28		10.00		6		6		100.00%		16		57.14%			
		Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	jumlah lomba kesiswaan SMA (jenis)	12	31,789,143,500.00	12.00	7,441,258,500.00	2	1,273,755,000.00	2	632,266,005.00	100.00%	49.64%	12	8,073,524,505.00	100.00%	25.40%		
		Pengembangan Kurikulum SMA	SMA melaksanakan pendidikan karakter (sekolah)	68	6,403,744,000.00	68.00	2,403,744,000.00	67	397,318,200.00	67	381,858,200.00	100.00%	96.11%	68	2,785,602,200.00	100.00%	43.50%		
		Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa (siswa)	6437	6,761,950,000.00	3937.00	4,250,190,000.00	1100	1,100,000,000.00	1100	1,416,180,000.00	100.00%	128.74%	5037	5,666,370,000.00	78.25%	83.80%		
		Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	jumlah sarana prasarana SMA yang direhab (unit)	106	46,621,917,000.00	28.00		19	18,086,289,000.00	19	18,049,142,959.00	100.00%	99.79%	47	18,049,142,959.00	44.34%	38.71%		
			jumlah sarana prasarana SMA yang dibangun (unit)	100		24.00		50		50		100.00%		74	-	74.00%			
			jumlah pengadaan sarana prasarana SMA (paket)	187		67.00		53		53		100.00%		120	-	64.17%			
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	Persentase SMK Pertaniaan Terkareditasi A (Persen)	100.00	172,371,242,924.00	25.00	68,449,306,424.00	100	46,414,000,000.00	33.3	31,599,002,986.00	33.30%	68.08%	58.3	100,048,309,410.00	58.30%	58.04%	DINAS PENDIDIKAN	
			Rata-rata nilai UN SMA (Poin)	7.00		5.30		6.7		0									
			Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal (Persen)	100.00		100.00		100		100									

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			APK SMK Laki-laki (Persen)	48.19		39.27		41.15		41.15									
			Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) (Persen)	100.00		50.00		100		75									
			Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) (%)	100.00		0.00		100		50									
			Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (%)	100.00		100.00		100		100									
			Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) (%)	100.00		50.00		50		75									
			Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal (%)	100.00		100.00		100		100									
			APK SMK Perempuan (%)	49.07		37.44		40.09		40.09									
			Persentase SMK pariwisata Terakreditasi A (Persen)	100.00		25.00		100		75									
			APK SMK (Persen)	48.62		38.38		40.63		35.48									
			Persentase SMK Kelautan dan perikanaan Terakreditasi l A (%)	100.00		25.00		100		50									
			Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terakreditasi A (Persen)	100.00		100.00		100		100									
			Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) (%)	100.00		33.30		66.66		60									
		Peningkatan Sarana/Prasarana dan	jumlah sarana prasarana SMK (persen)		75,477,383,000.00		9,759,883,000.00	100	9,604,880,000.00	100	7,069,393,081.00	100.00%	73.60%						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kelembagaan SMK	jumlah ruang SMK yang direhab (ruang)	74.00		33.00		8		8		100.00%		41	16,829,276,081.00	55.41%	22.30 %		
			; Terbangunnya RKB SMK (ruang)	57.00		12.00		3		3		100.00%		15		26.32%			
			Tersedianya Meubelair SMK (set)	786.00		206.00		120		120		100.00%		326		41.48%			
			jumlah pengadaan sumur bor (unit)	15.00		0.00		4		0		0.00%		0		0.00%			
			jumlah kantin yang dibangun; (unit)	20.00		3.00		10		10		100.00%		13		65.00%			
			jumlah wc yang dibangun (unit)	10.00		1.00		2		2		100.00%		3		30.00%			
			jumlah USB yang dibangun (unit)	2.00		0.00		1		0		0.00%		0		0.00%			
		Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	jumlah lomba kesiswaan SMK (jenis)	15.00	23,669,218,000.00	7.00	4,495,841,500.00	2	300,000,000.00	2	-	100.00%	0.00%	9	4,495,841,500.00	60.00%			
		Pengembangan Kurikulum SMK	Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK (sekolah) (sekolah)	58.00	9,584,262,000.00	58.00	3,284,262,000.00	57	829,274,100.00	57	686,950,722.00	100.00%	82.84%	58	3,971,212,722.00	100.00 %			
		Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai (siswa) (siswa)	3480.00	3,841,610,000.00	2380.00	2,610,550,000.00	1100	1,100,000,000.00	1100	1,100,000,000.00	100.00%	100.00 %	3480	3,710,550,000.00	100.00 %			
		Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	jumlah pengadaan peralatan praktik (paket)	35.00	59,798,769,924.00	23.00	48,298,769,924.00	0	32,342,637,000.00	21	30,747,149,770.00		95.07%	44	79,045,919,694.00	125.71 %			
			Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun (ruang)	81.00		11.00		8		8		100.00%		19	-	23.46%			
			jumlah toilet yang dibangun (unit)	144.00		54.00		6		6		100.00%		60	-	41.67%			
									44,176,791,100.00						-				
		Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	APK SLB (Persen)	36.00	58,380,656,510.00	85.34	15,261,332,500.00	29.47	14,700,000,000.00	85.34	4,048,232,263.00	289.58%	27.54%		19,309,564,763.00		33.08 %	DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase SLB terakreditasi A (Persen)	100.00		33.30		100		33.3					-				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Jumlah Microbus Operasional SLB (unit)	7.00	21,077,080,000.00	4.00	2,327,080,000.00	1	1,141,310,000.00	1	1,107,942,300.00	100.00%	97.08%	5	3,435,022,300.00	71.43%	16.30 %		
			Jumlah talud yang dibangun (unit)	6.00		1.00		2		2		100.00%		3	-	50.00%			
			jumlah pagar yang dibangun (unit)	6.00				1		1		100.00%		1	-	16.67%			
			jumlah rumah dinas guru yang direhab (unit)	3.00				1		1		100.00%		1	-	33.33%			
		Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	jumlah lomba pendidikan khusus (jenis)	15.00	6,000,000,000.00	9.00	2,255,186,500.00	3	283,222,000.00	3	283,203,600.00	100.00%	99.99%	12	2,538,390,100.00	80.00%	42.31 %		
		Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 (sekolah)	9.00	5,924,170,000.00	9.00	1,642,020,000.00	9	506,084,000.00	9	506,084,000.00	100.00%	100.00 %	9	2,148,104,000.00	100.00 %	36.26 %		
			Jumlah guru SLB yang me ngikuti pelatihan (orang)	300.00		100.00		90		90		100.00%		190	-	63.33%			
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	Terlaksananya pelayanan Pusat Layanan Autis (bulan)	12.00	12,100,079,510.00	12.00	2,757,719,000.00	12	1,626,961,000.00	12	1,350,810,563.00	100.00%	83.03%	12	4,108,529,563.00	100.00 %	33.95 %		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	jumlah sarana prasarana SLB yang direhab (ruang)	19.00	13,279,327,000.00	5.00	6,279,327,000.00	7	2,371,681,000.00	7	2,219,162,200.00	100.00%	93.57%	12	8,498,489,200.00	63.16%	64.00 %		
			jumlah sarana prasarana SLB yang dibangun (ruang)	48.00		39.00		7		7		100.00%		46	-	95.83%			
			jumlah pengadaan sarana prasarana SLB (paket)	88.00		33.00		7		7		100.00%		40	-	45.45%			
									5,929,258,000.00						-				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-	Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50 (Persen)	100.00	58,055,833,247.00	80.00	6,203,960,247.00	95	9,000,000,000.00	80	1,616,679,270.00	84.21 %	17.96%	80	7,820,639,517.00	80.00%	13.47 %	DINAS PENDIDIKAN	
			Persentase Guru Berkua lifikasi S1/D4, (Persen)	100.00		91.26		100		91.5					-				
			Persentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	60.00		60.76		45		63					-				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Mutu PTK SMA	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih (orang)	808.00	31,471,889,643.00	433.00	2,292,284,643.00	150	5,074,660,000.00	347	2,557,530,328.00	231.33%	50.40%	780	4,849,814,971.00	96.53%	15.41%		
			Jumlah guru SMA menerima beasiswa S2 (orang)	120.00		14.00		17		14		82.35%		28	-	23.33%			
			Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMA (dokumen)	5.00		2.00		1		1		100.00%		3	-	60.00%			
		Peningkatan Mutu PTK SMK	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Terlatih (orang)	1144.00	21,288,693,604.00	544.00	2,572,698,604.00	150	1,878,805,000.00	287	847,293,595.00	191.33%	45.10%	831	3,419,992,199.00	72.64%	16.06%		
			Jumlah guru SMK menerima beasiswa S2 (orang)	128.00		7.00		7		7		100.00%		14	-	10.94%			
			Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMK (dokumen)	5.00		2.00		1		1		100.00%		3	-	60.00%			
		Peningkatan Mutu PTK SLB	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Terlatih (orang)	957.00	5,295,250,000.00	357.00	1,338,977,000.00	150	475,755,000.00	140	439,601,355.00	93.33%	92.40%	497	1,778,578,355.00	51.93%	33.59%		
			Jumlah dokumen analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan SLB (dokumen)	5.00		2.00		1		1		100.00%		3	-	60.00%			
									7,429,220,000.00						-				
		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS (Persen)	100.00	344,008,059,269.00	100.00	70,713,110,200.00	100	73,599,845,660.00	100	31,596,948,563.00	100.00%	42.93%	100	102,310,058,763.00	100.00%	29.74%	DINAS PENDIDIKAN	
		Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 bulan (Persen)	100.00	336,000,000.00	100.00	84,000,000.00	100	97,507,092.00	100	7,056,000.00	100.00%	7.24%	100	91,056,000.00	100.00%	27.10%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	persentase pengelolan BOS (%)	100.00	588,000,000.00	100.00	97,600,000.00	100	251,394,649.00	100	133,920,000.00	100.00%	53.27%	100	231,520,000.00	100.00%	39.37%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 bulan (persen)	100.00	2,087,259,306.00	100.00	957,520,606.00	100	633,978,850.00	100	210,480,000.00	100.00%	33.20%	100	1,168,000,606.00	100.00%	55.96%		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 bulan (persen)	100.00	1,014,056,179.00	100.00	433,823,327.00	100	282,018,351.00	100	142,200,000.00	100.00%	50.42%	100	576,023,327.00	100.00%	56.80%		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	700,392,399.00	100.00	300,187,437.00	100	276,939,328.00	100	57,147,000.00	100.00%	20.64%	100	357,334,437.00	100.00%	51.02%		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	769,553,731.00	100.00	322,791,669.00	100	249,690,678.00	100	134,992,350.00	100.00%	54.06%	100	457,784,019.00	100.00%	59.49%		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	740,653,162.00	100.00	318,059,132.00	100	178,136,607.00	100	55,514,000.00	100.00%	31.16%	100	373,573,132.00	100.00%	50.44%		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,172,812,946.00	100.00	498,744,779.00	100	300,042,077.00	100	8,000,000.00	100.00%	2.67%	100	506,744,779.00	100.00%	43.21%		
		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	888,460,816.00	100.00	382,228,395.00	100	238,927,537.00	100	92,906,000.00	100.00%	38.88%	100	475,134,395.00	100.00%	53.48%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,472,043,581.00	100.00	2,855,467,534.00	100	1,599,511,387.00	100	564,450,000.00	100.00%	35.29%	100	3,419,917,534.00	100.00%	52.84%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	5,365,544,275.00	100.00	2,266,945,331.00	100	1,416,035,372.00	100	353,708,100.00	100.00%	24.98%	100	2,620,653,431.00	100.00%	48.84%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,430,316,030.00	100.00	2,921,643,682.00	100	2,115,794,056.00	100	579,882,500.00	100.00%	27.41%	100	3,501,526,182.00	100.00 %	54.45 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,362,605,575.00	100.00	1,842,316,099.00	100	1,103,594,980.00	100	481,000,000.00	100.00%	43.58%	100	2,323,316,099.00	100.00 %	53.26 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	8,542,218,725.00	100.00	3,690,511,495.00	100	2,368,142,359.00	100	98,880,000.00	100.00%	4.18%	100	3,789,391,495.00	100.00 %	44.36 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	13,998,954,247.00	100.00	5,792,178,962.00	100	2,719,981,748.00	100	1,158,199,537.00	100.00%	42.58%	100	6,950,378,499.00	100.00 %	49.65 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,235,427,015.00	100.00	2,564,247,585.00	100	1,925,954,669.00	100	637,687,070.00	100.00%	33.11%	100	3,201,934,655.00	100.00 %	51.35 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,786,188,121.00	100.00	1,923,534,957.00	100	1,235,528,024.00	100	749,296,000.00	100.00%	60.65%	100	2,672,830,957.00	100.00 %	55.84 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkal pinang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,769,081,833.00	100.00	1,108,853,075.00	100	623,916,113.00	100	39,680,000.00	100.00%	6.36%	100	1,148,533,075.00	100.00 %	41.48 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,711,294,394.00	100.00	744,161,882.00	100	477,081,572.00	100	209,155,500.00	100.00%	43.84%	100	953,317,382.00	100.00 %	55.71 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,681,650,120.00	100.00	1,656,161,500.00	100	961,112,687.00	100	270,086,119.00	100.00%	28.10%	100	1,926,247,619.00	100.00 %	52.32 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,475,385,848.00	100.00	1,482,819,328.00	100	1,251,556,278.00	100	341,949,091.00	100.00%	27.32%	100	1,824,768,419.00	100.00 %	52.51 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,569,654,988.00	100.00	693,724,319.00	100	517,974,136.00	100	231,640,000.00	100.00%	44.72%	100	925,364,319.00	100.00 %	58.95 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,271,950,198.00	100.00	1,470,063,456.00	100	727,671,256.00	100	220,495,000.00	100.00%	30.30%	100	1,690,558,456.00	100.00 %	51.67 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,014,508,912.00	100.00	2,705,110,730.00	100	1,386,562,558.00	100	405,235,136.00	100.00%	29.23%	100	3,110,345,866.00	100.00 %	51.71 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,361,346,448.00	100.00	1,496,530,030.00	100	724,596,994.00	100	216,640,000.00	100.00%	29.90%	100	1,713,170,030.00	100.00 %	50.97 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	758,811,003.00	100.00	332,827,736.00	100	273,015,653.00	100	87,257,000.00	100.00%	31.96%	100	420,084,736.00	100.00 %	55.36 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,447,057,859.00	100.00	1,078,430,688.00	100	1,100,205,737.00	100	236,300,000.00	100.00%	21.48%	100	1,314,730,688.00	100.00 %	53.73 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,073,522,434.00	100.00	2,610,104,817.00	100	2,124,074,546.00	100	559,769,230.00	100.00%	26.35%	100	3,169,874,047.00	100.00 %	52.19 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,793,328,912.00	100.00	1,109,826,412.00	100	893,734,069.00	60	326,234,000.00	60.00 %	36.50%	100	1,436,060,412.00	100.00 %	51.41 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,418,537,146.00	100.00	1,478,466,719.00	100	924,420,556.00	60	246,342,600.00	60.00 %	26.65%	100	1,724,809,319.00	100.00 %	50.45 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,195,011,925.00	100.00	842,020,100.00	100	825,689,983.00	60	242,782,729.00	60.00 %	29.40%	100	1,084,802,829.00	100.00 %	49.42 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	8,562,836,848.00	100.00	3,400,756,333.00	100	1,989,869,591.00	100	644,320,000.00	100.00%	32.38%	100	4,045,076,333.00	100.00 %	47.24 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	5,399,869,417.00	100.00	2,133,864,704.00	100	1,182,576,945.00	100	1,182,576,945.00	100.00%	100.00 %	100	3,316,441,649.00	100.00 %	61.42 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,207,686,007.00	100.00	1,785,120,128.00	100	1,066,400,081.00	100	559,800,000.00	100.00%	52.49%	100	2,344,920,128.00	100.00 %	55.73 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,094,116,357.00	100.00	1,748,326,938.00	100	989,678,630.00	100	453,208,664.00	100.00%	45.79%	100	2,201,535,602.00	100.00 %	53.77 %		
		Pengelolaan Dana BOS	Persentase Pengelolaan	100.00		100.0		100		100		100.0	17.62%	100		100.00	54.27		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Dana BOS selama 12 Bulan (%)		5,677,268,201.00	0	2,667,637,744.00		2,347,305,089.00		413,482,362.00	0%			3,081,120,106.00	%	%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,416,913,526.00	100.00	1,565,964,521.00	100	1,452,860,567.00	100	400,102,000.00	100.00%	27.54%	100	1,966,066,521.00	100.00%	57.54%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,195,338,318.00	100.00	1,919,588,670.00	100	1,037,389,533.00	100	336,742,241.00	100.00%	32.46%	100	2,256,330,911.00	100.00%	53.78%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,661,355,922.00	100.00	1,162,458,025.00	100	706,306,863.00	100	321,366,000.00	100.00%	45.50%	100	1,483,824,025.00	100.00%	55.75%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,468,936,692.00	100.00	1,740,626,079.00	100	1,066,828,954.00	100	570,086,900.00	100.00%	53.44%	100	2,310,712,979.00	100.00%	51.71%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,076,724,737.00	100.00	2,503,074,805.00	100	2,023,910,587.00	100	688,045,721.00	100.00%	34.00%	100	3,191,120,526.00	100.00%	52.51%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	5,629,005,203.00	100.00	2,281,534,271.00	100	1,992,509,024.00	100	734,765,826.00	100.00%	36.88%	100	3,016,300,097.00	100.00%	53.58%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,215,741,241.00	100.00	836,813,382.00	100	836,919,753.00	100	310,320,000.00	100.00%	37.08%	100	1,147,133,382.00	100.00%	51.77%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,734,134,760.00	100.00	2,107,760,640.00	100	1,575,185,759.00	100	45,080,000.00	100.00%	2.86%	100	2,152,840,640.00	100.00%	45.47%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,584,635,606.00	100.00	1,635,451,681.00	100	1,253,569,456.00	100	229,388,000.00	100.00%	18.30%	100	1,864,839,681.00	100.00%	52.02%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,914,287,054.00	100.00	1,287,371,684.00	100	684,171,706.00	100	269,980,000.00	100.00%	39.46%	100	1,557,351,684.00	100.00%	53.44%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,311,635,138.00	100.00	1,428,975,251.00	100	834,691,544.00	100	193,928,000.00	100.00%	23.23%	100	1,622,903,251.00	100.00%	49.01%		
		Pengelolaan Dana BOS	Persentase Pengelolaan	100.00		100.0		100		100		100.0	35.03%	100		100.00	55.30		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Dana BOS selama 12 Bulan (%)		1,846,779,738.00	0	841,822,589.00		512,354,369.00		179,460,000.00	0%			1,021,282,589.00	%	%		
		Pengelolaan Dana BOS SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,064,029,383.00	100.00	1,724,651,759.00	100	1,493,719,961.00	100	583,200,000.00	100.00%	39.04%	100	2,307,851,759.00	100.00%	56.79%		
		Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,734,843,316.00	100.00	1,534,311,059.00	100	929,340,605.00	100	579,655,000.00	100.00%	62.37%	100	2,113,966,059.00	100.00%	56.60%		
		Pengelolaan Dana BOS SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	7,826,571,065.00	100.00	3,359,758,071.00	100	1,945,498,436.00	100	751,424,450.00	100.00%	38.62%	100	4,111,182,521.00	100.00%	52.53%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	7,518,392,608.00	100.00	3,111,850,290.00	100	2,851,427,823.00	100	826,102,300.00	100.00%	28.97%	100	3,937,952,590.00	100.00%	52.38%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,230,067,481.00	100.00	2,504,847,433.00	100	1,611,700,636.00	100	778,204,442.00	100.00%	48.28%	100	3,283,051,875.00	100.00%	52.70%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,019,176,891.00	100.00	822,506,445.00	100	558,963,709.00	100	206,661,340.00	100.00%	36.97%	100	1,029,167,785.00	100.00%	50.97%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,089,955,158.00	100.00	1,822,034,064.00	100	1,038,367,146.00	100	565,560,000.00	100.00%	54.47%	100	2,387,594,064.00	100.00%	58.38%		
		Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,290,077,206.00	100.00	563,539,406.00	100	480,709,813.00	100	156,170,850.00	100.00%	32.49%	100	719,710,256.00	100.00%	55.79%		
		Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,591,104,621.00	100.00	680,006,755.00	100	688,929,558.00	100	151,690,000.00	100.00%	22.02%	100	831,696,755.00	100.00%	52.27%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,078,326,245.00	100.00	1,762,739,752.00	100	1,008,845,147.00	100	439,507,000.00	100.00%	43.57%	100	2,202,246,752.00	100.00%	54.00%		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	943,926,941.00	100.00	419,353,685.00	100	411,258,115.00	100	81,280,000.00	100.00%	19.76%	100	500,633,685.00	100.00%	53.04%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,679,060,932.00	100.00	1,140,815,217.00	100	627,413,787.00	100	297,974,200.00	100.00%	47.49%	100	1,438,789,417.00	100.00 %	53.70 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	5,802,812,118.00	100.00	2,483,357,289.00	100	1,930,731,048.00	100	465,483,650.00	100.00%	24.11%	100	2,948,840,939.00	100.00 %	50.82 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,269,041,694.00	100.00	1,454,784,584.00	100	822,673,492.00	100	269,070,000.00	100.00%	32.71%	100	1,723,854,584.00	100.00 %	52.73 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,678,331,524.00	100.00	995,139,506.00	100	975,417,214.00	100	450,720,000.00	100.00%	46.21%	100	1,445,859,506.00	100.00 %	53.98 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	814,645,771.00	100.00	316,057,635.00	100	387,096,832.00	100	129,981,000.00	100.00%	33.58%	100	446,038,635.00	100.00 %	54.75 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,788,061,165.00	100.00	1,070,826,166.00	100	687,285,189.00	100	233,760,000.00	100.00%	34.01%	100	1,304,586,166.00	100.00 %	46.79 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,050,499,108.00	100.00	465,400,000.00	100	525,680,000.00	100	229,920,000.00	100.00%	43.74%	100	695,320,000.00	100.00 %	66.19 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	5,695,522,939.00	100.00	2,177,587,731.00	100	1,643,364,463.00	100	572,367,600.00	100.00%	34.83%	100	2,749,955,331.00	100.00 %	48.28 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,551,109,284.00	100.00	1,023,468,972.00	100	824,668,298.00	100	360,960,000.00	100.00%	43.77%	100	1,384,428,972.00	100.00 %	54.27 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Memba long (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,186,528,876.00	100.00	1,345,438,355.00	100	834,796,665.00	100	213,440,000.00	100.00%	25.57%	100	1,558,878,355.00	100.00 %	48.92 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,404,081,682.00	100.00	1,470,348,993.00	100	780,337,717.00	100	232,871,313.00	100.00%	29.84%	100	1,703,220,306.00	100.00 %	50.03 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS SMAN1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,766,314,915.00	100.00	2,064,348,128.00	100	1,611,025,369.00	100	490,763,000.00	100.00%	30.46%	100	2,555,111,128.00	100.00 %	53.61 %		
		Pengelolaan Dana BOS SMAN2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,918,358,260.00	100.00	2,119,130,625.00	100	1,133,091,696.00	100	576,212,000.00	100.00%	50.85%	100	2,695,342,625.00	100.00 %	54.80 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,779,702,604.00	100.00	1,464,423,817.00	100	837,265,101.00	100	523,200,000.00	100.00%	62.49%	100	1,987,623,817.00	100.00 %	52.59 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,296,179,466.00	100.00	542,091,117.00	100	345,170,430.00	100	133,528,400.00	100.00%	38.68%	100	675,619,517.00	100.00 %	52.12 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	606,978,607.00	100.00	2,995,974,187.00	100	1,375,505,141.00	100	477,440,000.00	100.00%	34.71%	100	3,473,414,187.00	100.00 %	572.25 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	7,829,734,966.00	100.00	2,488,056,821.00	100	1,489,691,553.00	100	862,011,000.00	100.00%	57.87%	100	3,350,067,821.00	100.00 %	42.79 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,184,883,417.00	100.00	1,690,297,101.00	100	1,107,693,972.00	100	142,717,800.00	100.00%	12.88%	100	1,833,014,901.00	100.00 %	43.80 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	2,178,582,138.00	100.00	940,827,975.00	100	517,648,954.00	100	173,971,000.00	100.00%	33.61%	100	1,114,798,975.00	100.00 %	51.17 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,224,777,821.00	100.00	1,809,480,326.00	100	1,488,147,512.00	100	442,301,127.00	100.00%	29.72%	100	2,251,781,453.00	100.00 %	53.30 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%`)	100.00	3,185,022,081.00	100.00	1,399,902,960.00	100	799,955,577.00	100	299,321,147.00	100.00%	37.42%	100	1,699,224,107.00	100.00 %	53.35 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	4,403,945,236.00	100.00	1,894,613,459.00	100	1,098,970,525.00	100	571,287,250.00	100.00%	51.98%	100	2,465,900,709.00	100.00 %	55.99 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	3,229,788,541.00	100.00	1,475,895,043.00	100	770,876,353.00	100	338,776,000.00	100.00%	43.95%	100	1,814,671,043.00	100.00 %	56.19 %		
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,632,054,148.00	100.00	316,381,093.33	100	471,986,831.00	100	97,610,000.00	100.00%	20.68%	100	413,991,093.33	100.00 %	25.37 %		
		Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	6,154,623,380.00	100.00	2,950,704,494.00	100	1,495,962,438.00	100	410,467,573.00	100.00%	27.44%	100	3,361,172,067.00	100.00 %	54.61 %		
		Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 bulan (%)	100.00	5,188,021,389.00	100.00	1,965,642,572.00	100	1,689,860,030.00	100	728,581,500.00	100.00%	43.11%	100	2,694,224,072.00	100.00 %	51.93 %		
		Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Simpang Renggiang (DAK Non Fisik)	Persentase Pengelolaan Dana BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,305,237,554.00	100.00	530,116,928.00	100	302,927,340.00	100	121,220,000.00	100.00%	40.02%	100	651,336,928.00	100.00 %	49.90 %		
		Pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Persentase pengelolaan Da na BOS selama 12 Bulan (%)	100.00	1,156,200,000.00	100.00	-	100	252,800,000.00	100	-	100.00%	0.00%	100	-		0.00%		
		Pengelolaan Dana BOS Afirmasi							-						-				
		Pengelolaan Dana BOS Kinerja							-						-				
									91,204,122,829.00						-				
		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka (%)	90.00	209,220,500,000.00	79.29	38,868,000,000.00	81.97	40,998,600,000.00	80	27,961,178,011.00	97.60 %	68.20%	80	66,829,178,011.00	88.89%	31.94 %	DINAS PENDIDIKAN	
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkal pinang dan Bangka		26.00	72,743,204,840.00	26.00	23,894,223,000.00	26	12,709,451,800.00	26	11,955,024,068.00	100.00%	94.06%	52	35,849,247,068.00	200.00 %	49.28 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	4052.00	7,706,250,000.00	1594.00	2,702,650,000.00	852	1,187,887,614.00	852	889,947,978.00	100.00%	74.92%	2446	3,592,597,978.00	60.37%	46.62%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 2 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	7622.00	14,585,000,000.00	3073.00	5,043,000,000.00	1529	2,045,576,106.00	1529	1,692,604,510.00	100.00%	82.74%	4602	6,735,604,510.00	60.38%	46.18%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	3403.00	6,696,485,000.00	1298.00	2,816,985,000.00	800	1,007,331,200.00	799	893,017,100.00	99.88%	88.65%	2097	3,710,002,100.00	61.62%	55.40%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	2880.00	5,156,700,000.00	1068.00	1,800,700,000.00	713	683,577,280.00	713	679,405,114.00	100.00%	99.39%	1781	2,480,105,114.00	61.84%	48.09%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	1942.00	3,314,615,000.00	709.00	1,044,215,000.00	372	386,848,461.00	365	340,689,603.00	98.12%	88.07%	1074	1,384,904,603.00	55.30%	41.78%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	4211.00	6,576,240,000.00	1665.00	2,198,840,000.00	995	1,042,120,000.00	995	989,988,000.00	100.00%	95.00%	2660	3,188,828,000.00	63.17%	48.49%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	4008.00	6,279,240,000.00	1511.00	2,166,740,000.00	868	824,640,000.00	868	746,248,500.00	100.00%	90.49%	2379	2,912,988,500.00	59.36%	46.39%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	4424.00	7,003,840,000.00	1711.00	2,489,940,000.00	893	1,055,317,242.00	893	1,046,020,451.00	100.00%	99.12%	2604	3,535,960,451.00	58.86%	50.49%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Jumlah siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani (siswa) (siswa)	3368.00	5,288,600,000.00	1262.00	1,802,500,000.00	682	734,600,000.00	682	666,026,500.00	100.00%	90.67%	1944	2,468,526,500.00	57.72%	46.68%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani (siswa)	1290.00	7,686,150,000.00	483.00	2,451,350,000.00	260	983,760,000.00	256	762,000,000.00	98.46%	77.46%	739	3,213,350,000.00	57.29%	41.81%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Sungailiat terlayani (siswa)	5506.00	9,588,283,000.00	2118.00	3,230,283,000.00	1082	1,406,793,526.00	1061	1,025,746,522.00	98.06%	72.91%	3179	4,256,029,522.00	57.74%	44.39%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat, Bangka terlayani (siswa)	3515.00	6,063,450,000.00	1318.00	1,979,550,000.00	691	851,120,000.00	683	603,172,660.00	98.84%	70.87%	2001	2,582,722,660.00	56.93%	42.59%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 mendo Barat, Bangka terlayani (siswa)	1811.00	3,102,500,000.00	579.00	858,600,000.00	321	359,464,000.00	290	333,982,000.00	90.34%	92.91%	869	1,192,582,000.00	47.98%	38.44%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Belinyu, Bangka terlayani (siswa)	2198.00	3,877,620,000.00	744.00	672,562,000.00	417	532,773,720.00	417	497,524,700.00	100.00%	93.38%	1161	1,170,086,700.00	52.82%	30.18%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Jumlah siswa SMK N 1 Bakam, Sungailia terlayani (siswa)	1880.00	3,397,020,000.00	642.00	1,149,020,000.00	335	502,663,760.00	335	498,028,500.00	100.00%	99.08%	977	1,647,048,500.00	51.97%	48.49%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 bakam, kabupaten bangka terlayani (siswa)	1653.00	2,439,100,000.00	509.00	656,000,000.00	281	312,621,690.00	266	312,541,690.00	94.66%	99.97%	775	968,541,690.00	46.88%	39.71%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 belinyu, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	2561.00	4,155,130,000.00	1018.00	1,459,930,000.00	525	570,339,200.00	525	561,874,200.00	100.00%	98.52%	1543	2,021,804,200.00	60.25%	48.66%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendo barat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 Mendo Barat, kabupaten bangka terlayani (siswa)	2673.00	4,218,000,000.00	1041.00	1,454,500,000.00	520	633,096,000.00	513	602,961,000.00	98.65%	95.24%	1554	2,057,461,000.00	58.14%	48.78%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendo barat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 2 Mendo barat, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	1240.00	1,973,880,000.00	419.00	620,680,000.00	288	363,909,000.00	288	361,485,610.00	100.00%	99.33%	707	982,165,610.00	57.02%	49.76%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 merawang, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	2330.00	3,660,724,000.00	863.00	1,154,924,000.00	449	536,483,922.00	449	466,469,721.00	100.00%	86.95%	1312	1,621,393,721.00	56.31%	44.29%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 pemali, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	4039.00	6,406,215,000.00	1601.00	2,180,015,000.00	868	1,005,139,845.00	868	848,112,546.00	100.00%	84.38%	2469	3,028,127,546.00	61.13%	47.27%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 puding besar, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	2657.00	4,091,740,000.00	1006.00	1,325,340,000.00	420	452,440,000.00	420	449,440,000.00	100.00%	99.34%	1426	1,774,780,000.00	53.67%	43.37%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 riau silip, riau silip terlayani (siswa) (siswa)	1891.00	2,970,120,000.00	660.00	927,520,000.00	466	519,951,500.00	466	498,386,500.00	100.00%	95.85%	1126	1,425,906,500.00	59.55%	48.01%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungai Liat, Kabupaten Bangka	jumlah siswa SMAN 1 sungailiat, kabupaten bangka terlayani (siswa) (siswa)	4474.00	7,113,029,000.00	1787.00	2,453,129,000.00	924	1,055,688,000.00	924	984,860,000.00	100.00%	93.29%	2711	3,437,989,000.00	60.59%	48.33%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka		1026.00	1,796,116,000.00	257.00	557,516,000.00	128	414,400,000.00	128	411,848,000.00	100.00%	99.38%	385	969,364,000.00	37.52%	53.97%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Jumlah siswa SLB N Sungailiat terlayani (siswa) (siswa)	589.00	3,532,400,000.00	205.00	1,131,900,000.00	133	531,695,400.00	133	350,923,800.00	100.00%	66.00%	338	1,482,823,800.00	57.39%	41.98%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									32,709,689,266.00						-				
		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat (%)	90.00	90,435,121,000.00	79.29	16,815,200,000.00	81.97	18,280,760,500.00	80	12,614,271,490.00	97.60 %	69.00%	80	29,429,471,490.00	88.89%	32.54 %	DINAS PENDIDIKAN	
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	jumlah sekolah terlayani (sekolah) (sekolah)	13.00	31,535,676,360.00	24.00	10,272,253,000.00	12	5,974,515,599.00	12	5,757,658,417.00	100.00%	96.37%	36	16,029,911,417.00	276.92 %	50.83 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	jumlah siswa SMKN 1 mentok, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	3703.00	6,618,100,000.00	1412.00	2,261,400,000.00	706	1,063,021,000.00	706	751,623,940.00	100.00%	70.71%	2118	3,013,023,940.00	57.20%	45.53 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	jumlah siswa SMKN 1 kelapa, bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	3046.00	5,433,600,000.00	1137.00	1,811,600,000.00	586	824,268,000.00	568	818,788,000.00	96.93 %	99.34%	1705	2,630,388,000.00	55.98%	48.41 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parit tiga, Bangka Barat	jumlah siswa SMKN 1 Parit Tiga, Bangka Barat terlayani (siswa) (siswa)	3521.00	6,250,000,000.00	1326.00	2,226,800,000.00	785	979,505,650.00	785	974,552,138.00	100.00%	99.49%	2111	3,201,352,138.00	59.95%	51.22 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	jumlah siswa SMKN 1 Tempilang, Bangka Barat terlayani (siswa) (siswa)	1769.00	2,978,200,000.00	600.00	869,200,000.00	332	463,440,000.00	309	463,440,000.00	93.07 %	100.00 %	909	1,332,640,000.00	51.38%	44.75 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	jumlah siswa SMKN 1 Simpang Teritip, Bangka Barat terlayani (siswa) (siswa)	1051.00	2,100,420,000.00	192.00	572,420,000.00	128	549,960,500.00	109	530,681,500.00	85.16 %	96.49%	301	1,103,101,500.00	28.64%	52.52 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat terlayani (siswa) (siswa)	3354.00	5,251,600,000.00	1251.00	1,800,200,000.00	679	763,190,000.00	679	762,830,000.00	100.00%	99.95%	1930	2,563,030,000.00	57.54%	48.80 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 kelapa, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	3341.00	5,210,600,000.00	1264.00	1,790,000,000.00	633	746,000,000.00	629	740,900,000.00	99.37%	99.32%	1893	2,530,900,000.00	56.66%	48.57%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 muntok, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	3398.00	5,126,420,000.00	1260.00	1,769,720,000.00	738	708,946,300.00	738	594,658,111.00	100.00%	83.88%	1998	2,364,378,111.00	58.80%	46.12%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 parit tiga, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	2386.00	3,673,200,000.00	844.00	1,156,800,000.00	503	663,706,000.00	503	591,134,000.00	100.00%	89.07%	1347	1,747,934,000.00	56.45%	47.59%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 simpang teritip, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	3277.00	4,969,840,000.00	1254.00	1,632,840,000.00	642	698,106,475.00	642	488,499,500.00	100.00%	69.97%	1896	2,121,339,500.00	57.86%	42.68%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	jumlah siswa SMAN 1 tempilang, kabupaten bangka barat terlayani (siswa) (siswa)	2057.00	3,172,550,000.00	737.00	1,018,950,000.00	407	471,060,000.00	407	460,384,000.00	100.00%	97.73%	1144	1,479,334,000.00	55.61%	46.63%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	jumlah siswa SLB N Muntok, terlayani (siswa) (siswa)	462.00	2,699,100,000.00	160.00	831,800,000.00	85	328,000,000.00	77	318,575,800.00	90.59%	97.13%	237	1,150,375,800.00	51.30%	42.62%		
									14,233,719,524.00						-				
		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan (%)	90.00	207,518,000,000.00	79.29	39,479,000,000.00	81.97	41,795,200,000.00	80	26,136,868,076.00	97.60%	62.54%	80	65,615,868,076.00	88.89%	31.62%	DINAS PENDIDIKAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	jumlah sekolah terlayani (sekolah) (sekolah)	29.00	74,224,980,000.00	55.00	26,910,220,000.00	28	14,599,593,900.00	28	14,242,056,322.00	100.00%	97.55%	83	41,152,276,322.00	286.21%	55.44%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	jumlah siswa SMKN 1 Koba, terlayani (siswa) (siswa)	3234.00	5,549,560,000.00	1205.00	1,676,980,000.00	697	687,123,600.00	540	671,108,000.00	77.47%	97.67%	1745	2,348,088,000.00	53.96%	42.31%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 2 Koba, Bangka Tengah terlayani (siswa) (siswa)	4003.00	6,965,950,000.00	1518.00	2,373,950,000.00	774	952,979,703.00	774	664,610,200.00	100.00%	69.74%	2292	3,038,560,200.00	57.26%	43.62%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang katis, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Simpang katis, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	4050.00	7,076,200,000.00	1543.00	2,431,400,000.00	865	993,372,900.00	865	846,423,250.00	100.00%	85.21%	2408	3,277,823,250.00	59.46%	46.32%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangka lanbaru, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	4408.00	7,650,750,000.00	1764.00	2,700,350,000.00	924	1,172,995,108.00	924	832,463,133.00	100.00%	70.97%	2688	3,532,813,133.00	60.98%	46.18%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungai selan, Bangka Tengah	jumlah siswa SMK N 1 Sungai selan, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	1403.00	2,421,900,000.00	491.00	758,700,000.00	255	386,000,000.00	254	336,975,000.00	99.61%	87.30%	745	1,095,675,000.00	53.10%	45.24%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Koba, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	3565.00	5,504,400,000.00	1352.00	1,844,600,000.00	694	768,351,816.00	689	700,211,736.00	99.28%	91.13%	2041	2,544,811,736.00	57.25%	46.23%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubuk besar, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Lubuk besar, bangka tengah terlayani (siswa) (siswa)	2419.00	3,670,560,000.00	875.00	1,139,360,000.00	552	450,380,000.00	552	425,308,000.00	100.00%	94.43%	1427	1,564,668,000.00	58.99%	42.63%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Namang, Bangka Tengah terlayani (siswa) (siswa)	2335.00	3,572,800,000.00	856.00	1,136,600,000.00	449	506,000,000.00	437	483,001,800.00	97.33%	95.45%	1293	1,619,601,800.00	55.37%	45.33%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru, Bangka Tengah terlayani (siswa) (siswa)	2575.00	4,005,400,000.00	953.00	1,259,000,000.00	528	571,705,700.00	528	571,559,700.00	100.00%	99.97%	1481	1,830,559,700.00	57.51%	45.70%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungai selan, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 1 Sungai Selan, Bangka Tengah terlayani (siswa) (siswa)	1435.00	2,184,700,000.00	500.00	658,100,000.00	325	232,975,300.00	325	191,423,000.00	100.00%	82.16%	825	849,523,000.00	57.49%	38.89%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungai selan, Kabupaten Bangka Tengah	jumlah siswa SMA N 2 Sungai Selan, Bangka Tengah terlayani (siswa) (siswa)	3063.00	4,700,400,000.00	1131.00	1,522,800,000.00	617	643,794,831.00	617	610,322,682.00	100.00%	94.80%	1748	2,133,122,682.00	57.07%	45.38%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	jumlah siswa SMA Laskar Pelangi terlayani (siswa) (siswa)	528.00	11,017,480,000.00	160.00	3,297,480,000.00	96	3,189,164,940.00	25	2,227,705,840.00	26.04%	69.85%	185	5,525,185,840.00	35.04%	50.15%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	jumlah siswa SLB N Koba, Bangka Tengah terlayani (siswa) (siswa)	412.00	2,453,800,000.00	142.00	793,800,000.00	84	372,389,400.00	84	296,025,770.00	100.00%	79.49%	226	1,089,825,770.00	54.85%	44.41%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Toboali, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	4077.00	7,082,900,000.00	1502.00	2,282,100,000.00	787	843,764,000.00	696	777,159,000.00	88.44%	92.11%	2198	3,059,259,000.00	53.91%	43.19%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Payung, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	1896.00	3,372,400,000.00	687.00	1,090,000,000.00	401	475,720,000.00	401	475,720,000.00	100.00%	100.00%	1088	1,565,720,000.00	57.38%	46.43%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	714.00	1,537,500,000.00	210.00	524,350,000.00	121	281,756,000.00	120	278,756,000.00	99.17 %	98.94%	330	803,106,000.00	46.22%	52.23 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	1835.00	3,166,920,000.00	661.00	1,012,520,000.00	345	494,310,000.00	323	494,310,000.00	93.62 %	100.00 %	984	1,506,830,000.00	53.62%	47.58 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang rimba, Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	838.00	1,591,500,000.00	279.00	541,550,000.00	187	249,954,000.00	187	249,954,000.00	100.00%	100.00 %	466	791,504,000.00	55.61%	49.73 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas Bangka Selatan	jumlah siswa SMK N 1 Air Gegas, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	2020.00	3,514,600,000.00	731.00	1,082,200,000.00	406	557,399,600.00	367	557,399,600.00	90.39 %	100.00 %	1098	1,639,599,600.00	54.36%	46.65 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	2903.00	4,859,200,000.00	1198.00	1,625,600,000.00	659	656,401,600.00	659	656,401,600.00	100.00%	100.00 %	1857	2,282,001,600.00	63.97%	46.96 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	1453.00	2,218,100,000.00	508.00	672,700,000.00	301	291,200,000.00	301	290,745,000.00	100.00%	99.84%	809	963,445,000.00	55.68%	43.44 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Kep.Pongok, Bangka Selatan terlayani (siswa (siswa)	1224.00	1,854,060,000.00	420.00	542,060,000.00	225	309,706,000.00	205	307,206,000.00	91.11 %	99.19%	625	849,266,000.00	51.06%	45.81 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Payung, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	3227.00	4,915,975,000.00	1217.00	1,598,775,000.00	621	662,284,000.00	621	635,749,000.00	100.00%	95.99%	1838	2,234,524,000.00	56.96%	45.45 %		
		Peningkatan Fungsi	jumlah siswa SMA N 1 Pulau	967.00		299.0		177		177		100.0	100.00	476		49.22%	45.94		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Besar, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)		1,585,600,000.00	0	484,600,000.00		243,900,000.00		243,900,000.00	0%	%		728,500,000.00		%		
			jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)					177		0					-				
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Simpang Rimba, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	2256.00	3,420,200,000.00	825.00	1,069,400,000.00	428	474,591,980.00	396	457,541,900.00	92.52 %	96.41%	1221	1,526,941,900.00	54.12%	44.64 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 1 Toboali, Bangka Selatan terlayani (siswa) (siswa)	4453.00	6,853,375,700.00	1773.00	2,381,375,700.00	900	1,029,440,000.00	877	954,975,000.00	97.44 %	92.77%	2650	3,336,350,700.00	59.51%	48.68 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SMA N 2 Toboali, bangka selatan terlayani (siswa) (siswa)	2639.00	4,152,244,000.00	986.00	1,380,622,000.00	527	531,677,600.00	527	531,677,000.00	100.00%	100.00 %	1513	1,912,299,000.00	57.33%	46.05 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	jumlah siswa SLB N Toboali, bangka selatan terlayani (siswa (siswa)	465.00	2,722,100,000.00	167.00	837,100,000.00	93	380,352,000.00	93	374,352,000.00	100.00%	98.42%	260	1,211,452,000.00	55.91%	44.50 %		
									33,009,283,978.00						-				
		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur (Persen)	90.00	166,284,800,000.00	79.29	31,271,000,000.00	81.97	33,131,400,000.00	80	20,736,063,387.00	97.60 %	62.59%	80	52,007,063,387.00	88.89%	31.28 %	DINAS PENDIDIKAN	
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	jumlah sekolah terlayani (sekolah) (sekolah)	22.00	53,714,129,040.00	41.00	16,236,835,000.00	21	9,437,253,110.00	21	8,936,833,323.00	100.00%	94.70%	62	25,173,668,323.00	281.82 %	46.87 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	5241.00	9,131,247,500.00	2173.00	3,154,387,500.00	1100	1,272,001,239.00	861	1,130,444,140.00	78.27 %	88.87%	3034	4,284,831,640.00	57.89%	46.92 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjung pandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	4104.00	7,305,137,500.00	1572.00	2,442,837,500.00	802	1,138,395,120.00	800	897,195,221.00	99.75 %	78.81%	2372	3,340,032,721.00	57.80%	45.72 %		
			jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)					802		0				0	-				
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjung pandan, Belitung	jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	2832.00	4,883,060,000.00	1032.00	1,591,100,000.00	532	754,223,548.00	508	691,877,812.00	95.49 %	91.73%	1540	2,282,977,812.00	54.38%	46.75 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Badau, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	2720.00	4,689,025,000.00	1014.00	1,511,025,000.00	523	586,425,850.00	488	518,307,518.00	93.31 %	88.38%	1502	2,029,332,518.00	55.22%	43.28 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Selat nasik, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	949.00	1,714,240,000.00	296.00	538,240,000.00	164	206,214,400.00	164	197,736,347.00	100.00%	95.89%	460	735,976,347.00	48.47%	42.93 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Membalong, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	2648.00	4,050,400,000.00	960.00	1,270,000,000.00	526	613,767,604.00	526	588,785,762.00	100.00%	95.93%	1486	1,858,785,762.00	56.12%	45.89 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Sijuk, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	2663.00	4,093,900,000.00	982.00	6,954,600,000.00	507	547,632,395.00	492	445,620,140.00	97.04 %	81.37%	1474	7,400,220,140.00	55.35%	180.76 %		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa) (siswa)	3664.00	5,702,187,000.00	1414.00	1,924,887,000.00	751	979,807,673.00	751	763,826,005.00	100.00%	77.96%	2165	2,688,713,005.00	59.09%	47.15 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa) (siswa)	4025.00	6,323,237,500.00	1546.00	2,133,137,500.00	741	801,421,034.00	704	686,350,880.00	95.01%	85.64%	2250	2,819,488,380.00	55.90%	44.59%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SLB N Tanjungpandan, Kabupaten Belitung terlayani (siswa) (siswa)	751.00	3,165,100,000.00	271.00	830,500,000.00	146	593,422,800.00	146	540,626,700.00	100.00%	91.10%	417	1,371,126,700.00	55.53%	43.32%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	jumlah siswa SMK 1 MANGGAR, Kabupaten Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	3820.00	6,810,170,000.00	1324.00	1,969,850,000.00	741	1,062,447,500.00	741	1,038,624,000.00	100.00%	97.76%	2065	3,008,474,000.00	54.06%	44.18%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Kelapa kampit, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	2817.00	4,938,000,000.00	1050.00	1,613,760,000.00	541	650,173,440.00	468	597,845,700.00	86.51%	91.95%	1518	2,211,605,700.00	53.89%	44.79%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Dendang, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	1028.00	5,475,040,000.00	308.00	1,467,180,000.00	170	630,140,000.00	163	597,488,400.00	95.88%	94.82%	471	2,064,668,400.00	45.82%	37.71%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	jumlah siswa SMK N 1 Simpang renggiang, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	1062.00	2,250,760,000.00	328.00	608,580,000.00	180	509,736,000.00	154	502,180,000.00	85.56%	98.52%	482	1,110,760,000.00	45.39%	49.35%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Damar, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	1923.00	3,126,960,000.00	678.00	904,560,000.00	355	571,085,994.00	321	538,702,200.00	90.42%	94.33%	999	1,443,262,200.00	51.95%	46.16%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Gantung, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	3462.00	5,272,460,000.00	1282.00	1,661,160,000.00	691	884,837,850.00	691	648,407,228.00	100.00%	73.28%	1973	2,309,567,228.00	56.99%	43.80%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kab Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	2462.00	3,813,740,000.00	900.00	1,206,440,000.00	466	486,158,400.00	457	396,916,250.00	98.07%	81.64%	1357	1,603,356,250.00	55.12%	42.04%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kab Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	3377.00	5,457,040,000.00	1256.00	1,881,240,000.00	692	875,580,000.00	692	850,651,700.00	100.00%	97.15%	1948	2,731,891,700.00	57.68%	50.06%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang pesak, Kabupaten Belitung Timur	jumlah siswa SMA N 1 Simpang pesak, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	2600.00	4,038,090,000.00	954.00	1,263,430,000.00	493	679,068,271.00	475	666,840,436.00	96.35%	98.20%	1429	1,930,270,436.00	54.96%	47.80%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kab Belitung Timur	jumlah siswa SLB N 1 Manggar, Belitung Timur terlayani (siswa) (siswa)	576.00	3,369,240,000.00	204.00	1,011,940,000.00	115	435,998,980.00	115	431,252,520.00	100.00%	98.91%	319	1,443,192,520.00	55.38%	42.83%		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	jumlah siswa SMK N 1 Sijuk, Belitung terlayani (siswa) (siswa)	607.00	1,155,200,000.00	256.00	512,000,000.00	158	515,580,296.00	316	495,451,589.00	200.00%	96.10%	572	1,007,451,589.00	94.23%	87%		
		KESEHATAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1. Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes; 2. Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	1. 90% 2. 90	30,476,920,474.00	1. 73,45% 2. 75,84	11,241,688,893.00	1. 80% 2. 90	7,513,897,294.00	1. 81,042. 77,10	5,851,734,633.00	1. 101,32. 85,67	77.88	1. 154,492. 152,94	17,093,423,526.00	1. 171,662. 169,93	56.09%	DINAS KESEHATAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	13,892,223,855.00	73.45	6,979,576,576.00	80%	2,954,463,639.00	81.04	2,512,257,113.00	101.3	85.03	154.49	9,491,833,689.00	171.66	68.32 %		
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	2,777,283,251.00	73.45	799,668,592.00	80%	529,095,700.00	81.04	482,835,481.00	101.3	91.26	154.49	1,282,504,073.00	171.66	46.18 %		
		Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	949,098,846.00	73.45	154,460,000.00	80%	-	81.04	-	101.3	0	154.49	154,460,000.00	171.66	16.27 %		
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	1,145,337,090.00	73.45	234,443,726.00	80%	-	81.04	-	101.3	0	154.49	234,443,726.00	171.66	20.47 %		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	90	2,135,433,453.00	75.84	315,781,678.00	90	105,170,200.00	77.1	103,541,900.00	85.67	98.45	152.94	419,323,578.00	169.93	19.64 %		
		Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	90	397,591,463.00	75.84	52,361,501.00	90	55,797,000.00	77.1	5,143,600.00	85.67	9.22	152.94	57,505,101.00	169.93	14.46 %		
		Peningkatan kapasitas UPTD Balai Labkes	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	90%	9,179,952,516.00	73.45	2,705,396,820.00	80%	610,252,600.00	81.04	361,350,718.00	101.3	59.21	154.49	3,066,747,538.00	171.66	33.41 %		
		Dukungan manajemen (DAK Non Fisik)	Predikat (Nilai) SAKIP perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi	90	-	75.84	-	90	3,259,118,155.00	77.1	2,386,605,821.00	85.67	73.23	152.94	2,386,605,821.00	169.93	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Kesehatan Masyarakat	1. Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS (%); 2. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup); 3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (per seribu kelahiran hidup); 4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; 5. Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat; 6. Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	1. 100% ; 2. 19/KH 3. 7.12/1000 KH ; 4. 14.15 % ; 5. 90% 6. 80%	42,079,545,647.00	1.57,14% ; 2. 36/KH 3. 7,17/1000 KH 4. 5,62 % ; 5. 89,24 % 6. 100%	6,723,138,377.00	1. 90% ; 2. 21/KH 3. 7.16/1000 KH ; 4. 14.25 % ; 5. 84,46 % 6. 70%	4,829,206,995.00	1. 100% ; 2. 26/KH 3. 7,15/1000 KH ; 4. 4,15 % ; 5. 91,29 % 6. 61,72 %	2,979,058,411.00	1. 111,11 ; 2. 123,81 ; 3. 99,86; 4. 29,12; 5.108,09 ; 6. 92,12	61.69	1.157,14 % ; 2. 62/KH 3.14,32/1000 KH ; 4. 9,77 % ; 5. 180,53% 6. 161,72%	9,702,196,788.00	1. 157,14; 2. 326,32 3. 201,12 ; 4. 67,61; 5. 200,596.202,15	23.06 %	DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	100%	4,685,109,785.00	57.14 %	733,695,600.00	90%	249,332,840.00	100%	221,935,000.00	111.11	89.01	157.14%	955,630,600.00	157.14	20.40 %		
		Upaya peningkatan kesehatan keluarga	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	100%	4,863,884,329.00	57.14 %	1,412,210,064.00	90%	-	100.00%	-	111.11	0	157.14%	1,412,210,064.00	157.14	29.03 %		
		Penurunan kematian ibu	Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup)	19/KH	7,931,906,362.00	36/KH	1,218,233,100.00	21/KH	284,715,260.00	26	243,629,750.00	123.81	85.57	62	1,461,862,850.00	326.32	18.43 %		
		Penurunan angka kematian bayi	Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (per seribu kelahiran hidup)	7,12/1000 KH	6,545,115,314.00	7,17/1000 KH	937,880,188.00	7,16/1000 KH	132,510,000.00	7.15	119,538,600.00	99.86	90.21	14.32	1,057,418,788.00	201.12	16.16 %		
		Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	14.45 %	10,461,715,722.00	5.62 %	1,600,709,385.00	14.25 %	-	4.15 %	-	29.12	0	9.77 %	1,600,709,385.00	67.61	15.30 %		
		Peningkatan penyehatan lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	90%	6,000,487,463.00	89.24 %	683,902,290.00	84.46 %	120,500,560.00	91.29 %	103,438,322.00	108.09	85.84	180.53%	787,340,612.00	200.59	13.12 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	80%	1,591,326,672.00	100%	136,507,750.00	67%	42,148,335.00	61.72 %	20,825,000.00	92.12	49.41	161.72%	157,332,750.00	202.15	9.89%		
		Pembinaan kesehatan keluarga (DAK non fisik)	Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup)	0	-	0	-	21/KH	897,000,000.00	26	536,731,100.00	123.81	59.84	49	536,731,100.00	231.58	0		
		Penyehatan lingkungan (DAK Non Fisik)	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	0	-	0	-	84.46 %	520,000,000.00	91.29 %	245,470,650.00	108.09	47.21	91.29%	245,470,650.00	0	0		
		Upaya kesehatan kerja dan olahraga (DAK non fisik)	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	0	-	0	-	67%	600,000,000.00	61.72 %	379,734,589.00	92.12	63.29	61.72%	379,734,589.00	0	0		
		Pembinaan gizi masyarakat (DAK non fisik)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0	-	0	-	14.25 %	876,000,000.00	4.15 %	235,413,800.00	29.12	26.87	4.15 %	235,413,800.00	0	0		
		Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (DAK non fisik)	Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS	0	-	0	-	90%	1,107,000,000.00	100.00%	872,341,600.00	111.11	78.8	100.00%	872,341,600.00	0	0		
		Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	14.45 %	10,461,715,722.00	5.62 %	1,600,709,385.00	14.25 %	-	4.15 %	-	29.12	0	9.77 %	1,600,709,385.00	67.61	15.30 %		
		Peningkatan penyehatan lingkungan	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	90%	6,000,487,463.00	89.24 %	683,902,290.00	84.46 %	120,500,560.00	91.29 %	103,438,322.00	108.09	85.84	180.53%	787,340,612.00	200.59	13.12 %		
		Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	80%	1,591,326,672.00	100%	136,507,750.00	67%	42,148,335.00	61.72 %	20,825,000.00	92.12	49.41	161.72%	157,332,750.00	202.15	9.89%		
		Pembinaan kesehatan keluarga (DAK non fisik)	Jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (per kelahiran hidup)	0	-	0	-	21/KH	897,000,000.00	26	536,731,100.00	123.81	59.84	49	536,731,100.00	231.58	0		
		Penyehatan lingkungan (DAK Non Fisik)	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	0	-	0	-	84.46 %	520,000,000.00	91.29 %	245,470,650.00	108.09	47.21	91.29%	245,470,650.00	0	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% ; 2. Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko ; 3. Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria ; 4. Persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD , zoonosis) ;	1. 100% 2. <10% ; 3. 100% ; 4. 90% 5.37.50 % ; 6. 90% 7. 100% ; 8. 100%	29,202,776,971.00	1. 89,69 % 2. 0,39% ; 3. 85,71 % ; 4. 100% 5.38,56% ; 6. 125,43% 7. 100% ; 8.97,71%	4,779,320,378.00	1. 85,70 % 2. <10% ; 3. 100% ; 4. 88% 5.27,5 % ; 6. 87% 7. 90% ; 8. 90%	25,509,569,175.00	1. 84,57 % 2. 0,31% ; 3. 85,71 % ; 4. 100 % 5. 48,97 % ; 6. 124% 7. 100% ; 8. 89,95 %	23,143,441,636.00	1. 98,68 2. 3,10 ; 3. 85,71 ; 4. 113,64 5. 169,75 ; 6. 142,53 7. 111,11 ; 8. 99,94	90.72	1. 174,26% 2. 0,70 % ; 3. 171,42% ; 4. 200 % 5. 85,24 % ; 6. 249,43% 7. 200% ; 8. 187,66%	27,922,762,014.00	1. 174,26 2. 10,01 ; 3. 171,42 ; 4. 222,22 5. 227,31; 6. 277,14 7. 200 ; 8.187,66	95.62 %	DINAS KESEHATAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara ; 6. Presentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya 7. Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa ; 8. Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	1. 100% 2. <10% ; 3. 100% ; 4. 90% 5.37.50% ; 6. 90% 7. 100% ; 8. 100%	29,202,776,971.00	1. 89,69% 2. 0,39% ; 3. 85,71% ; 4. 100% 5.38,56% ; 6. 125,43% 7. 100% ; 8.97,71%	4,779,320,378.00	1. 85,70% 2. <10% ; 3. 100% ; 4. 88% 5.27,5% ; 6. 87% 7. 90% ; 8. 90%	25,509,569,175.00	1. 84,57% 2. 0,31% ; 3. 85,71% ; 4. 100% 5. 48,97% ; 6. 124% 7. 100% ; 8. 89,95%	23,143,441,636.00	1. 98,68 2. 3,10 ; 3. 85,71 ; 4. 113,64 5. 169,75 ; 6. 142,53 7. 111,11 ; 8. 99,94	90.72	1. 174,26% 2. 0,70% ; 3. 171,42% ; 4. 200% 5. 85,24% ; 6. 249,43% 7. 200% ; 8. 187,66%	27,922,762,014.00	1. 174,26 2. 10,01 ; 3. 171,42 ; 4. 222,22 5. 227,31; 6. 277,147. 200 ; 8.187,66	95.62 %		
		Pencegahan dan pengendlaian penyakit menular TB	Persentase Kab/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%	100%	1,149,918,784.00	89.69 %	269,366,100.00	85.70 %	125,995,000.00	84.57 %	107,201,550.00	98.68	85.08	174.26%	376,567,650.00	174.26	32.75 %		
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko	<10%	3,273,590,030.00	0.39 %	702,108,166.00	<10%	-	0.31 %	-	3.1	0	0.70 %	702,108,166.00	10.01	702,108,176.00		
		Peningkatan pengendalian penyakit malaria	Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	100%	1,140,979,086.00	85.71 %	169,440,520.00	100%	23,216,000.00	85.71 %	22,530,000.00	85.71	97.05	171.42%	191,970,520.00	171.42	16.83 %		
		Penanganan penyakit menular lainnya (hapatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	Persentase penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD , zoonosis)	90%	4,354,828,881.00	100.00%	803,871,650.00	88%	75,337,500.00	100.00%	46,060,500.00	113.64	61.14	200.00%	849,932,150.00	222.22	19.52 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	37.50 %	524,031,259.00	38.56 %	143,976,400.00	27.50 %	-	46.68 %	-	169.75	0	85.24%	-	227.31	0		
		Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes mellitus)	Presentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya	90%	1,230,885,842.00	125%	289,638,647.00	87%	83,236,725.00	124%	61,689,400.00	142.53	74.11	249.43%	351,328,047.00	277.14	28.54 %		
		Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100%	4,103,671,172.00	100%	465,858,771.00	90%	45,161,500.00	100.00%	42,614,780.00	111.11	94.36	200.00%	508,473,551.00	200	12.39 %		
		Peningkatan survey lan imunisasi dan kesehata situasi khusus	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	100%	13,424,871,917.00	97.71 %	1,935,060,124.00	90%	277,677,450.00	89.95 %	155,883,509.00	99.94	56.14	187.66%	2,090,943,633.00	187.66	15.58 %		
		Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	0	-	0	-	90%	80,000,000.00	89.95 %	80,000,000.00	99.94	100	89.95%	80,000,000.00	0	0		
		Pencegahan dan pengendalian penyakit (DAK Non Fisik)	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	0	-	0	-	90%	1,625,370,000.00	89.95 %	705,499,158.00	99.94	43.41	89.95%	705,499,158.00	0	0		
		Peningkatan survey lans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus Covid-19	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	0	-	0	-	90%	23,173,575,000.00	89.95 %	21,921,962,739.00	99.94	94.6	89.95%	21,921,962,739.00	0	0		
		Program Pelayanan Kesehatan	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional ; 3. Persentase kepesertaan JKN ; 4. Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 70% ; 4. 100%	124,405,126,587.00	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 81,43 % ; 4. 98,44 %	33,482,190,298.00	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 67% ; 4. 85%	29,147,452,750.00	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 81,54 % ; 4. 98,44 %	24,982,785,426.00	1. 100 ; 2. 100 ; 3. 121,40 ; 4. 115,81	85.71	1. 47 kec ; 2. 10 RSUD ; 3. 162,77% ; 4. 196,88%	58,464,975,724.00	1. 100 ; 2. 100 ; 3. 232,53 ; 4. 196,88	47.00 %	DINAS KESEHATAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	47 kec	7,286,416,538.00	47 kec	3,408,328,094.00	47 kec	165,929,500.00	47 kec	133,538,931.00	100	80.48	47	3,541,867,025.00	100	48.61 %		
		Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10 RSUD	7,971,855,206.00	10 RSUD	1,530,618,957.00	10 RSUD	729,173,750.00	10	485,932,451.00	100	66.64	10	2,016,551,408.00	100	25.30 %		
		Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	70%	106,914,637,362.00	81.43 %	28,290,003,257.00	67.00 %	27,041,504,500.00	81.34 %	23,675,980,144.00	121.4	87.55	162.77%	51,965,983,401.00	232.53	48.61 %		
		Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	100%	2,232,217,481.00	98.44 %	253,239,990.00	85%	63,096,000.00	98.44 %	9,813,900.00	115.81	15.55	196.88%	263,053,890.00	196.88	11.78 %		
		Pelayanan dasar (DAK Fisik)	Jumlah jenis belanja barang/jasa	0	-	0	-	2 jenis	1,147,749,000.00	0	677,520,000.00	66.67	59.03	0.00 %	677,520,000.00	0	0		
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) ; 2. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial ; 3. Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	1. 6182 orang ; 2. 98% ; 3. 94%	18,329,472,587.00	1. 2049 orang; 2. 96,68 % ; 3. 82,05 %	3,977,423,963.00	1. 4746 orang ; 2. 96% ; 3. 92%	2,102,491,250.00	1. 2079 orang ; 2. 96,88 % ; 3. 87,10 %	1,925,885,127.00	1. 43,81 ; 2. 100,92 ; 3. 94,67 %	91.6	1. 4128 orang ; 2. 193,56% ; 3. 169,15%	5,903,309,090.00	1. 66,77 ; 2. 197,51 ; 3.179,95	32.21	DINAS KESEHATAN	
		Pengembangan sumber daya manusia kesehatan /SDMK	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	6182 orang	9,835,982,777.00	2049	2,620,829,200.00	4746 orang	1,953,293,750.00	2079	1,780,100,450.00	43.81	91.13	4128	4,400,929,650.00	66.77	44.74 %		
		Peningkatan pelayanan kefarmasian	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	98%	7,348,069,263.00	97%	1,123,204,464.00	96%	55,489,000.00	96.88 %	55,145,540.00	100.92	99.38	193.56%	1,178,350,004.00	197.51	16.04 %		
		Peningkatan ketersedian alkes dan PKRT	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	94%	1,145,420,547.00	82.05 %	233,390,299.00	92%	9,677,500.00	87.10 %	9,625,000.00	94.67	99.46	169.15%	243,015,299.00	179.95	21.22 %		
		Kefarmasian (DAK non Fisik)	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	0	-	0	-	96%	84,031,000.00	96.88 %	81,014,137.00	100.92	96.41	96.88%	81,014,137.00	0	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	3400 sampel	6,391,164,839.00	3825	1,796,976,408.00	2600 sampel	5,050,043,252.00	1. 662 sampel; 2. 27385 sampel	4,185,046,717.00	1. 25,46; 2. 684,63	82.87	4,307	5,982,023,125.00	126.68	93.60 %	DINAS KESEHATAN	
		Peningkatan dan pengem bangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	3400 sampel	6,391,164,839.00	3825	1,796,976,408.00	2600 sampel	1,045,998,252.00	662	669,492,397.00	25.46	64.01	4,307	2,466,468,805.00	126.68	38.59 %		
		Peningkatan pelayanan Lab PCR untuk Covid-19	Jumlah pemerksaan sampel covid-19	0	-	0	-	4000 sampel	4,004,045,000.00	27385	3,515,554,320.00	684.63	87.8	27,385	3,515,554,320.00	0	0		
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan															RSJ	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan (orang)	1.893orang	29,556,336,000.00	703	6,119,399,112.00	370	3,349,541,072.00	370	2,819,858,546.00	100.00%	84.19	1073	8,939,257,658.00	56.68%	30.24		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan (orang)	1,893	56,892,150,000.00	703	2,407,766,584.00	370	131,920,000.00	370	78,044,224.00	100.00%	59.16	1073	2,485,810,808.00	56.68%	4.37		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	25 dokumen	2,110,000,000.00	10	61,279,375.00	5	30,640,000.00	5	13,290,000.00	100.00%	43.37	15	74,569,375.00	60.00%	3.53		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (dokumen)	10 dokumen	589,960,120.00	4	43,917,550.00	2	30,805,000.00	2	15,930,000.00	100.00%	51.71	6	59,847,550.00	60.00%	10.14		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	450 orang	53,552,444,500.00	165	1,393,405,233.00	90	264,229,046.00	90	183,430,264.00	100.00%	69.42	255	1,576,835,497.00	56.67%	2.94		
		Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA	Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa , NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapat pelayanan medis kejiwaan .															RSJ	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	Jumlah Porsi makan minum pasien, petugas khusus dan tenaga penunjang pelayanan kesehatan	1224 porsi	12,636,569,040.00	370	9,693,561,500.00	240	7,346,887,716.00	240	6,710,168,775.00	100.00%	91.33	610	16,403,730,275.00	49.84%	129.81		
		Penilaian Akreditasi	Sertifikat dari KARS	5 dok	2,419,000,000	2	361,392,725.00	1	302,000,000	1	142,815,730	100%	47.29	3	504,208,455	60.00%	20.84		
		Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)	412 kali	306,000,000.00	80	26,949,725.00	0	-	0	-	0.00%	0	80	26,949,725.00	19.42%	8.81		
		Penyusunan Clinical Pathway	Jumlah Dokumen clinical pathway	2 dok	150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00%	0	0	-	0.00%	0		
		Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial (kali)	30375 kali	4,860,000,000.00	10,500	113,400,000.00	6000	113,400,000.00	6000	104,093,550.00	100.00%	91.79	16,500	217,493,550.00	54.32%	4.48		
		Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	20 kali	252,000,000.00	10	52,738,370.00	0	-	0	-	0.00%	0	10	52,738,370.00	50.00%	20.93		
		Penyusunan Panduan Praktis Klinis	Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktis Klinis	15 dok	149,000,000.00	5	25,540,616.00	0	-	0	-	0.00%	0	5	25,540,616.00	33.33%	17.14		
		Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA																RSJ	
		Penjangkauan Bebas Pasung	Jumlah ODGJ yang bebas pasung	300 orang	2,040,000,000.00	22	93,744,317.00	0	-	0	-	0.00%	0	22	93,744,317.00	7.33%	4.6		
		Discharge Planning ODGJ	Jumlah Kunjungan keluarga pasien	5 kunjungan	3,361,999,000.00	2	129,782,657.00	1	30,000,000.00	1	19,760,000.00	100.00%	65.87	3	149,542,657.00	60.00%	4.45		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa																RSJ	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan yang dibeli di RSJ	5 paket	5,124,988,000.00	2	1,673,365,106.00	1	-	0	-	0.00%	0	2	1,673,365,106.00	40.00%	32.65		
		Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit yang dimusnahkan	5 tahun	95,700,000.00	1	1,770,000.00	1	-	0	-	0.00%	0	1	1,770,000.00	20.00%	1.85		
		Pengembangan SIMRS	Jumlah jaringan SIMRS yang dikembangkan	5 paket	1,000,000,000.00	2	132,276,305.00	1	75,000,000.00	1	63,642,300.00	100.00%	84.86	3	195,918,605.00	60.00%	19.59		
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang terawat di RSJ	5 tahun	4,736,030,000.00	2	1,660,906,669.00	1	1,100,000,000.00	1	1,087,044,384.00	100.00%	98.82	3	2,747,951,053.00	60.00%	58.02		
		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara di RSJ	91 pcs	500,000,000.00	31	161,786,891.00	18	50,000,000.00	8	49,625,500.00	44.44 %	99.25	39	211,412,391.00	42.86%	42.28		
		Pengadaan Perleng kapan Rumah Tangga Rumah Sakit (da pur,ruang pasien, laun dry, ruang tunggu dll	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	5 paket	1,200,000,000.00	2	304,467,600.00	1	50,000,000.00	1	37,618,000.00	100.00%	75.24	3	342,085,600.00	60.00%	28.51		
		Pemeliharaan rutin/ berkala ruang rawat inap rumah sakit (VV IP, VIP, Kelas I,II dan III	Jumlah ruang rawat inap yang terawat di RSJ	5 paket	1,802,000,000.00	2	385,526,000.00	1	50,000,000.00	1	49,849,933.00	100.00%	99.7	3	435,375,933.00	60.00%	24.16		
		Pengujian dan kalib rasi alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi di RSJ	170 pcs	494,720,000.00	68	185,476,880.00	34	89,900,000.00	34	89,141,616.00	100.00%	99.16	102	274,618,496.00	60.00%	55.51		
		Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit	5 tahun	593,080,000.00	2	201,600,100.00	1	117,700,000.00	1	117,378,747.00	100.00%	99.73	3	318,978,847.00	60.00%	53.78		
		Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	Pengembangan RSJD yang terencana	1 paket	1,400,000,000.00	0	-	1	9,821,800.00	1	9,821,800.00	100.00%	100	1	9,821,800.00	100.00 %	0.7		
		Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	Jumlah media promosi pelayanan kesehatan jiwa	22 kali	746,000,000.00	8	98,499,250.00	0	-	0	-	0.00%	0	8	98,499,250.00	36.36%	13.2		
		Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah Alat Kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai standar akreditasi	6 paket	6,600,000,000.00	2	1,282,195,105.00	1	974,725,258.00	1	970,509,358.00	100.00%	99.57	3	2,252,704,463.00	50.00%	34.13		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD																RSJ	
		Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	5 tahun	31,530,000,000.00	2	12,506,853,274.00	1	11,000,000,000.00	1	9,079,927,658.54	100.00%	82.54	3	21,586,780,933.00	60.00%	68.46		
		Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan yang berkualitas	5 tahun	10,970,000,000.00	2	1,452,957,950.00	1	2,543,000,000.00	1	1,352,601,633.00	100.00%	53	3	2,805,559,583.00	60.00%	25.57		
		Program peningkatan pelayanan pemerintah	Persentase pelayanan sesuai spesifikasi RS kelas B															RSUP	
		Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	90%	9,931,668,112.00	80	11,987,958,550.00	90%	9,931,668,112.00	84.93	8,379,041,881.00	94.37	84.37	184.37	20,367,000,431.00	204.86	205.07%		
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah paket pemenuhan sarana dan prasarana kantor	14 paket	3,676,273,545.00	85	2,142,520,000.00	14 paket	3,676,273,545.00	18	3,594,808,891.00	18	97.78	18	5,737,328,891.00	128.57	156.06%		
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	125 orang	166,110,596.00	80	768,036,000.00	125 orang	166,110,596.00	18	166,110,596.00	14.4	100	18	934,146,596.00	100	562.36%		
		Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan	3 laporan	-	80	6,800,000.00	3 laporan	-	0	-	0	0	0	6,800,000.00	0	0.00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	3 laporan	15,245,000.00	80	2,950,000.00	3 laporan	15,245,000.00	3	15,135,000.00	3	99.28	3	18,085,000.00	100	118.63%		
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan promosi	6 fasilitas kesehatan	250,123,500.00	80	132,460,000.00	6 fasilitas kesehatan	250,123,500.00	5	248,656,800.00	5	99.41	5	381,116,800.00	83.33	152.37%		
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah SDM yang sesuai kelas B	85%	14,336,300,000.00	85	12,910,200,000.00	85%	14,336,300,000.00	266.39	26,734,438,000.00	389.56	743.85	234.82	39,644,638,000.00	335.46	276.53%		
		Program Pelayanan Teknis Keperawatan																RSUP	
		Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Keperawatan	Jumlah dokumen standar sarana dan prasarana keperawatan	11 Dokumen	3,000,000.00	0	-	11 Dokumen	3,000,000.00	100	3,000,000.00	100	100	100.00%	3,000,000.00	100	100.00%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan SOP Keperawatan	Jumlah paket dokumen SOP	1 paket	900,000.00	0	-	1 paket	900,000.00	100	900,000.00	100	100	100.00%	900,000.00	100	100.00 %		
		Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan	Jumlah paket dokumen SAK	1 paket	900,000.00	0	-	1 paket	900,000.00	100	900,000.00	100	100	100	900,000.00	100	100.00 %		
		Penyusunan Urain Tugas Keperawatan	Jumlah dokumen uraian tugas keperawatan	15 dok	-	0	-	15 dok	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Peningkatan Etika Keperawatan	Jumlah tenaga keperawatan yang berkompeten	90 orang	30,868,695.00	80	52,016,000.00	90 orang	30,868,695.	20 org	30,868,695.00	100	100	100.00%	82,884,695.	100	268.51 %		
		Penyusunan Pedoman Pelayanan Keperawatan	Jumlah dokumen pedoman keperawatan	11 dok	6,900,000.00	80	-	11 dok	6,900,000.00	11 dok	4,093,650.00	45.62	59.33	139.30%	4,093,650.00	199	59.33 %		
		Penyusunan Program Kerja Pelayanan Keperawatan	Jumlah dokumen program kerja	11 dokumen	1,800,000.00	0	-	11 dokumen	1,800,000.00	11 dokumen	1,800,000.00	100	100	100.00%	1,800,000.00	100	100.00 %		
		Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	Jumlah dokumen program pengembangan dan peningkatan sumber daya keperawatan	7 dokumen	-	80	7,500,000.00	7 dokumen	-	7 dokumen	-	0	0	0	-	0	0.00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	Jumlah sumber daya keperawatan yang terlatih	1000rang	285,000,000.00	80	-	100 orang	285,000,000.	30 org	127,572,400.00	34.43	44.76	124.76%	127,572,400.	95.97	44.76 %		
		Penyusunan Program Pengembangan sumber Daya Keperawatan	Jumlah dokumen program pengembangan dan peningkatan sumber daya keperawatan	1 dokumen	5,850,000.00	0	-	1 dokumen	5,850,000.00	1 dokumen	5,850,000.00	100	100	100.00%	5,850,000.00	100	100.00 %		
		In House Training (IHT) Keperawatan	Jumlah sumber daya keperawatan yang terlatih	2080rang	125,000,000.00	80	-	2080rang	125,000,000.	20	108,220,932.00	64.21	80.27	163.48%	108,220,932.	125.75	86.58 %		
		Audit Keperawatan	Jumlah pelaksanaan audit keperawatan	4 kali	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana (Logistik) Keperawatan	Jumlah logistik keperawatan	3 paket	348,875,000.00	80	-	3 paket	348,875,000.00	3	341,292,000.00	75.25	26.25	177.83%	341,292,000.00	136.79	97.83 %		
		Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis																RSUP	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat kelulusan akreditasi RSUDP	100%	601,265,073.00	85	994,450,200.00	100	601,265,073.00	49.19	295,740,086.00	49.19	49.19	134.19%	1,290,190,286.00	134.19 %	214.58 %		
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	3 paket	9,547,875,000.00	80	14,594,475,000.00	3	10,047,875,000.00	3	9,903,754,858.00	100	98.57	100.00%	24,498,229,858.00	100.00 %	256.58 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah kemitraan pelayanan kesehatan	2 kemitraan	3,206,060,000.00	80	1,350,600,000.00	4	520,550,000.00	0	33,478,308.00	86.43	6.43	86.43%	1,384,078,308.00	6.43%	43.17 %		
		Program Pelayanan Kesehatan																RSUP	
		Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	Jumlah gedung yang terbangun	1 gdg	-	0	2,267,850,000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengadaan Pening katan Sarana dan Prasarana Rumah sakit	Jumlah paket pemenuhan sarana dan prasarana ope rasional rumah sakit kelas B	9 Paket	565,615,000.00	80	2,388,519,000.00	9	765,615,000.00	9	692,751,250.00	100	90.48	100	3,081,270,250.00	100	402.46 %		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	85 persen	5,112,031,328.00	85	12,097,739,000.00	85	6,338,666,328.00	96.94 %	6,144,431,746.00	114.05	96.94	181.94%	18,242,170,746.00	214.05	287.79 %		
		Penyusunan DED Rumah Sakit	Jumlah DED pembangunan gedung rumah sakit	1 paket	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan DAK	Tersedianya alat alat kesehatan rumah sakit	1 paket	64,214,429,444.00	80	40,771,884,000.00	1	67,145,706,144.00	1	64,214,429,444.00	100	95.63	100.00%	104,986,313,444.00	100	156.36 %		
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan DID	Tersedianya alat alat kesehatan rumah sakit	1 paket	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit DID	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan kesehatan lainnya	1 paket	110,620,000.00	0	-	1	110,620,000.00	1	106,608,200.00	100	96.37	100.00%	106,608,200.00	100	96.37 %		
		Renovasi ruangan isolasi khusus Covid-19	Tersedianya Ruang Isolasi	1 paket	800,000,000.00	85	-	4	800,000,000.00	1	799,735,000.00	100	99.97	100.00%	799,735,000.00	100	99.97 %		
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan																RSUP	
		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	2 paket	22,500,000,000.00	90	15,000,000,000.00	2	22,500,000,000.00	2	22,240,470,473.00	100	98.85	188.85	37,240,470,473.00	188.85	165.51 %		
		PEKERJAAM UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	28,385,629,859.00	100.0	5,119,237,579.00	100	5,609,161,337.00	100	1,644,982,817.00	100	29.33	200	6,764,220,396.00	200	23.83	DPU	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (persen)	85		77.3		82		-									
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (org)	800	20,188,524,552.50	290.0	6,624,084,058.00	165	2,940,412,000.00	165	2,655,427,505.00	100	90.31	455	9,279,511,563.00	57	45.96		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana per kantoran selama 12 bulan (orang)	800	8,854,062,984.00	290.0	4,278,532,146.00	165	712,085,696.00	165	520,203,639.00	100	73.05	455	4,798,735,785.00	57	54.20		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	250	771,740,000.00	100.0	207,842,084.00	2	16,500,000.00	2	4,633,868.00	100	28.08	102	212,475,952.00	41	27.53		
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah (laporan)	25	102,487,000.00	10.0	63,602,750.00	5	141,402,500.00	5	122,770,500.00	100	86.82	15	186,373,250.00	60	181.85		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daera dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (laporan)	5	721,618,287.00	4.0	507,403,990.00	2	204,664,451.00	2	182,435,009.00	100	89.14	6	689,838,999.00	120	95.60		
		Program Kebinamargaan	Proporsi panjanga jaringan jalan dalam Kondisi mantap (persen)	0.98	2,857,348,883,003.00	0.92	467,680,007,254.00	0.93	628,888,344,574.00	-	67,823,461,478.00	0	10.78	0.92	535,503,468,732.00	94.37	18.74	DPU	
		Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan (Dokumen)	15.00	14,466,750,000.00	8.00	4,306,477,300.00	1	113,982,500.00	1	109,071,000.00	100	95.69	9.0	4,415,548,300.00	60.00	30.52		
		Pembangunan Jalan PHNJD	Panjang jalan yang terbangun (km) (km)	30.00	312,000,000,000.00			15	93,761,139,364.00	15	89,232,450,019.20	100	95.17	15.0	89,232,450,019.20	50.00	28.60		
		Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan (Dokumen)	5.00	5,455,406,340.00	1.00	956,940,600.00	0	3,856,000.00	0	3,856,000.00	0	100.00	1.0	960,796,600.00	20.00	17.61		
		Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan/dibangun dalam kondisi baik (unit)	7.00	40,140,864,409.20	3.00	13,533,836,800.00	0	5,173,500.00	0	4,175,000.00	0	80.70	3.0	13,538,011,800.00	42.86	33.73		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan (Dokumen)	5.00	885,795,800.00	2.00	108,539,000.00	1	121,680,000.00	1	58,488,400.00	100	48.07	3.0	167,027,400.00	60.00	18.86		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik (meter)	3119.37	7,697,913,251.00	6170.04	2,470,851,232.00	2612.81	1,817,305,000.00	2,613	1,657,221,592.00	100	91.19	8,782.9	4,128,072,824.00	281.56	53.63		
		Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan (Dokumen)	5.00	736,998,567.00	2.00	105,741,500.00	1	133,401,500.00	1	92,067,563.00	100	69.02	3.0	197,809,063.00	60.00	26.84		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang terpelihara 1 Paket HASIL Panjang Jalan (paket)	5.00	706,530,000.00	2.00	181,474,700.00	1	156,121,375.00	1.0	123,226,600.00	100	78.93	3.0	304,701,300.00	60.00	43.13		
		Pembangunan Jalan (DAK Penugasan)	Panjang jalan yang terbangun (km)	37.70	160,150,000,000.00	27.55	114,537,258,683.00	4.8	22,075,268,500.00	4.8	21,415,733,064.00	100	97.01	32.4	135,952,991,747.00	85.81	84.89		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara (meter)	850.99	140,238,855,000.00	1,669.00	71,810,256,382.00	765.23	24,796,897,500.00	765.2	23,942,574,693.00	100	96.55	2,434.2	95,752,831,075.00	286.05	68.28		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km)	36.90	100,900,300,000.00	8.62	22,981,683,965.00	9.9	26,279,792,500.00	9.9	25,930,971,500.00	100	98.67	18.5	48,912,655,465.00	50.19	48.48		
		Operasional Jembatan Baturusa II	jembatan baturusa II yang terpelihara (unit)	5.00	9,377,666,560.00	2.00	2,770,125,717.00	1	1,776,747,500.00	1.0	961,820,428.00	100	54.13	3.0	3,731,946,145.00	60.00	39.80		
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun (km)	68.60	436,200,000,000.00	45.40	216,976,778,453.00	14.65	62,904,531,454.00	14.7	58,963,799,100.00	100	93.74	60.1	275,940,577,553.00	87.54	63.26		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Reguler)	Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km)					11.2	30,963,319,500.00	11.2	29,149,550,172.00	100	94.14	11.2	29,149,550,172.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan air baku (%)	30.00	558,563,410,211.00	0.19	94,821,899,613.00	0	147,804,150,444.00	0	313,603,228.00	#DIV/0!	0.21	0.19	95,135,502,841.00	0.63	17.03	DPU	
			Rasio Jaringan Irigasi (%)	36.00		7.02		22		4									
			Persentase peningkatanluas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	8.80		6.06		4		5									
		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang talud penahan tanah yang terbangun (M)	1050.00	10,228,485,000.00			0	4,947,250.00	0	4,947,250.00	0	100.00	0.00	4,947,250.00	0.00	0.05		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas Jaringan Irigasi Yang Teraliri (Hektar)	60.00	825,000,000.00			60	910,552,000.00	60	895,704,000.00	1	98.37	60.00	895,704,000.00	100.00	108.57		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan Peningkatan Drainase	Panjang drainase yang terbangun						1,550,000.00		1,550,000.00	0	100.00	0.00	1,550,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas Jaringan Irigasi Yang Teraliri (Hektar) (Hektar)	195.00	1,025,000,000.00			0	17,078,000.00	0	16,079,000.00	0	94.15	0.00	16,079,000.00	0.00	1.57		
		Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/ kali	Panjang saluran/sungai (M) (meter)	51000.00	20,671,125,119.00	35,150.00	19,063,211,481.00	0	15,929,100.00	0	15,929,100.00	0	100.00	351500	19,079,140,581.00	68.92	92.30		
		Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air lainnya	Luas Area yang Tertata (Dokumen)	12600.00	3,166,900,000.00			1	476,119,000.00	1	426,589,100.00	1	89.60	1.00	426,589,100.00	0.01	13.47		
		Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali	Panjang saluran/sungai (kM)	11.50	7,266,125,000.00	11.60	2,042,133,700.00	17	4,470,481,000.00	65	4,147,591,378.00	4	92.78	76.97	6,189,725,078.00	669.32	85.19		
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	jumlah gapoktan yang terbedayakan (kelompok)	20	2,648,444,965.00	8.00	920,541,000.00	3	890,592,000.00	3	690,729,500.00	1	77.56	11.00	1,611,270,500.00	55.00	60.84		
		Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air (laporan)	4	271,000,000.00	3.00	276,373,530.00	4	411,880,018.00	4	375,881,368.00	1	91.26	7.00	652,254,898.00	175.00	240.68		
		Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100	483,578,437,188.00	33.33	107,450,000,000.00	40	116,136,425,000.00	0	181,498,189.00	0	0.16	33.33	107,631,498,189.00	33.33	22.26	DPU	
		Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen perda kajian peninjauan kembali RTRW	1	500,000,000.00			1	689,811,698.00	1	272,649,906.00	100	39.53	1.00	272,649,906.00	100.0	54.53		
		Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov. Kep.Bangka Belitung	Jumlah laporan survey indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (laporan)	5	497,203,550.00	2	405,463,438.26	0	11,075,000.00	0	11,075,000.00	0	100.00	2.00	416,538,438.26	40.0	83.78		
		Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang (Rekomendasi Teknis)	5	1,289,487,698.00	2	254,260,565.00	16	219,285,334.00	45	179,065,201.00	281.25	81.66	47.00	433,325,766.00	940.0	33.60		
		Penyusunan regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Regulasi RRTR KSP(KIPT Sadai dan KIPT Tanjung Ular) (regulasi)	2	966,190,000.00			0	45,467,849.00	0	45,467,849.00	0	100.00	0.00	45,467,849.00	0.0	4.71		
		Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (Pembinaan dan Pelatihan)	2	100,000,000.00			1	16,994,111.00	1	16,994,111.00	100	100.00	1.00	16,994,111.00	50.0	16.99		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah peserta Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (peserta)	50	100,000,000.00			0	2,230,000.00	0	2,230,000.00	0	1.00	0.00	2,230,000.00	0.0	2.23		
		Penyusunan Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Neraca Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan (neraca)	1	586,070,000.00			0	23,406,000.00	0	23,406,000.00	0	100.00	0.00	23,406,000.00	0.0	3.99		
		Survey Inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventa risasi tanah (dokumen)	1	94,945,000.00			0	270,000.00	0	270,000.00	0	100.00	0.00	270,000.00	0.0	0.28		
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat (%)	20.00	14,726,173,698.00	20.00	2,294,706,639.00	20.00	3,120,658,453.00	0	137,007,000.00	0.00	4.39	20.00	2,431,713,639.00	100.0	16.51	DPU	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	Layanan data dan informasi jasa konstruksi (layanan)	3.00	1,128,967,510.00	3.00	203,814,186.00	1.00	64,143,000.00	1	63,783,000.00	100.00	99.44	4.00	267,597,186.00	133.3	23.70		
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (orang)	750.00	4,132,464,839.00	307.00	1,067,974,180.00	43.00	179,384,000.00	59	162,084,000.00	137.21	90.36	366.00	1,230,058,180.00	48.8	29.77		
		Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	Persentase jumlah alat berat dalam kondisi baik (%)	95.00	17,914,788,467.00	75.00	5,762,835,000.00	91.67	1,960,038,150.00	0	350,715,691.00	0	17.89	75.00	6,113,550,691.00	78.95	34.13	DPU	
		Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani (orang)	150.00	5,469,268,108.00	30.00	1,660,357,462.00	24	897,457,104.00	24	743,544,724.00	100	82.85	54.00	2,403,902,186.00	36.00	43.95		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat Berat yang dipelihara (paket)	5.00	1,683,887,827.00	2.00	374,466,116.00	1	384,181,747.00	1	202,120,115.00	100	52.61	3.00	576,586,231.00	60.00	34.24		
		Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi peralatan workshop (laporan)	5.00	51,251,013.00	2.00	29,847,688.00	0	1,033,000.00	0	1,033,000.00	0	100.00	2.00	30,880,688.00	40.00	60.25		
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	1.1.04.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah					5,484,737,312.64		1,450,981,599.00		1,430,307,878.00				6,915,045,190.64			DINAS PERKIM	
	1.1.04..01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur PD yang terlayani selama 12 Bulan	305	8,603,337,300.00	126	3,613,926,281.00	66	1,087,280,800.00	66.00	1,075,943,479.00	100.00	98.96	192.00	4,689,869,760.00	0.00	54.51		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.04.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persenatse Aparatur PD yang Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran selama 12 Bulan	100	7,726,357,166.00	100	1,564,555,065.64	100	263,483,900.00	100.00	257,628,600.00	100.00	97.78	200.00	1,822,183,665.64	0.00	23.58		
	1.1.04.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur PD yang meningkat Kapasitasnya	215	1,541,899,731.00	22	110,487,261.00	3	12,013,054.00	3.00	11,651,954.00	100.00	96.99	25.00	122,139,215.00	0.00	7.92		
	1.1.04.01.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90 %	35	1,207,165,000.00	18	115,681,735.00	9	45,662,145.00	9.00	42,942,145.00	100.00	94.04	27.00	158,623,880.00	0.00	13.14		
	1.1.04.01.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Peraangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah PD diatas 85 %	8	500,000,000.00	4	80,086,970.00	2	42,541,700.00	2.00	42,141,700.00	100.00	99.06	6.00	122,228,670.00	0.00	24.45		
2	1.1.04.01.02	Program Keciptakaryaan dan Permukiman			59,392,522,000.00		2,714,778,068.42		360,363,566.00		359,846,506.00				3,074,624,574.42			DINAS PERKIM	
	1.1.04.01.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	18	1,205,972,000.00	1	45,000,000.00	6.0	336,928,342.00	6.00	336,411,282.00	100.00	99.85	7.00	381,411,282.00	0.00	31.63		
	1.1.04.01.02.02	Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi air minum dan Sambungan Rumah	Jaringan Distribusi Air Minum yang Terpasang	950	4,799,570,000.00	150	744,722,983.91	0.0	9,046,600.00	0.00	9,046,600.00	100.00	100.00	150.00	753,769,583.91	0.00	15.70		
	1.1.04.01.02.03	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Panjang Jalan Permukiman yang terbangun	22,640	7,273,500,000.00	3,781	936,669,584.51	0.0	6,212,000.00	0	6,212,000.00	100.00	100.00	3,781.00	942,881,584.51	0.00	12.96		
	1.1.04.01.02.04	Pembangunan/Peningkatan Drainase/ Gorong- gorong di Kawasan Kumuh	Panjang Drainase Terbangun di Kawasan Kumuh	44,579	11,013,480,000.00	2,551	988,385,500.00	0.0	-	0	-	100.00	0.00	2,551.00	988,385,500.00	0.00	8.97		
	1.1.04.01.02.08	Pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Terbangun	45,400	31,500,000,000.00	0	-	0.0	5,006,624.00	0	5,006,624.00	100.00	100.00	0.00	5,006,624.00	0.00	0.02		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.04.01.02.10	Peningkatan/Penyediaan sarana air limbah di kawasan kumuh	Terbangunnya Sarana Air limbah di KawasanKumuh Provinsi	8	3,600,000,000.00	0	-	0	3,170,000.00	0	3,170,000.00	100.00	100.00	0.00	3,170,000.00	0.00	0.09		
3	1.1.04.01.02	Program Pembangunan Perumahan Rakyat			43,337,577,904.00		16,188,760,723.00		8,037,940,849.00		7,888,529,548.00				24,077,290,271.00			DINAS PERKIM	
	1.1.04.01.02.01	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang di Renovasi	550	41,344,230,000.00	254	16,149,622,423.00	146	8,000,000,000.00	146	7,850,588,699.00	100.00	98.13	400.00	24,000,211,122.00	0.00	0.00		
	1.1.04.01.02.06	Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	Jumlah Peserta Rapat Bidang Perumahan	200	627,126,000.00	50	39,138,300.00	-	13,894,049.00	0	13,894,049.00	100.00	100.00	50.00	53,032,349.00	0.00	0.00		
	1.1.04.01.02.07	Survey dan Pendataan Rumah Tidak layak Huni	Jumlah Laporan Survey dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang Tersusun	5	600,000,000.00	0	-	-	16,977,800.00	0.00	16,977,800.00	100.00	100.00	0.00	16,977,800.00	0.00	0.00		
	1.1.04.01.02.08	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpeng hasilan Tidak Tetap	Jumlah Pembiayaan Miko Perumahan Bagi Masyaraat Berpenghasilan Tidak Tetap yang Tersusun	5	766,221,904.00	0	-	-	7,069,000.00	0.00	7,069,000.00	100.00	100.00	0	7,069,000.00	0.00	0.00		
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai kepuasan pelayanan sekretariat Badan Kesbangpol (%)	100	22,210,218,728.00	100	4,439,947,279.00	100	1,573,553,015.00	50	1,551,080,955.00	1	0.99	150.00	5,991,028,234.00	1.50	0.27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Nilai Lakip Badan Kesbangpol (nilai)	79		77		80											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yg terlayani selama 12 bulan (Orang)	70	9,499,268,408.00	59	3,680,036,639.00	54	1,277,173,665.00	54	1,257,098,691.00	1	0.98	113.00	4,937,135,330.00	1.61	0.52		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (Orang)	70	10,573,246,000.00	59	643,030,440.00	54	162,025,000.00	54	159,803,310.00	1	0.99	113.00	802,833,750.00	1.61	0.08		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi target diatas 90% (Laporan)	25	745,404,320.00	5	93,883,000.00	5	63,541,800.00	5	63,369,454.00	1	1.00	10.00	157,252,454.00	0.40	0.21		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (Dokumen)	16	1,392,300,000.00	4	22,997,200.00	4	70,812,550.00	4	70,809,500.00	1	1.00	8.00	93,806,700.00	0.50	0.07		
1		Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota (%)	7	5,625,000,000.00	0.00	-	7	65,326,780.00	4	63,012,880.00	1	0.96	4	63,012,880.00	0.57	0.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	Jumlah Daerah yang Kondusif (Kabupaten/Kota)	7	2,850,000,000.00	0	-	7	18,665,800.00	7	16,699,500.00	1	0.89	7	16,699,500.00	1.00	0.01		
		Pencegahan dan Antisipasi Potensi Konflik di daerah	Jumlah Daerah Potensi Konflik (Kabupaten/Kota)	-	2,775,000,000.00	0	-	7	46,660,980.00	7	46,313,380.00	1	0.99	7	46,313,380.00	-	0.02		
2		Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi (%)	-	5,380,530,000.00	0	-	0	899,937,412.00	0	854,312,860.00	-	0.95	-	854,312,860.00	-	0.16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi (%)	0		0		0											
		Penguatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yg memahami wawasan kebangsaan (orang)	2000	2,450,000,000.00	0	-	2000	813,870,475.00	2000	768,245,923.00	1.00	0.94	2,000	768,245,923.00	1.00	0.31		
		Penguatan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang melestarikan budaya dan menjaga kerukunan (orang)	5000	800,000,000.00	0	-	500	15,756,650.00	500	15,756,650.00	1.00	1.00	500	15,756,650.00	0.10	1.97		
		Pembinaan Ideologi Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Memahami Ideologi Kebangsaan (orang)	1080	1,150,000,000.00	0	-	50	70,310,287.00	50	70,310,287.00	1.00	1.00	50	70,310,287.00	0.05	6.11		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penguatan Bela Negara	Jumlah Masyarakat yang cinta tanah air (orang)	840	980,530,000.00	0	-	150	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
3		Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah (Jumlah)	7	2,319,435,000.00	0.00	152,895,300.00	7	368,475,000.00	0	345,205,788.00	0.00	93.68	0.00	498,101,088.00	0.00	21.48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti (%)	80		0.00		60											
		Pembinaan Politik Daerah	Jumlah Masyarakat yang memahami politik (orang)	840	1,009,435,000.00	0	-	140	100,177,800.00	140	99,280,700.00	100.00	99.10	140.00	99,280,700.00	16.67	9.84		
		Penguatan Kelembagaan Parpol	Jumlah Parpol yang menjalankan tugas dan fungsinya (lembaga)	15	900,000,000.00	0	-	15	14,650,800.00	15	14,650,800.00	100.00	100.00	15.00	14,650,800.00	100.00	1.63		
		Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	20	330,000,000.00	8	93,897,100.00	4	221,244,700.00	4	198,872,588.00	100.00	89.89	12.00	292,769,688.00	60.00	88.72		
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	jumlah Lembaga Demokrasi yang membangun bidang politik (Berkas)	100	80,000,000.00	0	58,998,200.00	5	32,401,700.00	5	32,401,700.00	100.00	100.00	5.00	91,399,900.00	5.00	114.25		
4		Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza (Orang)	1,100	5,908,000,000.00	0.00	175,926,560.00	700	102,088,261.00	0	102,088,261.00	0.00	100.00	0.00	278,014,821.00	0.00	4.71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan (%)	65		0.00		45											
			Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya (%)	70		0.00		50											
		Pembangunan Ketahanan seni dan Budaya	Jumlah Pelaku seni yang ikut menjaga kesenian dan budaya (orang)	140	1,100,000,000.00	0	-	60	62,067,240.00	60	62,067,240.00	1	1.00	60	62,067,240.00	0	0.06		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan Ketahanan Ekonomi	Laporan Angka Kesenjangan Ekonomi (Laporan)	10	1,100,000,000.00	0	-	0	-	0	-	100.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
		Pencegahan dan penanggulangan Napza	Jumlah Masyarakat yang memahami bahaya penyalah gunaan napza (orang)	350	1,277,181,000.00	200	99,054,160.00	0	-	0	-	100.00	0.00	200.00	99,054,160.00	57.14	7.76		
		Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Ormas yang ikut serta dalam pembangunan (Ormas)	30	1,200,000,000.00	0	-	0	5,101,376.00	0	5,101,376.00	100.00	100.00	0.00	5,101,376.00	0.00	0.43		
		Forum komunikasi dan kerja sama antar umat beragama	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	15	1,230,819,000.00	6	76,872,400.00	1	34,919,645.00	1	34,919,645.00	100.00	100.00	7.00	111,792,045.00	46.67	9.08		
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	40,414,223,513.00	100	13,165,745,994.00	100	8,086,187,188.00	100	7,880,377,938.00	100%	97%	200	21,046,123,932.00	200%	52%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	
			Predikat SAKIP perangkat daerah	78	891,043,100.00	63	126,414,500.00	77	68,832,946.00	78.3	65,504,000.00	102%	95%	142	191,918,500.00	182%	22%		
		Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	233	33,367,076,213.00	227	12,196,014,728.00	227	7,382,464,375.00	227	7,231,789,568.00	100%	98%	454	19,427,804,296.00	195%	58%		
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	233	5,824,924,200.00	227	1,127,075,966.00	227	559,347,813.00	227	505,088,370.00	100%	90%	454	1,632,164,336.00	195%	28%		
		Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya	233	1,222,223,100.00	203	698,343,100.00	90	144,375,000.00	90	143,500,000.00	100%	99%	293	841,843,100.00	126%	69%		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah (Renja PD 2021 dan Renja Perubahan PD 2020)	10	412,123,800.00	5	62,905,800.00	2	16,687,000.00	2	16,568,000.00	100%	99%	7	79,473,800.00	70%	19%		
		Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD (Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LKPJ PD, dan Data Sektoral)	30	478,919,300.00	12	63,508,700.00	5	52,145,946.00	5	48,936,000.00	100%	94%	17	112,444,700.00	57%	23%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	99	2,371,433,500.00	23.8	459,444,831.00	16.23	167,047,520.00	47.6	107,437,448.00	293%	64%	40	566,882,279.00	40%	24%	SATPOL PP	
		Pengiriman peserta bimtek dan diklat peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti bimtek dan diklat	107	789,517,500.00	19	76,530,101.00	5	65,085,000.00	4	8,524,000.00	80%	13%	24	85,054,101.00	22%	11%		
		Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan	3840	981,916,000.00	1650	282,415,365.00	123	76,258,000.00	123	73,312,000.00	100%	96%	1,773	355,727,365.00	46%	36%		
		Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	Jumlah pejabat fungsional yang dibina	70	600,000,000.00	50	100,499,365.00	50	25,704,520.00	50	25,601,448.00	100%	100%	100	126,100,813.00	143%	21%		
		Program Penegakan Perda dan Perkada		100	1,773,204,791.00	100	163,068,700.00	100	277,127,440.00	100	218,272,600.00	100%	79%	200	381,341,300.00	200%	22%	SATPOL PP	
		Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan)	62	875,959,900.00	21	27,728,500.00	10	100,659,940.00	15	65,210,000.00	150%	65%	31	92,938,500.00	50%	11%		
		Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	Jumlah warga, aparatur dan badan hukum yang ditindak secara non yustisial	1550	897,244,891.00	612	135,340,200.00	130	176,467,500.00	130	153,062,600.00	100%	87%	742	288,402,800.00	48%	32%		
		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penindakan pelanggaran Tibumtranmas	100	7,811,800,000.00	100	2,778,970,300.00	100	2,378,616,200.00	100	2,136,090,136.00	100%	90%	200	4,915,060,436.00	200%	63%	SATPOL PP	
		Patroli	Jumlah patroli	4,320	811,800,000.00	2,160	99,750,000.00	1,080	84,650,000	1080	56,560,000.00	100%	67%	3,240	156,310,000	75%	19%		
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah peserta gelar pasukan	1,401	6,600,000,000.00	12	2,679,220,300.00	467	2,192,960,700.00	484	1,980,745,036.00	104%	90%	479	4,659,965,336.00	34%	71%		
		Penyelenggaraan deteksi dini pelanggaran tibumtranmas	Jumlah deteksi dini pelanggaran tibumtranmas	48	400,000,000.00	0	-	18	101,005,500.00	18	98,785,100.00	100%	98%	18	98,785,100.00	38%	25%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas Linmas dalam penyelenggaraan Kantrantibnas	23.12	1,334,236,000.00	1.51	207,787,783.00	2.72	190,864,000.00	1.5	184,496,994.00	55%	97%	4	392,284,777.00	18%	29%	SATPOL PP	
			Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	34.48	1,334,236,000.00	36.73	-	6.05	2,100,000.00	0	2,028,000.00	0%	97%	43	2,028,000.00	124%	0%		
		Simulasi akbar pemadam kebakaran	Jumlah peserta simulasi	360	1,334,236,000.00	0	-	100	2,100,000.00	0	2,028,000.00	0%	97%	100	2,028,000.00	28%	0%		
		Penyelenggaran peningkatan kapasitas anggota satuan perlin dungan masyarakat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas	360	1,334,236,000.00	110	207,787,783.00	60	190,864,000.00	60	184,496,994.00	100%	97%	170	392,284,777.00	47%	29%		
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	4	29,399,436,801.00	4	5,384,235,101.00		1,741,970,119.00		1,655,630,000.00				7,039,865,101.00			BPBD	
			Persentase Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	76		73													
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang ter layani selama 12 Bulan (%)	100	9,012,889,082.00	100	3,820,620,603.00	90	1,465,076,269.00	90	1,410,791,422.00	100.00%	96.29%	190	5,231,412,025.00	190.00%	58.04%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 Bulan (persen)	100	15,911,416,625.00	100	999,123,414.00	90	207,393,850.00	90	177,540,578.00	100.00%	85.61%	190	1,176,663,992.00	190.00%	7.40%		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah (persen)	100	1,404,125,000.00	100	172,274,204.00	90	10,875,000.00	90	10,475,000.00	100.00%	96.32%	190	182,749,204.00	190.00%	13.02%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target Di Atas 90% (laporan)	20	1,171,006,094.00	4	174,823,940.00	4	30,000,000.00	4	29,562,000.00	100.00%	98.54%	8	204,385,940.00	40.00%	17.45%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di Atas 85% (dokumen)	15	1,900,000,000.00	3	217,392,940.00	3	28,625,000.00	3	27,261,000.00	100.00%	95.23%	6	244,653,940.00	40.00%	12.88%		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	76	6,486,883,086.00	73	2,511,873,219.00		1,354,469,800.00		1,267,465,480.00		93.58%	73	3,779,338,699.00	96.05%	58.26%	BPBD	
		Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah orang yang terlatih untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Orang)	500	2,056,224,950.00	200	316,650,600.00	100	23,378,500.00	0	23,378,500.00	0.00%	100.00%	200	340,029,100.00	40.00%	16.54%		
		Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	Jumlah peserta yang ter latih dalam mitigasi Penanggulangan Bencana (Orang)	500	1,556,100,239.00	200	322,328,740.00	300	151,465,000.00	300	124,808,180.00	100.00%	82.40%	500	447,136,920.00	100.00%	28.73%		
		Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	Publikasi panduan standar minimum penyelamatan dini bencana (media cetak/elektronik)	50	1,124,557,897.00	10	500,462,650.00	10	51,400,000.00	10	51,173,200.00	100.00%	99.56%	20	551,635,850.00	40.00%	49.05%		
		Pengurangan Resiko Bencana dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah koordinasi berkala Tim Penanggulangan Bencana/Tim Tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	5	1,750,000,000.00	1	1,372,431,229.00	1	1,128,226,300.00	1	1,068,105,600.00	100.00%	94.67%	2	2,440,536,829.00	40.00%	139.46%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	78	46,816,275,000.00	75	197,215,500.00		15,062,568,800.00		14,009,271,084.03		93.01%	75	14,206,486,584.03	96.15%	30.35 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana	Jumlah orang yang terdidik dan terlatih dalam penanganan tindakan dini pascabencana (Orang)	160	800,000,000.00	40	63,919,600.00	40	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0.00%	100.00 %	40	67,919,600.00	25.00%	8.49%		
		Pemeliharaan Jembatan Portable	Jembatan portable yang terpelihara (unit)	8	514,250,000.00	4	77,602,000.00	1	49,950,000	0	-	0.00%	0.00%	4	77,602,000	50.00%	15.09 %		
		Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable	Telaksananya bongkar dan/atau pasang jembatan portable (unit)	5	502,025,000.00	2	55,693,900.00	1	73,059,800.00	1	12,610,000.00	100.00%	17.26%	3	68,303,900.00	60.00%	13.61 %		
		Rehabilitasi Dan Rekontruksi di Daerah Pasca Bencana	Jumlah Bangunan yang di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Di Daerah Pasca Bencana	10	45,000,000,000.00	0	-	6	14,935,559,000.00	6	13,992,661,084.03	100.00%	93.69%	6	13,992,661,084.03	60.00%	31.09 %		
		Program Kedaruratan dan logistik Penang gulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	78	6,987,125,000.00	75	389,465,850.00		6,599,412,760.00		5,056,953,596.00			75	5,446,419,446.00	96.15%	77.95 %	BPBD	
		Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya kegiatan kedaruratan Penang gulangan Bencana (bulan)	200	722,000,000.00	40	63,919,600.00	12	1,931,817,500.00	12	1,400,760,000.00	100.00%	72.51%	52	1,464,679,600.00	26.00%	202.86 %		
		Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana (Kab/Kota)	200	698,800,000.00	40	56,563,500.00	7	270,898,800	7	173,338,400.00	100.00%	63.99%	47	229,901,900	23.50%	32.90 %		
		Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Jumlah ketersediaan logistik untuk Penanggulangan BencanaDi Provinsi, dan 7 Kab/Kota (Item Barang)	8	514,250,000.00	4	77,602,000.00	2	122,600,000.00	2	71,500,000.00	100.00%	58.32%	6	149,102,000.00	75.00%	28.99 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana serta Evakuasi (item peralatan)	5	502,025,000.00	2	55,693,900.00	4	143,600,000.00	3	43,100,000.00	75.00 %	30.01%	5	98,793,900.00	100.00 %	19.68 %		
		Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pemeliharaan Penanggulangan Bencana yang siap pakai (jenis peralatan/barang)	5	723,625,000.00	1	71,449,550.00	10	1,010,420,960.00	6	366,381,491.00	60.00 %	36.26%	7	437,831,041.00	140.00 %	60.51 %		
		Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketersediaan buffer stock logistik Penanggulangan Bencana untuk korban bencana (paket jasa penyeberangan dan pengiriman kendaraan/ peralatan/ barang)	160	800,000,000.00	40	64,237,300.00	1	93,650,500.00	1	40,670,855.00	100.00%	43.43%	41	104,908,155.00	25.63%	13.11 %		
		Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Tanggap Covid - 19	Jumlah Bulan Percepatan penanganan Covid-19	2	3,026,425,000.00	0	-	2.00	3,026,425,000.00	2	2,961,202,850.00	100.00%	97.84%	2	2,961,202,850.00	100.00 %	97.84 %		
		SOSIAL																	
I		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		50939	11,558,516,000	91812	2,869,751,466.00	44331	1,051,299,000.00	44964	931,388,900.00	101.43	88.59					DINAS SOSIAL	
1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana Alam yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Desa/ Kel)	5	2,919,300,000.00	10	1,173,144,950.00	1	647,200,000.00	1	586,545,500.00	100.00	90.63	11	1,759,690,450.00	220.00	60.28		
			Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan Bencana Alam (Organg)	280		60	-	444		444		100.00		504		180.00	0.00		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (KK)	125		912	-	2		635		31750.00		1547		1237.60	0.00		
2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (KK)	250	1,607,200,000.00	62	396,833,570.00	10	221,544,000.00	10	201,243,400.00	100.00	90.84	72	598,076,970.00	28.80	37.21		
			Jumlah PSKS yang menda patkan peningkatan kappa sitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial (Orang);	350		44	-	25		25				69		19.71	0.00		
			Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (kab/ kota);	7		14	-	7		7		100.00		21		300.00	0.00		
3		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah Korban tindak kekerasan yang memper oleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial (org)	125	900,000,000.00	24	179,802,000.00							24	179,802,000.00	19.20	19.98		
4		Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial (orang)	6855	1,999,110,000.00	2740	569,066,900.00	900	128,215,000.00	900	97,010,000.00	100.00	75.66	3640	666,076,900.00	53.10	33.32		
			Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola/ pelaksana program askessos (lembaga)			4	-							4		0.00	0.00		
5		Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendam pingan program PKH (org)	42942	4,132,906,000.00	87942	550,904,046.00	42942	54,340,000.00	42942	46,590,000.00	100.00	85.74	130884	597,494,046.00	304.79	14.46		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
II		Program Pemberdayaan Sosial		3906	20,483,651,550.00	1083	2,469,872,409.00	942	540,757,500.00	748	486,158,447.00	79.41	89.90	1831	2,956,030,856.00	46.88	14.43		
1		Pemberdayaan Keluarga	Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Keluarga LK3)	50	12,500,000,000.00	10	239,993,000.00							10	239,993,000.00	20.00	1.92		
2		Penyuluhan Sosial	Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial (orang)	1510	1,066,357,000.00	435	152,452,000.00							435	152,452,000.00	28.81	14.30		
3		Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Jumlah dunia usaha/ lembaga/ masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku (lembaga)	150	518,735,000.00	30	19,150,000.00	0	3,400,000.00		3,400,000.00		100.00	30	22,550,000.00	20.00	4.35		
4		Peningkatan Kecintaan Terhadap Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipeliharа dan disediakan (TMP)	1	3,548,650,000.00	3	1,146,893,817.00	1	405,492,500.00	606	361,165,683.00	75.75	89.07	609	1,508,059,500.00	60900.00	42.50		
5			Jumlah orang/pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (orang)	1200	940,310,000.00	5	-	800		1		100.00		6	-	0.50	-		
			Tersantuninya keluarga pahlawan perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (orang)	475		25	-							25		5.26	-		
6		Peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	Jumlah Kepesertaan yang terlibat dalam peringatan hari pahlawan dan hari HKSN (orang)	30	969,289,550.00	442	704,756,492.00							442		1473.33	-		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pilar-pilar Sosial yang diberdayakan (orang)	475	940,310,000.00	130	206,627,100.00	130	131,865,000.00	130	121,592,764.00	100.00	92.21	260	328,219,864.00	54.74	34.91		
			Jumlah LK3 yang diberdayakan (LK3)	15		3		11		11		100.00		14		93.33	-		
III		Program Penanganan Farkir Miskin		89698	28,375,264,100.00	87282	478,992,300.00	43303	774,412,150.00	49940	705,476,550.00	115.33	91.10	137222	1,184,468,850.00	152.98	4.17	DINAS SOSIAL	
1		Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Subsidi Beras Secara Gratis (org)	43019	100,000,000.00	43019	40,210,000.00							43019	40,210,000.00	100.00	40.21		
2		Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Bantuan Rastra dan BPNT	Jumlah Rastra dan BPNT yang tersalur kepada Keluarga Miskin (kk)	43019	13,415,571,200.00	43458	-	43019	40,000,000.00	49646	39,770,950.00	115.40	99.43	93104	39,770,950.00	216.43	0.30		
3		Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan USaha Warga Miskin	Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha (kk)	165	697,346,300.00	30	140,729,000.00							30	140,729,000.00	18.18	20.18		
4		Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Wilayah Perdesaan	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan di pedesaan yang mendapat pendampingan UEP KUBE (kk)	1300	5,176,380,000.00	210	110,241,700.00	25	138,560,000.00	25	117,290,000.00	100.00	84.65	235	227,531,700.00	18.08	4.40		
5		Stimulan penguatan sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapat pen dampingan UEP KUBE (kk)	520	3,118,745,000.00	210	151,920,000.00	50	131,558,500.00	50	128,358,500.00	100.00	97.57	260	280,278,500.00	50.00	8.99		
6		Peningkatan kualitas dukungan program pusat	Jumlah Dukungan terhadap peningkatan kualitas program Pusat (KUBE)	60	409,000,000.00	20	32,110,000.00	14	17,465,600.00	14	17,465,600.00	100.00	100.00	34	49,575,600.00	56.67	12.12		
7		Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Keluarga Miskin	Jumlah warga miskin pede saan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbi ngan teknis berusaha (KK)	210	600,000,000.00	0	-	50	161,512,500.00	50	142,895,000.00	100.00	88.47	50	142,895,000.00	23.81	23.82		
8		Penguatan dan	Jumlah warga miskin perko	140		0		25		25		100.0	98.40	25		17.86			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Pra Sejahtera	taan yang memperoleh bantuan usaha dan bimbi ngan teknis berusaha (KK)		1,000,000,000.00		-		78,549,400.00		77,295,000.00	0			77,295,000.00		7.73		
9		Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin	Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha (kk)	60	400,000,000.00	0	-	30	136,766,150.00	30	125,390,500.00	100.00	91.68	30	125,390,500.00	50.00	31.35		
10		Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang mendapat pendampingan UEP KUBE (KK)	870	3,454,440,000.00	0	-	90	70,000,000.00	100	57,011,000.00	111.11	81.44	100	57,011,000.00	11.49	1.65		
11		Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya (Debitur)	335	3,781,600.00	335	3,781,600.00							335	3,781,600.00	100.00	100.00		
IV		Program Rehabilitasi Sosial		4299	8,233,965,000.00	4301	2,332,069,982.00	602	584,538,500.00	674	567,290,400.00	111.96	97.05	4975	2,854,376,382.00	115.72	34.67	DINAS SOSIAL	
1		Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatnya Peranan Panti/Yayasan/ Organisasi Sosial dan kader masyarakat dalam pelaya nan Lanjut Usia (orang)	1400	1,287,895,000.00	1413	619,277,608.00	140	126,791,500.00	141	126,112,900.00	100.71	99.46	1554	745,390,508.00	111.00	57.88		
			Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan (orang kader, pendamping)	3		3								3		100.00	-		
				10		10								10		100.00	-		
2		Optimalisasi Kinerja Komda Lansia	Meningkatnya Kinerja da Peran Serta KOMDA Lansia Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia (KOMDA Lansia)	7	100,000,000.00	3	44,984,000.00							3		42.86	-		
						150	-							150		0.00	-		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Jumlah Pelayanan dan Bantuan Sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang)	1100	1,649,950,000.00	551	404,767,198.00	125	145,865,000.00	125	140,022,900.00	100.00	95.99	676	544,790,098.00	61.45	33.02		
			Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang diberdayakan (LKSA)			7	-							7		0.00	-		
4		Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi (orang)	28	477,180,000.00	15	55,354,200.00	21	33,832,300.00	21	31,231,300.00	100.00	92.31	36	86,585,500.00	128.57	18.15		
5		Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah anak yang menda pat pendampingan dan ad vokasi apabila berhadapan dengan hukum (orang)	46	538,165,000.00	15	57,430,439.00	6	16,622,300.00	6	16,622,300.00	100.00	100.00	21	74,052,739.00	45.65	13.76		
6		Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat kan Perlindungan dan Reha bilitasi Sosial dan Mening katnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Ke sejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberi kan Pelayanan dan Pendam pingan kepada Penyandang Disabilitas (orang)	650	1,550,000,000.00	1159	609,280,597.00	150	166,507,500.00	221	166,254,700.00	147.33	99.85	1380	775,535,297.00	212.31	50.03		
7		Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah masyarakat dan korban napza yang menda patkan pembinaan penya lahgunaan napza (orang)	475	1,634,925,000.00	385	370,325,060.00	150	54,346,900.00	150	49,990,000.00	100.00	91.98	535	420,315,060.00	112.63	25.71		
8		Pembinaan Sosial Tuna Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pembinaan sosial (orang)	580	995,850,000.00	590	170,650,880.00	10	40,573,000.00	10	37,056,300.00	100.00	91.33	600	207,707,180.00	103.45	20.86		
V		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial		856	8,428,908,000.00	216	2,303,074,225.00	90	1,019,440,800.00	99	968,751,405.00	110.00	95.03	315	3,271,825,630.00	36.80	38.82	DINAS SOSIAL	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan psikososial (orang)	250	3,138,408,000.00	116	1,449,212,500.00	30	49,550,000.00	33	46,357,500.00	110.00	93.56	149	1,495,570,000.00	59.60	47.65		
2		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS	Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan (org)	250	3,617,050,000.00	16	400,978,669.00	30	915,370,000.00	33	868,666,405.00	110.00	94.90	49	1,269,645,074.00	19.60	35.10		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan (paket)	47		0	-	10		10		100.00		10		21.28	#DIV/0!		
3		Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja (orang)	100	100,000,000.00	20	29,097,000.00							20	29,097,000.00	20.00	29.10		
4		Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan (orang)	103	323,450,000.00	42	85,826,940.00	20	54,520,800.00	23	53,727,500.00	115.00	98.54	65	139,554,440.00	63.11	43.15		
5		Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti	Jumlah Prasarana Panti yang direhabiitasi (tahun)	3	300,000,000.00	1	99,896,746.00							1	99,896,746	33.33	33.30		
6		Pembangunan Prasarana Panti	Jumlah Sarana dan Prasarana panti yang dibangun (paket)	3	450,000,000.00	1	142,626,270.00							1	142,626,270.00	33.33	31.69		
7		Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun	Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina (orang)	100	500,000,000.00	20	95,436,100.00							20	95,436,100.00	20.00	19.09		
VI		Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial		388	17,086,670,000.00	140	3,081,594,170.00	57	1,443,055,500.00	55	1,257,556,150.00	96.49	87.15	195	4,339,150,320.00	50.26	25.39	DINAS SOSIAL	
1		Pengelolaan Fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam Panti	Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti (orang)	100	3,488,400,000.00	53	1,763,458,650.00	20	801,000,000.00	18	757,915,400.00	90.00	94.62	71	2,521,374,050.00	71.00	72.28		
2		Penyediaan dan dukungan sarana penunjang panti	Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti (tahun)	5	2,272,620,000.00	3	953,592,620.00	1	562,250,000.00	1	422,920,650.00	100.00	75.22	4	1,376,513,270.00	80.00	60.57		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	Jumlah Pengelola Panti yang memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan teknis pengelolaan panti (orang)	130	10,400,000,000.00	26	76,320,700.00							26	76,320,700.00	20.00	0.73		
4		Pendampingan dan pembinaan lanjutan klien	Jumlah klien yang memper oleh pendampingan dan pembinaan lanjutan (orang)	50	185,900,000.00	21	75,489,000.00	16	73,750,000.00	18	70,664,600.00	112.50	95.82	39	146,153,600.00	78.00	78.62		
5		Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan (orang)	100	289,750,000.00	36	63,013,200.00	20	6,055,500.00	18	6,055,500.00	90.00	100.00	54	69,068,700.00	54.00	23.84		
6		Rehabilitasi ringan prasarana panti	Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi (paket)	3	450,000,000.00	1	149,720,000.00							1	149,720,000.00	33.33	33.27		
		URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		TENAGA KERJA																	
1		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan sekretariat	100	5,147,742,654.00	100	6,049,102,000.00	100	4,901,731,037.00		1,635,579,277.00	175.00%	33.37%	100	7,684,681,277.00	1.00	1.49	DISNAKER	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1) (Persen)	100	3,324,968,910.00	100	5,059,652,000.00	100	3,115,729,037.00	25	1,316,735,352.00	25.00 %	42.26%	125	6,376,387,352.00	125.00	191.77		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (Persen)	100	1,115,749,197.00	100	164,320,000.00	100	535,532,000.00	25	27,139,300.00	25.00 %	5.07%	125	191,459,300.00	125.00	17.16		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, LKPJ PD (Dokumen/ Laporan)	100	50,000,000.00	0	-	4	44,900,000.00	2	26,675,000.00	50.00 %	59.41%	2	26,675,000.00	2.00	53.35		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan (Bulan)	100	532,024,547.00	12	683,130,000.00	12	1,028,870,000.00	3	220,522,960.00	25.00 %	21.43%	15	903,652,960.00	15.00	169.85		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perubahan Renstra PD 2017-2022, Renja PD 2020, Renja Perubahan PD 2019 dan Buku Rencana Tenaga Kerja Provinsi (RTKP) (Dokumen)	3	125,000,000.00	5	142,000,000.00	2	176,700,000.00	1	44,506,665.00	50.00 %	25.19%	6	186,506,665.00	200.00	149.21		
2		Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma kerja	14.59 %	1,781,470,000.00	1.84	115,859,000.00		993,477,000.00		198,726,804.00	150.00%	20.00%	1.84	314,585,804.00	12.61	17.66	DISNAKER	
		Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang mendapat penghargaan (perusahaan)	300%	150,000,000.00		27,490,000.00	3	92,720,000.00	1.5	82,080,000.00	50.00 %	88.52%	1.5	109,570,000.00	50.00	73.05		
		Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan (Rekomendasi)	5	270,000,000.00			1	222,560,000.00	0	41,988,229.00	0.00 %	18.87%	0	41,988,229.00	0.00	15.55		
		Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	Jumlah Laporan Pembahasan UMP (Rekomendasi)	8	275,000,000.00			1	231,172,000.00	0	24,000,000.00	0.00 %	10.38%	0	24,000,000.00	0.00	8.73		
		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan (Kasus)	2	117,470,000.00			0	79,300,000.00	0	4,162,675.00	0.00 %	5.25%	0	4,162,675.00	0.00	3.54		
		Peningkatan sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahan dalam pembuatan PP/ PKB (Perusahaan)	30	200,000,000.00			0	49,500,000.00	0	1,580,000.00	0.00 %	3.19%	0	1,580,000.00	0.00	0.79		
		Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang Mendapat Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 (Perusahaan)	250	444,000,000.00			3	109,700,000.00	1.5	6,198,000.00	50.00 %	5.65%	1.5	6,198,000.00	0.60	1.40		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemetaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Tersedianya Data Perusa haan,Klarifikasi dan Tingkat Kepatuhan Perusahaan (Perusahaan)	0	-	100	44,855,000.00	0	95,900,000.00	0	11,233,500.00	0.00 %	11.71%	100	56,088,500.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pembinaan dan Penyelesaian PHK Pekerja di Luar Pengadilan HI	Jumlah Kasus PHK Pekerja yang dibina dan diselesai kan di luar pengadalidan HI (Kasus)	170	200,000,000.00			25	44,125,000.00	12.5	7,581,000.00	50.00 %	17.18%	12.5	7,581,000.00	7.35	3.79		
		Pemetaan Kerawanan Kondisi HI	Jumlah kondisi Perusahaan yang rawan (Perusahaan)	165	125,000,000.00	100	43,514,000.00	50	68,500,000.00	0	19,903,400.00	0.00 %	29.06%	100	63,417,400.00	60.61	50.73		
3		Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	100	480,000,000.00		62,580,000.00		312,450,000.00		14,167,600.00	100.00%	4.53%	0	76,747,600.00	0.00	15.99	DISNAKER	
		Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Perusahaan)	170	130,000,000.00			5	60,450,000.00	2.5	5,981,300.00	50.00 %	9.89%	2.5	5,981,300.00	1.47	4.60		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengunaan TKA	Jumlah pembinaan terha dap perusahaan pengguna TKA (Perusahaan)	25	100,000,000.00			5	71,225,000.00	2.5	8,186,300.00	50.00 %	11.49%	2.5	8,186,300.00	10.00	8.19		
		Bintek Metodologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Peserta bimtek metologi bagi instruktur LPKS (Orang)	2500%	125,000,000.00			0	90,200,000.00	0	-	0.00 %	0.00%	0	-	0.00	0.00		
		Bimtek Penerapan tata kelola lembaga pelatihan kerja	Jumlah LPK yang mampu mencapai kompetensi sesuai standar yang berlaku (LPK) (LPK)	25	125,000,000.00	25	62,580,000.00	0	90,575,000.00	0	-	0.00 %	0.00%	25	62,580,000.00	100.00	50.06		
4		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diuji kesehatan lingkungan kerja	100	150,000,000.00		31,650,000.00		122,812,500.00		9,383,615.00	0.00 %	7.64%	0	41,033,615.00	0.00	27.36	DISNAKER	
		Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja Di UMKM	Jumlah UMKM yang diperiksa lingkungan kerjanya (UMKM) (UMKM)	30	150,000,000.00			4	62,725,000.00	0	-	0.00 %	0.00%	0	-	0.00	0.00		
		Pengujian Lingkungan Kerja	Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan			10	31,650,000.00	0	60,087,500.0	0	9,383,615.00	0.00 %	15.62%	10	41,033,615.	#DIV/0!	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			yang diperiksa (Perusahan)						0						00				
5		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi	100	3,750,000,000.00		4,443,840,000.00		2,467,612,500.00		323,282,185.00	57.89 %	13.10%	0	4,767,122,185.00	0.00	1.27	DISNAKER	
		Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari kerja bidang pertanian lada, karet dan sapi yang mendapat pelatihan (Paket)	32	3,750,000,000.00	25	778,240,000.00	19	2,340,292,500.00	1.5	298,722,185.00	7.89 %	12.76%	26.5	1,076,962,185.00	82.81	28.72		
		Pemasaran UPTD Balai Latihan Kerja	Tersedianya informasi dan program kegiatan UPTD balai latihan kerja bagi masyarakat serta terciptanya dan meningkatnya SDM yang terampil, kompeten dan berdaya saing (Orang)	0	-	560	3,665,600,000.00	90	127,320,000.00	45	24,560,000.00	50.00 %	19.29%	605	3,690,160,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
6		Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaku usaha/UMKM yang mendapat pembinaan peningkatan produktivitas	100	200,000,000.00		59,450,000.00		229,168,210.00		-	0.00 %	0.00%	0	59,450,000.00	0.00	29.73	DISNAKER	
		pelayanan dan peningkatan produktivitas	Pelaku usaha/UMKM yang mendapat pembinaan peningkatan produktivitas (UMKM)	40	200,000,000.00	40	59,450,000.00	0	229,168,210.00	0	-	0.00 %	0.00%		59,450,000.00	0.00	29.73		
		DP3ACSKB																	
I		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	1. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah 2. Tingkat Kepuasan Aparatur Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	3	10,088,203.98	3	3,881,142.86	3	1,449,280.05	3	1,337,145.05	100	92.26270989	0	5,178,762.95	0	51.33	DP3ACSKB	
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100	6,963,843.37	100	3,513,567.39	100	1,203,696.43	100	1,109,712.76	100	92.1920786	100	4,623,280.15	100	66.39		
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantor	100	1,247,055.69	87.5	166,057.72	100	133,279.62	100	122,548.29	100	91.94825823	87.5	288,606.01	87.5	23.14		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			an selama 12 bulan																
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2	627,625.65	4	64,562.80	4	59,169.00	4	55,559.00	100	93.89883216	4	120,121.80	100	19.14		
4		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 2. Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak 3.Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website	1. 5 2. 100 3. 100	1,249,679.27	0	97,430.00	7 Dok	53,135.00	7	49,325.00	100	92.82958502	7	146,755.00	100	11.74		
II		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang tidak bekerja	7,01	6,670,856.78	na	669,583.10	7.52	318,421.57	27,56	313,047.80	27,56	98.31		749,016.57	0	11.23	DP3ACSKB	
			Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik	10,02		na		10.2		11,18		11,18				0	0.00		
			Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	15,26		na		15.3		41,66		41,66				0	0.00		
			Persentase kepala keluarga miskin yang diberdayakan	7,64		na		8.86		5,31		5,31				0	0.00		
			Persentase anggaran resfonsif Gender (ARG) dalam APBD	3,64		na		3.58		6,5		6,5				0	0.00		
1		Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang ter petakan untuk program iR	7	468,741.00	7	7,650.00	2	7,620.00	2	7,620.00	100	100.00	9	15,270.00	128.5714286	3.26		
2		Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan dii Kab/ Kota	Jumlah Pembinaan dan Monev	63	636,045.00	14	89,072.30	1	1,490.00	1	1,490.00	100	100.00	15	90,562.30	23.80952381	14.24		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuann Prov. Kep. Bangka Belitung	12	2,114,832.00	24	299,747.57	300	95,821.00	300	92,067.13	100	96.08	324	391,814.70	100	18.53		
4		Kegiatan peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia	Jumlah peserta peringatan hari ibu	458	1,160,246.78	1000	326,310.90	800	189,622.50	800	188,002.60	100	99.15	1800	514,313.50	100	44.33		
5		Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender (PUG) dan PPRG	Jumlah peserta workshop	380	1,093,688.00	435	147,907.70	65	10,320.60	65	10,320.60	100	100.00	500	158,228.30	100	14.47		
6		Kegiatan Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Pening katan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Advokasi dan KIE	12	781,052.50	40	20,070.00	12	13,547.47	12	13,547.47	100	100.00	52	33,617.47	100	4.30		
7		Kegiatan Pemberdaya an Organisasi Masya rakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender	Jumlah Peserta	50	48,840.00	50	42,857.30	0	-	0	-	0	0.00	50	42,857.30	100	87.75		
8		Pelatihan dan Pemben tukan Fasilitator Pendidikan Politik Untuk Perempuan	Jumlah Peserta	30	86,684.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00		
9		Pameran hasil karya perempuan	Jumlah Kab/Kota	7	180,727.50	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00		
10		Peningkatan Peran LM/dalam Pencegah an dan Penanganan Stunting (DID)	Jumlah Lembaga	30	100,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00		
III		Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	14,85	7,108,720.10	17.41	539,258.80	16.83	1,126,297.40	17,25	985,557.55	17,25	87.50		894,594.70	0	12.58	DP3ACSKB	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	2,06		4.037		2.3		3,15		3,15				0	0.00		
			Persentase Kab/Kota Layak Anak	100		14.29		85.71		57,14		57,14				0	0.00		
1		Kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan (Forum Anak)	1. peserta forum anak daerah tingkat provinsi 2. peserta forum anak nasional dan kongres anak indonesia	89	988,921.50	70 & 12	357,794.26	70	197,150.00	70	186,337.70	100	94.52	70 & 12	544,131.96	100	55.02		
2		Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Jumlah peserta Peringatan Hari Anak	400	1,392,217.50	1600	401,354.67	900	375,406.50	900	333,765.09	100	88.91	2500	735,119.76	100	52.80		
3		Kegiatan TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	Jumlah aktifis yang mengikuti TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	480	1,390,246.70	140	203,601.20	0	-	0	-	0	0.00	140	203,601.20	29.16666667	14.64		
4		Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	Kelancaran fungsi Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	1	1,172,840.00	2	405,279.05	1	169,570.00	1	110,118.86	100	64.94	3	515,397.91	100	43.94		
5		Kegiatan Peningkatan fungsi komisi perlindungan anak daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kelancaran fungsi KPAD	1	1,293,621.00	2	410,683.60	1	27,595.00	1	27,595.00	100	100.00	3	438,278.60	100	33.88		
6		Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (PROVILA)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi	480	330,000.00	45	70,806.12	7	15,702.50	7	15,702.50	100	100.00	52	86,508.62	10.83	26.21		
7		Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Kab/Kota	7	117,907.40	7	57,769.08	7	117,907.40	7	117,907.40	100	100	14	175,676.48	100	149.00		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8		Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP /SLTA	Jumlah peserta workshop	700	222,475.00	0	-	700	222,475.00	700	193,640.00	100	87.04	700	193,640.00	100	87.04		
9		Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen kebijakan	1	491.00	0	-	1	491.00	1	491.00	100	100.00	1	491.00	100	100.00		
10		Penanganan Korban Kekerasan di Desa Stunting (DID)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00		
11		Implementasi Desa Layak Anak di Desa Stunting (DID)	0	0	200,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00		
		PANGAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4	1,972,890,349.00	4	7,890,530,000.00	6	1,232,390,961.00	4	1,105,937,238.00	66.7	90	8	1,105,937,238.00	200	56	DINAS PANGAN	
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100		90				100			#DIV/0!						
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan (persen)	100	1,012,130,000.00			100	852,431,800.00	100	784,310,849.00	100.0	92	100	784,310,849.00	100	77		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana per kantoran selama 12 bulan (%)	100	592,240,000.00			100	264,570,651.00	100	226,767,389.00	100.0	86	100	226,767,389.00	100	38		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya (%)	100	145,000,000.00			90	23,991,510.00	100	3,462,000.00	111.1	14	100	3,462,000.00	100	2		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	4	45,300,000.00			95	48,875,000.00	100	48,875,000.00	105.3	100	100	48,875,000.00	2500	108		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			(persen)																
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian dokumen perencanaan (persen)	100	178,220,349.00			93	42,522,000.00	100	42,522,000.00	107.5	100	100	42,522,000.00	100	24		
		Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang aman dikonsumsi (Persen)	80	4,500,000,000.00	40	10,765,000,000.00	86	366,761,854.00	86	354,360,329.00	100	96.62	126	11,119,360,329.00	157.5	247	DINAS PANGAN	
			Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50 (Skor PPH)					83		83.1		100.12048 19							
		Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan ter masuk gerakan makan sayur, buah, kacang-kacangan dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Jumlah event gerakan GEMA SABUK AMANG (kal+D14:D22i)	3	600,000,000.00	2002		2	-	0	-	0	#DIV/0!			0	0		
		Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Jumlah event daerah dan nasional (event)	2	500,000,000.00	2		2	-	0	-	0	#DIV/0!			0	0		
		Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat pemanfaatan lahan perkarangan yang difasilitasi (kelompok)	47	350,000,000.00	48812		15	19,658,700.00	0	19,658,700.00	0	100			0	0		
		Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	jumlah jenis alat uji rappid test (jenis)	7	800,000,000.00	93.09		4	-	0	-	0	#DIV/0!			0	0		
		Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah dokumen data skor PPH (dokumen)	1	300,000,000.00	170		1	-	1	-	100	#DIV/0!	171	-	17100	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan produk pangan lokal hasil pertanian (one village one product)	jumlah pelaku usaha yang difasilitasi (kelompok)	40	600,000,000.00	1		24	212,519,500.00	24	200,826,500.00	100	94.50	25	200,826,500.00	63	33		
		Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan (kali)	8	500,000,000.00	2468		8	55,625,804.00	3	55,254,804.00	37.5	99.33	2471	55,254,804.00	30888	11		
		Penilaian Pelaku Usaha dalam Memperoleh Sertifikat Produk Pertanian (Prima 3, Prima 2, dan No. Registrasi PSAT)	Jumlah komoditi yang mendapat sertifikat produk pertanian (komoditi)	100	500,000,000.00	98.82		50	78,957,850.00	20	78,620,325.00	40	99.57	119	78,620,325.00	119	16		
		Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/ Desa	Jumlah desa/kelurahan KRPL yang dibentuk (kelompok)	14	350,000,000.00	2		7	-	0	-	0	#DIV/0!		-	0	0		
		Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi (persen)	1.1	2,580,000,000.00	15	15,050,000,000.00	1.1	117,791,900.00	0	104,141,900.00	0	88.41	15	15,154,141,900.00	1364	587	DINAS PANGAN	
			Capaian Skor PPH Ketersediaan (Skor)	84				84		86									
		Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	JUmlah orang yang mengikuti kegiatan gerakan pemenuhan gizi (orang)	340	300,000,000.00	10		700	27,672,000.00	0	27,672,000.00	0	100.00	10	27,672,000.00	3	9		
		Pengembangan Daerah Mandiri Pangan	Jumlah terbentuknya daerah mandiri pangan (daerah)	8	550,000,000.00	2		8	16,123,700.00	0	16,123,700.00	0	100.00	2	16,123,700.00	25	3		
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah orang yang tertangani di daeah rawan pangan (orang)	1000	450,000,000.00	10		1000	-	0	-	0	100.00	10		1	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan dokumen ketersediaan dan akses pangan	JUmlah dokumen ketersediaan dan akses pangan (dokumen)	1	40,000,000.00			2	49,391,200.00	2	35,741,200.00	100	72.36	2		200	0		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah dokumen rekomendasi tentang peningkatan ketahanan pangan (dokumen)	1	200,000,000.00			1	10,611,000.00	1	10,611,000.00	100	100.00	1	10,611,000.00	100	5		
		Penyediaan Sarana Pengelolahan Hasil Pangan	Jumlah sarana pengolahan hasil pangan (unit)	1	1,000,000,000.00			1	7,554,000.00	0	7,554,000.00	0	100.00	0	7,554,000.00	0	1		
		Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	Jumlah dokumen data rawan pangan, FSVA dan SKPG (dokumen)	1	40,000,000.00			3	6,440,000.00	3	6,440,000.00	100	100.00	3	6,440,000.00	300	16		
		Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan	Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras) (Persen)		1,715,000,000.00	1	24,980,000,000.00	4.8	566,448,000.00	0.9	552,422,425.00	#VALUE!	97.52	#VALUE!	25,532,422,425.00	#VALUE!	1489	DINAS PANGAN	
			Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah) (persen)							34.66									
			persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (persen)							0									
			Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam) (persen)							9.39									
		Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUMP)	Jumlah GAPOKTAN yang difasilitasi (gapoktan)	5	350,000,000.00	70		5	122,974,000.00	5	122,148,900.00	100	99.33	74.58	122,148,900.00	1492	35		
		Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	JUmlah pembinaan kepada lumbung pangan masyarakat (kali)	2	325,000,000.00	56,529		2	12,412,000.00	2	12,412,000.00	100	100.00	56531.15	12,412,000.00	2826558	4		
		Pengendalian Distribusi Pangan	Jumlah pengawasan pemantauan harga pangan pokok di tingkat produsen, konsumen dan pasokan di 6 pelabuhan (pengawasan)	4	200,000,000.00	56		4	-	0	-	0	#DIV/0!	56	-	1400	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah pengadaan cadangan pangan daerah pemerintah provinsi (ton)	50	575,000,000.00	33,458		20	431,062,000.00	20	417,861,525.00	100	96.94	33477.64	417,861,525.00	66955	73		
		Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	Jumlah dokumen database harga, stock pangan dan dokumen pragnosa pangan (dokumen)	1	120,000,000.00			2	-	2	-	100	#DIV/0!	2	-	200	0		
		Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	Jumlah peserta pelatihan (orang)	1	145,000,000.00			10	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	0		
		PERTANAHAN																	
		Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100	94,945,000.00			0	270,000.00	0	270,000.00	0	100	0	270,000.00	0	0.28	DPU	
		Survey Inventarisasi tanah untuk kepentingan negara	Jumlah dokumen inventarisasi tanah (dokumen)	1	94,945,000.00			0	270,000.00	0	270,000.00	0	100	0	270,000.00	0	0.28		
		LINGKUNGAN HODUP																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5	20,990,864,875.00	4	7,940,312,985.00	4	2,163,793,437.00	0	2,129,087,693.00	0	0.98	4.00	10,069,400,678.00	80.00%	47.97%	DLH	
			Persentase Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100		100		100		0		0.00 %		100.00		100.00 %			
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai (ASN dan THL) Dinas Lingkungan Hidup yang Terlayani dan Responsive Gender (orang)	95	7,432,968,537.00		5,927,990,287.00	95	1,504,978,250.00	95	1,486,821,009.00	100.00%	98.79%	95.00	7,414,811,296.00	100.00 %	99.76%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Responsive Gender (Paket)	40	1,178,600,500.00		1,248,509,241.00	0	432,128,680.00	0	416,288,177.00		96.33%		1,664,797,418.00	0.00%	141.25 %		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Responsive Gender (Paket)					8		8		100.00%		8.00		100.00%			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang Responsive Gender (Orang)	100	642,760,000.00		94,607,244.00	2	28,628,172.00	1	28,628,172.00	50.00%	100.00%		123,235,416.00	0.00%	19.17%		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah di atas 85% (Dokumen)	3	534,701,875.00		220,341,338.00	3	166,388,335.00	3	165,738,335.00	100.00%	99.61%	3.00	386,079,673.00	100.00%	72.20%		
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang Responsive Gender (orang)					0		0									
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (Dokumen)					0		0									
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target di atas 90% (Jenis Laporan)	4	55,000,000.00		42,638,000.00	5	31,670,000.00	5	31,612,000.00	100.00%	99.82%		74,250,000.00	0.00%	135.00%		
		Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Daerah di Bidang Lingungan Hidup	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang Tersusun (Jenis Peraturan Daerah)	1	375,000,000.00		-	0	-	0	-				-				
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Pertumbuhan kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan (%)	100	14,651,945,000.00	100	1,441,320,915.00	100	138,961,663.00	0	138,544,063.00	0.00%	99.70%	100	1,579,864,978.00	100.00%	10.78%	DLH	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tersusun (Dokumen)	2	1,500,000,000.00	1	454,443,704.00	0	-	0	-			1	454,443,704.00	50.00%	30.30%		
		Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tersusun (Dokumen)	2	350,000,000.00		118,235,085.00	1	69,539,263.00	1	69,539,263.00	100.00%	100.00 %	1	187,774,348.00	50.00%	53.65%		
			Buku Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tersusun (Jenis Buku)					0		0		0.00 %							
		Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Persentase Rekomendasi dari Izin Lingkungan yang Diterbitkan (%)	16	220,000,000.00		98,176,400.00	80	49,725,000.00	100	49,307,400.00	125.00%	99.16%	100	147,483,800.00	625.00 %	67.04%		
		Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL - UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Komisi Penilai AMDAL (Rekomendasi)	7	185,000,000.00		80,199,431.00	0	-	0	-	0.00 %			80,199,431.00	0.00%	43.35%		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Komisi Penilai Amdal yang Terlatih dan Responsive Gender (Orang)					0		0		0.00 %							
		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/ Kota (Rekomendasi)	7	350,000,000.00		19,496,200.00	2	19,697,400.00	3	19,697,400.00	150.00 %	100.0%	3	39,193,600.00	42.86%	11.20%		
		Program Peningkatan Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi SO2 (%)	2.00	11,047,134,000.00	0.00	826,497,952.00	2	160,330,650.00	0	157,550,000.00	0.00 %		0	984,047,952.00	0.00%	8.91%	DLH	
			Persentase penurunan Konsentrasi NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas (%)	2.00		0.00		2		0		0.00 %				0.00%			
			Persentase penurunan Konsentrasi COD (%)	2.00		2.00		2		0		0.00 %				0.00%			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)	100.00		0.00		100		0		0.00 %				0.00%			
			Persentase penurunan Konsentrasi TSS (%)	2.00		0.00		2		0		0.00 %				0.00%			
			Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang diawasi (%)	70.00		0.00		65		0		0.00 %				0.00%			
			Persentase penurunan Konsentrasi BOD (%)	2.00		0.00		2		2		100.00%				0.00%			
		Pengendalian Beban Pencemaran Air	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai (Dokumen)	1.00	450,000,000.00	1.00	194,287,150.00	1	39,790,000.00	1	39,787,000.00	100.00%	99.99%	1	234,074,150.00	100.00 %	52.02%		
		Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/ Kegiatan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi (Usaha/Kegiatan)	90.00	787,000,000.00		115,404,870.00	35	8,200,000.00	35	8,200,000.00	100.00%	100.00 %	35	123,604,870.00	38.89%	15.71%		
		Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			262,350,000.00		102,723,600.00		-			0.00 %			102,723,600.00		39.16%		
		Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai (Titik pantau)	81.00	685,000,000.00		246,768,050.00	27	60,584,650.00	27	60,584,650.00	100.00%	100.00 %	27	307,352,700.00	33.33%	44.87%		
		Penerimaan, Penelahaan, dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diverifikasi (Kasus)	14.00	175,000,000.00		66,608,082.00	14	51,756,000.00	14	48,978,350.00	100.00%	94.63%	14	115,586,432.00	100.00 %	66.05%		
		Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja			500,000,000.00		79,939,600.00		-			0			79,939,600.00		15.99%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor limbah terhadap baseline BAU (%)	8.51	22,166,952,000.00	0	791,074,390.00	7.84	148,547,818.00	0	148,547,818.00	0.00 %		0.00	939,622,208.00	0.00%	4.24%	DLH	
			Persentase Volume Sampah yang terolah berbasis peran serta masyarakat (%)	5.00		0		3		0		0.00 %				0.00%	0.00%		
		Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Prapembangunan TPA Regional (Laporan)	1.00	-			1	10,815,500.00	1	10,815,500.00	100.00%	100.00 %		10,815,500.00	0.00%			
		Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (Dokumen)	1.00	98,305,000.00		46,203,000.00	0	-	0	-				46,203,000.00	0.00%	47.00%		
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumalh Kader/Kelompok Masyarakat yang Terlatih (Kader/Kelompok)	55.00	450,000,000.00		441,242,900.00	0	-	0	-				441,242,900.00	0.00%	98.05%		
		Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Jumlah Kampung Iklim yang Mendapat Penghargaan Tingkat Provinsi (Kampung Iklim)	3.00	228,132,000.00		70,626,800.00	0	21,720,318.00	0	21,720,318.00		100.00 %		92,347,118.00	0.00%	40.48%		
			Jumlah Piagam Penghargaan Nominasi Kalpataru (Penghargaan)					1		1		100.00%		1.00					
			Jumlah Laporan Pembinaan Adiwiyata Tingkat Provinsi (Jenis Penghargaan)					1		1		100.00%		1.00					
		Peningkatan Aksi Peduli Lingkungan	Jumlah Aksi Peduli Lingkungan yang Dilaksanakan (Aksi)	1.00	650,000,000.00			1	69,871,600.00	1	69,871,600.00	100.00%	100%	1.00	69,871,600.00	100.00 %	10.75%		
		Pengelolaan Sampah Laut	Laporan Kajian Pengelolaan Sampah Laut (Laporan)	1.00	350,000,000.00			1	46,140,400.00	1	46,140,400.00	100.00%	100%	1.00	46,140,400.00	100.00 %	13.18%		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang	100.00	17,345,250,000.	100	2,785,750,000.0	100	1,734,279,05	0	1,702,430,473.0	0.00 %		100.00	4,488,180,4	100.00 %	25.88%	DLH	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laboratorium Lingkungan	terakreditasi (%)		00		0		0.00		0				73.00				
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah Laporan Tingkat Kepuasan Pelanggan yang Tersusun (Laporan)	1.00	1,675,000,000.00		1,988,462,876.00	1	1,491,032,000.00	1	1,469,349,132.00	100.00%	98.55%	1.00	3,457,812,008.00	100.00 %	206.44 %		
			Jumlah sampel yang Dilayani dalam 1 Tahun (Sampel)					1000		2151		215.10%		2151.00					
		Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk Akreditasi (Parameter)	38.00	405,000,000.00		273,519,129.00	36	192,687,050.00	42	184,309,741.00	116.67%	95.65%	42.00	457,828,870.00	110.53 %	113.04 %		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium			3,000,000,000.00		316,229,000.00		-						316,229,000.00				
		Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan (Titik sampling)	50.00	200,000,000.00			35	50,560,000.00	35	48,771,600.00	100.00%	96.46%	35.00	48,771,600.00	70.00%	24.39%		
		Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium Lingkungan			150,000,000.00		65,801,800.00		-			0.00 %			65,801,800.00		43.87%		
		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penyediaan database kependudukan tk. Provinsi yang akurat	100	4,488,245.40	100	1,761,423.61	100	338,900.80	100	335,979.95	100.00	99.14		2,078,153.56	0.00	46.30	DP3ACSKB	
			Persentase pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi	34.37		18.75		21.87		25		25.00				0.00	0.00		
			Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	90		86.66		89		94,61		94,61				0.00	0.00		
			Persentase masyarakat yang mempunyai KTP	95		99.68		93		99,06		99,06				0.00	0.00		
			Persentase Masyarakat	69.8		69.9		70		87,77		87,77				0.00	0.00		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			yang memiliki Akte Kematian			4													
		Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk. Provinsi dan Penca tatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah rapat Teknis Penyelengaraan Adminduk	9	902,635.50	4	52,916.90	30	30,444.40	30	30,444.40	100.00	100.00	34	83,361.30	100.00	9.24		
		Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5	1,340,462.50	2	305,736.90	0	-	0	-	0.00	0.00	2	305,736.90	40.00	22.81		
		Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan	7	466,525.00	7	334,079.45	7	80,525.00	7	80,486.73	100.00	99.95	1. 4 Kali 2. 1 Lap	414,566.18	100.00	88.86		
		Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota	7	164,180.00	7	102,075.29	7	34,180.00	7	34,126.10	100.00	99.84	1. 4 Kali 2. 1 Lap	136,201.40	100.00	82.96		
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	1. Jumlah peserta rapat PIAK 2. Jumlah peserta konsolidasi database	1. 66 2. 14	253,776.00	1. 66 2. 14	194,217.04	1. 66 2. 14	33,085.00	1. 66 2. 14	32,126.40	100.00	97.10	1. 70 buku 2. 4 kali 3. 40 buku	226,343.44	100.00	89.19		
		Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah Laporan	1	292,199.00	1	198,103.71	1	92,199.00	1	91,720.67	100.00	99.48	2	289,824.38	100.00	99.19		
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Si pil bagi Aparatur (DAK)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	100	533,510.00	7	438,271.92	42	33,510.00	42	32,255.65	100.00	96.26	49	470,527.57	49.00	88.19		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Jumlah Peserta	200	500,000.00	7	116,772.40	0	-	0	-	0.00	0.00	7	116,772.40	3.50	23.35		
		Penyusunan profil Kependudukan Desa Stunting Provinsi Kep.Babel (DID)	Jumlah Buku Profil	100	34,582.40	0	-	200	34,582.40	200	34,445.00	100.00	99.60	200	34,445.00	100.00	99.60		
		Pengelolaan pemanfataan data kependudukan	Jumlah peserta	80	375.00	0	-	80	375.00	80	375.00	100.00	100.00	80	375.00	100.00	100.00		
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
I		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat Kepuasan Aaratur perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	82	16,282,096,660.00		3,774,232,929.00		1,978,799,678.00		1,936,976,063.00		97.89		5,711,208,992.00			DINAS PEMDES	
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan (orang)	81	11,224,615,966.00	81	3,278,153,442.00	81	1,494,770,000.00	81	1,476,961,607.00	100.00	98.81	162	4,755,115,049.00	200.00	42.36		
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)	81	2,991,980,694.00	81	461,204,787.00	81	338,214,678.00	81	321,432,402.00	100.00	95.04	162	782,637,189.00	200.00	26.16		
3		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	25	1,204,650,000.00	2	-	5	50,000,000.00	5	45,465,700.00	100.00	90.93	7	45,465,700.00	28.00	3.77		
4		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daeral dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangk menengah perangkat daerah diatas 85% (dokumen)	16	820,850,000.00	2	15,724,700.00	4	95,815,000.00	4	93,116,354.00	100.00	97.18	6	108,841,054.00	37.50	13.26		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang dibina	10	40,000,000.00	10	19,150,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	10	19,150,000.00	100.00	47.88		
II		PEMBINAAN PEMERINTAH DESA			2,367,603,293.00		616,470,110.00		359,505,546.00		349,978,156.00				966,448,266.00	0.00	40.82	DINAS PEMDES	
5		Penataan Kewenangan Desa (Desa)	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya	12	1,168,621,399.00	12	220,429,310.00	0	10,643,190.00	0	10,607,700.00	0.00	99.67	12	231,037,010.00	100.00	19.77		
			Jumlah Profil Desa/ Kelurahan yang tersusun dan terbina	21		21		21		21		100.00		42	-	200.00	#DIV/0!		
			Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun	2		2		0		0		0.00		2	-	100.00	#DIV/0!		
6		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	40	836,268,300.00	40	320,210,900.00	78	318,042,356.00	78	308,600,456.00	100.00	97.03	118	628,811,356.00	295.00	75.19		
			Jumlah BPD yang dibina	40		35		121		121		100	97.03	156		390.00	0.00		
7		Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dimonitoring bantuan keuangannya	309	212,713,594.00	61	20,980,000.00	309	30,820,000.00	309	30,770,000.00	100.00	99.84	370	51,750,000.00	119.74	24.33		
		Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Melalui Sikeudes	Jumlah Bendahara Desa yang dibina	30	150,000,000.00	34	54,849,900.00	0	-		-	0.00	0.00	34	54,849,900.00	113.33	36.57		
III		PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			4,402,732,502.00		1,588,155,543.00		1,118,943,534.00		1,057,141,982.00				2,645,297,525.00	0.00	60.08	DINAS PEMDES	
8		Pendampingan Kelembagaan masyarakat Desa	Jumlah Posyandu aktif	75	1,211,782,486.00	50	241,563,000.00	75	225,120,000.00	0	-	0.00	0.00	50	241,563,000	66.67	19.93		
			Jumlah Lembaga CPPD yang terbentuk dan terbina	10		0		10		0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
			Jumlah BUMDES yang aktif	30		0		20		20	216,821,000.00	100	96.31	20	216,821,000	66.67	0.00		
			Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif	10		0		10		0	-			0	-	0.00	0.00		
9		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kelompok PKK yang dibina	12	2,190,950,016.00	12	1,142,709,643.00	12	893,823,534.00	12	840,320,982.00	100	94.01	24	1,983,030,625.00	200.00	90.51		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang dinilai dalam kegiatan BBGRM	7		0		0		0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
			Jumlah Rakor PKK Provinsi yang terlaksana	20		0		0		0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
10		Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	2	1,000,000,000.00	2	203,882,900.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	203,882,900.00	100.00	20.39		
			Jumlah laporan yang tersusun	4		0		0		0		0.00		0		0.00	0.00		
			Jumlah peserta yang hadir	160		0		0		0		0.00		0		0.00	0.00		
			Jumlah alat yang diberikan	8		8		0		0		0.00		8		100.00	0.00		
IV		PENDAYAGUNAAN SDA, TTG DAN PELATIHAN MASYARAKAT			2,133,851,709.00		597,390,914.00		81,191,000.00		78,022,346.00				675,413,260.00	0.00	31.65	DINAS PEMDES	
11		Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yang dikutsertakan	7	986,162,543.00	7	258,944,100.00	7	75,221,000.00	0	-	0.00	0.00	7	258,944,100	100.00	26.26		
			Jumlah Peserta workshop TTG yang hadir	20		20		20		20	72,052,346.00	100.00	95.79	40	72,052,346.00	200.00	0.00		
			Jumlah alat TTG yang diberikan kepada POKMAS	15				15		0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
12		Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader KPM yang dibina	50	297,549,043.00	50	338,446,814.00	5	5,970,000.00	5	5,970,000.00	100.00	100.00	55	344,416,814.00	110.00	115.75		
13		Pelatihan kewirausahaan masyarakat	Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100	850,140,123.00	60		1	-	0	-	0.00	0.00	60	-	60.00	0.00		
V		PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN			1,589,765,031.00		41,670,300.00		70,788,900.00		69,844,900.00				111,515,200.00	0.00	7.01	DINAS PEMDES	
14		Pembangunan Kawasan Perdesaan (Kabupaten)	Jumlah Rakor PKP yang terlaksana	2	1,589,765,031.00	1	41,670,300.00	1	70,788,900.00	1	69,844,900.00	100.00	98.67	2	111,515,200.00	100.00	7.01		
			Jumlah Dokumen yang tersusun	2		0		0		0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
			Jumlah Kerjasama	2		0		0		0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
I		Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Gran disign ependudukan	100	5,959,007.00	0	1,344,828.63	12.5	227,163.10	71,42	203,580.93	71,42	89.62		1,546,809.56	0.0	25.96	DP3ACSKB	
			Prevalensi keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I	8.25		na		9.47		6,3		6,3				0.0	0.00		
			Unmeet Need	7.13		8.82		7.39		8,9		8,9				0.0	0.00		
			Persentase Desa/Kampung yang menjadi kampung KB	90.5		44.5		59.9		76,62		76,62				0.0	0.00		
1		Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	500	1,141,199.70	145	266,834.59	0	-	0	-	0.0	0.00	145	266,834.59	29.0	23.38		
2		Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	66	237,821.05	7	68,114.34	30	9,228.00	30	9,228.00	100.0	100.00	7	77,342.34	10.6	32.52		
3		Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	14	696,000.00	60	141,253.00	0	-	0	-	0.0	0.00	60	141,253.00	100.0	20.29		
4		Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	4	1,896,136.85	7	332,583.00	0	-	0	-	0.0	0.00	7	332,583.00	100.0	17.54		
5		Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Pemenang Kampung KB	27	1,377,554.15	6	534,443.70	0	-	0	-	0.0	0.00	6	534,443.70	22.2	38.80		
6		Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan kepada pelajar	Jumlah Peserta	60	52,517.50	0	-	60	52,517.50	60	32,200.30	100.0	61.31	60	32,200.30	100.0	61.31		
7		Pengembangan Kampung KB Cikar (DID)	Jumlah Peserta	414	174,155.00	0	-	0	-	0	-	0.0	0.00	0	-	0.0	0.00		
8		Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Pencegahan Stunting (DID)	Jumlah Peserta	420	383,622.75	0	-	60	165,417.60	60	162,152.63	100.0	98.03	60	162,152.63	14.3	42.27		
		PERHUBUNGAN																	
1	2.09.2.0	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	A	31,635,939,881.00	BB	4,674,102,864.88	B	4,733,027,841.00		4,169,953,086.00				8,844,055,950.88			DISHUB	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	9.01.01		Meningkatnya Kepuasaan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100		100		100											
			Meningkatnya Kepuasaan Masyarkat terhadap pelayanan di sektor transportasi	100		100		70											
	2.09.2.09.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai (Bulan)	12	12,536,145,381.00	12	1,338,807,313.00	12	1,789,287,724.00	12	15,664,240,430.00	100.00%	95.22%	12	3,042,629,085.00	100.00%	24.27%		
	2.09.2.09.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai (Bulan)	12	7,079,255,000.00	12	1,800,521,762.88	12	1,543,735,000.00	12	10,423,511,774.88	100.00%	90.16%	12	3,192,398,727.88	100.00%	45.10%		
	2.09.2.09.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat serta Bimtek (Orang)	75	814,260,000.00	75	49,333,368.00	0	-	0	863,593,443.00	0.00%	0.00%	75	49,333,368.00	100.00%	6.06%		
	2.09.2.09.01.01.05	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	755,525,000.00	4	213,439,084.00	4	88,235,641.00	4	1,057,199,729.00	100.00%	98.99%	4	300,782,407.00	100.00%	39.81%		
	2.09.2.09.01.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD (Dokumen)	5	88,675,000.00	5	38,370,700.00	5	55,000,000.00	5	182,045,705.00	100.00%	99.99%	5	93,365,700.00	100.00%	105.29%		
	2.09.2.09.01.01.07	Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	pengelolaan Website Dinas Perhubungan Prov. Kep. Babel (Tahun)	12	344,100,000.00	12	28,500,000.00	0	-	0	372,600,012.00	0.00%	0.00%	0	28,500,000.00	0.00%	8.28%		
	2.09.2.09.01.01.08	Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayananan Jasa Perhubungan	Tersedianya Database Pelayanan jasa Perhubungan (Buku)	30	121,260,000.00	30	43,257,432.00	0	-	0	164,517,462.00	0.00%	0.00%	0	43,257,432.00	0.00%	35.67%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.01.09	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	Pendaftaran dan Beasiswa Bagi Taruna/I STTD dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Orang)	41	9,701,589,500.00	41	1,115,177,618.00	40	1,256,769,476.00	31	12,073,536,635.00	77.50%	74.15%	31	2,047,093,644.00	75.61%	21.10%		
	2.09.2.09.01.01.10	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Bidang Perhubungan (Dokumen)	5	195,130,000.00	5	46,695,587.00	0	-	0	241,825,592.00	0.00%	0.00%	5	46,695,587.00	100.00%	23.93%		
2	2.09.2.09.01.02	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat	1	87,179,835,908.00		1,080,671,505.00		4,729,090,321.00	-	4,464,172,715.25			0	5,544,844,220.25	0.00%	6.36%	DISHUB	
	2.09.2.09.01.02.01	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap Kondisi Optimal pada ruas jalan provinsi di pulau bangka (%)	1	20,599,248,230.00	0	7,747,290.00	20	1,465,764,675.00	20	1,400,513,370.92	100.00%	95.55%	20	1,408,260,660.92	2000.00%	6.84%		
	2.09.2.09.01.02.03	Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analis Dampak Lalu Lintas (Dokumen)	20	642,955,500.00	4	43,096,815.00	4	3,250,000.00	2	1,250,000.00	50.00%	38.46%	6	44,346,815.00	30.00%	6.90%		
	2.09.2.09.01.02.04	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik (%)	75	6,933,900,000.00	30	498,263,354.00	70	1,236,966,450.00	70	1,127,876,001.00	100.00%	91.18%	100	1,626,139,355.00	133.33%	23.45%		
	2.09.2.09.01.02.05	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tersedianya Perlengkapan jalan Ruas Jalan di Pulau Bangka (unit)	938	41,065,983,106.00	105	250,647,500.00	100	1,977,758,000.00	100	1,891,182,147.33	100.00%	95.62%	205	2,141,829,647.33	21.86%	5.22%		
	2.09.2.09.01.02.15	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudik/ Awak Kendaraan Umum Teladan	Jumlah Peserta Pemilihan Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan (Peserta)	70	582,890,000.00	14	80,311,768.00	14	-	0	-	0.00%	0.00%	14	80,311,768.00	20.00%	13.78%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.02.16	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas (Peserta)	150	1,033,641,000.00	30	97,791,551.00	30	-	0	-	0.00 %	0.00%	30	97,791,551.00	20.00%	9.46%		
	2.09.2.09.01.02.19	Pengoperasian Bus Sekolah	Jumlah Bus Sekolah yang beroperasi	48	9,097,172,000.00	10	102,813,227.00	6	-	0	-	0.00 %	0.00%	10	102,813,227.00	20.83%	1.13%		
	2.09.2.09.01.02.20	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah Bus Sekolah yang beroperasi	5	3,891,181,400.00	0	-	1	19,327,660.00	0	19,327,660.00	0.00 %	0.00%	0	19,327,660.00	0.00%	0.50%		
	2.09.2.09.01.02.16	Peningkatan Peralatan Automatic Traffic Control System (ATCS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pemasangan ATCS	4	1,033,641,000.00	0	-	3	12,083,536.00	0	12,083,536.00	0.00 %	100.00 %	0	12,083,536.00	0.00%	1.17%		
	2.09.2.09.01.02.17	Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	12	394,350,700.00	0	-	3	3,550,000.00	0	1,550,000.00	0.00 %	0.00%	0	1,550,000.00	0.00%	0.39%		
	2.09.2.09.01.02.13	Penyusunan DED dan SID Pelabuhan ASDP di Kawasan konektivitas Pulau bangka dan pulau belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen DED dan SID Pelabuhan ASDP	1	1,377,560,972.00	0	-	1	2,460,000.00	0	2,460,000.00	0.00 %	100.00 %	0	2,460,000.00	0.00%	0.18%		
	2.09.2.09.01.02.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	1	527,312,000.00	0	-	1	7,930,000.00	0	7,930,000.00	0.00 %	0.00%	0	7,930,000.00	0.00%	1.50%		
3	2.09.2.09.01.03	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan Laut	1	17,692,088,820.00				2,410,029,500.00	0	2,377,759,148.00			0	2,377,759,148.00	0.00%	13.44%	DISHUB	
	2.09.2.09.01.	Rehabilitasi Pelabuhan/Dermaga	Jumlah Unit Pelabuhan/ Dermaga yang dipeliahra	1	1,089,631,500.00	0	-	1	6,650,000.00	0	4,650,000.00	0.00 %	69.92%	0	4,650,000.00	0.00%	0.43%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.2.09.01.03.02	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk pengguna jasa pelayaran	Jumlah Pengguna Jasa pelayaran yang mendapatkan sosialisasi keselamatan pelayaran	1	82,356,400.00	0	-	1	12,410,000.00	0	12,410,000.00	0.00 %	100.00 %	0	12,410,000.00	0.00%	15.07%		
	2.09.2.09.01.03.05	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Rambu SBNP yang terpasang (Unit)	12	11,700,000,000.00		3,102,000.00	1	1,997,197,500.00	1	1,988,136,403.00	100.00%	99.55%	1	1,991,238,403.00	8.33%	17.02%		
	2.09.2.09.01.03.24	DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Jumlah DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (Dokumen)	2	462,500,000.00	0	-	2	7,180,000.00	0	7,180,000.00	0.00 %	100.00 %	0	7,180,000.00	0.00%	1.55%		
	2.09.2.09.01.03.04	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang terpelihara	14	3,683,600,000.00			1	366,500,000.00	1	345,290,745.00	100.00%	94.21%	1	345,290,745.00	7.14%	9.37%		
	2.09.2.09.01.03.07	Penyusunan rencana induk pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana induk pelabuhan (RIP) di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-pulau kecil	1	674,000,920.00	0	-	1	20,092,000.00	0	20,092,000.00	0.00 %	100.00 %	0	20,092,000.00	0.00%	2.98%		
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH		100	2,451,626,026.00	1	3,813,482,560.00		2,451,626,026.00		2,350,722,007.00	93.21 %	95.88%	1	6,164,204,567.00	157.23 %	251.43 %	DISKOMINFO	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	53	2,205,832,226.00	47	1,403,061,463.00	53	2,205,832,226.00	44	2,110,558,507.00	83.02 %	95.68%	91	3,513,619,970.00	171.70 %	159.29 %		
		Peningkatan Sarana dan Prasaran aparatur	Jumlah Aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran	53	91,531,300.00	47	2,016,921,000.00	53	91,531,300.00	44	88,956,000.00	83.02 %	97.19%	91	2,105,877,000.00	171.70 %	2300.72%		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya			47	81,900,000.00						98.69%	47	81,900,000.00	0.00%	0.00%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	2	8,669,000.00	2	238,270,097.00	2	8,669,000.00	2	8,669,000.00	100.00%	100.00 %	4	246,939,097.00	200.00 %	2848.53%		
		Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tingkat konsistensi terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah di atas 85%	2	114,611,500.00	2	20,770,000.00	2	114,611,500.00	2	112,431,500.00	100.00%	98.10%	4	133,201,500.00	200.00 %	116.22 %		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)	5	30,982,000.00	5	52,560,000.00	5	30,982,000.00	5	30,107,000.00	100.00%	97.18%	10	82,667,000.00	200.00 %	266.82 %		
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			7,719,104,078.00	0.8944	2,862,346,336.00		7,719,104,078.00		7,650,733,559.00	84.06 %	99.11%	0.8944	10,513,079,895.00	126.29 %	136.20 %	DISKOMINFO	
		Pengelolaan saluran komunikasi pemerintah daerah dan non pemerintah daerah	Jumlah Saluran Komunikasi Pemda yang dikelola	1	597,417,700.00	1	1,465,305,926	1	597,417,700.	1	559,750,341.00	100.00%	93.69%	2	2,025,056,267.00	200.00 %	338.97 %		
			Jumlah Saluran Komunikasi Non Pemda yang difasilitasi	7		9		7		7		100.00%		16	-	228.57 %	0.00%		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi pemerintah daerah	76608	7,021,686,378.00	840	994,735,794.00	76608	7,021,686,378.00	77408	6,992,300,135.00	101.04%	99.58%	78248	7,987,035,929.00	102.14 %	113.75 %		
		Pengelolaan Kemitraan	Jumlah Mitra yang bersinergi dengan Pemda (media lokal)	30	100,000,000.00	45	402,304,616.00	30	100,000,000.00	28	98,683,083.00	93.33 %	98.68%	73	500,987,699.00	243.33 %	500.99 %		
			Jumlah mitra yg bersinergi dengan pemda (Media nasional)	10				10		11		110.00%		11	-	110.00 %	0.00%		
		Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Pengelola Aspirasi publik lingkup pemerintah daerah Yang Difasilitasi Aspirasi Publik	60	-			60	-	0	-	0.00 %	0.00%	0	-	0.00%	0.00%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Aspirasi publik yang dilaporkan	12				12		0				0	-	0.00%	0.00%		
		PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			4,712,451,297.00	0.9475	3,103,130,045.00		4,712,451,297.00		4,543,331,484.00	81.82%	96.41%	0.9475	7,646,461,529.00	135.76%	162.26%	DISKOMINFO	
		Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi	1	3,665,293,497.00	1	1,847,313,000.00	1	3,665,293,497.00	1	3,613,781,184.00	100.00%	98.59%	2	5,461,094,184.00	200.00%	148.99%		
			Jangka waktu layanan colocation (bulan)	12		12		12		12		100.00%		24	-	200.00%	0.00%		
			Jangka waktu layanan paket internet (bulan)	12		12		12		12		100.00%		24	-	200.00%	0.00%		
		Layanan Publik dan Pemerintah berbasis e-Governement	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-Government	5	321,257,800.00	2	1,059,308,045.00	5	321,257,800.00	5	210,970,000.00	100.00%	65.67%	7	1,270,278,045.00	140.00%	395.41%		
			Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment (aplikasi layanan)	5		1		5		5		100.00%		6	-	120.00%	0.00%		
			Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment (website)	40		40		40		40		100.00%		80	-	200.00%	0.00%		
		Penguatan jaringan komunikasi data pemerintah	Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (interkoneksi)	6	625,000,000.00	8	159,400,000.00	6	625,000,000.00	6	623,095,500.00	100.00%	99.70%	14	782,495,500.00	233.33%	125.20%		
			Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (instalasi jaringan komunikasi)	2				2		2		100.00%		2	-	100.00%	0.00%		
			Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (peralatan jaringan komputer)	10				10		10		100.00%		10	-	100.00%	0.00%		
		Pengawasan dan Pengendalian keamanan sistem informasi	Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	0	100,900,000.00	0	37,109,000.00	0	100,900,000.00	0	95,484,800.00	0.00%	94.63%	0	132,593,800.00	0.00%	131.41%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan kebijkan teknis dan SDM Keamanan Informasi	Jumlah kebijakan dan sertifikasi SDM di bidang keamanan informasi	2	-			2	-	0	-	0.00 %	0.00%	0	-	0.00%	0.00%		
		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	5	250,000,000.00	3	-	4	57,026,350	0	54,401,350.00	0.00 %	95.40%	3	54,401,350	6000.00%	21.76%	Dinas KUMKM	
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	3,330,000,000.00	100	-	100	2,989,676,477.00	0	2,955,775,950.00	0	98.86%	100	2,955,775,950.00	100	88.8%		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang terlayani		3,080,000,000.00			89	2,886,330,047.00	89	2,855,425,950.00	100	98.92%	89	2,855,425,950.00		92.71%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran					89	103,346,430.00	89	100,350,000.00	100	97%	89	100,350,000.00		#DIV/0!		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang ditingkatkan kemampuannya		250,000,000.00			-	-	0	-	-	-	0	-		0		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat daerah diatas 85%		250,000,000.00			4	57,026,350.00	4	54,401,350.00	100	95%	4	54,401,350.00		21.76%		
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	persentase pertumbuhan koperasi aktif (%)	15.5	13,115,000,000.00	0	2,420,000,000.00	15.5	70,421,800.00	20	69,261,000.00	129.032258 1	98.35164679	20	2,489,261,000.00	129.0322581	18.98	Dinas KUMKM	
			persentase peningkatan koperasi berkualitas (%)	6.6		0		6.6	102,187,300.00	8.06	97,165,900.00	122.121212 1	95.09	8.06	97,165,900.00	122.1212121			
			persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi (%)	12.7		0		12.7	12,390,000.00	13.33	12,390,000.00	104.960629 9	100.00	13.33	12,390,000.00	104.9606299	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah Peserta yang meningkatnya kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT)		1,550,000,000.00			30	70,421,800.00	30	69,261,000.00	100	98.35	30	69,261,000.00		4.47		
			Jumlah Pembuatan Akta Notaris					2	12,390,000	2	12,390,000.00	100	100.00	2	12,390,000				
		Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Jumlah Peserta Pengkaderan Koperasi		900,000,000.00			0	-	0	-	0	-	0	-		0		
		Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi		1,040,000,000.00			3	82,562,300.00	3	77,540,900.00	100	93.92	3	77,540,900.00		7.46		
			Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Tingkat Provinsi					2	19,625,000.00		19,625,000.00	0	100	0	19,625,000.00				
		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata (%)	7	15,728,584,000.00	0	2,935,000,000.00	7	-	0	152,834,800.00	0	0.00	0	2,935,000,000.00	0	18.66	Dinas KUMKM	
			persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan (%)	4		0		4	-	0		0	0.00	0	-	0			
			persentase peningkatan volume usaha koperasi (%)	12		0		11	152,835,000	-0.066			100.00		152,834,800				
		Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah Pameran yang diikuti		1,751,864,000.00			0	2,510,000.00	0	2,510,000.00	0	100.00	0	2,510,000.00		0.14		
			Jumlah Koperasi yang melakukan kerjasama/ Kemitraan					0	-	0	-	0	-	0	-				
		Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti Bimtek SPI		1,250,000,000.00			0	-	0	-	0	-	0	-		0		
		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Jumlah PPKL yang diberdayakan		1,275,000,000			3	150,325,000.00	3	150,324,800.00	100	100.00	3	150,324,800.00		11.79		
			Jumlah PPKL dan Pembina Koperasi yang ikut Bimtek Perkoperasian					0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan (%)	4	90,655,600,000.00	0	33,600,000,000.00	4	128,633,000.00	0	126,557,000.00	0.00	98.39	0	33,726,557,000.00	0	37.20	Dinas KUMKM	
			pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi (%)	20		0		20	800,000,000.00	0	799,590,000.00	0.00	99.95	0	799,590,000.00	0	#DIV/0!		
			persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil (%)	25		0		15	2,544,767,500.00	0	2,517,726,470.00	0.00	98.94	0	2,517,726,470.00	0	#DIV/0!		
			persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil (%)	15		0		15	1,507,585,510	0	997,094,400.00	0.00	66.14	0	997,094,400	0	#DIV/0!		
		Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Pendamping yang melakukan pendampingan		1,780,000,000.00			2	82,800,000	2	82,800,000.00	100.00	100.00	2	82,800,000.	#DIV/0!	4.651685393		
			Jumlah Pelaku Usaha yang diikutserta dalam pameran					0	45,833,000	1	43,757,000.00	#DIV/0!	95.47	1	43,757,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah promosi produk UMKM melalui market place/ Media Sosial Elektronik dan onlinemarketing					9	2,544,767,500.00	9	2,517,726,470.00	100.00	98.94	9	2,517,726,470.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Jumlah Sertifikat Halal					200	800,000,000.	200	799,590,000.00	100	99.95	200	799,590,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk barcode produk					0	-	0	-	0.00	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah dokumen data usaha kecil					1	240,882,320.00	1	228,493,600.00	100.00	94.86	1	228,493,600.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan kualitas Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Pemula Yang Mengikuti Mangang		720,000,000.00			0	-	0	-	0.00	-	0	-	#DIV/0!	0		
			Jumlah Peserta Sosialisasi Wirausaha Baru					0	-	0	-	0.00	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Peserta Fasilitasi Babel Academy					100	1,266,703,190.00	93	768,600,800.00	93	60.67726095	93	768,600,800.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	persentase SDM Usaha Kecil terlatih (%)	1.23	20,108,950,000.00	1.09	3,700,000,000.00	1.12	2,568,411,160.00	1.37	2,130,464,040.00	122.3	82.9	2.46	5,830,464,040.00	200	28.99	Dinas KUMKM	
			persentase SDM koperasi terlatih (%)	14.49		10.32		10.32	900,000,000.00	6.41	662,269,585.00	62.1	73.6	16.73	662,269,585.00	115.4589372	#DIV/0!		
		Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani		1,200,000,000.00			19	371,979,000.00	0	333,332,840.00	0.0	89.6	0	333,332,840.00	#DIV/0!	27.77773667		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		koperasi dan UMKM	Jumlah peserta pelatihan koperasi dan UKM yang terlayani					195		0		0.0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Perkoperasian Terlatih		3,000,000,000.00			75	450,000,000.00	120	402,896,585.00	160.0	89.5	120	402,896,585.00	#DIV/0!	13.42988617		
			Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Usaha Kecil yang terlatih Terlatih					120	178,795,160.00	100	163,700,000.00	83.3	91.6	100	163,700,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Mutu Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah Audit Surveylance ISO 9001:2015		500,000,000.00			1	67,637,000.00	1	63,052,500.00	100.0	93.2	1	63,052,500.00	#DIV/0!	12.6105		
		Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah peserta pelatihan bidang perkoperasian tersertifikat					115	450,000,000.00	46	259,373,000.00	40.0	57.6	46	259,373,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah peserta pelatihan bidang UMKM tersertifikat					660	1,950,000,000.00	781	1,570,378,700.00	118.33	80.53	781	1,570,378,700.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Pelayanaan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT KUMKM (%)	0	7,970,000,000.00	0	1,460,000,000.00	0	1,507,146,480.00	0	1,435,851,300.00	0.00	95.27	0	2,895,851,300.00	#DIV/0!	36.33	Dinas KUMKM	
			Pertumbuhan produk parekraf (%)	10		0		10	1,507,146,480.00	0	1,030,445,010.00	0.00	68.37	0	1,030,445,010.00	0	#DIV/0!		
		Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Jumlah UKM yang didampingi		1,885,000,000.00			50	1,172,576,290.00	50	1,030,445,010.00	100.00	87.88	50	1,030,445,010.00	#DIV/0!	54.67		
			Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Klinik usaha terpadu					150	81,614,000.00	150	78,614,000.00	100.00	96.32	150	78,614,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Jumlah Sentra Usaha yang disurvey					3	252,956,190.00	2	239,806,190.00	66.67	94.80	2	239,806,190.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		PENANAMAN MODAL																	
I.		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4	23,829,867,000.00	0	8,372,725,209.00	4	2,863,561,424.00	0	2,726,533,200.00	0	95.21	0	11,099,258,409.00	0	46.58	DINAS PENANAMAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100		0		100		0								DM PTSP	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai DPMPTSP yang terlayani	62	8,642,658,000.00	62	4,082,950,409.00	62	1,418,880,524.00	62	1,373,049,327.00	100	96.77	124	5,455,999,736.00	200	63.13		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket pemenuhan sarana dan prasarana kantor;	8	6,788,224,000.00	8	4,212,249,500.00	8	835,775,000.00	8	789,400,100.00	100	94.45	16	5,001,649,600.00	200	73.68		
			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara;	6		6		6		6		100		12		200			
			Jumlah kendaraan yang terpelihara.	4		4		4		4		100		8		200			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	100	350,000,000.00	100	51,400,000.00	0	-	0	-	0	0.00	100	51,400,000.00	100	14.69		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;	20	545,855,000.00	4	3,447,200.00	4	38,151,900.00	4	38,151,900.00	100	100.00	8	41,599,100.00	40	7.62		
			Jumlah peserta rakor.	175		35		35		35		100		70		40			
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	15	244,680,000.00	7	22,678,100.00	4	22,625,000.00	4	22,624,000.00	100	100.00	11	45,302,100.00	73	18.51		
		Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana UPTD yang terkelola	36	7,258,450,000.00	0	-	12	548,129,000.00	12	503,307,873.00	100	91.82	12	503,307,873.00	33	6.93		
I.		Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan jumlah UKM sumber daya mineral yang bermitra dengan investor (UKM Sektor Sumber Daya Mineral)	1	7,122,595,000.00	0	934,448,416.00	1	84,212,380.00		92,822,680.00	0	110	0	45,302,100.00	0.00	6.93	DM PTSP	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pertambahan jumlah UKM pertanian yang bermitra dengan investor (UKM Sektor Pertanian)	2		0		1						0		0.00			
			Pertambahan jumlah profil investasi sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor perikanan dan kelautan (Profil Sektor Perikanan dan Kelautan)	0		0		0						0		0.00			
			Pertambahan jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor (UKM Sektor Pariwisata)	1		0		1						0		0.00			
			Pertambahan jumlah UKM perikanan dan kelautan yang bermitra dengan investor (UKM Sektor Perikanan dan Kelautan)	2		0		1						0		0.00			
			Pertambahan jumlah profil investasi sektor sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor sumber daya mineral (Profil sektor Sumber Daya Mineral)	0		0		3						0		0.00			
			Pertambahan jumlah profil investasi sektor pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian (Profil Sektor Pertanian)	0		0		0						0		0.00			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pertambahan jumlah profil investasi sektor pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pariwisata (Profil sektor Pariwisata)	4		0		0						0		0.00			
1.		Studi Kelayakan Potensi Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi investasi	5	2,014,546,000.00	2	439,856,002.00	0	13,884,640.00	0	13,884,640.00	0	100	2	453,740,642.00	40.00	22.52		
2.		Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	90	713,049,000.00		21,471,100.00	0	-	0	-	0	0	0	21,471,100.00	0.00	3.01		
3.		Pelaksanaan matchmaking daerah	Jumlah penyelenggaraan matchmaking dalam negeri yang diikuti	13	2,375,000,000.00	1	375,830,514.00	0	8,610,300.00	0	17,220,600.00	0	200	1	393,051,114.00	7.69	16.55		
4.		Workshop Pengembangan usaha daerah	Jumlah penyelenggaraan workshop;	4	1,070,000,000.00	1	53,088,400.00	0	-	0	-	0	0	1	53,088,400.00	25.00	4.96		
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop.	120				0		0		0		0		0.00			
5.		Rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKPPMD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi;	4	490,000,000.00	1	18,493,500.00	1	61,717,440.00	1	61,717,440.00	100	100	2	80,210,940.00	50.00	16.37		
			Jumlah peserta yang mengikuti rakor.	135				45		45		100		45		33.33			
6.		Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah	Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi;	4	460,000,000.00	1	25,708,900.00	0	-	0	-	0	0	1	25,708,900.00	25.00	5.59		
			Jumlah peserta forum komunikasi.	150				0		0		0		0		0			
II.		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pertanian (Investor Sektor Pertanian)	4	5,585,815,000.00	9	831,764,363.00	3	35,037,060.00		35,037,060.00	0	100	9	866,801,423.00	30	15.52	DM PTSP	
			Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pariwisata (Investor Sektor Pariwisata)	4		0		3											

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pertambahan Jumlah Investor Sektor Sumber Daya Mineral (Investor Sektor Sumber Daya Mineral)	4		0		3											
			Pertambahan Jumlah Investor Sektor Perikanan dan Kelautan (Investor Sektor Perikanan dan Kelautan)	4		0		2											
1.		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi yang diikuti	30	5,585,815,000.00	9	831,764,363.00	0	35,037,060.00	0	35,037,060.00	0	100	9	866,801,423.00	30	15.52		
III.		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan Sektor Pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi (%)	47	3,727,902,452.00	0	480,816,260.00	45	175,047,030.00	0	168,341,480.00		293.16		649,157,740.00		43.60	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Persentase Perusahaan Sektor pariwisata yang sesua realisasi investasi dengan rencana investasi (%)	47		0		45											
			Persentase Perusahaan Sektor Perikanan dan Kelautan yang sesuai realisas investasi dengan rencana investasi (%)	47		0		45											
			Persentase Perusahaan Sektor Sumber Daya Mineral yang sesuai realisasi investas dengan rencana investasi (%)	47		0		45											
1.		Workshop laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Online	Jumlah perusahaan yang mengikuti workshop;	330	536,250,000.00	36	19,565,000.00	55	52,120,630.00	55	52,120,630.00	100	100.00	91	71,685,630.00	27.58	13.37		
			Jumlah aparatur yang mengikuti workshop.	120		14		20		20		100		34		28.33			
2.		Pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang terpantau	215	2,195,000,000.00	50	438,906,060.00	20	98,070,000.00	26	91,364,450.00	130	93.16	76	530,270,510.00	35.35	24.16		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.		Bimbingan dan penyelesaian masalah penanaman modal	Jumlah kasus yang diselesaikan	8	220,000,000.00	0	-	0	-		-	0	0.00	0	-	0.00	0.00		
4.		Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah dokumen LKPM	3	776,652,452.00	1	22,345,200.00	1	24,856,400.00	1	24,856,400.00	100	100.00	2	47,201,600.00	66.67	6.08		
IV.		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral (%)	86	7,477,750,000.00	0	1,223,641,753.00	82	440,744,894.00	0	427,695,295.00	0.00	97.04	0	1,651,337,048.00	0.00	22.08	DM PTSP	
			Rata-rata ketepatan waktu penyelesaian perizinan (Hari Kerja)	8		0		10		0		0.00							
1.		Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Babel	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	5750	6,014,485,000.00	2150	1,181,403,803.00	1150	440,744,894.00	837	427,695,295.00	72.78	97.04	2987	1,609,099,098.00	66.67	6.08		
2.		Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah dokumen kebijakan	1	50,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
3.		Rakor Forum PTSP se-Provinsi kepulauan bangka Belitung	Jumlah pelaksanaan rakor forum PTSP;	9	1,413,265,000.00	2	42,237,950.00	0	-	0	-	0.00	0.00	2	42,237,950.00	22.22	2.99		
			Jumlah peserta yang hadir	450		100				0		0.00		0		0.00			
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100	25,116,345,067.00	0	3,581,752,083.00	100	3,925,210,648.00		3,749,518,329.00		95.52	0	7,331,270,412.00	0.00	29.19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahragaan (nilai)	75		0		73											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100	23,923,360,067.00	100	3,040,130,048.00	100	3,063,052,000.00	100	2,949,469,251.00	100.00	96.29	200	5,989,599,299.00	200.00	25.04		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	75	669,285,000.00	100	384,266,700.00	80	645,235,503.00	80	607,197,502.00	100.00	94.10	180	991,464,202.00	240.00	148.14		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat Kapasitasnya (Pegawai)	10	75,500,000.00	10	68,630,335.00	2	13,791,200.00	2	13,791,200.00	100.00	100.00	12	82,421,535.00	120.00	109.17		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% Dokumen	5	198,000,000.00	5	63,600,000.00	5	105,381,945.00	5	104,838,012.00	100.00	99.48	10	168,438,012.00	200.00	85.07		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% Dokumen	4	123,200,000.00	4	17,500,000.00	4	41,225,000.00	4	40,425,000.00	100.00	98.06	8	57,925,000.00	200.00	47.02		
		Kegiatan Verifikasi dan evaluasi proposal penerimaan bantuan keuangan APBD di bidang kepemudaan dan olahraga	Jumlah Proposal yang diverifikasi dan dievaluas 3 dokumen	5	127,000,000.00	7	7,625,000.00	4	56,525,000.00	4	33,797,364.00	100.00	59.79	11	41,422,364.00	220.00	32.62		
1		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina (%)	0.39	4,542,197,106.00	0	1,727,268,401.00	0.24	563,179,778.00	98	558,625,678.00	408.3	99.2	98	2,285,894,079.00	25128.21	50.33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Persentase Insan Kepemudaan yang Berprestasi dan berdedikasi Yang mendapatkan pembinaan (%)	32.05		0		19.23											
			Persentase Kunjungan Pemuda Lintas Negara (%)	300		0		240											
			Persentase Pemuda yang menciptakan peluang lapangan Pekerjaan (%)	0.016		0		0.011											
		Pemberdayaan Peran	Jumlah pemuda yang meng	48		24		0		0		0.0	0.0	24		50.00	0.00		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		serta Pemuda	ikuti pemberdayaan peran serta pemuda 52 Pemuda		357,250,000.00		-		-		-				-				
		Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Jumlah pemuda Lintas Negara yang mengikuti pemberdayaan pemuda lintas negara 34 Pemuda	30	415,000,000.00	0	15,330,000.00	0.001	14,515,500.00	0	14,515,500.00	0.0	100.0	0	29,845,500.00	0.00	7.19		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas, kreativitas dan wawasan pemuda 50 Pemuda	70	305,000,000.00	0	2,030,000.00	0.001	2,030,000.00	0	2,030,000.00	0.0	100.0	0	4,060,000.00	0.00	1.33		
		Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah pemuda berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan dan penghargaan 10 Pemuda	10	100,000,000.00	18	2,350,100.00	1	2,350,100.00	1	2,350,100.00	100.0	100.0	19	4,700,200.00	190.00	4.70		
		Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	Jumlah pemuda yang Mengikuti pengembangan, pembinaan dan pelatihan generasi pemuda 91 Pemuda	234	3,064,177,000.00	261	1,581,829,123.00	212	421,050,000.00	165	416,495,900.00	77.8	98.9	426	1,998,325,023.00	182.05	65.22		
		Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda 35 Pemuda	98	300,770,106.00	52	125,729,178.00	35	123,234,178.00	35	123,234,178.00	100.0	100.0	87	248,963,356.00	88.78	82.78		
2		Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional (%)	0.007	8,612,524,407.00	105	5,487,114,069.00	0.006	2,777,698,750.00	105	2,566,673,346.00	17500.00	92.40	210	8,053,787,415.00	3000000.00	93.51	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			Persentase Insan Olahraga Yang Beprestasi dan Berdedikasi yang mendapatkan pembinaan (%)	5.08		0		4.07											
			Persentase pelajar penyandang Disabilitas yang dibina dalam bidang keolahragaan (%)	4.91		0		4.46											
			Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang	3.73		0		3.2											

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			mendapatkan pembinaan (%																
			Pertumbuhan Peserta yang mengikuti Babel Sport Tourism (%)	28		0		24											
			Persentase lansia yang mengikuti olahraga khusus (%)	0.25		0		0.22											
			persentase atlet pelajar berprestasi yang memperole medali yang dibina di tingkat provinsi (%)	6.44		142		5.76											
		Pembibitan, Pembina a dan Pelatihan Olahraga wan Berba kat pada Sentra Keolahragaan da Klub Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina 64 Atlet	48	1,222,853,775.00	65	1,229,953,414.00	72	511,100,000.00	72	505,008,496.00	100.00	98.81	137	1,734,961,910.00	285.42	141.88		
		Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional 175 peserta	70	468,640,224.00	186	313,141,000.00	119	153,697,000.00	119	153,697,000.00	100.00	100.00	305	466,838,000.00	435.71	99.62		
		Bangka Belitung Sport Tourism	jumlah peserta yang mengikuti Bangka Belitung Sport Tourism 200 Peserta	1000	1,650,000,000.00	410	12,500,000.00	0	-	0	-	0.00	0.00	410	12,500,000.00	41.00	0.76		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan 142 Atlet	142	1,732,339,758.00	142	2,205,252,568.00	13	2,112,901,750.00	13	1,907,967,850.00	100.00	90.30	155	4,113,220,418.00	109.15	237.44		
		Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Jumlah Atlet Yang Mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out 168 Atlet	105	1,646,405,035.00	84	581,584,500.00	0	-	0	-	0.00	0.00	84	581,584,500.00	80.00	35.32		
		Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestas 5 Medali	8	1,892,285,615.00	8	1,144,682,587.00	0	-	0	-	0.00	0.00	8	1,144,682,587.00	100.00	60.49		
3		Program Pengembangan Standarisasi Sarana	Persentase Sarana dan Prasa rana Untuk Event Olahraga Tingkat Regional dan Nasiona	25	600,000,000.00	0	723,751,243.00	16.67	1,400,678,535.00	23	1,285,940,505.00	137.97	91.81	23	2,009,691,748.00	92.00	334.95	Dinas Kepemudaan	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Yang Terbangun (%)															dan Olahraga	
			Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Yang Terbangun (%)	10		0		20											
		Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pengadaan sarana Keolahragaan 2 Sarana	1	150,000,000.00	0	34,855,400.00	3	768,057,280.00	3	657,777,280.00	100.00	85.64	3	692,632,680.00	300.00	461.76		
		Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana Kepemudaan yang direvitalisasi dan direhabilitasi 1 Prasarana	2	300,000,000.00	3	678,320,843.00	2	594,544,000.00	2	590,086,000.00	100.00	99.25	5	1,268,406,843.00	250.00	422.80		
		Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	jumlah prasarana yang dilakukan penilaian 1 laporan	1	150,000,000.00	1	10,575,000.00	0.001	38,077,255.00	0.001	38,077,225.00	100.00	100.00	1.00	48,652,225.00	100.10	32.43		
		STATISTIK																	
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN			46,338,600.00	0.9166	497,317,220.00					100%	100%	0.9166	497,317,220.00	170.00 %	327.95 %	DISKOMINFO	
		Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spasial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard		0	-			0	-	0				0	-	0.00%	0.00%		
		Inventarisasi dan Pengelolaan Data sektoral	Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah Rapat Teknis dalam rangka Kompilasi Data Sektoral dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Babel	8	-	8	135,109,000.00	8	-	0	-	0%	0%	8	135,109,000.00	100.00 %	0.00%		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Babel dengan format dashboard	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangan satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel	0	-			0	-	0	-	0%	0%	0	-	0.00%	0.00%		
		Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pemberdayaan TIK yang diperoleh masyarakat	5	40,500,000.00	20	325,001,500.00	5	40,500,000.00	5	40,500,000.00	100%	100%	25	365,501,500.00	500.00%	902.47%		
		PERSANDIAN																	
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN		2	5,838,600.00	3	37,206,720.00	2	5,838,600.00	2	5,838,600.00	100%	100%	5	43,045,320.00	250.00%	737.25%	DISKOMINFO	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	2	5,838,600.00	3	37,206,720.00	2	5,838,600.00	2	5,838,600.00	100%	100%	5	43,045,320.00	250.00%	737.25%		
		KEBUDAYAAN																	
I.		Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi (%)	69.52	60,658,738,650.00	-	7,381,142,311.00	42.38	11,092,929,800.00	-	236,989,039.00	0	2.136397176	-	7,618,131,350.00	-	12.559 0006	DISBUDPAR	
			Persentase budaya lokal yang dimanfaatkan (%)	69.52		-		42.38		-		0		-		-			
			Persentase budaya lokal yang dibina (%)	69.52		-		42.38		-		0		-		-			
			Persentase budaya lokal yang dikembangkan (%)	69.52		-		42.38		-		0		-		-			
		Kajian Tradisi Bangka Belitung	Jumlah naskah kajian tradisi (naskah)	2	110,043,000.00			2	-	-	-								
		Penulisan Sejarah Bangka Belitung	Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung (naskah)	1	257,846,500.00			2	95,211,948.00	-	95,211,948.00								
		Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	Jumlah Dukungan Event yang difasilitasi dan penyelenggaraan operasional lembaga adat (dukungan/ LAM)	30	6,714,059,000.00			2	16,000,000.00	1	16,000,000.00								

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Gita bahana dan Auba de Kemerdekaan RI	Jumlah peserta gita bahana dan aubade (orang)	350	505,820,000.00			0	8,892,157.00	-	8,892,157.00								
		Pengelolaan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola (cagar budaya)	25	-			0	12,446,934.00	-	12,446,934.00								
		Festival Budaya Melayu	Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan (Festival/ event)	1	1,154,730,000.00			0	-	-	-								
		Pentas seni budaya	jumlah sanggar yang dipentaskan (pentas/event)	35	327,313,000.00			15	104,440,000.00	1	104,438,000.00								
		Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	Jumlah Festival yang diselenggarakan (event)	1	790,079,000.00			0	-	-	-								
		PERPUSTAKAAN																	
	1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat nilai SAKIP Perangkat Daerah	3	1,660,790,765.00	100	66,416,750.00	3	59,925,000.00	97.91	58,675,000.00	3,263.80	97.91	197.91	125,091,750.00	6,597.14	7.53	DKPUS	
			tingkat kepuasan apatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	75	367,094,347,358.00	76	1,938,481,839.00	75	2,229,579,400.00	100.36	2,237,589,561.00	133.81	10.36	176.36	4,176,071,400.00	235.15	1.14		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	300	11,942,137,253.00	60	1,798,728,985.00	53	1,932,884,400.00	60	1,875,641,510.00	113.21	97.04	120	3,674,370,495.00	40.00	30.77		
		peningkatan sarana dan prasarana aparatur	jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani	300	354,670,734,776.00	60	129,777,563.00	53	296,695,000.00	60	361,948,051.00	113.21	-	12	491,725,614.00	40.00	0.14		
		peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	300	481,475,329.00	60	9,975,291.00	0	-	-	-	-	-	60	9,975,291.00	20.00	2.07		
		Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%	10	954,894,265.00	2	25,231,650.00	2	28,625,000.00	2	27,375,000.00	100	95.63	4	52,606,650.00	40.00	5.51		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	25	705,896,500.00	5	41,185,100.00	9	31,300,000.00	9	3,130,000.00	100	100	14	72,485,100.00	56.00	10.27		
	2	Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan	pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah	0	-	1.02	-	1030	-	-	-	-	0	1.02	-	0	0	DKPUS	
			pertambahan jumlah koleksi bahan pustaka	2000	1,038,405,000.00	350	72,266,510.00	400	85,533,000.00	43.33	74,796,250.00	10.8	87.5	393.33	147,062,760.00	19.67	14.16		
			pertambahan jumlah pengunjung	61000	3,582,679,000.00	10.345	352,182,664.00	12500	277,625,790.00	20.09	212,503,300.00	0.2	76.5	10,365.09	564,685,964.00	16.99	15.76		
		penyusunan bibliografi induk daerah dan katalog induk daerah	Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	10	691,055,000.00	2	39,504,510.00	2	34,274,000.00	2	32,475,150.00	100.0	94.8	4	71,979,660.00	40	10.42		
		Pengumpulan koleksi hasil terbitan daerah	jumlah koleksi hasil terbitan daerah	2680	347,350,000.00	140	32,762,000.00	75	51,259,000.00	735	42,321,000.00	980.0	82.6	875	75,083,100.00	32.65	21.62		
		pelayanan perpustakaan keliling	jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat	42500	1,432,000,000.00	3.431	72,732,349.00	1100	82,691,800.00	4.624	78,467,000.00	420.4	94.9	8.055	151,199,349.00	18.95	10.56		
		pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah	5070	2,150,679,000.00	260	279,450,315.00	270	194,933,990.00	254	134,036,300.00	94.1	68.8	514	413,486,615.00	10.14	19.23		
	3	Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	persentase perpustakaan terakreditasi	100	1,353,345,000.00	20	120,391,600.00	18	111,802,310.00	8,517.69	53,512,400.00	47,320.50	47.9	8537.6891	173,904,000.00	8537.7	12.85	DKPUS	
			pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	200	1,296,843,000.00	50	37,571,600.00	40	46,009,250.00	-	16,611,100.00	0.0	36.1	50	54,182,700.00	25	4.18		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi	Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi	95	620,000,000.00	15	37,571,600.00	10	46,009,250.00	0	16,611,100.00	0.0	36.1	15	54,182,700.00	15.79	8.74		
		lomba pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat Prov. Kep. Babel	jumlah perpustakaan sekolah yang mengikuti lomba	20	676,502,000.00	14	76,657,000.00	14	68,259,210.00	27	53,512,400.00	192.9	78.4	41	130,169,400.00	205	19.24		
		akreditasi perpustakaan sekolah	jumlah perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi	4	676,843,000.00	4	43,734,600.00	4	43,543,100.00	0	-	0.0	-	4	43,734,600.00	100	6.46		
		Peningkatan lapasitas SDM Perpustakaan	jumlah peserta bimtek	4	676,843,000.00	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		KEARSIPAN																	
	4	Program peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	100	4,704,527,902.00	20	107,469,510.00	20	152,289,000.00	-	99,057,000.00	-	65.05	20	206,526,510.00	20	4.39	DKPUS	
		Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	jumlah peserta bimtek kearsipan OPD Provinsi, Jumlah peserta bimtek kearsipan SMA,SMK dan SLB Provinsi	203	1,446,810,002.00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Arsip masuk desa	jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan layanan sadar arsip	239	910,000,000.00	35	107,469,510.00	0	-	-	-	-	-	35	107,469,510.00	14.64	11.81		
		Lomba kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	jumlah peserta lomba arsiparais teladan tingkat provinsi, jumlah peserta lomba pengelolaan arsip tingkat LKD Kab/kota OPD Kab/Kota dan Desa/ Kelurahan	239	910,000,000.00	-	-	21	99,030,000.00	12	82,862,000.00	57.14	83.67	12	82,862,000.00	5.02	9.11		
		Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep Babel	jumlah OPD Provinsi Kep.Babel yang diawasi	45	1,437,717,900.00	-	-	8	53,259,000.00	16	16,195,000.00	200	30.41	16	16,195,000.00	35.56	1.13		
	5	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kearsipan	pertambahan jumlah arsip dinamis dan statis yang dikelola sesuai standar	1765	3,251,628,000.00	1.428	9,103,000.00	378	120,750,000.00	56.49	128,106,900.00	14.94	106.09	1,484.49	137,209,900.00	84.11	4.22	DKPUS	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah arsip daerah yang dipelihara provinsi	1000	335,503,000.00	200	9,103,000.00	200	4,900,000.00	400	13,443,300.00	200	274.35	600	22,546,300.00	60	6.72		
		Pedampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	jumlah arsip dinamis yang dikelola di 7 Kab/Kota	1900	1,916,125,000.00	1.161	100,375,000.00	1300	9,620,000.00	-	9,620,000.00	100	100	1.161	109,995,000.00	61.11	5.74		
		Pameran arsip statis pemerintah Provinsi Kepulauan Babel	jumlah pengunjung pameran	40	500,000,000.00	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Babel	Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung	40	500,000,000.00	-	-	150	106,230,000.00	150	105,043,600.00	100	98.88	150	105,043,600.00	375	21.01		
		URUSAN PILIHAN																	
		KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan ruang laut pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)					7	551,616,000	3	224,416,000					36.90%	2.10%	DKP	
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Alokasi Pengelolaan Ruang Laut (Lokasi)					10	217,775,000	0	30,455,500					0.00%	13.98%	DKP	
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil diLuar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi dan SOP yang diterbitkan (rekomendasi)					13	568,936,000	0	1,640,000					0.00%	0.29%	DKP	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan dan dilakukan Pembinaan (kelompok)					**1.87**			**916,271,413**							DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)					1254	15,469,253,507	0	9,945,000					0.00%	0.06%	DKP	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan Prasana Usaha Perikanan Tangkap (Unit)					350	125,406,944	0	-					0.00%	0.00%	DKP	
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan tangkap (rekomendasi)					7	43,394,533,493	0	906,326,413					0.51%	2.09%	DKP	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1. Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan (pelabuhan perikanan) 2. Jumlah pelabuhan perikanan provinsi yang meningkat pengelolaannya (pelabuhan perikanan)					**4.2**		**0**	**965,148,800**							DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)					5	76,148,825	0	-					0.00%	0.00%	DKP	
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan (rekomendasi)					13120	1,167,894,619	5,696	216,184,000					43.41%	18.51%	DKP	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi budidaya perikanan laut (Ton)					11	4,976,537,108	1	748,964,800					9.09%	15.05%	UPTD BPI	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut (Paket)	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih yang di adakan					100	105,195,000	0	-					0.00%	0.00%	UPTD LPMMHP	
		PARIWISATA																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	82	44,722,346,150.00		10,693,764,536.00	80	3,942,536,163.00	-	3,454,860,914.00	0	87.63	0	14,148,625,450.00	0	31.64	DISBUDPAR	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	85				77		-									
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN Disbudpar yang terlayani (orang)	57	5,465,100,000.00			57	2,711,944,290.00	237	2,417,815,767.00								
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara (unit)	6	3,140,000,000.00			141	898,506,327.00	38	741,816,127.00								
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Disbudpar yang meningkat kapasitasnya (orang)	15	192,934,500.00			15	-	-	-								
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan dan capaian kinerja yang tersusun (dokumen)	5	470,167,000.00			5	34,725,000.00	1	14,625,000.00								
		Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	Jumlah ASN UPTD yang terlayani (orang)	100	765,325,000.00			4	257,235,546.00	5	242,520,520.00								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (dokumen)	6	364,616,000.00			3	40,125,000.00	4	38,083,500.00								
II.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan domestik melalui media promosi (%)	553752	9,860,429,500.00	-	8,334,677,198.00	466082	114,536,955.00	-	105,211,325.00	0	91.86	-	8,439,888,523.00	-	85.59	DISBUDPAR	
			Persentase kunjungan wisatawan mancanegara melalui media promosi (%)	10554		-		9049		-		0		-		-			
		Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata (bahan promosi dan informasi)	6	953,795,000.00			0	3,410,000.00	-	3,410,000.00								

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Informasi Pariwisata	Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung (TIC)	4	154,730,000.00			0	4,300,000.00	-	4,300,000.00								
		Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata	Jumlah media informasi yang berbasisi IT (media)	2	372,616,000.00			5	4,500,000.00	-	4,450,000.00								
		Kajian Pemasaran Pariwisata							-										
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di da lam dan luar daerah (event)	4	302,078,000.00			0	14,250,000.00	-	14,250,000.00								
		Partisipasi Event Promosi Pariwisata	Jumlah dukungan penyelenggaraan event yang difasilitasi (event)	20	6,371,249,800.00			0	-	-	-								
		Pelaksanaan Fam Trip			258,924,700.00				-										
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	Jumlah kerjasama dengan maskapai dan media (media)	5	562,772,000.00			1	88,076,955.00	-	78,801,325.00								
		Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung	Jumlah buku profil pariwisata (dokumen)	2000	334,264,000.00			0	-	-	-								
		Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	Terselenggaranya event promosi pariwisata (event)	4	550,000,000.00			0	-	-	-								
III.		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi (%)	8.39	7,194,306,901.00	0	3,823,241,484.00	7.38	38,807,000.00	-	38,807,000.00	0	100.00	0	3,862,048,484.00	0	53.68	DISBUDPAR	
			Persentase kelembagaan pariwisata yang berkualitas (%)	100		0		100		-		0		0		0			
			Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih (%)	2.77		0		3.08		-		0		0		0			
		Partisipasi Event Festival Nusantara	Jumlah event / festival yang diselenggarakan (duk event / festival)	40	1,823,259,000.00			0	-	-	-								

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan dasar Sumber Daya Pariwisata (orang)	500	1,700,237,368.00			0	14,415,100.00	-	14,415,100.00								
		penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata (orang)	450	1,500,913,000.00			0	9,987,600.00	-	9,987,600.00								
		penyelengaraan pemilihan putra- putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah sumberdaya manusia yang mampu mempromosikan pariwisata daerah (orang)	60	732,692,000.00			66	-	-	-								
		penyelengaraan kegiatan wisata kuliner	Jumlah pelaku ekonomi kreatif wisata kuliner (orang)	2	215,770,000.00			0	4,410,000.00	-	4,410,000.00								
		pengembangan industri perfilman, animasi, video dan fotografi	Jumlah pelaku ekonomi kreatif industri perfilman, animasi, video dan fotografi (orang)	2	823,014,533.00			0	-	-	-								
		peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	Jumlah dokumen kesepakatan pengembangan kelembagaan pariwisata daerah (dokumen)	1	182,325,000.00			0	3,250,000.00	-	3,250,000.00								
		forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	Jumlah naskah kesepakatan yang disepakati (naskah)	3	216,096,000.00			0	6,744,300.00	-	6,744,300.00								
		PERTANIAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	6		4	7,890,530,000.00	6	7,435,123,489.00	0	7,168,841,930.00	0	96	4	7,168,841,930.00	67	88	DINAS PERTANIAN	
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100		90		100		0			#DIV/0!						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang di layani (ASN)	126	5,418,230,000.00			126	6,237,492,489.00	126	6,089,089,774.00	100	98	126	6,089,089,774.00	100	112		
			Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang dilayani (THL)	136				136		136									
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor (unit)	20	1,402,300,000.00			20	821,210,000.00	20	729,092,522.00	100	89	20	729,092,522.00	100	52		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompentensi (orang)	70	450,000,000.00			70	18,600,000.00	1	12,570,900.00	1	68	1	12,570,900.00	1	3		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dok)	4	407,535,000.00			4	205,431,000.00	4	188,775,484.00	100	92	4	188,775,484.00	100	46		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan (Dok)	5	492,465,000.00			5	152,390,000.00	5	149,313,250.00	100	98	5	149,313,250.00	100	30		
		Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura ((pelaku usaha/poktan))	70	5,750,000,000.00	40	10,765,000,000.00	50	886,233,900.00	50	868,524,551.00	100	98.00	90	11,633,524,551.00	128.57	202.3221661	DINAS PERTANIAN	
			peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) (ton)	4118.19		2002		3095.08		2546.44		82.27	#DIV/0!			0	#DIV/0!		
			Pengembangan kawasan cabai ((kaw/unit))	0		2		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
			Peningkatan produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) (ton)	60017		48812		47017		68290		145.245	#DIV/0!			0	#DIV/0!		
			NTP subsektor Tanaman Pangan (%)	100.08		93.09		97.08		100.39		103.410	#DIV/0!			0	#DIV/0!		
			peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah) (ton)	199.96		170		114.51		97.94		85.53	#DIV/0!	267.94	-	134.00	#DIV/0!		
			Pengembangan kawasan bawang merah ((kaw/unit))	0		1		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar) (ton)	3769.61		2468		3113.22		5386.45		173.02	#DIV/0!	7854.45	-	208.36	#DIV/0!		
			NTP subsektor Hortikultura (%)	101.35		98.82		100.95		101.81		100.85	#DIV/0!	200.63	-	197.96	#DIV/0!		
			Pengembangan Kawasan Padi ((kaw/unit))	0		2		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!		-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	Peningkatan Produksi Bawang dan Cabai (Ha)	18.25	1,450,000,000.00			18.25	549,600,000.00	18.25	531,741,901.00	100	97		531,741,901.00	0	36.67		
		Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	Pelaksanaan GP-PTT Tanaman Padi dan Jagung di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Ha)	100	3,000,000,000.00			100	244,475,000.00	100	244,473,750.00	100	100		244,473,750.00	0	8.15		
		Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ha)	46	1,000,000,000.00			46	-	0	-	0	#DIV/0!		-	0	0		
		Promosi produk pangan dan hortikultura yang bermutu dan berdaya saing	Peningkatan Promosi Produk Hortikultura (Kegiatan)	2	300,000,000.00			2	92,158,900.00	0.5	92,308,900.00	25	100		92,308,900.00	0	30.77		
		Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian	ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian ((%))	16	12,637,640,500.00	15	15,050,000,000.00	15	10,876,501,250.00	15	10,127,156,356.00						0	DINAS PERTANIAN	
			Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian ((%))	10		10		10		10		100	#DIV/0!	20	-	200	#DIV/0!		
			Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ((Dok))	1		2		1		1		100	#DIV/0!	3	-	300	#DIV/0!		
			Peningkatan pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian ((%))	10		10		10		10		100	#DIV/0!	20		200	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan jaringan irigasi tersier	Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi (M3)	1850	3,500,000,000.00			1850	1,951,202,000.00	1850	1,840,695,811.00	100	#DIV/0!	1850		100	0		
		Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tersedianya aplikasi spasial LP2B (Paket/Dok)	1	-			1	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	#DIV/0!		
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Panjang jalan produksi pertanian (Km)	31	1,200,000,000.00			31	8,460,917,250.00	31	7,835,891,313.00	100	93	31	7,835,891,313.00	100	653		
		Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Terjaminnya kualitas pupuk, pestisida melalui pengawasan dan berkembangnya UPJA Alsintan (%)	100	700,000,000.00			100	19,800,000.00	100	19,117,142.00	100	97	100	19,117,142.00	100	3		
		Rembug Tani Nasional	Terlaksananya keikusertaan dalam pelaksanaan PENAS (%)	100	1,837,640,500.00			100	3,920,000.00	0	3,920,000.00	0	100	0	3,920,000.00	0	0		
		Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Meningkatnya Kapabilitas Penyuluh dan SDM Pertanian (orang)	350	1,350,000,000.00			350	160,000,000.00	350	153,460,600.00	100	96	350	153,460,600.00	100	11		
		Fasilitasi asuransi pertanian	Tersedianya asuransi pertanian (Ha)	3500	600,000,000.00			3500	180,342,000.00	3500	176,820,167.00	100	98	3500	176,820,167.00	100	29		
		Pemberian asuransi peternakan	Tersedianya asuransi peternakan (ekor)	1200	200,000,000.00			1200	100,320,000.00	1200	97,251,323.00	100	97	1200	97,251,323.00	100	49		
		Pengembagan optimasi lahan	Meningkatnya indeks pertanian (IP)	100	3,250,000,000.00			100	-	0	-	0	#DIV/0!	0	-	0	0		
		Program Pengembangan Perkebunan	Pengembangan kawasan lada ((kaw/unit))	1	7,550,000,000.00	1	24,980,000,000.00	1	5,563,639,639.00	1	5,485,639,900.00	100	99	2	30,465,639,900.00	200	404	DINAS PERTANIAN	
			NTP subsektor Perkebunan (%)	106.2		69.58		102.4		103.18		101	#DIV/0!	172.76	-	163	#DIV/0!		
			Peningkatan produksi karet (ton)	63575		56529.15		61407		56377.95		92	#DIV/0!	112907.1	-	178	#DIV/0!		
			Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan ((pelaku usaha/poktan))	131		56		81		81		100	#DIV/0!	137	-	105	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan produksi lada (ton)	53883		33457.64		46628		33921.12		73	#DIV/0!	67378.76	-	125	#DIV/0!		
		Intensifikasi tanaman perkebunan	Luasan Tanaman Lada yang di identifikasi/luasan bantuan saprodi tanaman lada (Ha)	1,500	4,000,000,000.00			1500	3,967,739,639.00	1500	3,923,763,500.00	100	99	1500	3,923,763,500.00	100	98		
		Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Penyediaan bibit tanaman perkebunan rakyat (sawit) (Ha)	50	950,000,000.00			50	399,000,000.00	50	398,999,600.00	100	100	50	398,999,600.00	100	42		
		Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	Sarana Bangunan UPH Bokar (unit)	6	2,100,000,000.00			6	1,126,600,000.00	6	1,112,866,800.00	100	99	6	1,112,866,800.00	100	53		
			Alat Pasca Panen Karet (Paket)					6		6		100	#DIV/0!	6	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	Tersedianya Dokumen penetapan harga pasar komoditas perkebunan (sawit) (bulan)	12	500,000,000.00			12	70,300,000.00	12	50,010,000.00	100	71	12	50,010,000.00	100	10		
		Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan ((pelaku usaha/poktan))	32	4,109,830,000.00	14	5,209,830,000.00	20	2,799,142,000.00	20	2,743,730,927.00	100	98	34	7,953,560,927.00	106	194	DINAS PERTANIAN	
			populasi ternak ayam ((ekor))	14,677,240		12,832,090		13,312,700		11,613,564		87	#DIV/0!	24,445,654	-	167	#DIV/0!		
			NTP subsektor Peternakan (%)	98		95		96		100		104	#DIV/0!	195	-	199	#DIV/0!		
			populasi ternak besar sapi ((ekor))	19,164		14,743		15,838		15,742		99	#DIV/0!	30,485	-	159	#DIV/0!		
			Pengembangan kawasan ternak sapi ((kaw/unit))	-		1		-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan populasi ternak	Meningkatnya populasi ternak (sapi) (ekor)	130	2,506,930,000.00			130	2,179,475,000.00	130	2,152,605,041.00	100	99	130	2,152,605,041.00	100	86		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi subsektor peternakan (%)	100	500,000,000.00			100	124,684,000.00	100	119,472,903.00	100	96	100	119,472,903.00	100	24		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Meningkatnya Fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik (ekor)	400	450,000,000.00			400	376,508,000.00	400	355,823,304.00	100	95	400	355,823,304.00	100	79		
		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular zoonosis pada ternak (sampel)	800	400,000,000.00			800	82,525,000.00	800	79,879,679.00	100	97	800	79,879,679.00	100	20		
		Pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik	Terlaksananya pengawalan dan Bimtek Pengolahan Limbah ternak sapi/pupuk kompos/pupuk organik (kelompok)	30	252,900,000.00			30	35,950,000.00	-	35,950,000.00	0	100	0	35,950,000.00	0	14		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Produsen)	54	628,225,000.00	44	778,225,000.00	47	490,510,000.00	47	441,556,175.00	100	90	91	1,219,781,175.00	169	194	Dinas Pertanian	
			Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel ((ton))	250		150		175		175		100	#DIV/0!	325	-	130	#DIV/0!		
			Jumlah varietas unggul yang didaftarkan (Varietas)	2		2		2		2		100	#DIV/0!	4	-	200	#DIV/0!		
			Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel ((polibag))	2,500		1,500		1750		1750		100	#DIV/0!	3,250	-	130	#DIV/0!		
			Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel ((polibag))	2,100,000		1,310,000		1570000		1570000		100	#DIV/0!	2,880,000	-	137	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Terawasinya dan terbinanya produsen benih yang mengedarkan benih (Produsen-penangkar/Kab-kota) (Produsen-penangkar kab/kota)	40	128,225,000.00			40	74,350,000.00	40	73,319,000.00	100	99	40	73,319,000.00	100	57		
		Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kualitas benih di wilayah provinsi kep. Bangka Belitung (%)	100	200,000,000.00			100	72,300,000.00	100	71,491,600.00	100	99	100	71,491,600.00	100	36		
		Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	Bertambahnya jumlah varietas unggul lokal di Provinsi Kep. Bangka Belitung (Varietas)	2	100,000,000.00			2	42,460,000.00	2	30,792,800.00	100	73	2	30,792,800.00	100	31		
		Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD BPSMB (UPTD)	1	200,000,000.00			1	301,400,000.00	1	265,952,775.00	100	88	1	265,952,775.00	100	133		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI ((%))	5	460,600,000.00	5	1,460,600,000.00	5	643,000,000.00	5	638,917,326.00	100	99	10	2,099,517,326.00	200	456	DINAS PERTANIAN	
		Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	Jumlah Layanan Laboratorium Pestisida (layanan)	2	160,600,000.00			2	478,000,000.00	2	476,875,400.00	100	100	2	476,875,400.00	100	297		
			Jumlah Laboratorium Hama Penyakit (unit)					2		0		0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	Layanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12	300,000,000.00			12	165,000,000.00	12	162,041,926.00	100	98	12	162,041,926.00	100	54		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Ketersediaan bibit karet (polibag)	40,000	3,318,670,000.00	40,000	6,620,635,000.00	40,000	2,895,086,506.00	40,000	2,331,550,506.00	100	81	80,000	8,952,185,506.00	200	270	DINAS PERTANIAN	
			Ketersediaan benih sumber padi ((ton))	6		4		6		6		100	#DIV/0!	10	-	167	#DIV/0!		
			Ketersediaan bibit ayam ((ekor))	15,000		6,000		8,000		8,000		100	#DIV/0!	14,000	-	93	#DIV/0!		
			Ketersediaan bibit lada (polibag)	150,000		50,000		75,000		75,000		100	#DIV/0!	125,000	-	83	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana (Dok/Unit)	1		1		1		1		100	#DIV/0!	2	-	200	#DIV/0!		
			Ketersediaan anakan sapi ((ekor))	35		20		25		25		100	#DIV/0!	45	-	129	#DIV/0!		
		Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (UPTD)	1	480,000,000.00			1	442,750,000.00	1	362,497,533.00	100	82	1	362,497,533.00	100	76		
		Pembangunan akses informasi perbenihan	Pusat Unggulan Inovasi (Dokumen)	1	250,000,000.00			1	904,650,000.00	1	430,194,767.00	100	48	1	430,194,767.00	100	172		
		Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Tersedianya Benih Lada dalam Polibag (Polibag)	50,000	938,670,000.00			50,000	42,717,006.00	539	42,717,006.00	1.1	100	539	42,717,006.00	1	5		
		Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Jumlah Bibit Sapi (ekor)	25	1,200,000,000.			25	997,715,000	36	995,568,200.00	144	100	36	995,568,200	144	83		
			Jumlah Bibit Ayam (ekor)	3				8,000		749		9.4	#DIV/0!	749	-	24967	#DIV/0!		
		Integrasi jagung dan sapi	Tersedianya pakan ternak (jagung) (Ha)	1	150,000,000.00			3	25,754,500.00	-	25,754,500.00	0	100	-	25,754,500.00	0	17		
		Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian	Sarana dan Prasarana di UPTD Balai Benih Pertanian (Paket)	1	300,000,000.00			1	481,500,000.00	1	474,818,500.00	100	99	1	474,818,500.00	100	158		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan UPTD Balai Benih Pertanian (DAK)							-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan UPTD Balai Benih Pertanian (DAK)							-			#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		KEHUTANAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85	28,808,429,700.	77	7,500,879,179.0	80.2	2,550,520,60	80	2,399,961,378.0	99.75	94.10	157	9,900,840,5	184.71	34.37	DISHUT	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Pelayanan Dinas Kehutanan (%)	100	00	100	0	100	0.00	100	0				57.00				
		Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100	10,693,240,000.00	100	4,940,635,280.00	181 orang	1,836,200,000.00	181	1,761,574,357.00	100.00	95.94	100	6,702,209,637.00	100.00	62.68		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	100	12,421,330,000.00	100	1,766,605,605.00	181 orang	640,608,200.00	181	567,172,221.00	100.00	88.54	100	2,333,777,826.00	100.00	18.79		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	210	1,625,000,000.00	60	366,867,828.00	25 orang	-		-								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	20	580,186,900.00	8	78,118,976.00	6 dok	28,625,000.00	6	27,500,000.00	100.00	96.07	14	105,618,976.00	70.00	18.20		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Daerah diatas 85%	25	215,405,000.00	10	33,704,000.00	4 lap	45,087,400.00	4	43,714,800.00	100.00	96.96	14	77,418,800.00	56.00	35.94		
		Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Persentase luas Kawasan Hutan yang dikelola (%)	100		62.5		75		75									
			Persentase pertumbuhan nilai hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (%)	0	18,866,697,126.00	0	2,981,312,216.00	0	195,433,997.00	0	183,745,697.00	100	94.02	137.5	3,165,057,913.00	137.5	16.78	DISHUT	
		Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah izin pemanfaatan kawasan	16	2,324,900,150.00		225,906,440.00	2 izin	7,173,700.00	2	7,173,700.00	100	100		233,080,140.00	25	10.03		
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	10	500,000,000.00		110,399,100.00	0 jenis	17,184,700.00	Rp1.783.000.000	17,184,700.00		100		127,583,800.00		25.52		
		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pengelolaan kawasan hutan	8	250,000,000.00		310,275,600.00	6	56,211,597.00	3	56,211,597.00	50	100		366,487,197.00	37.5	146.59		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Jumlah expo/promosi hasil hutan yang diikuti	5	450,000,000.00		750,341,310.00	2 kali	-		-				750,341,310.00		166.74		
		Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Jumlah izin usaha hasil hutan kayu (Izin)	60	1,563,650,163.00		216,725,300.00	12 izin	109,574,000.00	7120 m3	97,885,700.00		89.3		314,611,000.00		20.12		
		Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan			216,296,500.00		211,006,500.00	20 ha	5,290,000.00	0	5,290,000.00	0	100		216,296,500.00		100.00		
		Pembangunan Sarana d Prasarana Operasi onal KPH (DAK Kehutanan)							-		-				-				
		Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Jumlah Penanganan tindak pidana Kehutanan (Berkas Perkara)	2	15,834,049,000.00	2	2,940,308,704.00	2	1,862,509,900.00	2	1,854,002,689.00	100.00	99.54	4	4,794,311,393.00	200.00	30.28	DISHUT	
			Persentase Kawasan Lindung (%)	13.39		20		13.39		20									
			Menurunya Luas Kerusakan Hutan dan Lahan (Hektar)	400		10		600		24.27									
		Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	Jumlah perkara yang ditangani	11	600,000,000.00		202,633,360.00	2 berkas	189,700,000.00	2	185,673,739.00	100.00	97.88		388,307,099.00	100.00	64.72		
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas penurunan kawasan hutan yang terbakar	791	500,000,000.00		317,484,200.00	600 ha	260,018,000.	576	256,916,050.00	96.00	98.81		574,400,250	96.00	114.88		
		Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah luas kawasan hutan yang terlindungi	155	2,167,000,000.00		126,686,600.00	155.000 ha	1,348,472,000.00	30 org & 31 org	1,347,843,000.00		99.95		1,474,529,600.00		68.04		
		Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan ekosistem esensial			63,569,900.00				64,319,900.00	0	63,569,900.00		98.83		63,569,900.00		100.00		
		Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Dikelola (Jumlah DAS)	0	30,215,643,000.00	-	4,645,396,133.00	0	1,087,430,900.00	-	846,878,851.00	#DIV/0!	77.88	0	5,492,274,984.00	0	18.18	DISHUT	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Masyarakat	Luas Kawasan Perhutanan Sosial (Hektar)	38578		38,206		32019		38,952									
			Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar)	3194.3		1,828		2794.44		4,026									
		Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Luas DAS kritis yang terrehabilitasi	3194.64	1,423,000,000.00		205,899,430.00	200 ha	37,865,000.00	200	31,020,400.00	100.00	81.92	200	236,919,830.00	100	16.65		
		Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah kelompok tani huta (KTH) yang terbina	195	3,161,035,000.00		135,878,700.00	100	3,392,600.00	-	3,392,600.00	0.00	100.00	0	139,271,300.00	0	4.41		
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar)	9492.5	600,000,000.00		571,136,796.00	80 ha	463,216,000.00	80	343,330,201.00	100.00	74.12	80	914,466,997.00	100	152.41		
		Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas perhutanan sosial	119.289	600,000,000.00		593,600,013.00	2168 ha	202,588,300.00	2,168	182,672,850.00	100.00	90.17	2168	776,272,863.00	100	129.38		
		Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	Jumlah kelompok pecinta alam/pramuka	13	250,000,000.00		212,607,088.00	2 klpk	2,710,000.00	-	2,710,000.00	0.00	100.00	0	215,317,088.00	0	86.13		
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan (DBH DR)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman tahun pertama (T-1)		300,000,000.00		227,910,750.00	80 ha	377,659,000.00	80	283,752,800.00	100.00	75.13	80	511,663,550.00	1	170.55		
		Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Kelapa Kab Bangka Barat (DAK Kehutanan)							-		-				-				
		Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Mendo Barat Kab Bangka (DAK Kehutanan)							-		-				-				
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	Persentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100	17,156,142,000.00	39	1,609,492,333.00	66.67	2,325,566,020.00	44.65	2,122,488,686.00	66.97	91.27	83.65	3,731,981,019.00	83.65	21.75	DISHUT	
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin	6	400,000,000.00		209,344,003.00	66.67	74,100,000.00	66.67	74,100,000.00	100.00	100	66.67	283,444,003.00	100.00	70.86		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Bubus Panca	6	400,000,000.00		141,172,198.00	66.67	72,965,000.00	66.67	72,965,000.00	100.00	100	66.67	214,137,198.00	100.00	53.53		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas	6	450,000,000.00		178,544,550.00	66.67	74,350,000.00	66.67	73,500,000.00	100.00	98.86	66.67	252,044,550.00	100.00	56.01		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Sungai Sembulan	6	500,000,000.00		253,806,839.00	66.67	73,524,700.00	66.67	54,671,000.00	100.00	74.36	66.67	308,477,839.00	100.00	61.70		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Rambat Menduyung	6	400,000,000.00		153,610,700.00	66.67	74,100,000.00	66.67	74,100,000.00	100.00	100.00	66.67	227,710,700.00	100.00	56.93		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan	6	450,000,000.00		170,135,245.00	66.67	73,125,000.00	66.67	69,465,850.00	100.00	95.00	66.67	239,601,095.00	100.00	53.24		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Belantu Mendanau	6	450,000,000.00		259,094,060.00	66.67	74,500,000.00	66.67	70,200,000.00	100.00	94.23	66.67	329,294,060.00	100.00	73.18		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Gunung Duren	6	450,000,000.00		243,784,738.00	66.67	71,850,000.00	66.67	70,877,800.00	100.00	98.65	66.67	314,662,538.00	100.00	69.93		
		Pelayanan Adminis trasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	18	250,000,000.00			18	208,110,000.00	18	193,419,600.00	100.00	92.94	18	193,419,600.00	100.00	77.37		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Jebu Bembang Antan	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	16	225,000,000.00			16	199,252,000.00	16	184,533,683.00	100.00	92.61	16	184,533,683.00	100.00	82.01		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Bubus Panca	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	22	230,000,000.00			22	200,006,520.00	22	187,463,900.00	100.00	93.73	22	187,463,900.00	100.00	81.51		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Sigambir Kotawaringin	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	20	235,000,000.00			20	199,170,000.00	20	176,522,700.00	100.00	88.63	20	176,522,700.00	100.00	75.12		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Sungai Sembulan	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	26	260,000,000.00			26	226,350,000.00	26	187,541,309.00	100.00	82.85	26	187,541,309.00	100.00	72.13		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Muntai Palas	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	22	245,000,000.00			22	220,231,200.00	22	214,165,300.00	100.00	97.25	22	214,165,300.00	100.00	87.41		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Belantu Mendanau	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	23	270,000,000.00			23	245,000,000.00	23	232,141,879.00	100.00	94.75	23	232,141,879.00	100.00	85.98		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPH Gunung Duren	Jumlah aparatur yang terlayani selama 12 bulan	33	270,000,000.00			33	238,931,600.00	33	186,820,665.00	100.00	78.19	33	186,820,665.00	100.00	69.19		
		ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah dan Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	90	38,999,801,000.00	79.05	10,258,746,435.00	5.95	4,505,759,835.00	5.18	3,923,285,403.00	87.1	87.1	84.23	14,182,031,838.00	93.59	36.36	ESDM	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bln)	60	9,763,720,000.00	24	5,176,976,339.00	12	1,641,160,545.00	11.49	1,571,221,029.00	95.7	95.7	35.49	6,748,197,368.00	59.15	69.12		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur (bln)	60	8,614,875,000.00	24	1,506,943,416.00	12	159,570,000.00	7.45	99,085,833.00	62.1	62.1	31.45	1,606,029,249.00	52.42	18.64		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (orang)	125	808,040,000.00	35	60,207,210.00	30	-	0.00	-	0.0	0.0	35.00	60,207,210.00	28.00	7.45		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD, Renja, Renja Perubahan dan RKA (Dokumen)	25	658,720,000.00	10	75,842,300.00	5	29,825,000.00	4.99	29,773,750.00	99.8	99.8	14.99	105,616,050.00	59.97	16.03		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang Baik (dokumen)	24	563,646,000.00	9	39,487,956.00	5	45,190,600.00	4.96	44,856,100.00	99.3	99.3	13.96	84,344,056.00	58.18	14.96		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyebaran Data Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Jumlah Kegiatan Pameran (keg)	12	860,000,000.00	3	70,230,363.00	3	-	0.00	-	0.0	0.0	3.00	70,230,363.00	25.00	8.17		
		Pendataan Aset SKPD	Jumlah Aset SKPD yang terdata (persen)	80	800,000,000.00	50	-	60	17,989,400.00	10.00	17,989,400.00	16.7	100.0	60.00	17,989,400.00	75.00	2.25		
		Monotoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	Terlaksananya Monev kinerja SKPD dan cabang dinas ESDM Se-Prov.Kep. Babel (laporan)	4	600,000,000.00	1	-	1	-	0.00	-	0.0	0.0	1.00	-	25.00	0.00		
		Rapat korrdinasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya RAKOR di bidang ESDM (keg)	3	300,000,000.00	0	-	1	-	0.00	-	0.0	0.0	0.00	-	0.00	0.00		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka	Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Bangka (bln)	60	3,150,000,000.00	24	681,690,689.00	12	523,599,060.00	9.46	412,711,356.00	78.8	78.8	33.46	1,094,402,045.00	55.76	34.74		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka Barat	Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Bangka Barat (bln)	60	3,100,000,000.00	24	625,373,853.00	12	579,512,660.00	10.23	494,252,376.00	85.3	85.3	34.23	1,119,626,229.00	57.06	36.12		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Bangka Selatan	Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan (bln)	60	3,100,000,000.00	24	574,498,641.00	12	515,223,910.00	9.62	413,132,758.00	80.2	80.2	33.62	987,631,399.00	56.04	31.86		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Belitung	Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Belitung (bln)	60	3,350,000,000.00	24	832,193,780.00	12	550,898,000.00	11.26	517,048,821.00	93.9	93.9	35.26	1,349,242,601.00	58.77	40.28		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas / UPTD Kab. Belitung Timur	Operasional Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Belitung Timur (bln)	60	3,330,800,000.00	24	615,301,888.00	12	442,790,660.00	8.76	323,213,980.00	73.0	73.0	32.76	938,515,868.00	54.60	28.18		
		Program Peningkatan	Persentase cadangan	81.38		1.37		48.83		41.94		85.89	85.89	43.3		53.22	9.96	DINAS	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Mineral yang potensial (%)		3,488,506,000.00		85,278,042.00		305,216,530.00		262,153,737.00			1	347,431,779.00			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Persentase Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta (persen)	100		25.18		56.1		48.18		85.89	85.89	73.36		73.36	9.96		
		Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Hasil Penyelidikan Kebumian (laporan)	5	2,042,836,000.00	2	83,369,542.00	1	66,955,435.00	0.84	56,127,496.00	83.83	83.83	2.84	139,497,038.00	56.77	6.83		
		Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah (laporan)	140	645,670,000.00	20	1,908,500.00	30	117,105,845.00	21.86	85,340,541.00	72.87	72.87	41.86	87,249,041.00	29.90	13.51		
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Cetak Peta	Jumlah pendapatan daerah dari retribusi biaya cetak peta (miliar)	9.2	800,000,000.00	2.3	-	1.9	117,083,150.00	1.89	116,613,600.00	99.60	99.60	4.19	116,613,600.00	45.57	14.58		
		Kajian pengelolaan dan pemanfaatan Mineral Ikutan	Jumlah kajian pengelolaan Mineral Ikutan (kajian)	1	-	0	-	1	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
		Identifikasi Potensi Mineral Ikutan	Jumlah laporan identifikasi mineral ikutan (laporan)	1	-	0	-	1	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
		Penyajian data dan peta potensi sumber daya mineral	Jumlah peta potensi sumber daya mineral (peta)	3	-	0	-	3	4,072,100.00	0.00	4,072,100.00	0.00	100.00	0.00	4,072,100.00	0.00	0.00		
		Program Peningkatan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices (persen)	80	5,871,381,000.00	26.02	348,305,566.00	70	279,527,150.00	58.57	233,876,772.00	83.67	83.67	84.59	582,182,338.00	105.74	9.92	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Persentase DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam (persen)	100		70.51		80		0.00		0.00	83.67	70.51		70.51	9.92		
			Persentase perusahaan yang menempatkan Nilai jaminan reklamasi (persen)	100		47.02		20		16.73		83.67	83.67	63.75		63.75	9.92		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices (IUP)	698	2,864,240,000.00	265	216,425,821.00	567	145,477,150.00	565.87	145,186,400.00	99.80	99.80	830.87	361,612,221.00	119.04	12.63		
		Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Jumlah DBH SDA Mineral (miliar)	390	1,042,844,000.00	275	67,072,745.00	80	66,757,700.00	29.64	24,733,920.00	37.05	37.05	304.64	91,806,665.00	78.11	8.80		
		Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR	Jumlah jaminan Reklamasi perusahaan pertambangan (miliar)	50	1,314,297,000.00	23.77	64,297,000.00	10	59,620,700.00	9.44	56,284,852.00	94.40	94.40	33.21	120,581,852.00	66.42	9.17		
		Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar (Community Developmen and Carporate Sosial Responsibility/CD-CSR)	Jumlah Pembinaan pengembangan dan pemerdayaan masyarakat sekitar (CDCSR) (perusahaan)	60	650,000,000.00	20	510,000.00	20	7,671,600.00	0.00	7,671,600.00	0.00	100.00	20.00	8,181,600.00	33.33	1.26		
		Program Peningkatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Perusahaan pertambangan mineral non logam yang menerapkan good mining practices (%)	80	2,288,956,000.00	39.94	283,368,527.00	65	160,132,150.00	15.05	158,149,012.00	23.16	98.76	54.99	441,517,539.00	68.74	19.29		
		Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mieral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (IUP)	854	2,288,956,000.00	217	283,368,527.00	176	160,132,150.00	173.82	158,149,012.00	98.76	98.76	390.82	441,517,539.00	45.76	19.29		
		Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase perusahaan pendistribusian Minyak dan Gas yang taat aturan (%)	80	3,780,378,000.00	63.05	308,775,840.00	65	233,725,500.00	17.03	186,171,350.00	26.21	79.65	80.08	494,947,190.00	100.11	13.09	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Persentase Dana Bagi Hasil dari lifting MIGAS Babel (persen)	100		27.59		62.2		34.34		55.21	79.65	61.93		61.93	13.09		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan (obyek)	578	1,444,108,000.00	175	89,991,280.00	98	75,297,500.00	96.21	73,920,800.00	98.17	98.17	271.21	163,912,080.00	46.92	11.35		
		Optimalisasi Lifting Migas Prov. Kep. Babel dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil Migas)	Jumlah keikutsertaan REKON Lifting MIGAS (kali)	20	1,343,510,000.00	8	129,692,280.00	4	98,411,250.00	2.15	52,889,900.00	53.74	53.74	10.15	182,582,180.00	50.75	13.59		
		Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas	Jumlah pemantauan ketersedian stok MIGAS (obyek)	407	992,760,000.00	148	89,092,280.00	81	60,016,750.00	80.11	59,360,650.00	98.91	98.91	228.11	148,452,930.00	56.05	14.95		
		PERDAGANGAN																	
		I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (NILAI) SAKIP Perangkat Daerah	4	17,622,589,628.00	3	8,214,646,983.65	3	2,321,082,557.00	3	2,270,109,629.00	100	97.80	6	10,484,756,612.65	150.00	59.50	DISPERINDAG	
			Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100		100		100		200	-	200	0.00	200	-	200.00	0.00		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	660	12,451,640,650.00	264	6,892,918,828.00	130	2,058,525,350.00	394	2,017,461,349.00	394	98.01	394	8,910,380,177.00	59.70	71.56		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	660	2,983,775,000.00	264	1,094,577,855.65	130	156,770,953.00	394	151,462,026.00	394	96.61	394	1,246,039,881.65	59.70	41.76		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	195	712,604,400.00	18	76,477,600.00	0	3,750,000.00	18	1,750,000.00	18	46.67	18	78,227,600.00	9.23	10.98		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Tingkat Konsistensinya terhadap perencanaan jangk menengah Perangkat Daerah di atas 85%(dokumen)	11	1,101,865,750.00	4	108,327,000.00	4	68,612,954.00	8	68,013,254.00	8	99.13	8	176,340,254.00	72.73	16.00		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90 % (Jenis Dokumen)	25	372,703,828.00	10	42,345,700.00	5	33,423,300.00	15	31,432,000.00	15	94.04	15	73,777,700.00	60.00	19.80		
		II. Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Jumlah Volume ekspor (ton)	1816123.86	15,801,510,000.00	1481141.19	920,835,103.00	430453.83	670,057,998.00	354,416.37	473,550,148.00	82.34	70.67	1,835,557.56	1,394,385,251.00	101.07	8.82	DINAS PERINDAG	
			Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang twrsedia setiap waktu (11)	100		83		100		99	-	99.00	0.00	182	-	182.00	0.00		
		Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	270	2,960,000,000.00	71	463,491,600.00	50	353,708,000.00	26	187,810,000.00	52.00	53.10	97	651,301,600.00	35.93	22.00		
		Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku usaha)	250	3,200,000,000.00	59	159,764,172.00	23	30,500,125.00	23	28,651,375.00	100.00	93.94	82	188,415,547.00	32.80	5.89		
		Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah keikutsertaan (kali)	72	7,572,600,000.0	3	176,744,631.00			0	-	-	-	3	176,744,631	4.17	2.33		
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi akses pasar					0		0	-	-	-	0	-	0.00	0.00		
			Jumlah Fasilitasi Akses Pasar					4	275,971,481.00	4	247,210,381.00	100.00	89.58	4	247,210,381.00	0.00	0.00		
		Peningkatan Kemampuan SDM Perdagangan dan Produ	Jumlah (orang)	960	2,068,910,000.00	170	120,834,700.00			0	-	0.00	0.00	170	120,834,700.00	17.71	5.84		
			Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang terlatih	0				10	9,878,392.00	10	9,878,392.00	100.00	100.00	10	9,878,392.00	0.00	0.00		
		Pengembangan Kawasa Strategis/kawasan industri//sentra	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	5	2,186,358,000.00	0	-	0	18,830,975.00	0	18,830,975.00	0.00	100.00	0	18,830,975.00	0.00	1		
		Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri /sentra	Jumlah lokasi Pembinaan (lokasi)	8	1,250,000,000.00	0	-	0	17,340,400.00	0	17,340,400.00	0.00	100.00	0	17,340,400.00	0.00	1.39		
		Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun (buku)	4	1,300,000,000	1	6,900,000.00	1	3,950,000.00	1	3,950,000.00	1.00	100.00	2	10,850,000.	50.00	1		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	258	2,112,060,000.00	108	75,244,717.00	20	59,454,899.00	20	53,935,000.00	1.00	90.72	128	129,179,717.00	49.61	6.12		
		V. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	90	7,717,000,000.00		569,739,830.00	18	215,668,900.00	18	215,473,899.00	100	99.91	18	785,213,729.00	20.00	10.18	DISPERINDAG	
			Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100 = Berdaya)				-	40		43.34	-	108.35	0	43.34	-	0.00	0.00		
		Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang dan Jasa (Barang dan Jasa)	50	4,221,500,000.00	20	271,994,740.00			0	-	0	0	20	271,994,740.00	40.00	6.44		
			Jumlah Barang Beredar yang diawasi					4	51,740,000.00	4	51,665,000.00	100	99.86	4	51,665,000.00	0.00	0.00		
		Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah Kabupaten/Kota (Kab/Kota)	35	1,400,000,000.00	7	84,333,690.00	1	32,579,500.00	1	32,579,500.00	100	100	8	116,913,190.00	22.86	8.35		
		Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Konsumen (orang)	2000	645,500,000.00	800	102,335,200.00	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	100	800	106,335,200.00	40.00	16.47		
		Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen (Pengaduan)	134	1,450,000,000.00	36	41,579,400.00	20	119,849,400.00	108	119,729,399.00	540	99.90	144	161,308,799.00	107.46	11.12		
		Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta (Orang)	1830	2,090,000,000.00	100	69,496,800.00	0	7,500,000.00	0	7,500,000.00	0	100	100	76,996,800.00	5.46	3.68		
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	99.99	5,476,204,000.00	36	1,428,715,624.17	33.33	2,610,790,000.00	42	2,156,462,547.00	92.58	82.60	78	3,585,178,171.17	78.01	65.47	DISPERINDAG	
		Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah Pegawai (orang)	115	4,730,780,000.00	49	1,345,334,814.17	23	2,398,520,000.00	23	2,021,102,047.00	20.00	84.26	72	3,366,436,861.17	62.61	71.16		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah Lingkup Akreditasi (Ruang lingkup)	19	745,424,000.00	4	83,380,810.00	2	212,270,000.00	2	135,360,500.00	10.53	63.77	6	218,741,310.00	31.58	29.34		
		PERINDUSTRIAN																	
		III. Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	Persentase Kawasan Industri	75	6,848,418,000.00		82,144,717.00	25	99,576,274.00	0	94,057,074.00				176,201,791.00		2.57	DISPERINDAG	
			Persentase SIKIM	84				28		0	-								
		Pengembangan Kawasan Strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	5	2,186,358,000.00	0	-	0	18,830,975.00	0	18,830,975.00	0	100		18,830,975.00	0	0.86		
		Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri /sentra	Jumlah lokasi Pembinaan (lokasi)	8	1,250,000,000.00	0	-	0	17,340,400.00	0	17,340,400.00	0	100		17,340,400.00	0	1.39		
		Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun (buku)	4	1,300,000,000.00	1	6,900,000.00	1	3,950,000.00	1	3,950,000.00	100	100		10,850,000.00	0	0.83		
		Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	258	2,112,060,000.00	108	75,244,717.00	20	59,454,899.00	20	53,935,699.00	100	91		129,180,416.00	0	6.12		
		IV. Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri	80	15,533,116,936.00		3,813,119,482.00	20	4,095,327,241.00	20	3,734,793,175.00	100.00	91.20	20	7,547,912,657.00	25.00	48.59	DISPERINDAG	
			Persentase Produk Industri yang berdaya saing	80				20		20	-	100.00	0.00	20	-	25.00	0.00		
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	Jumlah SDM Yang Terlatih (Pelaku Industri/Masyarakat)	580	1,997,439,000.00	205	766,523,510.00	0	24,707,786.00	0	24,707,786.00	0.00	100.00	205	791,231,296.00	35.34	39.61		
		Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)	4050	4,666,086,468.00	1310	1,073,199,780.00			0	-	0.00	0.00	1310	1,073,199,780.00	32.35	23.00		
			Jumlah Produk industri yang terfasilitasi Perizinan	0				0	15,155,500.00	0	15,155,500.00	0.00	1.00	0	15,155,500.00	0.00	0.00		
		Rumah Pengembangan Produk	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)	2280	3,112,601,648.00	800	414,759,420.00			0	-	0.00	0.00	800	414,759,420.00	35.09	13.33		
			Jumlah kemasan produk industri yang terfasilitasi	0				400	1,242,390,195.00	400	1,097,483,085.00	100.00	88.34	400	1,097,483,085.00	0.00	0.00		
		Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP (OVOP)	43	900,000,000.00	12	106,195,400.00	16	92,475,000.00	15	91,510,749.00	93.75	98.96	27	197,706,149.00	62.79	21.97		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/ Masyarakat (Pelaku Industri/ Masyarakat)	2550	4,306,989,820.00	1000	1,452,441,372.00			0	-	0.00	0.00	1000	1,452,441,372.00	0.39	33.72		
			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)					350	713,967,245.00	350	636,622,075.00	100.00	89.17	350	636,622,075.00	0.00	0.00		
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Teknolgi Tepat Guna (TTG)	11	550,000,000.00	0	-	2	106,631,515.00	2	106,398,815.00	100.00	99.78	2	106,398,815.00	18.18	19.35		
			Jumlah Peserta Seminar Nasional					0				0.00	0.00	0	-	0.00	0.00		
			Jumlah Kemasan produk terfasilitasi					5000	1,900,000,000.00	5000	1,762,915,165.00	100.00	92.79	5000	1,762,915,165.00	0.00	0.00		
		TRANSMIGRASI																	
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	180	86,520,000.00	80	196,614,000.00		127,190,000.00		-	0	0	80	196,614,000.00	44.44	227.25	DISNAKER	
		peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi	Meningkatnya Pengatuhan dan Keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup dikawasan transmigrasi (Orang)			40	104,500,000.00	0	94,860,000.00	0	-	0	0	40	104,500,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	Meningkatnya Pengatuhan dan Keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup dikawasan transmigrasi (Orang)	1	86,520,000.00	40	92,114,000.00	0	32,330,000.00	0	-	0	0	40	92,114,000.00	400	106.47		
			Meningkatnya Pengatuhan dan Keterampilan dan meningkatkan kualitas hidup dikawasan transmigrasi (Orang)					25		0		0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		FUNGSI PENUNJANG																	
		PERENCANAAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat SAKIP Bappeda (Predikat)	92	37,869,534,100.00	82	8,131,546,000.00	85	7,512,876,000.00	85	3,280,708,284.00	100	43.67	167.0	3,280,708,284.00	181.52	8.66	BAPPEDA	
			Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Predikat)	100		100		100		100									
		PelayanaN Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Org)	0	-			100	2,692,614,209.00	100	2,427,762,919.00	100	90.16	100.0	2,427,762,919.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Org)	100	3,254,243,000.00			100	946,053,000.00	100	748,751,365.00	100	79.14	100.0	748,751,365.00	100.00	23.01		
		Peningkatan Disiplin Aparatur			145,000,000.00														
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani (Org)	35	650,000,000.00			3	14,779,900.00	3	14,779,900.00	100	100	3.0	14,779,900.00	8.57	2.27		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporaN kinerja dan keuangan yang tersusun (Laporan)	7	175,000,000.00			7	30,000,000.00	7	29,975,000.00	100	99.92	7.0	29,975,000.00	100.00	17.13		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen)	3	250,000,000.00			3	59,939,100.00	3	59,439,100.00	100	99.71	3.0	59,439,100.00	100.00	23.78		
		Peningkatan Kapasitas ASN Perecana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang digunakan berdasarkan SIPD dan (Persen)	100	26,990,808,050.00	85	5,014,050,000.00	90	5,449,455,000.00	90	1,399,061,557.00	100	25.67	175	1,399,061,557.00	175.00	5.18	BAPPEDA	
			Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti (Persen)	85		75		75		90									
			Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD) (Persen	100		85		90		90									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun (Dokumen)	2	2,500,000,000.00			3	869,350,789.00	3	842,597,839.00	100	96.92	3	842,597,839.00	150.00	33.70		
		Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah system informasi perencanaan daerah yang terkelola (Aplikasi) pembangunan	2	250,000,000.00			1	17,376,043.00	3	17,376,043.00	100	100	3	17,376,043.00	150.00	6.95		
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun (Laporan)	17	1,550,000,000.00			10	60,000,000.00	10	57,274,800.00	100	95.46	10	57,274,800.00	58.82	3.70		
		Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah system informasi perencanaan pembangunan daerah yang terkelola (Aplikasi)	2	175,000,000.00			1	60,000,000.00	1	56,000,000.00	100	93.33	1	56,000,000.00	50.00	32.00		
		Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah elemen data edatabase pada system informasi pembangunan daerah yang terisi tervalidasi (Data)	500	570,000,000.00			0	-	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00		
		Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan/rekomendasi rumusan kebijakan percepatAn pembangunan daerah (Laporan/Rekomendasi)	10	1,735,690,550.00			2	400,000,000.00	2	389,600,000.00	100	97.4	2	389,600,000.00	20.00	22.45		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan sinkronisasi (Laporan)	3	500,000,000.00			2	36,212,875.00	2	36,212,875.00	100	100	2	36,212,875.00	66.67	7.24		
		Analisis Isu-isu Stategis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																	
		Analisis Isu-isu Strategis Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																	
		Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan mitra kerja Bidang Infrastruk dan Kewilayahan yang ditin daklanjuti (Persentase)	100	8,857,969,500.00	85	1,815,000,000.00	90	1,978,250.00	90	24,800,600.00	100	1.25	175	24,800,600.00	175.00	0.28	BAPPEDA	
			Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur da Kewilayahan yang baik (memliki rencana kinerja yang baik tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya de ngan indikator yang tepat) (Persentase)	90	-	90		90		90									
		Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerJa pada mitra kerja Sub Bigang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I (Kali)	4	492,405,000.00	1		1	8,396,400.00	1	8,396,400.00	100	100	2	8,396,400.00	50.00	1.71		
		Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerpada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengem Bangan Wilayah II (Kali)	4	607,753,000.00			4	5,190,000.00	4	5,190,000.00	100	100	4	5,190,000.00	100.00	0.85		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I	Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kiner pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pengem Bangan Wilayah I (Kali)	1	400,000,000.00			2	8,514,200.00	2	8,514,200.00	100	100	2	8,514,200.00	200.00	2.13		
		Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II	Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ki nerja pada mitra kerja Sub Bidang Infrastruktur dan Pe ngembangan wilayah II(Kali)	1	500,000,000.00			1	2,700,000.00	1	2,700,000.00	100	100	1	2,700,000.00	100.00	0.54		
		Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Renstra PD mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya denganindikator Yang tepat) (Persentase)	90	8,702,707,500.00	90	1,805,000,000.00	90	1,886,500,000.00	90	18,856,000.00	100	100	180	6,010,000.00	200.00	0.07	BAPPEDA	
			Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditindaklanjuti (Persentase)	90		90		90		90									
		Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Jumlah rapat perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kiner pada Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kali)	4	364,652,000.00			3	12,846,000.00	3	12,846,000.00	100	100	3	12,846,000.00	75.00	3.52		
		Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perencanaanurusan ingkungan Hidup,Kehutanan, ESDM, Pangan,Pertanian, Kelautan danPerikanan yang dihasilkan (Rekomi/Lap	4	464,652,000.00			0	-	0	-	100	100	0	-				

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Terlaksananya rapat pada Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I (Kali)	1	475,000,000.00			1	1,230,000.00	1	1,230,000.00	100	100	1	1,230,000.00	100.00	0.26		
		Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Jumlah koordinasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II (Kali)	1	425,000,000.00			1	4,780,000.00	3	4,780,000.00	100	100	3	4,780,000.00	300.00	1.12		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Prov. Kep. Babel																	
		Penyusunan Neraca Perdagangan antar pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																	
		Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan	Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang social budaya Dan pemerintahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) (Persentase)	90	8,944,352,250.00	90	1,900,000,000.00	90	2,025,000,000.00	90	60,356,800.00	100	2.98	180	60,356,800.00			BAPPEDA	
			Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti (Persentase)	90		75		80		80									
		Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah rapat pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I (Kali)	4	625,000,000.00			2	40,100,500.00	2	40,100,600.00	100	100	2	40,100,600.00	50.00	6.42		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah rapat pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II (Kali)	4	425,000,000.00			1	8,188,000.00	1	8,188,000.00	100	100	1	8,188,000.00	25.00	1.93		
		Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Jumlah koordinasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya Dan Pemerintahan I (Kali)	1	400,000,000.00			5	12,068,200.00	5	12,068,200.00	100	100	5	12,068,200.00	500.00	3.02		
		Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Jumlah koordinasi emantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II (Rekomendasi/La poran)	1	400,000,000.00			0	-	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00		
		Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Jumlah study perencanaan bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang dihasil Kan (Laporan)	1	360,000,000.00			0	-	0	-	0	0	0	-	0.00	0.00		
		Anaisis Isu-isu Strategis Pencapaian Indikator SDGs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																	
		KEUANGAN																	
1		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	5	90,415,438,860.00	4	17,952,638,519.00	4	18,468,082,326.00	4	11,605,432,078.00	100.00	62.84	8	29,558,070,597.00	160.00	32.69	BAKUDA	
			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100		76.39		100		73.74									
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)	100	15,238,963,668.00			100	10,688,023,899.00	100	9,712,374,652.00	100.00	90.87						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)	100	4,748,561,982.00			75	1,975,359,500.00	81.875	1,782,408,669.00	109.17	90.23						
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat (orang)	35	364,651,875.00			5	44,802,757.00	5	44,673,757.00	100.00	99.71						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)	3	54,684,000.00			3	18,370,000.00	3	18,370,000.00	100.00	100.00						
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)	7	54,684,000.00			7	31,375,000.00	7	31,375,000.00	100.00	100.00						
		Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA (bulan)	12	169,050,000.00			12	16,250,000.00	12	16,230,000.00	100.00	100.00						
2		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	25.48	45,386,992,961.00	28.25	8,480,854,500.00	24.62	9,594,262,119.00	25.06	6,384,568,516.00	101.79	66.55	53.31	14,865,423,016.00	209.22	32.75	BAKUDA	
			Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah : (NILAI)	4		3		3		3									
		Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Asistensi penyelesaian permasalahan pajak daerah (kali)	8.96136E+11	874,440,571.00			7	115,704,000.00	7	91,262,417.00	100.00	78.88						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Kebijakan pendataan dan penagihan pajak daerah (dokumen)					5		5		100.00							
		Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah (bulan)	12	898,327,082.00			12	366,278,360.00	12	284,434,888.00	100.00	77.66						
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Nilai IKM pada layanan Samsat corner (NILAI)	12	107,257,499.00			80.5	55,564,000.00	80.6	42,018,379.00	100.12	75.62						
		Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait (kali)	2	131,364,772.00			1	25,195,000.00	1	-	100.00	0.00						
		Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik (kali)	7	801,281,000.00			30	143,069,000.00	31	140,625,000.00	103.33	98.29						
		Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang (NILAI)	12	1,300,000,000.00			84	1,083,249,000.00	86.14	1,012,566,158.00	102.55	93.47						
			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kota Pangkalpinang (Rp)					933263571000		912530485380		97.78							
		Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka (NILAI)	12	1,304,767,408.00			90	1,225,440,000.00	96.7	1,078,079,353.00	107.44	87.97						
			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka (Rp)					708433168000		644588848380		90.99							
		Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung (NILAI)	12	1,317,000,000.00			84	969,421,250.00	82.5	906,044,508.00	98.21	93.46						
			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Belitung (Rp)					739184182000		555156082440		75.10							
		Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah	Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (NILAI)	12	665,392,000.00			80	681,223,200.00	80.43	601,919,914.00	100.54	88.36						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kabupaten Bangka Tengah	Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Rp)					566795523000		369272790 23		65.15							
		Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka Barat (Rp	12	650,000,000.00			330901281000	867,076,250.00	307261748 35	623,032,075.00	92.86	71.85						
			Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat (NILAI)					82		85.98		104.85							
		Peningkatan pelayanan pemerintah pada	Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan (NILAI)					84.5	833,558,542.00	77.99	756,496,484.00	92.30	90.76						
			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Bangka Selatan 45.815.267.200 (Rp)					281281034000		274121889 98		97.45							
		Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	Nilai IKM pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur (NILAI)	12	1,128,200,000.00			79	918,136,375.00	84.28	816,839,340.00	106.68	88.97						
			Realisasi pendapatan pajak daerah pada UPT Wilayah Kabupaten Belitung Timur (Rp)					342125560 13		333296082 11		97.42							
		Penyusunan Regulasi/ Kebijakan Bidang Tata Kelola Pajak Daerah	Jumlah Peraturan tentang tata kelola pajak daerah tersusun (peraturan)	3	110,579,000.00			3	55,639,380.00	3	31,250,000.00	100.00	56.17						
3		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%)	74.52	7,356,066,449.00	71.75	1,411,445,825.00	75.38	1,642,050,038.00	74.94	198,651,970.00	99.42	12.10	146.69	1,610,097,795.00	196.85	21.89	BAKUDA	
		Intensifikasi dan Eksten sifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Jumlah data objek baru yang dapat dijadikan sumber PAD (data)	45	586,776,903.00			10	65,006,213.00	10	62,821,213.00	100	96.64						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Tersusunnya dokumen rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten kota (dokumen)	12	84,228,642.00			0	-	0	-	0	0						
		Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Tersusunnya dokumen kesepakatan untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (dokumen)	1	248,897,000.00			0	-	0	-	0	0						
		Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	Laporan hasil pengawasan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (laporan)	3.96929E+12	700,000,000.00			2	89,288,521.00	2	60,653,521.00	100	67.93						
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah			112,452,000.00				-										
		Penyusunan Regulasi/ Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Jumlah Peraturan Tentang Regulasi/Kebijakan Bidang tata Kelola retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah (peraturan)	2	200,000,000.00			5	115,300,000.00	5	75,177,236.00	100	65.20						
4		Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD (nilai)	3	23,497,308,393.00	3	4,374,492,500.00	3	4,991,211,750.00	3	1,339,804,697.00	100	26.84	6	5,714,297,197.00	200.00	24.32	BAKUDA	
			Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS (%)	100		99.35		100		95									
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APB	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD (rancangan peraturan)	4	2,158,105,362.00			4	1,436,259,199.00	4	1,076,173,397.00	100	74.93						
		Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (orang)					0	-	0	-	0	0						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD (keputusan)					14	368,830,000.00	14	202,622,300.00	100	54.94						
		Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah asistensi pemecahan permasalahan penyusunan APBD Kabupaten/Kota (asistensi)	8	375,000,000.00			3	150,344,000.00	3	61,009,000.00	100	40.58						
5		Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan	Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (%)	100	8,791,629,142.00	77.78	1,520,000,000.00	100	2,070,000,000.00	100	360,746,000.00	100	17.43	177.78	1,880,746,000.00	177.78	21.39	BAKUDA	
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (rancangan peraturan)	1	430,000,000.00			1	165,020,000.00	1	158,400,000.00	100	95.99						
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA keuangan	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan (bulan layanan)					12	170,900,000.00	12	131,138,000.00	100	76.73						
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (laporan)	1	180,000,000.00			1	20,100,000.00	1	11,100,000.00	100	55.22						
		Evaluasi Raperda Kab/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD (keputusan)	7	200,000,000.00			7	42,432,320.00	7	41,400,000.00	100	97.57						
		Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	1	280,000,000.00			1	25,277,850.00	1	18,708,000.00	100	74.01						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Akutansi dan Pelaporan			500,000,000.00				-										
6		Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya (Rp)	5.9364E+12	14,039,555,563.00	5.255E+12	2,702,898,850.00	5.2445E+12	3,058,588,735.00	5.81088E+12	630,971,715.00	110.8	20.6	###########	3,333,870,565.00	186.41	23.75	BAKUDA	
			Prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD (%)	0.4		0.23		0.36		0.78									
		Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (orang)					100	15,425,000.00	100	9,025,000.00	100	58.51						
			Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (orang)					0		0		0							
		Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			305,000,000.00				-										

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Mili Daerah (laporan)	2	273,279,389.00			2	108,927,200.00	2	53,201,500.00	100	48.84						
		Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (keputusan)	1	300,000,000.00			1	74,707,043.00	1	74,707,043.00	100	100						
		Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (keputusan)	1	135,000,000.00			1	175,220,000.00	1	112,528,900.00	100	64.22						
		Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (laporan)	2	210,000,000.00			2	56,897,000.00	2	25,121,000.00	100	44.15						
		Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sertifika	20	350,000,000.00			20	222,111,300.00	15	131,767,318.00	75	59.32						
		Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan (keputusan)	1	150,000,000.00			1	24,312,900.00	1	24,312,900.00	100	100						
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	Tersedianya dan beroperasinya aplikasi sistem SIMDA ter-update (bulan)	12	480,000,000.00			12	206,120,000.00	12	143,878,576.00	100	69.80						
		Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (dokumen)	1	348,162,980.00			1	127,192,057.00	1	39,726,478.00	100	31.23						

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Regulasi/Kabijakan Biang Tata Kelola Aset Daerah	Jumlah Peraturan Tentang regulasi / kebijakan bidang tata kelola aset daerah (peraturan)					1	25,030,000.00	1	16,703,000.00	100	66.73						
7		Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten (%)	100	3,970,407,562.00	100	828,793,700.00	100	829,173,070.00	100	18,225,000.00	100	2.20	200	847,018,700.00	200.00	21.33	BAKUDA	
		Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (orang)					0	-	0	-	0	0						
		Sosialisasi Penatausahaan Keuangan	Jumlah Peserta sosialisasi (orang)	100	175,692,000.00			0	-	0	-	0	0						
		Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan (dokumen)	4	204,974,000.00			4	112,220,000.00	4	18,225,000.00	100	16.24						
		KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah																BKPSDMD	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang Terlayani (Orang)	187	5,505,000,000.00	195	6,107,313,267.00	187	4,630,100,864.00	182	4,509,376,471.00	97.19	97.39	377	10,616,689,738.00	202	193		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor (Paket)	6	6,145,000,000.00	11	1,730,772,898.00	0	1,135,470,399.00	0	939,910,206.00	0	82.78	11	2,670,683,104.00	183	43		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara (Paket)	0	-	10		4		4		100		14		#DIV/0!			
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara (Unit)	0	-	6		7		7		100		13		#DIV/0!			
			Jumlah Mesin Genset Yang Terpelihara (Unit)	0	-			1		1		100		1		#DIV/0!			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya (Orang)	567	1,100,000,000.00	1457	394,641,500.00	0	-	0	-	0	0	1457	394,641,500.00	257	36		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (Dokumen)	2	260,000,000.00	10	34,035,600.00	5	47,494,500.00	5	44,419,500.00	100	93.53	15	78,455,100.00	750	30		
			Jumlah Dokumen (Dokumen)	0	-	2		2		2		100		4		#DIV/0!			
		Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	0	-	9	4,940,700.00	9	42,439,900.00	9	42,069,900.00	100	99.13	18	47,010,600.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penguatan Kelembagaan/ Organisasi	Jumlah Laporan (Laporan)	0	-	1	30,649,000.00	1	-	0	-	0	0	1	30,649,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan																	
		Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan																BKPSDMD	
		Perencanaan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN (Dokumen)	2	274,850,000.00	5	49,249,700.00	2	79,274,000.00	2	72,303,873,085.00	100	91.21	7	72,353,122,785.00	350	26325		
		Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan (Orang)	25	1,213,967,000.00	27	176,012,380.00	25	564,125,000.00	18	515,873,085.00	72	91.45	45	691,885,465.00	180	57		
			Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN (Orang)	0		0		150		109		72.67		109		#DIV/0!			
		Penyusunan Dokumen Manajemen Pola Karir	Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	100,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun (Orang)	930	240,000,000.00	1303	500,000.00	900	25,477,200.00	1247	25,477,200.00	138.56	100	2550	25,977,200.00	274	11		
		Promosi dan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi (Orang)	200	2,050,000,000.00	302	1,234,603,025.00	280	640,961,780.00	478	615,187,260.00	170.71	95.98	780	1,849,790,285.00	390	90		
			Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment (Orang)	0		179		65		88		135.38		267		#DIV/0!			
			Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi (Orang)	0		0		63		7		11.11		7		#DIV/0!			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara																BKPSDMD	
		Pembinaan ASN	Jumlah ASN Yang Terbina (Orang)	3500	900,000,000.00	4633	44,261,000.00	1500	139,261,320.00	1866	125,515,520.00	124.4	90.13	6499	169,776,520.00	186	19		
		Peningkatan Kesejahteraan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Pembekalan Purnabhakti (Orang)	100	900,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
			Jumlah ASN Yang Berprestas (Orang)	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!			
			Jumlah ASN Yang Menerima KGB (Orang)	0		0		0		2008		0		2008		#DIV/0!			
			Jumlah ASN Yang Menerima Satya Lencana (Orang)	0		0		0		257		0		257		#DIV/0!			
		Pengembangan Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran Tingkat Nasional (Orang)	3123	6,150,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang di monev SKP-nya (Orang)	1	266,153,000.00	0	-	2000	30,249,480.00	3000	30,249,460.00	150	100	3000	30,249,460.00	300000	11		
			Jumlah Aplikasi Kinerja yang dibangun / dikembangkan (Aplikasi)	0		0		0		1		0		1		#DIV/0!			
			Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik (Orang)	0		0		3000		4968		165.6		4968		#DIV/0!			
		Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (Buku)	250	1,348,000,000.00	250	253,087,700.00	2	246,344,978.00	0	240,064,178.00	0	97.45	250	493,151,878.00	100	37		
			Jumlah ID Card (Buah)	0		0		1800		3000		166.67		3000		#DIV/0!			
			Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan (Kartu)	0		98		125		121		96.8		219		#DIV/0!			
			Jumlah Profil Pegawai (data)	0		0		5469		5385		98.46		5385		#DIV/0!			
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara																BKPSDMD	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengukuran dan Pemetaan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang tersertifikasi (Orang)	200	250,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Jumlah ASN Yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Orang)	120	5,124,350,000.00	80	2,169,627,600.00	40	184,188,000.00	40	178,900,808.00	100	97.13	120	2,348,528,408.00	100	0		
		Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional (Orang)	0	8,921,000,000.00	1362	2,770,406,941.00	480	732,184,001.00	531	689,300,065.00	110.63	94.14	1893	3,459,707,006.00	#DIV/0!	0		
		Peningkatan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing (Orang)	0	3,300,000,000.00	45	1,646,374,109.00	26	1,393,622,550.00	30	1,301,615,650.00	115.38	93.4	75	2,947,989,759.00	#DIV/0!	89		
		Peningkatan Mutu Kediklatan	Nilai akreditasi diklat (Nilai)	81	482,500,000.00	85.86	93,869,000.00	81	192,800,500.00	87	178,167,299.00	107.41	92.41	172.86	272,036,299.00	213	56		
			Jumlah Dokumen (Dokumen)	0		2		3		3		100		5		#DIV/0!			
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian Yang digunakan sebagai Bahan perumusan kebijakan (Persentase)	86	14,214,471,500.00	80	2,832,500,000.00	80	3,029,125,000.00	80	71,915,385.00	100.00		160	71,915,385.00	186.05	0.51	BAPPEDA	
			Persentase hasil inovasi daer yang dikembagkan (%)	80		80		75											
		Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian prioritas pembangunan daerah (Penelitian)	6	729,303,750.00			-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00		
		Penguatan Jaringan Kelitbangan	Jumlah kegiatan pendukung/ penu njang kelitbangan (Kegiatan)	3	790,079,000.00			1	50,151,085.00	1	50,151,085.00	100.00	100.00	1	50,151,085.00	33.33	6.35		
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah sosialisasi daerah Yang dilaksanakan (Kali)	1	486,202,500.00			1	18,614,300	1	18,614,300.00	100.00	100.00	1	18,614,300.	100.00	3.83		
		Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Jumlah rapat kebijakan pembangunan yang Dilaksanakan (Kali)	28	1,464,100,000.00			1	3,150,000.00	1	3,150,000.00	100.00	100.00	1	3,150,000.00	3.57	0.22		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PENGAWASAN																	
1		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85	11,924,000,000.00	75	5,649,028,179.00	80	2,149,178,300.00		2,071,706,491.00		96.40	0	7,720,734,670.00	0	65	INSPEKTORAT	
			Skor (nilai) Sakip Perangkat Daerah (Skor)	85		79.07		82											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Aparatur Perangk Daerah Yang Terlayani Selam 12 Bulan (%)	100	2,260,000,000.00	100	3,637,514,733.00	100	1,503,612,150.00	100	1,451,879,716.00	100	96.56	200	5,089,394,449.00	200	225		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangk Daerah yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantora Selama 12 Bulan (%)	100	8,777,000,000.00	100	1,063,931,413.00	100	489,059,250.00	100	486,149,075.00	100	99.40	200	1,550,080,488.00	200	18		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (%)	100	759,000,000.00	100	891,805,983.00	100	106,231,900.00	100	89,381,900.00	100	84.14	200	981,187,883.00	200	129		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangklat daerah dengan realisasi target diatas 90% (Laporan)	4	92,000,000.00	4	39,126,350.00	4	20,400,000.00	4	18,117,000.00	100	88.81	8	57,243,350.00	200	62		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah perangkat daerah diatas 85% (Dokumen)	7	36,000,000.00	7	16,649,700.00	7	29,875,000.00	7	26,178,800.00	100	87.63	14	42,828,500.00	200	119		
1		Program Pengawasan dan Pembinaan Pemeri tahan dan Aparatur	Persentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK (%)	80	1,611,000,000.00	100	155,453,230.00	75	162,460,000.00		146,902,500.00	0	90.42	100	302,355,730.00	125	19	INSPEKTORAT	
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Babe	Jumlah laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (laporan)	4	400,000,000.00	4	140,542,230.00	4	63,800,000.00	4	52,795,000.00	1	82.75	8	193,337,230.00	200	48		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam sistem MCP dan Korsupgah	4	170,000,000.00	4	-	0	-	0	-	0	0.00	4	-	100	0		
		Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi d Kabupatan/Kota	Jumlah evaluasi SAKIP dan EKPPD pada Provinsi dan Kab/Kota	8	350,000,000.00	8	-	8	79,800,000.00	8	75,525,000.00	1	94.64	16	75,525,000.00	200	22		
		Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah unit kerja Zona Integritas (Dokumen)	5	350,000,000.00	8	1,981,000.00	5	18,860,000.00	5	18,582,500.00	1	98.53	13	20,563,500.00	260	6		
		Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi (Laporan)	12	185,000,000.00	12	12,930,000.00	0	-	0	-	0	0.00	12	12,930,000.00	100	7		
		Penanganan Whistle Blower System	Jumlah pengaduan melalui Whistle Blower System (laporan)	12	156,000,000.00	12	-	0	-	0	-	0	0.00	12	-	100	0		
2		Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan kas daerah (%)	98	6,112,799,000.00	38.04	7,553,601,745.00	95	3,317,610,794.00	0	3,203,004,700.00	0	96.55	38.04	10,756,606,445.00	39	176	INSPEKTORAT DAERAH	
			Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%)	95		69.6		90											
			Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat (%)	100		100		100											
		Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah (%)	20	674,000,000.00	15	284,954,000.00	15	84,200,000.00	15	52,287,200.00	100	62.10	30	337,241,200.00	150	50		
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Perangka Daerah yang diawasi terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja (obrik)	160	3,403,000,000.00	150	5,389,774,183.00	150	2,475,482,794.00	150	2,429,782,500.00	100	98.15	300	7,819,556,683.00	188	230		
		Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rakor yang dilaksamakan terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (rakor)	2	363,000,000.00	2	225,493,478.00	1	-	0	-	0	0.00	2	225,493,478.00	100	62		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian rekomendasi LHP APIP dan BPK (obrik)	160	915,000,000.00	150	1,077,500,284.00	150	481,750,000.00	150	481,306,000.00	100	99.91	300	1,558,806,284.00	188	170		
		Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah laporan tim satgas Saber pungli atas uang dan barang daerah (laporan)	2	460,000,000.00	2	364,056,700.00	2	182,128,000.00	2	179,504,000.00	100	0.00	4	543,560,700.00	200	118		
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah (laporan pengaduan)	20	297,799,000.00	15	211,823,100.00	15	94,050,000.00	10	60,125,000.00	66.67	0.00	25	271,948,100.00	125	91		
3		Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP (level)	3	1,121,176,000.00	2	153,329,110.00	3	20,750,000.00	0	18,255,000.00	0	87.98	2	171,584,110.00	67	15	INPEKTORAT DAERAH	
			Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP (level)	3		3		3											
		Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas pemeriksaan APIP dan BPK (%)	100	197,300,000.00	0	-	0	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0		
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang terlayani dalam sisatgas SPIP (Perangkat Daerah)	42	303,876,000.00	42	153,329,110.00	42	20,750,000.00	42	18,255,000.00	100	87.98	84	171,584,110.00	200	56		
		Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan (Perangkat Daerah)	42	195,000,000.00	0	-	42	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0		
		Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat SPIP (Peserta)	100	425,000,000.00	0	-	100	-	0	-	0	0.00	0	-	0	0		
		SEKRETARIAT DAERAH																	
	1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	50,942,622,648.00	150.79	74,866,848,773.00	100	44,036,121,427.00	92	38,020,661,672.00	91.98	86.34	242.77	112,887,510,445.00	242.77	22160	BIRO UMUM	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	27,469,877.00	100	25,543,271,314.00	100	20,619,466,000.00	99.99	20,229,822,532.00	99.99	98.11	199.99	45,773,093,846.00	199.99	166.63		
		peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	23,573,345,160.00	100	20,413,800,617.00	100	18,368,590,350.00	100	15,676,124,408.00	100	85.34	200	36,089,925,025.00	200.00	153.1		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	36,200,000.00	100	350,500,000.00	100	230,260,000.00	98.53	81,337,500.00	98.53	35.32	198.53	431,837,500.00	198.53	119.29		
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)	100	2,399,025,000.00	100	1,951,024,908.00	100	2,116,972,300.00	100	2,033,377,232.00	100	96.05	200	3,984,402,140.00	200.00	166.08		
	2	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian (%)	100	1,306,000,000.00	134.86	2,249,043,862.00	100	1,250,000,000.00	77	58,438,721.00	77.01	4.68	211.87	2,307,482,580.00	211.87	176.68	BIRO EKONOMI	
		Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	jumlah rekomendasi tim pengendalian inflasi daerah (rekomendasi)	2	53,902,000.00	2	23,902,000.00	2	27,813,498.00	2	13,563,098.00	100	48.76	4	37,465,098.00	200.00	69.51		
		Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Koperasi dan UKM (Rekomendasi)	2	38,050,000.00	2	34,363,300.00	2	2,625,000.00	2	2,625,000.00	100	100	4	36,988,300.00	200.00	97.21		
		Monitoring dan Evaluasi Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi (Rekomendasi)	2	1,201,812,000.00	2	1,198,550,703.00	2	5,125,000.00	2	5,125,000.00	100	100	4	1,203,675,703.00	200.00	100.61		
		Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Promosi Potensi Investasi Daerah (Rekomendasi)	1	74,950,000.00	1	74,579,800.00	1	2,625,000.00	1	2,625,000.00	100	100	2	77,204,800.00	200.00	103.01		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Daerah (Rekomendasi)	1	50,302,000.00	1	49,946,009.00	1	3,125,000.00	1	3,193,000.00	100	102.18	2	53,139,009.00	200.00	105.64		
		Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Sistem Resi Gudang (Rekomendasi)	1	37,350,000.00	1	17,350,000.00	1	2,655,000.00	1	2,625,000.00	100	98.87	2	19,975,000.00	200.00	53.48		
		Monitoring dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Perindustrian dan Perdagangan di Prov. Kep. Bangka Belitung (Rekomendasi)	-	-	-	-	1	2,625,000.00	1	2,625,000.00	100	100	-	-	-	-		
		Kerjasama IMT-GT Regional Sumatera dan Sekretariat IMT-GT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Kerjasama(Rekomendasi)	-	-	-	-	2	26,664,810.00	2	23,432,623.00	100	87.88	-	-	-	-		
		Monitoring dan Evaluasi Berkah Mart diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	-	-	-	-	1	2,625,000.00	1	2,625,000.00	100	100	-	-	-	-		
	3	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam (%)	100	882,500,000.00	121.43	651,362,075.00	100	505,000,000.00	88	7,875,000.00	87.50	1.56	208.93	659,237,075.00	208.93	74.70	BIRO EKONOMI	
		Monitoring dan Evaluasi Sektor Hulu dan Hilir Migas	Jumlah Rekomendasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas (Rekomendasi)	1	1,900,000.00	-	-	1	3,750,000.00	1	2,625,000.00	100.00	70.00	-	2,625,000.00	0	138.16		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Prov. Kep Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	1,512,500.00	1	1,512,500.00	1	2,625,000.00	1	2,625,000.00	100.00	100.00	-	4,137,500.00	0	273.55		
		Monitoring dan Evaluasi Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Bukan Logam di Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertambangan MIneral Logam dan Bukan Logam (Rekomendasi)	-	-	-	-	1	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Monitoring, Evaluasi da Koordinasi Komoditi Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Potensi Produksi Pertanian, Perkebu dan Komoditi Pangan Provins Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	1,512,500.00	0	1,512,400.00	1	2,625,000.00	1	2,625,000.00	100.00	100.00	-	4,137,400.00	0	273.55		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak da Gas di Prov. Kep. Bangk Belitung	Jumlah Rekomendasi Distribu Bahan Bakar Minyak dan Gas (Rekomendasi)	1	1,900,000.00	1	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak LIngkungan (Amdal) di Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Rekomendasi)	1	1,812,500.00	1	1,812,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD,Penanaman Modal,Pariwisata dan Budaya (%)	100	3,260,000,000.00	68.99	2,621,929,800.00	100	967,661,933.00	91	37,875,000.00	91.21	3.91	160.2	2,659,804,800.00	160.20	81.59	BIRO EKONOMI	
		Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembentukan Bank Umum Syariah (Rekomendasi)	1	37,325,000.00	100	26,528,600.00	1	-	-	-	0.00	0.00	1	26,528,600.00	100.00	71.07		
		Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi/ Kesepakatan Program CSR di Prov. Kep. Bangka Belitung (Rekomendasi)	2	152,200,560.00	2	81,227,000.00	3	5,150,000.00	3	2,625,000.00	100.00	50.97	5	83,852,000.00	250.00	55.09		
		Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Prov. Kep. Babel	Jumlah Rekomendasi Penyertaan Modal Prov. Kep. Bangk Belitung (Rekomendasi)	1	55,150,000.00	1	1,000,000.00	1	32,625,000.00	1	32,625,000.00	100.00	100.00	2	33,625,000.00	200.00	60.97		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindung an Benda Cagar Budaya atau Benda diduga caga budaya	Jumlah Rekomendasi Pelestarian Benda Cagar Budaya atau Benda Diduga Cagar Budaya (Rekomendasi	1	141,845,000.00	1	115,045,000.00	2	-	-	-	0.00	0.00	1	115,045,000.00	100.00	81.11		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kemitra BUMD	Jumlah Rekomendasi Pembinaan dan Tata Kelola BUMD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rekomendasi)	1	86,954,440.00	1	47,252,000.00	1	3,750,000.00	1	2,625,000.00	100.00	70.00	2	49,877,000.00	200.00	57.36		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Investasi Daerah di Prov. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Investasi Daerah di Provinsi KepulauanBangka Belitung (Rekomendasi)	-	-	-	-	1	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daya Wisata di Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pengembangan Daya Tarik Wisata di Prov. Kep. Bangka Belitung (Rekomendasi)	-	-	-	-	1	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-		
	5	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota (%)	80	1,407,072,623.00	96.25	494,198,731.00	85	724,460,022.00	100	48,623,903.00	117.65	6.71	196.25	542,822,639.00	245.31	38.58	BIRO PEMBANGUNAN	
		Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monep APBN	Tersedianya aplikasi e-monep APBN (Aplikasi)	1	29,050,000.00	1	23,736,524.00	-	-	-	-	-	-	1	23,736,524.00	100	81.71		
		Koordinasi Kebijakan APBN	Tersedianya laporan (Rekomendasi)	-	-	-	-	1	15,446,208.00	1	15,446,208.00	100.00	100.00	-	-	-	-		
		Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Jumlah laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik penyelenggaraan dana APBN (Laporan)	2	34,550,000.00	2	17,590,000.00	2	33,177,700.00	2	33,177,700.00	100.00	100.00	4	50,767,700.00	200	146.94		
	6	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi (%)	85	3,503,023,340.00	170.37	3,479,126,600.00	90	1,826,634,238.00	100	167,550,000.00	111.11	9.17	270.37	3,646,676,600.00	318.08	104.10	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	
		Publikasi Media Massa Cetak	Jumlah publikasi di media massa/cetak (Tayang)	154	801,050,000.00	100	796,375,000.00	154	177,765,000.00	30	117,765,000.00	19.48	66.25	130	914,140,000.00	84.42	114.12		
		Publikasi Media Elektronik/IT	Jumlah publikasi di media elektronik dan IT (Tayang)	120	312,967,850.00	120	312,500,000.00	150	40,875,000.00	30	40,875,000.00	20.00	100.00	150	353,375,000.00	125	112.91		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/ Baleho	Jumlah publikasi media luar (Tayang)	30	167,364,200.00	30	153,975,000.00	30	99,100,000.00	7	8,910,000.00	23.33	100.00	37	162,885,000.00	123.33	97.32		
		Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Jumlah Terbitan Majalah/ Buletin Pemerintah Provinsi (Eksemplar)	1300	105,500,000.00	1300	103,675,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7	Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase agenda kepala daerah yang terlayani (%)	85	535,354,305.00	92.2	300,918,250.00	90	548,075,938.00	72	689,008,689.00	79.53	125.71	163.78	989,926,939.00	192.69	184.91	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (buah)	1700	85,923,750.00	1700	79,070,000.00	2300	54,900,000.00	18	1,925,000.00	0.78	3.51	-	80,995,000.00	0	94.26		
		Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Tersedianya Alat Pendukung Keprotokolan	-	-	-	-	25	866,823,853.00	20	618,557,261.00	80	71.36	-	-	-	-		
		Workshop Bidang Keprotokolan	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan (orang)	75	118,144,000.00	75	101,004,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik (%)	85	1,975,838,255.00	178.37	2,322,081,075.00	90	1,563,036,938.00	100	181,450,341.00	111.11	11.61	278.37	2,503,531,416.00	327.49	126.71	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekreta riat daerah (eksemplar)	18480	192,346,200.00	18480	188,133,500.00	13900	14,602,500.00	8	14,602,500.00	0.06	100	18488	202,736,000.00	100.04	105.4		
		Pengumpulan Infromasi, LayananKehumasan, dan Keprotokolan	Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah (Kali)	185	531,594,550.00	185	527,920,661.00	185	53,825,170.00	18	53,825,170.00	9.73	100	203	581,745,831.00	109.73	109.43		
		Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik (Perangkat Daerah)	23	19,400,000.00	23	19,347,400.00	33	20,998,710.00	13	20,998,710.00	39.39	100	36	40,346,110.00	156.52	207.97		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan (buah)	4010	624,500,000.00	4010	63,958,500.00	6103	74,775,700.00	16	74,775,700.00	0.26	100	4026	678,734,200.00	100.4	108.68		
		Peningkatan Kualitas SDM dan KoordinasiKehumasan dan Keprotokolan	Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah (orang)	-	-	-	-	5	5,290,681.00	14	5,290,681.00	280	100	-	-	-	-		
	9	Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (meter persegi)	810000000	70,574,000.00	85	5,744,892,383.00	85	521,268,842.00	99	73,572,800.00	116.56	14.11	184.08	5,818,465,183.00	0.00	830.53	BIRO PEMERINTAHAN	
			Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat (bidang)	30	-	30	-	30	-	-	-	-	-	30	-	100.00	-		
			persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan (%)	40	-	40	-	40	-	-	-	-	-	40	-	100.00	-		
		Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerin tah Prov. Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya proses sertifikat tanah (Bidang)	20	572,072,000.00	20	511,024,920.00	100	19,493,400.00	100	19,493,400.00	100	100	120	530,518,320.00	600.00	92.74		
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Sengketa Pertanahan di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketa pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (7 Kab/Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-		
		Kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi administrasi kewilayahan	Kelengkapan data (7 kab/kota)	7	44,440,000.00	7	4,745,000.00	7	11,095,400.00	7	11,065,400.00	100	100	14	15,840,400.00	200.00	35.64		
		Kegiatan penegasan batas daerah	Terlaksananya proses penegasan batas daerah (7 kab/kota)	7	313,159,000.00	7	247,559,320.00	7	43,668,000.00	5	42,984,000.00	71.43	98.43	12	290,543,320.00	171.43	92.78		
		Kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data rupa bumi	Terlaksananya inventarisasi data rupabumi (7 kab/kota)	7	23,918,000.00	7	9,620,000.00	-	-	-	-	0	0	7	9,620,000.00	100.00	40.22		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	10	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Prosentase pembinaan keagamaan (persen)	100	12,728,933.00	13.87	11,250,186,871.00	100	8,735,216,501.00	79	1,013,262,529.00	79.08	11.6	92.95	12,263,449,400.00	92.95	96.34	BIRO KESRA	
		Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	jumlah TPHD yang diberangkatakan (orang)	9	520,500,000.00	9	468,950,000.00	9	100,000,000.00	-	86,063,600.00	0	86.06	9	555,013,600.00	100.00	106.63		
			terseleksinya Petugas Haji Daerah (9)	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-		
		Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	jumlah jemaah haji yang diberangkatkan dari dan ke embarkasi (orang)	1100	815,009,700.00	1100	545,075,000.00	1255	150,000,000.00	-	142,383,329.00	0	94.92	1100	687,458,329.00	100.00	84.35		
		Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Frekuensi Penyelenggaraan Safari Jumat (masjid dan rumah jabatan)	17	507,350,000.00	17	470,454,000.00	17	517,700,000.00	17	463,984,000.00	100	89.62	34	934,438,000.00	200.00	184.18		
		Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	Persentase Pembinaan Keagamaan (persentase)	80	2,444,201,504.00	80	1,910,470,871.00	80	498,575,005.00	80	314,456,600.00	100	63.07	160	2,224,927,471.00	200.00	91.03		
		Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji	Jumlah jamaah yang terfasilitasi biaya domestik haji (orang)	1100	3,609,871,290.00	1100	3,354,413,792.00	1255	15,000,000.00	-	6,375,000.00	0	42.5	100	3,360,788,792.00	100.00	93.1		
		Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ (orang)	30	453,846,000.00	30	763,188,457.00	-	-	-	-	-	-	30	763,188,457.00	100.00	86.03		
		Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep.Babel	Jumlah Santri yang mengikuti seleksi pentas seni dan olah raga tingkat Provinsi (orang)	500	951,842,750.00	500	398,516,000.00	-	-	-	-	-	-	500	398,516,000.00	100.00	87.81		
		Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	Jumlah santri yang meng ikuti pentas seni dan olah raga tingkat Nasional (org)	100	951,842,750.00	100	806,629,100.00	-	-	-	-	-	-	100	806,629,100.00	100	84.74		
	11	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda	prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata (persen)	100	2,010,920,000.00	86.77	1,323,400,000.00	100	1,228,252,250.00	-	61,160,250.00	0	4.98	-	-	0	0	BIRO KESRA	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kep.Bangka Belitung	Jumlah sekolah yang dinilai (sekolah)	28	224,209,750.00	28	112,335,200.00	28	-	-	-	0	0	-	-	-	-		
		Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi acara HUT Bangka Belitung (orang)	3000	724,572,500.00	3000	679,653,800.00	3000	376,406,250.00	-	61,160,250.00	0	16.25	-	-	-	-		
	12	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	85	3,420,000,000.00	157.17	1,985,214,950.00	90	1,356,434,800.00	98	817,953,834.00	108.49	60.3	254.81	2,803,168,784.00	299.77	81.96	BIRO HUKUM	
		Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang selesai disusun (%)	70	118,850,000.00	70	118,623,500.00	70	234,584,087.00	60	230,727,682.00	84.71	98.36	130	349,351,182.00	185.71	293.94		
		Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang selesai disusun	100	700,000.00	100	600,000.00	100	28,302,955.00	50	24,509,100.00	50	86.6	150	25,109,100.00	150	3587.01		
		Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Kab/Kota yang selesai dievaluasi (%)	12	6,700,000.00	12	4,301,200.00	10	78,165,530.00	9	74,161,754.00	90	94.88	21	79,462,954.00	175	1171.09		
		Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Raperda Kab/Kota yang selesai dievaluasi (%)	12	6,700,000.00	12	4,301,200.00	-	-	-	-	-	-	12	4,301,200.00	100	64.2		
		Penyusunan Propempperda dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun (Usulan)	1	86,700,000.00	1	83,325,000.00	-	-	-	-	-	-	1	83,325,000.00	100	96.11		
		Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Usulan Raperda yang selesai disusun	-	-	-	-	10	419,652,841.00	8	415,140,934.00	80	98.92	-	-	-			
		Pembinaan Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PHD Kab/Kota yang dilakukan Pembina Teknis (rancangan)	-	-	-	-	30	77,003,262.00	30	73,414,364.00	100	95.34	-	-	-	-		
	13	Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Hukum (%)	85	1,816,000,000.00	96.06	979,271,626.00	90	622,800,000.00	80	192,965,950.00	88.78	30.98	175.98	1,172,237,576.00	207.03	64.55	BIRO HUKUM	
		Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian (kasus)	2	103,850,000.00	2	19,660,000.00	1	62,279,497.00	1	44,033,600.00	100	70.7	3	63,693,600.00	150	61.33		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian (Kasus)	2	142,150,000.00	2	84,693,700.00	1	100,390,337.00	1	72,147,800.00	100	71.87	3	156,841,500.00	150	110.34		
		Pembinaan Pelaksanaa Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda d Kab/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota (Laporan)	1	6,400,000.00	1	4,609,000.00	1	17,914,150.00	1	17,709,500.00	100	98.86	2	22,318,500.00	200	348.73		
		Pembinaan Pelaksana an RANHAM di Kab/ Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Laporan)	4	6,300,000.00	4	5,490,000.00	1	17,475,050.00	1	17,475,050.00	100	100	5	2,265,050.00	125	364.52		
		Bantuan Hukum Kepa da Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantu an Hukum Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum (Orang)	40	79,250,000.00	4	75,133,000.00	45	43,451,250.00	35	41,600,000.00	77.78	94.74	75	116,733,000.00	187.5	147.3		
	14	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Survey kepuasan masya rakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa (Nilai Indeks Kepuasan)	90	1,982,884,194.00	101.46	534,166,170.00	90	638,455,000.00	100	42,279,276.00	111.11	6.62	201.46	576,445,446.00	223.84	29.07	BIRO LAYANAN PENGADAAN	
		Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Laporan dan rekomendasi kebijakan Monev APBD (Laporan)	1	15,250,000.00	0	-	1	-	-	-	0	0	-	-	-	-		
		Peningkatan Fungsi Sitem E-Monep APBD	Laporan koordinasi sistem e-monep (Laporan)	1	42,660,000.00	1	26,202,000.00	1	10,235,300.00	1	10,235,000.00	100	100	-	-	-	-		
		Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Jumlah rekomendasi APBD (Rekomendasi)	1	82,050,000.00	1	76,175,000.00	1	28,073,476.00	1	28,073,476.00	100	100	-	-	-	-		
		Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekomendasi terhadap realisasi program dan kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Laporan)	1	30,050,000.00	1	19,502,500.00	1	3,970,800.00	1	3,970,800.00	100	100	-	-	-	-		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	15	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa (Nilai Indeks Kepuasan)	80	5,034,568,000.00	91.93	2,682,501,921.00	94	2,282,250,000.00	81	927,437,874.00	86.4	40.64	173.16	3,609,939,795.00	216.44	71.7	BIRO LAYANAN PENGADAAN	
			Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP (persen)	92	-	55.49	-	92	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
		peningkatan Fungsi pelayanan ULP	Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP (%)	12	964,500,000.00	12	891,787,698.00	12	1,141,881,323.00	12	927,437,874.00	100	81.22	-	1,819,225,572.00	0	188.62		
		Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	FRekuensi Pelatihan/ Pembinaan/bimtek/Pendampingan (%)	3	75,632,000.00	3	66,150,094.00	3	-	-	-	0	0	-	66,150,094.00	0	87.46		
		Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Jumlah sosialisasi (%)	2	81,252,000.00	2	7,006,519.00	2	-	-	-	0	0	-	73,006,519.00	0	89.85		
		Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-		
	16	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik (Nilai Indeks Kepuasan)	80	5,020,020,500.00	84.5	3,237,026,576.00	94	1,864,758,960.00	84	626,730,529.00	88.99	33.61	168.15	3,863,757,105.00	210.18	76.97	BIRO LAYANAN PENGADAAN	
			Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan (persen)	92	-		-	92	-	-	-	-	-	35.66	-	-	-		
		Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE (%)	12	1,061,111,500.00	12	952,296,951.00	12	596,201,952.00	12	476,654,850.00	100	79.95	24	1,428,951,801.00	200	134.67		
		Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE (%)	2	258,274,000.00	2	138,556,488.00	2	21,139,795.00	2	21,139,795.00	100	100	4	159,696,283.00	200	61.83		
		Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Penerapan aplikasi penyedia Barang/Jasa (%)	1	110,302,000.00	1	98,134,063.00	1	-	-	-	0	0	1	98,134,063.00	100	88.97		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bulan Pemeliharaan & Perangkat SPSE (%)	12	527,500,000.00	12	464,789,100.00	12	131,887,550.00	12	128,935,884.00	100	97.76	24	593,724,984.00	200	112.55		
	17	Program Pengembangan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan (Prosentase)	15	2,638,074,000.00	10	1,969,262,830.00	11	2,272,931,408.00	79	890,469,627.00	716.25	39.18	88.79	2,859,732,457.00	591.92	108.4	BIRO PEMERINTAHAN	
			Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi (peringkat)	13	-	10	-	13	-	-	-	-	-	10	-	-	-		
			Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administra (%)	20	-	5	-	20	-	-	-	-	-	5	-	-	-		
			Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik (%)	100	-	0	-	90	-	-	-	-	-	0	-	-	-		
		Kegiatan Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di provinsi kep. bangka belitung (urusan)	6	78,940,000.00	6	77,596,081.00	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-		
		Kegiatan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung (7 kab/kota)	52	226,550,000.00	52	223,520,935.00	7	526,424,000.00	7	448,816,613.00	100	85.26	59	672,337,548.00	113.46	296.77		
		Kegiatan administrasi izin keluar negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/ Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke luar negeri	Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan (surat izin)	80	31,080,000.00	80	25,945,683.00	10	103,550,000.00	7	95,046,790.00	70	91.79	87	120,992,473.00	108.75	389.29		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan administrasi penatausahaan biro pemerintahan	Terlaksana pelayanan administrasi penatausahaan pada biro pemerintahan (dokumen)	-	-	-	-	6	350,238,666.00	6	346,606,224.00	100	98.96	-	-	-	-		
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertang gung jawaban (LKPJ)	LKPJ akhir tahun dan sosialisasi revisi PP nomor 3 tahun 2007 (Dokumen dan orang)	1	119,637,500.00	1	119,637,500.00	-	-	-	-	0	0	-	119,637,500.00	0	100		
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) Kab/Kota dan perangkat daerah provinsi kep. Bangka Belitung (Kabupaten/Kota)	7	160,750,000.00	7	157,824,339.00	-	-	-	-	0	0	-	157,824,339.00	0	98.18		
		Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terlaksananya rapat sinkronisasi penyelenggaraan urusan konkuren (orang)	50	77,200,000.00	50	46,501,900.00	-	-	-	-	0	0	-	46,501,900.00	0	60.24		
		Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019	Pelaksanaan pemilihan legislative dan pilpres 2019 yang tertib dan lancar (Kabupaten/Kota)	7	6,200,000.00	7	6,200,000.00	-	-	-	-	0	0	-	6,200,000.00	0	100		
		Kegiatan implementasi proses pergantian antar waktu Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Kep.Bangka Belitung	Berkas calon anggota DPRD prov. kep. bangka belitung dan calon anggota DPRD kab/kota yang telah terverifikasi (persen)	80	88,860,000.00	80	84,552,140.00	80	150,000,000.00	-	-	0	0	-	84,552,140.00	0	95.15		
	18	Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung (%)	90	166,551,000.00	121.56	2,127,881,182.00	90	1,092,300,000.00	74	280,034,076.00	82.33	25.64	195.66	2,407,915,258.00	217.4	144.57	BIRO PEMERINTAHAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri (%)	90	-	80	-	90	-	-	-	-	-	80	-	-	-		
		Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah pertemuan Gubernur dengan Bupati/ Wali kota se-prov. kep. bangka belitung (Kesepakatan)	1	332,188,000.00	1	328,603,278.00	1	281,402,000.00	1	278,174,076.00	100	98.85	2	606,777,354.00	200	182.66		
		Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI	Terlaksananya keikutsertaan pemerintah provinsi dalam APPSI (iuran dan rakernas)	1	91,150,000.00	1	90,825,000.00	1	94,650,000.00	-	-	0	0	1	90,825,000.00	100	99.64		
		Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah kepada pemerintah/ pemerintah daerah lainnya dan BUMD (proposal)	5	14,700,000.00	5	13,545,000.00	6	1,860,000.00	6	1,860,000.00	100	100	11	15,405,000.00	220	104.8		
		Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Terlaksananya pertemuan-pertemuan penyelarasan program pemerintah pusat/instansi vertikal di prov. kep. bangka belitung dengan pemeritah daerah (pertemuan)	1	18,875,000.00	1	16,337,500.00	1	-	-	-	0	0	1	16,337,500.00	100	86.56		
		Kegiatan pengembangan kerjasama daerah	Tersusunnya rekomendasi kerjasama (kesepakatan)	-	-	-	-	50	-	-	-	0	0	-	-	-	-		
		Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kep. Bangka Belitung	Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS provinsi kepulauan (iuran dan pertemuan BKS)	1	151,150,000.00	1	150,260,000.00	-	-	-	-	-	-	1	150,260,000.00	100	99.41		
		Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Tersusunnya rekomendasi kerjasama (persen)	50	56,544,850.00	50	55,369,300.00	-	-	-	-	-	-	5	55,369,300.00	100	97.92		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Terlaksananya inventarisasi potensi kerjasama dengan luar negeri yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah (laporan)	1	23,053,000.00	1	11,558,500.00	-	-	-	-	-	-	1	11,558,500.00	100	50.14		
	19	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi (persen)	100	1,067,422,000.00	90.69	536,131,000.00	100	620,030,000.00	100	99,249,700.00	100.00	16.01	190.69	635,380,700.00	190.69	59.52	BIRO KESRA	
		Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah (proposal)	500	12,590,000.00	500	10,990,000.00	500	95,955,500.00	400	95,889,700.00	80.00	99.93	900	106,879,700.00	180	848.93		
		Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Meningkatnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bansos dan Hibah (orang)	200	9,125,000.00	200	9,125,000.00	230	146,930,000.00	200	110,215,000.00	86.96	86.96	400	119,340,000.00	200	1307.84		
		Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Terlaksananya pelayanan yang optimal kepada masyarakat (7 kab/kotai)	21	73,575,000.00	21	58,346,400.00	7	-	-	-	0.00	0.00	21	58,346,400.00	100	79.3		
	20	Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum (%)	85	1,510,000,000.00	52.61	1,147,267,822.00	90	743,427,190.00	94	20,890,800.00	104.04	2.81	146.25	1,168,158,622.00	172.06	77.36	BIRO HUKUM	
		Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH (Peraturan)	80	1,296,178,400.00	80	1,277,898,260.00	120	3,000,000.00	120	3,000,000.00	100.00	100.00	200	1,280,898,260.00	98.82	98.82		
		Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/ Kota Se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum (Rekomendasi)	1	46,826,000.00	1	39,049,700.00	1	19,310,300.00	1	17,890,800.00	100.00	92.65	2	56,940,500.00	121.6	121.6		
	21	Program Perencanaan Setda	Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat (%)	80	428,313,000.00	88.58	312,957,118.00	85	132,532,000.00	89	98,910,750.00	105.20	74.63	178	411,867,868.00	222.5	96.16	BIRO PEMBANGUNAN	

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (Dokumen)	4	35,849,750.00	4	23,345,350.00	3	25,500,000.00	3	20,291,550.00	100.00	91.83	7	46,761,900.00	175	130.44		
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan Setda (Laporan)	4	32,649,750.00	4	26,379,250.00	4	26,875,000.00	4	15,917,788.00	100.00	87.13	8	49,795,800.00	200	152.52		
	22	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota (%)	95	1,549,651,606.00	147.27	1,256,193,655.00	97	276,887,000.00	100	28,093,700.00	103.09	10.15	242.27	1,284,287,355.00	255.03	82.88	BIRO PEMBANGUNAN	
		Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	jumlah laporan koordinasi sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota (Laporan)	1	794,134,800.00	1	744,141,427.00	1	28,093,700.00	1	28,093,700.00	100.00	100.00	2	772,235,127.00	200	97.24		
	23	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan (Nilai indeks Kepuasan)	80	1,446,989,500.00	82.82	1,048,083,104.00	94	482,379,553.00	55	82,250,300.00	58.79	17.05	138.09	1,130,333,404.00	172.61	78.12	BIRO LAYANAN PENGADAAN	
			Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT (persen)	92	-	46	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Jumlah penerapan aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa (Aplikasi)	1	9,000,000.00	1	8,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,100,000.00	0	90		
		Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SOP dan Penerapannya (Dokumen)	1	25,200,000.00	1	13,665,200.00	1	64,955,291.00	1	19,502,000.00	125	30.02	-	33,167,200.00	0	131.62		
		Pengelolaan data dan informasi	Jumlah Admin OPD sistem informasi pengadaan (Admin)	42	70,327,000.00	42	28,437,600.00	42	20,000,000.00	42	18,247,200.00	100	91.24	-	46,684,800.00	0	66.38		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan (Dokumen)	4	969,542,500.00	4	839,394,697.00	8	63,872,738.00	6	44,501,100.00	75	69.67	-	883,895,797.00	0	91.17		
	24	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan	Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien (%)	75	86,699,500.00	90.55	80,528,307.00	89	248,122,330.00	99	245,772,197.00	111.3	99.05	189.6	326,300,504.00	252.8	376.36	BIRO ORGANISASI	
		Validasi Evaluasi jabatan Aparatur sipil Negara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi jabatan ASNnya	1	47,785,000.00	1	46,464,829.00	32	36,892,000.00	32	35,692,000.00	100	96.75	33	82,156,829.00	3300	171.93		
		Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Perangkat Daerah yang tertata sesuai dengan aturan yang berlaku	1	37,114,500.00	1	32,553,478.00	2	30,033,680.00	2	29,946,911.00	100	99.71	3	62,500,389.00	300	168.4		
		Penataan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Jumlah Unit Pelaksana Dinas dan Cabang Dinas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertata	-	-	-	-	16	46,078,080.00	16	45,600,748.00	100	98.96	-	-	-	-		
		Pembinaan dan Pengendalian kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tersinkronisasinya Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan yang berlaku	1	1,800,000.00	1	1,510,000.00	7	51,738,400.00	7	51,632,400.00	100	99.8	8	53,142,400.00	800	2952.36		
		Analisa beban kerja jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi ke Bangka Belitung	Jumlah Perangkat Daerah yang memvalidasi analisa jabatan dan analisa beban kerja perangkat daerah	-	-	-	-	32	83,380,170.00	32	82,900,138.00	100	99.42	-	-	-	-		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	25	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah (%)	75	226,873,500.00	109.33	191,195,562.00	80	243,542,087.00	97.8	238,172,418.00	122.24	97.8	207.13	429,367,980.00	276.17	189.25	BIRO ORGANISASI	
		Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan (Laporan) 42 OPD	1	68,150,000,000.00	1	66,116,593.00	42	25,284,000.00	42	24,382,400.00	100	96.43	43	90,498,993.00	4300	132.79		
		Manajemen Perubahan	- Jumlah Pembinaan Reforma Birokrasi PD '- Jumlah Asistensi Reformasi Birokrasi' - Jumlah Pengembangan Age Perubahan	-	-	-	-		98,178,800.00	42	97,137,538.00	100	98.94	-	-	-	-		
		Penigkatan Akuntabilitas Kinerja	-Jumlah Pembinaan Akuntabilitas Kabupaten/kot Jumlah Pembinaan/penguata Akuntabilitas	-	-	-	-	42	59,060,050.00	42	56,564,052.00	100	95.77	-	-	-	-		
		Data dan Informasi Kinerja	- Jumlah Kesepakatan Forsesdasi' - Jumlah data kinerja Perang Daerah yang tervalidasi dan terkelola	-	-	-	-	42	61,019,237.00	42	60,088,428.00	100	98.47	-	-	-	-		
		Forum Sekretaris Daerah Prov.Babel	jumlah dokumen kesepakatan (Dokumen)	1	14,938,700.00	1	10,294,350.00	-	-	-	-	-	-	1	10,294,350.00	100	68.91		
		Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Laporan (Laporan)	1	2,420,000.00	1	1,389,500.00	-	-	-	-	-	-	1	1,389,500.00	100	57.42		
		Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kiner dan rencana aksi kinerj di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Peserta (Orang)	50	73,390,000.00	50	72,981,919.00	-	-	-	-	-	-	50	72,981,919.00	100	99.44		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Instansi Pemerintah Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja tahunan (dokumen)	1	25,045,000.00	1	19,965,000.00	-	-	-	-	-	-	1	19,965,000.00	100	79.72		
		Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	Jumlah OPD yang dibina (OPD)	43	42,929,800.00	43	20,448,200.00	-	-	-	-	-	-	43	20,448,200.00	100	47.63		
	26	Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemda	Peningkatan kepuasan masyarakat ()	55	1,106,498,700.00	70	1,061,546,110.00	80	628,082,876.00	72.35	227,193,584.00	90.43	36.17	142.35	1,288,739,694.00	258.81	116.47	BIRO ORGANISASI	
		Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Prov. Kep. Babel	Laporan, evaluasi dan pelaksanaan SOP	1	149,550,000.00	1	134,466,370.00	1	10,755,798.00	1	10,755,798.00	100.00	100	2.00	145,222,168.00	-	-		
		pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Prov. Kep. Babel	Jumlah Unit Layanan yang melaksanakan Pelayanan Publik dengan baik	1	1,219,950.00	1	750,000.00	10	90,070,000.00	5	9,960,000.00	50.00	11.06	6.00	10,710,000.00	-	-		
		Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi yang dikompetisikan	1	45,395,000.00	1	43,929,889.00	10	21,125,000.00	5	20,963,555.00	50.00	99.24	6.00	64,893,444.00	-	-		
		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah Laporan SKM yang nilainya baik	1	1,130,000.00	1	900,000.00	10	36,150,000.00	10	35,956,427.00	100.00	99.46	11.00	36,856,427.00	-	-		
		Peningkatan administrasi ketatausahaan	Jumlah Laporan dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan	1	909,203,750.00	1	881,499,851.00	1	155,940,640.00	1	149,557,804.00	500.00	95.91	2.00	1,031,057,655.00	-	-		
		SEKRETARIAT DPRD																	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah																SETWAN	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani (orang)	285	10,954,109,126.00	64	9,205,358,874.00	265	7,041,400,000.00	265	6,960,160,370.00	100.00	96.66	329	16,165,519,244.00	115.44	147.57		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)	7	50,000,000.00	0	43,455,653.00	3	21,471,743.00	3	24,112,486.00	100.00	112.30	3	67,568,139.00	42.86	135.14		
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Seragam Anggota DPRD dan Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah (stel)	575	1,170,899,334.00	0	798,750,000.00	225	533,682,000.00	225	497,766,000.00	100.00	93.27	225	1,296,516,000.00	39.13	110.73		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	86	931,167,600.00	0	78,460,000.00	1	5,147,131.00	1	5,147,131.00	100.00	100.00	1	83,607,131.00	1.16	8.98		
			Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD (%)	90				90		90		100.00		90		100.00			
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)	0	-	0	46,037,083.00	5	43,753,900.00	5	58,632,800.00	100.00	134.01	5	104,669,883.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan																SETWAN	
		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum DPRD	Jumlah dokumen/ laporan (dokumen/laporan)	5	292,820,000.00	0	135,000,000.00	2	105,000,000.00	0	1,750,000.00	0.00	1.67	0	136,750,000.00	0	47		
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan (rapat paripurna istimewa/biasa)	15	848,810,511.00	5	176,211,500.00	15	242,830,000.00	22	192,391,300.00	146.67	79.23	27	368,602,800.00	180	43		
		Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas (raperda dan produk hukum lainnya)	25	28,290,657,890.00	3	12,445,462,692.00	10	7,927,853,126.00	19	11,353,960,364.00	190.00	95.39	22	23,799,423,056.00	88			

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembahasan anggaran pemerintah Prov. Kep. Babel	Dokumen nota/ kesepakatan (dokumen /laporan)	4	553,429,800.00	0	87,735,832.00	4	97,510,000.00	4	79,419,962.00	100.00	81.45	4	167,155,794.00	100	30		
		Kunjungan kerja badan anggaran	Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Anggaran (laporan)	6	3,647,585,535.00	1	1,463,181,741.00	4	1,272,469,607.00	7	1,595,101,002.00	175.00	99.69	8	3,058,282,743.00	133	84		
		Kunjungan kerja badan legislasi/ pembentukan Perda	Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (laporan)	6	2,821,365,648.00	1	907,906,903.00	4	615,950,888.00	4	627,336,397.00	100.00	78.42	5	1,535,243,300.00	83	54		
		Kunjungan Kerja Badan Kehormatan	Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (laporan)	6	1,376,107,590.00	1	512,424,364.00	4	299,999,000.00	5	429,430,152.00	125.00	95.43	6	941,854,516.00	100	68		
		Reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD (dokumen/laporan)	3	10,869,624,810.00	0	-	2	4,535,287,923.00	2	2,868,562,336.00	100.00	63.25	2	2,868,562,336.00	67	26		
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat (orang)	90	2,200,615,505.00	2	663,713,831.00	90	303,222,585.00	6	286,468,232.00	6.67	94.47	8	950,182,063.00	9			
		Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	Jumlah rekomendasi / kesepakatan (kesepakatan)	3	779,267,225.00	0	216,363,975.00	3	125,000,000.00	2	58,961,417.00	66.67	47.17	2	275,325,392.00	67	35		
		Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	Jumlah tenaga ahli dan Kelompok Pakar/tim ahli (7 tenaga ahli dan 5 kelompok pakar/tim)	12	1,067,899,899.00	2	581,184,600.00	12	1,018,100,000.00	12	668,887,500.00	93.75	67.66	14	1,250,072,100.00	117	117		
		Kunjungan kerja komisi	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja komisi (laporan)	576	40,992,135,338.00	72	43,171,103,027.00	1500	29,267,848,672.00	2200	37,417,002,210.00	146.67	97.48	2272	80,588,105,237.00	394	197		
		Kunjungan kerja badan musyawarah	Jumlah laporan Kunjungan Kerja Badan Musyawarah (laporan)	6	1,934,398,202.00	1	1,268,764,473.00	4	1,090,062,500.00	3	997,025,027.00	50.00	91.46	4	2,265,789,500.00	67	117		
		Program Peningkatan Pelayanan Kerumah tanggaan Kehumasan Dan Protokoler Dewan																SETWAN	
		Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah publikasi fungsi kelembagaan (publikasi)	210	3,601,232,129.00	30	2,879,326,617.00	200	1,352,083,186.00	319	1,520,154,803.00	159.00	97.94	349	4,399,481,420.00	166	122		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	Persentase pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran (persen)	80	6,029,632,312.00	24	5,966,192,919.00	77	1,837,253,160.00	77	2,645,512,384.00	100.00	97.29	101	8,611,705,303.00	126	143		
		Pelayanan Kerumahtanggan dan Perlengkapan Lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase anggota DPRD & ASN yang mendapatkan pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan (persen)	0	-	0	-	100	2,354,717,808.00	100	2,151,433,690.00	100.00	89.47	100	2,151,433,690.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
		BADAN PENGHUBUNG																	
I		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung ()	74	135,910,457,300.00	82	12,913,540,000.00	72	7,976,568,540.00	78.29	6,802,876,424.00	72.00	465.12	72	19,716,416,424.00	100	0	BADAN PENGHUBUNG	
			Nilai Lakip Badan Penghubung ()	85		70		75		77		77.00		85					
1		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani (Orang)		34,520,111,800.00	65	5,747,577,500.00	65	5,243,558,540.00	81.06	4,250,094,934.00	124.71	81.05	146.06	9,997,672,434.00	0	0		
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		7,498,954,000.00	100	7,006,725,000.00	100	2,682,331,860.00	93.33	2,503,339,750.00	93.33	93.33	193.33	9,510,064,750.00	0	0		
3		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)		422,830,000.00	35	100,450,000.00	33	11,828,140.00	100	11,828,140.00	303.03	100.00	135	112,278,140.00	0	26.6		
4		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen)		3,897,710,000.00	3	2,200,000.00	4	12,875,000.00	91.07	11,725,000.00	2276.75	91.07	94.07	13,925,000.00	0	0		
5		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)		423,045,000.00	5	6,400,000.00	5	25,975,000.00	99.67	25,888,600.00	1993.40	99.67	104.67	32,288,600.00	0	0		

	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun-1) (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (Tahun 2020) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6		Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Jogjakarta	Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Jogjakarta (paket)		80,000,000,000.00	1	50,187,500.00	0	-	0	-	0.00	0.00	1	50,187,500.00	0	0.1		
II		Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta ()		34,884,473,000.00	100	2,825,594,500.00	100	368,474,854.00	400	335,850,045.00	100.0	5714.3	100	3,161,444,545.00	0	9.1	BADAN PENGHUBUNG	
1		Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek (kali)		6,021,376,000.00	100	529,824,000.00	24	212,608,048.00	88.11	187,333,510.00	367.1	88.1	188.11	717,157,510.00	0	11.9		
2		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Kali)		1,722,857,000.00	100	94,933,000.00	12	140,600,000.00	94.77	133,249,729.00	789.8	94.8	194.77	228,182,729.00	0	13.2		
3		Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (acara)		9,261,157,000.00	100	1,341,450,000.00	2	2,900,000.00	100	2,900,000.00	5000.0	100.0	200	1,344,350,000.00	0	14.5		
4		Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kep. Babel di Taman Mini	Jumlah Anjungan yang di Rehabilitasi Berat (Anjungan)		10,296,485,000.00	100	250,187,500.00	1	-	0	-	0.0	0.0	100	250,187,500.00	0	2.4		
5		Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi (%)		6,482,598,000.00	100	564,200,000.00	7	12,366,806.00	100	12,366,806.00	1428.6	100.0	200	576,566,806.00	0	8.9		
6		Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	Terlaksananya Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan Elektronik (%)		1,100,000,000.00	100	45,000,000.00	12	-	0	-	0.0	0.0	100	45,000,000.00	0	0.0		

Berdasarkan data di atas program yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebanyak 199 program menjadi 199 progran dan 1.322 kegiatan menjadi 1.364 kegiatan atau bertambah kegiatan baru sebanyak 42 kegiatan yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kepulualauan Bangka Belitung. Kegiatan baru tersebut merupakan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan Covid-19. Sementara itu, jumlah anggaran Belanja Langsung pada Perubahan RKPD Tahun 2020 sebesar Rp1.642.157.877.288,00 dan dalam Perubahan APBD sebesar Rp.1.207.599.362.621,00.

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 pada Perubahan APBD sebesar Rp.1.207.599.362.621,00 dari semula Rp.1.203.728.967.766,00 atau bertambah sebesar Rp.3.830.394.855,00. Sampai dengan Triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp.1.027.940.458.284,00 dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 85,5% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 96,2% dengan predikat kinerja masing-masing Tinggi dan Sangat Tinggi.

Secara umum kendala yang dihadapi adalah pada pelaksanaan program/kegiatan triwulan IV Tahun 2020 terutama pada Perangkat Daerah penanggungjawab program/kegiatan sebagai berikut:

a. adanya pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik yang melibatkan perkumpulan orang banyak;
b. masih terdapat Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan formulir penyusunan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, sehingga menyulitkan penyusunan laporan evaluasi;
c. dalam penyusunan laporan masih ada Perangkat Daerah yang tidak mempedomani target kinerja dan anggaran program yang terdapat dalam dokumen Renstra;
d. masih kurangnya kapasitas SDM penyusun laporan, hal ini terlihat dari hasil laporan yang disampaikan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan;
e. dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih ditemui adanya Perangkat Daerah yang tidak mencantumkan faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bangka Belitung terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan urusan Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Beberapa permasalahan pembangunan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas I : Pembangunan Agropolitan

   Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Pertanian;

   Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian pada tahun 2017 sebesar 12,07% dan menurun pada tahun 2018 sebesar 12,05%. Hal ini disebabkan pertumbuhan sub tanaman hortikultura tumbuh sebesar -1,58 dimana terjadi penurunan produksi untuk tanaman komoditas hortikultura tahun 2017 sebesar 22.546 ton sedangkan 2018 sebesar 22.325 ton.

2. Prioritas II : Pembangunan Bahari

   Masih rendahnya PDRB Sub Sektor Perikanan;

   Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan tahun 2017 sebesar 5,80% sedangkan tahun 2018 sebesar 6%. Sedangkan laju pertumbuhan produksi sektor perikanan mencapai 8,11%. Produksi perikanan tangkap 2018 mencapai 228.980,328 ton, sedangkan tahun 2019 mencapai 237.796,07 ton. Meskipun mengalami kenaikan namun belum optimal. Sebagai sektor unggulan, bidang kelautan dan perikanan harusnya mampu memberikan kontribusi setidaknya 30% dalam PDRB Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan, namun sektor perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 6 % dari total PDRB Bangka Belitung.

3. Prioritas III : Pembangunan Pariwisata

   Masih rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan;

   Rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan disebabkan oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang masih rendah sehingga mempengaruhi salah satu kategori lapangan usaha PDRB yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. Jumlah kunjungan wisatawan tidak signifikan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190 wisatawan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan kunjungan wisatawan. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar 15,30% sedangkan pada tahun 2019 sebesar hanya 2,92%. Kecilnya pertumbuhan ini dikarena *event-event* pariwisata masih sangat terbatas, tempat-tempat wisata belum dikelola dengan baik serta kurangnya promosi pariwisata dan pengemasan pariwisata yang menarik bagi wisatawan.

4. Prioritas IV : Peningkatan Ekonomi Masyarakat

   b. Masih adanya masyarakat yang menganggur;

      Tingkat pengangguran Bangka Belitung per Agustus 2017 sebesar 3,78% sedikit lebih rendah dibandingkan per Agustus 2018 sebesar 3,65% dan 2019 sebesar 3,62%. Meskipun tingkat pengangguran menurun namun jumlah pengangguran di Bangka Belitung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 sebanyak 26.399 orang dan naik di tahun 2018 sebanyak 26.552 orang dan 2019 sebanyak 26.871 orang. Peningkatan jumlah pengangguran ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja setiap tahun yang meningkat rata-rata 4% (2018) dan 2% (2019).

   c. Masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;

      Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83 kemudian meningkat sebesar 63,23 (2017) dan 63,82 (2018). Capaian IPK

Bangka Belitung masuk dalam kategori menengah ke bawah<65,99. Hal ini menunjukkan banyaknya kesempatan kerja yang masih bersifat informal sehingga menambah jumlah setengah penganggur, belum sigap dan siapnya unit usaha baru dan lama dalam menyiapkan sarana hubungan industrial di perusahaan serta mengikuti dan memenuhi pelaksanaan norma ketenagakerjaan yang berlaku, dan tidak memadainya jumlah tenaga kerja pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan;

Jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung data Maret 2019 sebesar sebanyak 68.380 orang (4,62%) sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 68.390 orang (4,53). Naiknya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan dari garis kemiskinan dimana pada Maret tahun 2019 garis kemiskinan sebesar Rp677.716 sedangkan Maret 2020 sebesar Rp721.455, terjadi kenaikan sebesar 6,45%. Penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan cenderung sulit untuk diangkat dari kemiskinan karena hampir tidak mempunyai keahlian dan sulit menjangkau sumber-sumber ekonomi yang ada. Penduduk yang berada pada kerak kemiskinan sulit untuk dilatih dan diberi pekerjaan.

e. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat desa;

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara rata-rata mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dimana data pada Maret 2019 sebesar 0,735 sedangkan Maret 2020 menjadi sebesar 0,790. Indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat pedesaan jauh dibawah garis kemiskinan sebesar 0,735. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan pada Maret 2019 sebesar 0,335 meningkat menjadi 0,445 pada Maret 2020. Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita masyarakat desa sebesar Rp671.054 kapita/orang dibandingkan dengan pendapatan masyarakat perkotaan sebesar Rp685.433 kapita/orang.

5. Prioritas V : Pembangunan Pendidikan

a. Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat;

Rendahnya kesempatan pendidikan masyarakat terlihat dari masih belum optimalnya Angka Harapan Lama Sekolah Masyarakat (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan). Pada Tahun 2018 angka harapan lama sekolah baru mencapai 11,87 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11.70, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan 12.05) dan pada tahun 2019 menjadi 11,94 (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki 11.78, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan12.11). Meskipun angka harapan lama sekolah mengalami kenaikan akan tetapi angka harapan lama sekolah ini belum mencapai angka 12,00. Hal ini berarti bahwa masyarakat di Bangka Belitung belum seratus persen menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

b. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat;

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat disebabkan masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A. Pada tahun 2018 persentase sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta baru mencapai 40,15% dan pada tahun 2019

persentase sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta beranjak naik mencapai 43.38% akan tetapi persentase sekolah yang terakreditasi A masih dibawah 50%.

6. Prioritas VI : Pembangunan Kesehatan

   Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan;

   Masih lambatnya pencapaian angka kesehatan masyarakat menyebabkan belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana pada tahun 2018 angka kesehatan masyarakat sebesar 88,35% dan pada tahun 2019 angka kesehatan masyarakat 88,48%, atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0, 13%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup, dimana angka kematian bayi sebesar 4,21 (2017) dan Balita sebesar 5,03 (2018). Sedangkan angka kematian Balita sebesar 5,44 (2017) dan 6,50 (2018).

7. Prioritas VI : Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

   Belum optimalnya penatakelolaan pemerintah;

   Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi birokrasi dimana pada tahun 2018 sebesar 65,39 dan tahun 2019 sebesar 66,84, dengan kategori "B". Terdapat beberapa komponen penilaian yang mengalami penurunan, yaitu penataan sistem manajemen SDM dari 12,19 (2018) menjadi 11,32 (2019), penguatan akuntabilitas dari 3,27 (2018) menjadi 3,56 (2019). Hal ini belum dinilai baik karena masih harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan dan belum diikuti upaya nyata yang dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang. Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan di Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pencapaian APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; Hal ini dilihat dari pencapaian tahun 2019 APK Pendidikan Menengah baru mencapai 82,45. Sedangkan untuk APK Pendidikan Khusus pada tahun tahun 2019 baru mencapai 85,34. Belum optimalnya pencapaian APK ini disebabkan masih banyak siswa yang putus sekolah. Jumlah siswa SMA putus sekolah pada 2019 sebanyak 39 orang dan SMK sebanyak 86 orang. Masih banyak siswa yang putus sekolah disebabkan karena motivasi siswa untuk bersekolah rendah, masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan yang letaknya jauh dari pemukiman dan juga karena faktor ekonomi. Selain daripada itu terbatasnya Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) dan banyaknya siswa tidak mampu/siswa miskin untuk bersekolah,

sehingga pada tahun 2022 direncanakan untuk pembangunan RKB dan beasiswa bagi anak didik tidak mampu.

b. Masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A; Hal ini dilihat dari pencapaian 2019 sebesar 43,38 persen. Rendahnya mutu satuan pendidikan ini terutama disebabkan oleh faktor kurangnya sarana prasarana pendidikan serta jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, sehingga di tahun 2022 direncanakan akan dibangun sarana dan prasana pendidikan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan.

2. Urusan Bidang Kesehatan

Permasalahan di Bidang Kesehatan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi; Dimana pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebanyak 2.049 orang dari 7.184 orang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi SDMK baik melalui pendidikan maupun pelatihan, sehingga pada tahun 2022 akan direncanakan pelatihan secara *Online* untuk efesiensi anggaran;

b. Masih rendahnya persentase kualitas kesehatan masyarakat; Hal ini dapat dilihat dari Jumlah kematian Ibu pada tahun 2019 sebanyak 36 orang, Angka tersebut masih diatas target provinsi yaitu 22 orang. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kasus pre-eklamsi (perdarahan), dan hipertensi dalam kehamilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga di tahun 2022 direncanakan untuk peningkatan kesehatan masyarakat;

c. Masih rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2019 sebesar 57,14%. Angka ini masih dibawah target provinsi tahun 2019 yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan dari *stakeholder* terkait di kabupaten/kota.

3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

a. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan; Pada tahun 2019 tercapai 92,23% dari target sebesar 94,21% atau menurun sebesar 9,77%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu bencana banjir tahun 2017 hingga 2019 yang mempercepat penurunan kualitas jalan dan jembatan, adanya beberapa ruas jalan yang umurnya lebih pendek dari pada yang diperkirakan, sehingga terdapat penambahan jumlah jalan yang harus dilakukan pemeliharaan. Selain daripada itu jembatan rusak pada jalur strategis yang perlu segera ditangani dan membutuhkan dana yang cukup besar, serta terdapat beberapa jalan yang belum memenuhi standar.

b. Masih banyaknya pelanggaran rencana tata ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan mengakibatkan berbagai masalah, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Tingkat ketaatan terhadap tata ruang pada tahun 2019 sebesar 40%. Banyaknya kasus penambangan liar menjadi salah satu rintangan utama dalam mencapai target pada akhir periode Renstra Dinas PUPR sebesar 100%;

c. Kurangnya tenaga ahli konstruksi; Seiring dengan maraknya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di provinsi ini menjadi salah satu masalah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum. Pengambilan tenaga ahli dari luar daerah menyebabkan meningkatnya biaya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018 dan 2019, bidang jasa konstruksi telah berhasil menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi sebanyak lebih dari 150 orang lebih setiap tahunnya, namun tetap saja belum memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang sangat tinggi;

d. Masih banyaknya daerah atau areal persawahan di daerah selatan yang belum dapat dialiri air pada musim kering dikarenakan tidak adanya embung atau waduk sebagai tempat untuk menampung air yang mampu dialirkan kesawah sawah.

e. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air masih sangat rendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 persentase kawasan yang terlindungi dari daya rusak air baru mencapai 6,06%. Masalah erosi pantai, penanganan banjir, serta kekeringan menjadi fokus utama bidang sumber daya air. Capaian penyediaan air baku pada tahun 2019 hanya 19%. Disamping itu, sektor irigasi juga memerlukan perhatian untuk menghidupkan sektor pertanian. Rasio jaringan irigasi baru mencapai 7% atau baru 35% yang tertangani, sedangkan kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai 73,7%. maka jaringan irigasi pun perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan di Bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya akses terhadap tempat tinggal/hunian layak yang dilengkapi sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin serta masyarakat korban bencana. Pada tahun 2019 capaian kinerja 87,62 %. Sedangkan PSU perumahan capaian kinerja pada tahun 2019 baru 49,84%. Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga belum adanya pedoman dalam sistem perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar. Pembagian wewenang antara provinsi dan kabupaten/kota masih belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak provinsi terkait pemenuhan infrastruktur dasar hanya dilaksanakan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi yang memiliki luasan 10-15 ha, pada kawasan strategis provinsi serta pemenuhan prasana sarana utilitas permukiman. Pada tahun 2019 persentase luasan kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani mencapai 15,44%. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman dikarenakan belum optimalnya tata kelola penataan kawasan permukiman serta belum menyeluruhnya cakupan layanan akses pengolahan persampahan serta belum adanya TPA regional. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian lokasi lahan TPA regional;

b. Masyarakat di lintas kabupaten/kota belum mendapatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Pada tahun 2018 pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 86,13% sedangkan nasional mencapai 88%. Pada tahun 2019 pemenuhan kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 88,33%.

5. Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di Bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

a. Rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan rendahnya capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana capaian IKD dibagi menjadi capaian rendah (0 s.d 0,40), sedang (0,41 s.d. 0,80) dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 0,81). Indeks kapasitas bencana Bangka Belitung 0,39 (rendah). Rendahnya IKD yang menggambarkan rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan masih kurangnya penguatan kebijakan dan kelembagaan, dengan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Permasalahan di Bidang Satuan Pamong Praja, sebagai berikut:

a. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar;

b. Meningkatnya tindak kriminal; Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebanyak 1.828 kasus dan tahun 2017 sebanyak 1.490 kasus. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus. Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan kurang amannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. Belum optimalnya pelatihan bagi Satinlinmas; Belum semua anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2019 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru 1.030 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;

d. Tingginya kasus bencana kebakaran; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang yang sering mengalami bencana kebakaran khususnya kebakaran hutan dibandingkan dengan bencana lainnya. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran hutan. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Penyusunan peta rawan kebakaran sangat diperlukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satuan Lindungan Masyarakat (Satinlinmas), masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat/relawan pemadam kebakaran.

6. Urusan Bidang Sosial

Permasalahan di Bidang Sosial, sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana pada tahun 2017 sebanyak 394,681 orang menjadi 391,124 orang ditahun 2018 serta 398,670 ditahun 2019. Meningkatnya PMKS di Bangka Belitung disebabkan naiknya beberapa komponen PMKS diantaranya anak terlantar dari 54,357 orang (2018) menjadi 63,168 orang (2019), lanjut usia terlantar sebanyak 38,728 orang (2018) menjadi 42,964 orang (2019), pemulung dari 156 orang (2018) menjadi 225 (orang), Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) dari 240 orang (2018) menjadi 551 orang;

b. Kecenderungan jumlah pekerja migran bermasalah dan yang harus dipulangkan ke tempat asalnya semakin bertambah setiap tahunnya yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) orang WNI asal Pangkalpinang yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Timor Leste yang telah dipulangkan melalui KBRI Dili. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.

c. Menurunnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dimana jumlah PSKS sebanyak 752 lembaga dan 1.017 orang (2017), 689 lembaga dan 980 orang (2018), dan 700 lembaga dan 962 orang (2019). Menurunnya jumlah PSKS disebabkan oleh menurunnya pekerja sosial profesional dari 159 (2018) menjadi 143 (2019), pekerja sosial masyarakat dari 415 orang (2018) menjadi 413 orang (2019), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dari 117 orang (2018) menjadi 109 orang (2019).

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja; Berdasarkan data tahun 2019 jumlah pencari kerja di Bangka Belitung yang terdaftar sebesar 4 persen atau sebanyak 5.225 pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja.

2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga; Salah satu faktor meningkatnya kualitas keluarga adalah sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi salah satu yang menjadi objek pembinaan adalah Industri Rumahan (IR) yang dikelola oleh perempuan. Dari data tahun 2018 IR yang dikelola oleh perempuan hanya 1.941 atau

0,40 % dibandingkan dengan perempuan yang produktif. Pada tahun 2019 walaupun ada peningkatan tetapi masih jauh perbandingan antara perempuan yang mandiri melalui IR yaitu sebesar 3.129 dengan perempuan produktif 472.545 yaitu sebesar 0,66% tentu dirasakan masih sangat kurang.

b. Belum memadainya SDM perlindungan anak, perempuan dan pemenuhan hak anak; Dari data 2019 SDM perlindungan perempuanyang terdata sebanyak 177 orang jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang harus dilindungi sebanyak 471.329 atau sebesar 0,037% sehingga dapat dikatakan angka tersebut sangat tidak proporsional. Begitu juga SDM perlindungan anak yang terdata sebanyak 790 dengan jumlah anak yang harus dilindungi sebanyak 436.486 atau sebesar 0,18% dan juga dalam pemenuhan hak anak, jumlah SDM yang terdata sebanyak 800 dengan perbandingan 436.486 orang anak atau sebesar 0,183%.

3. Urusan Bidang Pangan

Permasalahan di Bidang Pangan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,09 dan 87,84. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.

b. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai Skor PPH Konsumsi di Bangka Belitung sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 80,09 dan naik di tahun 2019 sebesar 83,01. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,09 dan 87,84. Meskipun skor PPH Konsumsi meningkat namun masih perlu keragaman konsumsi agar skor tetap bertahan.

c. Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana dalam rentang tahun 2015-2019, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) meskipun cukup fluktuatif namun secara keseluruhan angka PoU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 PoU sebesar 12,55 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 7,90 persen (2019). Hal ini menunjukkan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan jumlah penduduk saat penghitungan sebanyak 1.481.512 jiwa maka penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan sebanyak 117.039 jiwa.

4. Urusan Bidang Pertanahan

Permasalahan di Bidang Pertanahan, sebagai berikut:

a. Masih banyaknya kasus sengketa tanah

Masih banyak lahan yang merupakan lahan sengketa, sehingga menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Penyelesaian kasus sangat fluktuatif. Pada tahun 2019 dari 8 kasus terdapat 2 kasus yang tidak terselesaikan. Kemudian masih banyak juga lahan pemerintah yang belum terinventarisir maupun teridentifikasi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat memanfaatkannya. Hingga tahun 2019 anggaran untuk bidang pertanahan masih sangat sedikit.

Akibatnya masalah-masalah diatas sulit untuk diselesaikan. Bahkan kewajiban daerah untuk menyelesaikan ganti rugi sengketa tanah pembangunan jalan provinsi pun menjadi terhambat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan infrastuktur pun masih cukup rendah, dampaknya antara lain adalah biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi untuk pelebaran jalan dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi yang cukup tinggi atas lahan mereka.

5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan urusan Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

a. Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup adalah sebagai instrumen pengendalian, pencegahan kerusakan lingkungan di awal sehingga perlu dokumen perencanaan lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan. Jika dokumen perencanaan ini tidak tersusun maka akan menyulitkan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.

b. Perlunya meningkatkan parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi; Sampling merupakan bentuk pelayanan laboratorium dalam pengambilan parameter kualitas lingkungan (air, udara & tanah). Sampling kualitas lingkungan udara merupakan salah satu persyaratan laboratorium yang telah teregistrasi oleh KLHK selain K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja.). Tahun 2019, jumlah parameter yang terakreditasi sebanyak 34 parameter dari target 32 parameter.

c. Masih rendahnya persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Pada tahun 2019 ketaatan usaha/kegiatan yang masuk katagori “taat” hanya 34,11% dari 85 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan atau hanya sebanyak29 usaha/kegiatan. Sementara dalam tahun 2018 dari target 50 usaha/kegiatan yang diawasi, yang masuk kategori taat sebanyak 36 usaha/kegiatan atau 72%.

d. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup; Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang ijin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Dalam tahun 2018, target pengaduan masyarakat adalah 14 pengaduan.Pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, target pengaduan masyarakat sebanyak 14 pengaduan, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus (94%) dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus.

e. Perlunya menindaklanjuti kewenangan dari pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti usulan dari 7 kabupaten/Kota dalam penilaian pemberian penghargaan tingkat provinsi; Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjadi Tim Penilai berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan hasilnya dikirim ke pusat untuk dilakukan verifikasi hasil final, seperti penerima penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata tingkat provinsi untuk diusulkan menjadi calon penerima penghargaan. Pada tahun 2019 penerimaan adipura 5 kabupaten kota, 5

penghargaan bidang lingkungan, 1 Kalpataru dan Adiwiyata tingkat provinsi sebanyak 13 sekolah dari 14 yang ditargetkan (92,85%), dan 1 sekolah mendapatkan penghargaan tingkat nasional.

f. Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pada saat ini, TPA Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung sampah dari Kota Pangkalpinang dan sekitar Kabupaten Bangka Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada di Pulau Bangka (belum final verifikasi lokasi) dan 1 di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan perlu ditindaklanjuti).

6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan; Berdasarkan data pada tahun 2019 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan hanya 8 dinas dari 34 dinas. Permasalahan lain masih rendahnya cakupan kepemilikan akta, baik akta nikah, kelahiran dan kematian. Pada tahun 2018 mayarakat yang telah memiliki akta pencatatan sipil sebanyak 63,32% sementara pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,10%. Begitu juga cakupan dokumen pendaftaran penduduk yaitu KK,KTP dan KIA belum maksimal. Data tahun 2018 masyarakat Bangka Belitung yang sudah mengurus dokumen kependudukan sebesar 60,41% dan 2019 sebesar 74,41%.

7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya pengelolaan lembaga kemasyarakatan; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif di Bangka Belitung tahun 2015-2019 dari 65 BUMDes menjadi 289 BUMDes yang tersebar di seluruh desa di Bangka Belitung. Meskipun jumlah BUMDes aktif naik setiap tahunnya namun kenaikan ini belum maksimal. Sebanyak 77 Desa dari 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki BUMDes. Padahal unit usaha ini hal yang wajib dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terbentuknya BUMDes, diantaranya faktor modal, belum adanya kesiapan BPD dan Peraturan Desa.

8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

a. Meningkatnya Angka Kelahiran Total (TFR); Perbandingan antara tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,03 % yaitu dari 2,27 menjadi 2,30. Hal ini salah satu penyebabnya adalah masih kurang optimalnya pembinaan kepada kabupaten/kota tentang keluarga berencana. Data 2018 menyebutkan hanya 5 dari 7 kabupaten/kota yang intensif menjadi binaan provinsi. Kemudian untuk pembinaan diperbaharui lagi di 2019 dengan mengupayakan pembinaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

b. Masih belum seluruh kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian penduduk; Data 2019 menyebutkan bahwa dari 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung hanya 4 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen kependudukan (*Grand Design* Kependudukan). Hal ini tentunya akan mempersulit untuk pelaksanaan pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk.

c. Belum optimalnya pembentukan Kampung KB; Meskipun dari tahun 2016-2019 pembentukan Kampung KB meningkat namun Data tahun 2019 Kampung KB yang terbentuk 118 Kampung KB dari target 131 kampung KB yang terbentuk pada akhir masa RPJMD.

9. Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan urusan Bidang Perhubungan, sebagai berikut:

a. Belum memadainya infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Meskipun pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dari tahun 2016-2019 terus meningkat namun peningkatan tersebut belum optimal. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru mencapai38,12 persen di tahun 2019. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas baru terealisasi sebesar 15,25% (1 unit APILL, 1200 m Marka jalan dan 36 unit rambu lalu lintas) atau capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 15,25%. Sedangkan untuk pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk jalan provinsi kawasan perkotaan, dimana kebutuhan perkotaan sebanyak 1.120 unit, sampai dengan tahun 2019 baru dapat terealisasi sebanyak 80 unit.

10. Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi

Permasalahan urusan Bidang Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government*; meskipun pada tahun 2019 capaian kinerja sudah mencapai 90 persen namun layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government* belum optimal dikarenakan belum terintegrasinya data antar instansi dan terbatasnya belum adanya payung hukum yang mengatur terkait dengan pemanfaatan satu data.

11. Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

a. Menurunnya jumlah koperasi di Bangka Belitung; Jumlah koperasi di Bangka Belitung pada tahun 2016 berjumlah 1.149 dan menurun menjadi 1.049 koperasi di 2019. Hal ini dikarenakan adanya pembubaran koperasi dan koperasi yang tidak aktif. Setidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 100 pembubaran koperasi. Sedangkan koperasi tidak aktif bertambah dari 328 menjadi 395 ditahun 2019.

b. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM; Pada tahun 2018 sebanyak 150.948 UMKM dan 2019 sebanyak 161.186 UMKM. Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat pembaharuan data UMKM di Bangka Belitung. Sedangkan jumlah UMKM yang diberdayakan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.500 UMKM dan 4.300 UMKM di tahun 2019. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dikarenakan beberapa faktor, seperti : minimnya modal, kurang inovatif, belum maksimalnya pemasaran secara online, dan sebagainya.

12. Urusan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya persentase capaian realisasi investasi. Pada tahun 2018 nilai sebesar 3,7 trilyun dengan realisasi 3,1 trilyun PMDN dan 620 milyar untuk PMA. Sedangkan tahun 2019 realisasi investasi sebesar 4,2 trilyun dengan rincian 2,9 trilyun PMDN dan 1,3 trilyun PMA. Nilai ini jauh dari target nasional 6,85 trilyun (2019). Beberapa hambatan dan kendala investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni, belum adanya pelabuhan yang respresentatif, masih banyak investor yang belum memahami proses mendapatkan NIB pada sistem perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga ada bebarapa pelaku usaha mengisi rencana investasinya pada OSS tidak sesuai dengan nilai rencana investasi yang akan diinvestasikan.

13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan dimana pada tahun 2019 jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 184 orang dan tahun 2018 sebanyak 199 orang. Hal ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Masih belum optimalnya pembinaan cabang olahraga dimana pada tahun 2019 terdapat 8 cabor yang diikutsertakan dalam 13 cabor pada pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke 6 dari 7 provinsi yang ikut serta dalam pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I.

14. **Urusan Bidang Statistik**

Permasalahan urusan Bidang Statistik, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral; Meskipun pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen di tahun 2019, namun capaian ini belum optimal mengingat kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memanfaatan data statistik dalam perencanaan dan belum adanya regulasi daerah didalam mengatur penggunaan data tersebut dalam perencanaan dan pengambil kebijakan.

15. Urusan Bidang Persandian

Permasalahan urusan Bidang Persandian, sebagai berikut:

a. Rendahnya capaian indeks kematangan keamanan informasi; Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi. Hal ini menunjukkan tingkat sistem elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standar ISO 27001:2013 karena belum mencapai level III+ dimana penerapan keamanan informasi telah terdefinisi dan konsisten.

16. Urusan Bidang Perpustakaan

Permasalahan di urusan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya tingkat pembinaan perpustakaan.

Sampai dengan tahun 2019 jumlah perpustakaan yang sudah dibina masih sangat sedikit yaitu sebanyak 149 perpustakaan atau sebesar 9,50% dari 1560 perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

c. Masih rendahnya koleksi buku dan naskah kuno di perpustakaan;

Sampai tahun 2020 koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah masih sangat sedikit yaitu sebanyak 26.600 koleksi buku, sedangkan untuk naskah kuno sangat minim sekali. Sesuai aturan koleksi buku yang harus di miliki perpustakaan sekurang-kurangnya 0,015 per kapita masyarakat dan subjeknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi buku di perpustakaan sekurangnya mencapai minimal 50.000 judul. Keterbatasan koleksi buku ini sebagai salah satu implikasi menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 6.253 menjadi 4.700 pengunjung.

17. Urusan Bidang Kebudayaan

Permasalahan di urusan Bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

a Kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfilman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

18. Urusan Bidang Kearsipan

Permasalahan di urusan Bidang Kearsipan, sebagai berikut:

b Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan;

Tantangan terberat adalah penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan, di mana berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak ANRI, belum menunjukkan angka yang baik. Penyebab kegagalan tersebut antara lain disebabkan adanya permasalahan pengelolaan arsip yang belum maksimal dan belum adanya tempat penyimpanan yang memadai terutama Depo Arsip Daerah Provinsi.

c Masih rendahnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku;

Perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaannya, karena belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan yang memadai, disamping anggaran yang tersedia minim. Disamping itu, kendala yang dihadapi adalah sebagian besar PD Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan dan mempromosikan pentingnya arsip untuk diselamatkan.

d Belum adanya layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Program layanan perizinan penggunaan arsip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ada aturan yang mengatur tentang pedoman keterbukaan arsip statis untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Peraturan Gubernur.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

a. Masih belum optimalnya pemanfaatan luasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang termanfaatkan; Sampai tahun 2019 luasan yang dicadangkan untuk kawasan konservasi baru 595.182,01ha dengan 2 lokasi yakni kawasan konservasi perairan gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya di Kabupaten Belitung Timur dan kawasan konservasi perairan Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Akibat baru ditetapkannya Raperda RZWP3K di awal tahun 2020 sehingga pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan ruang laut baru bisa dilakukan setelah Perda RZWP3K ditetapkan.

b. Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang taat aturan; Sampai tahun 2019 baru 75% pelaku usaha yang taat aturan. Terkendala dengan minimnya hari operasi kapal pengawas yang dalam setahun hanya memiliki 46 hari operasi pada tahun 2019, jumlah hari operasi yang optimal minimal 100 hari operasi dalam setahun, dan harus memiliki minimal 2 tim patroli, sedangkan saat ini hanya memiliki 1 tim patrol (1 kapten kapal patroli PNS).

c. Menurunnya produksi perikanan tangkap; Pertumbuhan produksi perikanan tangkap secara umum meningkat dilihat dari target yang hanya 215.300 ton dengan realisasi sebesar 223.680,33 ton, tetapi jika dengan dibandingkan dengan produksi tahun 2018 sebesar 228.980,33 ton maka produksi 2019 mengalami penurunan. Berbagai faktor yang menyebabkan penurun produksi perikanan antara lain belum optimalnya pelayanan kepada pelaku usaha penangkapan ikan di pelabuhan perikanan yang ada, serta kurang memadainya infrastruktur yang ada di sentra-sentra nelayan yakni sarana bongkar muat berupa tambat labu/jetty.

d. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah; Sampai tahun 2019, produksi perikanan budidaya hanya 7.150,66 ton masih sangat jauh dari target produksi tahun 2019 mencapai 12.120 ton, penurunan produksi ini bila dibandingkan produksi 2018 yang mencapai 9.341,9 ton akibat menurunnya produksi udang di PT. Merdeka sebagai penyumbang terbesar produksi budidaya. Diharapkan pada dua tahun kedepan produksi perikanan budidaya dari jenis budidaya udang vaname akan meningkat dengan maraknya investasi pembukaan tambak baru di wilayah Bangka Belitung.

e. Jumlah produksi benih ikan yang unggul dari balai pemuliaan milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal; Sarana dan prasarana yg harus dibenahi baik balai benih air laut dimana kondisi bangsal benih dan pendederan harus segera di rehab karena termakan usia Untuk balai benih air payau, karakteristik instalasinya untuk udang windu sedangkan saat ini balai beralih ke jenis udang vaname sehingga perlu dilakukan rehabilitasi guna pengoptimalan produksi benih di kedua balai benih. Pada tahun 2019, produksi benih air laut hanya berproduksi sebanyak 0,023 juta ekor sedangkan benih air payau hanya berproduksi sebanyak 437 ribu ekor.

f. Belum optimalnya pembudidaya yang dibantu vaksinasi dan dibina tentang pengelolaan kesehatan lingkungan budidaya; Sampai dengan tahun 2019 baru 10% pembudidaya yang memperoleh fasilitasi vaksinasi dan dan pembinaan kesehatan lingkungan karena keterbatasan personil dan anggaran di bidang budidaya.

g. Pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan masih cukup rendah; Sampai dengan tahun 2019 produksi baru mencapai 39.697,74 ton potensi industri pengolahan masih cukup besar, apalagi produk yang diekspor masih berupa produk beku dan segar, belum mengalami pengolahan berupa pengalengan maupun pengasapan. Ini merupakan tantangan bagi industri pengolahan perikanan di Bangka Belitung.

2. Urusan Bidang Pertanian

Permasalahan urusan di Bidang Pertanian, sebagai berikut:

e. Belum optimalnya rasio sarana dan prasarana pertanian; Meskipun capaian rasio sarana dan prasarana meningkat setiap tahun namun belum optimal. Meningkatnya rasio sarana dan prasarana pertanian tidak diikuti dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Sub Sektor Hortikultura menurun dari 99.98 (2017) menjadi 98.82 (2019). Begitupun dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan sebesar 93.82 (2017) dan menurun di tahun 2019 sebesar 69.58 (2019). Hal ini disebabkan menurunnya harga lada dan karet yang menyebabkan menurunnya ketertarikan petani untuk berkebun lada dan karet sehingga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan dan perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan.

3. Urusan Bidang Pariwisata

Permasalahan urusan di Bidang Pariwisata, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi. Hal ini terlihat dari realisasi tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 hanya sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata. Meningkatnya tenaga pariwisata belum diikuti dengan peningkatan

kualitas sumber daya pariwisata. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam memberikan pelatihan bagi sumber daya pariwisata.

4. Urusan Bidang Kehutanan

Permasalahan urusan di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya pengelolaan hutan yang disebabkan karena:

- kelembagaan pengelola kawasan hutan tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru 8 (delapan) unit yang ditetapkan sebagai UPTD KPH sebagai pelaksana kewenangan urusan kehutanan tingkat provinsi; perlunya peningkatan kapasitas SDM di KPH;
- luas lahan kritis berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk tahun 2013, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2013 mencapai 216.109 hektar; capaian penanaman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluas 18.973 hektar (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019); masih tingginya kerusakan hutan dan lahan, perlu peningkatan upaya penegakan hukum melalui koordinasi yang sinergis dengan berbagai unsur; kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 kebakaran hutan seluas 1.423 ha (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019).

b. Masih rendahnya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Hal ini disebabkan oleh belum terbentuk dan ditetapkannya kawasan ekosistem essensial/kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting dan lembaga pengelolanya termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; belum dimiliki data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang menjadi kewenangan provinsi;

c. Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas penyuluh kehutanan yang berdampak rendahnya kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH tahun 2020 dari 180 KTH, terdiri dari kelas pemula berjumlah 168 KTH, kelas madya berjumlah 15 KTH, kelas utama berjumlah 0 KTH;

d. Belum optimalnya program perhutanan sosial; Hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 172 izin dengan luas 38.051 ha, namun baru 52 izin yang sudah menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jenis usahanya. Rendahnya usulan masyarakat untuk mengusulkan pengelolaan hutan sosial menjadi salah satu belum optimalnya pemanfaatan perhutanan sosial. Untuk tahun 2020, terdapat 7 usulan (±334 ha) yang sedang berproses untuk pengajuan usulan ke Kementerian.

e. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 DAS yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama; sejumlah 162 DAS harus dipulihkan daya dukungnya dan 271 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; capaian hingga tahun 2019 sejumlah 4 DAS telah diupayakan dipulihkan daya dukungnya dan 2 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

5. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif berfluktuatif; capaian rasio elektrifikasi tidak akan statis mengingat kebutuhan untuk memiliki rumah dan berkembangnya dunia usaha semakin bertambah tentunya kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat.

6. Urusan Bidang Perdagangan

Permasalahan urusan di Bidang Perdagangan, sebagai berikut:

a. Menurunnya ekspor di Kepulauan Bangka Belitung; ekspor Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. pada tahun 2019 ekspor mengalami penurunan menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI *(competent person of Indonesia)* dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut.

b. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan di kalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.

7. Urusan Bidang Perindustrian

Permasalahan urusan di Bidang Perindustrian, sebagai berikut:

a. Rendahnya pertumbuhan jumlah industri; Sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami tren penurunan baik industri besar, sedang, dan kecil. Pertumbuhan jumlah industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 18,36% (2018), 12,40% (2019), dan 9,20 (2020). Menurunnya pertumbuhan industri di Bangka Belitung, salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah industri sedang dari 106 unit (2018) menjadi 100 unit (2020). Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri mengalami perlambatan kenaikan sebesar 2%.

b. Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah; Industri yang sesuai Izin Usaha Industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data.

8. Transmigrasi

Permasalahan urusan di Bidang Transmigrasi, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi; Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada tahun 2016 dengan luas 180.278.28 ha.

Kemudian pada tahun 2018 ditetapkan 1 kawasan lagi yaitu kawasan Jebus dengan 74.015.27. Meskipun sudah ada 2 kawasan transmigrasi yang ditetapkan akan tetapi pelaksanaan dilapangan belum begitu optimal dalam pengembangan wilayah, terutama menjadikan wilayah yang strategis secara ekonomi dan menjadi pusat perkotaan baru. Pembangunan kota mandiri terpadu perlu mendapat dukungan dari semua sektor agar dapat berkembang dengan baik.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan urusan Sekretariat Daerah, sebagai berikut.

a. Belum optimalnya Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan kemampuan menyediakan data masih rendah. Data yang disajikan hanya mencapai 60% atau 0-50% data IKK LPPD. Sekitar 30% lainnya sudah cukup baik, mampu menyediakan 50-75% data IKK. Rendahnya nilai LPPD berimplikasi pada Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menjadi rendah, *good governance* tidak berjalan. Bila hal ini terjadi tiga tahun berturut-turut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), pemerintah akan melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan urusan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

a. Pencapaian target jumlah produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan dalam 1 tahun masih sulit dilakukan. Pada tahun 2019 target jumlah produk hukum yang dibahas adalah 23 produk hukum. Namun sampai dengan semester pertama tahun 2019, jumlah produk hukum yang dibahas masih di bawah 10. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa rancangan peraturan daerah yang pembahasannya cukup panjang hingga memakan waktu beberapa bulan. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari eksekutif baru bisa dibahas setelah rancangan perdanya disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Bisa saja penyampaian rancangan Peraturan Daerahnya mundur dari jadwal semula. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintah antara lain:

1. Unsur Perencanaan

Permasalahan unsur Perencanaan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Program/indikator dalam RPJMD dengan Renstra PD. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya sistem pembangunan daerah satu data secara elektronik, baik perencanaan data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja provinsi untuk komponen perencanaan kinerja dalam upaya peningkatan keselarasan antar dokumen

perencanaan, penganggaran dan pelaporan pada tahun 2018 sebesar 23,27 dan tahun 2019 sebesar 23,50 dari bobot maksimal 30.

b. Belum optimalnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dilihat dari belum optimalnya hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada komponen capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya sebesar 12,40 dari bobot maksimal 20.

2. Unsur Keuangan

Permasalahan unsur Keuangan, sebagai berikut:

a. Rendahnya rata-rata ratio kemandirian keuangan daerah; capaian rasio kemandirian daerah yang mencapai 46,16% sejak tahun 2014, Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah (> 50%), hanya pada tahun 2018 saja angka kemandirian keuangan diatas 50% yaitu 50,20%. Hal ini disebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%. Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%.

3. Unsur Kepegawaian

Permasalahan Unsur Kepegawaian, sebagai berikut:

a. Masih belum optimalnya Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 94,10 % dari target 83%; tahun 2019 realisasi 26,66 % dari target 87%, sehingga pencapaian target pemenuhan pegawai ASN dari tahun 2018-2019 baru tercapai 314 orang dari target 480 orang.

b. Masih belum maksimalnya ASN yang memiliki disiplin dan kinerja minimal baik. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 75,42% dari target 56%; tahun 2019 realisasi sejumlah 99,89% dari target 99,71%, sehingga pencapaian target penyelesaian kasus disiplin dari tahun 2018-2019 hanya dapat diselesaikan 26 kasus dari total kasus yang masuk sebanyak 53 kasus.

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

a. Masih belum maksimalnya ASN yang meningkat kompetensinya. Hal ini terlihat pada realisasi tahun 2018 sejumlah 88,61% dari target 52%; tahun 2019 realisasi sejumlah 84,90% dari target 59%, sehingga pencapaian target ASN yang meningkat kompetensinya dari tahun 2018-2019 sebanyak 1.412 orang dari target 10.798 orang.

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan Unsur Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

a. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil

penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hanya sebesar 75 %.

b. Hasil inovasi daerah yang dikembangkan belum optimal. Meskipun pada tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.555 dan meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 280, namun inovasi Bangka Belitung belum pernah masuk nominasi dibandingkan dengan provinsi lain.

6. Unsur Penghubung

Permasalahan Unsur Penghubung, sebagai berikut:

a. Belum maksimalnya pelayanan Badan Penghubung, dimana Nilai Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung pada tahun 2019 sebesar 100 %. Selain itu dilihat dari capaian data dan informasi Nilai Sakip Badan Penghubung sebesar 71,18 (2019). Walaupun mengalami peningkatan namun masih terbatas pada kepuasan pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kepuasan hasil dari pelayanan Badan Penghubung.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan Unsur Pengawasan, sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan. Tujuan yang akan dicapai adalah nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar <5% dari total APBD tahun anggaran berjalan. Data pada tahun anggaran 2018 menunjukkan nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar 0,86% dan pada tahun anggaran 2019 sebesar 0,06%.

b. Belum optimalnya nilai level capaian maturitas SPIP. Hal ini terlihat dari data tahun 2018 masih level 2+ dan tahun 2019 level 3 (dengan catatan).

c. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan. Hal ini terlihat pada realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan tahun 2018 memperoleh Nilai 5,66 dan tahun 2019 mendapatkan Nilai 5,74 dari total Nilai Bobot sebesar 12. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya instrumen pengawasan lainnya seperti benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat upaya pembangunan zona integritas yang lebih intensif di unit-unit kerja guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 serta mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang akan menjawab keluhan mengenai pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 yang akan datang, pemerintah pusat dan pemerintah Daerah masih dihadapkan pada tantangan dan upaya untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial terhadap dampak penyebaran Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah akan tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus kita lakukan.

Dalam menghadapi dampak penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menentukan tema RKPD Tahun 2022 yang telah dirumuskan yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Menuju Sumber Daya Manusia Yang Unggul". Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD 2022 memiliki dua prioritas pembangunan yaitu dibagi menjadi prioritas pembangunan utama dan penunjang. Prioritas pembangunan utama akan difokuskan pada beberapa sektor, yaitu:

1. Pembangunan Agropolitan
2. Pembangunan Bahari
3. Pembangunan Pariwisata
4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5. Pembangunan Pendidikan
6. Pembangunan Kesehatan

Kemudian, arah prioritas pembangunan penunjang akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
2. Pengembangfan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
3. Pembangunan Sosial
4. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Pembangunan Berdemokrasi
6. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan
7. Pengendalian Lingkungan Hidup

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2018-2020 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel III.1 menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara nominal PDRB pada tahun 2018 sebesar Rp 52,208 milyar meningkat menjadi sebesar Rp 53,941 milyar pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi perlambatan menjadi sebesar Rp 52,702 milyar.

Tabel III.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021 (Milyar rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019*	2020**	2021 e	2022 e
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,590	9,863	10,683	11,565	12,065
B	Pertambangan dan Penggalian	6,571	6,631	6,019	6,022	6,025
C	Industri Pengolahan	11,788	11,929	11,257	11,213	11,415
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50	53	55	60	62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9	9	10	10	10
F	Konstruksi	4,492	4,810	4,700	4,820	5,040
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,445	7,576	7,226	7,377	7,630
H	Transportasi dan Pergudangan	2,021	2,065	1,725	1,626	1,670
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,207	1,319	1,281	1,324	1,380
J	Informasi dan Komunikasi	1,110	1,263	1,458	1,578	1,666
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	941	988	921	970	1,013
L	Real Estate	1,702	1,725	1,805	1,888	1,970
M,N	Jasa Perusahaan	136	138	119	119	122
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,844	3,073	2,973	2,979	3,107

Lapangan Usaha		2018	2019*	2020**	2021 e	2022 e
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
P	Jasa Pendidikan	1,289	1,380	1,369	1,595	1,677
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	632	697	705	695	725
R,S,T,U	Jasa lainnya	381	422	396	397	407
	PDRB	**52,208**	**53,941**	**52,702**	**54,238**	**55,983**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2020)

**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi*

Dilihat dari perkembangan sektoral pada kurun waktu 2018-2020 Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan keempat sektor yang dianggap sebagai penggerak PDRB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun 2020 sektor dengan kontribusi PDRB terbesar diperoleh dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 11,257 Milyar, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 10,683 milyar, sektor perdagangan besar dan eceran Rp 7,226 milyar, dan sektor pertambangan Rp 6,019 milyar. Kontribusi keempat sektor tersebut sebesar Rp 35,185 milyar atau sebesar 67,79 persen. Kontribusi sektor lainnya sebesar Rp 17.517 milyar atau sebesar 32,21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2021 dan 2022 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp 54,238 milyar dan pada tahun 2022 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 55.983 milyar. Diperkirakan dalam kurun waktu tersebut Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dianggap merupakan keempat sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (*region*) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2018-2020 juga menunjukkan tren yang flutuatif. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2018 sebesar Rp 52,208 milyar, meningkat menjadi sebesar Rp 53,941 milyar pada tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 52,702 milyar.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2018 nilai ekspor mencapai sebesar Rp 25.432 milyar menurun menjadi sebesar Rp 21.186 milyar pada tahun 2019, dan kembali mengalami penurunan sebesar Rp 19.288 milyar pada tahun 2020. Sedangkan untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode tahun 2018-2019, yaitu masing-masing sebesar Rp 11.780 milyar pada tahun 2018, sebesar Rp 12.453 milyar pada tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan investasi menjadi sebesar Rp 11.634 milyar. Sejalan dengan komponen investasi yang menunjukan tren yang fluktuatif, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami pergerakan yang fluktuatif sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp 5.060 milyar pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp 5.273 milyar pada tahun 2019 dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp 5.091 milyar. Pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Tabel III.2
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

	Pengeluaran	2018	2019*	2020**	2021e	2022e
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	27,779	28,875	28,745	29,320	30,357
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	337	374	374	389	408
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,060	5,273	5,091	5,516	5,727
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,780	12,453	11,634	11,899	12,313
5	Perubahan Inventori	393	499	65	167	363
6	Ekspor Luar Negeri	25,432	21,186	19,288	21,604	22,464
7	Impor Luar Negeri	2,010	492	411	969	1,210
8	Net Ekspor Antar Daerah	(16,563)	(14,227)	(12,084)	(13,687)	(14,439)
PDRB		**52,208**	**53,941**	**52,702**	**54,238**	**55,983**

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2020)
**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi*

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor row materials sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia.

Dengan adanya pemulihan pasca pandemi maka penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode Tahun 2018-2020 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 terus mengalami perlambatan dalam pertumbuhan, dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,45 persen. Tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan sebesar 3,32 persen, dan terus mengalami perlambatan pertumbuhan sampai dengan -2,30 persen di tahun 2020.

Gambar III.I
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

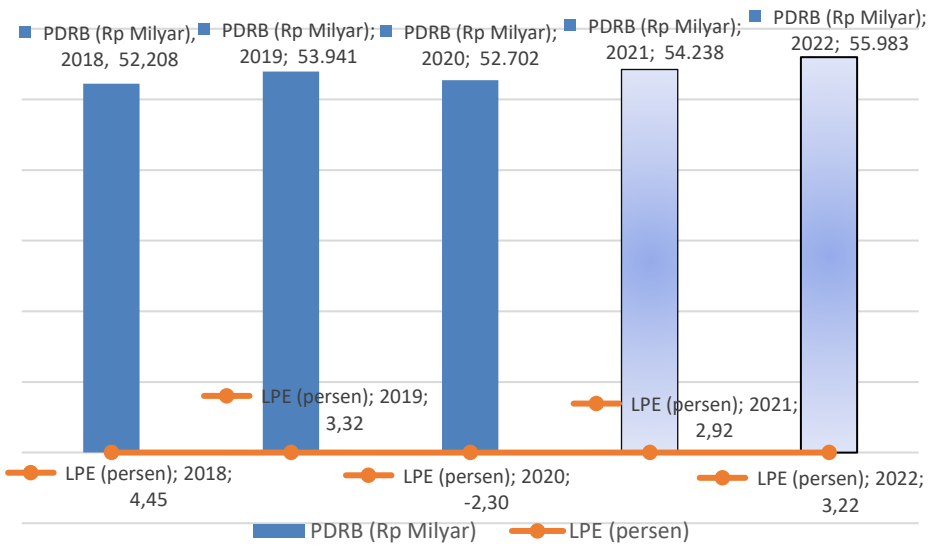

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, ᵉ Data Estimasi*

Terjadinya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 disebakan oleh penurunan kinerja perekonomian yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian Kepulauan Bangka Belitung seperti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar persen, lapangan usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami kontraksi. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,92 persen dan 3,22 persen.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha	2018	2019*	2020**	2021 e	2022 e
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.43	2.85	8.31	8.26	4.32
B.	Pertambangan dan Penggalian	(0.96)	0.91	(9.23)	0.06	0.04
C.	Industri Pengolahan	3.97	1.20	(5.63)	(0.39)	1.80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.17	5.00	5.14	8.70	3.33
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	(6.38)	4.55	5.43	1.03	1.02
F.	Konstruksi	5.74	7.08	(2.29)	2.56	4.56
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.65	1.76	(4.62)	2.09	3.43
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.82	2.18	(16.46)	(5.72)	2.69
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	6.16	9.28	(2.88)	3.38	4.17
J.	Informasi dan Komunikasi	10.67	13.78	15.44	8.21	5.63
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.81	4.99	(6.78)	5.28	4.44
L.	Real Estate	8.27	1.35	4.64	4.58	4.34
M, N.	Jasa Perusahaan	6.67	1.47	(13.99)	0.14	2.76
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.22	8.05	(3.25)	0.21	4.27
P.	Jasa Pendidikan	8.96	7.06	(0.80)	16.53	5.11
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.46	10.28	1.15	(1.45)	4.40
R,S.T.U	Jasa Lainnya	7.35	10.76	(6.16)	0.25	2.54
	PDRB	**4.45**	**3.32**	**(2.30)**	**2.92**	**3.22**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2020)
**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi*

3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku diperlihatkan dalam tabel III.4 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan kemudian menurun di tahun 2020. Pada tahun 2018, PDRB perkapita sebesar Rp 50.082 milyar kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 50.911 milyar dan pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan menjadi sebesar Rp 49.772 milyar. Penurunan pendapatan tersebut merupakan imbas dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang menyerang kawasan-kawasan termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namum sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh pada masa pandemi dan pascapandemi, PDRB perkapita pada tahun 2021-2022 diperkirakan akan terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 51.880 milyar dan sebesar Rp 53.856 milyar.

Tabel III.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (milyar)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2022

PDRB Per Kapita	2018	2019*	2020**	2021 e	2022 e
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	50.082	50.911	49.772	51.880	53.856

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2020)
**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi*

3.1.1.4 Struktur Perekonomian Daerah

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 21,36 persen, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai sebesar 22,12 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 20,27 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,71 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,42 persen.

Gambar III.2
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

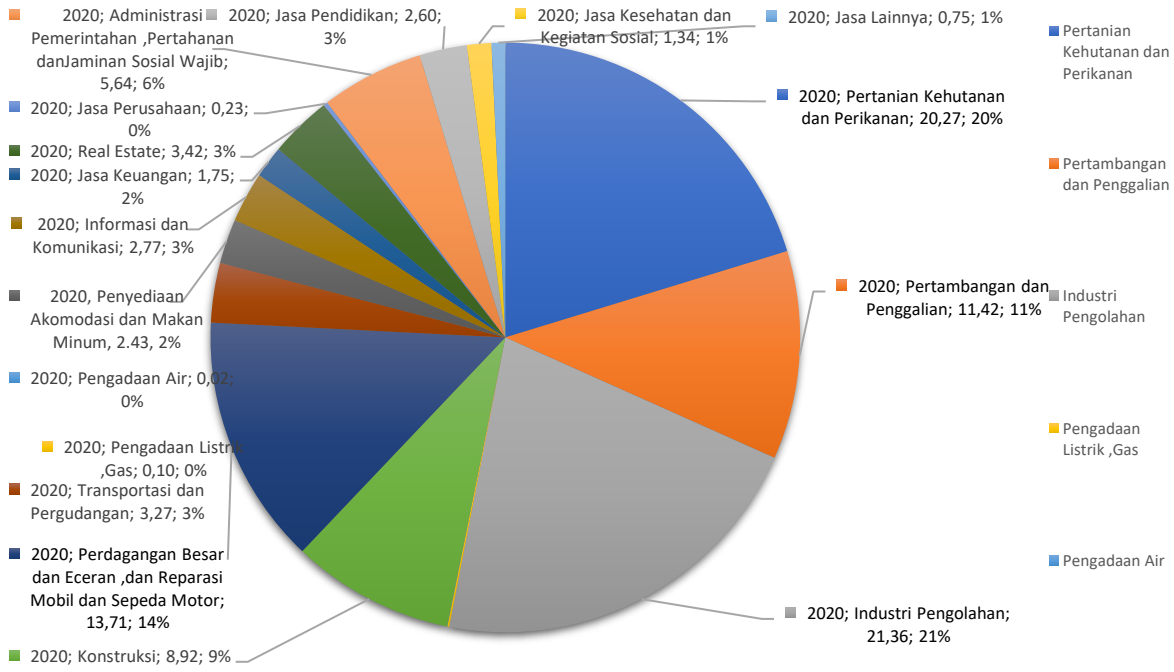

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)

Selanjutnya, sepanjang tahun 2021 dan 2022, diperkirakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah dengan rata-rata sebesar 21,44 persen. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar lainnya adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontibusi sebesar 20,53 persen, 11,62 persen dan 10,93 persen.

Tabel III.5

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2022 (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2018	2019*	2020**	2021 e	2022 e
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*((6)*
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.37	18.28	20.27	21.32	21.55
B.	Pertambangan dan Penggalian	12.59	12.29	11.42	11.10	10.76
C.	Industri Pengolahan	22.58	22.12	21.36	20.67	20.39
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F.	Konstruksi	8.60	8.92	8.92	8.82	9.00
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.26	14.05	13.71	13.60	13.63
H.	Transportasi dan Pergudangan	3.87	3.83	3.27	3.00	2.98
I.	Penyedian Akomodasi dan Makan Minum	2.31	2.45	2.43	2.44	2.46
J.	Informasi dan Komunikasi	2.13	2.34	2.77	2.91	2.98
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.80	1.83	1.75	1.79	1.81
L.	Real Estate	3.26	3.20	3.42	3.48	3.52
M, N.	Jasa Perusahaan	0.26	0.26	0.23	0.22	0.22
0.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.45	5.70	5.64	5.49	5.55
P.	Jasa Pendidikan	2.47	2.56	2.60	2.94	3.00
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21	1.29	1.34	1.28	1.30
R,S.T.U	Jasa Lainnya	0.73	0.78	0.75	0.73	0.73
	PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2020)
**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi*

Dari hasil estimasi pada tabel III.5 pada tahun 2021-2022, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih dianggap merupakan sektor potensial utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian diikuti sektor industri pengolahan, sektor pertambangan kemudian diikuti sektor perdagangan besar dan eceran.

3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2018-2020 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata 53,76 persen, diikuti oleh komponen ekspor luar negeri dan pembentukan modal tetap bruto yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan 20 persen terhadap PDRB.

Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 9,71 persen.

Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah pada tahun 2021 dan 2022 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor luar negeri dan pembentukan modal tetap bruto. Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2018-2022 diperlihatkan pada Tabel III.6 di bawah ini.

Tabel III.6
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018–2022 (dalam persen)

	Pengeluaran	2018	2019*	2020**	2021 e	2022 e
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53.21	53.53	54.54	54.06	54.23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.65	0.69	0.71	0.72	0.73
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.69	9.78	9.66	10.17	10.23
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	22.56	23.09	22.08	21.94	21.99
5	Perubahan Inventori	0.75	0.93	0.12	0.31	0.65
6	Ekspor Luar Negeri	48.71	39.28	36.60	39.83	40.13
7	Impor Luar Negeri	3.85	0.91	0.78	1.79	2.16
8	Net Ekspor Antar Daerah	(31.73)	(26.38)	(22.93)	(25.23)	(26.79)
	PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2018-2020)
**) Data Sementara, **) Data Sangat Sementara, e Data Estimasi*

3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 0,71 persen dan Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) mengalami inflasi sebesar 1.49 persen *year on year*. Berdasarkan laju inflasi dua kota ini maka inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sebesar 1.08 persen. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.

Gambar III.3
Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2022

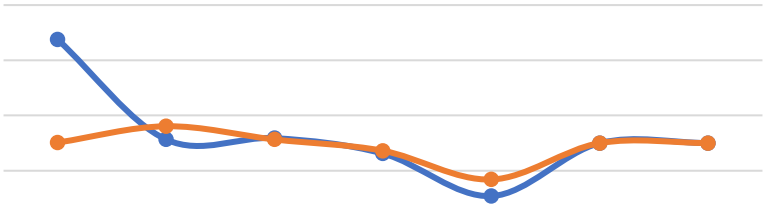

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prov Kep Babel	6,75	3,13	3,18	2,62	1,08	3	3
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	3	3

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016-2021)
**) Tahun 2021-2022 (Proyeksi Kementerian Keuangan)*

Jika memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2020, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1% dengan tekanan yang cenderung mengalami peningkatan dari 2020. Laju inflasi yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dinilai akan memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2021-2022.

3.1.1.7 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 697,339 juta dibanding pada tahun 2019 sebesar Rp 1.330,93, sama halnya dengan investasi PMA, investasi PMDN pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.863,75 Juta dibanding pada tahun 2019 sebesar Rp 2.915,15 juta.

Pada Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.9.

Tabel III.7
Perkembangan Realisasi Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2019 (dicari data infestasi 2020)

Investasi		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e	2022 e
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
PMA	Jumlah Proyek	76	93	141	105	183	332	306	350
	Nilai (Rp juta)	1.033,29	726,66	2.046,28	620,12	1.330,93	697,34	946,46	909,51
PMDN	Jumlah Proyek	28	63	94	161	418	988	885	1055
	Nilai (Rp juta)	1.023,74	2.201,96	1.734,73	3.112,92	2.915,15	1.863,75	2.913,82	3.134,33
Total Investasi		**2.057,03**	**2.928,62**	**3.781,01**	**3.733,04**	**4.246,08**	**2.561,09**	**3.860,28**	**4.043,85**

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)
e) 2021-2022 Data Estimasi

Investasi yang diperkirakan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun kedepan harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

3.1.1.8 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Pada Tahun 2020 ekspor timah mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2019 nilai ekspor timah sebesar US$ 1.108,2 juta dan turun menjadi sebesar US$ 982,8 juta. Selanjutnya, ekspor barang-barang non timah bergerak fluktuatif. Semula pada tahun 2017 ekspor sebesar US$ 393,2 juta, meningkat di tahun 2018 menjadi US$ 413,8 juta, kemudian terus mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar US$ 265,8 juta menjadi US$ 206,1 juta di tahun 2020.

Diperkirakan dalam kurun waktu dua tahun kedepan (2021-2022), espor timah akan terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, sebesar US$ 1.343,0 juta di tahun 2021 dan US$ 1.379,5 juta di tahun 2022. Sedangkan pada komoditi non timah juga mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar US$ 263,5 juta, akan tetapi di tahun 2022 diperkirakan akan terjadi penurunan menjadi sebesar US$ 242,8 juta. Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 s.d. 2019 dan proyeksi ekspor pada Tahun 2020 dan 2021, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel III.8
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017- 2020 (dalam juta US$)

Kelompok Komoditi	Nilai Value (US$)					
	2017	2018	2019	2020	2021 [e]	2022 [e]
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Timah	1.390,9	1.361,2	1.108,2	982,8	1.343,0	1.379,5
Non Timah	393,2	413,8	265,8	206,1	263,5	242,8
Total Ekspor	***1.784,1***	***1.775,0***	***1.374,0***	***1.188,9***	***1.606,5***	***1.622,3***

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2020)
[e]) Tahun 2021-2022 (Proyeksi)

Sebaliknya, untuk impor Provinsi Kepulauan Bangka sepanjang tahun 2017-2020 cenderung mengalami penurunan untuk komoditas migas, yaitu semula sebesar US$ 56,0 juta pada tahun 2017 terus mengalami penurunan sampai dengan US$ 3,08 juta pada tahun 2020.

Sedangkan impor untuk komoditas non migas bergerak fluktuatif, semula pada tahun 2017 sebesar US$ 18,4 juta meningkat darastis di tahun 2018 sebesar US$ 128,6 juta. Kemudian terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019 menjadi sebesar sebesar US$ 11,18 juta, kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar US$ 11,54 juta. Secara rinci perkembangan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 dan proyeksi tahun 2020-2021 dapat dilihat pada gambar III.11 di bawah ini.

Tabel III.9
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017- 2019 (dalam juta US$)

Kelompok Komoditi	Nilai Value (US$)					
	2017	2018	2019	2020	2021 e	2022 e
Migas	56,0	16,7	4,86	3,08	13.01	15,13
Non Migas	18,4	128,06	11,18	11,54	20,03	23,10
Total Impor	**74,4**	**144,76**	**16,04**	**14,61**	**33.,04**	**38,23**

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2020)
e) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)

3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

3.1.2.1 Pengangguran

Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 5,25 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu semula berada di angka 3,62 .Hal ini dapat diartikan pada tahun 2020, dari 100 angkatan kerja terdapat 5 sampai dengan 6 orang sebagai pengangguran yaitu mereka yang tidak bekerja atau tidak mempunyai usaha yang aktif mencari kerja atau mempersiapkan usaha.

Angka pengangguran diperkirakan pada tahun 2021-2022 akan mengalami penurunan seiring dengan perkiraan akan membaiknya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan penyerapan angkatan kerja. Memperhatikan kondisi tersebut dan kebijakan pasca pandemi Covid-19 maka tahun 2021-2022 diproyeksikan TPT sebesar 5.05 persen.

Tabel III.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019 (dalam persen)

Kegiatan Utama	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e	2022 e
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,60	3,78	3,61	3,58	5,25	5,05	5,05

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016-2020)
e) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)

3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini,

dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2020. Semula tahun 2019 sebesar 4,53 persen meningkat menjadi 4.83 persen. Kondisi ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi yang mengalami kontraksi.

Gambar III.4
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2022

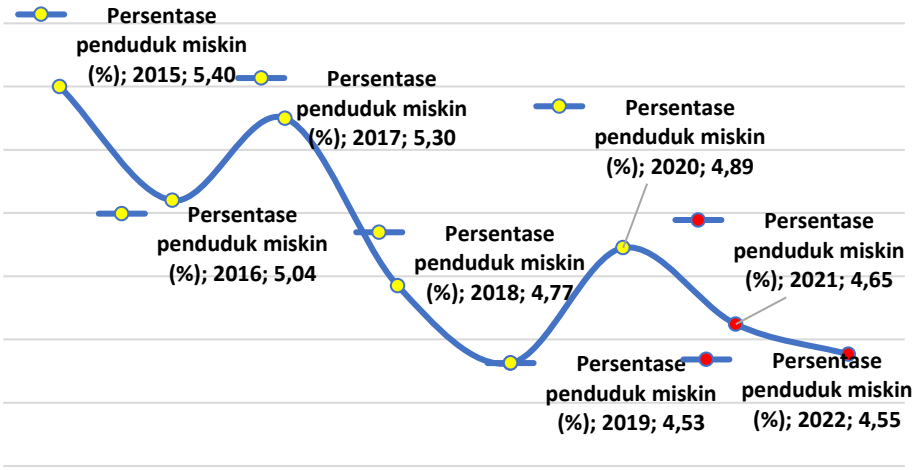

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2015-2019)
e) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang diperkirakan akan tumbuh positif, dinilai akan memberikan dampak terhadap penurunan penduduk miskin tahun 2021-2022 yaitu sebesar 4,65 persen dan 4,55 persen. Hal ini didukung dengan upaya penguatan sektor-sektor ekonomi melalui program-program pemerintah pasca pandemi dalam penanggulangan masalah kemiskinan dengan memfokuskan pada daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson, dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah 0 < IW < 1

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2001-2019 yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 angka indeks sebesar 0,192 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,2000. Hal ini mengindikasikan bahwa angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, menunjukan bahwa pembangunan wilayah semakin mendekati merata atau dengan kata lain menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya berdasarkan proyeksi yang dilakukan diketahui bahwa ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang dua tahun ke depan kecenderungan menurun. Diperkirakan pada tahun 2021 angka indeks sebesar 0,183 dan tahun 2022 sebesar 0,180 yang diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagimana tersaji pada Gambar III.7 berikut,

Gambar III.5

Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2022

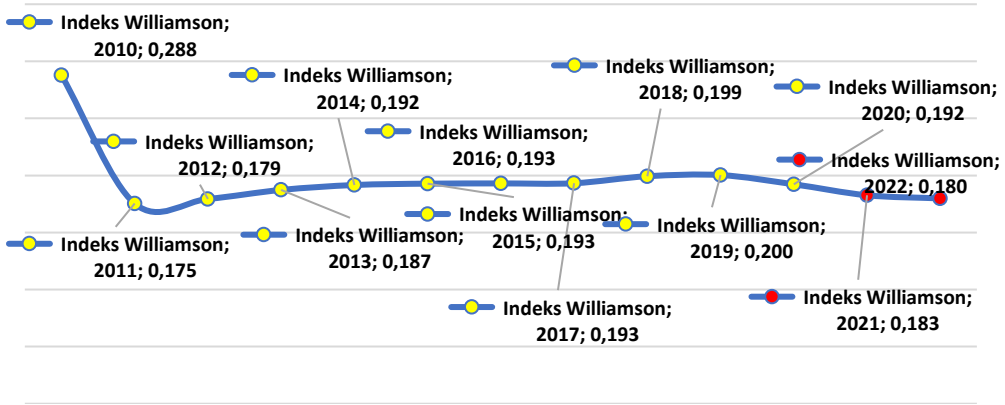

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2017-2020)
e) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)

3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini/Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Apabila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Tabel III.11

Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2021

Tahun	Gini Ratio
(1)	*(2)*
2015	0,275
2016	0,288

Tahun	Gini Ratio
(1)	*(2)*
2017	0,276
2018	0,272
2019	0,262
2020	0,257
2021 [e]	0,254
2022 [e]	0,248

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010-2020)

[e]) Tahun 2020-2021 (Proyeksi)

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,257, angka tersebut merupakan yang paling rendah sepanjang sepuluh tahun terakhir. Artinya angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah, bahkan terendah pada kawasan Sumatera. Selanjutnya, Gini Ratio untuk tahun 2021 dan 2022 diperkirakan akan cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2021 dan 2022

Pemulihan perekonomian global yang mulai terlihat pada triwulan IV 2020 diprakirakan berlanjut dan semakin baik pada 2021 dan 2022. Prakiraan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara untuk membangun *herd immunity* dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh Amerika Serikat (AS), sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi Tiongkok dan India.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diprakirakan mencapai 5,1 persen, sedikit meningkat dibandingkan prakiraan awal sebesar 5,0 persen. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global diprakirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian dunia. Kondisi likuiditas global juga tetap besar dan suku bunga tetap rendah, sejalan dengan stimulus kebijakan moneter yang masih berlanjut. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional diprakirakan akan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional ke depan. Pada triwulan IV 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,19% (yoy), terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 terkontraksi -2,07%. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada triwulan IV-2020 membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya -3,49% (yoy). Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan

ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh Pemerintah. Perbaikan kinerja ekspor terus berlanjut pada beberapa komoditas, seperti *Crude Palm Oil* (CPO), batu bara, dan besi baja yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral.

Untuk keseluruhan tahun 2021, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,3%-5,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kisaran 4,8%-5,8% sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2020. Perbaikan ekonomi nasional didukung oleh sinergi kebijakan ekonomi nasional, yang mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan kembali pulih pada tahun 2021 dan 2022, sejalan dengan implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara termasuk Indonesia, dinilai akan menimbulkan perbaikan terhadap kinerja sektor unggulan Babel, yakni industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap, serta pariwisata. Pada tahun 2021 dan 2022 pasca pemulihan Covid-19, perekonomian Bangka Belitung diperkirakan mampu tumbuh sebesar 2,92 persen dan 3,22 persen.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh positif pada triwulan I 2021 didukung oleh terjaganya keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian meskipun dibayangi akibat mewabahnya virus Covid-19. Hal ini pun terjadi pada anggaran pendapatan maupun belanja dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2021, sehingga akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah di Bangka Belitung. Selain itu, stimulus fiskal dari pemerintah pusat juga diharapkan dapat lebih mendorong konsumsi masyarakat Bangka Belitung.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022, yaitu:

1. pemulihan perekonomian global akibat pandemi Covid-19;
2. harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. inflasi Bangka Belitung pada Tahun 2022 diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1 persen dengan tekanan yang cenderung menurun dari 2021;
4. menurunnya tekanan inflasi disebabkan oleh melemahnya permintaan sebagai dampak adanya wabah Covid-19, tercukupinya pasokan barang termasuk pangan, dan tetap lancarnya jalur distribusi;
5. pada tahun 2022, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dari tahun 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di tahun 2021;
6. dalam menghadapi tantangan dalam 2022, telah dilakukan sinergi yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS yang lebih menekankan kepada kesehatan, jaring pengaman sosial, stimulus pajak dan KUR serta program pemulihan ekonomi nasional.

3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Mulai pulihnya perekonomian di tahun 2021 secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 antara lain adalah:

1. peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Hal ini disebabkan kedua sektor ini pada tahun 2021 mengalami peningkatan dan cukup stabil. Untuk itu, diharapkan pada tahun 2022 kedua sektor ini dapat terus tumbuh stabil untuk mengatasi pemulihan ekonomi akibat Covid-19;
2. peningkatan investasi daerah yang terkontraksi pada tahun 2021 dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar meningkatkan jumlah investor baik dalam dan luar negeri.
3. Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat;
4. liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah pada tahun 2020 terdepresiasi pada angka -2,30 persen, pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami perlambatan dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 3,32 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada sisi harga dan ekspor komoditas.

Selain itu, penurunan pada laju pertumbuhan ini diikuti oleh hampir seluruh sektor pengeluaran PDRB ADHK. Untuk itu, pada tahun 2021, sektor konsumsi dan ekspor yang dinilai memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), diharapkan dapat tumbuh stabil dan meningkatkan roda perekonomian Bangka Belitung secara signifikan. Hal ini untuk mengatasi penurunan dan mendukung tema pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2018-2020, kebijakan ekonomi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 akan difokuskan pada tujuan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran:
    a. meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
    b. meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
    c. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
    d. meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan energi;
    e. meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran:
    a. menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka;
    b. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan;
    c. menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator angka kemiskinan;
    d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator pendapatan perkapita masyarakat desa.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. realokasi dan *refocusing* penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga memiliki fasilitas yang memenuhi standar penanggulangan Covid-19;
2. optimalisasi Belanja Fiskal di daerah melalui *Front Loading* realisasi belanja fiskal di daerah supaya memberikan dampak yang lebih cepat bagi masyarakat, realisasi proyek pemerintah bersifat padat karya, efisiensi/realokasi penggunaan anggaran terhadap kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat seperti bantuan langsung tunai bagi keluarga yang kehilangan pendapatan;

3. stimulus sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan cara memberikan pelonggaran pembayaran pajak kepada UMKM, berkoordinasi dengan BMPD dan OJK terkait relaksasi pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit umum, mendorong UMKM *go digital* untuk memanfaatkan layanan penjualan *online* maupun sistem pembayaran non tunai;
4. optimalisasi akses kredit bagi pelaku usaha melalui peningkatan akses UMKM antara lain KUR ke sektor produktif bagi petani, peternak, nelayan melalui *business matching*.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan *refocusing* pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat

dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia dan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga pada tahun 2022 masih difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural." Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tema dan prioritas nasional ini mendukung percepatan ekonomi nasional dan daerah yang terdampak oleh virus corona pada tahun 2020.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;

b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Untuk transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;

c) lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Hal ini menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pendapatan transfer yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen dana bagi hasil pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah pada Tabel III.14 berikut ini:

Tabel III.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019 s.d. Tahun 2022

No	Uraian	REALISASI		PROYEKSI	
		Realisasi tahun 2019 (N-2)	Realisasi tahun 2020 (N-1)	Proyeksi/Target 2021 (N)-APBD	Proyeksi Target 2022 (N+1)-RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**826.810.199.101,62**	**685.755.816.112,02**	**749.455.044.038,00**	**813.834.247.213**
1.1.1	Pajak Daerah	750.814.242.494,42	613.615.822.525,72	634.727.812.959,00	698.200.594.255
1.1.2	Retribusi Daerah	8.726.344.417,00	6.533.805.118,00	20.094.191.546,00	21.000.613.425
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.442.309.381,71	5.471.185.541,79	5.500.000.000,00	5.500.000.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.827.302.808,49	60.135.002.926,51	89.133.039.533,00	89.133.039.533
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.743.152.363.799,00**	**1.601.320.733.258,00**	**1.724.311.215.000,00**	**1.135.587.523.000,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.743.152.363.799,00	1.601.320.733.258,00	1.724.311.215.000,00	1.135.587.523.000,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**125.071.000.474,00**	**117.859.835.678,00**	**94.500.000.000,00**	**-**
1.3.1	Hibah	99.585.198.474,00	64.193.790.678,00	94.500.000.000,00	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus	25.485.802.000,00	53.666.045.000,00	-	-
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.695.033.563.374,62**	**2.404.936.385.048,02**	**2.568.266.259.038,00**	**1.949.421.770.212,90**

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini:

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2022 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;

2. meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:
    a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
    b. pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    c. pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    d. melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, gerai samsat dan samsat *online/mobile*, layanan SMS, dan pengembangan samsat *outlet*;
    e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
    f. penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
    g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
    h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
    i. melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
    j. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:
    a. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

b. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

d. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan) dan program/ kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut belanja tidak langsung dan belanja langsung (berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah) dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

1.) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

3.) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4.) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5.) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

6.) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1.) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3.) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4.) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6.) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

1.) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

2.) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.15.

Tabel III.13

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 s.d. Tahun 2022

No	Uraian	REALISASI		PROYEKSI	
		Realisasi Tahun 2019 (N-2)	Realisasi Tahun 2020 (N-1)	Proyeksi/Target 2021 (N)-APBD	Proyeksi Target 2022 (N+1)-RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.1	**Belanja Operasi**	**1.831.667.022.444,45**	**1.729.633.227.168,32**	**2.060.350.605.594,00**	**1.441.532.657.901,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	834.647.896.587,01	942.098.582.491,00	870.356.489.672,00	854.274.650.074,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	700.956.706.797,44	467.681.174.677,32	795.483.568.015,00	514.698.080.327,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi		-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	295.620.904.060,00	319.266.470.000,00	392.833.845.987,00	71.009.927.500,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	441.515.000,00	587.000.000,00	1.676.701.920,00	1.550.000.000,00
2.2	**Belanja Modal**	**441.331.002.840,86**	**421.306.363.317,47**	**641.639.965.233,00**	218.236.006.954,00
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**-**	**14.257.680.075,00**	**32.065.928.776,00**	10.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	14.257.680.075,00	32.065.928.776,00	10.000.000.000,00
2.4	**Belanja Transfer**	**512.053.731.098,27**	**371.541.838.479,21**	**374.570.668.246,00**	**440.106.969.200,30**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	423.625.933.450,93	330.883.067.997,21	335.400.268.246,00	392.141.169.200.30
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	88.427.797.647,34	40.658.770.482,00	39.170.400.000,00	47.965.800.000,00
	Jumlah Belanja Daerah	**2.785.051.756.383,58**	**2.536.739.109.040,00**	**3.108.627.167.849,00**	**2.091.542.268.333,90**
	Defisit murni / (surplus)	**(90.018.193.008,96)**	**(131.802.723.991,98)**	**(540.360.908.811,00)**	**(142.120.498.121,00)**

Kebijakan belanja daerah tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.

1. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2022 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan "negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan "dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".
4. mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: "besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
    a. pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);
    b. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
    c. pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
    d. program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
6. meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2017-2022, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.16, diarahkan pada:

1. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. meningkatkan pembentukan tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2022.

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Untuk besaran pembayaran pokok utang yang dibayarkan sebesar Rp81.739.252.592,00. Uraian pembiayaan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran dapat dilihat pada Tabel. III.16.

Tabel III.14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019 s.d. Tahun 2022

No	Uraian	REALISASI		PROYEKSI	
		Realisasi tahun 2019 (N-2)	Realisasi tahun 2020 (N-1)	Proyeksi/Target 2021 (N)-APBD	Proyeksi Target 2022 (N+1)-RKPD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**302.308.282.366,62**	**220.399.957.480,11**	**540.360.908.811,00**	**223.859.751.713,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	302.308.282.366,62	220.399.957.480,11	295.064.908.811,00	223.859.751.713,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	245.296.000.000,00	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**81.739.253.592,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	81.739.253.592,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	**302.308.282.366,62**	**220.399.957.480,11**	**540.360.908.811,00**	**142.120.498.121,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**212.290.089.357,66**	**88.597.233.488,13**	**00**	0,0

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 menjadi bagian perencanaan yang krusial dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 sekaligus tahun terakhir dari penjabaran Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan Daerah Tahun 2022 difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 yang menekankan pada realisasi capaian target pembangunan selama periode 5 tahun RPJMD. Namun, selama kurun waktu periode RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdapat berbagai perubahan baik dalam hal kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, beberapa dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tema perencanaan pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** yang dituangkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Agenda Pembangunan Nasional tersebut telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Gambar IV.1
7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

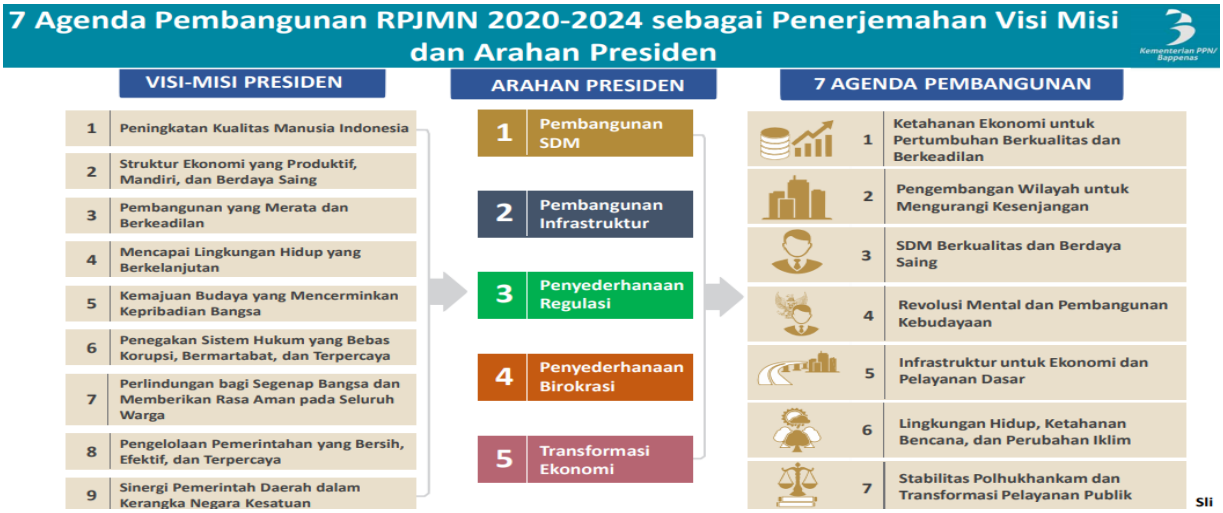

Sumber : RPJMN 2020-2024, 2022

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun terakhir penyusunan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Tahap III (Ketiga) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahap ke III ini adalah **"Meningkatnya Ekonomi Daerah Dan Terpenuhinya Kapasitas Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)".** Fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk unggulan provinsi. Sementara itu, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Posisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 dari target pembangunan tahun terakhir pada Tahap ke III Periode RPJDP 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar IV.1

Gambar IV.2
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2022 Terhadap RPJPD dan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022

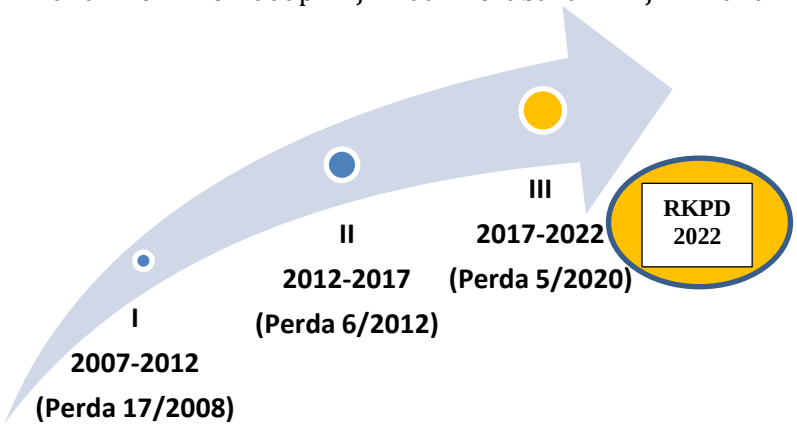

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 merupakan bentuk penyelarasan perencanaan pembangunan daerah terhadap berbagai perubahan kebijakan dan regulasi nasional (RPJMN Tahun 2020-2024), efisiensi pelaksanaan pembangunan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2012-2017). Perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 10 tujuan dengan 10 indikator kinerja, dan 27 sasaran baru dengan 27 indikator kinerja guna mencapai Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yaitu**: "Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"**, yang dituangkan kedalam 6 (enam) Misi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun terakhir penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Periode 2017-2022 yang berfokus pada pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar IV.3
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2022 Terhadap RPJMD Tahun 2017-2022

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)

D. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RTRWP) Tahun 2014-2034 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan Berbasis

Agro-Bahari Untuk Menunjang Pariwisata Serta Pengendalian Wilayah Pertambangan Untuk Menjamin Pembangunan Yang Berkelanjutan".

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan Daerah Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka: (1) Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu; (2) Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari; (3) Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang di dukung infrastruktur yang memadai; Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, *heritage* dan bahari serta ramah lingkungan; (4) Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan; dan (6) Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan.

E. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 ditetapkan pada tanggal 27 April 2020 dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020. RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perencanaan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menjadi lebih terintegrasi dan terarah guna mencapai pelaksanaan tujuan pembangunan daerah yang adil dan merata. RZWP3K selanjutnya menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kebijakan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi: (a) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (b) menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (c) mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan. Di dalam RZWP3K, diatur penggunaan rencana alokasi ruang laut, yang meliputi: (1) Kawasan Pemanfaatan Umum; (2) Kawasan Konservasi; (3) Alur Laut; dan (4) Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 mengacu pada RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 sebagai pedoman dalam perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

F. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun III (ketiga) dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan RKP Tahun 2022, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan sepuluh fokus pembangunan, yakni Industri, Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Kesehatan, Reformasi Perlindungan Sosial, serta Reformasi Pendidikan dan Pelatihan.

Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Disamping itu Tahun 2022 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari *Middle Income Trap*. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045 dengan mengusung 6 (enam) strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi Pertama: SDM berdaya saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi. Strategi Kedua: Produktivitas sektor ekonomi mencakup industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian. Strategi Ketiga: Ekonomi hijau meliputi ekonomi rendah karbon, *blue economy*, dan Transisi energi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat, membuka kesempatan kerja hijau yang lebih berkelanjutan, dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Strategi Keempat: Transformasi Digital terdiri atas, infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler. Strategi Kelima: integrasi ekonomi domestik meliputi economic powerhouse dengan fokus pada infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara, serta domestic value chain. Strategi Keenam: Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang ekonomi antar wilayah.

G. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022. Dinamika pembangunan dan perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka selama pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 baik di tingkat nasional maupun regional yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Tema RKPD Tahun 2022. Beberapa isu dan permasalahan tersebut antara lain:

Gambar IV.4
Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Justifikasi Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

1. Percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan dan UMKM
    a. Pertumbuhan Ekonomi terkontraksi (tumbuh negatif) akibat dari Covid-19, dimana pada TW 2 2020 (- 4,98) sedangkan pada TW 3 2020 (– 4,38).
    b. Produksi dan nilai tambah komoditias unggulan belum optimal, terlihat dari masih tergantungnya pada ekspor timah sebesar 80 % dari total ekspor.
    c. Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri menurun tajam akibat pandemic Covid-19.
    d. Sektor transportasi dan perdagangan yang terkontraksi sangat besar seiring dengan kebijakan pembatasan penerbangan dan *personal distancing* karena pandemic Covid-19
    e. Memaksimalkan peran UMKM melalui skema online untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
    a. Tingkat Pengangguran yang cenderung meningkat dimana tahun 2020 sebesar 5,25 % meningkat dari tahun 2019 sebesar 3,58
    b. Angka kemiskinan yang meningkat pada tahun 2020 sebesar 4,53 akibat menurunnya pendapatan masyarakat
3. Peningkatan Sumberdaya manusia yang berkualitas
    a. Tingkat pendidikan SDM masih rendah, terlihat dari 60 % pendidikan tenaga kerja babel lulusan SMP ke bawah
    b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih rendah, dimana tahun 2019 RLS sebesar 8,32 Tahun dan merupakan terendah se-Sumatera
    c. IPM masih di bawah rata-rata Nasional, dimana IPM Prov. Babel tahun 2019 sebesar 71,30 sedangkan capaian Nasional sebesar 71,92
    d. Kompetensi ASN yang masih rendah, yang ditandai dengan indeks profesionalitas ASN tahun 2020 sebesar 71,27 dan Nilai penerapan system merit dalam manajeman ASN tahun 2020 provinsi kep. Babel sebesar 196,5 dengan kategori kurang
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
    a. Jumlah korban terpapar akibat pandemi Covid – 19 yang cenderung meningkat
    b. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi pada tahun 2018 sebesar 167,24/100.000 KH
    c. Angka Stunting yang masih tinggi, walaupun dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki tren menurun
5. Peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan bencana
    a. Kualitas Lingkungan Hidup yang masih Rendah ini terlihat dari lahan kritis di babel yang cukup luas yaitu 216.108 Ha atau 12,98 %

b. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Masih rendah, terlihat dari indeks kapasitas bencana daerah tahun 2019 sebesar 0,39 jauh dari target provinsi sebesar 0,63

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terutama untuk menyelaraskan dan menyesuaikan Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2022 dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam Perubahan RPJMD 2017-2022, serta berdasarkan pertimbangan kondisi umum daerah yang terdampak Pandemi Covid-19, maka ditetapkan **Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022** adalah **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul",** dengan makna yang tertuang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

(1) **Percepatan** dimaknai dengan mengoptimalkan instrumen pembangunan secara efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat guna dan tepat sasaran;

(2) **Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan** dimaknai dengan memfokuskan strategi transformasi ekonomi regional melalui serangkaian kegiatan yang untuk memperbaiki kondisi perekonomian akibat Pandemi Covid-19; serta meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Tenaga Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, serta Pelayanan Kesehatan guna memaksimalkan upaya pemulihan kesehatan masyarakat.

(3.) **Sumber Daya Manusia yang Unggul** dimaknai dengan menghasilkan sumber daya manasia yang mandiri dan kompetitif, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan tenaga kerja serta terpenuhinya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing sesuai kebutuhan organisasi, berinovatif, bertanggung jawab dan selalu berorientasi pada tujuan organisasi.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah Tahun 2022 berdasarkan Visi, dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pengembangan potensi sektor pertanian, pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan serta pengembangan sektor pariwisata. Fokus pembangunan selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas dan layanan kesehatan untuk mengatasi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum reda baik di tingkat global, nasional maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu RKPD 2022 difokuskan untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mendukung daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan **"Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul".** Untuk itu, dilakukan penyelarasan terhadap Visi-Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022. Hubungan antara visi dan misi dan tujuan-sasaran pembangunan 2017-2022 disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.

Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	*2*	*3*	*4*
Visi **"Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"**			
Pertumbuhan Ekonomi		**Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah**	
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
		2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
		3 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1 Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
		4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
		5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
2 Meningkatnya pemerataan pendapatan	1 Indeks Gini	6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka
		7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
		8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan
		9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
Infrastruktur Dan Konektivitas		**Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas**	
3 Meningkatnya ketersedian infrastruktur	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		11 Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Dasar	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar
		12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
Pendidikan Dan Sosial Masyarakat		**Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal**	

TUJUAN BARU		INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU		SASARAN BARU		INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU	
1		*2*		*3*		*4*	
4	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1	Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan	13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
				14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1	Persentase sekolah dengan akreditasi A
5	Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat	1	Indeks Pem bangunan Sosial	15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
				16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk
				17	Meningkatkan Pem bangunan Resposif Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
				18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda
				19	Meningkatkan Pembangunan Olah raga	1	Indeks Pembangunan Olah Raga
				20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PMKS Sejahtera
Kesehatan Masyarakat				**Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat**			
6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	21	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kesehatan Masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				**Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dan Pembangunan Demokrasi**			
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	22	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi
Berdemokrasi				**Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dan Pembangunan Demokrasi**			
8	Meningkatnya Demokrasi	1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	23	Meningkatkan Kebebasan Sipil	1	Nilai Kebebasan Sipil
				24	Meningkatkan Hak-Hak Politik	1	Nilai Hak-Hak Politik
				25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1	Nilai Lembaga Demokrasi
Bencana				**Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan**			
9	Menurunnya Resiko Bencana	1	Indeks Resiko Bencana	26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1	Indeks Kapasitas Bencana Daerah

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	*2*	*3*	*4*
Lingkungan Hidup		**Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan**	
10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Berdasarkan Tabel IV.1, untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 dilaksanakan melalui 6 (enam) misi yang diharapkan dapat mencapai 10 (sepuluh) tujuan yang ditandai dengan 27 (dua puluh tujuh) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022

INDIKATOR MAKRO	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		
	RKP	RKPD	RKP	RPJMD Provinsi Babel	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,5%	3,25	5,4-6,0	3,22	3,22
Kemiskinan	9,2 - 9,7%	5,50	8,5-9,0	5,00	4,55-4,99
Pengangguran	7,5 - 8,2%	5,50	6,24-5,52	5,00	4,05-4,55
Gini Ratio	0,377 - 0,379	0,254	0,376-0,378	0,255	0,248
IPM	72,78 - 72,90	71,35	73,44-73,48	71,45	71,70

Sumber: RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Permendagri 17/2021-Pedoman Penyusunan RKPD 2022

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, terdapat 10 tujuan dan indikator kinerja tujuan tahun 2022 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.3 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		TARGET TAHUN 2022	KONDISI AKHIR RPJMD 2017-2022
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,22	4,00
2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	1	Indeks Gini	0,248	0,255
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	1	Indeks Ketersediaan Infrastuktur	67%	70%
4	Meningkatnya pendidikan masyarakat	1	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan	8.30	8.30
				L= 8,40	L= 8,40
				P = 8.20	P = 8.20
5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	1	Indeks Pembangunan Sosial	44,36	44,36
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	70,36	70,48
				L = 68,50	L = 68,60
				P = 72,30	P = 72,45
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,43	69,50
8	Meningkatnya Demokrasi Indonesia	1	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	76	76
9	Menurunya Risiko Bencana	1	Indeks Risiko Bencana	147	147
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,99	75,99

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2022 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No.	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	TARGET TAHUN 2022
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	5,98
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	5,59
3	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	2,25
4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	1,76

No.	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	TARGET TAHUN 2022
1	*2*	*3*	*4*
5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	2,75
6	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05-4,55
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,80
8	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,55-4,99
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.479.389
10	Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	100
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	54
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	71,84
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	13 L= 13 P=13
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah dengan akreditasi A	60
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,5
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,08
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,50
19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,45
20	Meningkatkan Kesejahteran Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	67
21	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	86,22
22	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,50
23	Meningkatkan Kebebasan Sipil Masyarakat	Nilai Kebebasan Sipil	87,82
24	Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Nilai Hak-Hak Politik	81,85
25	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi Masyarakat	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,54
26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Terhadap Bencana Daerah	0,41
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,99

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan

dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan dalam RPJMD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapain sasaran. Disamping itu beberapa langkah yang dilakukan dalam penentuan strategi dan arah kebijakan tahun 2022 antara lain :

1. Mengevaluasi dan menganalisis capaian Tujuan dan Sasaran pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1.
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya atau N-1 serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan arah kebijakan dan saran pembangunan nasional.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakandari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2022 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian	Peningkatan sarana prasa rana produksi pertanian, perkebunan,dan perterna kan
				2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Pro-duksi Pertanian	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
				3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan
				4	Pengembangan Kawas an Agropolitan dan Tekno-park Lada Air Gegas	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Tekno-park Lada Air Gegas
				5	Peningkatan ketersedia an pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan	Peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Meningkatan pengen-dalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatan pengendali-an dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				2	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi daya	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
				3	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Pro-duksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
				4	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan sarana pra-sarana produksi per-ikanan tangkap dan perikanan budidaya
				5	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pening-katan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan Promosi, koor-dinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3	Meningkatkan Laju Pertumbuhan kunjungan wisatawan	1	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengem-bangan ekonomi kreatif
				2	Peningkatan insfrastruk-tur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Peningkatan insfra-struktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
				3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata
				4	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	Peningkatan peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
				5	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Tanjung Gunung
				6	Pengembangan hinter-land dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka	Pengembangan hinter-land dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka
				7	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	Pengembangan hinter-land dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang
				8	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Pulau Punai
				9	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
					Pulau Sumatera	
				10	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	1	Meningkatkan produk-si dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
				2	Peningkatan ketersedia-an energi listrik masyarakat	Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat
5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
				2	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
				3	Peningkatan tata kelola industri	Peningkatan tata kelola industri
				4	Peningkatan tata kelola perdagangan	Peningkatan tata kelola perdagangan
6	Menurunkan Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja
				2	Peningkatkan peran KUKM dalam mening-katkan kesempatan kerja	Peningkatkan peran KUKM dalam mening-katkan kesempatan kerja
				3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pening-katan lapangan pekerjaan	Peningkatan Promosi, koor-dinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
7	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	1	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
8	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1	Persentase Angka Kemiskinan	1	Mengurangi beban penge luaran masyarakat miskin	Mengurangi beban penge luaran masyarakat miskin
				2	Peningkatkan pendapat an masyarakat miskin	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
9	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1	Peningkatan pendapatan masyarakat desa	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
10	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Peningkatan, pemelihara an dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infra-struktur Pekerjaan Umum
				2	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruk tur dengan tata ruang	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruk tur dengan tata ruang
				3	Peningkatan ketersedia an dan kapasitas SDM Konstruksi	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
11	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
12	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
13	Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1	Persentase Sekolah Terakreditasi A	1	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan
15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
				2	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
18	Meningkatkan Kualitas Pemuda	1	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Peningkatan insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	Peningkatan insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
19	Meningkatkan Pembangunan Olah raga	1	Indeks Pembangunan Olahraga	1	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
20	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	1	Angka Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
				2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat
				3	Penurunan Angka Stunting	Penurunan Angka Stunting
				4	Peningkatan pelaksanaan Germas	Peningkatan pelaksanaan Germas
21	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
				2	Meningkatkan Tata kelola pengawasan	Meningkatkan Tata kelola pengawasan
				3	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, pengang-garan dan pelaporan
				4	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				5	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
				6	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
				7	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa
				8	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
				9	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanaan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
				10	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN
22	Meningkatkan Kebebasan Sipil	1	Nilai Kebebasan Sipil	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
23	Meningkatkan Hak-Hak Politik	1	Nilai Hak-Hak Politik	1	Peningkatan pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanaan terhadap hak-hak politik masyarakat
				2	Peningkatan penye-lenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat, penegakan Perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Peningkatan penye-lenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
24	Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1	Nilai Kelembagaan Demokrasi	1	Peningkatan pengem-bangan lembaga-lembaga demokrasi	Peningkatan pengem-bangan lembaga-lembaga demokrasi
25	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
				2	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
				3	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur
27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas air sungai	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
				2	Peningkatan pengen-dalian terhadap kualitas udara	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
				3	Peningkatan pengen-dalian dan pengawasan hutan	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
				4	Peningkatan tata kelola kehutanan	Peningkatan tata kelola kehutanan
				5	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*		*4*		*5*
				6	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang ber-kelanjutan

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD 2017-2022 untuk tahun 2022.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan sasaran pembangunan nasional;
2. pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
3. pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2017-2022;

4. merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2022;

5. program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;

6. selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022 terdiri dari 2 kriteria yaitu:

1). prioritas Pembangunan Daerah I (Utama); berisi program-program unggulan yang yang berkorelasi dan sesuai tema pembangunan tahun 2022;

2). prioritas Pembangunan daerah II (Penunjang) berisi program-program unggulan yang tidak berkorelasi secara langsung dengan tema pembangunan, namun mendukung tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2022.

Dalam penentuan prioritas pembangunan I dan II, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Prioritas pembangunan daerah I (Utama) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, sebagai berikut :

Gambar IV.5
Prioritas Pembangunan Daerah I (Utama) Tahun 2022

1. PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan pada: 1). memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangkamengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai Provinsi Lada bisa dicapai kembali; 2). membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; 3). memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; 4). memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan pada : 1). memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Bangka Belitung, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; 2). mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan pada: 1). menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni-budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka Belitung, Karnaval Budaya Serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; 2). *rebranding* pantai-pantai di Bangka Belitung melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; 3). memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep *waterfront city.*

4. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan pada: 1). mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui bantuan promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (*Business Gathering*), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (*Training*); 2). memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; 3). melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; 4). pendirian dan optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir.

5. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, hingga lansia. Target sasaran yang telah dilaksanakan antara lain upaya peningkatan dan pemenuhan terhadap: percepatan penurunan *stunting* melalui status kesehatan dan gizi ibu dan anak; pengendalian penyakit; akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil/pedesaan/pulau-pulau; cakupan pelayanan kesehatan

universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta responsivitas sistem kesehatan.

6. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih difokuskan kepada pemerataan pendidikan melalui peningkatan akses, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, untuk meningkatkan cakupan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari pendidikan anak usia dini, penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, hingga memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Pemenuhan akses layanan pendidikan berkualitas ini juga diharapkan dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin (gender). Sementara itu, khusus pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah (vokasi) terhadap dunia kerja, terutama dalam upaya mendukung capaian prioritas unggulan daerah.

7. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Fokus kegiatan Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (*meritokrasi*) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui *fit and proper test* dengan lelang jabatan.

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah I (Utama) dengan Sasaran dan Strategi untuk tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (Utama) RKPD 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
1	PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
				2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian
2	PEMBANGUNAN BAHARI	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
				2	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
3	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA	1	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif
				2	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
4	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Peningkatan kesempatan kerja
				2	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja
				3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
		1	Indeks Pembangunan Ketenaga kerjaan	1	Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
		1	Persentase Angka Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masya-rakat miskin
				2	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
		1	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
5	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	1	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
		1	Persentase Sekolah Terakreditasi A	1	Peningkatan mutu layanan pendidikan
6	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN
7	PEMBANGUNAN KESEHATAN	1	Angka Kesehatan Masyarakat	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
				2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah I (Utama) dengan Strategi serta dukungan program Perangkat Daerah untuk tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.7
Strategi dan Program Prioritas
Yang Mendukung Prioritas Pembangunan I (Utama) RKPD 2022

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertani-an, Perkebunan dan Peternakan	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75%	Dinas Pertanian
					Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya keamanan 7 Kab/Kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	7 Kab/Kota	Dinas Pertanian
					Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 zoonosis	Dinas Pertanian

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tersertifikasinya 1 unit usaha produk peternakan diBangka Belitung (ber NKV/ Nomor Kontrol Veteriner) serta ter ujinya 210 sample produk pe ternakan pada unit-unit usaha/ kios-kios produk peternakan	1 NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dan 210 sample	Dinas Pertanian
			Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang dipenuhi	1 unit usaha	Dinas Pertanian
			2 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1 Laporan	Dinas Pertanian
				Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	1 Laporan	Dinas Pertanian
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dokumen Pengendalian dan Penamggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4 Dokumen	Dinas Pertanian
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	rasio luas areal pengendalian OPT terhadap luas pertanaman	3%	Dinas Pertanian
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	3500 HA	Dinas Pertanian
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	2.010 Ekor	Dinas Pertanian
			3 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80%	Dinas Pertanian
			Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani dan penyuluh yang dilatih	1000 orang	Dinas Pertanian
			Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah Event Rembuk Tani Nasional (PENAS)	1 Event	Dinas Pertanian

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	JUmlah peningkatan kapabilitas penyuluhan	204 Orang	Dinas Pertanian
2	PEMBANGUNAN BAHARI	1	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Per-ikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan	1.050.000 Ha	Dinas Kelautan & Perikanan
					Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Alokasi Pengelolaan Ruang Laut	7 Lokasi	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	1 Dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang terkelola	2 Kawasan	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Layanan Operasional Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	12 Bulan	Dinas Kelautan & Perikanan
					Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi dan SOP Yang Diterbitkan	10 Rekomen dasi	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil	10 Rekomen dasi	Dinas Kelautan & Perikanan
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Diberdayakan dan Dilakukan Pembinaan	13 Kelompok	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Dilakukan Pembinaan	3 Kelompok Masyarakat	Dinas Kelautan & Perikanan
				2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	1,85%	Dinas Kelautan & Perikanan
					Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	1254 unit	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat bantu Penangkapan, Rumpon/Rumah Ikan/Fish Apartemen, Mesin, dll)	Jumlah ALat Bantu Penangkapan/Navigasi yang diadakan	50 Unit	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/direhab	4 Unit	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (kapal dan API)	Kawat Bubu	850	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jaring kepiting	2000	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jaring udang	1.500	Dinas Kelautan & Perikanan
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan usaha Perikanan Tangkap	350 rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Gerai Perizinan (Kegiatan)	7 Kegiatan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	7 pelabuhan perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yng meningkat pengelolaannya	7 Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Rencana Induk Pelabuhan Perikanan	1 dokumen	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dibangun/rehabilitasi berupa Fasilitas Pokok, Fungsional dan Fasilitas Penunjang	4 Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang dilayani	7 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	4,20%	Dinas Kelautan & Perikanan
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang	5 rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2022				
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga kerja Asing	Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil		
			Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas daerah Kab/Kota	7 buku	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana budidaya yang diserahkan kepada masyarakat	2 paket	Dinas Kelautan & Perikanan
				Tersedianya benih ikan laut yang diserahkan ke masyarakat	4 paket	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah benih yang diserahkan ke masyarakat	13 paket	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Peralatan Budidaya	13 paket	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	11	Dinas Kelautan & Perikanan
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih yang di Adakan	11 Paket	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan	1 paket	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Hatchery yang direhab	1 unit	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan	1 unit	
				Jumlah Tenaga Teknis Pembenihan Ikan Air Laut	14 Orang	
			Sub Kegiatan Penyediaan sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Hatchery yang direhab		Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah Tambak Pembesaran yang dibangun		
				Jumlah Sarana Prasarana Balai yang diadakan		
				Persentase pembudidaya yang dibantu vaksinasi dan dibina tentang pengelolaan kesehatan lingkung-	10%	

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				an budidaya		
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut	Jumlah pembudi-daya yang dibina dalam penanganan kesehatan ling-kungan budidaya	100 pembudi daya	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembudi-daya yang dibantu Vaksinasi Perikanan	100 pembudi day	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah verifikasi kesehatan dan lingkungan budidaya yang telah memenuhi INDOGAP	10 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			4 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75%	Dinas Kelautan & Perikanan
			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perika-nan sampai dengan 12 mil yang diawasi	115 Pelaku Usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah pelaku usaha kelautan dan perika-nan sampai dengan 12 mil yang dibina	14 Pelaku Usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	10 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang diawasi	100 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
				Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang dibina	14 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan per ikanan di Wilayah Sungai, danau, Wa duk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusaha-kan Lintas Kab/Kota dalam 1 Daerah Provinsi yang diawas	50 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi yang diawas	50 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2022						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
				5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3,30%	Dinas Kelautan & Perikanan
					Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	25 rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/ Kota dalam 1 daerah Provinsi	25 rekomendasi	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Jumlah Produk Hasil Kelautan dan Perikanan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di informasikan atau dipromosikan	3 kegiatan	Dinas Kelautan & Perikanan
						2. Jumlah pasar hasil perikanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan pembinaan dan yang didata	7 Pasar Hasil Perikanan	
						4. Jumlah Promosi serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan yang dilakukan	5 kegiatan	
					Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	90%	Dinas Kelautan & Perikanan
					Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	1. Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan persyaratan/standar usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar	15 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
						2. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan SKP bagi usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah besar atau lintas daerah	5 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi		
						1. Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan persyaratan/standar usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah dan besar	15 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
					Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2. Jumlah rekomen-dasi yang dikeluar-kan untuk menda-patkan SKP bagi usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah besar atau lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi	5 pelaku usaha	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelaut-an dan perikanan	125 Unit Pengolahan Ikan	Dinas Kelautan & Perikanan
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Ke-amanan Hasil Perikanan dalam Rangka Meng-hasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah sampel di uji dlm rangka pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi thd mutu dan keamanan hasil perikanan	750 sampel	Dinas Kelautan & Perikanan
						Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Peman-tauan, Evaluasi dan Verifikasi dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan di pelaku usaha hasil perikan an	12 kegiatan	Dinas Kelautan & Perikanan
3	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Kelem-bagaan Pari-wisata Serta Pengembang-an Ekonomi Kreatif	1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%	Dinas Budpar
					Kegiatan Pengelolaan Ke budayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1	Jumlah budaya melayu dilestarikan	1 jenis	Dinas Budpar

NO	RKPD 2022				
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			(satu) Daerah Provinsi			
			Sub Kegiatan Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 jenis	Dinas Budpar
			Sub Kegaitan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina	-	Dinas Budpar
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah lembaga adat yang dibina	1 lembaga	Dinas Budpar
			2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%	Dinas Budpar
			Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dibina	5 kesenian	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Rampak gendang, marching band dan gita bahana yang dibina	104 orang	Dinas Budpar
				Jumlah SDM kesenian tradisional yang dilatih		Dinas Budpar
				Jumlah SDM kesenian tradisional yang dilatih	-	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian yang dibina	17 lembaga	Dinas Budpar
				Jumlah pengiriman misi kesenian	-	Dinas Budpar
			3 Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	35%	Dinas Budpar
			Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah lokal yang diberdayakan	3 sejarah	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan lembaga sejarah yang diberdayakan	50 orang	Dinas Budpar
					1 lembaga	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah pembentukan Provinsi Kep. Babel yang dapat diakses oleh masyarakat	-	Dinas Budpar

NO	RKPD 2022						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
			4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola	50%	Dinas Budpar
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan sebagai peringkat provinsi	15 cagar budaya	Dinas Budpar
				Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	5 cagar budaya	Dinas Budpar
				Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan sebagai peringkat provinsi	12 cagar budaya	Dinas Budpar
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum provinsi yang dikelola	100%	Dinas Budpar
				Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang dikelola	1 museum	Dinas Budpar
				Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum Wisma Ranggam	20 jenis	Dinas Budpar
			5	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	6,32%	Dinas Budpar
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah media promosi pariwisata	6 media, 8 Event, 2 Website, 1 Dokumen	Dinas Budpar
				Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melaui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata	1 Media	Dinas Budpar
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah fasilitasi promosi pariwisata bagi industri pariwisata provinsi	8 event	Dinas Budpar
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan promosi pariwisata	3 bahan promosi	Dinas Budpar
					Jumlah Pusat informasi Destinasi Pariwisata Bangka Belitung	2 TIC	Dinas Budpar
					Jumlah kajian pariwisata	1 dokumen	Dinas Budpar
					Jumlah data dan sebaran informasi pariwisata	2 Website	Dinas Budpar

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			6 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan tersertifikasi	29,54%	Dinas Budpar
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisa dan ekonomi kreati terlatih dan tersertifikasi	140 orang	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peserta yang telah mengikuti peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata	50 orang	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM bidang Homestay yang terlatih	40 orang	Dinas Budpar
				Jumlah SDM pemandu wisata yang terlatih	-	Dinas Budpar
				Jumlah SDM perhotelan yang terlatih	-	Dinas Budpar
				Jumlah SDM bidang spa yang terlatih	-	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang terlatih	50 orang	Dinas Budpar
			7 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	70%	Dinas Budpar
			Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik wisata provinsi yang di kelola	2 kawasan, 2 dokumen	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Peranca ngan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rencana dan rancangan daya tarik wisata unggulan	1 dokumen	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen pengembangan daya tarik wisata unggulan	1 dokumen	Dinas Budpar
				Jumlah DTW yang dikembangkan	-	Dinas Budpar
			Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang di Kelola	1 kawasan	Dinas Budpar
			Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan	Jumlah dokumen rencana kawasan	1 dokumen	Dinas Budpar

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Strategis Pariwisata Provinsi	strategis pariwisata provinsi yang ditetapkan		
					Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	1 destinasi	Dinas Budpar
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	Dinas Budpar
4	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1	Peningkatan kesempatan kerja	1.	Program Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1). Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	0,04	Disnaker
						2). Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	0,2	Disnaker
						3). Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas	15 Perusahaan	Disnaker
					Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	20 paket	Disnaker
						2. Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapakan Informasi Program	5 kerjasama	Disnaker
					Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	20 paket	Disnaker
					Sub Kegiatan : Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama dengan sektor swasta	5 Kerja sama	Disnaker
					Kegiatan :Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	15 Perusahaan	Disnaker

NO	RKPD 2022						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6	7
				Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Kompetensi SDM	15 Perusahaan	Disnaker
			2	Program 2: Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan	0,05	Disnaker
				Kegiatan 1: Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	100 orang	Disnaker
				Sub Kegiatan 1: Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja	30 org	Disnaker
				Sub Kegiatan 2 : Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencarikerja Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Binaan	70 org	Disnaker
				Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Laporan	7 kab/kota	Disnaker
				Sub Kegiatan 2 : Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah data pencari kerja secara online	2000 org	Disnaker
				Kegiatan 2 : Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan	7 kab/kota	Disnaker
				Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah RPTKA ,Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi	80 orang dan 7 Lokasi	Disnaker
			3	Program 3 : Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana Hubungan Industri	0,4131	Disnaker
				Kegiatan 1 : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanji an Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	55 Perusahaan	Disnaker
				Sub kegiatan 1 : Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan Yang Terkait dengan Hubungan Industri		Disnaker

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub kegiatan 2 : Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Pendaptaran PKB yang Terkait dengan Hubungan Industri		Disnaker
			Sub Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Pedataan dan Iformasi Sarana Hubungan Hindusrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	12 Perusahaan	Disnaker
			Kegiatan 2 : Pencegahan dan Penyelesaian Perseli sihan Hubungan Indus trial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdam pak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Permasalahan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	55 Perusahaan	Disnaker
			sub Kegiatan 1 : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	125 Kasus	Disnaker
			Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Terkait Permasalahan Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8 Laporan	Disnaker
			Kegiatan 3 : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK), dan Upah Mini mum Sektoral Kabu/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimun Provisni	1 Rekomen dasi	DISNAKER
			Sub Kegiatan 1 : Penetapan Upah Minimum Provinsi	Jumlah Rekaomendasi Penetapan Upah Minimun Provinsi	1 Rekomen dasi	DISNAKER
			4 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang dilakukan pengawasan ketenagakerjaan	0,61	DISNAKER

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	persentase pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,16	DISNAKER
					Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Pelaksana Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kepatuhan terhadap Norma Kerja di Perusahaan	0,19	DISNAKER
					Sub Kegiatan 2 : Penegakan Hukum Ketenagakerjaan diperusahaan	persentase penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang inkrah di pengadilan	0,8	DISNAKER
					Sub Kegiatan 3 : Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan kerja di perusahaan	Persentase Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di UMKM	0,85	DISNAKER
		2	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	1	Program Pengawas-an Dan Pemerik-saan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	70%	Dinas KUKM
					Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	50 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	20 Koperasi	Dinas KUKM
						Jumlah Koperasi yang dibubarkan	5 Koperasi	Dinas KUKM
					Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan	20 Koperasi	
					Meningkatkan Akun-tabilitas, kepercayaan, Kepatuhan Kesi-nambunga dan memberikan manfaat yang sebesar-besar-nya kepada anggota dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	40 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	60 Orang	Dinas KUKM
						Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern (SPI)	50 Orang	Dinas KUKM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Meningkatkan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan terbentukny Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang mematuhi Peraturan Perundang-undangan	50 Koperasi	Dinas KUKM
			2 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi berkualitas	50%	Dinas KUKM
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Sehat	5 Koperasi	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Mana-jemen, Efisiensi, Likui-ditas, Jati diri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 Koperasi	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi berprestasi	3 Koperasi	Dinas KUKM
				Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi Berpreastasi	2 Orang	Dinas KUKM
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus dan anggota Koperasi yang tersertifikasi pelatihan	1000 Peserta	Dinas KUKM
				Jumlah Pendam-ping/ Penyuluh/ Konsultan PLUT yang diberdayakan	70 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang ter-sedia	1 Dok	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	1000 Peserta	Dinas KUKM
				Jumlah pembina/ Pen-damping/ Pen-yuluh/ Konsultan PLUT yang mengi-kuti Bimbingan teknis peningkatan kapasitas	80 Orang	Dinas KUKM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang di-susun	1 Dok	Dinas KUKM
				Operasional Balatkop	1 Tahun	Dinas KUKM
			3 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	3%	
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus dan anggota Koperasi yang tersertifikasi pelatihan	150 Orang	
				Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang tersedia	1 Dokumen	
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Anggota Ko perasi yang dilatih	150 orang	
				Jumlah Kajian Mutu Pelatihan yang disusun	1 Dokumen	
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemaha man dan Pengetahu an Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	740 Orang	
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	20%	Dinas KUKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan	2%	Dinas KUKM
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk ekspor	3 Koperasi	Dinas KUKM
				Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalan	7 Koperasi	Dinas KUKM
				Jumlah tenaga penyuluh yang diberdayakan	30 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah koperasi yang mendapatkan akses pasar (Pameran Harkopnas)	5 Koperasi	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk ekspor	3 Koperasi	Dinas KUKM
				Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalan	7 Koperasi	Dinas KUKM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah tenaga penyuluh yang diberdayakan	30 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah koperasi yang mendapatkan akses pasar (Pameran Harkopnas)	5 Koperasi	Dinas KUKM
			4 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang diberdayakan	1%	Dinas KUKM
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Konsultan PLUT yang diberdayakan	7 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang bermitra	7 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang berdayakan	100 Orang	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Pendataan dan Kajian UMKM	1 Dokumen	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasiKemitraan	30 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah Konsultan PLUT yang diberdayakan	8 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah Peserta Forum Koordinasi UMKM	100 Orang	Dinas KUKM
			5 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	0,01	Dinas KUKM
			Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya	100 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	40 UMKM	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang meningkat kualitas produk dan terstandarisasi	200 UMKM	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	200 Orang	Dinas KUKM
			Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti DiseminasiStandarisasi dan Sertifikasi Produk	350 Orang	Dinas KUKM
				Jumlah UMKM yang	10 Orang	Dinas KUKM

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						mengikuti Promosi dan Pemasaran Produk		
						Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan Usaha	200 Orang	Dinas KUKM
		3	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor	80%	DMPTSP
					Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	1 UKM	DMPTSP
					Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan	8 UKM	DMPTSP
					Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Peta	DMPTSP
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM	1 Dokumen	DMPTSP
					Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi	1 Dokumen	DMPTSP
				2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor Yang Berinvestasi	65%	DMPTSP
					Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana	3 Pameran Promosi	DMPTSP
					Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Laporan	DMPTSP
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	JumlahPromosi Penanaman Modal Yang Terlaksana	3 Pameran Promosi	DMPTSP
				3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	100%	DMPTSP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	DMPTSP
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum	50 Peserta	DMPTSP
				Jumlah Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Rakor Forum	DMPTSP
			Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi	1200 Izin	DMPTSP
				Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Laporan	DMPTSP
				Jumlah Laporan Pengaduan Yang di Tindak Lanjuti	2 Laporan	DMPTSP
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Aplikasi	DMPTSP
			Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	1200 Izin	DMPTSP
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Laporan SKM	DMPTSP
				Jumlah Laporan Pengaduan Yang Di Tindak Lanjuti	12 Pengaduan	DMPTSP
			4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan	15%	DMPTSP

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
					Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Terpantau	75 perusahaan	DMPTSP
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Dipantau	75 perusahaan	DMPTSP
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop	507 Perusahaan dan Aparatur	DMPTSP
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kasus / Permasalahan Perusahaan Yang Terselesaikan	2 kasus / permasalahan	DMPTSP
				5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Valid dan Up to date	100%	DMPTSP
					Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	DMPTSP
					Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	DMPTSP
		4	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKSyang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50,00 %	Dinas Sosial
					Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan sosial	5 orang	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang di angkat (adopsi) dan memperoleh perlindungan sosial	5 orang	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan perizinan	5 orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
					Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	80.000 KK	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	660 Orang	Dinas Sosial
						Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	530 KK	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	7 kab/kota	Dinas Sosial
						Jumlah Fakir Miskin yang ditangani	220 KK	Dinas Sosial
						Jumlah Keluarga Miskin yang diberikan Pendampingan Jaminan Sosial	43749 KK	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang di Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	220 KK	Dinas Sosial
				5	Program Pengelolaan TMP	Prosentase TMP yang dikelola	100 %	Dinas Sosial
					Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMP yang dikelola	1 TMP	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsil	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dipelihara	1 TMP	Dinas Sosial
					Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah kebutuhan permakanan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	Dinas Sosial
		5	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan	0,97	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antardesa kewe nangan provinsi yang terlaksana	3 Kerjasama	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	1. Jumlah Peserta Rakor yang terlaksana	75 orang	Dinas Pemdes
						2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten	1 Laporan	Dinas Pemdes

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1. Jumlah Peserta Bimtek yang meningkat kapasitasnya	0	Dinas Pemdes
				2. Jumlah Produk Unggulan yang dikembangkan	0	Dinas Pemdes
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Bimtek yang mening kat Kapasitasnya	0	Dinas Pemdes
			2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.	1	Dinas Pemdes
				Persentase lembaga adat desa yang akti	0	Dinas Pemdes
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Da erah Provinsi serta Pem berdayaan Masyara kat Hukum Adat yang Masya rakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kab/Kota.	Jumlah lembaga kemasyarakatan	309 Desa	Dinas Pemdes
				lembaga adat yang terbina	0	Dinas Pemdes
			Fasilitasi penataan, Pem berdayaan dan Pendaya gunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah RT/RW yang mendapat pembinaan	0	Dinas Pemdes
				2. LAD yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pemdes
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah PKK Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina	7 Kab./Kota,	Dinas Pemdes
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Pos yandu, LPM, dan Ka rang Taruna) Lemba ga Adat Desa/ kelu rahan yang dibina	0	Dinas Pemdes
			Fasilitasi penyelenggara an ketentraman, keter tiban dan perlindungan masyarakat	Jumlah Trantibumlinmas Desa terbentuk dan terlatih	0	Dinas Pemdes
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyara kat dan Pemerintah desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa	1. Jumlah BUMDESA yang aktif	12 BUMDESA,	Dinas Pemdes
				2.Jumlah Produk unggulan Desa yang dikelola	20 Prudes	Dinas Pemdes

NO	RKPD 2022						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						3. Jumlah berkah mart yang difasilitasi dan didampingi pengembangannya	230 Berkah Mart	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan FasilitasiPemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes
						Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Perikanan	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes
				3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan	0,970873786	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antardesa kewenangan provinsi yang terlaksana	3 Kerjasama	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Kerja Sama antar desa Lintas Kabupaten/Kota	1. Jumlah Peserta Rakor yang terlaksana	75 orang	Dinas Pemdes
						2. Identifikasi Pru kades Lintas Kabupaten	1 Laporan	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1. Jumlah Peserta Bimtek yang meningkat kapasitasnya	0	Dinas Pemdes
						2. Jumlah Produk Unggulan yang dikembangkan	0	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Bimtek yang meningkat Kapasitasnya	0	Dinas Pemdes
				4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif.	1	Dinas Pemdes
						Persentase lembaga adat desa yang akti	0	Dinas Pemdes
					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Da erah Provinsi serta Pem berdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masya rakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kab/Kota.	Jumlah lembaga kemasyarakatan	309 Desa	Dinas Pemdes
						lembaga adat yang terbina	0	Dinas Pemdes

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan		Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*		*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Fasilitasi penataan, Pem berdayaan dan Pendaya gunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah RT/RW yang mendapat pembinaan	0	Dinas Pemdes
						2. LAD yang mendapat pelatihan	0	Dinas Pemdes
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah PKK Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina	7 Kab./Kota,	Dinas Pemdes
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan yang dibina	0	Dinas Pemdes
					Fasilitasi penyelenggara an ketentraman, keterti ban dan perlindungan masyarakat	Jumlah Trantibumlinmas Desa terbentuk dan terlatih	0	Dinas Pemdes
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa	1. Jumlah BUMDESA yang aktif	12 BUMDESA,	Dinas Pemdes
						2.Jumlah Produk unggulan Desa yang dikelola	20 Prudes	Dinas Pemdes
						3. Jumlah berkah mart yang difasilitasi dan didampingi pengembangannya	230 Berkah Mart	Dinas Pemdes
					Sub Kegiatan FasilitasiPemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes
						Meningkatnya Teknologi Tepat Guna Sektor Perikanan	7 Kab/Kota	Dinas Pemdes
5	PEMBANGUNAN KESEHATAN	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhnan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	86,55%	Dinas Kesehatan
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan TK. Daerah Provinsi	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan	100%	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun	1 Sarana	Dinas Kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas	64%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengem-bangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll	Jumlah penduduk yang dilayani Pelayanan Kesehatan Bergerak	10.300 orang	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipelihara	1 unit	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	90 unit	Dinas Kesehatan
				Persentase penyediaan sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana di fasilitas layanan kesehatan	4 unit	Dinas Kesehatan
				Jumlah lembaga yang diberikan bantuan	1 lembaga	Dinas Kesehatan
			DAK FISIK	Jumlah instalasi air bersih	1 unit	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pengadaan alat kesehatan	13 unit	Dinas Kesehatan
				Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi	10 unit	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	7 jenis	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan	10 unit	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Kab/ Kota yang menyedia kan fasilitas pelaya nan, sarana, pra sarana dan alat kese hatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	57%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Telemedicine	8 fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
				Peserta pertemuan evaluasi pelaksana an telemedicine	21 orang	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskes mas dengan keterse diaan obat dan vaksin essensial	95%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	64 puskesmas	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembelian obat buffer stock	3 jenis	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayan an kesehatan bagi penduduk terdamp ak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	80%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah pelayanan ke sehatan bagi pendu duk terdampak kris is kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	6 kali	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditang gulangi	15 kejadian	Dinas Kesehatan
				Persentase pelaya nan kesehatan keluarga	71%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah ibu hamil yang mengikuti pe ngembangan kelas ibu dalam penerap an penggunaan buku kia yang telah memu	3764 orang	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				tuskan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan		
				Jumlah fasilitas kesehatan yang dikuatkan dalam Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan bayi baru lahir	7 puskesmas	Dinas Kesehatan
				Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi MTBS	40 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Bayi yg teridentifikasi penyebab kematian	36 kasus kematian ibu, 188 kasus kematian bayi	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah usia repro duksi yang menda patkan penguatan ke sehatan reproduk si masa sebelum hamil	240 Orang	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah kader kesehatan dan petugas kesehatan yang tersosialisasi dalam pemberdayaan lansia dalam Meningkatkan Status Kesehatan Lansia	70 orang	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pencanangan bulan timbang	400 orang	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah siswa yang dilakukan pengu-kuran kebugaran	630 siswa	Dinas Kesehatan
				Jumlah peserta pertemuan lintas sektor dan koordinasi lintas program dan lintas sektor	50 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah perusahaan yang dilakukan penilaian Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	7 perusahaan	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sampel makanan, sampel limbah, sampel air yang diperiksa	510 sampel	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah peserta Seminar Kesehatan Lingkungan	300 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah Kampanye germas dalam pembudayaan Germas di masyarakat	6 kampanye	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah peserta PETA DORA untuk SIANIL	100 orang	Dinas Kesehatan
				Persentase layanan kesehatan di Puskesmas	64%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (ASMAN TOGA) yang dibentuk dan dibina	7 kelompok	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan penyakit menular dan tidak menular	80%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta workshop intensifikasi penemuan kasus dalam rangka peringatan Hari Tuberculosis Sedunia (HTBS)	55 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah peserta workshop layanan HIV-AIDS dan IMS	60 Orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah peserta workshop dan deteksi dini penyakit tidak menular	400 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang dibina penyakit menular dan tidak menular	64 puskesmas	Dinas Kesehatan
				Jumlah bahan habis pakai penyakit menular dan tidak menular	3.050 test	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	500 orang	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah siswa yang dilakukan screening kesehatan jiwa (mobile keswa) dengan 30 orang per kabupaten/kota	210 siswa	Dinas Kesehatan
				Jumlah peserta pertemuan pemantapan program kesehatan jiwa	32 orang	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	100 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masalah NAPZA	10 fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
				Persentase layanan kesehatan di Puskesmas	64%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah puskesmas, Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dan kabupaten/kota yang melakukan kerja sama program pelayanan darah	64 puskesmas	Dinas Kesehatan
				Persentase kepesertaan JKN	81%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah	1.130.000 jiwa	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	80%	Dinas Kesehatan
				Jumlah peserta pertemuan koordinasi program surveilans, PIE dan kekaran tinaan kesehatan	36 orang	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah kesepakatan koordinasi dan sin kronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kab/kota	7 dokumen	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ke giatan pelaksanaan koordinasi dan sin kronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kab/ kota	1 dokumen	Dinas Kesehatan
				Persentase layanan kesehatan di Puskes mas	64%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pende katan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak	64 puskesmas	Dinas Kesehatan
				Jumlah lembaga yang diberikan bantuan	1 lembaga	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang teregistrasi secara nasional	64 puskesmas	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	80%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan	6 kali	Dinas Kesehatan
				Persentase layanan kesehatan di Puskesmas	64%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah pasien yang dilayani di klinik kesehatan	1200 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah tenaga kesehatan	35 orang	Dinas Kesehatan
				Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem rujukan terintegrasi berbasis kompetensi	100%	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan rujuk dan rujuk balik melalui Sisrute yang berbasis Kompetensi	6 rumah sakit	Dinas Kesehatan
				Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuan tentang rujukan dan rujuk balik	55 orang	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayan an kesehatan bagi penduduk terdam pak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	80%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa ke labora torium rujukan/ na sional untuk konfir masi laboratorium	20 spesimen	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah peserta Pemberdayaan masyarakat daerah bencana dan atau berpotensi bencana	245 orang	Dinas Kesehatan
				Persentase Kab/ Kota yang menerap kan sistem rujukan terintegrasi berbasis kompetensi	100%	Dinas Kesehatan
				Jumlah peserta Penguatan Dinas Kesehatan Kab/Kota sebagai Tim PPMI (Pengawasan Pemantauan Mutu Internal)	24 orang	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayan an kesehatan bagi penduduk terdam pak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	80%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Jumlah penilaian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan	5 kali	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kab/kota yang melaksanakan SIK	57%	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan	3 dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah kab/kota yang fasilitas pela yanan kesehatannya melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disyaratkan	3 kabupaten/ kota	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Perijinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10 dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	19 rumah sakit	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang mengimple mentasikan tata kelola rumah sakit sesuai standar akreditasi	19 rumah sakit	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah peserta per temuan Penguatan Peran BPRS dalam Pengawasan RS	56 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	7 puskes mas	Dinas Kesehatan
			2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Men dapatkan Pening katan Kompetensi	81%	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85%	Dinas Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi kebu tuhan kompeensinya melalui pendidikan dan pelatihan	30 orang	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti bimtek kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	30 orang	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sum ber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	258 orang	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar	8 orang	Dinas Kesehatan
				Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi	250 orang	Dinas Kesehatan
			3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Yang Memenuhi Syarat	82%	Dinas Kesehatan
			. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dan penyalur alat kesehatan yang dapat diawasi serta memenuhi syarat dan memiliki izin edar	85%	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Jumlah Pedagang Besar Farmasi cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	14 sarana	Dinas Kesehatan
			Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Berbasis Elektronik	Jumlah perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur AlatKesehatan (PAK) berbasis elektronik	14 sarana	Dinas Kesehatan
			Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase usaha kecil obat tradisional yang dapat diawasi serta memenuhi syarat dan memiliki izin edar	80%	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat tradisional	Dinas Kesehatan
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat tradisional	Dinas Kesehatan
			3 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	85%	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan baru yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten/Kota	5 kebijakan	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peserta kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) " Sehat Bersama Bunda Germas "	300 orang	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan KIE PHBS di masyarakat	6 tema	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru	3 tatanan	Dinas Kesehatan
				Jumlah Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media KIE	4 media informasi kesehatan	Dinas Kesehatan
			Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	70%	Dinas Kesehatan
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah peserta asistensi pengintegrasian pengembangan posyandu	450 orang	Dinas Kesehatan

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
						Jumlah partisipasi intensifikasi penemuan kasus tuberkulosis dengan LP/LS percepatan eliminasi TB	30 orang	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta kapasitas kader posyandu	100 orang	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta rakor pengelola promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100 orang	Dinas Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Ber-sumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang meleksanakan pembinaan posyandu aktif	60%	Dinas Kesehatan
					Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase kab/kota yang meleksanakan pembinaan posyandu aktif	60%	Dinas Kesehatan
						Jumlah peserta yang mengikuti Bimbi ngan Teknis dan Supervisi UKBM		Dinas Kesehatan
		2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peme nuhan kesehatan rumah Sakit Terakreditasi paripurna	80	RSUP
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Sarpras dan alkes untuk Rumah Sakit rujukan	3 Gedung,4 Kemitraan, 1 Dokumen,1 878 jenis,30 unit, 80%	RSUP
					Sub Kegiatan Pembangunan fasilitas kesehatan lainya	Jumlah gedung	1 Gedung	RSUP
						Jumlah gedung jenazah B rumah Sakit	1 Gedung	RSUP
						Jumlah gedung jenazah B rumah Sakit lanjutan	1 Gedung	RSUP
						Jumlah Kemitraan Pelayanan Rumah Sakit	4 Kemitraan	RSUP
						Jumlah dokumen	1 dokumen	RSUP
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah alat kesehatan (DAK)	885 jenis	RSUP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah alat kesehatan/ Penunjang medik	10 jenis	RSUP
				Jumlah alat kesehatan	975 unit	RSUP
			Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana di Rumah sakit		RSUP
				Jumlah furniture gedung C	3 jenis	RSUP
			Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Keperawatan	1 jenis	RSUP
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi		RSUP
				Jumlah Pemeliharaan alat kalibrasi	30 unit	RSUP
			Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 jenis	RSUP
				Jumlah paket laundry	1 jenis	RSUP
			Pemeliharaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan kesehatan	Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Penunjang Medik Kesehatan	80%	RSUP
			Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	persentase Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	80%	RSUP
			Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit	80%	RSUP
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem in formasi Keperawatan terintegrasi	1 Aplikasi Keperawatan	RSUP
			Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Aplikasi Asuhan Keperawatan Terintegrasi	1 Aplikasi Keperawatan	RSUP
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	4 dokumen	RSUP
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah SOP Keperawatan	1 dokumen	RSUP
				Jumlah Standar Asuhan Keperawatan	1 dokumen	RSUP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	1 dokumen	RSUP
				Jumlah Dokumen Perencanaan perbaikan strategis	1 Dokumen	RSUP
			2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	80	RSUP
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah SDM kesehatan Rumah Sakit	212 orang	RSUP
			Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	212 orang	RSUP
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetisi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Mutu dan Kompetisi SDM Keperawatan	3 Dokumen	RSUP
			Sub Kegiatan Peningkatan Kompetisi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	6 Orang	RSUP
				Jumlah Peserta Pengembangan Kepribadian Keperawatan	129 Orang	RSUP
				Jumlah Peserta In House Traning Keperawatan	35 Orang	RSUP
			Sub Keg: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan Etika Keperawatan	1 dokumen	RSUP
				Jumlah Pelaksanaan Audit Keperawatan	1 dokumen	RSUP
				Jumlah Penilaian Perawat dan Bidan Teladan	1 dokumen	RSUP
			3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			RSJ
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM DAN UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas pelayanan,sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	85%	RSJ

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung rawat inap yang dibangun	1 gedung rawat inap yang dibangun	RSJ
			Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah gedung rawat jalan sesuai standar	1 gedung rawat jalan	RSJ
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan Rumah Sakit yang direhabisitasi	8 bangunan rumah sakit	RSJ
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dibeli	7 jenis alat kedokteran	RSJ
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang terkalibrasi	10 unit	RSJ
			Sub Kegiatan Pengadaan Bahan habis pakai lainnya (Sprei, Handuk dam habis pakai lainnya)	Jumlah Sprei Handuk dan pakaian habis pakai yang dibeli	5 Jenis	RSJ
			Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan /Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Peralatan laboratorium yang telah dipelihara	10 Jenis alat yang dibeli dan dipelihara	RSJ
			Sub Kegiatan Pemeliharaan alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan /Alat Penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	14 jumlah alat yang dipelihara	RSJ
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan kesehatan terhadap Upaya Kesehatan Masyarakat ,Perorangan dan rujukan pada rumah sakit jiwa	80%	RSJ
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Limbah Rumah Sakit yang dikelola selama 1 tahun	12 bulan	RSJ
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan	60 sekolah	RSJ
				Jumlah terapi support pada keluarga pasien	40 kali	RSJ
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah kunjungan keluarga pasien sebelum pasien pulang (discarge planning)	20 kali	RSJ

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah pasien dengan bebas pasung	15 pasien	RSJ
				Jumlah kunjungan ke keluarga pasien (home visite)	20 kali	RSJ
				Jumlah rehabilitan dan pendamping yang ikut serta	40 orang	RSJ
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan orang dengan kecanduan NAPZA	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi mental sosial dan NAPZA	4800 orang	RSJ
			Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan rumah sakit	83%	RSJ
			Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah sertifiaksi akreditasi yang diperoleh	1 sertifikat akreditasi	RSJ
				Jumlah Dokumen SOP	3 dokumen	RSJ
				Jumlah Dokumen asuhan keperawatan	1 dokumen	RSJ
				Jumlah dokumen panduan praktik klinis	1 dokumen	RSJ
				Jumlah Dokumen Clinical pathway	1 dokumen	RSJ
				Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	RSJ
				Jumlah Dokumen Standar pelayanan minimal	1 dokumen	RSJ
			2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			RSJ
			Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM DAN UKP Provinsi	Persentase sumber daya kesehatan yang tersedia untuk ukm dan ukp provinsi	90%	RSJ
			Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga Kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar Rumah Sakit kelas A	160 orang	RSJ
			Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis	Persentase pengem bangan mutu dan peningkatan	85%	RSJ

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
					Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	kompetensi SDM kesehatan tingkat daerah provinsi		
					Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kompetisi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang dilaksanakan	100 kali	RSJ
						Jumlah perawat yang di assesment	170 orang	RSJ
						Jumlah perawat yang mendapat BTCLS	36 orang	RSJ
						Jumlah perawat mendapatkan pelatihan assesor keperawatan	25 orang	RSJ
					Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Laporan Audit Keperawatan	25 orang	RSJ
6	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	1	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase GTK Bersertifikasi	80	Dinas Pendidikan
						Nilai rata-rata UK GTK SMA	60	Dinas Pendidikan
						Jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional/ Internasional	4	Dinas Pendidikan
						APK SMA	43,43	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah guru SMA yang mengikuti PPG	25 Orang	Dinas Pendidikan
						Jumlah guru SMA yang mendapat pengem-bangan kompetensi	165 Orang	Dinas Pendidikan
						Jumlah lomba kesis-waan SMA	12 Jenis	Dinas Pendidikan
						Jumlah sarana prasarana yang di bangun	7 Lokasi	Dinas Pendidikan
						Jumlah siswa/ mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 Orang	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah guru yang mengikuti PPG	25 Orang	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2022						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
					Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	15 Orang	Dinas Pendidikan
					Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	150 Orang	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SMA yang dibina minat, bakat dan kreativitas	2000	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	3 paket	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	2 paket	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin yang dibangun	2 paket	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	4 ruang	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	3 ruang	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur Sekolah	Jumlah Meubeleur	380 SET	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	Dinas Pendidikan
				Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah siswa/ mahasiswa yang mendapat beasiswa	1894 orang	Dinas Pendidikan
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru SMK yang mengikuti PPG	20 Orang	Dinas Pendidikan
					Jumlah guru SMK yang mendapat pengem-bangan kompetensi	160 Orang	Dinas Pendidikan
					jumlah Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 Tim	Dinas Pendidikan
					Jumlah lomba kesis-waan SMK	5 jenis	Dinas Pendidikan
					jumlah sarana prasarana SMK yang direhab	4 lokasi	Dinas Pendidikan
					jumlah sarana prasarana SMK yang bangun	7 ruang	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Pengadaan sarana prasarana SMK	1 paket	Dinas Pendidikan
				Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 Orang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah guru yang mengikuti PPG	20 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan S2	10 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	150 Orang	Dinas Pendidikan
				Terseleksinya Kontingen guru berprestasi ke tingkat Nasional	1 kali	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan SMK	5 jenis	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah Ruang Kelas yang direhab	3 lokasi	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik	jumlah ruang praktik yang direhab	1 lokasi	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan ruang kelas baru	jumlah RKB yang dibangun	6 ruang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pembangunan ruang praktik	jumlah ruang praktik yang dibangun	1 ruang	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Pengadaan Perleng-kapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 paket	Dinas Pendidikan
			Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1000 Orang	Dinas Pendidikan
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru SMA yang mengikuti PPG	10 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah Guru SMA yang mendapat pengem-bangan kompetensi	102 Orang	Dinas Pendidikan
				Jumlah lomba kesiswaan	8 jenis	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						Jumlah Pengadaan Sarana prasarana pendidikan khusus	2 unit	Dinas Pendidikan
						Jumlah Sarana, Prasarana pendidikan khusus yang dibangun	3 lokasi	Dinas Pendidikan
						Jumlah penyediaan Biaya Operasional PLA	12 bulan	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan khusus	Jumlah Guru yang mengikuti PPG	10 Orang	Dinas Pendidikan
						Jumlah Guru yang berkualifikasi S1 dan S2	2 Orang	Dinas Pendidikan
						Jumlah Guru mengikuti Diklat Kompetensi	100 Orang	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah tim lomba kesiswaan	10 Tim	Dinas Pendidikan
						Jumlah sekolah kesiswaan pendidikan khusus yang dibina	9 Sekolah	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	2 Unit	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	3 lokasi	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tersedianya Biaya Operasional PLA	12 bulan	Dinas Pendidikan
		2	**Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan**	**1**	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi**	**80%**	**Dinas Pendidikan**
					Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah dokumen analisis GTK	1 dokumen	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen pe metaan dan mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satu an Pendidikan Mene ngah dan Pendidik an Khusus	1 dok	Dinas Pendidikan

NO	RKPD 2022							
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4		5	6	7
				2	Program Pengembangan Kurikulum Dan Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75%	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 dok	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMA	44	Dinas Pendidikan
						Jumlah peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SMK	36	Dinas Pendidikan
					Kegiatan Penetapan Kuri-kulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Muatan Lokal Pendidikan khusus	1 dok	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan Pelatihan Penyusu-nan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1	Dinas Pendidikan
				3	Program Bahasa Dan Sastra	Persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra	70%	Dinas Pendidikan
					Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah buku/kamus yang disusun	2 jenis	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan koordinasi penyusunan kamus bahasa daerah	Jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	2 jenis	Dinas Pendidikan
					Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi	Jumlah siswa yang berminat mengikuti lomba	50 Orang	Dinas Pendidikan
					Sub Kegiatan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan provinsi	Jumlah / jenis buku yang dicetak dan distribusi	4 judul	Dinas Pendidikan
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	50 Orang	Dinas Pendidikan
7	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	1	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN	1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	73	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	5	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	99,79	BKPSDM
			Kegiatan 1: Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Data Pegawai yang dikelola	5587	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Yang Di Kelola	100	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Dikelola Datanya	5587	BKPSDM
			Kegiatan 2: Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang lulus CASN/IPDN	146	BKPSDM
				Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi	300	BKPSDM
				Jumlah SK Pensiun dan Pangkat yg Diterbitkan Tepat Waktu	1241	BKPSDM
				Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN	100	BKPSDM
				Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi	146	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun	91	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Kenaikan Pangkat	1150	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi	300	BKPSDM
			Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian	Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak yang dilakukan penataan	3650	BKPSDM
			Kegiatan 3: Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase pegawai yg terukur indeks	93	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel		
				Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68	BKPSDM
				Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	0	BKPSDM
				Jumlah ASN yang dikembangkan profesinya	925	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Inspektorat,Badan, Kantor, Satuan POLPP, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah Prov Babel	93	BKPSDM
				Persentase pegawai yg terukur indeks profesionalitasnya di Lingkungan Dinas Prov Babel	68	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN	1 Kepengurusan	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Fasilitasi Profesi ASN	MTQ KORPRI Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	-	BKPSDM
				Persemayaman bagi anggota KORPRI Prov. Kep. Bangka Belitung	27	BKPSDM
				Pekan Olahraga Antar Unit KORPRI Pemprov. Kep. Bangka Belitung	42 PD	BKPSDM
				PORPROV KORPRI IV se-Prov. Kep. Bangka Belitung	800	BKPSDM
				PORNAS KORPRI XVI	125	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Penyegaran Rohani KORPRI		BKPSDM
			Kegiatan 4: Pengembangan Karir ASN	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300	BKPSDM
				Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	BKPSDM
				Jumlah Pedoman pengembangan manajemen karir	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300	BKPSDM
				Jumlah ASN yang menerima beasiswa	26	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah Pedoman Pengembangan Karir	1	BKPSDM
			Kegiatan 5: Pembinaan ASN			BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dibina disiplin dan rohaninya	4300	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2:Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani	8	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Satya Lencana	100	BKPSDM
				ASN Berprestasi	700	BKPSDM
				Pemberian Bantuan Hukum	900	BKPSDM
			2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang tersertifikasi	90	BKPSDM
				Nilai Akreditasi Diklat	81	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	17,18	BKPSDM
				Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengem bangan kompetensi	89,29	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	26,06	BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional	63,46	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan 1: Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Umum dan Pilihan	640	BKPSDM
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi	200	BKPSDM
				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pengembangan kompetensi Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	BKPSDM
			Sub Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pe ngembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Admi nistrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penun jang, dan Urusan Konkru en, Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	4	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	2	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	4	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum	4	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	3	BKPSDM
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	2	BKPSDM
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Pilihan	5	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Umum	360	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	200	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	120	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Pilihan	280	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jabatan Administrasi PD Penunjang	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	1	BKPSDM
			Kegiatan 2: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Tersertifikasi	90	BKPSDM
				Nilai Akreditasi Lembaga Pelatihan	81	BKPSDM
				Jumlah dokumen Sumber Belajar dan Pelaksanaan Kerjasama	18	BKPSDM
				Jumlah Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	125	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	240	BKPSDM
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	165	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi	1	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagan	4	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	-	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	-	BKPSDM
				Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	-	BKPSDM
			Sub Kegiatan 2: Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Operasional LSP PDN Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi	90	BKPSDM
			Sub Kegiatan 4: Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat	10	BKPSDM
				Nilai Akreditasi Diklat	-	BKPSDM
				Penerbitan Media Diklat/Profil Badan/Jurnal Badan	5	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Laporan Evaluasi Pasca Diklat	15	BKPSDM
				Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	1	BKPSDM
				Pengembangan Aplikasi Pelatihan	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 5: Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Laporan Hasil Kerjasama Antar Lembaga	1	BKPSDM
			Sub Kegiatan 6: Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Ne-geri Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pemebelajaran Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah	1	BKPSDM
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pemebelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	2	BKPSDM
				Jumlah Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Bagi Jabatan Fungsional	6	BKPSDM
			Sub Kegiatan 7: Penyelenggaraan Pengem bangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemim-pinan, dan Prajabatan	Jumlah Pimpinan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	80	BKPSDM
				Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi	45	BKPSDM
				Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan kompetensi	165	BKPSDM
				Jumlah ASN yang mengikuti Pengem bangan Kompetensi Kepemimpinan	80	BKPSDM
				Jumlah CASN yang mengikuti Pengem bangan Kompetensi Prajabatan	160	BKPSDM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan 8: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja-sama, Serta Pengem-bangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	1	BKPSDM
				Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1	BKPSDM

Sedangkan Prioritas Pembangunan II (Penunjang) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, yaitu:

Gambar IV.6
Prioritas Pembangunan Daerah II (Penunjang) Tahun 2022

1. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan pada zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang Tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan utama bagi Babel. Maka, zonasi bagi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; Pembayaran dan Pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

2. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembanguan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan *brand* babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasiskan untuk membangun kemandiriaan energi;

3. PEMBANGUNAN SOSIAL

Fokus kegiatan peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak melalui program Provinsi Layak Anak (Provila); Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang; Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender; Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga; Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi melalui berbagai event olahraga baik tingkat Nasional maupun Regional.

4. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan dengan Nongkrong Bareng ("Nobar") program rutin bersama Perangkat Daerah, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (*WhatsApps Groups* atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanaan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (*smart city*); Mengutakan sistem pelayanaan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanaan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya;

5. PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimlakan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

6. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

7. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahah; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca.

Tabel IV.8
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Daerah Penunjang dengan Indikator Sasaran dan Strategi Pembangunan pada RKPD 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
				2	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat
		1	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
				2	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
				3	Peningkatan tata kelola industri
				4	Peningkatan tata kelola perdagangan
2	Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan	1	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
				2	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
				3	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
		2	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
		3	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
3	Pembangunan Sosial	1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
		2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	
1	*2*	*3*		*4*	
				2	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
		4	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Peningkatan insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
		5	Indeks Pembangunan Olah Raga	1	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
4	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
				2	Meningkatkan Tata kelola pengawasan
				3	Peningkatan kese-larasan antar dokumen perencana-an, penganggaran dan pelaporan
				4	Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah
				5	Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
				6	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah
				7	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa
				8	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
				9	Peningkatan kualitas pelayanaan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
5	Pembangunaan Berdemokrasi	1	Nilai Kebebasan Sipil	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
		2	Nilai Hak-Hak Politik	1	Peningkatan pelaya-nan terhadap hak-hak politik masyarakat
				2	Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat, penegak-an perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
		3	Nilai Kelembagaan Demokrasi	1	Peningkatan pengem-bangan lembaga-lembaga demokrasi
6	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	1	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
				2	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
				3	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana Teluk Bayur
7	Pengendalian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
				2	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
				3	Peningkatan pengendalian dan penga-wasan hutan
				4	Peningkatan tata kelola kehutanan
				5	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
				6	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Keselarasan antara Prioritas Pembangunan daerah II (penunjang) dengan arah kebijakan serta dukungan program perangkat daerah untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel IV.7 di bawah ini.

Tabel IV.9
Arah Kebijakan dan Program Prioritas
yang mendukung Prioritas Pembangunan II (penunjang) RKPD 2022

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	1 Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineralyang berwawasan lingkungan	1 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pertambangan yang "good mining practices" pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka	0,75	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mneral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut S.D Dengan 12 Mil	jumlah WIUP aktif yang diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP yang diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		2 Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat	2 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Ratio Elektrifikasi pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka	0,999	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Jumlah badan usaha yang dibina		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		1 Meningkatkanproduksi dan nilai tambah sumber daya mineralyang berwawasan lingkungan	1 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pertambangan yang "good mining practices" pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat	0,75	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertamba ngan Mneral Bukan Lo gam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	jumlah WIUP aktif yang diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pe ngawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Per tambangan Mineral Bu kan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah Provin si dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		2 Peningkatan ketersedian energi listrikmasyarakat	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Ratio Elektrifikasi pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat	0,999	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Jumlah badan usaha yang dibina		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		1 Meningkatkanproduksi dan nilai tambah sumber daya mineralyang berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pertambangan yang "good mining practices"pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	0,75	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mneral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	jumlah WIUP aktif yang diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut s.d 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		2 Peningkatan ketersedian energi listrikmasyarakat	2 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Ratio Elektrifikasi pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	0,999	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Jumlah badan usaha yang dibina		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		1 Meningkatkanproduksi dan nilai tambah sumber daya mineralyang berwawasan lingkungan	1 Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pertambangan yang "good mining practices" pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung	0,75	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mneral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	jumlah WIUP aktif yang diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		2 Peningkatan ketersedian energi listrikmasyarakat	1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Ratio Elektrifikasi pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung	0,999	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Jumlah badan usaha yang dibina		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pertambangan yang good mining practices pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur	0,75	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mneral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	jumlah WIUP aktif yang diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi		Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Ratio Elektrifikasi pada Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	0,999	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Jumlah badan usaha yang dibina		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase kepatuhan penataan izin air tanah	0,7	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomtek perizinan air tanah dan laporan pengawasan perizinan air tanah	15 Dokumen dan 1 laporan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Rekomendasi teknis perizinan air tanah	15 Rekomtek	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	jumlah laporan pembendalian dan pengawasan perizinan air tanah	1 laporan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Pertambangan yang "good mining practices"	0,75	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mneral Bukan Logam Dan Batuan Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	250 WIUP	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Rekon PNBP MINERBA dan Jumlah Peta yang dicetak	4 kali & 100 peta	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batu dalam 1 Daerah Provins dan Wilayah laut sampa dengan 12 Mil	Jumlah WIUP yang dikendalikan dan diawasi	250 WIUP	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	0,1068	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen pelaksanaan konservasi energi	2 Dokumen	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi.	Jumlah Rapergub yang dibuat	1 Repergub	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembinaan Dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi.	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan konservasi energi	1 Laporan	
			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Ratio Elektrifikasi	0,999	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	Jumlah badan usaha yang diawasi	40 Badan Usaha	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi Yang Fasilitas Instansinya Dalam Daerah Provinsi.	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan	40 laporan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan	Jumlah Desa yang di data	25 Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Laporan pengumpulan dan pengolahan data	1 laporan	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	Jumlah Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang tersusun		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		3 Peningkatan Tata Kelola Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya	1	DISPERINDAG

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3	DISPERINDAG
			Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Distributor/ Pengecer	3	DISPERINDAG
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pela belan Bahan Berbahaya	Jumlah Produk bahan berbahaya	1	DISPERINDAG
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Barang terdistribusi	0,6	DISPERINDAG
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)	200	DISPERINDAG
			Pembinaan dan Pengen dalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)	3	DISPERINDAG
			Program Stabilisasi Har ga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersedian Bapokting	0,8	DISPERINDAG
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)	18	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkro nisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkro nisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting	6	DISPERINDAG
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Koevisien Variasi	<11	DISPERINDAG

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	DISPERINDAG
			Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	14	DISPERINDAG
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	0,7	DISPERINDAG
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11	DISPERINDAG
			Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan (dokumen)	11	DISPERINDAG
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provins	Jumlah Pengawasan (laporan)	2	DISPERINDAG
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi	11	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan (laporan)	2	DISPERINDAG
			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	900	DISPERINDAG
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Akses Pasar Ekspor	3	DISPERINDAG

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan	2	DISPERINDAG
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Produk Dagang	6	DISPERINDAG
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45	DISPERINDAG
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir/Calon Eksportir	45	DISPERINDAG
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	40 (Mampu)	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3	DISPERINDAG
			Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasional	3	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Perlin-dungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Konsumen yang teredukasi	440	DISPERINDAG
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Responden	400	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)	40	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	0,78	DISPERINDAG

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindung an Konsumen	Jumlah Jenis Barang yang diawasi	10	DISPERINDAG
			6 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,4	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Permintaan Dagang	4	DISPERINDAG
			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	DISPERINDAG
		4 Peningkatan Tata Kelola Industri	1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah industri	0,02	DISPERINDAG
			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	0,02	DISPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	DISPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI	200	DISPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	2	DISPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	350	DISPERINDAG
				Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	80	DISPERINDAG
			2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	0,3	DISPERINDAG

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yg dipantau	55	DISPERINDAG
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau	5	DISPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah IUI yang diawasi	50	DISPERINDAG
			3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data informasi industri di SIINAS	0,7	DISPERINDAG
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60	DISPERINDAG
			Fasilitasi Pengum pulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	DISPERINDAG
			7 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan Terstandarisasi	0,75	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota	Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	0,9	DISPERINDAG

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	DISPERINDAG
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sample yang di uji	200	DISPERINDAG
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi	5	DISPERINDAG
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,4	DISPERINDAG
			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	20	DISPERINDAG
			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Produk	20	DISPERINDAG
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah industri	0,05	DISPERINDAG
			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	0,02	DISPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk	200	DISPERINDAG
5	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50%	DINAS PUPR
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	91,50%	DINAS PUPR
			Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Panjang Jalan yang terencana	251 km	DINAS PUPR
			Subkegiatan Survey Kondisi Jalan Jembatan	kondisi jalan yang disurvey kondisi jembatan yang disurvey	850.99 km 3.508 km	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pembangunan Jalan (PHNJD)	Panjang Jalan PHNJD yang terbangun	10 km	DINAS PUPR

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan Panjang jalan yang menuju standar (PT.SMI)	9.5 km 18.5 km	DINAS PUPR
			Subkegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi Panjang jalan yang direhabilitasi (PT.SMI)	1.47 km 4 km	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang fungsional jalan yang terpelihara	752.65 km	DINAS PUPR
			Subkegiatan Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti	28 m	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang terpelihara	3508.75 m	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara berkala	14.88 km	DINAS PUPR
		2 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	96,09%	DINAS PUPR
			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1 penyelenggaraan	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Jumlah Pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU) Jumlah tenaga ahli yang dilatih dan disertifikasi	1 laporan 2 kegiatan 30 orang	DINAS PUPR
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1 penyelenggaraan	DINAS PUPR
			Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan data dan informasi jasa konstruksi	2 layanan	DINAS PUPR
			2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air			DINAS PUPR

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, Persentase Penyediaan Air Baku	5%; 1,6%	DINAS PUPR
				Persentase pening katan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	0,05	DINAS PUPR
			Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman PantaiPenyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	5 dokumen	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang terbangun (m)	1370 meter	DINAS PUPR
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	panjang pengaman pantai yang dibangun	175 m	DINAS PUPR
			Subkegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai/Kali yang dilakukan pemeliharaan	140 km	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	lembaga yang dibina dan diberdayakan	1 lembaga	DINAS PUPR
				Persentase Penyediaan Air Baku	1,60%	DINAS PUPR
			Subkegiatan Penyusu nan Rencana Teknis dan Dokumen Lingku ngan Hidup untuk Konstruksi Bendung an, Embung, dan Ba ngunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Tek nis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penam pung Air Lainnya	4 dokumen	DINAS PUPR

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Subkegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	1 dokumen	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	bangunan penampung air yang terbangun	350 m	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Luas bangunan polder/kolam retensi	3 Ha	DINAS PUPR
				Rasio Irigasi	0,5	DINAS PUPR
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Irigasi	0,5	DINAS PUPR
			Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4 dokumen	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi yang ditingkatkan	336 ha	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan	300 ha	DINAS PUPR
			Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang di OP kan	400 ha	DINAS PUPR
			Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang di OP kan	200 ha	DINAS PUPR
			Subkegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah kelembagaan pengelola irigasi yang aktif	1 lembaga	DINAS PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	83%	DINAS PUPR

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Jumlah perencanaan tata ruang yang ditetapkan	2 perencanaan tata ruang	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pelaksanaan Persetu juan Substansi, Eva luasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan	1 RTRW	DINAS PUPR
			Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah rencana rinci tata ruang yang ditetapkan	1 RRTR	DINAS PUPR
			Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	1 sosialisasi	DINAS PUPR
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	15 Perte muan	DINAS PUPR
			Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi	10 pelanggaran	DINAS PUPR
			Subkegiatan Koor dinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang	16 Rekomen das i	DINAS PUPR
		3 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	74,65%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses Air Minum	144 KK	DINAS PERKIM
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan dan Rencana Teknis Terinci SPAM Lintas Kab/Kota	1 Dokumen	DINAS PERKIM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Panjang Pipa distribusi Air Minum	1500 m	DINAS PERKIM
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	92,50%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga Yang terlayani sistem air limbah domestik	140 KK	DINAS PERKIM
			Sub Kegiatan Pemicuan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Rumah Tangga yang terbangun Tangki Septik Individual	140 KK	DINAS PERKIM
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Srategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersusunnya Dokumen SSK Provinsi dan Roadmap Sanitasi		DINAS PERKIM
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata	50%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang terselenggara dan tertata	2Unit	DINAS PERKIM
			Perencanaan ,Pembangunan ,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang terbanguan dan tertata	2Unit	DINAS PERKIM
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Luas Kawasan yang tertata	30%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab /Kota	Luas kawasan Strategis Provinsi yang tertata	0,4 Ha	DINAS PERKIM

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan yang tertata	1 Lokasi	DINAS PERKIM
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah akibat bencana yang tertangani	100%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan yang tersusun	1 Dokumen	DINAS PERKIM
			Sub Kegiatan Indentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan indentifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi yang tersusun	1 Dokumen	DINAS PERKIM
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun	0	DINAS PERKIM
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			DINAS PERKIM
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah yang diselesaikan	0	DINAS PERKIM
			Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang terfasiltasi oleh PSU	50%	DINAS PERKIM
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Permukiman yang terfasiltasi PSU	3 Lokasi	DINAS PERKIM
			Sub Kegiatan Perencanaan Penyedia an PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan/RP3KP	-	DINAS PERKIM
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana ,Sarana,dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan Yang dibangun	2900 m	DINAS PERKIM
				Jumlah RTLH yang terbangun	0	

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		4 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan 1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26,47%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah jenis pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	5 jenis perlengkapan jalan	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah jenis pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	5 jenis perlengkapan jalan	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang dipelihara	5 jenis perlengkapan jalan	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal penumpang tipe B yang beroperasi	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Type B	Jumlah taruna/i Sekolah tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibiayai	24 orang	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen Rekayasa lalu lintas untuk jalan provinsi	30 orang	DINAS PERHUBUNGAN
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	30 orang	DINAS PERHUBUNGAN
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	3 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	3 dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Angkutan umum yang dilaksanakan audit dan inspeksi	1150 kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah angkutan umum (penumpang dan barang) yang diperiksa surat laik jalannya.	800 kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				jumlah angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) yang di ramp check.	150 kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah angkutan yang diperiksa terkait untuk pelayanan dalam rangka melayani Peringatan hari-hari daerah dan nasional	200 kendaraan	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah sopir/ awak kendaraan umum yang mengikuti pemilihan awak kendaraan umum teladan	14 orang	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rute trayek yang disubsidi	4 rute	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	jumlah rute /trayek yang mendapatkan subsidi aglomerasi	4 rute	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	67%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2 unit	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah SBNP yang dipelihara	2 unit	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah Pembangunan Pelabuhan	0	DINAS PERHUBUNGAN
				Jumlah Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	0	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpang Regional yang dipelihara	0	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Induk Pelabuhan	1 Dokumen	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dermaga penyeberangan yang dibangun	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi	67%	DINAS PERHUBUNGAN
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki Izin Usaha di Pelabuhan Pengumpang Regional	60 perusahaan	DINAS PERHUBUNGAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di fasilitasi	60 peru sahaan	DINAS PERHU BUNGAN
4	PEMBANGU NAN SOSIAL	1 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	1 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang responsif Gender	84.37%	DP3ACSKB
			Kegiatan Pelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten kota yang dibina	7 Kab/kota	Kab/kota DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta penguatan kapasitas pelaksanaanPUG dan PPRG	75 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	240 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasauk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD peserta pengembangan materi danPelaksanaan KIE Kesetaraan dan Keadilan Genderbagi institusi Media Massa	32 OPD	DP3ACSKB
			Kegiatan Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina	7 Kab/ kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1. Jumlah peserta Pelatihan dan pembentukan fasilitator pendidikan politik untuk perempuan; 2. Jumlah peserta Pembinaan Industri Rumahan	75 Orang; 90 Orang	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6	7
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia La yanan Pemberdayaan Perempuan Kewenang an Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina	7 Kab/kota	DP3ACSKB
				SubKegiatan Peningka tan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penye dia Layanan Pember dayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta	45 Orang	DP3ACSKB
		2	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan SDM Perlindungan Perempuan	0.039%	DP3ACSKB
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas kabupaten/kota	jumlah laporan upaya pencegahan perlindungan perempuan dan para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan	1 laporan	DP3ACSKB
				Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendam pingan layanan perlin dungan perempuan kewenangan Provinsi	1. Jumlah kebijkan; 2. jumlah peserta sosialisasi pencegah an pelecehan ssek sual bagi perempuan	1 Kebijakan10 0 Orang	DP3ACSKB
				Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	100%	DP3ACSKB
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan pengaduuan masyarakatyang ditangani	1 Dokumen	DP3ACSKB
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	100%	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakatyang ditangani	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Nilai-nilaiKejuangan Perempuan Indonesia	500 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang di bina	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	40 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	40 Orang	DP3ACSKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Capaian OPD yang Menyediakan Data Pilah Gender dan Anak	90,62 %	DP3ACSKB
			Kegiatan Pengumpul an Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data ditingkat Provinsi	Jumlah profil dan data gender dan anak yang tersedia	1 dokumen	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah dokumen profil dan data gender dan anak yang tersedia	1 Profil	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		3 Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	3 Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	18,3 %	DP3ACSKB
			Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan yang Melibatkan kelembagan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi dan Komunikasi InformasiEdukasi dan media publikasi	160 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dibina	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta FA tingkat provinsi dan tingkatnasional dan peserta HAN	977 Orang	DP3ACSKB
			4 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase SDM Perlindungan Anak	0,20%	DP3ACSKB
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 laporan	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi	jumlah peserta TOT bagi aktivis PATBM kab/kota	100 Orang	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Layanan Anak yang memerlkan Perlindungan Khusus	100	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen layanan anak yang memerlukanperlindungan khusus kewenangan provinsi	1 Dokumen	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan KPAD yang difasilitasi	1 Lembaga	DP3ACSKB
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Anak yang memerlkan Perlindungan Khusus	100	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen peningkatan SDM PenyediaLayanan Anak yang memerlukan perlindungankhusus kewenangan provinsi	1 Kegiatan	DP3ACSKB
		3 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	1 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	78,33%	DP3ACSKB
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA)	2 Kab/Kota	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah peserta Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	120 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA)	2 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai target dokumen pendaftaran pendu duk (KTP, KK, KIA)	2 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pembi naan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pe ngawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 kegiatan	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Bim bingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 kegiatan	DP3ACSKB
			Program Pencatatan Sipil	Persentase masya rakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	98,33%	DP3ACSKB
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kab/ kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksa naan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,Pemant auan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai target akta pencatat an sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	1. Jumlah penerima bantuan ADM (Kab. BangkaTengah dan Kab. Bangka Selatan); 2. Jumlah peserta Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1. 2 Kab/Kota; 2. 60 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan	7 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerja sama	37,84%	DP3ACSKB
			Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kab/kota yang dibina	2 Kab/Kota	DP3ACSKB
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan	56 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelenggaraan adminduk	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1. Jumlah media publikasi; 2. Jumlah peserta	3 Media; 50 Orang	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah kab/kota yang difasilitasi penyelenggaraan adminduk	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan PendayagunaanData Kependudukan	1 Kegiatan	DP3ACSKB
			4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan penyajian data base kependudukan tingkat provinsi yang akurat	100%	DP3ACSKB
			Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah jenis profil	2 Profil	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku profil	100 Buku	DP3ACSKB
			5 Program Pengendalian Penduduk	persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk	71,42%	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiata Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	jumlah laporan pengendalian penduduk	1 dokumen	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Buku	DP3ACSKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kab/kota yang di bina	71,42%	DP3ACSKB
			Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal	jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan advokasi dan KIE sesuai kearifan budaya lokal	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub kegiatan Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi dan Promosi KIE Program KKBPK	Jumlah kategori perlombaan Hari Keluarga	1 Kategori	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui mitra kerja	Jumlah peserta advokasi program KKBPK	30 Orang	DP3ACSKB
			Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	jml kab/kota yang melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesertaan ber-KB	7 kab/kota	DP3ACSKB
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Jejaring kemitraan dalam program KKBPK	Jumlah peserta kegiatan penguatan jejaringkemitraan dalam program KKBPK	30 Orang	DP3ACSKB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kampung KB	79,28%	DP3ACSKB

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3		4	5	6	7
				Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembanguan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan program pembangunan keluarga	7 kab/kota	DP3ACSKB
				Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah konselor terlatih	35 Orang	DP3ACSKB
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	Jumlah peserta kegiatan PIK Remaja	20 Orang	DP3ACSKB
				Kegiatan Pember-dayaan dan Peningka-tan Peran Serta Organisasi kemasya-rakatan tingkat Daerah Provinsi dalam Pem-bangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah kab/kota yang melaksanakan pembinaan ormas dalam upaya ketahanan dan keserjahteraan keluarga	7 kab/kota	DP3ACSKB
		5	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda Yang Berprestasi; Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda yang termanfaatkan	0,15% ; 100%	DISKEPORA
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang berprestasi	153 pemuda	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			DISKEPORA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	49 pemuda	49 pemuda	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	74 pemuda	74 pemuda	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Peren canaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeli haraan, dan Pengawa san Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	30 pemuda	30 pemuda	DISKEPORA
			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			DISKEPORA
			Pelaksanaan Koor dinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara an Pelayanan Kepemu daan Melalui Imple mentasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			DISKEPORA
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan; Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	0,03%; 48,61%	DISKEPORA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan; Jumlah organisasi pemuda yang aktif	21 peserta; 35 organisasi pemuda	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	21 peserta	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	35 organisasi pemuda	
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang memiliki kapasitas	2,01%	DISKEPORA
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4.370 orang	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah laporan	1 laporan	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Penyediaan Pusat Pendidikan dan Perlatihan Kepramuka an di Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana yang tersedia	8 jenis	DISKEPORA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan			DISKEPORA
		8	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet pelajar yang berprestasi	14,29%	
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet pelajar yang dibina	550 atlet	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi Event dan Single event Tingkat Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan	10 cabor	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan multi Event dan Single event	Jumlah peserta yang ikut serta dalam pengiriman kontingen	208 peserta	DISKEPORA
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah atlet pelajar yang dibina	125 atlet	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Pemu satan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahraga an (Sport Science)	Jumlah peserta yang ikut dalam Training Camp	159 peserta	DISKEPORA
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			DISKEPORA
				Sub Kegiatan Pemberian Pengharga an Olahraga Provinsi			DISKEPORA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Persentase cabang olahraga yang dibina; Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang termanfaatkan	61,54%; 100%	DISKEPORA
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dibina; Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	8 cabor; 4 prasarana	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah atlet pelajar yang dibina	10 peserta	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordi nasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pember dayaan Perkumpulan Olah raga dan Penyele nggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah peserta kegiatan keolahragaan	200 peserta	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	4 prasarana	DISKEPORA
				Persentase standarisasi tenaga keolahragaan	58,97%	DISKEPORA
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	1 organisasi	DISKEPORA
			Sub Kegiatan Standa-risasi Organisasi Keolahragaan			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah laporan	1 laporan	DISKEPORA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolah-ragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait			DISKEPORA
			Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			DISKEPORA
		Peningkatan pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani	50, %	Dinas Sosial
			Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk di pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	7 Orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk di pulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang difasilitasi	7 Orang	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	50,00 %	Dinas Sosial
			Kegaiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitasi yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	20 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah disabilitas dalam panti non pemerintah yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti non pemerintah	10 Orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial disabilitas di dalam panti non pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	Dinas Sosial
				3. Jumlah panti disabilitas non pemerintah yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada penyandang disabilitas	1 Panti	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dalam panti non pemerintah	10 Orang	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan alat bantu	5 Orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti	10 Orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1. Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20 Orang	Dinas Sosial
				2. Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				3. Jumlah panti lanjut usia yang mendapatkan bimbingan pelayanan kepada lanjut usia	1 Panti	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang direhab sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pengasuhan	Jumlah Pengasuh anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat bimtek pembekalan standar nasional pengasuhan anak	27 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah tenaga pelayanan sosial didalam panti non pemerintah yang mendapat bimbingan keterampilan psikososial	25 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah mendapatkan fasilitasi pembuatan akta kelahiran, NIK dan KIA	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan pendidikan	20 orang	Dinas Sosial
				Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat akses layanan kesehatan dasar	20 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegaitan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak yang mendapat akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	10 orang	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang direhab sosial	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependu-dukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Koordinasi, Sinkronasi dan Pembinaan Pelak-sanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelak-sanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	1 kegiatan	Dinas Sosial
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejah-teraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di rehab sosial	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegaitan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	10 orang	Dinas Sosial

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah PMKS lain-nya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang difasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependu-dukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	10 orang	Dinas Sosial
			Sub KegiatanAkses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lain nya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal	10 orang	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan TMP	Prosentase TMP yang dikelola	100 %	Dinas Sosial
			Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah TMP yang dikelola	1 TMP	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsil	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dipelihara	1 TMP	Dinas Sosial
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah kebutuhan permakanan yang disediakan dalam Panti Pemerintah	20 orang	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	1 Meningkatkan Tata kelola pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	< 5%	INSPEKTORAT
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal Terselenggara	100%	INSPEKTORAT
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			INSPEKTORAT
				Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasil kan Bidang Peme rintahan dan Aparatur	11 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHP yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	11 Laporan	INSPEKTORAT
				Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 Laporan	INSPEKTORAT
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 Laporan	INSPEKTORAT
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan	3 Laporan	INSPEKTORAT
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR atas Laporan Keuangan yang dihasilkan	1 Laporan	INSPEKTORAT
			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah LHP atas Pengawasan Umum dan Teknis Kab/ Kota yang dihasilkan	7 Laporan	INSPEKTORAT
				Persentase Peningkatan TLHP BPK dan APIP	85%	INSPEKTORAT
			Monitoring dan Evalu asi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Ha sil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monev TLHP BPK RI dan APIP	36 Laporan	INSPEKTORAT
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terselenggara	100%	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Tertangani	12 bulan	INSPEKTORAT
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu meliputi Audit Khusus dan Kasus	100%	INSPEKTORAT
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	3	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	100%	INSPEKTORAT
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dihasilkan	4 Dokumen	INSPEKTORAT
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pemetaan Risiko Perangkat Daerah terlaksana	100%	INSPEKTORAT
				Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	3	INSPEKTORAT
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan	100%	INSPEKTORAT
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	20 Laporan	INSPEKTORAT
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Terlaksana	12 bulan	INSPEKTORAT
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksana	12 bulan	INSPEKTORAT
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksana	12 bulan	INSPEKTORAT

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		2 Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1 Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100	BAPPEDA
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun (Dokumen)	2 Dokumen	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan pengintegrasian perencanaanpembangunan daerah dengan rencanapembangunan lainnya	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang	1 Dokumen	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Forum PD/ForumLintas PD	1 Dokumen	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik	1 Dokumen	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumenperencanaan pembangunan daerah	1 Laporan	BAPPEDA
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data PD yang diverifikasi dan dianalisis	500 Data	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan data update dalam Aplikasi yangdisusun	1 Laporan	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	70	BAPPEDA
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendaian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	21 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi danKabupaten/Kota	8 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah laporan hasil evaluasi capaianprogram/kegiatan SDGs	1 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah laporan hasil evaluasi capaianprogram/kegiatan SPM	1 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah laporan monitoring RKPD Kabupaten/Kota	8 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan hasil evaluasi capaian program Perangkat Daerah	1 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah sistem informasi perencanaan daerah yangterkelola	1 Aplikasi	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi/evaluasi perencanaankabupaten/kota	7 Laporan	BAPPEDA
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	12 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyusunandokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan yang disusun	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahan yang disusun	10 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD danRKPD) yang disusun	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaanSinergitas dan Harmonisasi PerencanaanPembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	8 Laporan	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen peren-canaan PD bidang Pemerin-tahan dan Pembangunan Manusia	90	BAPPEDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	4 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasipenyusunan dokumen perencanaan pembangunandaera h (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidangpemerintahan yang disusun	4 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan BidangPembangun an Manusia	4 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Peren-canaan Pembangu-nan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusiayang disusun	4 Laporan	BAPPEDA
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	BAPPEDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	3 Laporan	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJMD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun	1 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA(RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun	2 Laporan	BAPPEDA
				Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90	BAPPEDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	4 Laporan	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang tersusun	4 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	4 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun	4 Laporan	BAPPEDA
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	BAPPEDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencana an PD bidang Infra struktur dan Kewilayahan	90	BAPPEDA
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monev Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Peren-canaan Pembangu-nan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dilakasanakan	4 Laporan	BAPPEDA
				Jumlah Laporan Hasil Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	4 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah LaporanHasil Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPeran gkat Daerah Bidang Kewilayahan yang dilakasanakan	4 Laporan	BAPPEDA
			Program Penelitian dan Pengembagan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	80	BAPPEDA
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan data penelitian dan pe-ngembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan (Laporan)	3 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan pengelolaan data penelitian dan pengembangan dan peraturan	3 Laporan	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	3 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	2 laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata (laporan)		BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan (laporan)		BAPPEDA
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	2	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Laporan	BAPPEDA
				Persentase jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	75	BAPPEDA
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembagan Inovasi dan Teknologi (Laporan)	4	BAPPEDA
			Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Laporan)	2	BAPPEDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2	BAPPEDA
			Program Penataan Organisasi	Persentase Kebijakan di 5 (Lima) Area Perubahan yang tersusun		SETDA
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Usulan PD yang menyusun kebijakan evaluasi terhadap Organisasinya	32 PD	SETDA
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang menyusun kebijakan Penataan Organisasi berdasarkan hasil evaluasi	7 Kab/Kota	SETDA
			Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisa Jabatan, evaluasi jabatan dan peta jabatannya	32 PD	SETDA
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rekomendasi Area Perubahan Manajemen Perubahan dan Penguatan Akuntabilitas yang dibuat		SETDA
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan tugas Tim dan Dokumen Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai standar RB	32 PD	SETDA
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja	32 PD	SETDA
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah PD yang menyusun kebijakan laporan Evaluasi Implementasi perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai standar RB	32 PD	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase Rekomendasi Area Perubahan Penataan Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang dibuat		SETDA
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Kebijakan Peta Proses Bisnis (Probis) dan SOP	Probis dan SOP	SETDA
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkaat Daerah yang telah menetapkan standar pelayanan, pelayanan Prima, pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan teknologi Informasi untuk pelayanan	10 PD	SETDA
			Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase kebijakan dibidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama yang tersusun	90%	SETDA
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			SETDA
				Persentase rekomendasi bagian administrasi kewilayahan	90%	SETDA
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah bahan usulan rekomendasi Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah	7 Berkas	SETDA
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah bahan usulan rekomendasi Pemerintahan Umum	7 Berkas	SETDA
			Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah bahan usulan rekomendasi Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah	7 Berkas	SETDA
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase rekomendasi bagian otonomi daerah	90%	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah bahan usulan rekomendasi Kepala Daerah dan DPRD	5 Berkas	SETDA
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah bahan usulan rekomendasi Otonomi dan Penataan Urusan	6 Berkas	SETDA
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah bahan usulan rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan	9 Berkas	SETDA
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi bagian kerjasama	90%	SETDA
			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah bahan usulan rekomendasi Kerjasama Antar Pemerintah	5 Berkas	SETDA
			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah bahan usulan rekomendasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta		SETDA
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah bahan usulan rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		SETDA
		4 Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)	1 Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang tersusun	80%	SETDA
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Bidang Bina Mental Spiritual yang dibuat	80%	SETDA
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Sarana dan Prasarana Spiritual	5	SETDA
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendaasi Kelembagaan Bina Spiritual	10	SETDA
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dibuat	80%	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pendidikan	2	SETDA
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kesehatan	2	SETDA
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Sosial	2	SETDA
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dibuat	80%	SETDA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kepemudaan, Olah raga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1	SETDA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	SETDA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kepemudaan, Olah raga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan	1	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		5 Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	1 Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang di sahkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi	90%	SETDA
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum daerah yang disusun	90%	SETDA
				Persentase Produk Hukum yang di dokumetasikan	90%	SETDA
				Persentase Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi	90%	SETDA
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah Berupa Raperda	10 Raperda	SETDA
				Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur	35 Pergub	SETDA
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Gubernur	500 Kepgub	SETDA
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Bahan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	100 NHL	SETDA
				Jumlah bahan pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya	100 NHL dan 100 PHD yang didokumetasikan	SETDA
				Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah yang dipublikasi	100 PHD yang di publikasikan	SETDA
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota wilayah I	7 Raperda dan 7 Raperkada	SETDA
				Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota wilayah II	7 Raperda dan 7 Raperkada	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota wilayah III	7 Raperda dan 7 Raperkada	SETDA
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	2%	SETDA
				Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum Pemda	80%	SETDA
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bahan penyelesaian sengketa hukum untuk proses persidangan	2 kasus	SETDA
				Jumlah laporan pembinaan penyelesaian sengketa hukum pemda kabupaten/kota	1 laporan	SETDA
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah bahan usulan pemberian bantuan hukum masyarakat miskin	45 orang	SETDA
				Jumlah bahan pelaporan RANHAM	1 Laporan	SETDA
		3 Peningkatan tata lakasana dan kinerja pemerintah daerah	1 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang tersusun	75%	SETDA
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			SETDA
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro yang dibuat	75%	SETDA
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Mikro yang dibuat	75%	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Ekonomi Makro	3 Berkas	SETDA
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Ekonomi Mikro	1 Berkas	SETDA
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rekomendasi Kebijakan SDA yang dibuat		SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Berkas	SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Berkas	SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Energi dan Air	2 Berkas	SETDA
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rekomendasi Kebijakan BUMD dan BLUD yang dibuat		SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD	3 Berkas	SETDA
			Koordinasi, Sinkro nisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD		SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD		SETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monito ring dan Evaluasi Kebi jakan Pengelolaan Ba dan Layanan Umum Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD		SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi BUMD dan BLUD		SETDA
			Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 4 (Strategis)	SETDA
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			SETDA
				Persentase pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	96%	SETDA
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi PBJ	1 Rumusan	SETDA
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tindaklanjut usulan proses pemilihan penyedia Barang dan Jasa	100%	SETDA
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pemantauan monev pemantauan barang/jasa	1 LAPORAN	SETDA
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengeloaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	96%	SETDA
			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	1 LAPORAN	SETDA
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah sistem PBJ yang dikembangkan	1 APLIKASI	SETDA
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi PBJ	1 LAPORAN	SETDA
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	96%	SETDA
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/ Jasa	1 LAPORAN	SETDA
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah lembaga UKPBJ yang dibina	7 UKPBJ	SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan tentang pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek Pengadaan Barang/Jasa	1 LAPORAN	SETDA
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			SETDA
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dibuat	75%	SETDA
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah		SETDA
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah		SETDA
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pembangunan APBD, APBN dan Wilayah	6 Berkas	SETDA
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pengendalian, Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dibuat	75%	SETDA
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	6 Berkas	SETDA
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pelaporan dan Perumusan Pembangunan Daerah		SETDA
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Pelaporan dan Perumusan Pembangunan Daerah		SETDA

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		6 Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Provinsi	Persentase informasi publik berkaitan dengan publikasi yang dapat diakses masyarakat	100	DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Mayarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi, kebijakan dan program peme rintah daerah serta Jumlah Kelompok Informasi Masyara kat yang terkoneksi	200	DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data/ infor masi Publik Sektor Pariwisata, Pertani an, Perikanan, Pendi dikan, Kesehatan Pemerintah Daerah yang terupdate	6.000 berita/ informasi	DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi pemda yang dikelola; Jumlah saluran komunikasi non Pemda yang difasilitasi	1 saluran dan 9saluran	DINAS KOMINFO
			2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi			DINAS KOMINFO
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah terhubung nya interkoneksi jaringan internet OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang terlayanidengan layanan Data Center (Colocation, Beckup Data, Monitoring jaringan, Instalasi Virtual Server, Keamanan Sever) se Provinsi Bangka Belitung	1	DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani		DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Nama Domain dan SubDomain yang sesuai dengan standar Pemerintah		DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Presentase realisisasi Kegiatan dan anggaran dengan Rencana Induk		DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikas dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik		DINAS KOMINFO
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks kematangan Keamanan informasi		DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Untuk Keamanan Informasi ada di Kemenkominfo, dan Persandian ada di BSSN, untuk Sub Kegiatan dilak-sanakan oleh 2 seksi yang berbeda, output yang dihasilkan juga memiliki 2 output yang berbeda		DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah layanan keamanan informasi yang diterapkan oleh Pemda		DINAS KOMINFO
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			DINAS KOMINFO
			Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			DINAS KOMINFO
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan penyediaan data dan inormasi serta layanan persandian yang berkualitas	21 kali	DINAS KOMINFO
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya jumlah kebutuhan data statistik sektoral dan jumlah SDM OPD Proinsi dan Kab/ kota yang meningkat pengetahuan tentang mutu statistik daerah yang terintegrasi	60 Orang	DINAS KOMINFO
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Identifikasi kebutuhan Data Statistik Sektoral Provinsi dan Kabupaten Kota	100	DINAS KOMINFO
				Jumlah OPD Provinsi yang mampu menyediakan Metadata Statistik Sektoral	100	DINAS KOMINFO

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			DINAS KOMINFO
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi		DINAS KOMINFO
			Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	100	DINAS KOMINFO
		Peningkatan Kualitas Pelayanaan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi				
4	PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbolNegara.	0	BAKESBANG-POL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah RekomendasiIdeologi dan Wawasan Kebangsaan	4 Rekomendasi , 1 Dokumen	BAKESBANG-POL
				Jumlah Rekomendasi Bela Negara dan Karakter Bangsa	4 Rekomendasi	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelapor an di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Laporan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	4 Laporan	BAKESBANG-POL

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Laporan Bela Negara dan Karakter Bangsa	4 Laporan	BAKESBANG-POL
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas		BAKESBANG-POL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Kebijakan	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah.	Jumlah Laporan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	BAKESBANG-POL
		Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perdaserta perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			BAKESBANG-POL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Peman tapan Kewaspadaan Nasional dan Penanga nan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksa naan Pemantapan Ke waspadaan Nasional dan Pena nganan Konflik Sosial	1 Dokumen	BAKESBANG-POL

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan Pelaksa naan Kebijakan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Penanganan Konflik yang dilaksanakan	4 Kebijakan	BAKESBANG-POL
				Jumlah Kebijakan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang dilaksanakan	4 Kebijakan	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik	4 Rekomenda si	BAKESBANG-POL
				Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	4 Rekomenda si	BAKESBANG-POL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Konflik	4 Laporan	BAKESBANG-POL

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Laporan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	4 Laporan	BAKESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun		BAKESBANGPOL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	BAKESBANGPOL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	4 Kebijakan	BAKESBANGPOL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Rekomendasi	BAKESBANGPOL
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penya-lagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah Laporan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	BAKESBANGPOL

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak	100%	SATPOL PP
				Persentase penegakan pelanggar perda	100%	SATPOL PP
				Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibnas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	44,78%	SATPOL PP
				Persentase personil Satpol pp yang berkompeten	83,75%	SATPOL PP
			Kegiatan Penanganan gangguan keten-traman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		SATPOL PP
			Sub Kegiatan 1: Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pengawalan	50 kali	SATPOL PP
				Jumlah pengamanan demo	24 kali	SATPOL PP
				Jumlah pengamanan aset/piket	360 hari	SATPOL PP
				Jumlah patroli	1080 kali	SATPOL PP
				Jumlah peserta gelar pasukan	600 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 2: Penindakan atas gang guan ketentra man dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	Jumlah penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20 kali	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 3: Koordinasi penyeleng garaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi	Jumlah dokumen kesepakatan rakor (Jumlah Kegiatan rakor)	1 Dokumen	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 4: Pemberdayaan perlin dungan masyarakat dalam rangka ketentra man dan ketertiban umum	Jumlah peserta Satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas	50 Orang	SATPOL PP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas	100 Orang	SATPOL PP
				Jumlah peserta satlinmas yang mampu mengamankan pemilu dan pemilukada	80 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 5: Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah peserta pembinaan mental dan spiritual	2 kali 100 orang	SATPOL PP
				Jumlah latihan fisik	22 kali	SATPOL PP
				Jumlah peserta pelatihan pelaksana an tugas Satpol pp	50 Orang	SATPOL PP
				Jumlah pelatihan instruktur upacara	44 kali	SATPOL PP
				Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya	15 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 6: Pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pembinaan pejabat fungsional satpol pp	4 kali	SATPOL PP
				Jumlah rakor pembinaan Jabatan fungsional Satpol PP	2 kali	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 7: Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Pengadaan motor patroli	5 motor	SATPOL PP
				Pengadaan HT	4 HT	SATPOL PP
				Pengadaan spy cam	2 unit	SATPOL PP
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah aktifitas penegakan perda dan perkada	52 kali	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 1: Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah peserta sosialisasi perda dan perkada	-	SATPOL PP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Sub Kegiatan 2: Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Gubernur	Penindakan pelanggar perda secara non yustisial (masyarakat/badan hukum)	12 Orang	SATPOL PP
				Jumlah razia ASN	20 kali	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 3: Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Gubernur	Penyelidikan pelanggar perda/perkada	10 kasus	SATPOL PP
				Penyidikan pelanggar perda/ perkada	3 kasus	SATPOL PP
				Jumlah rapat koordinasi sekretariat PPNS	4 kali	SATPOL PP
			KegiatanPembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	-	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 1: Pengembangan kappa sitas dan karir PPNS	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	-	SATPOL PP
			4 Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Relawan Pemadam Kebakaran di kabupaten dan kota	0,26	SATPOL PP
			Kegiatan 1: Penyelanggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	-	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 1: Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	-	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Jumlah relawan kebakaran yang mampu menang-gulangi kebakaran	100 Orang	SATPOL PP
			Sub Kegiatan 3: Pengadaan dan pemeli haraan sarana dan pra sarana penanganan kebakaran	Jumlah mobil suplai air mobil pemadam kebakaran	-	SATPOL PP
4	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Program Penanggulangan Bencana			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Pelayanan InformasiPublikasi Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 Media cetak/elektronik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	JumlahDokumen Penyusunan Kajian Kebencanaandi daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/kota	1 Dokumen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	JumlahPengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	1 Unit	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap BencanaDi 7 Kab/Kota	Di 7 Kab/Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana,	1 Laporan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Orang Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	JumlahPengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1Pengendalian Operasi Pusdalops	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	JumlahPenyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 item peralatan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Di 7 Kab/Kota Prov. Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang DalamPenguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penanganan Pascabencana	JumlahPenanganan Pasca Bencana di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah OrangPengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	100 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	JumlahPelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Di 7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	7 Kab/Kota Prov.Kep.Bangka Belitung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah WaktuRespon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Bulan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah WaktuRespon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Bulan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pengerahan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban BencanaDi 7 Kab/ Kota Prov. Kep. Bangka Belitung	37 Orang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah ItemPenyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Prioritas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7 Prioritas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah DokumenPenyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	RKPD 2022						
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Kabupaten Kota Dalam Pengu atan Kelem bagaan Bencana Daerah	7 Kabupaten Kota	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kerja sama Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Mitra	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
5	PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase DAS yang dikelola	1,64	DINAS KEHUTANAN
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kab/ Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas DAS yang dikelola		DINAS KEHUTANAN
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen RP DAS yang direview	6	DINAS KEHUTANAN
				Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS		DINAS KEHUTANAN
				Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah pemegang IPPKH yang mene rapkan teknik kta	6	DINAS KEHUTANAN
				Pemberdayaan Masya rakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS	5	DINAS KEHUTANAN
				Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah kelembagaan pengelolaan DAS provinsi	1	DINAS KEHUTANAN
				Peningkatan Koordina si dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	6	DINAS KEHUTANAN
		2	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Titik Pantau Kualitas Air yang memenuhi status mutu Air dengan kategori baik	30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Titik Pantau Kualitas Udara yang memenuhi status mutu udara	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Persentase Titik Pantau Kualitas Air laut yang Memenuhi Baku Mutu	25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Rekomendasi Hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca yang diterbitkan	1 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang terpublikasi	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah Sungai yang dipantau status mutu airnya	11 Sungai	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Kota yang dipantau status Mutu udaranya	7 Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu	20 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Usulan Parameter Kualitas Lingkungan untuk diakreditasi	37 Parameter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Rekomendasi hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air	81 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Dokumen Daya dukung dan Daya Tampung Beban Pencemaran Air	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Laporan Implementasi Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Lingkungan	1 Laporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara	28 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Titik Pantau Kualitas Air laut	20 Titik Pantau	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Dokumen Prasyarat Akreditasi Laboratorium yang tersusun	4 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	75 Titik Sampling	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Tenaga Analis Laboratorium	23 Orang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah komponen Data Emisi Gas Rumah Kaca yang terolah	4 Komponen Data	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen data dan Informasi Lingkungan Hidup yang disusun	2 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3 Peningkatan tata kelola kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Pengelolaan Hutan	90	DINAS KEHUTANAN
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen rencana tata hutan KPH	7	DINAS KEHUTANAN
			Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah rancang bangun tata hutan UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sigambir Kotawaringin	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Sungai Sembulan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah rancang bangun tata hutan KPHP Gunung Duren	1	DINAS KEHUTANAN
			Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen pembagian blok/ petak pengelolaan hutan KPH		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/ petak pengelolaan hutan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/petak pengelolaan hutan UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/ petak pengelolaan hutan KPHP Muntai Palas	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/ petak pengelolaan hutan KPHP Unit IX-Sungai Balar (Muntai Palas)	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/ petak pengelolaan hutan KPHL Belantu Mendanau	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen pembagian blok/ petak pengelolaan hutan KPHP Unit XI - Gunung Tajam (Belantu Mendanau)	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan PengelolaanHutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	8	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sigam bir Kotawaringin	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Sungai Sembulan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Muntai Palas	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Belantu Mendanau	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan UPTD KPHP Gunung Duren	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah izin pemanfaatan HP dan HL		DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah Honorer Operator GIS	1	DINAS KEHUTANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	1	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi dan Sin kronisasi Pengendali an Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfa atan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengenda lian izin usaha atau kerjasama pemanfa atan di kawasan hutan produksi	2	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah koordinasi dan sinkrinisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	1	DINAS KEHUTANAN
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi	2	DINAS KEHUTANAN
			Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Dengan Tujuan Khusus Untuk Kepentingan Religi	Jumlah izin KHDTK		DINAS KEHUTANAN
			Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah Rencana Pengelolaan	1	DINAS KEHUTANAN
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	42	DINAS KEHUTANAN
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTn RL	1	DINAS KEHUTANAN
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat UPTD KPHP Muntai Palas		DINAS KEHUTANAN
				Luas hutan rakyat UPTD KPHP Muntai Palas	10	DINAS KEHUTANAN
			Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan kota yang dibangun	2	DINAS KEHUTANAN
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas penghijauan lingkungan	20	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Rambat Menduyung	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	2	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Bubus Panca	4	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungan di UPTD KPHP Sungai Sembulan	4	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungana di UPTD KPHP Muntai Palas	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungana di UPTD KPHP Belantu Mendanau	2	DINAS KEHUTANAN
				Luas penghijauan lingkungana di UPTD KPHP Gunung Duren	2	DINAS KEHUTANAN
			Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah persemaian sederhana		DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Rambat Menduyung	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Bubus Panca	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Sungai Sembulan	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Muntai Palas	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHL Belantu Mendanau	1	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah persemaian sederhana UPTD KPHP Gunung Duren	1	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas kaji terap teknologi RHL	2	DINAS KEHUTANAN
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalamRangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengembangan RHL	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Luas sumber benih	20	DINAS KEHUTANAN
			PenetapanPengadaanBenihdanPengedarBenih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar	3	DINAS KEHUTANAN
			Sertifikasi Sumber Benih	Luas sumber benih yang disertifikasi	20	DINAS KEHUTANAN
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah dokumen pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	1	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luas penurunan kebakaran hutan dan lahan	1582	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah penanganan perkara pidana kehutanan	2	DINAS KEHUTANAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan aktivas perusakan hutan	2	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah honorer pembantu Polhut	30	DINAS KEHUTANAN
			Pencegahan dan Pem-batasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah pengendalian kerusakan kawasan hutan	6	DINAS KEHUTANAN
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah penanganan aktifitas ilegal pemanfaatan hasil hutan	6	DINAS KEHUTANAN
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi perlindungan hutan	1	DINAS KEHUTANAN
			Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan		DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
				Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	4	DINAS KEHUTANAN
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin usaha hasil hutan bukan kayu	1	DINAS KEHUTANAN
				Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	4	DINAS KEHUTANAN
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah izin pengolahan hasil hutan kayu		DINAS KEHUTANAN
				Pembinaan dan Pelaksanaan Pengo-lahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah pembinaan	1	DINAS KEHUTANAN
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi	1	DINAS KEHUTANAN
		4	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20	DINAS KEHUTANAN
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewena-ngan Daerah Provinsi	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang di konservasi	5	DINAS KEHUTANAN

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pengendalian dan Pengawasan Tum-buhan dan SatwaLiar yangtidakDilindungidan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi yang dikendalikan dan diawasi	5	DINAS KEHUTANAN
			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah kawasan yang meimiliki nilai ekosistem penting	2	DINAS KEHUTANAN
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang dikuatkan kapasitas dan keberdayaannya	1	DINAS KEHUTANAN
			Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah daerah penyangga yang dikelola	1	DINAS KEHUTANAN
		5 Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1 Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase Tersusnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	0,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2 Kali Penyelenggaraan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Beserta turunannya yang tersusun	1 Dokumen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH yang terfasilitasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Jumlah Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diawasi	100Usaha/Kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang terfasilitasi	18 Izin Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Rekomendasi Hasil Kinerja KPA Kabupaten/Kota	7 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	100 Usaha/Kegiatan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			3 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Aduan Masyarakati yang diverifikasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			4 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang terbina	0,25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Pendidikan, Pelatihan ,dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	7 Kabupaten/ Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok swadaya Masyarakat yang Terbina	35 Kelompok Masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	RKPD 2022					
	Prioritas Pembangunan	Strategi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang diselenggarakan	5 Kali	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	0,8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah JenisPenghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	3 Jenis Penghargaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi	14 Sekolah Adiwiyata	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Bank Sampah yang mendapatkan penghargaanTingkat Provinsi	3 Bank Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Kota calon Penerima Adipura yag dibina	7 Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang Tersusun	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional	1 Laporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional	1 Laporan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4.2.2. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV.10
Keselarasan Antara permasalahan, isu strategis dan Prioritas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No.	Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Daerah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Rendahnya harga komoditi pertanian seperti sawit, Karet. Dan lada	1	Percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pertanian, kelautan, pariwisata, perdagangan dan UMKM	1	Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2	Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani				
3	Produktivitas bahan pangan terutama padi masih jauh di bawah konsumsi masyarakat				
4	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produkproduk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik kamoditas pangan mau pun komoditas non pangan				
5	Brlum optimalnya produktivitas perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya			2	Pembangunan Bahari
6	Belum optimalnya penerapatan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar				
7	Objek dan destinasi wisata belum dikelola dengan baik			3	Pembangunan Pariwisata
8	Belum memadainya sarana dan prasana penunjang untuk pengembangan sektor pariwisata				
9	Rendahnya kualitas Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan				
10	Rendahnya Daya Saing produk UMKM				
12	Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.	2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
13	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.				

No.	Permasalahan	Isu Strategis		Prioritas Daerah	
1	*2*	*3*		*4*	
14	Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
15	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur strategis (energi, pelabuhan, air bersih)				
16	Angka Rata-rata lama sekolah yang masih rendah dimana tahun 2017 sebesar 7,78 tahun	3	Peningkatan Sumberdaya manusia yang berkualitas	5	Pembangunan Pendidikan
17	Tingginya angka anak putus sekolah (Drop Out) khususnya pendidikan menengah				
18	Usia harapan hidup yang masih rendah dimana tahun 2017 sebesar 69,99 tahun	4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	6	Pembangunan Kesehatan
19	Angka kematian ibu yang masih tinggi				
20	Kurangnya penerapan perda yang diterbitkan.	5	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal	7	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
21	Kurangnya penerapan Pergub dan Keputusan Gubernur yang diterbitkan				
22	Rendahnya tingkat pelayanan publik				
23	Rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD				
24	Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar (illegal loging)	6	Peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan bencana		
25	Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah				
26	Masih lemahnya koordinasi dalam penanganan bidang kebencanaan baik pra, saat terjadi bencana maupun pasca bencana				

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Melalui Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2022 pada tanggal 19 Februari 2021 secara daring, melalui video conference, Kementerian Bappenas selaku coordinator penyusunan RKP 2022 menyampaikan Tema dan Prioritas Pembangunan tahun 2022. Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Bappenas/PPN Suharso Manuharfa yang dihadiri oleh para Kementerian lembaga pemerintah non-kementerian, Bappeda Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, pimpinan BUMN dan KADIN. Acara tersebut membahas pertimbangan asumsi pandemi Covid-19 selesai di 2022 dan skenario agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 sebagai bagian penting dalam Kerangka Ekonomi Makro RKP 2022 dengan mengusung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Tahun 2022

Prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional sebagaimana Tabel IV.8. Matrik ini menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetap program dan kegiatan yang selaras dengan rencana pembangunan nasional tahun 2022.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan sasaran antara lain: a) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi; b) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antara lain: a) meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan jawa dan luar jawa); b) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; c) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; d) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah;
3. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran pembangunan antara lain: a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b) perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; c) pemenuhan layanan dasar; d) peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; e) pengentasan kemiskinan; f) peningkatan produktivitas dan daya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; b) meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; c) meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; d) menguatnya modernisasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; e) meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; (f) meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran pembangunan antara lain: a) meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; b) meningkatnya konektivitas wilayah; c) meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan; (d) meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; (e) meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan sasaran pembangunan antara lain: (a) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (c) pembangunan rendah karbon.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan antara lain: (a) konsolidasi demokrasi; (b) optimalisasi kebijakan luar negeri; (c) penegakan hukum nasional yang mantap; (d) reformasi birokrasi dan tata kelola; (e) menjaga stabilitas keamanan nasional.

Untuk mencapai 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. penyelarasan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.8.

Tabel IV.11
Keselarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas dan Sasaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2022	Prioritas Daerah I (utama)		Prioritas Daerah II (Penunjang)		Sasaran Daerah	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
1	Transformasi Ekonomi	1	Peningkatan Ekonomi Masyarakat			1	Menurunkan tingkat pengangguran
						2	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja
						3	Menurunkan tingkat kemiskinan
						4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
		1	Pembangunan Agropolitan			1	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian
		2	Pembangunan Bahari			2	Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan
		3	Pengembangan Pariwisata			3	Meningkatkan Laju Pertumbuhan kunjungan wisatawan
2	Pembangunan SDM	1	Pembangunan Pendidikan			1	Meningkatkan kesempatan pendidikan
						2	Meningkatkan kualitas pendidikan
				1	Pembangunan Sosial	3	Meningkatkan kesejahteraan anak
						4	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
						5	Meningkatkan pembangunan resposif gender
						6	Meningkatkan kualitas pemuda
						7	Meningkatkan pembangunan olah raga
						8	Meningkatkan kesejahteran sosial

No	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2022	Prioritas Daerah I (utama)		Prioritas Daerah II (Penunjang)		Sasaran Daerah	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
		2	Pembangunan Kesehatan			1	Meningkatnya kesehatan masyarakat
				1	Pembangunaan Berdemokrasi	1	Meningkatkan kebebasan sipil
						2	Meningkatkan hak-hak politik
						3	Meningkatkan peran lembaga demokrasi
3	Pembangunan Infrastruktur			1	Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan	1	Meningkatkan ketersedian infrastruktur pekerjaan Umum
						2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar
						3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan
4	Penyederhanaan Birokrasi	1	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik			1	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan
5	Penyederhanaan Regulasi						

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN 2020-2024): **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, sesuai dengan Rancangan RKP 2022, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6,0 persen (*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 4,9-5,4 persen; Jawa-bali sebesar 5,5-5,9 persen; Nusa Tenggara sebesar 4,8-5,4 persen; Kalimantan sebesar 5,8-6,3 persen; Sulawesi sebesar 6,9-7,6 persen; Maluku sebesar 6,6-7,3 persen dan Papua sebesar 5,4-6,1 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen (*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 9,2 persen; Jawa-bali sebesar 8,5 persen; Nusa Tenggara sebesar 17,1 persen; Kalimantan sebesar 5,8 persen; Sulawesi sebesar 9,7 persen; Maluku sebesar 13,1 persen dan Papua sebesar 23,8 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 6,24-5,52 persen (*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,8-5,1 persen; Jawa-bali sebesar 6,8-6,1 persen; Nusa Tenggara sebesar 4,0-3,2 persen; Kalimantan sebesar 5,0-4,3 persen; Sulawesi sebesar 5,3-4,5 persen; Maluku sebesar 6,3-5,6 persen dan Papua sebesar 4,4-3,7 persen; dan
4. Sasaran laju inflasi 2,0-4,0.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel IV.7 dibawah.

Tabel IV.12

Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Indikator	Tahun 2022		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-6,0%	4,9-5,4	3,22
Tingkat Kemiskinan %	8,5-9,0%	9,2	4,55-4,99
Tingkat Pengangguran %	6,24-5,52 %	5,8-5,1	4,05-4,55
Laju Inflasi (%)	3,00%	5,3	3,5-4,0

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Permedagri 17/2021

4.2.4. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tabel IV.13

Keselarasan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Nasional dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
1	**Transformasi Ekonomi**	**PP 6**	**Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi**	**1**	**Peningkatan kesempatan kerja**	**1**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	4%	DISNAKER
								Persentase Pelatihan Kerjasama dengan sektor swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk penyedia instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	20%	DISNAKER
								Meningkatnya Kom-petensi dan Produktivitas	15 Perusahaan	DISNAKER
						2	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase Tenga Kerja Menurunnya Angka Pencari Kerja	5%	DISNAKER
		PP 5	**Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasI**	**2**	**Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja**	**1**	**Program Pelayanan Izin Simpan Pinjam**	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan	20%	DINAS KUKM
						2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	Persentase Koperasi Aktif	70%	DINAS KUKM
						3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	Persentase Koperasi berkualitas	50%	DINAS KUKM
						4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	Persentase SDM Koperasi yang terlatih	30%	DINAS KUKM

No	RKP 2022		RKPD 2022					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program	Perangkat Daerah
							Indikator / Target	
1	2	3	4		5		6 / 7	8
					5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	Persentase Koperasi yang diberdayakan — 20%	DINAS KUKM
					6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro**	Persentase UMKM yang diberdayakan — 1%	DINAS KUKM
					7	**Program Pengembangan UKM**	Persentase UMKM yang dikembangkan — 1%	DINAS KUKM
			3	**Peningkatan Pro mosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan**	1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Jumlah Kebijakan Daerah Yang Mendukung Investasi — 1 Kebijakan	DINAS PMPTSP
					2	**Program Promosi Penanaman Modal**	Jumlah Realisasi Investasi — 1,9 Trilyun	DINAS PMPTSP
					3	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP — 100%	DINAS PMPTSP
					4	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Meningkatnya persentase capaian realisasi investasi — 15%	DINAS PMPTSP
					5	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP — 100%	DINAS PMPTSP
			4	**Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja**	1	**Program Hubungan Industrial**	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial	DISNAKER
					2	**Program Pengawasan**	Persentase pengawasan	DISNAKER

No	RKP 2022		RKPD 2022					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
							Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						Ketenagakerjaan	Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan		
			5	**Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin**	**1**	**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan		DINAS SOSIAL
					2	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani		DINAS SOSIAL
					3	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah		DINAS SOSIAL
					4	**Program Rehabilitasi Sosial**	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di PSBL		DINAS SOSIAL
					5	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		DINAS SOSIAL
			6	**Peningkatan pendapatan masyarakat desa**	**1**	**Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		DINAS PEMDES
					2	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif. Persentase lembaga adat desa yang aktif		DINAS PEMDES
					3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan		DINAS PEMDES

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		PP 3	**Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan**	**1**	**Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan**	**1**	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase ketersediaan saprodi pertanian	15%	DINAS PERTANIAN
								Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan	69,58	DINAS PERTANIAN
								Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura	14,21	DINAS PERTANIAN
								Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	10,17	DINAS PERTANIAN
								Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)		
								Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	5%	DINAS PERTANIAN
								Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak	356,32	DINAS PERTANIAN
								Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	100	DINAS PERTANIAN
								Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	90	DINAS PERTANIAN
								Persentase ketersediaan pakan ternak	90	DINAS PERTANIAN
						2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian	15	DINAS PERTANIAN

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						1	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	75	DINAS PERTANIAN
						2	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4	DINAS PERTANIAN
						3	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	Dokumen Perizinan usaha pertanian	1	DINAS PERTANIAN
						1	**Program Penyuluhan Pertanian**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	80	DINAS PERTANIAN
		PP 4	**Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan**	**4**	**Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**	**1**	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						1	**Program Pengembangan perikanan Tangkap**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						2	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						3	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						1	**Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan**	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3,30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PP 7	**Peningkatan ekspor**	**7**	**Peningkatan peran**	**1**	**Program 2: Program**	Persentase	42,85%	DINAS KEBUDAYAAN

No	RKP 2022		RKPD 2022					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi	Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
						Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
		bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	**serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif**		**Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif		DAN PARIWISATA
				1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	70%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				1	**Program Pembinaan Sejarah**	Persentase Pembinaan Sejarah	35%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				2	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	29,14%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Persentase Kemitraan Pariwisata yang terbentuk	82,85%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Persentase Assesor bidang yang terlatih	50%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				1	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				2	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	50 nilai	DNAS PEKERJAAN UMUM
			Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan		**Program Pengelolaan Pelayaran**	Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi	67 persen	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
								Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	67 persen	DINAS PERHUBUNGAN
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26,47 persen	DINAS PERHUBUNGAN
2	**PEMBANGUNAN SDM**	**PP 4**	**Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**	**1**	**Peningkatan akses pelayanan pendidikan**	**1**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Persentase GTK Bersertifikasi	80	DINAS PENDIDIKAN
								Nilai rata-rata UK GTK SMA	60	DINAS PENDIDIKAN
								jumlah medali siswa dalam kompetisi nasional /Internasional	4	DINAS PENDIDIKAN
								APK SMA	43,43	DINAS PENDIDIKAN
				2	**Peningkatan mutu layanan pendidikan**	**1**	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	80%	DINAS PENDIDIKAN
						2	**Program Pengembangan Kurikulum Dan Pengendalian Perizinan Pendidikan**	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	75%	DINAS PENDIDIKAN
						3	**Program Bahasa Dan Sastra**	persentase minat siswa terhadap bahasa dan sastra	70%	DINAS PENDIDIKAN
		PP 5	**Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**	**3**	**Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak**	**1**	**Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)**	Persentase SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	90,00%	DP3ACSKB

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						2	**Program Perlindungan Khusus Anak**	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak	90,00%	DP3ACSKB
		PP 1	**Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan**	**4**	**Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang**	**1**	**Program Pengendalian Penduduk**	persentase kab/kota yang memiliki Dokumen pengendalian penduduk	71,42%	DP3ACSKB
						2	**Program Pendaftaran Penduduk**	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	78,33%	DP3ACSKB
						3	**Program Pencatatan Sipil**	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	98,33%	DP3ACSKB
						4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama	37,84%	DP3ACSKB
						5	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Persentase penyediaan penyajian database kependudukan tingkat provinsi yang akurat	100%	DP3ACSKB
				5	**Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**1**	**Program Perlindungan Perempuan**	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan	90,00%	DP3ACSKB

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
				6	**Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender**	**1**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	Persentase Kegiatan yang responsif gender	80%	DP3ACSKB
						2	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	Persentase Perempuan kepala Keluarga yang di berdayakan	12,66%	DP3ACSKB
						3	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	Persentase OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	78&	DP3ACSKB
				7	**Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi**	**1**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda**	Persentase Pemuda Yang Berprestasi	0,1	DISKEPORA
								Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan	0,05	DISKEPORA
						2	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	Persentase Organisasi Pemuda yang memiliki Standarisasi	0,1	DISKEPORA
				8	**Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga**	**1**	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	Persentase atlet pelajar yang berprestasi	40,48	DISKEPORA
		pp 2	**Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**	**9**	**Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial**		**Program Rehabilitasi Sosial**	Prosentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti Non Pemerintah	50%	DINAS SOSIAL

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
							Program Penanganan Bencana	Prosentase korban bencana yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	50%	DINAS SOSIAL
							Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	0.5	DINAS SOSIAL
		pp 3	**Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**	**9**	**Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat**	**1**	**Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Minimal Utama	30 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Peningkatan Pemeriksaan Laboratori um Kesehatan	10 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memakai Sistem Informasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	80 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Status Kesehatan Masyarakat	76,45 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	100 persen	DINAS KESEHATAN
								Persentase Fasilitas Pela yanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Iinformasi Kesehatan yang Dipersyaratkan	50 persen	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2022		RKPD 2022					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
							Indikator	Target	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
					2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	80 persen	DINAS KESEHATAN
					3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	Persentase Sediaan Farasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang Memenuhi Syarat	45 persen	DINAS KESEHATAN
					4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	Persentase Posyandu Aktif	63 persen	DINAS KESEHATAN
			10	**Peningkatan pelayanaan kesehatan masyarakat**	**1**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Pelayanan,sarana dan prasarana yang tersedia di rumah Sakit	80%	RSUP
					2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	80%	RSUP
					3	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			RSJ
					4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**			RSJ

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		PP 1	**Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**	**1**	**Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi**	**1**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.**	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.	0	BAKESBANGPOL
				2	**Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat**	**1**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Indeks Kinerja Ormas		BAKESBANGPOL
				3	**Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)**	**1**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**			BAKESBANGPOL
						2	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun		BAKESBANGPOL
						3	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	Persentase pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak	100%	SATPOL PP
								Persentase penegakan pelanggar perda	100%	SATPOL PP

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
								Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibnas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	44,78%	SATPOL PP
								Persentase personil Satpol pp yang berkompeten	83,75%	SATPOL PP
						4	**Program Penanggulangan Kebakaran**	Cakupan Relawan Pemadam Kebakaran di kabupaten dan kota	0,26	SATPOL PP
				4	**Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi**	**1**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada	15%	BAKESBANGPOL
						2	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**			BAKESBANGPOL
		PP 2	**Meningkatkan kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**	**5**	**Peningkatan Tata Kelola pelestarian Kebudayaan**	**1**	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Persentase Kebudayaan yang dikelola	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						2	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**	**PP 1**	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**	**1**	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum**	**1**	**Program Penyelenggaraan Jalan**	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	96,56%	DINAS PUPR
						2	**Program Pengembangan Sumber Daya Air**	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	5%	DINAS PUPR
								Persentase Penyediaan Air Baku	2%	DINAS PUPR
								Rasio Irigasi	50%	DINAS PUPR
				2	**Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang**	**1**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	83%	DINAS PUPR
				3	**Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi**	**1**	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	96,09%	DINAS PUPR
				4	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman**	**1**	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	74,65%	DINAS PERKIM
						2	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan persampahan	15%	DINAS PERKIM

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	92,50%	DINAS PERKIM
						4	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Drainase**	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	28,50%	DINAS PERKIM
						5	**Program Pengembangan Permukiman**	Persentase Permukiman di KSP dalam kondisi baik	3,91%	DINAS PERKIM
						6	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	Persentase Luas Kawasan yang Tertata	30%	DINAS PERKIM
						7	**Program Pengembangan Perumahan**	persentase rumah akibat bencana yang tertangani	100%	DINAS PERKIM
						8	**Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	Persentase Permukiman yang terfasiltasi oleh PSU	50%	DINAS PERKIM
		PP 2	**Infrastruktur Ekonomi**	**5**	**Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan**	**1**	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)**	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26,47	DINAS PERHUBUNGAN
						2	**Program Pengelolaan Pelayaran**	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	67%	DINAS PERHUBUNGAN
						3	**Program Pengelolaan Penerbangan**	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara	20%	DINAS PERHUBUNGAN
		PP 2	**Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**	**1**	**Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**1**	**Program Penanggulangan Bencana**			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		PP 1	**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**	**2**	**Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai**	**1**	**Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**	Persentase DAS yang dikelola	1,64	DINAS KEHUTANAN
				3	**Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara**	**1**	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Persentase Titik Pantau Kualitas Air yang memenuhi status mutu Air dengan kategori baik	30%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Titik Pantau Kualitas Udara yang memenuhi status mutu udara	50%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Titik Pantau Kualitas Air laut yang Memenuhi Baku Mutu	25%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Jumlah Rekomendasi Hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca yang diterbitkan	1 Rekomendasi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Persentase Data dan Informasi Lingkungan Hidup yang terpublikasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				4	**Peningkatan tata kelola kehutanan**	**1**	**Program Pengelolaan Hutan**	Persentase Pengelolaan Hutan	90	DINAS KEHUTANAN
				5	**Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan**	**1**	**Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	20	DINAS KEHUTANAN

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
		PP 3	**Pembangunan Rendah Karbon**	**6**	**Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan**	**1**	**Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup**	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	75%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						2	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	Persentase Peningkatan Ketatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	40%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						3	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	Persentase Aduan Masyarakat yang diverifikasi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Laporan Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang Tersusun	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	**PENYEDERHANAAN BIROKRASI**	**PP 3**	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**1**	**Meningkatkan Tata kelola pengawasan**	**1**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	< 5~~%~~	INSPEKTORAT
						2	**Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi**	Persentase Perangkat Daerah yang tingkat maturitas SPIP-nya level 3		INSPEKTORAT
		PP 4	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**2**	**Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan**	**1**	**Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah**	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	95	BAPPEDA

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
						2	**Program Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	BAPPEDA
						3	**Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	BAPPEDA
				3	**Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah**	**1**	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	98	BIRO PEREKONOMIAN
								Persentase Tata Kelola Penataan Adm. Umum	95%	BIRO PEREKONOMIAN
								Prosentase Pembinaan Mental Spiritual	100%	BIRO PEREKONOMIAN
				4	**Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)**	**1**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	Terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan dan penataan wilayah	7 dokumen penataan	BIRO PEMERINTAHAN
		PP 1	**Konsolidasi Demokrasi**	**6**	**Peningkatan tata kelola pemerintah berbasis elektronik**	**1**	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**			DINAS KOMINFO
						2	**Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi**			DINAS KOMINFO
						3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**			DINAS KOMINFO
						4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			DINAS KOMINFO
						5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			DINAS KOMINFO

No	RKP 2022			RKPD 2022						
	Prioritas Nasional	Program Prioritas		Strategi		Program		Kinerja Program		Perangkat Daerah
								Indikator	Target	
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8*
				7	**Peningkatan kompetensi dan profesional ASN**	**1**	**Program Kepegawaian Daerah**	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	73%	BKPSDM
								Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	5%	BKPSDM
								Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	100%	BKPSDM
						2	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Persentase ASN yang tersertifikasi	90%	BKPSDM
								Nilai Akreditasi Diklat	81	BKPSDM
								Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	17,18%	BKPSDM
								Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi	89,29%	BKPSDM
								Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	26,06%	BKPSDM
5	**PENYEDERHANAAN REGULASI**	**PP 4**	**Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**	**5**	**Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah**	**1**	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional	63,46%	BKPSDM
								Meningkatnya PHD yang tertata	90%	BIRO HUKUM

4.2.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Setelah pelaksanaan *Millenium Development Goals (MDGs)* periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat top down, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu *Sustainability Development Goals (SDGs)* sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh *MDGs SDGs* memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan *SDGs* untuk agenda paska 2015, yaitu :

(1) *SDGs* tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *MDGs* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi;

(2) *SDGs* akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional;

(3) *SDGs* akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*). Sampai dengan saat ini, konsep *SDGs* akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir.

Berikut ini tabel IV.14 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs.*

Tabel IV.14
Strategi dan Program Prioritas RKPD 2022
Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64			DINSOS PEMDES
			Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,54	22,50	22,58	DINAS PUPR PERKIM
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapat kan beasiswa miskin	100	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapat kan beasiswa miskin	100	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN	100			DINAS KESEHATAN
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	75,09			DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kepala Keluarga pe rempuan miskin yang diberdaya kan Persentase peningkatan perempu an pelaku IR	8,86%	5,31%	0,74%	DP3ACSKB
			Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase PMKS (fakir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	24,27			DINSOS PEMDES
			Program Pengembangan Perdagang an	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagang an	10%			DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan keterse diaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%			DISPERINDAG
			Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP sub sektor Tanaman Pangan	97,08%			DISTAN PANGAN
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiski nan yang	35%			DISKOMINFO

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				dapat diakses oleh masyarakat				
			Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahte ra dan Sejahtera I Persentase Kampung KB	6,35	6,33	85%	DP3ACSKB
			Program Peningkatan Pe ngawasan Ketenagakerja an, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	75%			DISNAKER
				Persentase penurunan kecelakaan kerja	0,30%			DISNAKER
2	Mengentaskan kelaparan ketahan an pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan agriculture berkelanjutan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	83			DISTAN PANGAN
				Persentase pangan yang aman dikonsumsi	86			DISTAN PANGAN
			Program Ketersediaan Dan Kerawan an Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersedia an	84			DISTAN PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari kate gori penduduk rawan pangan	1,1			DISTAN PANGAN
			Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	69,21%	0	77,42%	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	70%			DINAS PUPR PERKIM
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14,65%			DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Kawasan Budidaya	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	-			DISTAN PANGAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pertanian	Holtikultura					
				Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	-			DISTAN PANGAN
				Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	-			DISTAN PANGAN
			Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-			DISTAN PANGAN
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen			DLHK
3	Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua dan segala usia	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat	75,09%			DINKES
			Proram Pencegahan dan Pengendali an Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	82,83%			DINKES
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	35%			DISKOMINFO
		Meningkatkan Pengendaliaan Penyalahgunaan Napza	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	40			RSJ
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Nap za yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	30			RSJ
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penya lahgunaan napza	700	0	0	BAKESBANGPOL
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban napza	21,28			DINSOS PEMDES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need	9,3	8,9		DP3ACSKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kab/kota yang di bina			100%	
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	peningkatan akses pelayanan pendidikan	Program Peningkatan Dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	APK SMA	40,63%	39,04	42	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengem bangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63%	35,48	37	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengem bangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	26,21%	58,25	65	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	91,5%	92,5%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	63%	65%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	95%	80%	83%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengem bangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	61,4%	65%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	UN dihapus	UN dihapus	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengem bangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	45%	64,58%	75%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	UN dihapus	UN dihapus	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengem bangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	33,3%	55,5%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat	5.08%			DISBUDPARORA

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				provinsi yang memperoleh medali				
			Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5.08%			DISBUDPARORA
			Program Peningkatan Pemberdaya an Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	22.87%			DISBUDPARORA
			Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	Presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	75%	60%	DKPUS
			Program Pengembangan Standari sasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16.67%			DISBUDPARORA
			Program Peningkatan Pemberdaya an Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6.41%			DISBUDPARORA
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	7%			DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	6%			DINAS PERHUBUNGAN
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	35%			DISKOMINFO
			Program Peningkatan Penyelengga raan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	90%			DISKOMINFO
			Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahtera an rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang tersusun	80%	98%	80%	BIRO KESRA
			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dibuat	80%	98%	80%	BIRO KESRA
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Bahan Usulan Rekomen dasi Bidang Pendidikan	2 Berkas	-	2 Berkas	BIRO KESRA

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					
			Program Pengelolaan Bantuan Ope rasional Sekolah (Bos DAK)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%			DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan dan Pengem bangan Pelayanaan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38.60%			DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%			DINAS PENDIDIKAN
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja	7,52%	27,58%		DP3ACKB
		Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, peng anggaran dan pelaporan kinerja	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3,58	6,5		DP3ACKB
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	16,83	16,54		DP3ACKB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khu sus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	2,3	3,1		DP3ACKB
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kegiatan yang responsif gender			90,62%	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Perempu an Pelaku IR			0,74%	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak			90,62%	
		Menekan tingkat kekerasan terhadap	Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan SDM Perlindungan Perempuan			0,040%	

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		perempuan dan anak						
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak			0,30%	
			Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak				DINKES
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67%			DINSOS PEMDES
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	35%			DISKOMINFO
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak	57,14	57,14		DP3ACKB
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan SDM da lam Pemenuhan Partisipasi anak			0,19%	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapat kan hak dalam pelayanan, perlin dungan dan rehabilitasi sosial	18,99%			DINSOS PEMDES
			Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14,25%			DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	10,2%	11,18		DP3ACKB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	41,66		DP3ACKB
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kegiatan yang responsif gender			90,62%	

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6	Menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi Persentase Berakses Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	69,21%	0	77,42	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	88,85%			DINAS PUPR PERKIM
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak	85,65%	0	85,86	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85,10%			DINAS PUPR PERKIM
		Pengendalian kualitas air	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS	2%			DLHK
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	100%	100%	DLHK
7	Menjamin akses energy yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	Program Pengembangan Pertamba ngan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Persentase Perusahaan pertamba ngan non logam yang menerap kan good mining practices	65%	31,40%	80%	DINAS ESDM
			Program Pengembangan Pertamba ngan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertamba ngan logam yang menerapkan good mining practices	65%	65%	-	DINAS ESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	49%	0%	-	DINAS ESDM
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplemen tasikan	75%	76,92%	90 %	BIRO EKBANG
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;	1,04%			DISPERINDAG
			Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar	2%			DISPERINDAG

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase penggunaan EBT	6,84%	30,8%	10,94%	DINAS ESDM
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	65%	67,2%	-	DINAS ESDM
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	65%	65%	-	DINAS ESDM
		Peningkataan potensi penggalian sumber-sumber Pedapat an asli daerah untuk peman faatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	80%	87,5 %	90 %	BIRO EKBANG
			Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu Barel			DINAS ESDM
8	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inclusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	73%	91,2 %	90 %	BIRO EKBANG
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1			DMPTSP
			Program Peningkatan Promosi Penanaman	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3			DMPTSP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Modal					
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.45%			DMPTSP
			Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20%			DISNAKER
			Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5.24%			DISPERINDAG
			Program Peningkatan Pemberdaya an Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja	10.20%			DISBUDPARPORA
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6.84%			DISBUDPARPORA
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang beker ja di sektor perikanan tangkap	6.84%	2,63%	6,87	DKP
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1.16%	0,36%	1,2	DKP
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	35%			DISKOMINFO
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	95,51%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	14%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha	15%			DINAS KUKM
			Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	0 orang		DINSOS PEMDES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Masyarakat					
				Persentase KPM yang aktif	3,24%	0,00%		DINSOS PEMDES
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan indus tri yang inklusif dan berkelan jutan serta mendorong inovasi	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	75%			DINAS PUPR PERKIM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruk tur air baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan volume air baku	20%			DINAS PUPR PERKIM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruk tur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Penyelengga raan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86%			KOMINFO
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	20%			DINAS PERHUBUNGAN
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	30%			DINAS PERHUBUNGAN
10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan luar negeri							
11	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan							

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	berkelanjutan							
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruk tur dasar yang layak bagi masyarakat	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase peningkatan aksesibi litas Kawasan permukiman Per sentase lingkungan yang tertata	10%	0	20%	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase peningkatan aksesibi litas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi Persentase bangunan yang tertata	30%	0	60%	DINAS PUPR PERKIM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase berkurangnya luasan lingkungan kumuh	0,0043%	0	0,0030%	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	86%			KOMINFO
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Peningkatan penyelenggara an perlindungan dan pengelo laan lingkungan yang ber wawasan lingkungan dan berkelanjutan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%			DLHK
			Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplementasik an kajian lingkungan hidup	25%			DLHK
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolah an sampah yang ramah lingkungan	5%			DLHK
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan	2	2	2	DLHK
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%			UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK
			Program Pengembangan Pertam bangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	12%	0%	-	DINAS ESDM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	15,66 Miliar	-	DINAS ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	62%	0%	-	DINASESDM
			Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	63,64%	0%	-	DINAS ESDM
				Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air	2,00%	0%	-	DINASESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	0%	-	DINAS ESDM
			Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola	75%	75%	100%	DLHK
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	1,20%			DINAS PERHUBUNGAN
		Pengembangan TPA Regional	Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20.00%			DINAS PERHUBUNGAN
			Program Kecipta Karyaan Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di Pengembangan TPA Regional	13%	0	24%	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional	3,4531%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	2%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional				DINAS PUPR PERKIM
			Program Pengembangan Sda	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	50%			DINAS PUPR PERKIM
13	Membuat langkah aksi untuk menghadapi perubahan iklim dan	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan	76%			BPBD

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	dampaknya			Bencana				
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20%			DINSOS PEMDES
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	2,80%			DISTAN PANGAN
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	25%			DISKOMINFO
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	90%			DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%			SATPOL PP
			Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang diintervensi dalam penanggulangan bencana	85%			BPBD
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	20%			DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%			RSUP
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	50%			DINAS PUPR PERKIM
				Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	36,80%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabiliasi rumah akibat bencana	0%	0%	0%	DINAS PUPR PERKIM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,96%			DINAS PUPR PERKIM
				Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,17%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Rehabilitasi Dan Re konstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	80%			BPBD
			Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kon disi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%			DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	85%			RSJ
			Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	0,525			DINAS PUPR PERKIM
				Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	45,00%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	panjang penahan tanah akibat erosi	64,00%	20,33%	20,33%	DINAS PUPR PERKIM
				Persentase DAS kritis yang di kelola	20,33%			DLHK
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	100%	100%	DLHK
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%			DINAS PUPR PERKIM
				Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	70%			DINAS PUPR PERKIM
			Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	0,27%	0	0,40%	DINAS PUPR PERKIM
			Program	Persentase panjang	97%			DINAS PUPR

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kebinamargaan	jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				PERKIM
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	83%			DINAS PUPR PERKIM
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan laut, samudra dan sumberdaya maritime yang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	Program Pengembangan Pengelola an Ruang Laut	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	825.077	627.620	835.077	DKP
		Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta pene gakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Pengelola an Ruang Laut	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2,13%	0 %	3%	DKP
				Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	75	0 %	85	DKP
			Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	68,96	85	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	18%			DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	219.300	219.034	227.300	DKP
				Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	110	106	112	DKP
		Pengembangan Kawasan Stra tegis Minapolitan Lepar Pongok	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikan an Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	22.500	n/a	31.000	DKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada			DLHK
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	30%			DINAS PERHUBUNGAN
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	75			DINAS PUPR PERKIM
		Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik	35.000	n/a	144.000	DKP
			Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	30%			DINAS PERHUBUNGAN
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	75			DINAS PUPR PERKIM
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	13.125	n/a	53.125	DKP
			Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplem tasikan	75			DINAS PUPR PERKIM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	4.375	n/a	15.750	DKP
15	Melindungi, mengembalikan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, memerangi kekeringan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Peningkatan tutupan lahan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakaan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan	1 Dok			DLHK
			Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	20%	20%	20%	DLHK
		Pengembangan Perhutanan Sosial	Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	154,46%	154,46%	154,46%	DLHK
16	Melindungi kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan.	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	16,83	16,54		DP3ACSKB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	2,3	3,1		DP3ACSKB
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan SDM			0,040%	

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022 Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Perlindungan Perempuan				
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak			0,30%	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67$			DINSOS PEMDES
			Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	35%			DISKOMINFO
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	8			INSPEKTORAT
			Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	90			INSPEKTORAT
				Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	95			INSPEKTORAT
				Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100			INSPEKTORAT
			Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3			INSPEKTORAT
				Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3			INSPEKTORAT
		Peningkatan pelayanaan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	10,2%	11,18		DP3ACSKB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	41,66		DP3ACSKB

No	Tujuan Pembangunan an SDGs	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	RKPD 2022				
				Kinerja Program				
				Indikator (out come)	Target 2020	Realisas 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kegiatan yang responsif gender			90,62%	
		Meningkatnya kualitas kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level 3 (Proaktif)	Level 3 (Proaktif)	Level 4 (Strategis)	BIRO LAYANAN PENGADAAN
17	Penguatan moi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan							

4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan adalah 1) Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel IV.15

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022

Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pendidikan menengah	Pembangunan Pendidikan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	APK SMA	40,63%	39,04%	42%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK	40,63%	35,48%	37%	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Khusus	Pembangunan Pendidikan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	APK SLB	26,21%	58,25%	65%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	100%	91,5%	92,5%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	45%	63%	65%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompeten si diatas 50	95%	80%	83%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasil A	50%	61,4%	65%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,8	UN dihapus	UN dihapus	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A	44,83%	64,58%	75%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	6,7	UN dihapus	UN dihapus	DINAS PENDIDIKAN
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	33,3%	55,5%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengelolaan Bantuaan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan rele vansi pendidikan vokasi dalam mendukung pem bang unan eko nomi ber	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanaan Pendidik an Kejuruan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	44,83%	65%	75%	DINAS PENDIDIKAN

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		basis potensi lokal						
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pe ngembangan per ekonomian berba sis potensi lokal	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan rele vansi pendidikan vokasi dalam mendukung pem bangunan ekono mi berbasis po tensi lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38,60%	65%	75%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase SLB terakreditasi A	100%	33,3%	55,5%	DINAS PENDIDIKAN
			Program Pengelolaan Bantuaan Oprasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN

b. SPM Bidang Kesehatan

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan untuk SPM bidang kesehatan untuk Provinsi antara lain: 1) Kejadian luar biasa (KLB): 2) Kebencanaan.

Tabel IV.16
Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022
Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Kesehatan

No	**Standar Pelayanan Minimal**	**RKPD 2022**						
		Prioritas Daerah	**Program Perangkat Daerah**	**Kinerja Program**				
				Indikator (*out come*)	**Target 2020**	**Realisasi 2020**	**Target 2022**	**Perangkat Daerah**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk ter dampak krisis keseha tan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pembangunan Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengenda lian Penyakit	Persentase Kab/ kota yang melaksa nakan kewaspa daan dini dan respon	90%			DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pe nyelenggaraan penanggulang an bencana	Program Pencegahan dan Pengenda lian Penyakit	Persentase pendu duk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pe layanan kesehatan	20%			DINAS KESEHATAN

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi				
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%			DINAS KESEHATAN

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: 1) setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih; 2) setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar.

Tabel IV.17

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022

Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	65%			DINAS PUPR PERKIM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wil. Provinsi (RTRWP)	75			DINAS PUPR PERKIM
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan volume air baku	20%			DINAS PUPR PERKIM

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pengembangan kawasan konek tivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera		Persentase vo lume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivi tas Pulau Bang ka dengan Pulau Sumatera	5%			DINAS PUPR PERKIM
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil		Persentase vo lume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%			DINAS PUPR PERKIM
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai		Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%			DINAS PUPR PERKIM

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni.

Tabel IV.18

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator *(out come)*	Target	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Pembangunan Perumahan	Persentase peni ngkatan kuanti tas dan kualitas rumah tidak la yak huni bagi masyarakat mis kin	22,54%	22,50%	22,58%	DINAS PUPR PERKIM
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena reloka si program Pemerin tah Daerah provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Perumahan Rakyat	Persentase rekon struksi dan reha bilitasi rumah akibat bencana	0%	0	0	DINAS PUPR PERKIM

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator *(out come)*	Target	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	0,27%	0	0,40%	DINAS PUPR PERKIM

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu: 1) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar; 2) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan; 3) setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar; 4) setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan); 5) setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum; 6) setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

Tabel IV.19

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator *(out come)*	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	0	0	0	KESBANGPOL
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	1	0	0	KESBANGPOL
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/ kota	7	7	0	KESBANGPOL
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan	Persentase Ormas/ LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	45	45	0	KESBANGPOL
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	50	50	0	KESBANGPOL
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan	Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai	100%			SATPOL PP

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator *(out come)*	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
		ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Masyarakat	dengan aturan				
			Program Perlindungan Masyarakat	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantran tibmas	6,05%			SATPOL PP
			Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%			SATPOL PP
			Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda	100%			SATPOL PP

f. SPM Bidang Sosial

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial (pemerintah provinsi): 1) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga, setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 2) rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 3) rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga, setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar; 4) rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga, setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga: 5) pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Tabel IV.20

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2022

Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2022 Bidang Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peran	19,01			Dinsos

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
		yang berkualitas,		an dan fungsi sosial				
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti							DINSOS
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti							DINSOS
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti							DINSOS
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28			UPTD PANTI SOSIAL
			Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62			UPTD PANTI SOSIAL
			Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0,19%			DISKEPORA
				Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4,02%			DISKEPORA
				Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2,67%			DISKEPORA
			Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang tersusun	80%	98%	80%	BIRO KESRA
			Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Rekomendasi Bidang Bina Mental Spiritual yang dibuat	80%	98%	80%	BIRO KESRA

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
			Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,28			DISNAKER
				Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10,64			DISNAKER
				Persentase wanita Tuna sosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8,62			DISNAKER
				Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,78			DISNAKER
		Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22,84			DINSOS
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	17			DINSOS
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanaan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15,63			DINSOS
				Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	16,83	16,54		DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	2,3	3,1		DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan SDM Perlindungan Perempuan			0,040%	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak			0,30%	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67			DINAS SOSIAL
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%			DISKOMINFO
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak	57,14	57,14		DP3ACSKB
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi anak			0,19%	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99			DINAS SOSIAL
		Pembangunan kesejahteraan sosial di arahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01			DINSOS
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28			UPTD PANTI SOSIAL
			Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62			UPTD PANTI SOSIAL

No	Standar Pelayanan Minimal	RKPD 2022						
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program				
				Indikator (*out come*)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2022	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99			DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban NAPZA	21,28			DINAS SOSIAL

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan Kabupaten/Kota tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan kawasan terutama untuk daerah yang terpencil dan jauh. Percepatan pertumbuhan ekonomi di fokuskan pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan dan pariwisata yang dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah serta meningkatkan daya saing daerah. Fokus percepatan pertumbuhan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang di Kabupaten Belitung, Kawasan Industri (KI) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan dan Kawasan Industri (KI) Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat serta Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung di Kaabupaten Bangka Tengah dan Lintas Timur Pulau Bangka Di Kabupaten Bangka.

Gambar V.I
Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

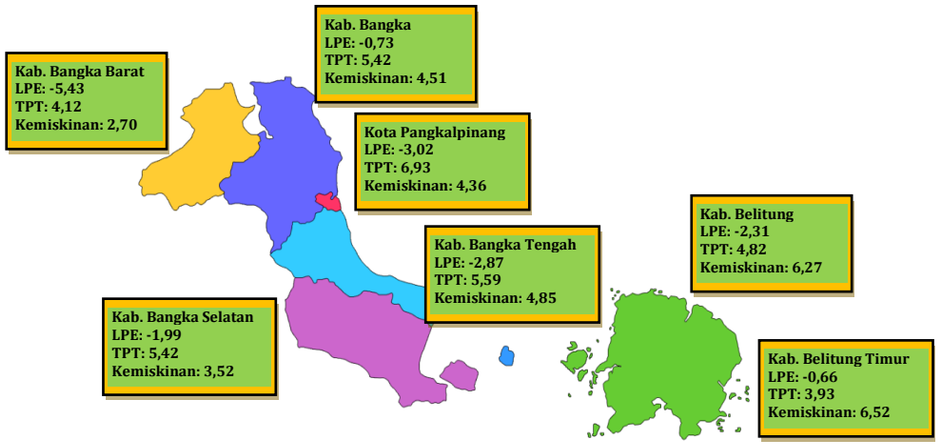

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021(diolah)

Pengembangan kewilayahan diharapkan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan peta diatas dari hasil capaian indikator makro tahun 2020, pengangguran tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 6,93%; untuk tingkat kemiskinan tertinggi yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 6,52%. Sedangkan Capaian tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yang mencapai 6,93% sedangkan capaian terendah berada di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 3,93%. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan wilayah agar perekonomian di Bangka Belitung dapat merata.

Prioritas pengembangan wilayah sesuai dengan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu "**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Menuju Sumber Daya Manusia yang Unggul"** yang diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari penyebaran virus Covid-19 melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional.

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada :

1. Kota Pangkalpinang diarahkan sebagai pusat jasa, perdagangan dan industri.
2. Kabupaten Bangka diarahkan dalam pengembangan pertanian, pariwisata melalui KEK Lintas Timur.
3. Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan industri melalui Kawasan Industri Tanjung Ular.
4. Kabupaten Bangka Tengah diarahkan dalam pengembangan pertanian dan pariwisata melalui KEK Tanjung Gunung.
5. Kabupaten Bangka Selatan diarahkan dalam pengembangan perikanan dan pertanian terutama sebagai lumbung padi dan lada.
6. Kabupaten Belitung diarahkan dalam pengembangan pariwisata melalui KEK Tanjung Kelayang dan pengembangan sektor perikanan.
7. Kabupaten Belitung Timur diarahkan dalam pengembangan perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan gambar V.I maka uraian tentang prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan pada pembahasan di bawah ini.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang

Pembangunan Kota Pangkalpinang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan. Untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya PDRB Sektor industri pengolahan dan perdagangan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan tata kelola industri (2) Peningkatan tata kelola perdagangan, untuk sasaran peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Gambar V.2
Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Tabel V.1
Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kota Pangkalpinang Tahun 2022

NO	RKPD 2021						
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1	Menurunkan Angka Pengangguran	1	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang di Tempatkan	5%	DISNAKER
		2	Peningkatan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang diberdayakan	500 UMKM	DINAS UMKM
2	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan dan perdagangan	1	Peningkatan tata kelola industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah industri	3%	DISPERINDAG
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	80%	DISPERINDAG
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data informasi industri di SIINAS	90%	DISPERINDAG
		2	Peningkatan tata kelola perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya	100%	DISPERINDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Barang terdistribusi	65%	DISPERINDAG
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersedian Bapokting	85%	DISPERINDAG
					Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	75%	DISPERINDAG
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan Terstandarisasi	100%	DISPERINDAG
3	Meningkatan Kapasitas daerah terhadap pengulangan bencana	1	Peningkatan kualitas penyelenggara-an penanggulang-an bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana Yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	80%	BPBD
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana Yang Diintervensi Dalam Kedaruratan Penangulangan Bencana	100%	BPBD
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	80%	BPBD
				Program Pencegahan, Penangulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan relawan pemadan kabakaran di kabupaten dan kota	26%	SATPOLPP
				Pengembangan Perumahan	Teridentifikasi rehabilitasi rumah korban bencana	500 KK	PERKIM
				Inspeksi Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang disurvey		PUPR

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka

Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada empat sasaran utama yaitu: (1) meningkatnya pembangunan kesehatan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; (2) pengurangan angka pengangguran melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan peran KUMKM dalam meningkatkan kesempatan kerja; (3) meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan pengembangan *hinterland* dan kawasan lintas timur Pulau Bangka; (4) meningkatnya PDRB sub sektor pertanian melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan, serta strategi dan arah kebijakan mengenai upaya peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan.

Gambar V.3
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2022

Tabel V.2
Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tahun 2022

NO	RKPD 2022						
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pembangunan Kesehatan	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah KLB yang dapat ditanggulangi	5 kejadian (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan
					Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	6 kali (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinkes, BPBD, Satpolpp, RSUP
					Jumlah sampel makanan, sampel limbah, sampel air yang diperiksa	510 sampel (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinkes, Disdik, Dis Perindag, Dinas Pemdes, DLH, UMKM, Dishub, Distan,

NO	RKPD 2022							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
								Dinas Perkim/PU
		2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga yang dibentuk dan dibina	1 kelompok	Dinas Kesehatan
						Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	18 puskesmas (dibagi untuk & Kab/kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina penyakit menular dan tidak menular	74 fasyankes (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah puskesmas yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	64 Puskesmas (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	1062 orang (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium	20 spesimen 9 (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan, RSUP, RSJD
2	Pengurangan Angka Pengang-guran	1	Peningkatan kesempatan kerja	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan informasi Pasar Kerja	7 Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Data Pencari Kerja Secara online	2000 orang (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Tenaga Kerja
		2	Peningkatan peran KUMKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Konsultan Plut yang diberdayakan	500 UMKM (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas UMKM
3	Meningkat-kan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan kualitas SDM pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang (untuk 7 Kab/Kota)	Disbudpar
				2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80orang (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Disbudpar
				3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang terlatih	100 orang (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Disbudpar
						Jumlah SDM Perhotelan yang terlatih	200 orang (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Disbudpar
						Jumlah SDM bidang SPA yang terlatih	100 orang (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Disbudpar
						Jumlah SDM Ekraf yang	75 orang (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Disbudpar

NO	RKPD 2022							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
						terlatih		
		2	Pengembangan *hinterland* dan kawasan lintas timur Pulau Bangka					
4	Meningkat-nya PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Luasan Benih/Bibit Holtikultura yang tersedia	120 Ha (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
						Jumlah Luasan Bibit Perkebun-an yang tersedia (Lada, Sawit, Karet, Kopi)	185 Ha (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
						Jumlah sertifikasi benih/ bibit pertanian yang dikeluarkan	3.075.000 Bibit (untuk 7 Kab/kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
						Kualitas mutu pakan ternak	100%	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendalinya keamanan 7 kab/kota di wilayah babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	1 Laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
						Tersertifikasi-nya unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/ Nomor Kontrol Veteriner) serta terujinya sampel produk peternakan pada unit usaha/kios produk peternakan	1 NKV dan 210 sampel (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada empat sasaran utama yaitu: (1) meningkatnya pembangunan kesehatan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; (2) pembangunan pendidikan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan akses layanan pendidikan, dan peningkatan mutu layanan pendidikan; (3) meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas pulau Bangka dengan Sumatera; (4) meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan melalui strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan industri dan kawasan terpadu (KIPT) Tanjung Ular.

Gambar V.4
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Startegi dan arah Kebijakan	Sasaran
○ Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ○ Peningkatan pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Kesehatan
○ Peningkatan Akses pelayanan pendidikan ○ Peningkatan mutu layanan pendidikan	Pembangunan Pendidikan
○ Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif ○ Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas pulau Bangka dengan Sumatera ○ Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Tanjung ular	Meningkatkan pertumbuhan kunjungan Wisatawan
	Meningkatnya PDRB Sektor industri pengolahan dan perdagangan

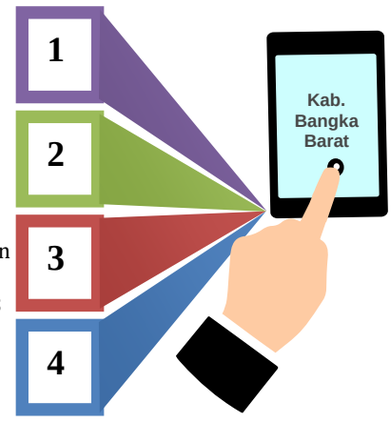

Tabel V.3
Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	RKPD 2022								
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program			Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*			*5*	*6*	*7*
1	Pembangunan Kesehatan	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi	5 kejadian (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan
							Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	6 kali (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	DINKES, BPBD, SATPOLPP, RSUP
							Jumlah sampel makanan, sampel limbah, sampel air yang diperiksa	510 sampel (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinkes, Disdik, DLH Disperindag, Dinas Pemdes, UMKM,, Dishub, Dinas Pertanian, Dinas Perkim/PU
		2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Jumlah kelompok Asuhan Mandiri TamanObat Keluarga yang dibentuk dan di bina	1 kelompok	Dinas Kesehatan
							Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	18 puskesmas (dibagi untuk & Kab/kota)	Dinas Kesehatan
							Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina penyakit menular dan tidak menular	74 fasyankes (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan
							Jumlah puskesmas yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	64 Puskesmas (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan
							Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	1062 orang (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan
							Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium	20 spesimen 9 (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan, RSUP, RSJD

NO	RKPD 2022							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
2	Pembangunan Pendidikan	1	Peningkatan akses layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMA	44.43	Dinas Pendidikan
		2	Peningkatan mutu layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Nilai Assesment	87,98	Dinas Pendidikan
3	Meningkatkan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan tersertifikasi	6.75%	Disbudpar
		2	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas pulau Bangka dengan Sumatera	1	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	9,70%	Disbudpar
4	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	1	Pengembangan kawasan industri dan kawasan terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah industri	5%	Disperindag

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sektor pertanian dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PDRB sub sektor pertanian antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan. Sedangkan Pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V.5
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Tabel V.4

Sasaran Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

NO	RKPD 2022								
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program			Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*			*5*	*6*	*7*
1	Penurunan Angka Pengangguran	1	Peningkatan kesempatan kerja	1	Program Penempatan Tenaga Kerja		Pengelolaan informasi Pasar Kerja	7 Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja
							Jumlah Data Pencari Kerja Secara online	2000 orang	Dinas Tenaga Kerja
		2	Peningkatan peran KUMKM dalam meningkatkan kesempatan kerja	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Jumlah Konsultan Plut yang diberdayakan	500 UMKM	Dinas UMKM
2	Meningkat-kan Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1	Peningkatan kualitas SDM pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	Disbudpar
				2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Peserta yang telah mengikuti Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80orang	Disbudpar
				3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Pemandu Wisata yang terlatih	100 orang	Disbudpar
							Jumlah SDM Perhotelan yang terlatih	200 orang	Disbudpar
							Jumlah SDM bidang SPA yang terlatih	100 orang	Disbudpar
							Jumlah SDM Ekraf yang terlatih	75 orang	Disbudpar
		2	Pengembangan *hinterland* dan kawasan lintas timur Pulau Bangka						
3	Pembangunan Pendidikan	1	Peningkatan akses layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan		APK SMA	44.43	Dinas Pendidikan
		2	Peningkatan mutu layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan		Rata-Rata Nilai Assesment	87,98	Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Penyediaan dan Pengemban gan Sarana Pertanian		Jumlah Luasan Benih/Bibit Holtikultura yang tersedia	120 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
							Jumlah Luasan Bibit Perkebun-an yang tersedia (Lada, Sawit, Karet, Kopi)	185 Ha (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
							Jumlah sertifikasi benih/ bibit pertanian yang dikeluarkan	3.075.000 Bibit (untuk 7 Kab/kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
							Kualitas mutu pakan ternak	100%	Dinas Pertanian dan Pangan
		2	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Terkendalinya keamanan 7 kab/kota di wilayah babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	1 Laporan	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	RKPD 2022					
	Sasaran Pembangunan	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				Tersertifikasi-nya unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/ Nomor Kontrol Veteriner) serta terujinya sampel produk peternakan pada unit usaha/kios produk peternakan	1 NKV dan 210 sampel (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan

5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

Pembangunan Kabupaten Bangka difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sektor pertanian dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PDRB sub sektor pertanian antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan peternakan. sedangkan pencapaian sasaran untuk menurunkan angka pengangguran, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan kesempatan kerja, (2) Peningkatan peran KUKM dalam perluasan kesempatan kerja, (3) Peningkatan promosi, koordinasi, kerjasama dan investasi dalam perluasan kesempatan kerja. Sedangkan untuk sasaran penurunan angka kemiskinan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Gambar V. 6
Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021

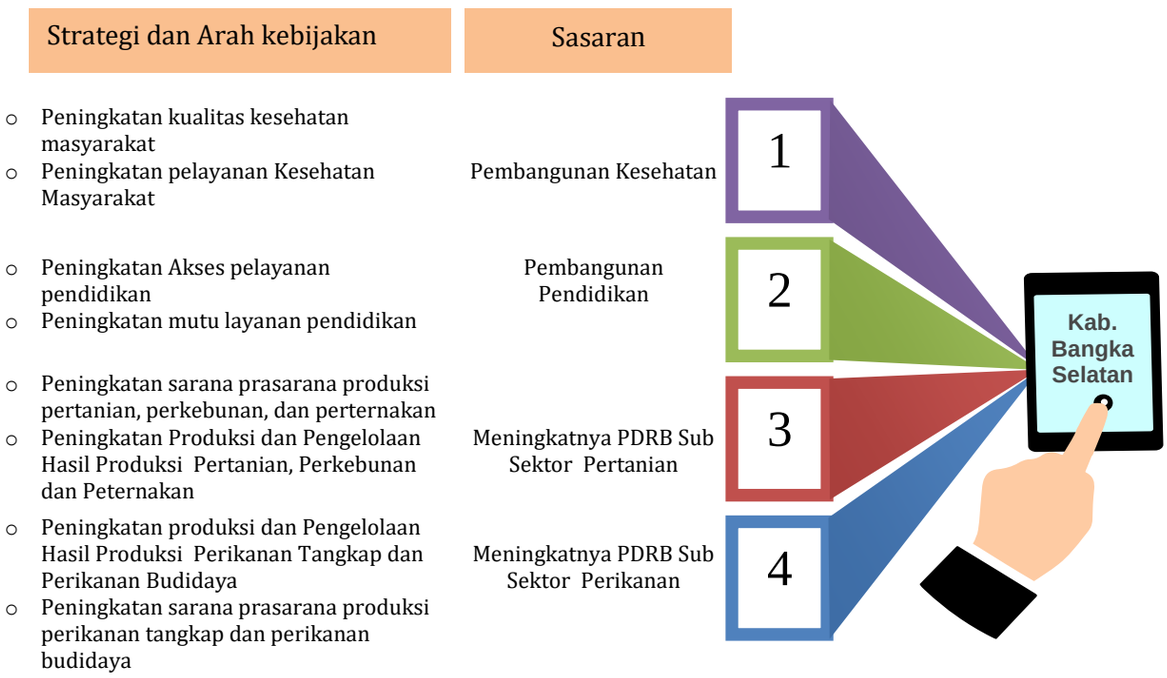

Tabel V.5

Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021

NO	RKPD 2022								
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	Pembangunan Kesehatan	1	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi	5 kejadian (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	6 kali (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	DINKES, BPBD, SATPOLPP, RSUP
						Jumlah sampel makanan, sampel limbah, sampel air yang diperiksa	510 sampel (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinkes, Disdik, DLH Disperindag, Dinas Pemdes, UMKM,, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perkim/PU
		2	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah kelompok Asuhan Mandiri TamanObat Keluarga yang dibentuk dan di bina	1 kelompok	Dinas Kesehatan
						Jumlah puskesmas yang melakukan simulasi survei akreditasi	18 puskesmas (dibagi untuk & Kab/kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina penyakit menular dan tidak menular	74 fasyankes (dibagi untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah puskesmas yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	64 Puskesmas (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji	1062 orang (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan
						Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	20 spesimen 9 (dibagi untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kesehatan, RSUP, RSJD
2	Pembangunan Pendidikan	1	Peningkatan akses layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SMA	44.43	Dinas Pendidikan
		2	Peningkatan mutu layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Nilai Assesment	87,98	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Luasan Benih/Bibit Holtikultura yang tersedia	120 Ha	Dinas Pertanian dan Pangan
						Jumlah Luasan Bibit Perkebun-an yang tersedia	185 Ha (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
						Jumlah sertifikasi benih/ bibit pertanian yang dikeluarkan	3.075.000 Bibit (untuk 7 Kab/kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
						Kualitas mutu pakan ternak	100%	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	RKPD 2022							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
		2	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terkendalinya keamanan 7 kab/kota di wilayah babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis (Rabies dan AI)	1 Laporan	Dinas Pertanian dan Pangan
						Tersertifikasi-nya unit usaha produk peternakan di Bangka Belitung (ber NKV/ Nomor Kontrol Veteriner) serta terujinya sampel produk peternakan pada unit usaha/kios produk peternakan	1 NKV dan 210 sampel (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan	1	Program Pengembangan perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan budidya (%)	4,20%	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3,30%	Dinas Kelautan dan Perikanan

5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

Pembangunan Kabupaten Belitung difokuskan pada tiga sasaran utama yaitu: (1) penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan arah kebijakan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin; (2) meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan pengembangan *hinterland* dan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang; (3) meningkatnya PDRB sub sektor pertanian melalui strategi dan arah kebijakan peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta strategi dan arah kebijakan berupa upaya peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Gambar V.7
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2022

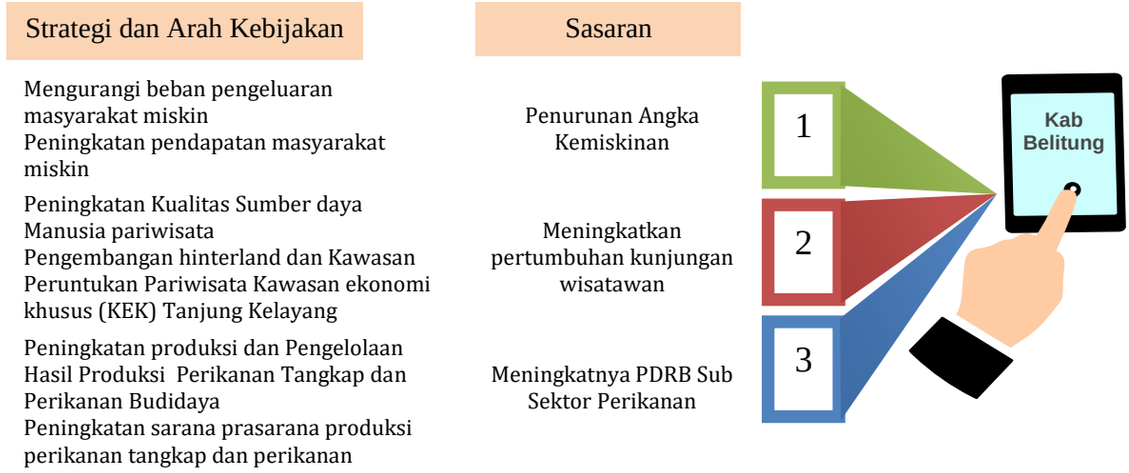

Tabel V.6

Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Tahun 2022

NO	RKPD 2022							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	Penurunan Angka Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)	18 Jenis	Disperindag
						Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	Disperindag
						Jumlah Pemantauan harga dan stok	12 kali	Disperindag
						Jumlah Operasi Pasar	2 kali	Disperindag
				2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	7 Kab/Kota	Dinas Sosial
		2	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	7 Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Data Pencari Kerja Secara online	2000 orang	Dinas Tenaga Kerja
				2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina	7 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas-nya	40 orang	Disbudpar
				2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80 orang	Disbudpar
				3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang terlatih	100 orang	Disbudpar
						Jumlah SDM Perhotelan yang terlatih	200 orang	Disbudpar
						Jumlah SDM bidang SPA yang terlatih	100 orang	Disbudpar
						Jumlah SDM Ekraf yang terlatih	75 orang	Disbudpar
		2	Pengembangan *hinterland* dan kawasan perun tukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyampaian Informasi Program/kegiatan melalui semua media komunikasi	80%	Dinas Komunikasi dan Informasi
3	Meningkat-nya PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budi-daya	1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya Laut (ton/tahun)	13120 ton/ tahun (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kelautan dan Perikanan
				2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Data Statistik Perikanan Tangkap (Dokumen)	1 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan usaha Perikanan Tangkap (rekomendasi)	350 Rekomendasi (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan persyaratan/standar usaha pengolah-an hasil perikanan skala menengah dan besar(pelaku usaha)	15 (untuk 7 Kab/kota)	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan	5 rekomendasi (untuk 7	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RKPD 2022					
	Sasaran Pembangunan	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				SKP bagi usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah besar atau lintas daerah Kab/ Kota dalam 1 daerah Provinsi	Kab/Kota)	
				Jumlah pelaksanaan Bimbingan dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada UPI	1 kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan di pelaku usaha hasil perikanan	12 kegiatan (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25 rekomendasi (untuk 7 Kab/Kota)	Dinas Kelautan dan Perikanan

5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan Kabupaten Belitung difokuskan pada dua sasaran utama yaitu meningkatnya ekonomi daerah melalui peningkatan sub sektor perikanan dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran penurunan angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan penurunan angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan.

Strategi yang digunakan untuk Pernurunan Angka Kemiskinan antara lain: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2)Peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan pencapaian sasaran Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, (2) Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan pertumbuhan kunjungan Wisatawan, strategi yang digunakan antara lain: (1) Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif dan (2) Peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata.

Gambar V.8
Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

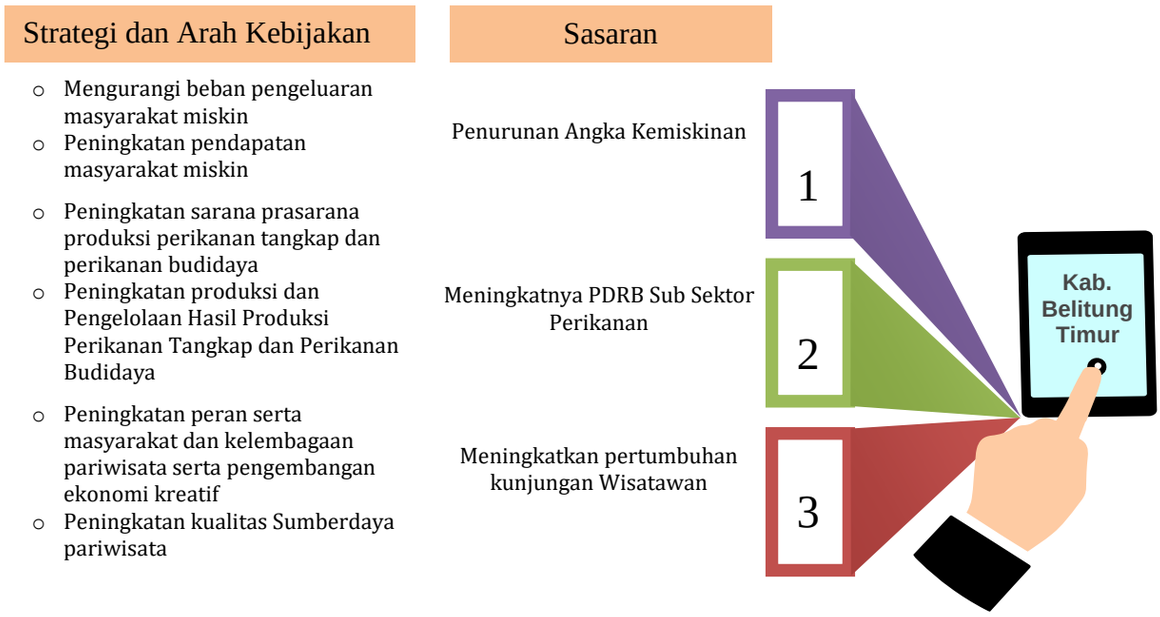

Tabel V.7

Sasaran. Arah Kebijakan dan Program Prioritas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

NO	RKPD 2022							
	Sasaran Pembangunan	Strategi		Program		Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*		*4*		*5*	*6*	*7*
1	Penurunan Angka Kemiskinan	1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)	18 Jenis	Disperindag
						Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok	8	Disperindag
						Jumlah Pemantauan harga dan stok	12 kali	Disperindag
						Jumlah Operasi Pasar	2 kali	Disperindag
				2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah data Fakir Miskin yang dikelola dengan baik	7 Kab/Kota	Dinas Sosial
		2	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	7 Kab/Kota	Dinas Tenaga Kerja
						Jumlah Data Pencari Kerja Secara online	2000 orang	Dinas Tenaga Kerja
				2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina	7 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas-nya	40 orang	Disbudpar
				2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang telah mengikuti Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80 orang	Disbudpar
				3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pemandu Wisata yang terlatih	100 orang	Disbudpar
						Jumlah SDM Perhotelan yang terlatih	200 orang	Disbudpar
						Jumlah SDM bidang SPA yang terlatih	100 orang	Disbudpar
						Jumlah SDM Ekraf yang terlatih	75 orang	Disbudpar
		2	Pengembangan *hinterland* dan kawasan perun tukan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyampaian Informasi Program/kegiatan melalui semua media komunikasi	80%	Dinas Komunikasi dan Informasi
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	1	Meningkatkan nilai tambah sektor perikanan	1	Program Pengembangan perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,85%	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan budidya (%)	4,20%	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	3,30%	Dinas Kelautan dan Perikanan

5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

1. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan Lindung;
b. Kawasan Budidaya.

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi:

a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam;
e. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
f. kawasan rawan bencana alam.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Rencana Sistem Perkotaan;
b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
c. Rencana Sistem Jaringan Energi;
d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
f. Sistem Prasarana Lingkungan.

3. Rencana Kawasan Strategis

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

5.2.1 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun pada Tahun 2011 dan pemberlakuannya sampai dengan Tahun 2034 sehingga saat ini tahapan tersebut telah memasuki tahapan 5 (lima) tahun kedua yang berarti diperlukan kolaborasi atau penyesuaian terhadap visi dan misi kepala daerah.

Tahapan RTRW yang kedua ini juga masih merujuk pada indikasi program utama yang ditetapkan pada saat penyusunan dan penetapan terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 dikarenakan belum ada peninjauan kembali maupun revisi terhadap RTRW tersebut.

Indikasi program utama pada tahun tahapan kedua (Tahun 2017-2022) dimaksud mencakup :

A. Pemantapan Sistem Perkotaan
   - A.1 Perwujudan PKNp Pangkal Pinang
   - A.2 Perwujudan PKW Muntok
   - A.3 Perwujudan PKW Tanjung Pandan
   - A.4 Perwujudan PKW Manggar
   - A.5 Perwujudan PKL Kelapa
   - A.6 Perwujudan PKL Puding Besar
   - A.7 Perwujudan PKL Sungai Selan

A.8 Perwujudan PKL Payung
A.9 Perwujudan PKL Sungailiat
A.10 Perwujudan PKWp Koba
A.11 Perwujudan PKWp Toboali

B. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
B.1 Perwujudan Sistem Transportasi
B.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik
B.3 Perwujudan Sistem Telekomunikasi
B.4 Perwujudan Sistem Sumber Daya Air
B.5 Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman

C. Perwujudan Pola Ruang
C.1 Perwujudan Kawasan Lindung
C.2 Perwujudan Kawasan Budidaya

D. Perwujudan Kawasan Strategis
D.1 Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian
D.2 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
D.3 Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
D.4 Perwujudan KTM Batu Betumpang
D.5 Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok
D.6 Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik
D.7 Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga
D.8 Perwujuduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri
D.9 Perwujuduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
D.10 Perwujuduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang
D.11 Perwujuduan Kota Tua Muntok
D.12 Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB)
D.13 Perwujudan PLTN (Bangka Barat & Bangka Selatan)
D.14 Pengelolaan Kawasan Gunung Lalang (Cagar Alam)
D.15 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Kemanan (Kawasan Latihan Tempur Militer Buding)

Penjabaran terhadap beberapa indikator utama tersebut dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti yang terinci pada tabel berikut dibawah ini. Dalam perkembangannya seperti yang telah dikemukakan di atas maka diperlukan penyesuain mulai dari visi dan misi kepala daerah terbarukan (tahapan kedua RTRW), kemudian terhadap evaluasi dan (rencana revisi RTRW) serta penyesuaian terhadap aturan terbarukan dari nama program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan sehingga pada sub bab ini bersifat mengulas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 berdasarkan tahapannya, yang berarti bahwa penyesuaian akan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada bab dan sub bab berikutnya yang telah terbarukan (sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah). Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034 sebagaimana Tabel V.8 dibawah ini :

Tabel V.8

Indikator Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034 Tahapan 2021-2034

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A	**Pemantapan Sistem Perkotaan**									
A1	**Perwujudan PKNP Pangkal Pinang**	Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam	Dinas Perindag	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan inner ringroad dan outer ring road	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan taman kota	Dinas Pekerjaan Umum					APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (DLHD)					APBD Kab/Kota	Badan Lingkhungan Hidup Daerah (DLHD)	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam	Dinas Perhubungan					APBD Prov	Dinas Perhubungan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi	Dinas Budpar	√				APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Peningkatan terminal	Dinas Perhubungan	√				APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
A2	**Perwujudan PKW Muntok**	Pemantapan tata batas kawasan kota tua	BPN	√					BPN	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan RDTR Kota tua	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah	Dinas Pekerjaan Umum					APBN/APBD	Dinas Pekerjaan Umum	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum					APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan	√				APBD Prov	Dinas Kesehatan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Badan Lingkhungan Hidup Daerah	√				APBD Kab/Kota	Badan Lingkhungan Hidup Daerah	(seharusnya) selesai pada tahap I
A3	**Perwujudan PKW Tanjung Pandan**	Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu	Disperindag	√				APBD Prov	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan wisata	Disbudpar	√				APBD Kab/Kota	Disbudpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau)	Disperindag	√				APBD Prov	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan museum bahari	Disbudpar	√				APBD Prov	Disbudpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan terminal tipe B	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan	√				APBD Prov	Dinas Kesehatan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A4	Perwujudan **PKW Manggar**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD	√				APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar	Dinas Perhubungan	√				APBN/ APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum	Dinas Perhubungan	√				APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan	√				APBD Prov	Dinas Kesehatan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
A5	Perwujudan **PKL Kelapa**	Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterplan kawasan perdagangan	Disperindag	√				APBD Kab/Kota	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas wisata air panas	Disbudpar	√				APBD Kab/Kota	Disbudpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan industri pengolahan sawit	Diperindag					APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Diperindag	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
A6	**Perwujudan PKL Puding Besar**	Pembangunan fasilitas rest area	Dinas Perhubungan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag	√				APBD Kab/Kota	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan					APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
A7	Perwujudan **PKL Sungai Selan**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU						Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan					APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
A8	Perwujudan **PKL Payung**	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag	√				APBD Kab/Kota	Disperindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU					APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A9	Perwujudan **PKL Sungailiat**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan terminal tipe C	Dishub	√				APBD Kab/Kota	Dishub	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Dibudpar					APBD Kab/Kota	Dibudpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU						Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
A10	Perwujudan **PKWp Koba**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dishub	√				APBD Kab/Kota	Dishub	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar					APBD Kab/Kota	Disbudpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
A11	Perwujudan **PKWp Toboali**	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dinas Perhubungan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar					APBD Kab/Kota	Disbudpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	DLHD	√				APBD Kab/Kota	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
B	**Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah**									
B1	**Perwujudan Sistem Transportasi**									
a	**Sistem Transportasi Darat**	Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer	Dinas PU					APBN	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar.	Dinas PU	√				APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
b	**Sistem Transportasi Laut**	Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar)	Dinas Perhubungan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
c	**Sistem Transportasi Udara**	Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan fasilitas pendukung bandara	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
B2	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik**	Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik	PLN					APBN/APBD Prov/Masyarakat	PLN	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit	Dinas Pertambangan dan Energi					APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
B3	**Perwujudan Sistem Telekomunikasi**	Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional	Dinas Kominfo					APBN/APBD Prov/Swasta	Dinas Kominfo	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong pengguanaan menara bersama antara operator (*join operation*)	Dinas Kominfo	√				Swasta	Dinas Kominfo	(seharusnya) selesai pada tahap I
		pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan.	Dinas Kominfo					APBN/Swasta	Dinas Kominfo	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha	Dinas Kominfo					APBN/ Swasta	Dinas Kominfo	Merupakan lanjutan dari Tahap I
B4	**Perwujudan Sistem Sumber Daya Air**	Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut	Dinas PU						Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan cekdam pada hulu sungai	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur	Dinas PU					APBN/APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
B5	**Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman**	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL)	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3)	DLHD	√				APBN/APBD Prov	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan.	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
C	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**									
C1	**Perwujudan Kawasan Lindung**									
	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembali-kan/ meningkatkan fungsi lindung;	Dinas Kerhutanan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Kerhutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengawasan kawasan lindung.	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengamanan kawasan lindung	Dinas Kerhutanan					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;	Dinas PU					APBN/APBD Prov/LSM	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.	Dinas PU					APBD Prov	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Pengelolaan kawasan perlindungan setempat	Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan	DLHD	√				APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi dan penghijauan sempadan	DLHD					APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah	DLHD					APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah	DLHD	√				APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat	DLHD					APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan	DLHD					APBN/APBD Prov/ Masyarakat	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan cagar budaya	(penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok)	-					-	-	
	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat	DLHD	√				APBN/APBD Prov/LSM	DLHD	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia	DLHD					APBN/APBD	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis	DLHD					APBN/APBD /LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam	DLHD					APBN/APBD /LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
	Pengelolaan kawasan lindung lainnya	pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.	DLHD					APBN/APBD /LSM	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
C2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**									
a	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi**	Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan	√				APBN	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan	√				APBN	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan produksi	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan					APBN	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan	√				APBN	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b	**Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat**	Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan produksi dean inspeksi	Dinas Kehutanan	√				APBD Prov	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan					APBD Prov	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan					APBD Prov	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
c	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian**	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegaitan pertanian hortikultur dan atau perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan					APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
d	Perwujudan Sentra Perikanan	Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
e	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pemantapan tata batas wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat	Dinas Pertembangan dan Energi	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Dinas Pertembangan dan Energi					APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau	Dinas Pertembangan dan Energi					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air	Dinas Pertembangan dan Energi					APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Pertembangan dan Energi	Merupakan lanjutan dari Tahap I
f	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**	Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindag	√				APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/ APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan	Dinas Perindag	√				APBN	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.	Dinas Perindag	√				APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
g	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata**	Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBD Kab/Kota	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBD Kab/Kota	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/ Masyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi	Dinas Budaya dan Pariwisata					APBD Kab/Kota	Dinas Budaya dan Pariwisata	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (*trip*)	Dinas Budaya dan Pariwisata	√				APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/M asyarakat	Dinas Budaya dan Pariwisata	(seharusnya) selesai pada tahap I
h	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman**	Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterpal perencanaa kota yang ditetapkan	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni	Dinas PU	√				APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota)	Dinas PU	√				APBN/ APBD Prov/APBD Kab/Kota/ Masyarakat	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
D	**Perwujudan Kawasan Strategis**									
D1	**Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian**	Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D2	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	
		Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
D3	**Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)	Dinas Perindag					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D4	**Perwujudan KTM Batu Betumpang**	Penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sarana sosial budaya	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D5	**Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok**	Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengesahan kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan	Dinas Kelautan &Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan &Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D6	**Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik**	Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove	DLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan tambak ikan	Dinas Kelautan & Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias)	Dinas Kelautan & Perikanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
D7	**Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga**	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perindag/PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag/PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik)	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D8	**Perwujduan Kawasan Kota Terpadu Mandiri**	Penyusunan RDTR KTM Gantung	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	DLHD					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	DLHD	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D9	**Perwujduan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)**	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyiapan lahan	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan jalan askes	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur	Dinas PU	√				APBN/APBD	Dinas PU	(seharusnya) selesai

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		penunjang						Prov/APBD Kab/Kota		pada tahap I
		Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor	Dinas Perindag	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perindag	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan)	Dinas Perhubungan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pembangunan prasarana penunjang lainnya	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
D10	**Perwujduan Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang**	Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan lahan	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal	Dinas PU					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengadaan kapal penumpang	Dinas Perhubungan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyediaan sistem air baku dan air minum	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
D11	**Perwujduan Kota Tua Muntok**	Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan jenis bangunan *heritage*	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, *Asian Herritage* dan diupayakan menjadi *World Heritage*	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penataan kawasan dan restorasi bangunan	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia)	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan heritage map dan promosi kawasan	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyusunan agenda tahunan	Dinas Budpar	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler)	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua	Dinas Budpar					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Budpar	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D12	**Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim**	Pengembangan kawasan pendidikan	Dinas Pendidikan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	
		penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan	Dinas Pendidikan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		pembangunan sarana penunjang pendidikan	Dinas PU	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas PU	(seharusnya) selesai pada tahap I
		pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam		√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota		(seharusnya) selesai pada tahap I
		pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri	Dinas Pendidikan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Pendidikan	Merupakan lanjutan dari Tahap I

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				SUMBER DANA	PELAKSANA	KETERANGAN
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
				15-19	20-24	25-29	30-34			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
D14	**Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)**	Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Perbaikan fasilitas penunjang	Dinas Kehutanan	√				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	(seharusnya) selesai pada tahap I
		Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik	Dinas Kehutanan					APBN/APBD Prov/APBD Kab/Kota	Dinas Kehutanan	Merupakan lanjutan dari Tahap I
		Peningkatan fasilitas karantina hewan								Merupakan lanjutan dari Tahap I

Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010 (dibarukan oleh Bappeda, 2020

Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 tentunya korelasi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.9

Tabel V.9

Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1	Menetapkan Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan rencana pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan
			b.Sosialisasi dan sinkronisasi rencana pengembangan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan
			c. Fasilitasi pengembangan kemitraan dan kolaborasi program dalam pe-ngembangan pusat pela-yanan primer dan sekun-der pariwisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan
			d.Pelaksanaan pemantau-an dan evaluasi pelaksanaan rencana pengem-bangan pusat pelayanan primer dan sekunder pari-wisata Provinsi Kepulauan Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan dan bidang tata ruang; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan bidang perencanaan pembangunan
2	Pembangun Destinasi Pariwisata	Program pembangunan	a.Penyusunan jalur wisata tematik lokal (dalam DPP),							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Provinsi (DPP) Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan DPP Wilayah Selatan Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang seimbang dan terpadu antara wilayah utara dan selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	daya tarik wisata	provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan keunggulan daya tarik wisata di wilayah DPP dan tema pengembangan KSPP & KPPP.							bidang kepariwisataan	o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung; o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Sosialisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan jalur wisata tematik di DPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o Kementerian bidang kepariwisataan; o Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan; o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Babel; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			c.Pendampingan pengem-bangan produk pariwisata dan ujicoba jalur wisata tematik.							PD Provinsi Kep. Babel bidang kepariwisataan	o Kementerian bidang kepariwisataan; o Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan; o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Babel;
			d.Pelaksanaan pemantau-an dan evaluasi pelaksa-naan jalur wisata tematik lokal (dalam DPP), provinsi, nasional, dan internasional sesuai dengan keunggulan daya tarik wisata di wilayah DPP dan tema pengem-bangan KSPP dan KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o Kementerian bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; o Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung; o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
3	Membangun Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Muntok dan sekitarnya, KSPP	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Muntok dan sekitarnya.							PD Provinsi Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum;
			b.Penyusunan dan penetapan							SKPD Provinsi Kep.	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Belinyu- Sungailiat dan sekitarnya, KSPP Pangkalpinang- Mendo Barat- Bangka Tengah, serta KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya untuk memberikan nilai tambah yang positif bagi identitas provinsi sebagai wilayah pertambangan timah dan penghasil lada di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, peningkatan kualitas ekosistem alam, serta pemulihan kerusakan lingkungan.		Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya.							Bangka Belitung bidang kepariwisataan	perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan perencanaan; o Perguruan tinggi bidang perencanaan
			c. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat Bangka Tengah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
			d. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Pulau Belitung dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang, dan hukum; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
			e. Sinkronisasi dan kola-borasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan dan bidang tata ruang; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan.
			f.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KSPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, tata ruang; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan kepariwisataan; o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
4	Membangun Kawa-san Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan sekitarnya, KPPP	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Toboali dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan;
			b. Penyusunan dan penetapan							PD Provinsi Kep.	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Gugusan Pulau di Selat Gaspar untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari & budaya khas, meningkatkan daya saing produk pari-wisata secara inter-nasional, mencipta-kan keterpaduan pembangunan & penyebaran perkembangan pariwisata yang lebih luas.		Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Gugusan Pulau di Selat Gaspar.							Bangka Belitung bidang kepariwisataan	perencanaan, tata ruang, dan bidang hukum dan peraturan perundangan; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan Kepariwisataan
			c. Sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; o PD Kabupaten/Kota bid. perencanaan;
			d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak Pembangunan KPPP Prov. Kep. Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang perencanaan dan idang tata ruang; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan;
5	Memadukan pembangunan perwi-layahan DPP, KPPP, dan KSPP Kep. Babel dengan DPN Palembang- Bangka Belitung, KSPN Tanjung Kelayang & sekitar-nya, KPPN Belinyu & sekitarnya, KPPN Pangkalpinang-Sungailiat dan sekitarnya, serta KPPN Punai- Belitung dan sekitarnya.	Program pembangunan perwilayahan pariwisata	a.Sosialisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Multipihak KSPP Pulau Belitung dengan Rencana Induk dan Rencana Detil KSPN TanjungKelayang & sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaam dan kepariwisataan; o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan
			b.Penandatangan naskah kesepakatan bersama pembagi-an peran dalam pembangunan KSPN Tanjung kelayang & KSPP Pulau Belitung.							Kementerian bidang kepariwisataan	o PD Provinsi bid. perencanaan, bid. tata ruang, dan kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan dan kepariwisataan; o Perguruan tinggi Bid. Kepariwisataan;
			c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembagian peran dalam pembangunan KSPN Tanjungkelayang dan KSPP Pulau Belitung.							Kementerian bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan, bidang tata ruang, dan kepariwisataan;
6	Mengembangkan sistem mitigasi dan	Program pembangunan	a.Penyusunan dan penetapan sistem mitigasi dan adaptasi							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan, bidang Hukum,

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	adaptasi terhadap bencana, kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan sektor lain di KSPP dan KPPP, serta dampak lingkungan akibat pariwisata di seluruh wilayah DPP.	perwilayahan pariwisata	pariwisata terhadap bencana.							bidang penanggulangan bencana	bidang lingkungan hidup, dan kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan;
			b.Penyusunan dan penetapan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan di KSPP dan KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan, bidang Hukum, bidang lingkungan hidup; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan;
			c. Sosialiasi dan sinkronisasi sistem mitigasi dan adaptasi dengan rencana sektor lain.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup, Bencana, dan kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang perencanaan;
			d.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan							PD Provinsi Kep. Babel bidang perencanaan pembangunan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Bencana, dan kepariwisataan;
7	Menetapkan dan mengembangkan daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis pesisir, pantai, pulau- pulau kecil, formasi geologis batuan granit, perkebunan lada, adat-istiadat khas	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan dan penetapan standar pembangunan dan pengelolaan bagi daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum, Kebudayaan dan Hukum dan Peraturan
			b.Dukungan dan pendam-pingan penerapan standar pembangunan dan pengelo-laan daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum, Kebudayaan; o Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan
			c.Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar pembangunan dan pengelo-laan daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Bangka Belitung bidang Pekerjaan Umum dan kebudayaan; o Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan
			d.Pemberian penghargaan/ insentif bagi daya tarik wisata provinsi berkinerja tinggi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Perguruan tinggi bidang perencanaan kepariwisataan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
8	Mengembangkan keterpaduan pembangunan dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kab/kota yang terletak di sekitar daya tarik wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Sinkronisasi program/ kegiatan pengembangan daya tarik wisata provinsi dengan daya tarik wisata nasional dan daya tarik wisata kabupaten/ kota di sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan paket wisata terpadu daya tarik wisata provinsi, daya tarik wisata nasional, daya tarik wisata kabupaten/kota.							Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ Kementerian bidang kepariwisataan ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan
9	Mengembangkan interpretasi sesuai tema daya tarik dan jalur wisata tematik DPP Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Perencanaan interpretasi di daya tarik wisata dalam jalur wisata tematik.							Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c.Pembuatan dan pemasangan papan interpretasi di daya tarik wisata dan di jalan dalam jalur wisata tematik.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan dan Perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			d.Pembuatan panduan bagi interpreter.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			e. Pembuatan brosur/leaflet interpretasi di daya tarik wisata.							Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			f. Pelatihan interpretasi bagi para pemandu wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
10	Merencanakan dan menerapkan pengelolaan pengunjung pada daya tarik wisata primer dan sekunder pada KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan pedoman rencana pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	o Pengelola daya tarik wisata; o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan rencana pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata.							Pengelola daya tarik wisata	o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan rencana pengelolaan pengunjung daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Pengelola daya tarik wisata; o Perguruan tinggi bid.kepariwisataan
11	Merencanakan dan menerapkan informasi terpadu antara daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan sistem informasi daya tarik wisata terpadu berbasis teknologi informasi							PD Provinsi bidang komunikasi dan infprmatika	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kominfo, Bid. kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata;
			b.Penyediaan informasi tentang daya tarik wisata sekitar dan daya tarik wisata yang memilki keterkaitan tema dengan daya tarik wisata primer dan sekunder							Pengelola daya tarik wisata	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
12	Mengembangkan program geowisata pada daya tarik wisata alam berbasis pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, dan formasi geologis batuan granit.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan interpretasi berbasis geowisata di daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	o PD Provinsi bid. geologis/sumber daya mineral, kehutanan, pertanian, perkebunan., kebudayaan; o PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			b.Penyelenggaraan program wisata pendidikan geowisata							Pengelola daya tarik wisata	o PD Provinsi bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			didaya tarik wisata bagi wisatawan umum/pelajar/ mahasiswa								kepariwisataan; o Asosiasi usaha perjalanan wisata
			c.Penyusunan dan penyelenggaraan paket geowisata.							Asosiasi usaha perjalanan wisata	o PD Provinsi bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Asosiasi usaha perjalanan wisata di Bandung
13	Mengembangkan program wisata minat khusus bahari (selam, *snorkeling*, memancing di tengah laut) pada daya tarik wisata berbasis pantai dan pulau-pulau kecil.	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan interpretasi berbasis ekowisata bahari di daya tarik wisata pantai dan pulau-pulau kecil							PDKabupaten/Kota bidang kepariwisataan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisata, bidang kelautan dan perikanan; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			b.Sosialisasi keselamatan dan keamanan penyelenggaraan wisata minat khusus bahari.							Daerah Provinsi	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisata, bidang kelautan dan perikanan; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			c.Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan pelayanan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan wisata minat khusus bahari.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kelautan dan perikanan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
14	Mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif pada daya tarik wisata budaya berbasis pesisir, agrowisata lada dan	Program pembangunan daya tarik wisata	a.Penyusunan dan penyelenggaraan program wisata pendidikan dan wisata kreatif pada daya tarik agrowisata (lada dan lainnya).							-PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pertanian dan perkebunan -Pengelola daya tarik wisata	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bid. kepariwisataan; o Perguruan tinggi bid. kepariwisataan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	lainnya, dan adat-istiadat khas Kepulauan Bangka Belitung, khususnya nanggung dan upacara adat perkawinan.		b.Penyusunan dan penyeleng-garaan program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni, budaya pesisir.							-PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kebudayaan -Pengelola daya tarik wisata	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bid. kepariwisataan
			c.Penyusunan dan penyeleng-garaan paket wisata edukatif dan kreatif di desa wisata.							Pengelola desa wisata	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung
15	15. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sinkronisasi kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi dengan rencana pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang pekerjaan umum; ○ Asosiasi perjalanan wisata Provinsi Kep. Bangka Belitung
			b.Perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju daya tarik wisata provinsi							PD Provinsi Kep. Bangka	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang PU
16	Membangun jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Studi kelayakan pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bid. perhubungan; ○ Perguruan tinggi bidang transportasi
			b.Penyusunan, penetapan, dan							PD Provinsi Kep.	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			sosialisasi rencana pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							Bangka Belitung bidang perhubungan Belitung bidang pekerjaan umum	bidang kepariwisataan
			c. Sinkronisasi program pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; bidang perhubungan
			d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan jaringan transportasi sungai untuk mendukung pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ - SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan
17	Memadukan jaringan transportasi Daerah Provinsi dengan sistem transportasi lintas Sumatera untuk mendukung pariwisata.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sosialisasi program/kegiatan pembangunan keterpaduan jaringan transportasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sistem transportasi lintas Sumatera.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan
			b.Sinkronisasi program/ kegiatan pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. Kepari wisataan, bidang perhubungan
			c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan;

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			kegiatan pembangunan sistem transportasi lintas Sumatera yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							bidang perhubungan	o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bidang perhubungan; o Perguruan tinggi bidang transportasi
18	Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sosialisasi kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan angkutan umum yang menghubungkan KSPP dan KPPP, serta pusat pelayanan primer dan sekunder.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan
			b.Penambahan rute angkutan umum menuju daya tarik wisata primer dan sekunder di KSPP dan KPPP.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan, bidang perhubungan
19	Mengembangkan transportasi wisata untuk mendukung jalur wisata tematik di DPP.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Sosialisasi dan sinkronisasi kebutuhan penyediaan trans-portasi wisata untuk memper-kuat jalur wisata lokal & reg.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,Bidang perhubungan
			b.Penyediaan angkutan wisata dan kelengkapannya, rambu petunjuk arah, serta papan peta dan informasi menuju daya tarik wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; bidang perhubungan
			c.Perbaikan dan pemeliharaan angkutan wisata.							PD Provinsi bidang perhubungan	o PD Provinsi bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bid. Pariwisata;
20	Mengembangkan	Program	a.Penyediaan angkutan umum							PD Provinsi Kep.	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	transportasi terpadu yang menghubungkan bandara/ pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	peningkatan aksesibilitas	rute bandara/pelabuhan Tanj-ungPandan,bandara/ pelab-Pangkalpinang, bandara/ pelab –Sungailiat, bandara/ pelabuhan–Muntok, band/ pelab–Pulau Mendanau							Bangka Belitung bidang perhubungan	bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan,bidang perhubungan
			b.Penyusunan dan penerapan standar pelayanan transpor-tasi terpadu menghubungkan bandara/pelab. dengan pusat pelayanan primer /sekunder.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan bidang perhubungan; o Perguruan tinggi bidang transportasi
21	Mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Palembang, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Batam, Medan, dan Balikpapan.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Koordinasi pengembangan rute & frekuensi penerbangan langsung dari Jakarta, Palem-bang, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali,Batam,Medan,&Balikppan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	o Kementerian bidang kepariwisataan; o Kementerian bidang perhubungan o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan dan penerapan sistem pengelolaan penerbangan Babel							-PD Provinsi bid. perhubungan -Pengelola bandara	o Kementerian bidang perhubungan
			c. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan di bandara.							PD Provinsi bid .perhubungan/bandara	o Kementerian bidang perhubungan; o Perguruan tinggi bidang transportasi
22	Mengembangkan rute dan frekuensi penerbangan dari Malaysia dan Singapura, dan negara sumber pasar wisatawan mancanegara lainnya.	Program peningkatan aksesibilitas	a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi penerbangan langsung dari Malaysia dan Singapura.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	o Kementerian bidang perhubungan; o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan
			b.Studi penilaian kebutuhan pengembangan rute dan frekuensi penerbangan internasional untuk mendukung pariwisata.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	o Kementerian bidang perhubungan o Perguruan tinggi bidang transportasi
23	Mengembangkan rute dan frekuensi pelayaran dari	Program peningkatan aksesibilitas	a.Koordinasi pengembangan rute dan frekuensi pelayaran dari Jakarta, Batam.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	o Kementerian bidang perhubungan; o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Jakarta, Batam, dan daerah sumber pasar wisatawan nusantara lainnya.		b.Studi penilaian kebutuhan pengembangan rute dan frekuensi pelayaran nasional untuk mendukung pariwisata.							- PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. perhubungan	o Kementerian bidang perhubungan o Perguruan tinggi bidang transportasi
24	Menetapkan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi moda transportasi darat dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Program peningkatan aksesibilitas	a.Penyusunan dan penetapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang hukum dan peraturan perundangan
			b.Pendampingan penerapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; o Perguruan tinggi bidang transportasi
			c.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar kenyamanan, keselamatan, dan keamanan angkutan umum darat dan laut di Prov. Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perhubungan	o PD Kabupaten/ Kota bidang perhubungan; o Perguruan tinggi bidang transportasi
25	Meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan & pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas umum	a.Sosialisasi standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, bidang pekerjaan umum
			b.Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	o PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; o PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.		prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan								○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang teknik sipil ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan prasarana umum dan fasilitas umum di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum; ○ Perguruan tinggi bidang teknik sipil
26	Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat dalam pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi, destinasi pariwisata provinsi, kawasan pengembangan pariwisata provinsi, dan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas umum	a.Sosialisasi dan sinkronisasi kebutuhan pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional kepada pihak swasta, pengelola daya tarik wisata, dan masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum
			b.Fasilitasi pengembangan kerja sama pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum berstandar nasional dan internasional.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang pekerjaan umum
										PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, perhubungan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	kawasan strategis pariwisata provinsi.										kepariwisataan, perhubungan
27	Meningkatkan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan terhadap standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Sosialisasi standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;bid. pekerjaan umum
			b.Pelatihan dan pendampigan penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Babel bidang PU; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, Bid.PU ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional dan internasional bagi penyediaan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Babel bidang PU; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan, Bid.PU ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
28	Menyusun dan menetapkan standar bangunan berciri khas lokal dan pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan pedoman bangunan fasilitas pariwisata berciri khas budaya Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum	○ PD Provinsi bid. kepariwisataan; bid. hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bid. kepariwisataan, pekerjaan umum ○ Perguruan tinggi bid kepariwisataan
			b.Penyusunan dan penetapan pedoman pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid. kebudayaan, hukum & peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan & bid. kebudayaan
			c. Penyusunan dan penetapan regulasi waktu operasional fasilitas hiburan dan rekreasi di Kepulauan Bangka Belitung							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bid. kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bid.pariwisata; ○ PD Provinsi bidang hukum dan peraturan perundangan
			d.Sosialisasi standar bangunan							PD Provinsi Kep.	○ PD Kabupaten/ Kota bidang

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			berciri pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat Kepulauan Babel (khas lokal)							Bangka Belitung bidang kepariwisataan	kepariwisataan
			e. Pelatihan dan pendampingan penerapan standar pelayanan berkarakter budaya dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kebudayaan, bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; bidang kebudayaan
			f. Pemantauan dan evaluasi penerapan regulasi waktu operasional fasilitas hiburan dan rekreasi di Kepulauan Bangka Belitung.							PD Kabupaten/ Kota bidang kesatuan polisi pamong praja	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
29	Membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar internasional dan ramah lingkungan di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Sosialisasi standar pelayanan dan pengelolaan ramah lingkungan untuk fasilitas akomodasi, fasilitas makan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
			b.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasi-onal dan ramah lingkungan bagi fasilitas akomodasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;
			c. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas makan dan minum.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kesehatan	○ PD Provinsi bid. kepariwisataan, bid. lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			d.Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas perjalanan wisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid. lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan
			e. Pemantauan dan evaluasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas informasi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi bid.g komunikasi dan informatika, bid. lingkungan hidup; ○ PD Kabupaten/Kota bid. pariwisata; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan, bidang lingkungan
			f. Pemberian insentif bagi fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi berstandar internasional yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang lingkungan hidup ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang lingkungan
30	Mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Penelitian kuota dan lokasi fasilitas akomodasi kelas bintang di Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung bidang tata ruang; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi mekanisme percepatan pengurusan perizinan pembangunan hotel bintang di Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perizinan terpadu	○ PD Provinsi /Kab/Kota bidang kepariwisataan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang perizinan terpadu
			c. Fasilitasi konsultasi pembangunan hotel bintang							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum;

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			dengan para pakar arsitektur, struktur bangunan, dan perhotelan.							bidang kepariwisataan	○ Perguruan tinggi bidang arsitektur
			d.Sosialisasi persyaratan fasilitas dan pelayanan hotel bintang kepada hotel nonbintang dalam rangka peningkatan kelas hotel.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
			e. Fasilitasi peningkatan kelas hotel dari hotel nonbintang ke hotel bintang.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pekerjaan umum; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
31	Mempercepat peningkatan pembangunan fasilitas akomodasi berkelas nonbintang dan pondok wisata (*homestay*) berstandar nasional dan internasional di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Penelitian kuota dan lokasi fasilitas akomodasi kelas nonbintang di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kota Pangkalpinang bidang Kepariwisataan; ○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan; ○ PD Kota Pangkalpinang bidang tata
			b.Penyusunan, penetapan, dan sosialisasi mekanisme percepatan pengurusan perizinan pembangunan hotel nonbintang di Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perizinan terpadu	○ PD Provinsi bid kepariwisataan; Bid. Hukum & peraturan perundangan; ○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan;bid perizinan
			c. Pembinaan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau.							PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidang kepariwisataan; ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang
			d.Dukungan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ Kementerian bidang kepariwisataan;

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			Muntok, Sungailiat, Toboali, dan Pulau Mendanau.							bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
32	Mengendalikan pembangunan fasilitas pariwisata di daerah sempadan pantai dan sempadan lainnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan;	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Kajian pelanggaran daerah sempadan (pantai, sungai, dll) oleh fasilitas pariwisata dan tindakan penanganannya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi bid. perencanaan pemb; bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang perencanaan wilayah dan kota.
			b.Sosialisasi daerah sempadan (pantai, sungai, dll) kepada seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk pengelola usaha							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan, bidang kepariwisataan
			c.Sosialisasi sanksi pelanggaran daerah sem-padan oleh fasilitas pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi bidang perencanaan pembangunan; bidang kepariwisataan
			d.Penandatangan kesepakatan tindakan penanganan pelanggaran daerah sempadan oleh fasilitas pariwisata berdasarkan hasil kajian.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang tata ruang	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang perencanaan pembangunan; bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata
33	Mengembangkan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	a.Sosialisasi pondok wisata (*homestay*) kepada masyarakat di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan ○ Kecamatan/Kelurahan
			b.Penyusunan dan pemutakhiran basis data dan penilaian kesiapan pondok wisata (homestay) di KSPP dan KPPP Babel							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang	○ PD Kabupaten/ Kota bidang

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			c. Pembinaan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			d.Dukungan pengembangan pondok wisata (*homestay*) di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa
34	Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Sosialisasi kualitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat bagi destinasi pariwisata berdaya saing global / berkelanjutan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata
			b.Pelatihan dan pembinaan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global /berkelanjutan.							PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan; ○ Asosiasi usaha pariwisata
35	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Identifikasi potensi dan kelembagaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata provinsi.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Perguruan tinggi dan Asosiasi usaha pariwisata
			b.Fasilitasi pertemuan masya-rakat dengan pengelola daya tarik wisata provinsi untuk sinkronisasi kebutuhan daya tarik wisata berstandar nasional dan internasional dengan potensi masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			c.Pembentukan dan pengembangan lembaga masyarakat sebagai mitra pengelola dan atau pengelola daya tarik wisata provinsi.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang	○ PD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan
			d.Pemantauan dan evaluasi keberhasilan program pening-katan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata provinsi.							SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Kabupaten/Kota bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa
36	Meningkatkan peran Pokdarwis untuk mendukung penge-lolaan KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing global.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Penguatan organisasi Pokdarwis yang sudah ada.							SKPD Kabupaten/ Kota bid. kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa
			b.Pembentukan dan pengembangan Pokdarwis di KSPP dan KPPP Kepulauan Bangka Belitung.							SKPD Kabupaten/ Kota bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; ○ Kecamatan/Kelurahan/ desa
37	Menguatkan peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata berkelanjutan di KSPN Tanjungkelayang dan sekitarnya.	Program peningkatan peran masyarakat	a.Dukungan terhadap penguatan organisasi tata kelola destinasi pariwisata berbasis masyarakat di KSPN Tanjung Kelayang & sekitarnya							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang pariwisata	○ Kementerian bid. kepariwisataan; ○ PD Kabupaten Belitung bidang kepariwisataan; ○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung
			b.Penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengelolaan KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ Kementerian bidan kepariwisataan; ○ PD Kab. Belitung bid. pariwisata; ○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung
			c.Penguatan lembaga koperasi pariwisata sebagai lembaga bisnis pariwisata yang dikelola masyarakat.							PDK Kabupaten Belitung bidang koperasi	○ Kementerian bidang koperasi; ○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Kab. Belitung bid. pariwisata; ○ Kelompok Kerja Lokal Pariwisata DMO Belitung
38	Mengembangkan mekanisme	Program peningkatan	a.Penyusunan dan sosialisasi profil investasi terpadu							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan; ○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	investasi pariwisata	Kepulauan Bangka Belitung berbasis teknologi informasi.							bidang investasi	bidang perdagangan
			b.Penyusunan dan penetapan mekanisme investasi terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bid. kepariwisataan; bid. Perdagangan, bid. hukum dan peraturan perundangan; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi
			c.Penyelenggaraan forum komunikasi dan koordinasi investasi terpadu Prov.i Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan, bidang perdagangan, dan bidang terkait lainnya
			d.Penyepakatan program prioritas bersama pengembangan investasi terpadu Provinsi Babel.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi bidang kepariwisataan bid. Perdagangan dan bidang terkait lainnya
			e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program program prioritas bersama pengembangan investasi terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan; bid. perdagangan & bid. terkait lainnya; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi
39	Menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.	Program peningkatan investasi Pariwisata	a.Penyusunan dan penetapan regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang Investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat; bidang hukum dan peraturan perundangan; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi
			b.Sosialisasi regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan masyarakat; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi dan bidang kepariwisataan
			c. Pemantauan dan evaluasi							PD Provinsi Kep.	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			pelaksanaan regulasi investasi pariwisata yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan alam, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah.							Bangka Belitung bidang investasi	bidang kepariwisataan; bidang lingkungan hidup; bidang kebudayaan, dan bidang pemberdayaan
40	Mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasiskan penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan alam dan budaya.	Program peningkatan investasi pariwisata	a.Penelitian kebutuhan investasi pariwisata dan pendukungnya untuk me-wujudkan destinasi pariwisata berdaya saing global.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			b.Penelitian dampak investasi pariwisata dan pendukung-nya terhadap perwujudan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			c. Penelitian dampak investasi pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya Kep. Babel							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
			d.Penelitian dampak investasi pariwisata terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi; ○ Perguruan tinggi bidang ekonomi/ bidang kepariwisataan
			e. Perumusan dan penetapan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Bangka Belitung bidang kepariwisataan; LH, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, hukum, Perguruan tinggi bidang ekonomi/bidang kepariwisataan
			f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mekanisme pengendalian investasi pariwisata.							PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang investasi	○ PD Provinsi Kep. Bangka Belitung bidang kepariwisataan, bidang lingkungan hidup, bidang kebudayaan, bidang pemberdayaan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN						PELAKSANA	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
											masyarakat; o Perguruan tinggi bidang ekonomi; o Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas untuk tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena untuk program prioritas tahun tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta RKP tahun 2022 yang diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama di tahun 2022 dan mendukung target capaian prioritas nasional.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel V.1

Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional

Tahun 2022

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	**PN : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS**					**115,321,680,779**	
	PP : PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI DENGAN MENGUTAMAKAN PENINGKATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	*15,7*	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	75,000,000	Urusan ESDM
		Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	*68,8%*	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	75,000,000	Urusan ESDM
	PP : PENINGKATAN KUANTITAS/KETAHANAN AIR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI	Produktivitas air (water productivity) (US$/$m^3$)	*4,7*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	117,344,000,000	Urusan PUPR
	PP : PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES DAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	92,8	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infra struktur dan Seluru Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	135,000,000	Urusan Pangan
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,00			35,000,000	Urusan Pangan
		Angka Kecukupan Protein (AKP)(gram/kapita/hari)	57,0	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	40,000,000	Urusan Pangan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevelence of Under- nourishment*/PoU)	5,5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		100,000,000	Urusan Pangan
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecutiry Experience Scale*/FIES)	4,5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		715,130,607	Urusan Pangan
	PP : PENINGKATAN PENGELOLAAN KEMARITIMAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	25,1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	300,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	66,800,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	66,750,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Proporsi tang-kapan jenis ikan yang berada dala batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	<72	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah laut sampai dengan 12 mil	3,500,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukur an di atas 10 GT Sampai dengan 30 GT	750,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabu han Perikanan Provinsi	3,450,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudida yaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Mo dal Asing dan/atau Tenaga kerja Asing	150,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Pembu didayaan Ikan Di Laut	1,831,465,111	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasar an dan Pengola han Hasil Peri kanan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
					Pembinaan Mutu dan Keaman an Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengo lahan dan Pemasar ran Skala Menengah dan Besar	175,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	1,800,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainya yang dapat diusaha kan Lintas Kab/Kota dalam 1 (Satu Daerah Provinsi)	50,000,000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	PP : PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM), DAN KOPERASI	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,8				
		Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	63	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	676,152,000	Urusan UMKM
				Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	398,802,465	Urusan UMKM
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaan nya lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	35,000,000	Urusan UMKM
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaiain Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pin jam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daer Provinsi	90,000,000	Urusan UMKM
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	50,000,000	Urusan UMKM

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pemberdayaan Dan Perlindung an Koperasi	pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggo-taannya lintas daerah kab/ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	165,480,000	Urusan UMKM
	PP : PENINGKATAN NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, DAN INVESTASI DI SEKTOR RIIL, DAN INDUSTRIALISASI	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	50,000,000	Urusan Pertanian
					Pengawasan Mu tu, Penyediaan dan Peredar an Benih Tanaman	100,000,000	Urusan Pertanian
					Peningkatan Ke tersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tana man Paka Ter nak, Bahan Pa kan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	512,899,660	Urusan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	400,000,000	Urusan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Ke sehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 Daera Provinsi	150,000,000	Urusan Pertanian
					Penerapan Per syaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Beba Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	125,000,000	Urusan Pertanian
				Program Pe ngendalian Dan Penang gulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penang-gulangan Ben-cana Pertanian Provinsi	167,906,655	Urusan Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota	20,000,000	Urusan Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	150,000,000	Urusan Pertanian

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	200,000,000	Urusan Pertanian
		Kontribusi PDB kemari timan (%)	7,2				
		Pertumbuh an PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (%)	6,5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Renca na Pembangu nan Industri Provinsi	120,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
		Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	5,2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pari wisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Des tinasi dan Kawa san Strategis Pariwisata Provinsi	2,000,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pe ningkatan Da ya Tarik Desti nasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	784,875,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peni ngkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	792,212,100	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
					Pengelolaan Ka wasan Strategis Pariwisata Provinsi	500,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.439-1.452	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Pe ningkatan Kapa sita Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreati Tingkat Lanjutan	2,300,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
		Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	6,9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pem berian Fasilitas/In sentif di bida ng Penanaman Modal yang menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	290,173,750	Urusan Modal dan PTSP
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	253,489,900	Urusan Modal dan PTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggara an Promosi Pena naman Modal yang menjadi Kewenangan Daeral Provinsi	452,726,250	Urusan Modal dan PTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Mo dal Yang Ruang Lingkup nya Lintas Da erah Kab / Kota	46,000,000	Urusan Modal dan PTSP
					Penanaman Modal Yang Menurut Keter tuan Peraturan Per undang-Undangan Menjadi Kewenang an Daerah Provinsi	436,770,000	Urusan Modal dan PTSP

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	367,133,820	Urusan Modal dan PTSP
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	82,668,900	Urusan Modal dan PTSP
		Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Tenaga Kerja
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (%)	3,2-3,7		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	521,064,826	Urusan Tenaga Kerja
		Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (%)	15,0			71,874,802	Urusan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	20,9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	37,464,514	Urusan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	14,0			44,615,000	Urusan Tenaga Kerja
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	20,0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50,000,000	Urusan Tenaga Kerja
					Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Provinsi	61,248,861	Urusan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kab/Kota	74,440,980	Urusan Tenaga Kerja
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 11 Daerah Provinsi	134,076,288	Urusan Tenaga Kerja

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Penetapan Upah Minimum Provin si, Upah Mini mum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kab Kota, dan Upah Minimum Sekto ral Kab/ Kota	120,000,000	Urusan Tenaga Kerja
				Program Pe ngawasan Ke tenagakerjaan	Penyelenggara an Pengawasan Ketenagakerjaan	186,459,290	Urusan Tenaga Kerja
	PP : PENINGKATAN EKSPOR BERNILAI TAMBAH TINGGI DAN PENGUATAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)	Pertumbuh an ekspor barang dan jasa (Persen)	4,8	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggara an Promosi Da gang melalui Pa meran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Eks por Unggulan yang ter dapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	120,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
		Neraca perdagang an barang (USD miliar)	3,0		Penyelenggara an Promosi Da gang melalui Pa meran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam Provinsi	115,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	**25,0**	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuha Pokok Dan Baran Penting	Menjamin Keter sediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pen ting di Tingkat Daerah Provinsi	33,000,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
					Pengendalian Harga Informasi Ketersedi an Stok Barang Ke butuhan Pokok dan Barang Pen ting pad Pelaku Usaha Dis tribusi Barang Linta Kab/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	152,300,000	Urusan Perindustrian dan Perdagangan
	PP : PENGUATAN PILAR PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING EKONOMI	Kontribusi sektor jasa keuangan/ PDB (Persen)	**4,3**				
		Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	**21,1**				
		Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) (Peringkat)	**N.A.**				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2	**PN : MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**					**95,418,518,078**	
	PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	N.A	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	250,000,000	Urusan DP3ACSKB
			2,21	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	50,000,000	Urusan DP3ACSKB
			N,.A	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	45,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Angka kelahiran total (Total *fertility rate*/TFR)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	105,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75,000,000	Urusan DP3ACSKB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	75,000,000	Urusan DP3ACSKB
	PP : PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	N.A	Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daera Kab/ Kota dalam 1 Daerah Provinsi	84,000,000	Urusan Sosial
					Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1,244,820,600	Urusan Sosial
		Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	N.A		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	428,995,000	Urusan Sosial

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulang kan Ke Daerah Kab/ Kota Asal	20,000,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosi al Dasar Penya dang Disabilitas Terlantar di da lam Panti	195,010,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	106,389,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Ter lant di Dalam Panti	327,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial D Gelan dangan dan Pengemis di Dalam	65,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi So sial l Penyan dang Masala Kesejah teraan Sosia (PMKS) Lainnya di I HIV/AIDS dan NAPZ Dalam Panti	167,576,483	Urusan Sosial
				Program Perlindung an dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pe ngangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	43,392,500	Urusan Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	929,841,132	Urusan Sosial
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	757,200,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlan tar di Dalam Panti	63,946,277	Urusan Sosial
					Rehabilitasi So sial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	85,870,567	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi So sial Dasar Penyan dang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	575,943,567	Urusan Sosial
	PP : PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fa silitas Pelayan an, Sarana, Pra sarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2,810,000,000	Urusan Kesehatan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	18,6				
		Angka kema tian neonatal (per 1.000 ke lahiran hidup)	11,6				
		Angka pre va lens kontra sepsi modern/ *modern Contra ceptive Prevelance Rate* (mCPR)	62,5				
		Persentase kebutuhan berKE yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	8,0	Pemenuhan Upaya Kesehat an Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Laya na Ke sehatan Untuk UKP Ruju kan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	32,071,397,457	Urusan Kesehatan
		Prevalensi was ting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,5				
		Insidensi HIV (pe 1.000 pen duduk yang ti dak terinfeksi HIV)	0,19				
		Insidensi tuber kulosis (per 100.000 penduduk)	231,0				
		Jumlah kab/kota yang men capai eliminasi malaria	365,0				
		Insidensi hepati tis B (%)	1,39				
		% merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9				
		Prevalensi obesi tas pada pendu duk usia > 18 tahun (%)	21,8				
		% tekanan darah tinggi	34,1				
		% fasilitas ke sehatan ting kat pertama terakreditasi	80,0				
		% rumah sakit terakreditasi	**90,0**				
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terinteg rasi	50,000,000	Urusan Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pe layanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	275,300,000	Urusan Kesehatan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Pening katan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Ke sehatan Tingkat Daerah Provinsi	950,100,000	Urusan Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Pengaku an Pedagang Besar Far masi (PBF) Ca bang dan Caba ng Penyalur Alat Ke sehatan (PAK)	20,000,000	Urusan Kesehatan
					Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradi sional (UKOT)	20,000,000	Urusan Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Ko munikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bers dan Sehat dalam Rangka Pro motif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilit as Layanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	40,707,576,090	Urusan Kesehatan
					Penyelenggaraan Sistem Infor masi Kesehatan Secara Terinteg rasi	100,000,000	Urusan Kesehatan
					Penerbitan Izin Ru mah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelaya nan Kesehatan Ting kat Daerah Provinsi	849,927,800	Urusan Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebu tuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	14,342,980,000	Urusan Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkat an Kompetisi Tek nik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	11,000,000	Urusan Kesehatan
	PP : PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kuriku lum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100,000,000	Urusan Pendidikan

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA	Program Guru Da Tenaga Kependidik an	Pemindahan Pen didik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kab/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi	50,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengembang an Kurikulum	Penetapan Kuri kulum Muatan Lokal Pendidik an Khusus	50,000,000	Urusan Pendidikan
		Rata-rata La ma Sekolah Penduduk Usia 1 Tahun Ke atas (Tahun)	8,95	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelo laan Pendidikan Sekolah Menengah A	34,235,900,000	Urusan Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah Pendu du Usia 25 Tahun Keatas (thn)	13,79				
					Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Kejuruan	33,621,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	5,201,300,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Atas	14,021,420,000	Urusan Pendidikan
					Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Keju ruan	1,000,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1,358,296,479	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Atas	300,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Kejuruan	100,000,000	Urusan Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendi dikan Sekolah Menengah Kejuruan	200,000,000	Urusan Pendidikan
	PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lem baga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewe nangan Provinsi	123,496,000	Urusan DP3ACSKB
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkat an Kuali tas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Urusan DP3ACSKB

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekera san terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Dae rah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92,647,000	Urusan DP3ACSKB
					Kegiatan Penyedia an Layanan bagi Anak yang Memer lukan Perlindungan Khusus yang Memer lukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	175,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah me ngalami keke rasan sepan jang hidupnya (%)	Menur un	Program Pengarusutamaa n Gender Dan Pember dayaan Perempuan	Kegiatan Pelemba gaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewe nangan Provinsi	50,450,000	Urusan DP3ACSKB
					Kegiatan Pember dayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	25,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi Kebija kan dan Pendam pingan Keluarga untuk Mewujud kan KG da Perl indungan Anak Kewenangan Pro vinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	75,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Indeks Pemberday aan Gender (IDG)			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkat an Kualitas Keluar ga dalam Mewujud kan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	125,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,756				
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menur un	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	25,000,000	Urusan DP3ACSKB

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Perlindung an Perempuan	Pencegahan Keke rasan ter hadap Per empuan yang me libatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	83,407,000	Urusan DP3ACSKB
					Penyediaan Laya nan Rujukan Lanjut an bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000	Urusan DP3ACSKB
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pem berdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepe mudaan Kewenang an Provinsi	1,240,000,000	Urusan Kepemuda an dan Olahraga
					Pemberdayaan dan Pengembangan Or ganisasi Kepemuda an Tingkat Daerah Provinsi	560,000,000	Urusan Kepemuda an dan Olahraga
	PP : PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase ruma tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (laya nan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	*N.A*	Program Pemberdayaan Sosial	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	84,000,000	Urusan Sosial
		Persentase rum ah tangga miskin dan rentan yang mengakses pen danan usaha	*N.A*		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1,673,815,600	Urusan Sosial
		Luas kawasan hutan yang dike lola oleh masya rakat dan dilepas kan untuk TORA (Ha)	*1,850, 000*				
		Bidang Tanah yang diredistri busi	*N.A*				
		Bidang tanah yang dilegalisasi	*N.A*	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Kor ban Tindak Kekera san dari Titik Debar kasi di Daerah Pro vinsi untuk dipu langkan Ke Daerah Kab/Kota Asal	20,000,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlan tar di dalam Panti	195,010,000	Urusan Sosial

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	106,389,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlan tar di Dalam Panti	327,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi So sial Dasar Ge landangan dan Pengemis di Dalam Panti	65,000,000	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyan dang Masalah Kesejahter an Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	167,576,483	Urusan Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	43,392,500	Urusan Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakup an Daerah Provinsi	929,841,132	Urusan Sosial
				Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	139,550,000	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlan tar di Dalam Panti	63,946,277	Urusan Sosial
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	85,870,567	Urusan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabi litas Terlan tar di dalam Panti	575,943,567	Urusan Sosial
	PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angka tan kerja berpen didikan menen gah ke atas	48.4				
		Jumlah PT yang Masuk ke dalam *World Class University*					
		a. Top 200	0				
		b. Top 300	1				
		c. Top 500	2				
		Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	**47**				
3	**PN : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**					**12,768,277,387**	

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PP : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEO LOGI PANCASILA UNTUK MEM PERKUKUH KETA HANAN BU DAYA BANGS. DAN MEMBENTUK MEN TALITAS BANGSA YANG MAJU, MO DERN, DAN BER KARAKTER		N A	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanga nan Gangguan Ke tentraman dan Ke tertiban Umum Lint Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5,764,050,000	SATPOL PP
					Kegiatan Penega kan Peraturan Dae rah provinsi dan Peraturan Gubernu	285,000,000	SATPOL PP
					Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipi	-	SATPOL PP
				Program pence gahan, penang gulangan, penye lamatan kebakar an dan penyelam tan non kebakara	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	525,084,414	SATPOL PP
	PP : MENINGKATKAN PE MAJUAN DAN PE LESTARIAN KEBUDA YAAN UNTUK MEM PERKUAT KARAK TER DAN MEMPER TEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESE JAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADA BAN DUNIA		N A	Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan Penge lolaan Kebuda yaan yang Masyarakat Pe lakunya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,250,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
					Kegiatan Pembi naa Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	187,500,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kegiatan Pembi naa Kesenian yang Mas yarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	1,995,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pembinaan Sejarah	Kegiatan Pembina an Sejarah Lokal Provinsi	912,500,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pe lestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kegiatan Peneta pan Cagar Buda ya Peringkat Provinsi	312,500,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
					Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	300,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Permuseuman	Kegiatan Penge lolaan Museum Provinsi	875,000,000	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PP : MEMPERKUAT MO DERA BERAGAMA UNTUK ME NGUKUHKAN TOLERAN SI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama	N A				
	PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREA TIVITAS BAGI TER WUJUDNYA MASYARA KAT BERPENGETAHUAN DAN BERKARAKTER			Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingk Daerah Provinsi	50,000,000	Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	311,642,973	Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
4	**PN : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR**					**40,629,473,684**	
	PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rum ah tangga yang menempati huni an dengan kecu kupan luas lantai per kapita (%)	94	Program Pengelolaan Dan Pengem bangan Sistem Penyedia an Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penye diaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	750,000,000	Urusan PUPR
		Persentase ru mah tangga yang menempati huni an dengan keta hanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	84.8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaa Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota	750,000,000	Urusan PUPR
		Persentase ruma tangga yang me miliki sertifikat hak atas tanah untuk perumaha (%)	84.8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pem bangunan	Penyelesaian Ma sal Ganti Keru gian dan Santunan Tanah untuk Pembangun an oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100,000,000	Urusan PUPR
		Rasio outstan ding KPR ter hadap PDB	58.23				
		Persentase ru mah tangga yang menempati hunia dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	*82.07 %*	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pe makaian, Dan Pe ngusaha an Air Ta nah Dalam Daerah Provinsi		Urusan ESDM
		Persentase ru mah tangga yang masih memprak tikkan buang air besar semba rangan (%)	*2.98*	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Dae rah Kab/Kota	11,761,700,000	Urusan PUPR
		Persentase ru mah tangga yang menempati huni an dengan akses sampah yang terkelola dengan	*75.28 %*				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		baik (%)					
		Jumlah Daerah Irigasi yang imodernisasi	**3**				
		Luas lahan per tanian padi dan non- padi yang beririgasi me ningkat (Ha)	11614 2.7083				
		Provinsi dengan penuru nan risi ko bencana di wilayah risiko bencana	**20**				
	PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang ber operasi dalam 5 tahun (2.500 km	N A	Program Penyelenggara an Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	24,778,351,684	Urusan PUPR
		Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenu hi standar (7 pelabuhan)	N A	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pe labuhan Pengum pan Regional	100,000,000	Urusan Perhubungan
					Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Da nau yang Me layani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200,000,000	Urusan Perhubungan
	PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah laya nan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun da dikembang kan (Kota)	N A	Program Penye lenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1,457,250,000	Urusan Perhubungan
				Program Pe nyelenggara an Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ d Jalan	118,620,000	Urusan Perhubungan
	PP : ENERGI DAN KETE NAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	100	Program Penge lolaan Ketenaga listrikan	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasi Dalam Provinsi	75.000.000,-	Urusan ESDM
		Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1268				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PP : TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8.8	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Kominfo
		Persentase penggu na internet (%	79.2				Urusan Kominfo
		Persentase popu lasi yang di jangkau oleh jaringan ber gerak pitale bar (4G) Exis ting Q2 2019: 97,59%	98.5				Urusan Kominfo
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Penge lola Nama Do main yang Telah ditetapkan ole Pemerintah Pusat da Subdomain di Ling kup Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Kominfo
					Kegiatan Pengelola an e-overn ment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Kominfo
				Program Penye lenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyeleng garaan Statistik Sek toral dilingkup Dae rah Provinsi	300,000,000	Urusan Kominfo
				Program Penye lenggaraan Persandian Untu Pengamanan Informasi	Kegiatan Penyeleng garaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerin tah Daerah Provinsi	225,000,000	Urusan Kominfo
					Kegiatan Penetapan Hubungan Komunik Sandi Antar Perangk Daerah Provinsi	88,552,000	Urusan Kominfo
5	**PN : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM**					**3,021,595,000**	
	PP : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1,000,000,000	Urusan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55.3				
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	59.5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Kegiatan Pen cegahan Pence maran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	1,751,937,000	Urusan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	63.5				Urusan Lingkungan Hidup

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidu Untuk Masyaraka	Kegiatan Penyeleng garaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Ling kungan Hidup untuk Lembaga Kemasya rakatan Tingkat Daerah Provinsi	74,658,000	Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pem bin Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Perlindungan Dan Pengelolaan Ling kungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembina an dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	60,000,000	Urusan Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesai Pengaduan Masya rakat di Bidang Perlindu ngan dan Penge lolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	60,000,000	Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan Pemanfaat an Hutan Di Kawas an Hutan Produksi dan Hutan Lindung	50,000,000	Urusan Kehutanan
					Kegiatan Pelaksana an Rehabilitasi di Luar Kawasan Hu tan Negara	25,000,000	Urusan Kehutanan
	PP : PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase poten kehi langan PDB akibat dampak bencana (persen)					
		Persentase penurunan poten kehilangan PDB sektor terdampal bahaya iklim (persen)					
	PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penu runan emisi GRK hadap baseline pada sektor ener gi (persen)	12.8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase penu runan emisi GRK terhadap baselin pada sektor lahar (persen)	53.1				Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase penu runanemisi GRK hadap baseline pada sektor limb (persen)	9.3				Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase penu runan emisi GRK terhadap base line pada sektor IPPU (persen)	2.5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakar Lingkugan Hidup		Urusan Lingkungan Hidup

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
				Lingkungan			
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitk oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Urusan Lingkungan Hidup
6	**PN : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUK HANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK**					**10,376,340,437**	
	PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	*95.47*				
	PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL	Indeks Pembangunan Hukum	*0.69*				
	PP : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian / Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	*80*	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	796,366,000	Bakuda
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	*70*				
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kab/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	*45*				

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pembinaan Pengelolaan Ke uangan daerah Kabupaten/Kota	211,050,000	Bakuda
	PP : MENJAGA STABILI TAS KEAMANAN NASIONAL	Global Fire Powe Index	0.24				
		Global Terorism Index	4:34		Koordinasi dan Pengelolaan Perben daharaan Daerah	257,068,000	Bakuda
		Proporsi orang yang merasa ama berjalan sendiria	>55%				
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Ke uangan Daerah	429,472,000	Bakuda
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	587,488,000	Bakuda
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapat an Daerah	828,501,000	Bakuda
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapat an Daerah	130,520,000	Bakuda
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	536,092,918	Bappeda
					Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Dae rah Bidang Perenca naan Pembangunan Daerah	96,833,300	Bappeda
					Kegiatan Pengen dalian, Evaluasi dan Pelaporan Pemba ngunan Daerah	271,172,000	Bappeda
				Program Koordi nasi dan Sinkro nisasi Perenca naan Pemba ngunan Daerah	Kegiatan Koordi nas Perencana an Bidan Peme rintahan dan Pembangunan Manusia	364,547,150	Bappeda
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	227,089,300	Bappeda

NO	RPJMN TAHUN 2020-2024			RKPD TAHUN 2022			
	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET (2022)	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	KET.
(1)	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185,861,433	Bappeda
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,473,723,350	Inspektorat
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	319,980,000	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	205,650,000	Inspektorat
				Program Penataan Organisasi	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	190,000,000	Biro Organisasi
					Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	383,608,500	Biro Organisasi
				Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	570,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	570,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jas	167,785,975	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	234,221,337	BKPSDM
					Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	250,637,587	BKPSDM
					Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	568,035,000	BKPSDM
					Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	135,000,000	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	91,637,587	BKPSDM
					Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	294,000,000	BKPSDM

6.2. Dukungan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya

Pada RKPD Tahun 2022 masih diarahkan pada belanja bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya (dukungan terhadap perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi masyarakat). Hal ini sebagai upaya kebangkitan di tengah pandemi Covid-19, yaitu dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah serta pembangunan pendidikan. Berikut adalah sub kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya, sebagai berikut:

Tabel VI.2

Dukungan Penanganan Covid-19 dan Dampaknya

NO	URAIAN/SUB KEGIATAN	Indikator	PAGU RKPD 2022	PERANGKAT DAERAH
-1	*-2*	*-3*	*-4*	
I	**PENANGANAN COVID-19**		**3.642.129.957**	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yangdikalibrasi Jumlah pengadaan alat kesehatan	200,000,000	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya	2,196,129,957	DINAS KESEHATAN
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan danMinuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhabilitasi Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat danvaksin esensial	10,000,000	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembelian obat buffer stock	100,000,000	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	801,000,000	DINAS KESEHATAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatanbagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi	130,000,000	DINAS KESEHATAN
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan	50,000,000	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang terkalibrasi	80,000,000	RSUP
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Sprei, handuk, dan pakaian habis pakai yang dibeli	75,000,000	RSUP
II	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**116.827.135.942**	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupunyang dibiayai oleh pemerintah	27,000,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan	73,480,000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah siswa yang mendapat beasiswa	1,000,000,000	

NO	URAIAN/SUB KEGIATAN	Indikator	PAGU RKPD 2022	PERANGKAT DAERAH
-1	-2	-3	-4	
	Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase realisasi bantuan keuangan	47,965,800,000	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pendidikan	506,485,942	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kesehatan	585,000,000	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahtera an Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Sosial	39,696,370,000	
III	**PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT**		**211.407.971.836**	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang di Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	812,968,632	DINAS SOSIAL PEMDES
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna	275,000,000	DINAS SOSIAL PEMDES
	Proses PelaksanaanPendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster Kompetensi	521,064,826	DINAS TENAGA KERJA
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Kegiatan Perempuan Indonesia dan Jumlah Peserta Pembinaan IR	97,450,000	DP3ACSKB
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian PanganLainnya	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100,000,000	DISTAN PANGAN
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana an Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah luasan jalan usaha tani	400,000,000	DISTAN PANGAN
	Pengembangan danPelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan pakanternak (sapi dan ayam)	512,899,660	DISTAN PANGAN
	Pengawasan Mutu,Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah luasan bantuan bibit dan/ atau saprodi tanaman tahunan danpenyegar (sawit, kopi)	9,303,684,000	DISTAN PANGAN
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dariDaerah Provinsi Lain	jumlah pengadaanbibit ternak	2,100,000,000	DISTAN PANGAN
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian	100,000,000	DISTAN PANGAN
	Pengawasan Mutu,Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah luasan bantuan bibit dan/ atau saprodi tanaman tahunan danpenyegar (sawit, kopi,karet)	20,000,000	DISTAN PANGAN
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah tenaga penyuluh yangdiberdayakan	165,480,000	DINAS UMKM
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandirisehingga dapat Meningkatkan Penciptaan LapanganKerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Kecamatan di Kab/Kota yang melakukan pendataanUMKM Jumlah Pendamping yang memberdayakanUMKM Jumlah Temu Mitra UMKM	676,152,000	DINAS UMKM
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana an Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	60,000,000	DISBUDPAR PORA
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100,000,000	DISBUDPAR PORA

NO	URAIAN/SUB KEGIATAN	Indikator	PAGU RKPD 2022	PERANGKAT DAERAH
-1	-2	-3	-4	
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) TingkatLanjutan	Jumlah SDM pemandu wisata yang terlatih	310,000,000	DISBUDPAR PORA
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SumberDaya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang terlatih	230,422,494	DISBUDPAR PORA
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/direhab	7,275,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih EfisienApabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih yang diserahkan ke masyarakat Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan	722,519,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembud dayaan Ikandi Laut	Tersedianya benih yang diserahkan kemasyarakat	617,800,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Peng gunaan SumberDayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatif nya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan	467,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksana an Kebijakan PercepatanPengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina	120,000,000	DISPERINDAG
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaa Pemberdayaan Industri dan PeranSerta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	500,000,000	DISPERINDAG
	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai yang terbangun	25,500,000,000	DINAS PUPR PERKIM
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/kolam retensi yang terbangun	53,500,000,000	DINAS PUPR PERKIM
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah luasan sungan yang di normalisasi/restorasi	15,761,700,000	DINAS PUPR PERKIM
	Rehabilitasi Jalan	Jumlah luas jalan yang direhab	15,000,000,000	DINAS PUPR PERKIM
	Pemeliharaan rutin jalan	Jumlah luas jalan yang dipelihara	24,713,306,850	DINAS PUPR PERKIM
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah luasan irigasi rawa yang ditingkatkan	344,000,000	DINAS PUPR PERKIM
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah luasan irigasi permukaan yang ditingkatkan	20,000,000,000	DINAS PUPR PERKIM
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah luasan jalan yang dilebarkan	31,101,524,374	DINAS PUPR PERKIM

6.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang dimasukan sebelum Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Terdapat usulan permasalahan sebanyak 802 usulan dan yang diakomodir

dalam program/kegiatan provinsi sebanyak 382 usulan dan 420 usulan tidak diakomodir. Tidak diakomdirnya usulan sebagian sebagian besar karena bukan merupakan kewenangan provinsi.

Tabel VI.3

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
1	Trantibumlinmas	Penanganan pemerintah dalam mengatasi banjir, Belum optimalnya intervensi Daerah rawan bencanadalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1 paket	Kampung seberang, Gedung Nasional Taman Sari Kota pangkalpinang		✓	Tidak Tersedianya dana Anggaran untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB karena Defisit anggaran	BPBD
B	BKPSDM							
1	Kepegawaian	Belum Optimalnya Pemenuhan Pegawai ASN yang Sesuai dengan Kebutuhan dan Formasi. Adanya formasi PNS untuk tenaga pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan		✓	Sesuai UU No. 23 Th 2014 tentang PEMDA pasal 12, urusan PAUD dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA. Maka sesuai kewenangan, usulan POKIR Dewan dapat disampaikan ke Pemkab. Belitung Timur.	BKPSDM
C	Perhubungan							
1	Perhubungan	Permohonan bantuan untuk penerangan lampu jalan di desa benteng kota karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Paket	Benteng Kota, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
2	Perhubungan	Bantuan lampu selat karena Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan pengumpan regional	1 Paket	desa sungai padang, Kab. Belitung, Sijuk, Sungai Padang		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
3	Perhubungan	permintaan untuk pengerukan alur sungai karena Kurangnya pemenuhan infrastruktur pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.	1 Paket	desa sungai padang, Kab. Belitung, Sijuk, Sungai Padang		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
4	Perhubungan	Lampu Jalan PLN di Desa Air Saga karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Km	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
5	Perhubungan	Lampu jalan di Desa Pelepak Pute dan Dusun Aik kalak karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Km	Dusun Aik Kalak da Desa Pelepak Pute, Kab. Belitung, Sijuk, Pelepak Pute		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
6	Perhubungan	Perbaikan bagi penerangan yang bermasalah di sepanjang jalan Gantung-Badau karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	50 Km	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
7	Perhubungan	permohonan pemasangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 set	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
8	Perhubungan	untuk menindak lanjuti mengenai penerangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	100 unit	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
9	Perhubungan	Masayarkat mengharapkan penerangan lampu jalan (PLTS) untuk keamanan masyarakat karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Km	Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
10	Perhubungan	Untuk menindak lanjuti mengenai penerangan lampu jalan di dusun Air bakung desa air ruai karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	100 titik	Dusun air bakung desa air ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
11	Perhubungan	Memohon bantuan lampu penerangan jalan disepanjang jalan Dusun Dam Keramat Desa Pemali karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	10 titik	Dusun Dam Keramat, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
12	Perhubungan	Penerangan jalan umum karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 km	Jl. permai 1 RT 22 /09 Kelekak usang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
13	Perhubungan	Lampu Jalan di Desa Pelempang Jaya karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 km	Desa Pelempang Jaya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Pelempang Jaya		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
14	Perhubungan	Masyarakat Mengusulkan Lampu pandu Untuk Nelayan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	5 buah	Desa Air Ketekok, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
15	Perhubungan	Masyarakat mengusulkan Lampu Jalan di RT 08 Dusun permai air ketekok, karena jalan sering digunakan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	2 Km	Desa Air Ketekok, RT 08, Dusun Permai, Air Ketekok, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
16	Perhubungan	Usulan pembuatan lampu jalan untuk mempermudah aktivitas masyarakat karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	30 Buah	Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
17	Perhubungan	Perbaikan penerangan jalan di sepanjang jalan desa Lilangan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan	15 Km	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		provinsi (5 jenis)						
18	Perhubungan	Pengadaan Lampu Jalan di desa Simpang Rusa RT 03 sampai RT 04 karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	50 Set	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
19	Perhubungan	Meminta pengadaan lampu jalan dari RT 02 Sampai RT 04 karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	20 set	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
20	Perhubungan	Meminta pengadaan lampu jalan di sepanjang jalan pengayoman desa cerucuk karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	50 Set	JL. Pengayoman, Cerucuk, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
21	Perhubungan	Meminta pengadaan lampu jalan untuk wilayah cerucuk di depan kantor desa dan wilayah dusun mempiu di sekitar mushola karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	15 set	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
22	Perhubungan	Meminta pengadaan lampu jalan di dusun mentigi karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	30 set	JL. Tuk Anom, Mentigi, Kab. Belitung, Membalong, Mentigi		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
23	Perhubungan	Meminta pengadaan lampu jalan untuk wilayah dusun aik mirah karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	20 set	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Lassar		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
24	Perhubungan	Meminta pengadaan lampu jalan umenuju pelabuhan desa tanjung rusa. karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	30 set	JL. Merdeka, Tanjungrusa, Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
25	Perhubungan	pembangunan penerangan lampu jalan karena Peningkatan keselamatan	1000 meter	jalan hundani, Kota Pangkal Pinang, Gabek,		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan	Dishub

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		angkutan dan jalan		Gabek Dua			pemulihan ekonomi	
26	Perhubungan	pembangunan penerangan lampu jalan karena Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan	1000 meter	jalan rustam effendi, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
27	Perhubungan	Penerangan lampu jalan dan pembangunan tiang listrik karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Paket	Kelurahan Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
28	Perhubungan	Penerangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Paket	RT 05 Gang pisang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
29	Perhubungan	Pemasangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Paket	RT 06 Kelurahan Asam, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
30	Perhubungan	Penerangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	200 unit	Desa Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
31	Perhubungan	Penerangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	100 unit	Desa Telak s/d Desa Bakit, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
32	Perhubungan	Penerangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	100 unit	telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
33	Perhubungan	Penerangan lampu jalan karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	200 unit	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
34	Perhubungan	masyarakat meminta bantuan dalam hal penertiban aturan simbol-simbol lalu lintas seperti lampu merah, tempat mangkal bus yang ada dipersimpangan empat lampu merah jalan mentok karena Kurangnya sarana dan	10 Orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)						
35	Perhubungan	Bantuan Lampu penerangan jalan Desa Pemali karena Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan	1 Paket	Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
36	Perhubungan	Minimnya penerangan lampu jalan sepanjang jalan pangkalpinang - simpang belinyu karena Peningkatan keselamatan angkutan dan jalan	1 Paket	Di seluruh kecamatan dan desa dilintasi jalan kewenangan provinsi bangka belitug, Kab. Bangka, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
37	Perhubungan	masyarakat mengajukan anggaran pembuatan penerangan Lampu Jalan Provinsi karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Paket	Desa Simpang Yul, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
38	Perhubungan	masyarakat mengajukan anggaran pembuatan penerangan Lampu Jalan Provinsi karena Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi (5 jenis)	1 Paket	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak		✓	Karena hanya menjalankan pekerjaan rutin dan pemulihan ekonomi	Dishub
D	Perumahan dan Permukiman							
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat mengeluhkan masalah rumah layak huni, sudah di data tapi tidak terlaksana dengan alasan laporan tidak sampai	100 unit	Kelurahan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam		**ü**	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat mengusulkan pembangunan drainase karena selokan di daerah sekitar terlalu kecil yang mengakibatkan banjir.	2 unit	Desa Air Ketekok, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		**ü**	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan perumahan yang layak huni di Desa Air Ketekok	10 unit	Desa Air Ketekok, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		**ü**	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan pembangunan Drainase di sekitaran Jalan Pak Bujok,	2 unit	Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Buluh Tumbang		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemukiman warga yang dijadikan hutan lindung dan wilayah pemukiman yang terkena pembangunan jalan lingkar, sehingga harus dilaksanakan program pengendalian ruang untuk memperjelas batas wilayah pemerintah.	100 m2	Dusun Ujung Gersik, Kab. Belitung, Membalong, Membalong		ü	SK Gubernur Program relokasi provinsi belum ada dan kesiapan lahan	Dinas Perkim
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Siring simpang Pasar Keretak	10 km	Desa Keretak, Kab. Bangka Tengah, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	penambahan lampu jalan	15 titik	desa sungai padang, Kab. Belitung, Sungai Padang		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Dinas ESDM	Dinas Perkim
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat mengharapkan pembangunan selokan di jalan Pattimura	500 m	Kelurahan Tanjungpendam, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan gorong-gorong/selokan dekat hotel BW Suite karena sering tergenang banjir	500 m	Hotel BW Suite Kelurahan Tanjungpendam, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
10	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat Desa Lintang berharap tersedianya antuan rumah layak huni	1 paket	Air Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang	ü		Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							Belas) Ha)	
11	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program rumah layak huni	20 unit	Desa Karya Makmur, Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur		ü	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
12	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program rumah layak huni	20 unit	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		ü	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
13	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan parit	600.000.000 rupiah	gabek, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan untuk pengajuan bantuan rumah layak huni bagi keluarga yang kurang mampu dan belum memiliki hunian yang layak.	1 paket	Mancung, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung		ü	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan perumahan dan menuju perumahan	3 km	Padang Tekukur Desa, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum mendapatkan akses air PAM yang telah dibangun di desa Renggiang	200 Orang	Desa Renggiang, Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang		ü	Bukan Kewenangan Perkim (bukan Kawasan kumuh dan bukan lintas kabupaten)	Dinas Perkim
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan area penyerapan air dibeberapa titik yang sering terjadi genangan air ketika musim hujan	50 Titik Lokasi	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Dinas ESDM	Dinas Perkim
18	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	sumur bor	180.000.000 Rupiah	Lampur rt 04 rt 15ndan rt 21, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Dinas ESDM	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
19	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat desa Jalan Merak II Samratulangi Kelurahan Srimenanti mangharapkan bantuan pembuatan saluran air/drainase	1 km	Jalan Merak II Samratulangi, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
20	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni	50 unit	Kp. Bukit Intan Lubuk Kelik, Kab. Bangka, Sungailiat, Lubuk Kelik		ü	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
21	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat meminta pengaspalan jalan lingkungan	1 km	Desa Kampung Bukit Intan Lubuk Kelik, Kab. Bangka, Sungailiat, Lubuk Kelik		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
22	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat meminta peningkatan jalan lingkungan	1 km	Kelurahan Surya Timur, Kab. Bangka, Sungailiat, Surya Timur		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
23	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat mengahrapkan bantuan pengaspalan jalan lingkungan namanya jalan Sumatera	1 km	Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
24	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat mengharapkan untuk meningkatkan kualitas jalan yaitu pengaspalan jalan samping lapangan bola	1 km	RT 03 Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
25	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat mengaharapkan pengaspalan jalan sambungan RT 07 dan 08	1 km	RT 07 dan RT 08 Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
26	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	masyarakat meminta perbaikan bandar besar/siring yang sudah rusak	1 km	RT 97 Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
27	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pada saat kemarau masyarakat mengusulkan PAM masuk ke Desa Pemali	50 unit	Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Bukan Kewenangan Perkim (bukan Kawasan kumuh dan bukan lintas kabupaten)	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	mengusulkan perbaikan pembuatan drainase di daerah kuburan Desa Pemali yang sudah ada	1 km	Daerah perkuburan Desa Pemali, Kab. Bangka, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pengaspalan jalan untuk memperlancar akses masyarakat	1 km	Kampung Rambak, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	siring bandar	100 m	RT 06 Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	saluran/gorong-gorong	2 km	jalan di depan fotocopy simpang tiga di jalan srikandi, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
32	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drainase dan talud	1 km	Kecamatan Pemali Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
33	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	renovasi lantai siring dari rumah anak bapak slamet ke kuburan pemali	5 km	Kecamatan Pemali Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		ü	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
34	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jalan setapak dari posyandu ke pantai menjadi jalan yang dapat dilewati mobil	5 km	Kecamatan Sungailiat Kampung Rambak, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
35	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	masyarakat memohon bantuan pembanguanan poskamling di lingkunagan	1 unit	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan		ü	Bukan Kewenangan Perkim	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
36	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	masyarakat memimta untuk pengadaan poskamling di lingkungan	1 unit	pangkalapinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		ü	Bukan Kewenangan Perkim	Dinas Perkim
37	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	masyarakat memohon untuk bantuan dana pembuatan pagar perkuburan daerah bacang di depan sekolah SMADA	1 unit	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Bukan Kewenangan Perkim	Dinas Perkim
38	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	masyarakat memohon untuk bantuan perbaikan drainase di daerah air itam	1 Km	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
39	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	masyarakat memohon adanya perbaikan drainase di lingkungan rejosari	10 Km	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	ü		Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
40	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran primer	1 km	GG. Srigala Kudai Selatan RT.04 (Parit 4), Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
41	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran jalan	1 km	GG. Srigala Kudai Selatan, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
42	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran primer	1 km	GG. Kelinci Kudai selatan, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
43	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran jalan	1 km	GG. Kelinci Kudai Selatan (Parit 4), Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
44	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman /	Pembangunan saluran pembuangan (Talud)	1 km	Kudai Selatan (Parit 4), Kab. Bangka, Sungailiat,		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Kudai			tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	
45	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Talud/drainase	1 km	RT/RW 09/03 Dusun Aik rayak I, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
46	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Talud di Lapangan Tekukur jalan Lingkung RT. 34 panjang 500 m lebar 3 m	1500 m2	Lapangan Tekukur jalan Lingkung RT. 34 panjang 500 m lebar 3 m, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
47	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Talud Perbatasan Kel. Paal Satu Air Ketekok dan Pangkal Lalang	1 km	Perbatasan Kel. Paal Satu Air Ketekok dan Pangkal Lalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
48	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perlunya dilakukan pengerukan saluran got atau normalisasi drainase di sepanjang jalan raya membalong yang ada di wilayah desa cerucuk	10 kilometer	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
49	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar / Siring Jl. Fatmawati dalam mulai dari masjid Umar bin khatab sampai ke jalan H. Umar	150 Meter	Jl. Fatmawati dalam, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
50	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/Bandar/siring Jl. Fatmawati dalam mulai dari jalan H. Umar sampai ke Jl. Maharani	200 Meter	Jl. Fatmawati dalam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
51	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar / Siring Jl. Kulan mulai dari Perumahan Amirah sampai ke Sungai Kulan	250 Meter	Jl. Kulan, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
52	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Jl. H. Umar mulai dari depan sampai ke Toko Nada	250 Meter	Jl. H. Umar, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
53	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/Bandar/Siring Gang Flamenggo mulai dari Jl. H. Umar ke arah Jl. H.Bakir	500 Meter	Gang Flamenggo, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
54	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gang H. Umar 1 Kiri dan Kanan	400 Meter	Gang H. Umar 1, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
55	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gang H. Umar 2 Kiri dan Kanan	400 Meter	Gang H. Umar 2, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
56	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar / Siring Gang Sirih Kiri dan Kanan	400 Meter	Gang Sirih, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
57	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gang H. Umar 4 Kiri dan Kanan	800 Meter	Gang H. Umar 4, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
58	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase / Bandar / Siring Gang H. Umar 7 Kiri dan Kanan	600 Meter	Gang H. Umar 7, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
59	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gang H. Umar 8 Kiri dan Kanan	600 Meter	Gang H. Umar 8, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
60	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Jl. Seni Tari Kiri dan kanan	600 meter	JL. Seni Tari, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
61	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Jalan Sumber Kiri dan Kanan	800 Meter	JL. Sumber, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
62	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Jl. Ikan Lele Kiri dan Kanan	500 Meter	JL. Ikan Lele, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
63	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gang Kembang Kiri dan Kanan	300 meter	Gang Kembang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
64	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gang Bandes	200 Meter	Gang Bandes, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
65	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran primer	1 km	Jln. Sisingamangaraja Kudai Selatan, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
66	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/ Bandar/ Siring Gg. Sulaiman Kiri dan Kanan	200 Meter	Gang Sulaiman, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
67	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran jalan	1 km	Jln. Samratulangi Kudai Selatan (Parit 1), Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
68	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran pembuangan (Talud)	1 km	Jln. Samratulangi Kudai Selatan (Parit1), Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
69	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan Pembangunan Jalan Lingkungan	2 km	Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
70	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengajuan Drainase/Bandar/Siring Jl. Keuskupan Batu Kadera	200 Meter	Jl. Keuskupan Batu Kadera, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
71	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Drainase/Bandar/Siring JL. Mustika	200 Meter	Jl. Mustika, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
72	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Normalisasi dari peningkatan Drainase RT 07 RW 02	250 Meter	RT 07 RW 02 Kelurahan semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
73	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan jalan pemukiman dan plat deker	300 Meter	Jl. Sapu-sapu RT 003 RW 001, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
74	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jl. Lapen RT 10 RW 02 Kelurahan Semabung Lama	190 Meter	Jl. Lapen RT 10 RW 02 Kelurahan Semabung Lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
75	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jl. Lapen Musyawarah RT 10 RW 02 Kelurahan semabung lama	90 Meter	Jl. Lapen Musyawarah RT 10/RW 02 Kelurahan Semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
76	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengajuan Jalan Setapak kiri jalan RT 10 RW 02 Kelurahan Semabung Lama	200 Meter	RT 10 RW 02 Kelurahan Semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
77	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Setapak JL. Manggis RT 07 RW 03 Kelurahan Semabung Lama	150 Meter	Jl. Manggis RT 007 RW 003 Kelurahan Semabung Lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
78	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lapen Jl. Robi	100 Meter	Jl. Robi RT 07 RW 03 Kelurahan Semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
79	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan setapak Gg. Rumbia	100 Meter	Gg. Rumbia Kelurahan semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
80	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Jalan Setapak Gg. Sulaiman	100 Meter	Gg. Sulaiman Kelurahan Semabung Lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							prioritas	
81	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengajuan jalan setapak Kanan jalan RT 10 RW 02 Kelurahan Semabung Lama	200 Meter	RT 10 RW 02 Kelurahan semabung lama, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
82	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengerasan Jalan Puru/Lapen Gg. H.Umar 4	500 Meter	Gg. H.Umar 4, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
83	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengerasan Jalan Puru/Lapen Jl.Seni Tari	500 Meter	JL.Seni Tari, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
84	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengerasan Jalan Puru/Lapen JL. Sumber	600 Meter	JL. Sumber, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
85	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengerasan Jalan puru/Lapen JL.Ikan Lele	250 Meter	JL. Ikan Lele, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
86	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengerasan Jalan Puru/Lapen Gg. Kembang	100 Meter	Gg. Kembang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
87	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan pengaspalan jalan yang jadi penghubung Desa Air Seruk dan Desa Terong	5 km	Desa Terong, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
88	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan pembuatan Talud di Desa Terong	10 meter	Desa Terong, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
89	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran	1 km	Jln, Samratulangi Kampung Songliang Kudai Selatan, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan plat decker	1 Buah	Jln. Samratulangi Kampung Songliang Kudai Selatan, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
91	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran pembuangan (primer)	1 KM	Jl. Depati Amir RT.04 Lingkungan Srimenanti, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
92	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Talud di jembatan/Plat Decker	1 km	Dusun Cit, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Riau Silip, Cit		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
93	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan siring jalan	750 meter	Jalan Nilam Raya Rt 02 Desa Padang Baru, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							kabupaten/kota	
94	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan siring dan Plat Deker 3 buah Desa Bukit Kijang	791 meter	Dusun Bukit Lesung RT 06, Kab. Bangka Tengah, Namang, Bukit Kijang		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
95	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembangunan Siring Jalan Desa Padang Baru	276 m	Jalan Gang Siam RT 01 s.d RT 05 Dusun Padang Baru, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
96	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembuatan Siring Dusun Kemingking	500 meter	RT 05 Dusun Kemingking, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Kemingking		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
97	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembangunan Siring Jalan Lingkar Desa Katis	300 meter	Desa Katis, Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Katis		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
98	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Siring RT 012 Desa Tanjung Gunung	200 meter	RT 012 Desa Tanjung Gunung, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Tanjung Gunung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
99	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran pembuangan	1 km	Jln, Sisingamangaraja Kudai Selatan, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
100	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/Bandar/Siring Jl. Manggis kiri dan kanan 150x2	300 meter	Jl. Manggis RT 07 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
101	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembuatan Drainase/Bandar/Siring Jl. Manggis 100 x 2	200 meter	Jl. Manggis RT 07 RW 03, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
102	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan jalan kampung yang belum pernah dibuat (jalan Baru) dibuat jalan sementara rumah warga sudah banyak dan menuju wisata pemancingan dan perkebunan kelompok-kelompok tani warga serta berada di kecamatan Tanjungpandan	2 km	Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
103	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Jalan baru di depan mushola desa sungai samak	5 kilometer	JL. Pegantungan, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan Jalan Baru di RT 03 RW 04 karena sampai sekarang belum ada pengaspalan	5 kilometer	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
105	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengadaan jalan aspal baru untuk jalan sawah dari RT 01 sampai RT 02 yang sampai hari ini belum di aspal	5 kilometer	JL. Raya Membalong, Jalan Sawah, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
106	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jalan di Dusun Aik Ranggong Desa Air Saga (wilayah perkebunan warga / wisata pemancingan untuk peningkatan perekonomian warga / menambah pendapatan)	3 km	Dusun Aik Ranggong Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
107	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sarana Pemandian umum Dusun Pasir Putih Batubetumpang	200.000.000 Rupiah	Dusun Pasir Putih Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		ü	Bukan kewenangan perkim	Dinas Perkim
108	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan shering jalan Koperasi Desa Batubetumpang	150.000.000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
109	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan perbaikan jalan yang telah rusak	150 Meter	Lingkungan baru, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
110	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bantuan perbaikan rumah	1 Unit	Jalan Mat Yasin RT 25 RW 12, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam		ü	Tidak Masuk Kawasan Kumuh Provinsi (Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha)	Dinas Perkim
111	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pembangunan saluran tersier di jalan jebung dalam	170 juta	jalan jebung dalam, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
112	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pembuatan sarana pemandian umum di belakang polsek gerunggang	200 juta	jalan raya tua tunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		ü	Bukan kewenangan perkim	Dinas Perkim
113	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan bandar atau selokan air di Kelurahan Air Itam	50.000.000 Rupiah	Kelurahan Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
114	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan drainase di Jalan Manggis	100.000.000 Rupiah	Jalan Manggis, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
115	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan selokan air dan penerangan lampu jalan	200.000.000 Rupiah	Jalan Beringin Raya RT 03 RW 10, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
116	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan drainase di Gang Pisang	100.000.000 Rupiah	Gang Pisang Kelurahan Asam, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
117	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan bantuan pembuatan saluran siring bandar	1 Km	Desa Kampung Bukit Intan, Kab. Bangka, Sungailiat, Lubuk Kelik		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
118	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan jalan setapak di Kelurahan Air Itam	80.000.000 Rupiah	Jalan H. Usman, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
119	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan jalan setapak di Gang Sinar	100.000.000 Rupiah	Gang Sinar Kelurahan Air Itam, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	ü		Diakomodir dengan catatan dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu. Penanganannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas	Dinas Perkim
120	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembuatan Talud, saluran Drainase dan peningkatan jalan	800 meter	Jl. Sumatra, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
121	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembuatan Talud, saluran Drainase dan peningkatan jalan	200 meter	jl. Nias Dusun Air Pengabis, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
122	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembuatan Talud, saluran Drainase dan peningkatan jalan	900 meter	Jl. Natuna Dusun Sigambir, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
123	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembuatan Talud, saluran Drainase dan peningkatan jalan	600 meter	Jl. Tarakan Dusun Air Raya, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
124	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pembuatan Talud, saluran Drainase dan peningkatan jalan	140 meter	Jl. Ambalat Dusun Air Bakung, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
125	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Pengaspalan jalan Enggano	1000 meter	Jl. Enggano Dusun Air Pengabis, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
126	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pembangunan saluran drainase kampak 2	200.000.000 rupiah	tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
127	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pembangunan saluran drainase kampak serasi	200.000.000 Rupiah	tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		ü	Tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi dan tidak terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota	Dinas Perkim
128	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Permohonan Bantuan Pembangunan Drainase Jalan Raya Sadai.	1.000.000.000 Rupiah	Desa Bukit Terap, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Bukit Terap	ü		Masuk Kawasan Strategis Provinsi	Dinas Perkim
129	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat meminta untuk pengaspalan jalan dari kelurahan Jerambah Gantung ke Balun Ijuk yang melewati Dusun Air Kulan	1 Buah	Dusun Air Kulan, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		ü	Bukan Kewenangan Perkim, ke Bidang Bina Marga	Dinas Perkim
130	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat meminta agar Desa Air Kulan dibangun listrik	1 Unit	Desa Air Kulan, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		ü	Bukan Kewenangan Perkim, Dinas ESDM	Dinas Perkim
E	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan bantuan talud untuk kawasa Pasir Kuning Tempilang	1 paket	pantai Pasir Kuning Tempilang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tempilang	✓		Rekomendasi : kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2021, sedang dalam proses lelang Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
2	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan pembangunan Embung Sawah Desa Serdang.	216500000 Rupiah	Desa Serdang, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang	✓		Rekomendasi : wilayah sungai kewenangan pusat, untuk irigasi DI kewenangan Provinsi. tahun 2021 akan direncanakan secara swakelola untuk bahan usulan DAK irigasi tahun 2023 Koefisien : 216500000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	bantuan pemecah gelombang pantai Tanjung Pendam	500 m	Kel. Tanjung Pendam, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpendam		✓	Rekomendasi : pembangunan belum diakomodir karena anggaran terbatas, hanya untuk operasi dan pemeliharaan Koefisien : 500 m Anggaran : 1	Dinas PUPR
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat berharap normalisasi sungai air Bebulak	1 sungai	Desa Perawas, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas		✓	Rekomendasi : wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir, karena belum tersedia perencanaan teknis dan terbatasnya anggaran Koefisien : 1 sungai Anggaran : 1	Dinas PUPR
5	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi Belitong Argensi	1 buah	Desa Perawas, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir karena belum adanya perencanaan teknis dan keterbatasan anggaran Koefisien : 1 buah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
6	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi sungai Samak	500 m	Desa Perawas, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir karena belum adanya perencanaan teknis dan keterbatasan anggaran Koefisien : 500 m Anggaran : 1	Dinas PUPR
7	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	bantuan agar kolong bekas pertambangan untuk toidak dibiarkan begitu saja	100 buah	Desa Pelempang Jaya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Pelempang Jaya		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan Provinsi, belum dapat diakomodir untuk pembangunannya karena belum memiliki perencanaan teknis Koefisien : 100 buah Anggaran : 1	Dinas PUPR
8	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meminta pengerukan sungai cerucuk di sepanjang wilayah desa cerucuk	30 kilometer	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir karena belum adanya perencanaan teknis dan keterbatasan anggaran Koefisien : 30 kilometer Anggaran : 1	Dinas PUPR
9	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Usulan terhadap pendalaman daerah pinggir sungai tempat para nelayan menambatkan perahu , karena dalam beberapa tahun terakhir apabila musim kemarau perahu para nelayan tidak bisa merapat ke dermaga	100 meter	Desa Terong, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran Koefisien : 100 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
10	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Realisasi sarana air bersih yang tak kunjung terwujudkan, padahal sudah difasilitasi, namun belum terealisasi.	1 unit	Desa Terong, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, belum dapat diakomodir karena belum adanya perencanaan teknis dan anggaran Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
11	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bantuan Normalisasi sungai	1 Unit	Desa Aik Rayak, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Rayak		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran Koefisien : 1 Unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
12	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan talud sungai dekat SMK Negeri 3 Tanjung Pandan	1 unit	Jl. Rumah Sakit, Kab. Belitung, Parit		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan provinsi, namun belum dapat diakomodir karena keterbatasan anggaran Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
13	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diharapkan kepada Pemerintah untuk membuat Pemecah Ombak / pemecah gelombang di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang Barat, Kabupaten Bangka Barat.	1 paket	Air Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang		✓	Rekomendasi : Wilayah kewenangan Pemerintah Pusat, jika dilaksanakan provinsi perlu perizinan dan kelengkapan readiness criteria, belum diakomodir, karena keterbatasan anggaran. Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
14	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Adanya bantuan pembangunan talud dari pemerintah di pantai desa benteng	1 paket	Desa Benteng, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota		✓	Rekomendasi : Wilayah kewenangan Pemerintah Pusat, jika dilaksanakan provinsi perlu perizinan dan kelengkapan readiness criteria, belum diakomodir, karena keterbatasan anggaran. Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
15	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat meminta bantuan pembangunan pemecah ombak/talud sekaligus sebagai tempat sandaran kapal	1 paket	Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur		✓	Rekomendasi : Wilayah kewenangan Pemerintah Pusat, 2021 terdapat perencanaan oleh Kementerian PUPR Balai WS Babel, 2022 telah masuk Stock Program di Kementerian PUPR dan sedang dalam pembahasan Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
16	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mohon bantuan pemerintah untuk memperbaiki bendungan pinggiran sungai sehingga air tidak masuk	1 paket	Mancung, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai Kewenangan Pusat, Belum dapat diakomodir Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
17	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permasalahan kurangnya air bersih	1 unit	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai Kewenangan Pusat, belum dapat diakomodir karena belum adanya perencanaan teknis Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
18	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	masyarakat kelurahan surya timur meminta bantuan normalisasi saluran air	1 km	Kelurahan surya timur, Kab. Bangka, sungailiat, Surya Timur		✓	Rekomendasi : wilayah sungai kewenangan pusat, belum dapat diakomodir Koefisien : 1 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
19	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendalaman/pengerukan alur karena tidak ada bangunan permanen sehingga terjadi pendangkalan	2 km	jalan depan fotocopy simpang tiga jalan srikandi Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : wilayah sungai kewenangan pusat, belum dapat diakomodir Koefisien : 2 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
20	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan pintu air tambak udang	90000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Daerah irigasi kewenangan pusat. Koefisien : 90000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
21	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perbaikan untuk saluran irigasi dari Bendungan Pice yang tidak lagi berfungsi untuk memenuhi keperluan air bagi lahan pertanian masyarakat dan perbaikan pintu kendali air di sungai untuk mengatasi masuknya air asin ke area persawahan	1 Usulan	Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lenggang		✓	Rekomendasi : Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, tahun 2021 ada review design, tahun 2022 sudah masuk stock program prioritas kementerian PUPR. Koefisien : 1 Usulan Anggaran : 1	Dinas PUPR
22	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi saluran irigasi tambak udang Batubetumpang	190000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Belum adanya pelimpahan kewenangan irigasi tambak Batu Betumpang ke provinsi Koefisien : 190000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
23	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi/Normalisasi saluran irigasi Tambak di Desa Batubetumpang	200000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Belum adanya pelimpahan kewenangan irigasi tambak Batu Betumpang ke provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
24	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permasalahan kurangnya air bersih	1 unit	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		✓	Rekomendasi : wilayah sungai kewenangan pusat, belum dapat diakomodir, belum adanya perencanaan teknis Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
25	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Normalisasi dan pemasangan dinding penahan tanah (talud) Kolong Kongnung (Swadaya)	2000000000 Rupiah	Kolong Kongnung Kelurahan Pasar Padi, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2000000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
26	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diharapkan tersedianya pembangunan Sarana Air Bersih atau Sumur Bor berkapasitas besar di desa air lintang	1 paket	Kampung Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang		✓	Rekomendasi : Bisa diajukan ke Dinas PRKP Bidang CK Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
27	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	masyarakat mohon bantuan untuk sumur bor bagi warga di dataran tinggi	2 unit	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 2 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
28	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 unit	kelurahan ampui, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
29	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 unit	kelurahan selindung, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
30	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 unit	kelurahan opas indah, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
31	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 unit	kelurahan sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
32	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 unit	kelurahan pintu air, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 unit	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							Anggaran : 1	
33	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 unit	kelurahan bacang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
34	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan sumur bor air bersih bagi masyarakat	1 bangunan	kelurahan kacang pedang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		✓	Rekomendasi : Wilayah sungai kewenangan pusat, jika sesuai UU 17/2019 sumur bor harus melalui perizinan ke kementerian PUPR Koefisien : 1 bangunan Anggaran : 1	Dinas PUPR
35	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional provinsi	1 unit	desa jelutung, Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung		✓	Rekomendasi : Bukan kewenangan Dinas PUPR, bisa diusulkan ke Dinas PRKP Bidang CK Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
36	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan terminal terpadu provinsi	1 unit	desa padang baru, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru		✓	Rekomendasi : Bukan kewenangan Dinas PUPR, bisa di ajukan ke Dinas Perhubungan Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
37	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jalan dari simpang bandara sampai ke arah bawah desa buluh tumbang yang batal dibangun.	2 km	Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Buluh Tumbang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
38	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengaspalan jalan dan peningkatan jalan serta perbaikan jalan perkuburan dan pengaspalan jalan	10 km	Desa Keretak, Kab. Bangka Tengah, sungai Selan, Keretak		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 10 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
39	PEKERJAAN UMUM DAN	Perbaikan jalan dan shiring dari parit	10 km	Desa sungai Selan, Kab.		✓	Rekomendasi : Bukan	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
	PENATAAN RUANG	tiga, kelurahan sungai selan		Bangka Tengah, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			Kewenangan Provinsi Koefisien : 10 km Anggaran : 1	
40	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	perbaikan jalan di desa sungai padang	30 Km	desa sungai padang, Kab. Belitung, Sijuk, sungai Padang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 30 Km Anggaran : 1	Dinas PUPR
41	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	perbaikan jalan di desa sungai padang	30 Km	Desa sungai Padang, Kab. Belitung, Sijuk, sungai Padang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenagan Provinsi Koefisien : 30 Km Anggaran : 1	Dinas PUPR
42	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pemeliharaan jalan di jalan raya Dusun Aik Begantung. kondisi rusak sering kecelakaan	3 km	jalan raya Dusun Aik Begantung, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 3 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
43	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi jalan bukit katak antara simpang kubur ke TK sepanjang 1,5 Kilometer yang terdapat di Desa Lintang	1 paket	Kampung Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
44	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Bantuan pengaspalan jalan pondok pesantren hubbul quran sinar baru	2 km	Desa Sinar Baru, Kab. Bangka, sungailiat, Sinar Baru		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
45	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jalan dan jembatan	5 km	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 5 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
46	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelebaran jalan sungailiat-belinyu	10 km	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 10 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
47	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mohon bantuan pembangunan jembatan kayu dari dusun lintas sampai desa Mancung agar di bangun menjadi jembatan permanen	1 paket	Mancung, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
48	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengurukan jalan tanah puru Rt 04 dan rt 08 sepanjang 500 meter	198000000 Rupiah	NAMANG RT 04 DAN RT 08, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 198000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
49	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pemasangan siring dan plat Doiker	200000000 Rupiah	NAMANG RT 01 MENUJUH RT 0003, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
50	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemasangan siring desa namang	185000000 Rupiah	desa namang rt 02, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 185000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
51	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemasangan primer 100 M	195000000 Rupiah	DESA CAMBAI RT 01, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 195000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
52	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemasangan siring 250 M	175000000 Rupiah	DESA CAMBAI RT 02, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
53	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat di Kecamatan Tempilang mengharapkan tersediannya akses jalan yang memadai antar desa dalam kecamatan.	3 paket	Air Lintang, Benteng Kota dan Tempilang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tempilang, Seluruh Kelurahan/Desa		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 3 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
54	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemasangan siring 250 m RT 03	175000000 Rupiah	Desa cambai Rt 03, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
55	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pemasangan gorong gorong desa nibung	200000000 Rupiah	desa nibung, Kab. Bangka Tengah, Koba, Nibung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
56	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pemasangan siring	200000000 Rupiah	cambai selatan rt 06, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
57	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pemasangan siring rt 08 volume 300 M	175000000 Rupiah	Desa cambai Rt 08, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai Selatan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
58	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pemasangan siring 300 m rt 05	175000000 Rupiah	cambai selatan rt 05, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai Selatan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
59	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	penggurukan jalan puru 1400 m rt 04	200000000 Rupiah	cambai selatan, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai Selatan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
60	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Desa Ketap juga mengharapkan adanya pembangunan jalan sekolah yang masih berupa tanah merah	1 paket	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
61	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pengawalan perbaikan jalan	1 set	Desa Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 set Anggaran : 1	Dinas PUPR
62	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rebab aspal jalan Galena	100 m	Desa Pemali RT. 06, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 100 m Anggaran : 1	Dinas PUPR
63	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehab aspal jalan topaz	1.2 km	jalan Topaz, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1.2 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
64	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring dan Plat Deker 170 Meter	200000000 Rupiah	NAMANG RT 01 MENUJUH RT 03, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
65	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring Desa Namang 175 Meter	185000000 Rupiah	Desa Namang Rt 02, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenagang Provinsi Koefisien : 185000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
66	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring Primer 100 Meter	195000000 Rupiah	Desa cambai Rt 01, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 195000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
67	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring 250 Meter Rt 02	175000000 Rupiah	DESA CAMBAI RT 02, Kab. Bangka Tengah, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
68	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring 250 Meter Rt 03	175000000 Rupiah	DESA CAMBAI RT 03, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangann Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
69	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Gorong-Gorong Desa Nibung	200000000 Rupiah	Desa Nibung, Kab. Bangka Tengah, Koba, Nibung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
70	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring	200000000 Rupiah	Cambai Selatan Rt 06, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
71	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunann Siring volume 300 Meter Rt 08	175000000 Rupiah	Desa Cambai Rt 08, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai Selatan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
72	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring 300 Meter Rt 05	175000000 Rupiah	Cambai Selatan Rt 05, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai Selatan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 175000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
73	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring Beton sepanjang 400 Meter (200 Meter Kiri + 200 Meter Kanan)	200000000 Rupiah	Desa air pasir pinang seribu, Kab. Bangka Tengah, sungai Selan, sungai Selan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
74	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarrakat meminta perbaikan jembatan di DAM I yang sudah lama rusak	1 unit	Desa Air ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 unit Anggaran : 1	Dinas PUPR
75	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan hotmix RT 15	3 km	RT. 15 Paal 1, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 3 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
76	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat meminta perbaikan jalan yang rusak disepanjang jalan dusun Dam Keramat desa pemali dan diaspal kembali	50 km	Dusun Dam Keramat, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 50 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
77	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan dan pengaspalan jalan saukemang	10 km	Desa Saukemang, Kab. Belitung, Selat Nasik, Petaling		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 10 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
78	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	meminta jalan pengayoman desa cerucuk untuk ditingkatkan menuju standar	5 kilometer	JL. Pengayoman, Cerucuk, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 5 kilometer Anggaran : 1	Dinas PUPR
79	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Untuk ditindak lanjuti perbaikan jalan yang rusak di sepanjang jalan lingkar Desa akibat rusak berat dan segera diaspal	20 Km	Desa Dalil, Kab. Bangka, Bakam, Dalil		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 20 Km Anggaran : 1	Dinas PUPR
80	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat mengharapkan adanya bantuan rehabilitasi jalan yang telah rusak di desa kace	2 Km	Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2 Km Anggaran : 1	Dinas PUPR
81	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jalan alternatif Jangkang-Lidun dan Jangkang-Kembiri supaya mempercepat akses masyarakat Jangkang ke pusat kota maupun pemerintahan	40 Kilometer	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 40 Kilometer Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
82	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perbaikan jalan menuju lokasi persawahan di Danau Nujau	5 Kilometer	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 5 Kilometer Anggaran : 1	Dinas PUPR
83	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan usaha Tani Desa Sidoarjo perbatasan Panca Tunggal	200000000 Rupiah	Desa Sidoarjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
84	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan usaha Tani Desa Panca Tunggal ke perbatasan Desa Sidoarjo	200000000 Rupiah	Desa Panca tunggal, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
85	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	masyarakat mengharapkan Pembangunan play over dan jalan sawah dusun kamat	100000000 Rupiah	dusun kamat, desa simpang yul, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 100000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
86	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan usaha tani sawah di lokasi persawahan sungai ulim	190000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 190000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
87	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jembatan pejalan kaki di Taman wisata Mangrouve di pantai Batubetumpang	200000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
88	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan jalan/ Peningkatan jalan	2 km	Dusun I dan Dusun II Desa Pasir Garam, Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Pasir Garam		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
89	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan Sambungan jalan Desa Munggu	726 meter	Desa Munggu, Kab. Bangka Tengah, sungai Selan, Munggu		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 726 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
90	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Bantuan jalan Lingkar Desa Celuak	2 km	Desa Celuak, Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Celuak		✓	Rekomendasi : Ruas jalan Provinsi di daerah tersebut adalah Namang-Puput, apakah jalan lingkar Desa Celuak tersebut ada pada ruas jalan tersebut? Koefisien : 2 km Anggaran	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							: 1	
91	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan jalan Setapak Dusun pantai dan Dusun Batu Belubang	350.5 meter	Dusun pantai dan Dusun Batu Belubang, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Batu Belubang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 350.5 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
92	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan jalan Produksi Desa Jelutung	2.5 km	Desa Jelutung Rt 02 dan Rt 013 (RAPAK), Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2.5 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
93	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan jalan Tanh Puru dan 1 plat deker	1000 meter	Dusun Bukit Lesung RT 07 Desa Bukit Kijang, Kab. Bangka Tengah, Namang, Bukit Kijang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1000 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
94	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pengerasan jalan Desa Padang Baru	300 meter	jalan Rambutan RT 01 Dusun Padang Baru, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Padang Baru		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 300 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
95	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan jalan Tanah Puru Desa Tanjung Gunung	2 km	Desa Tanjung Gunung RT 02 dan RT 11 Desa Tanjung Gunung, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Tanjung Gunung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
96	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penimbunan jalan Tanah Puru Dusn Malik Baru	220 meter	RT 11 Dusun Malik Baru, Kab. Bangka Tengah, sungai Selan, Kemingking		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 220 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
97	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan saluran air dari Rt 001 menuju Rt 003	388 meter	jalan lingkar Rt 001 menuju Rt 003, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 388 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
98	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan siring/drainase	1 km	desa baskara bakti, Kab. Bangka Tengah, Namang, Baskara Bakti		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
99	PEKERJAAN UMUM DAN	Pembangunan SIRING	300 meter	Desa kayu besi gang karet		✓	Rekomendasi : Bukan	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
	PENATAAN RUANG			Rt 03, Kab. Bangka Tengah, Namang, Kayu Besi			Kewenangan Provinsi Koefisien : 300 meter Anggaran : 1	
100	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dengan Aspal Lapen Desa Fajar Indah	200000000 Rupiah	Desa Fajar Indah, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Fajar Indah		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
101	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan Desa Suka jaya dengan Aspal Lapen	200000000 Rupiah	Desa Suka Jaya, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Sukajaya		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
102	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan Desa Sumber Jaya Permai dengan Aspal Lapen	200000000 Rupiah	Desa Sumber Jaya Permai, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Sumber Jaya Permai		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan Desa Panca Tunggal dengan aspal lapen	200000000 Rupiah	Desa Panca Tunggal, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
104	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan Desa Sidoharjo dengan Aspa Lapen	200000000 Rupiah	Desa Sidoharjo, Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Sidoharjo		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
105	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan lingkungan di Desa Batebetumpang dengan Aspal Lapen dari jalan BOM lama sampai dengan jalan Masjid	200000000 Rupiah	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
106	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Rangka Baja pasar desa	200000000 Rupiah	desa cambai selatan, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai Selatan		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
107	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Siring jalan Lingkar Desa	200000000 Rupiah	Desa belilik, Kab. Bangka Tengah, Namang, Belilik		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
108	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan usaha Tani sawah Desa sebagin	200000000 Rupiah	Desa Sebagin, Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Sebagin		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
109	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan perbaikan kerusakan jalan aspal dari Serdang hingga Dusun Mempunai.	10 KM	Desa Serdang, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 10 KM Anggaran : 1	Dinas PUPR
110	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jembatan jalan usaha Tani lokasi persawahan sungai Ulim Batu Betumpang	220000000 Rupiah	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 220000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
111	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan lingkungan Desa Batubetumpang dengan Aspal Lapen dari jalan keramat Batu Betumpang sampai dengan jalan kepantai Batu Betumpang	220000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 220000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
112	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan lingkungan Desa Batubetumpang dari jalan lapangan bola Batubetumpang Barat sampai dengan jembatan Tebet	230000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 - Anggaran : 1	Dinas PUPR
113	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan lingkungan Desa BatuBetumpang dari jembatan Tebet sampai dengan Lapangan Bola Timur BatuBetumpang	220000000 Rupiah	Desa BatuBetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 220000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
114	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan lingkungan Desa BatuBetumpang dari jalan Lapangan Bola Timur sampai dengan jalan SD Desa BatuBetumpang	210000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 210000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
115	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Pasir Putih Desa BatuBetumpang dengan Aspal Lapen	210000000 Rupiah	Dusun Pasir Putih BatuBetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 210000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
116	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jembatan penyeberangan Nelayan dan Anggota tambak udang Desa BatuBetumpang	210000000 Rupiah	Desa BatuBetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 210000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
117	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan Desa Panca Tunggal degan Aspal Lapen	220000000 Rupiah	Desa Panca Tunggal, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Panca Tunggal		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 220000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
118	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan Desa Sumber Jaya Permai dengan Aspal Lapen	220000000 Rupiah	Desa Sumber Jaya Permai, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Sumber Jaya		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 220000000	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
				Permai			Rupiah Anggaran : 1	
119	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan bekas timbunan sebelah kanan Galian dengan P.800M dan L.5M	230000000 Rupiah	Desa BatuBetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 230000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
120	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan bekas timbunan kiri galian dengan P.800M dan L.5M	200000000 Rupiah	Desa BatuBetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
121	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan pagar sekolah SMA Negeri 1 Pulau Besar	190000000 Rupiah	Desa BatuBetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 190000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
122	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat meminta bantuan untuk perbaikan jalan daerah pangkal balam	15 Km	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 15 Km Anggaran : 1	Dinas PUPR
123	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Desa Ketap juga mengharapkan adanya pembangunan jalan sekolah yang masih berupa tanah merah	1 paket	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 paket Anggaran : 1	Dinas PUPR
124	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat mengharapkan adanya pengaspalan jalan di Desa Kace yang belum di aspal.	3 km	Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 3 km Anggaran : 1	Dinas PUPR
125	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Peningkatan jalan usaha tani Rt 001 Air Simpur Dusun Damkramat	196000000 Rupiah	RT 001 Air Simpur Dusun Damkramat, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 196000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
126	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Peningkatan jalan Usaha Tani Jl AirRajak Rt 002 Dusun Damkramat	158000000 Rupiah	Jl. Air Rajak RT 002 Dusun Damkramat, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 158000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
127	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Peningkatan jalan Usaha Tani Jl Pramuka Rt 008 Dusun Sumbawa	17000000 Rupiah	Jl Pramuka Rt 008 Dusun Sumbawa, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 17000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
128	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Peningkatan jalan Usaha Tani Jl Travo Rt 008 Dusun Taruna Setia	16000000 Rupiah	Jl. Travo Rt 008 Dusun Taruna Setia, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 16000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
129	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Peningkatan jalan Usaha Tani Jl TK II Rt 004 Dusun Sumbawa	174000000 Rupiah	Jl TK II Rt 004 Dusun Sumbawa, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 174000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
130	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan Siring di Simpang Siput Rt 003 Lingkungan Kudai Utara	1 kegiatan	Simpang Siput Rt 003 Lingkungan Kudai Utara, Kab. Bangka, sungailiat, Sinar Jaya Jelutung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1	Dinas PUPR
131	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Pembangunan Box Culvert RT 001 Lingkungan Sinar Jaya (Perbatasan Lingkungan Kuday Utara)	1 kegiatan	RT 001 Lingkungan Sinar Jaya (Perbatasan Lingkungan Kuday Utara), Kab. Bangka, sungailiat, Sinar Jaya Jelutung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1	Dinas PUPR
132	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan pengaspalan jalan di Rt 001 Lingkungan Jelutung	1 kegiatan	Rt 001 Lingkungan Jelutung, Kab. Bangka, sungailiat, Sinar Jaya Jelutung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1	Dinas PUPR
133	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan pembangunan siring di RT 003 dan Rt 001 Lingkungan Ake	1 kegiatan	RT 003 dan Rt 001 Lingkungan Ake, Kab. Bangka, sungailiat, Sinar Jaya Jelutung		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1	Dinas PUPR
134	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	permohonan bantuan pembangunan siring beton panjang 900 meter untk penghubung jalan dari RT 02 Dusun Muntabak sampai dengan RT 03 Dusun Penyamun	200000000 Rupiah	Desa Penyamun Kecamatan Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Penyamun		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
135	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Permohonan Bantuan jalan Usaha Tani sepanjang 1,5 KM dari Parit 10 menuju Dusun Bokor Rt 15 (jalan Lingkar)	1 kegiatan	Desa Air Duren, Kab. Bangka, Pemali, Air Duren		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1	Dinas PUPR
136	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	permohonan peningkatan jalan Usaha Tani Air Simpur Dusun Damkramat	199400000 Rupiah	Air Simpur Dusun Damkramat, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 199400000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
137	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	kurangnya perawatan jalan sungailiat - bakam melintasi pedesaan mabat,	1000000000 Rupiah	Di sepanjang jalan sungailiat - bakam, Kab.		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		mangka, dan lain - lainnya		Bangka, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa			Koefisien : 1000000000 Rupiah Anggaran : 1	
138	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan saluran primer dan sekunder serta peninggian jalan di Pasar Kampung Bintang	500000000 Rupiah	jalan Theresia Kelurahan Bintang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 500000000 Rupiah Anggaran : 1	Dinas PUPR
139	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	permohonan pengajuan permbukaan Jl Makam Depati Bahrin menuju sawah	1 Set	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 Set Anggaran : 1	Dinas PUPR
140	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	permohonan pengajuan pembukaan Jl. Baru dari sawit H. Juntub menuju sawit H. Junaidi	1 Set	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 Set Anggaran : 1	Dinas PUPR
141	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	permohonan pengajuan untuk siring batu merah	2000 meter	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 2000 meter Anggaran : 1	Dinas PUPR
142	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	permohonan perbaikan jalan Rabat Beton sepanjang 400 meter dan lebar 2 meter	1 Set	Desa Kimak, Kab. Bangka, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Rekomendasi : Bukan Kewenangan Provinsi Koefisien : 1 Set Anggaran : 1	Dinas PUPR
143	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perbaikan dan pelebaran jalan.	2 km	Desa Air Ketekok, Kab. Belitung, Paal Satu	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Dalam Kota Tanjungpandan; Tanjungpandan-Simpang Empat (Sijuk) Koefisien : 2 km Anggaran : 700350000	Dinas PUPR
144	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelebaran dan perbaikan jalan provinsi di desa pelepak pute sejauh 20 Km	20 Km	Desa Pelepak Pute, Kab. Belitung, Pelepak Pute	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Simpang Empat (Sijuk) - Buding Koefisien : 20 Km Anggaran : 607000000	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
145	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelebaran jalan Provinsi dari Desa Sijuk sampai Desa Pelepak Pute	10 km	sepanjang Desa Sijuk sampai Desa Pelepak Pute, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Simpang Empat (Sijuk) - Buding Koefisien : 10 km Anggaran : 607000000	Dinas PUPR
146	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	perbaikan jalan desa Buluh Tubang sampai desa Buding	20 Km	desa buluh tumbang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penanganan rutin jalan Perawas - Buding Koefisien : 20 Km Anggaran : 606200000	Dinas PUPR
147	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan Produksi desa Kerakas-lampur-kerantai	10 km	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah, sungai Selan, Lampur	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Namang-Puput; Puput-Sp.Katis; Puput-Sp.Gedong; sungai Selan-Lampur-Sp.Gedong Koefisien : 10 km Anggaran : 695200000	Dinas PUPR
148	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan jalan Provinsi Desa Lampur-sungai Selan	10 km	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk kedalam penangan Rutin jalan Namang-Puput; Puput-Sp. Katis; Puput-Sp. Gedong; sungai Selan-Lampur-Sp. Gedong Koefisien : 10 km Anggaran : 695200000	Dinas PUPR
149	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	perbaikan dan pelebaran jalan dari dsa Badau sampai Desa Dendang	8 Km	desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Badau-Dendang; Bantan-Pelulusan Koefisien : 8 Km Anggaran : 949800000	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
150	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diperlukan pemeliharaan rutin bandar jalan di desa Lintang	1 paket	Kampung Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Puding Besar-Saing-Kota Waringin; sungai Dua-Dam III-Sangku Koefisien : 1 paket Anggaran : 796800000	Dinas PUPR
151	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelebaran jalan Desa Ibul	3 km	Desa Ibul, Kab. Belitung, Badau, Ibul	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Badau-Dendang; Bantan-Pelulusan Koefisien : 3 km Anggaran : 949800000	Dinas PUPR
152	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	pembangunan siring sepanjang jalan raya sungkap	200000000 Rupiah	desa sungkap, Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Sungkap	✓		Rekomendasi : Kewenangan Provinsi, sementara ruas tersebut masuk dalam penanganan Rutin jalan Namang-Puput; Puput-Sp.Katis; Puput-Sp.Gedong; sungai Selan-Lampur-Sp.Gedong Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 695200000	Dinas PUPR
153	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelebaran jalan Gantung-Badau	50 Kilometer	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penangan Rutin jalan Dendang - Gantung Koefisien : 50 Kilometer Anggaran : 739200000	Dinas PUPR
154	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Desa Telak mengharapkan adanya pembuatan siring	1 paket	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penanganan rutin jalan Parit Tiga - Tanjung Ru Koefisien : 1 paket Anggaran : 541200000	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
155	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Desa Telak mengharapkan adanya pembuatan siring	1 paket	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penangan rutin jalan Parit Tiga - Tanjung Ru Koefisien : 1 paket Anggaran : 541200000	Dinas PUPR
156	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	masyarakat memohon semua pihak yang terkait membantu berjalannya realisasi pembangunan jembatan di wilayah rejosari	1 set	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penanganan rutin jalan Pangkalpinang-Batas Kota (SP. Katis); A. Yani; Sp. Semabung-Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Sp. Pasir padi-Alexander; PPI; Sp. Alexander-Sp. Lingkar Timur; Sp. Pulau Bangka-Sampur Koefisien : 1 set Anggaran : 673440000	Dinas PUPR
157	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jalan baru di wilayah desa cerucuk RT 02 sampai RT 04 dusun cerucuk depan lapas cerucuk	6 kilometer	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk	✓		Rekomendasi : masuk kedalam ruas penanganan rutin jalan Junction - Membalong Koefisien : 6 kilometer Anggaran : 940800000	Dinas PUPR
158	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masyarakat juga meminta perbaikan jalan yang rusak	20 km	Desa Air ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai	✓		Rekomendasi : apakah masuk ruas jalan provinsi? jika iya, kegiatan masuk kedalam ruas penanganan rutin jalan sungailiat - Puding Besar Koefisien : 20 km Anggaran : 597400000	Dinas PUPR
159	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pelebaran jalan di sepanjang Desa Lilangan	15 Kilometer	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan	✓		Rekomendasi : Apakah jalan tersebut masuk ruas jalan Provinsi? Jika iya ruas tersebut ditangani kegiatan Rutin jalan Dendang - Gantung Koefisien : 15 Kilometer Anggaran : 739200000	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
160	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perbaikan dalam meningkatkan kualitas jalan Sudirman yang sering tergenang air ketika hujan	10 Kilometer	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	✓		Rekomendasi : Apakah jalan tersebut masuk ruas jalan Provinsi? Jika iya ruas tersebut ditangani kegiatan Rutin jalan Dendang - Gantung Koefisien : 10 Kilometer Anggaran : 739200000	Dinas PUPR
161	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembanguanan ruas jalan Dendang Gantung	2500000000 Rupiah	Desa Dendang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang	✓		Rekomendasi : Ruas jalan tersebut ditangani kegiatan Rutin jalan Dendang - Gantung Koefisien : 2500000000 Rupiah Anggaran : 739200000	Dinas PUPR
162	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan ruas jalan Badau Dendang	4300000000 Rupiah	Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	✓		Rekomendasi : Ruas tersebut ditangani kegiatan Rutin jalan Badau - Dendang; Bantan - Pelulusan Koefisien : 4300000000 Rupiah Anggaran : 949800000	Dinas PUPR
163	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi jalan A Yani dan Perbaikan Pedestrian	1500000000 rupiah	Jl. A Yani, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penanganan rutin jalan Pangkalpinang-Batas Kota (SP. Katis); A. Yani; Sp. Semabung-Sampur; Trem; RE. Martadinata; Sumberejo; Sp. Pasir padi-Alexander; PPI; Sp. Alexander-Sp. Lingkar Timur; Sp. Pulau Bangka-Sampur Koefisien : 1500000000 rupiah Anggaran : 673440000	Dinas PUPR
164	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan jalan Provinsi Desa Batub Betumpang sampai Desa Bedengung	21 KM	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	✓		Rekomendasi : Masuk dalam ruas penanganan rutin jalan Air Gegas-Bedengung; Bedengung-Batu Betumpang Koefisien : 21 KM Anggaran : 929000000	Dinas PUPR

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
F	Sosial							
1	Sosial	Program BLT yang tidak tepat sasaran		Desa Teru, Kab. Bangka Tengah, Teru	✓		Penerima BLT diusulkan dan input dari Desa/Kel masing-masing melalui Dinas Sosial Kab/Kota	Dinas Sosial
2	Sosial	Masalah BLT dan Honor Satgas Covid yang belum pasti		Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Masalah BLT tidak jelas apa yang ditanyakan dan Honor Satgas kewenangan BPBD	Dinas Sosial
3	Sosial	Masyarakat Jalan Merak II Samratulangi Keluarhan Sri Menanti belum mendapatkan bantuan COVID 19		Jalan Merak II Samratulangi, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti		✓	program tsb adalah program dan anggaran 2020 kemensos dan sesuai dgn usulan di 2020, 7 org korban di Bangka Beltung telahdibantu. Akan tetapi usulan terbaru utk 2021 ditolak oleh pihak kementerian dikarenakan sudah tidak ada lagi program santunan kematian untuk korban covid 19 serta anggarannya di 2021	Dinas Sosial
4	Sosial	permohonan bantuan penambahan insentif pendamping desa		Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan		✓	Tidak jelasnya permohonan bantuan penambahan insentif pendamping desa pada program apa yang dimaksud	Dinas Sosial
5	Sosial	masyarakat menanyakan prihal subsidi atau bantuan bagi pekerja swasta		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	✓		Dinsos khususnya Bidang Linjamsos melaksanakan pembayaran premi khusus BPJS ketenagakerjaan bagi peserta PKH	Dinas Sosial
6	Sosial	masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang kurang optimal khusus tingkat kelurahan dan kecamatan		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	✓		Relawan penanganan bencana (TAGANA) di tingkat kabupaten /kota masih berposko di Dinsos setempat, sehingga persebarannya belum	Dinas Sosial

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							sampai tingkat kecamatan/desa.	
7	Sosial	sekolah mempertanyakan terkait bantuan dari pemerintahan pusat selain subsidi upah		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	✓		Bantuan dari pemerintahan pusat selain subsidi upah adalah BST+Program Sembako... smp skrg msh berlangsung... di Dayasos tahun kemaren ada bantuan beras 15 kilo/bulan utk 3 bln dengan penerima e PKH.	Dinas Sosial
8	Sosial	kepala sekolah SMA3 memohon untuk penambahan guru di sekolah		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat		✓	Penambahan Guru Di Sekolah Tidak Termasuk Dalam Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial	Dinas Sosial
9	Sosial	para pengurus panti asuhan memohon adanya perhatian khusus bagi kesejahteraan mereka		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	✓		Karena pemberdayaan sosial khususnya kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang salahsatunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Yayasan perlu mendapat perhatian dalam bentuk Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk membantu kesejahteraan para penghuni dan pengurus LKS/Yayasan agar mandiri.	Dinas Sosial
10	Sosial	pengurus panti asuhan memohon adanya penambahan SDM yang terampil khususnya panti asuhan ad-duha		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	✓		Pembinaan Panti Adalah Menjadi Tugas Dinas Sosial Provinsi	Dinas Sosial
11	Sosial	masyarakat meminta bantuan perihal tunggakan BPJS yang tidak bisa		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui,		✓	Untuk pemberian bantuan BPJS Kesehatan tidak ada	Dinas Sosial

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		digunakan ketika berobat		Asam			di bidang LINJAMSOS khususnya seksi Jaminan Sosial keluarga dinas sosial Provinsi, karena BPJS Kesehatan merupakan tupoksi dari Dinas Kesehatan	
12	Sosial	masyarakan memohon adanya bantuan untuk masalah banjir yang sudah menjadi rutinitas		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	✓		Dinsos Provinsi telah mendistribusikan bantuan logistik bencana dari Kementerian Sosial ke seluruh gudang Dinsos Kab/Kota dan sebagian lokasi Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial
13	Sosial	Masyarakat mengharapkan bantuan penanggulangan Covid-19.		Desa Air Ketekok,, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu	✓		Bidang PFM blm tersedia anggaran bantuan penanggulangan Covid-19	Dinas Sosial
14	Sosial	meminta untuk pengawasan dan juga efaluasi mengenai dana bantuan sosial (BLT) yang seharusnya Rp 600.000 tetapi kenyataannya menerima hanya Rp 300.000		Desa Jadah Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	✓		BLT Kemensos tahap I -III Rp. 600.000 selanjutnya tahap IV-XII oleh Kemensos dibayar Rp. 300.000	Dinas Sosial
15	Sosial	Monitoring dari pemerintah terhadap penyebaran Covid-19 di daerah masih kurang.		Desa Air Ketekok, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Monitoring terhadap penyebaran covid 19 di setiap daerah itu adalah tugas dari gugus tugas dan Dinas Kesehatan di Kab/Kota masing2. Karena mrk yg memiliki data2 akurat terhadap penyebaran covid 19 yg ada di wilayah masing2 dan juga memiliki posko informasi yg setiap saat masyarakat bisa menyampaikan informasi ke posko tersebut.	Dinas Sosial
16	Sosial	Siswa menanyakan apakah bisa Anggota DPRD menjadi Bapak Asuh bagi siswa yang tidak mampu		SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali		✓	Orang Tua Asuh Tidak Termasuk Dalam Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas	Dinas Sosial

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							Sosial	
17	Sosial	masyarakat meminta bantuan perihal adanya layanan keliling untuk pengaduan BPJS		Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		✓	untuk pemberian layanan keliling yang berhubungan dengan BPJS ketenagakerjaan akan kami tindak lanjuti selanjutnya agar kedepan dinas sosial memiliki layanan keliling khusus BPJS ketenagakerjaan, sedangkan BPJS Kesehatan merupakan tupoksi dari Dinas Kesehatan	Dinas Sosial
18	Sosial	pengurus Relawan kemanusia (Relindo) memohon bantuan adanya bantuan sarana dan prasaran penunjang kegiatan serta pembangunan gedung relawan		Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		✓	Bantuan sarana dan prasaran penunjang kegiatan serta pembangunan gedung relawan Tidak Termasuk Dalam Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial	Dinas Sosial
G	Kominfo							
1	Komunikasi dan Informatika	masyarakat meminta penganggaran terhadap informasi layanan sosial	5 orang	Pangkal Balam, Rejo Sari		✓		Diskominfo
2	Komunikasi dan Informatika	masyarakat meminta keterbukaan masalah bantuan akibat covid-19	10 orang	Pangkal Balam, Rejo Sari		✓		Diskominfo
3	Komunikasi dan Informatika	Meminta agar jaringan internet yang stanby dan gratis karena sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan data yang diminta secara cepat dan selama ini dana yang dipakai Sekolah membengkak untuk biaya internet, mohon kirannya agar jaringan Telekomunikasi masuk ke Sekolah	1 Unit	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali		✓		Diskominfo
4	Komunikasi dan Informatika	Para Guru meminta agar jaringan Internet yang stanby dan Gratis karena sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan data yang diminta secara cepat. Selama ini dana yang dipakai Sekolah membengkak untuk biaya internet, mohon kiranya agar	1 Unit	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali		✓		Diskominfo

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		jaringan Telekomunikasi masuk Sekolah.						
H	Kearsipan dan Perpustakaan							
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bantuan untuk di bangunkan perpustakaan Agama	1 Unit	Desa sungai padang, Kab. Belitung, Sijuk, Sungai Padang		✓	Berdasarkan UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpustakaan desa bukan merupakan kewenangan provinsi. Disarankan untuk diusulkan melalui mekanisme DABA atau diusulkan dalam APBD Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	kemampuan literasi di tingkat desa belum berkembang optimal akibat terbatasnya akses literasi seperti perpustakaan bahkan belum ada sama sekali (Sarana dan Prasarana Perpustakaan)	1 Unit	Di Mabat, Kab. Bangka, Bakam, Mabat		✓	Berdasarkan UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpustakaan desa bukan merupakan kewenangan provinsi. Disarankan untuk diusulkan melalui mekanisme DABA atau diusulkan dalam APBD Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	kemampuan literasi di tingkat desa belum berkembang optimal akibat terbatasnya akses literasi seperti perpustakaan bahkan belum ada sama sekali (Sarana dan Prasarana Perpustakaan)	1 Unit	Di Mangka, Kab. Bangka, Bakam, Mangka		✓	Berdasarkan UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpustakaan desa bukan merupakan kewenangan provinsi. Disarankan untuk diusulkan melalui mekanisme DABA atau diusulkan dalam APBD Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	kemampuan literasi di tingkat desa belum berkembang optimal akibat terbatasnya akses literasi seperti perpustakaan bahkan belum ada sama sekali (Sarana dan Prasarana Perpustakaan)	1 Unit	Di Desa Bakam, Kab. Bangka, Bakam, Bakam		✓	Berdasarkan UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpustakaan desa bukan merupakan kewenangan provinsi. Disarankan untuk diusulkan melalui mekanisme DABA atau diusulkan dalam APBD Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tenaga Kerja							
I	Pemberdayaan Perempouan dan Anak							
1	Kependudukan	Belum maksimalnya penggunaan data profil kependudukan untuk perencanaan pembangunan	1 buku	Kampung Rambak Sungailiat, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Bukan Kewenangan DP3ACSKB	DP3ACSKB
2	Kependudukan	Fasilitas penunjang yang kurang memadai	1 unit	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		✓	Bukan Kewenangan DP3ACSKB	DP3ACSKB
3	Perlindungan Perempuan dan Anak	perlindungan anak terkhusus anak usia dini yang masih memerlukan perlindungan orangtua sebaiknya penyulusah dimasifkan oleh OPD terkait Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak	50000000 Rupiah	di Seluruh Kabupaten Bangka, Kab. Bangka, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	✓		Kegiatan ini sudah melekat pada tigas dan fungsi DP3ACSKB	DP3ACSKB
J	Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa							
1	Pemberdayaan Masyarakat	Belum maksimalnya UEM (Bumdes) yang dapat meningkatkan PADesa	5 kelompok	Desa Perawas, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	√			Dinas Pemdes
2	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pelatihan bagi pengurus Bumdesma dan BKAD	50 orang	Desa Pelempang Jaya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Pelempang Jaya		√		Dinas Pemdes

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
3	Pemberdayaan Masyarakat	Belum maksimalnya PKK aktif	100 orang	Kelurahan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	√			Dinas Pemdes
4	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pelatihan bagi pengurus Bumdesma dan BKAD	100000000 rupiah	Desa Jadah Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin		√		Dinas Pemdes
5	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pelatihan bagi pengurus Bumdesma dan BKAD	50000000 rupiah	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan		√		Dinas Pemdes
6	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pelatihan bagi pengurus Bumdesma dan BKAD	50 Orang	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang		√		Dinas Pemdes
7	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya pelatihan bagi pengurus Bumdesma dan BKAD	1 Usulan	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang		√		Dinas Pemdes
8	Pemberdayaan Masyarakat	Belum maksimalnya UEM (Bumdes) yang dapat meningkatkan PADesa	1 Set	Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	√			Dinas Pemdes
9	Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnra dukungan Stakeholder terhadap pemasaran dan pengembangan Prukades	1 Set	Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	√			Dinas Pemdes
10	Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnra dukungan Stakeholder terhadap pemasaran dan pengembangan Prukades	150 Juta	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	√			Dinas Pemdes
11	Pemberdayaan Masyarakat	Kurangnra dukungan Stakeholder terhadap pemasaran dan pengembangan Prukades	1 Set	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	√			Dinas Pemdes
12	Pemberdayaan Masyarakat	Masih kurangnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Unit	Dusun Aik Rayak, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	√			Dinas Pemdes
13	Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	50000000 Rupiah	di seluruh kabupaten bangka, Kab. Bangka, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		√		Dinas Pemdes
14	Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	70000000 Rupiah	di provinsi bangka belitung, Kab. Bangka, Bakam, Bakam		√		Dinas Pemdes

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
15	Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	70000000 Rupiah	Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		√		Dinas Pemdes
K	Pengawasan							
1	INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI dalam Urusan Pemerintahan Daerah, Penegakan Integritas dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah		pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari	✓		Rekomendasi : disetujui Koefisien : 50000000 rupiah Anggaran : 50000000	Inspektorat
L	Kesbangpol							Kesbangpol
M	RSJ							Rumah sakit Jiwa Daerah
N	Satpol PP							
1	Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Masyarakat memohon adanya perhatian dari pemerintah perihal muda-mudi yang nongkrong larut malam di perkuburan jalan Mentok	10 orang	Pangkalpinang, Kec Rangkui, Gajah Mada		✓	Menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang,akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Satpol PP Kota Pangkalpinang	Satpol PP
2	Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penyelesaian beroperasinya alat tangkap cantrang	1 unit	Tanjungpandan, Belitung, seluruh Kecamatan		✓	Menjadi domain urusan kelautan, akan dikoordinasikan lebih lanjut apakah ada aturan perda/perkada yang mengatur alat tangkap cantrang dan kewenangan urusan pemda siapa?	Satpol PP
O	Setda							

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
1	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat mengharapkan adanya perkembangan harga jual karet di lingkup petani		Desa Zed, Kab. Bangka, Mendo Barat, Zed	✓			Biro Ekonomi
2	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengharapkan adanya solusi dari harga lada yang murah		Desa Zed, Kab. Bangka, Mendo Barat, Zed	✓			Biro Ekonomi
3	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat juga menginginkan agar harga timah juga ikut naik.		Desa Zed, Kab. Bangka, Mendo Barat, Zed	✓			Biro Ekonomi
		pemberian bantuan hukum masyarakat	1	paket	√			Biro Hukum
4	SEKRETARIAT DAERAH	usulan acara setahun sekali untuk seluruh pengajian se Kabupaten Belitung dengan mengundang penceramah luar ataupun motivator luar supaya ada pencerahan dan wawasan baru	1 kegiatan	seluruh kabupaten belitung, kabupaten belitung, seluruh kecamatan dan kelurahan/desa	✓			Biro Kesra
5	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan honor imam dan marbot masjid	100 orang	desa sinar baru kab. Bangka kec. Sungailiat	✓			Biro Kesra
6	SEKRETARIAT DAERAH	pembuatan ruang pertemuan klenteng cahaya bhakti	172600000 rupiah	jelitik, kabupaten bangka, sungailiat	✓			Biro Kesra
7	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan ruang belajar sekolah minggu gereja sidang jemaat Allah	187200000 rupiah	desa hakok, kabupaten bangka, sungailiat, matras	✓			Biro Kesra
8	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan dana da'i untuk dibuatkan juknis yang pasti sehingga tidak menggangu penyusunan APBDes dan mudah pencairannya	1 paket	desa air batu, badau	✓			Biro Kesra
9	SEKRETARIAT DAERAH	permohonan pengawalan perbaikan pembangunan masjid di dusun limbung	1 set	desa jada bahrin kab bangka	✓			Biro Kesra
10	SEKRETARIAT DAERAH	permohonan bantuan pembangunan masjid fathul jannah	150000000 rupiah	jl;. Tanjung kelayang rt.06/ rw 02 kabupaten belitung, sijuk, terong	✓			Biro Kesra
11	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat meminta agar marbot masjid dan pengulu desa lebih diperhatikan dan sejahterakan	1 paket	desa dalil kec. Bangka, bakam, dalil	✓			Biro Kesra
12	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan pembangunan masjid al ijtihad	300000000 rupiah	desa buyan kelumbi, kabupaten bangka barat, tempilang, buyan kelumbi	✓			Biro Kesra
13	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan anggaran pembangunan renovasi masjid nurul al-	100000000rupiah	desa sinar surya kabupaten bangka barat	✓			Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		falah		tempilang, sinar surya				
14	SEKRETARIAT DAERAH	agar dana hibah bisa disalurkan sesuai dengan aturan dan besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dengan persyaratan yang tidak memberatkan bagi masjid atau rumah ibadah yang baru didirikan yang harus berumur 3 tahun	1 orang	teladan, toboali, kabupaten bangka selatan	✓			Biro Kesra
15	SEKRETARIAT DAERAH	menginginkan agar adanya program bantuan hibah dari biro kesra setda babel dan diinformasikan serta sosialisasikan kepada masyarakat luas, supaya masyarakat lebih mudah memahami syarat - syarat dan cara pengajuan	1 orang	teladan, toboali, kabupaten bangka selatan	✓			Biro Kesra
16	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan masjid al Barokah	1003465000 rupiah	jl. Amd teladan, kab. Bangka selatan	✓			Biro Kesra
17	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan dana untuk pesantren darul adzkar	1 milyar	jalan jebung kota pangkalpinang, gabek, selindung	✓			Biro Kesra
18	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan dana pembangunan yayasan al khoiriyah baturusa	500 juta	jalan raya merawang kab. Bangka, merawang, batu rusa	✓			Biro Kesra
19	SEKRETARIAT DAERAH	Pengurus yayasan rumah al quran bangka belitung memohon bantuan pembangunan gedung asrama dan prasarana lainnya untuk penunjang kegiatan KMB	1 set	pangkalpinang, kota pangkalpinang, gerunggang, tua tunu	✓			Biro Kesra
20	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan pemasangan faslitias masjid anni' mah seperti pemasangan pagar stenlis, pemasangan balok tiang beton dan pemasangan dinding batako	100000000 rupiah	jl. Tanjung kelayang rt.02 rw.01 kab. Belitung, sijuk, air itam	✓			Biro Kesra
21	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan langgar Al-Muhajirin	1 unit	Desa Keretak, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran :	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							1500000000	
22	SEKRETARIAT DAERAH	PEMASANGAN ATAP BAJA RINGAN PASTORY GPdi ELIM	130000000 Rupiah	SUNGAILIAT, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 130000000 Rupiah Anggaran : 130000000	Biro Kesra
23	SEKRETARIAT DAERAH	pengajuan rehab masjid di dusun parit gunung	1 paket	dusun parit gunung, Kab. Belitung, Badau, Badau		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 paket Anggaran : 250000000	Biro Kesra
24	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat ingin Belitong punya Islamic Center	1 unit	Desa Pelempang Jaya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Pelempang Jaya		✓	Rekomendasi : ditolak karena permohonan bantuan sosial dan hibah belum diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Biro Kesra
25	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan ruangan tahfiz quran di pondok pesantren hubbul quran	1 unit	Desa Sinar Baru, Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Baru		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
26	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan dari proposal yayasan HIPNI Belinyu	1 proposal	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 proposal Anggaran : 10000000	Biro Kesra
27	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan untuk masjid Nurul Kholid Batu Ketok	1 unit	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : ditolak, karena permohonan bantuan sosial dan hibah belum diajukan Koefisien : 1 unit Anggaran : 10000000	Biro Kesra
28	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan kekurangan besi untuk masjid nurul desa labu	1 masjid	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : ditolak karena masjid tersebut sudah pernah dibantu pada bantuan hibah tahun 2020 Koefisien : 1 masjid Anggaran : 250000000	Biro Kesra
29	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan CCTV untuk Masjid	10 buah	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 10 buah Anggaran : 7500000	Biro Kesra
30	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Ruang Belajar Sekolah minggu seluas 60 Meter persegi pada gereja pantekosta di Indonesia (GPDI)	180000000 Rupiah	Dusun Bedukang Desa Deniang, Kab. Bangka, Riau Silip, Deniang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 180000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
31	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitas gereja pantekosta kharismatik di Indonesia (GPK DI)	178800000 Rupiah	Sungailiat, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 178800000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
32	SEKRETARIAT DAERAH	Pemasangan Teralis Digereja GBT	90000000 Rupiah	Desa Kudai, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 90000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra
33	SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan Sound System dan Muebeler Gereja Wilayah (BKSGW)	171000000 Rupiah	Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 171000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
34	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitas dan penambahan fasilitas gereja GPIB Pangkalpinang	250000000 rupiah	Jl. Jendral Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Opas Indah		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 250000000 rupiah Anggaran : 20000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
35	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitasi dan penambahan fasilitas gereja GPKRIS PangkalBalam	100000000 rupiah	Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 rupiah Anggaran : 250000000	Biro Kesra
36	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitasi dan penambahan fasilitas gereja GKRI Pangkalpinang	100000000 rupiah	Air Mawar, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 rupiah Anggaran : 130000000	Biro Kesra
37	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitas dan Penambahan fasilitas Gereja GPdI Imanuel Pangkalpinang	100000000 rupiah	Bedukang 1, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 rupiah Anggaran : 250000000	Biro Kesra
38	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitasi dan Pengembangan fasilitas klenteng Kongfuchu	300000000 rupiah	Kampung bintang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 300000000 rupiah Anggaran : 250000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
39	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan speaker pengeras suara untuk kegiatan pengajian ibu Majlis Taklim	20 unit	seluruh Kabupaten Belitung, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Rekomendasi : ditolak, karena permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial belum diajukan Koefisien : 20 unit Anggaran : 50000000	Biro Kesra
40	SEKRETARIAT DAERAH	Mohon bantuan pemerintah untuk pembangunan masjid di desa mancung.	1 paket	Mancung, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 paket Anggaran : 100000000	Biro Kesra
41	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat mengharapkan pembangunan surau/masjid di Jalan Merak II Samratulangi	1 bangunan	Jalan Merak II Samratulangi, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 bangunan Anggaran : 1500000000	Biro Kesra
42	SEKRETARIAT DAERAH	pengurus masjid al-hidayah di lingkungan cendrawasih kelurahan srimenanti kecamatan sungailiat memiinta bantuan dana hibah 2021 untuk renovasi masjid al-hidayah	1 renovasi	jalan lingkungan cendrawasih, Kab. Bangka, Sungailiat, Sri Menanti		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 renovasi Anggaran : 1500000000	Biro Kesra
43	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat jalan laut kelurahan matras kecamatan Sungailiat mengharapkan bantuan pembangunan masjid Baitul makmur dimana proposal tersebut sudah diajukan ke Setda provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 06 Agustus 2018 dengan nomor	1 Bangunan	Jalan laut kelurahan matras, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		✓	Rekomendasi : ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan gubernur kepulauan bangka belitung no 77 tahun 2020 Koefisien : 1 Bangunan	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		agenda 574/HBD/2018					Anggaran : 150000000	
44	SEKRETARIAT DAERAH	Untuk Masjid Desa Telak yang belum pernah diusulkan dan masyarakat mengharapkan pembangunan balai untuk kegiatan masjid desa	5 unit	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 5 unit Anggaran : 100000000	Biro Kesra
45	SEKRETARIAT DAERAH	Pengawalan proposal dalam perbaikan bangunan Masjid di Dusun Limbung	1 unit	Dusun Limbung, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 130000000	Biro Kesra
46	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat jalan laut Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat mengharapkan bantuan Pembangunan Mesjid Baitul Makmur dimana proposal sudah diajukan ke Setda Prov. Kep. babel tanggal 6 Agustus 2018 dengan no agenda 574/HBD/2018	1 unit	Jalam Laut, Kab. Bangka, Sungailiat, Matras		✓	Rekomendasi : ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai pergub nomor 77 tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Biro Kesra
47	SEKRETARIAT DAERAH	Bnatuan Mobil Jenazah	1 unit	Jlaan Laut, Kab. Bangka, Sungailiat, Matras		✓	Rekomendasi : ditolak, karena tidak terdapat pada renja opd Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
48	SEKRETARIAT DAERAH	PENGADAAN ATAP BAJA RINGAN PASTORY GPdi ELIM	130000000 RUPIAH	Sungailiat, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 130000000 RUPIAH Anggaran : 130000000	Biro Kesra
49	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Masjid Muhajirin	1 unit	Kampung Rambak, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 1500000000	Biro Kesra
50	SEKRETARIAT DAERAH	laptop dan printer untuk TPA Baitul Muttaqin	1 unit	Lingkungan Pasir, Kab. Bangka, Sungailiat, Kudai		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 25000000	Biro Kesra
51	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat memohon adanya bantuan dari untuk para mualaf atau orang yang baru masuk islam	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		✓	Rekomendasi : Ditolak karena bukan kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koefisien : 1 orang Anggaran : 50000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
52	SEKRETARIAT DAERAH	Pemohonan bantuan untuk merehabilitas Masjid At-thohiroh untuk meningkatkan kegiatan keagamaan	200000000 Rupiah	Jl. Tanjung Kelayang RT.011/RW.04, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 100000000	Biro Kesra
53	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan bantuan Mushola Usman Umar	100000000 Rupiah	Jalan Pengayoman Dusun Perawas II, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
54	SEKRETARIAT DAERAH	Meminta penambahan Lokal gedung TPA AL-MUHAJIRIN	1 Bangunan	Desa Air ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 Bangunan Anggaran : 150000000	Biro Kesra
55	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Tower Masjid Alfalah	1 unit	Desa suka Mandi, Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
56	SEKRETARIAT DAERAH	Bantuan sarana daan prasarana TPA dan TPQ Miftahul Jannah	100 unit	Desa Air ruai, Kab. Bangka, Pemali, Air Ruai		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100 unit Anggaran : 200000000	Biro Kesra
57	SEKRETARIAT DAERAH	penambahan bangunan pengajian pada masjid desa kace	1 bangunan	desa kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 bangunan Anggaran : 150000000	Biro Kesra
58	SEKRETARIAT DAERAH	permohonan pembangunan kanopi mushola zawiyah al-qutbil	1 paket	Desa Dalil, Kab. Bangka, Bakam, Dalil		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 paket Anggaran : 75000000	Biro Kesra
59	SEKRETARIAT DAERAH	untuk ditindak lanjuti perbaikan atap masjid Nurul Fallah Desa Dalil yang sudah sangat rusak dan meminta bantuan untuk pembangunan Kubah Masjid Nurul Fallah Desa Dalil	1 unit	Desa Dalil, Kab. Bangka, Bakam, Dalil		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
60	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat mengusulkan untuk Pelebaran rumah ibadah di RT 30 Desa Air ketekok Masjid Baiturahman	1 unit	Desa Air Ketekok RT 30, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000	Biro Kesra
61	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan penggalangan dana untuk pelebaran Masjid As-Sajadah dikarenakan Jama'ah di Masjid tersebut sudah bertambah banyak	2 unit	Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang		✓	Rekomendasi : ditolak karena sudah dibantu pada Tahun 2019 dan 2021 Koefisien : 2 unit Anggaran : 200000000	Biro Kesra
62	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan bantuan pembangunan Mesjid untuk kepentingan masyarakat umum di Desa Terong	2 unit	Desa Terong, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 2 unit Anggaran : 250000000	Biro Kesra
63	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat mengajukan anggaran pembangunan Lembaga Masjid Al-Huda desa Simpang Yul	750000000 Rupiah	Desa Simpang Yul, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul		✓	Rekomendasi : ditolak karena sudah dibantu Tahun 2020 Koefisien : 750000000 Rupiah Anggaran : 150000000	Biro Kesra
64	SEKRETARIAT DAERAH	untuk ditindak lanjuti penambahan Gedung Madrasah Diniyah dan TPQ di Desa Dalil	1 Gedung	Desa Dalil, Kab. Bangka, Bakam, Dalil		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 Gedung Anggaran : 100000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
65	SEKRETARIAT DAERAH	untuk ditindak lanjuti penambahan Lokal Gedung Madrasah Diniyah dan TPQ di Desa Dalil	1 Unit	Desa Dalil, Kab. Bangka, Bakam, Dalil		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000	Biro Kesra
66	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan pembangunan masjid dusun luenc(petaling jaya)	300000000 Rupiah	dusun luenc(petaling Jaya), Desa Simpang Yul, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 300000000 Rupiah Anggaran : 150000000	Biro Kesra
67	SEKRETARIAT DAERAH	Peningkatan sarana dan prasarana proses belajar mengajar dibeberapa TPA yang ada di desa Lilangan	1 Usulan	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 Usulan Anggaran : 75000000	Biro Kesra
68	SEKRETARIAT DAERAH	Peningkatan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar dibeberapa TPA beserta pengingkatan honor bagi para pengajar	1 Usulan	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 Usulan Anggaran : 150000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
69	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitasi berat kantor BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) , Kab. Bangka	250000000 Rupiah	Jalan Jend. Ahmad Yani, samping kantor BAZNAZ, Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 250000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra
70	SEKRETARIAT DAERAH	Usulan Masyarakat untuk rehab Masjid Al Kurnia Desa Kace	3000000000 Rupiah	Desa kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 3000000000 Rupiah Anggaran : 150000000	Biro Kesra
71	SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan Baju untuk ibu-ibu pengajian majlis taklim di Desa kace	20 kodi	Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace		✓	Rekomendasi : ditolak karena permohonan habah bansos belum diajukan berdasarkan pergub nomor 77 tahun 2020 Koefisien : 20 kodi Anggaran : 15000000	Biro Kesra
72	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengharapkan pembangunan yayasan pondok pesantren nurul muttaqin sp. Tiga sp teritip	200000000 Rupiah	simpang tiga,simpang teritip, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Simpang Tiga		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 150000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
73	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengharapkan Pembuatan dan renovasi pagar masjid Yayasan Al ikhlas al islamy dusun lingkun desa penyampak	150000000 Rupiah	dusun Lingkun, desa penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 150000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra
74	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan anggaran Renovasi Masjid Baiturrohman	150000000 rupiah	desa jebus, kecamatan jebus, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus		✓	Rekomendasi : ditolak karena tidak sesuai persyaratan yang berlaku berdasarkan pergub nomor 77 tahun 2020 Koefisien : 150000000 rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
75	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Pagar Masjid Jabal Nur, Bukit Betung	250000000 Rupiah	Jalan Bukit Betung, Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 250000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
76	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Rumah Tahfiz Yayasan Roudhatul Muhibbin, Desa Puding	300000000 Rupiah	Jalan Ujung Timur Puding Besar , Kode Pos.33179, Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 300000000 Rupiah Anggaran : 100000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
77	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Ruang Belajar, WC dan Pembukaan Jalan Tanah Puru Madrasah Diniyah Nurul Iman, Desa Zed	400000000 Rupiah	Jalan Sawah Dusun 001/ RT 003 , Kode Pos 33173, Kab. Bangka, Zed		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 400000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
78	SEKRETARIAT DAERAH	Renovasi Masjid At-Taqwa Nangnung	500000000 Rupiah	Jalan Timah Raya, Nangnung, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 500000000 Rupiah Anggaran : 150000000	Biro Kesra
79	SEKRETARIAT DAERAH	permohonan bantuan dana hibah / bansos	16600000 rupiah	Kampung Amad Aid Beleng, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 16600000 rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
80	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan dan bantuan pembangunan masjid AL-KHOSYI''UN	1953110000 rupiah	JL. Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama		✓	Rekomendasi : ditolak karena sudah dibantu pada tahun 2020 sebesar Rp. 750.000.000 Koefisien : 1953110000 rupiah Anggaran : 200000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
81	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Ruang Kelas dan Asrama Putri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur''an Hubbul Qur''an Sinar Baru (Yayasan Bahagia Dunia Akhirat)	500000000 Rupiah	Jalan Perkuburan Sinar Baru, Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Baru		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 500000000 Rupiah Anggaran : 250000000	Biro Kesra
82	SEKRETARIAT DAERAH	pembangunan lahan parkir dan rumah tahfiz masjid baitul hikmah	1 unit	Jl. Letkol Saleh Ode, RT.06/RW.02, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000	Biro Kesra
83	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Yayasan Pena Ar Rahmah	1620000000 Rupiah	JL. Abadi, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1620000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
84	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan Pembangunan Laboratorium IPA, Lapangan Olahraga, Conblock dan Pagar Sekolah SMP YAPENKOS	2216436000 Rupiah	JL. Raya Kebintik, Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Kebintik		✓	Rekomendasi : dikembalikan karena permohonan hibah bansos belum diajukan berdasarkan peraturan gubernur kepulauan bangka belitung nomor 77 tahun 2020 Koefisien : 2216436000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
85	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Masjid Al-Kurnia Kace	1 UNIT	Jl. Raya Kace RT 01 Dusun III Desa Kace, Kab. Bangka, Mendo Barat, Kace		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 UNIT Anggaran : 150000000	Biro Kesra
86	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan pihak Pengurus Masjid Jami'' Al Fitri Desa Serdang untuk Pembangunan Pagar dan Rehab Masjid.	560400000 Rupiah	Desa Serdang, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 560400000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
87	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur''an Darussalam Desa Permis.	2601411500 Rupiah	Desa Permis, Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 2601411500 Rupiah Anggaran : 250000000	Biro Kesra
88	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan untuk pembangunan mesjid al aqla	300 juta	jalan stania, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 300 juta Anggaran : 150000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
89	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan dana pembangunan TK jasmine	30 juta	jalan raya tuatunu, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 30 juta Anggaran : 30000000	Biro Kesra
90	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan dana pemabnungan mesjid baitul ma''ruf	150 juta	jalan stania, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga		✓	Rekomendasi : ditolak karena telah dibantu pada tahun 2020 sebesar Rp.170.000.000 Koefisien : 150 juta Anggaran : 150000000	Biro Kesra
91	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan hibah mobil untuk masjid Al-Ihsan desa Lilangan	1 Unit	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan		✓	Rekomendasi : ditolak karean permohonan hibab bansos belum diajukan berdasarkan pergub kep babel no 77 tahun 2020 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 150000000	Biro Kesra
92	SEKRETARIAT DAERAH	Rehabilitasi dan Penambahan fasilitas klenteng Konfuchu	300000000 rupiah	Jl. Pikas 2, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 300000000 rupiah Anggaran : 150000000	Biro Kesra
93	SEKRETARIAT DAERAH	pembangunan masjid Alfaizun	1 unit	kelurahan sriwijaya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
94	SEKRETARIAT DAERAH	untuk masjid desa telak yang belum pernah diusulkan dan masyarakat mengaharapkan pembangunan balai untuk kegiatan masjid desa	5 unit	telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 5 unit Anggaran : 150000000	Biro Kesra
95	SEKRETARIAT DAERAH	pengurus lembaga sosial (Yakesma) memohon adanya bantuan penunjang program dan pembangunan gedung	1 set	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 set Anggaran : 25000000	Biro Kesra
96	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan renovasi Musholla An-Nur	100000000 rupiah	penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
97	SEKRETARIAT DAERAH	Pembuatan pagar tralis, pintu pagar tralis dan pengecatan pagar tembok untuk Masjid Al-Hasan	50000000 Rupiah	Jalan Tanjung Tinggi Rt.01/Rw.01 Dusun Mekarjaya, Kab. Belitung, Sijuk, Tanjong Tinggi		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 50000000 Rupiah Anggaran : 25000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
98	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan renovasi surau Ariful jami'ah	100000000 Rupiah	Jl. Basuki rahmat, Kab. Belitung, Pangkallalang		✓	Rekomendasi : ditolak karena tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 77 tahun 2020 Koefisien : 100000000 Rupiah Anggaran : 100000000	Biro Kesra
99	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan renovasi Surau Hijratul Qalbiah	100000000 Rupiah	Jalan Dr. Susilo Timur RT. 33 RW 04, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
100	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan renovasi tahap kedua Masjid Al-Hasyim	150000000 Rupiah	Jl. Melati Rt.07A Dusun II, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Dukong		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 150000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra
101	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan renovasi Surau Baitussalam	50000000 Rupiah	Jl. Kenanga, Kab. Belitung, Paal Satu		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 50000000 Rupiah Anggaran : 25000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
102	SEKRETARIAT DAERAH	perbaikan pertama Masjid Nurul Iman, Desa Saing	150000000 Rupiah	di Masjid Nurul Iman, Desa Saing, Kab. Bangka, Puding Besar, Saing		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 150000000 Rupiah Anggaran : 25000000	Biro Kesra
103	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan dana untuk yayasan Tahfiz Quran	1 unit	tanjung pandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000	Biro Kesra
104	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan renovasi masjid	1 unit	tanjung pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum sesuai persyaratan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 unit Anggaran : 75000000	Biro Kesra
105	SEKRETARIAT DAERAH	Melanjutkan pembangunan ruang kelas ponpes tahfiz at toyibah balun ijuk	200000000 Rupiah	Ponpes Tahfiz Al Quran, Balun Ijuk, Kab. Bangka, Merawang, Balun Ijuk		✓	Rekomendasi : ditolak karena sudah mendapatkan bantuan hibah pada tahun 2020 sebesar Rp. 500.000.000 Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
106	SEKRETARIAT DAERAH	melanjutkan pembangunan Masjid Nurul Falah masih kurang bahan bangunan di fasilitas WC, Tempat Wudhu, Teras Masjid	100000000 Rupiah	Di Desa Nurul Falah, Kab. Bangka, Bakam, Bakam		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra
107	SEKRETARIAT DAERAH	bantuan dana ormas fortuni	50 Juta	parit lalang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 50 Juta Anggaran : 10000000	Biro Kesra
108	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Masjid Al-Falaah Desa Tanah Bawah yang masih tersendat dana.	150000000 Rupiah	Masjid Al-Falaah Desa Tanah Bawah, Kab. Bangka, Puding Besar, Tanah Bawah		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 150000000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra
109	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan Renovasi Rumah Makan atau Parkir masjid Al-Falah	200000000 rupiah	Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 200000000 rupiah Anggaran : 20000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
110	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan Renovasi untuk masjid Al-Muhaimin di Air Nangka	200000000 rupiah	dusun air nangka, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 200000000 rupiah Anggaran : 200000000	Biro Kesra
111	SEKRETARIAT DAERAH	masyarakat mengajukan anggaran Renovasi masjid Nurul Falah	200000000 rupiah	dusun Pancor desa Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur		✓	Rekomendasi : dtolak karena tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan gubenrur kepulauan bangka belitung nomor 77 tahun 2020 Koefisien : 200000000 rupiah Anggaran : 200000000	Biro Kesra
112	SEKRETARIAT DAERAH	Renovasi fisik Mushola Tanwiril Umam Desa Kemuja masih terkendala pendanaan.	200000000 Rupiah	Mushola Tanwiril Umam, Desa Kemuja., Kab. Bangka, Mendo Barat, Kemuja		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 200000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
113	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan bantuan renovasi Masjid Al-Fithrah	1213080000 Rupiah	Masjid Al-Fithrah. Jl. Teladan AMD,, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1213080000 Rupiah Anggaran : 50000000	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
114	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Bakam	1 Bangunan	Desa Bakam, Kab. Bangka, Bakam, Bakam		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 1 Bangunan Anggaran : 50000000	Biro Kesra
115	SEKRETARIAT DAERAH	Permohonan Rehab Masjid An-nur Desa Terap.	600000000 Rupiah	Desa Terap, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Bukit Terap		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 600000000 Rupiah Anggaran : 100000000	Biro Kesra
116	SEKRETARIAT DAERAH	Pembangunan Mushola di Munggu, kec. Sungai Selan.	100000000 Rupiah	di Munggu, kec. Sungai Selan., Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 100000000 Rupiah Anggaran : 75000000	Biro Kesra
117	SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan sound sistem utk majelis di desa Munggu, kec. Sungai Selan	50000000 Rupiah	di desa Munggu, kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan		✓	Rekomendasi : ditolak karena pemohonan hibah dan bansos belum diajukan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2020 Koefisien : 50000000 Rupiah Anggaran : 25000000	Biro Kesra
118	SEKRETARIAT DAERAH	Pengadaan seragam Irmas di desa Munggu, Kec. Sungai Selan.	20000000 Rupiah	di desa Munggu, Kec. Sungai Selan., Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan,		✓	Rekomendasi : ditolak karena tidak terdapat pada renja opd Koefisien :	Biro Kesra

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
				Sungai Selan			20000000 Rupiah Anggaran : 10000000	
119	SEKRETARIAT DAERAH	Masyarakat berharap provinsi dapat mengalokasikan dana provinsi untuk membantu kelurahan	250.000.000	Kelurahan tanjung pendam, Kabupaten Belitung		✓	Bukan kewenanangan Biro Pemerintahan, kewenangan untuk pemberdayaan Kelurahan ada di Dinas PemDes	Biro Pemerintahan
120	SEKRETARIAT DAERAH	penyelesaian wilayah Desa yang masuk ke dalam kawasan hutan	1 unit	Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	✓			Biro Pemerintahan
P	Pendidikan							
1	Pendidikan	Pengelolaan sekolah belum memadai	1 paket	desa badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	4 paket	Air Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan	Kurikulum yang belum 100 persen terintegrasi dengan kurikulum nasional	1 paket	yayasan mardhotillah, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	√		sudah ada petunjuk teknis terkait zonasi dan penerimaan siswa baru	Dinas Pendidikan
4	Pendidikan	Kurikulum yang belum 100 persen terintegrasi dengan kurikulum nasional	1 paket	yayasan mardhotilla, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
5	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 sekolah	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		√	Karena keterbatasan anggaran untuk beli lahan	Dinas Pendidikan
6	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	6 orang	Semua, Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
7	Pendidikan	Pengelolaan sekolah belum memadai	200 peserta	Kelurahan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
8	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
9	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	30 siswa/siswi	SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
10	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	20 siswa/siswi	SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
11	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	50 Orang	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
12	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	1 paket	Desa Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
13	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak		√	Kewenangan ada di kabupaten masing masing	Dinas Pendidikan
14	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak		√	Kewenangan ada di kabupaten masing masing	Dinas Pendidikan
15	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	100 Unit	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
16	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	100 siswa	Kampung Rambak, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
17	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	50 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
18	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	20 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
19	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 item	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
20	Pendidikan	Kompetensi guru rendah	10 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
21	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 set	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir melalui DAK	Dinas Pendidikan
22	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui,	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
				Keramat				
23	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	20 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat		√	untuk pembangunan USB perlu dilakukan analisa terlebih dahulu	Dinas Pendidikan
24	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
25	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
26	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		√	Untuk beasiswa tidak bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran	Dinas Pendidikan
27	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Kejaksaan	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
28	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	10 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
29	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	1000 siswa	Desa Pelempang jaya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Pelempang Jaya	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
30	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	1 unit	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Dendang, Seluruh Kelurahan/Desa		√	untuk pembangunan USB perlu dilakukan analisa terlebih dahulu	Dinas Pendidikan
31	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	1 Gedung	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang		√	untuk pembangunan USB perlu dilakukan analisa terlebih dahulu	Dinas Pendidikan
32	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Usulan	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung		√	Kewenangan ada di kabupaten masing masing	Dinas Pendidikan
33	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	200000000 Rupiah	Desa Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
34	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
35	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	20 Set	SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
36	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali		√	Karena keterbatasan anggaran	Dinas Pendidikan
37	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	20 Siswa/Siswi	SMK YPK Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
38	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	400000000 Rupiah	Jalan parit 3 Belinyu, Simpang Tiga, Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
39	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	190000000 Rupiah	Desa Payung, Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
40	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	200000000 Rupiah	Desa Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
41	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	25 Guru	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali		√	Karena keterbatasan anggaran	Dinas Pendidikan
42	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
43	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA Negeri 2 Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun Suka Maju, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
44	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA Negeri 2 Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun Suka Maju, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
45	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	50 Siswa/Siswi	SMA Negeri 2 Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun Suka Maju, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
46	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	30 Siswa/Siswi	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
47	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	20 Siswa/Siswi	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
48	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	20 Unit	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
49	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
50	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	25 Guru	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali		√	Karena keterbatasan anggaran	Dinas Pendidikan
51	Pendidikan	Pengelolaan sekolah belum memadai	5 Kegiatan	SMA Negeri 2 Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun Suka Maju, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
52	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA Negeri Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun Suka Maju, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
53	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	2 Unit	SMA Negeri 2 Jl. Ki Hajar Dewantara Dusun Suka Maju, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
54	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
55	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Bangunan	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
56	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMAN 2 TOBOALI, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
57	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA Negeri 2 Toboali, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
58	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Bangunan	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
59	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	JL. Kalimaya, RT. 03 RW. 02,, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
60	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Bangunan	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
61	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
62	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	50 Siswa/Siswi	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
63	Pendidikan	Pengelolaan sekolah belum memadai	5 Kegiatan	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias		√	Karena keterbatasan anggaran	Dinas Pendidikan
64	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Buah	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
65	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 bangunan	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
66	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	212770000 Rupiah	Desa Serdang, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang		√	tidak jelas untuk jenjang SD, SMP atau SMA, usulan tidak diakomodir	Dinas Pendidikan
67	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Ruangan	SMA YPK, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
68	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	SMA Negeri 2, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
69	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	100 m	Jl. Tanjung Kelayang Rt.32/Rw 06, Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga		√	perlu koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Pendidikan
70	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	800000000 Rupiah	Desa Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
71	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Unit	Jl. Manunggal XXI, Kab. Belitung, Sijuk, Sijuk	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
72	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Usulan	Jl. Tengah Desa Renggiang, Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
73	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	800000000 Rupiah	telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
74	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	1 paket	Desa Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
75	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
76	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	2 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
77	Pendidikan	Kurikulum yang belum 100 persen terintegrasi dengan kurikulum nasional	15 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
78	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	1 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
79	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
80	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	10 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat		√	tidak jelas untuk jenjang SD, SMP atau SMA, usulan tidak diakomodir	Dinas Pendidikan
81	Pendidikan	Kompetensi guru masih kurang	5 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat		√	tidak jelas untuk jenjang SD, SMP atau SMA, usulan tidak diakomodir	Dinas Pendidikan
82	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	5 set	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
83	Pendidikan	masih terbatasnya beasiswa bagi siswa	5 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
84	Pendidikan	Kompetensi guru masih kurang	10 orang	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
85	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 set	Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		√	kewenangan Kab/Kota	Dinas Pendidikan
86	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Usulan	Jl. P2D Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur, Simpang Pesak, Simpang Pesak	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
87	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Gedung	Jl. Raya gantung padang, Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
88	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Set	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan		√	tidak jelas untuk jenjang SD, SMP atau SMA, usulan tidak diakomodir	Dinas Pendidikan
89	Pendidikan	Kurangnya sarana produktif SMK	1 Unit	Jalan komplek perkantoran kecamatan pulau besar, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
90	Pendidikan	Kurangnya sarana produktif SMK	1 Bangunan	Jl. Rumah Sakit, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
91	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	Jl. Rumah Sakit, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
92	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 unit	Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
93	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 unit	Pangkal Lalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
94	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1 Bangunan	Pangkal Lalang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang		√	Untuk gedung UKS sedang dibangun menggunakan dana DAK tahun 2020 sedangkan untuk aula SLB Tj. Pandan tidak memungkinkan lagi	Dinas Pendidikan
95	Pendidikan	masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 unit	tanjung pandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		√	tidak jelas untuk jenjang SD, SMP atau SMA, usulan tidak diakomodir	Dinas Pendidikan
96	Pendidikan	Pengelolaan sekolah belum memadai	1 unit	tanjung pandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa		√	kewenangan Kab/Kota	Dinas Pendidikan
97	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	200000000 Rupiah	Desa Koba, Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
98	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	250000000 Rupiah	Desa Koba, Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba		√	kewenangan Kab/Kota	Dinas Pendidikan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
99	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	300 m2	Jl. Tanjung Kelayang Rt. 32 Rw. 06, Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
100	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	435720000 Rupiah	SMA YPK . Jl. Jendral Sudirman, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Akan diakomodir jika tersedia anggaran APBD	Dinas Pendidikan
101	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	265800000 Rupiah	SMA YPK, Jl. Jendral Sudirman, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali		√	Karena keterbatasan anggaran	Dinas Pendidikan
102	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	245680000 Rupiah	SMA YPK. Jl. Jendral Sudirman, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	√		Usulan di DAK	Dinas Pendidikan
103	Pendidikan	Keterbatasan daya tampung sekolah	100000000 Rupiah	Pembangunan Rumah sekolah TK di kelurahan arung dalam RT 17, Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam		√	kewenangan Kab/Kota	Dinas Pendidikan
104	Pendidikan	Sarana Prasarana pendidikan yang masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan	2 Unit	Desa Air Kulan, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu		√	kewenangan Kab/Kota	Dinas Pendidikan
Q	Kehutanan							
Q	Kehutanan	Pembebasan lahan hutan diharapkan agar masyarakat bisa mengelola kawasan hutan untuk bertani atau berkebun	3	Dusun Ujung Gersik	√		Perlu adanya legalitas masyarakat yang berkebun di dalam kawasan hutan menjadi Kelompok Tani Hutan yang pendampingannya dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan di KPHL Belantu Mendanau Belitung.	Dinas Kehutanan
					√		Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilaksanakan melalui skema yang sudah ada tanpa dilaksanakan perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.	Dinas Kehutanan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
2	Kehutanan	Lahan PT. REBINMAS masuk kawasan Hutan Produksi murni agar diperjuangkan statusnya dan kontribusi kurang	125	Desa Pelepak Pute	√		Perlu adanya pembinaan dalam kepatuhan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangaan yang berlaku	Dinas Kehutanan
3	Kehutanan	Warga Desa Tanjung Binga mengharapkan untuk mempertanyakan kejelasan Kemitraan dengan pihak investor lain yaitu HTI dan HPS agar petani mendapat penghasilan yang lebih baik	2	Desa Tanjung Binga	√		Perlu adanya kemitraan antara Masyarakat yang telah berkebun di lahan Konsesi HTI melalui Program Perhutanan Sosial dalam Skema Kemitraan sesuai peraturan Perundangan yang berlaku	Dinas Kehutanan
4	Kehutanan	Lahan yang akan dibuka di Desa Tanjung Binga dengan HKM Batu Siang belum ada sinkronisasi dengan Kepala Desa Tanjung Binga dengan Pihak Investor	350	Desa Tanjung Binga	√		Kelompok HKm Batu Siang memiliki kewajiban menyusun RKU dan RKT yang di setujui oleh Penyuluh Kehutanan di KPHL Belantu Mendanau, dan dapat disinkronisasikan dengan Desa, hal ini disebabkan Dana Desa dapat dialokasikan mendukung Program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Dinas Kehutanan
5	Kehutanan	Masyarakat mengharapkan pembebasan lahan hutan produksi untuk pengembangan dan pemekaran desa mengingat sudah bertambah banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Belitung	500	Desa Pelempang Jaya	√		Perlu adanya Koordinasi, Sosialisasi dan sinkronisasi lebih lanjut dengan pihak kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelepasan kawasan hutan	Dinas Kehutanan
6	Kehutanan	Lahan PT. REBINMAS masuk kawasan hutan produksi murni agar diperjuangkan stausnya dan kontribusi kurang	450	Desa Tanjung Binga			Perlu adanya pembinaan dalam kepatuhan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan	Dinas Kehutanan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							peraturan perundangaan yang berlaku	
7	Kehutanan	Lahan PT. REBINMAS masuk kawasan hutan produksi murni agar diperjuangkan stausnya dan kontribusi kurang	20000	Desa Selumar (HTI) dan Desa HTI Lainnya	√		Perlu adanya pembinaan dalam kepatuhan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangaan yang berlaku	Dinas Kehutanan
8	Kehutanan	Masyarakat meminta solusi terkait dengan larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran	5	Desa Simpang Renggiang	√		Perlu adanya sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap larangan membuka lahan dengan membakar	Dinas Kehutanan
9	Kehutanan	Masyarakat meminta solusi untuk pembukaan lahan yang tidak diizinkan dengan cara membakar	3	Desa Jangkang	√		Perlu adanya sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap larangan membuka lahan dengan membakar	Dinas Kehutanan
10	Kehutanan	Meminta solusi bagi masayarakat yang ingin membuka lahan perkebunan terkait dengan larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran	3	Desa Lilangan	√		Perlu adanya sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap larangan membuka lahan dengan membakar	Dinas Kehutanan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
11	Kehutanan	Penetapan kawasan hutan kemasyarakatan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya	1	Desa Simpang Renggiang	√		Perlu adanya koordinasi antara Dinas Kehutanan melalui KPHP Gunung Duren dalam pemanfaatan HKM sesuai dengan Peta PIAPS dan peraturan yang berlaku	Dinas Kehutanan
12	Kehutanan	Perlu adanya penyelesaian status kawasan hutan lindung di desa sungai samak, untuk memudahkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	1	JL. Pegantungan, Sungai Samak	√		Hutan lindung dapat dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial (Hutan Krmasyarakatan atau Hutan Desa) tanpa mengubah status kawasan hutan.	Dinas Kehutanan
13	Kehutanan	Masyarakat berharap pemerintah dapat membantu masalah hutan adat	500	Desa Pelempang Jaya	√		Tahapan yang harus dilaksanakan adalah ditetapkan terlebih dahulu kelompok adatnya melalui peraturan daerah. Selanjutnya dilaksanakan proses pengusulan pengelolaan hutan adat.	Dinas Kehutanan
							Jika lokasi berada dalam kawasan hutan dapat dilakukan pengelolaan melalui skema perhutanan sosial.	Dinas Kehutanan
14	Kehutanan	Perketat izin korporasi agar ada sinergi anggaran Provinsi, Kabupaten dan Desa	1	Desa Perawas	√		Perlu data dukung izin korporasi, terkait usaha apa yang dilakukan dan lokasi berada didalam kawasan hutan atau tidak.	Dinas Kehutanan
15	Kehutanan	Meminta Legalitas penggunaan kawasan hutan produksi untuk digunakan sebagai lahan pertanian	1	Desa Jangkang	√		Perlu koordinasi dan sinkronisasi dalam mengajukan izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Dinas Kehutanan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
16	Kehutanan	masih banyak kawasan HTI yang di tolak warga	1	Seluruh Kecamatan	√		Perlu adanya kemitraan antara Masyarakat yang telah berkebun di lahan Konsesi HTI melalui Program Perhutanan Sosial dalam Skema Kemitraan sesuai peraturan Perundangan yang berlaku	Dinas Kehutanan
17	Kehutanan	tingginya pemanfaatan lahan secara ilegal	70.000.000	di seluruh wilayah provinsi bangka belitung	√		Perlu adanya pembinaan dalam kepatuhan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundangaan yang berlaku	Dinas Kehutanan
R	Kelautan dan Perikanan							
1	Kelautan dan Perikanan	minta bantuan bibit ikan untuk 8 kolam untuk dikelola oleh masyarakat	8000 ekor	Desa Tanjung Binga, Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	✓		Rekomendasi :Difasilitasi dengan catatan data kelompok dan proposal harus segera disampaikan ke DKP Prov Koefisien : 4000 ekor Anggaran : 80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Kelautan dan Perikanan	Permohonan bantuan mesin kapal sebagai alat tangkap ikan untuk kelompok nelayan Jungkong	9 Set	Jl. Tanjung Kelayang RT.12/RW.03 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Kelautan dan Perikanan	Masyarakat mengusulkan untuk pembuatan rumpon – rumpon demi menghindari rusaknya biota laut karena aktifitas kapal isap.	3 buah	Desa Air Ketekok, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Paal Satu		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Kelautan dan Perikanan	Usulan pembangunan dermaga untuk nelayan di Dusun Ujung Gersik.	1 unit	Dusun Ujung Gersik, Kab. Belitung, Membalong		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Kelautan dan Perikanan	Bantuan Peber Untuk Nelayan	1000 buah	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
6	Kelautan dan Perikanan	Solusi permasalahan laut	1 solusi	Desa Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Kelautan dan Perikanan	Masyarakat meminta bantuan pembangunan pemecah ombak/talud sekaligus sebagai tempat sandaran kapal.	1 paket	Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Kelautan dan Perikanan	GENZET 8000 WATT UNTUK 80 ORANG (BAGAN)	940000000 Rupiah	DESA EBO KEC S.LIAT, Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Kelautan dan Perikanan	80 ORANG (Nelayan dan pembudidayaan ikan)	160000000 Rupiah	SUNGAILIAT, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Kelautan dan Perikanan	Bantuan lampu nyulo (di atas lampu kapal)	50 buah	Keluarahan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Kelautan dan Perikanan	Masyarakat anggota kelompok nelayan meminta bantuan untuk pengadaan mesin dan jaring udang	15 Kelompok nelayan	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Kelautan dan Perikanan	Permohonan bantuan jaring, pukat dan alat tangkap sejenis lainnya untuk kelompok nelayan yang meliputi tiga desa yaitu Desa Air Lintang, Desa Benteng Kota dan Desa Tempilang	3 paket	Air Lintang, Benteng Kota, Tempilang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tempilang, Seluruh Kelurahan/Desa		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Kelautan dan Perikanan	tambak ikan 10 petak 5 x 20	180000000 Rupiah	Lampur, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	✓		Rekomendasi :Difasilitasi dengan catatan data kelompok dan didukung dengan proposal dan data calon penerima Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Kelautan dan Perikanan	masyarakat memohon bantuan alat transportasi dan alat tangkap ikan	10 set	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
15	Kelautan dan Perikanan	masyarakat meminta bantuan alat perlengkapan penangkapan ikan	10 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
16	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan talut tambatan perahu nelayan Desa Batubetumpang	700000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Kelautan dan Perikanan	Minta bantuan bibit ikan untuk dikelola masyarakat	1 Kelompok	Desa Sungai Padang, Kab. Belitung, Sijuk, Sungai Padang	✓		Rekomendasi :Difasilitasi dengan catatan data kelompok dan didukung dengan proposal dan data calon penerima Koefisien : 1 Paket	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Tambatan perahu nelayan Timur Desa Batubetumpang dan Pembangunan Plat deker/Gorng-gorong	200000000 Rupiah	Desa Batubetumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
19	Kelautan dan Perikanan	Bantuan untuk nelayan (kapal, alat tangkap ikan,dll)	2 Kelompok	Kelurahan Tanjungpendam, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Kelautan dan Perikanan	Bantuan dana pengadaan sarana dan prasarana berupa alat tangkap	37700000 Rupiah	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Kelautan dan Perikanan	Bantuan pembutan/penyedian bagan apung untuk 10 kelompok	500000000 Rupiah	di Bangka Belitung, Kab. Bangka, Sungailiat, Rebo		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Kelautan dan Perikanan	Banyaknya kelompok nelayan menginginkan tangkap ikan untuk meningkat daya tambah untuk menambah hasil tangkap ikan	500000000 Rupiah	di Pangkalniur, Pulau Dante, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Kelautan dan Perikanan	Banyaknya kelompok nelayan menginginkan tangkap ikan untuk meningkat daya tambah untuk menambah hasil tangkap ikan	500000000 Rupiah	Di Belinyu, Kab. Bangka, Belinyu, Belinyu		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Kelautan dan Perikanan	tidak sedikit keluhan dari pada nelayan baik darat dan laut mengeluhkan	100000000 Rupiah	di seluruh kabupaten bangka, Kab. Bangka,		✓	Alokasi anggaran 0 rupiah	Dinas Kelautan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		kualitas ikan tangkapannya akibat dari penangnan lingkungan yang baik		Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa				dan Perikanan
25	Kelautan dan Perikanan	Masyarakat mengeluhkan bangunan PPI yang rusak sehingga menimbulkan bau tidak sedap	1 Unit	jalan TPI Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	✓		diakomodir di tahun 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	Kelautan dan Perikanan	Masyarakat menanyakan masalah kartu KUSUKA untuk pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan	1 Buah	jalan TPI ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	✓		diakomodir di tahun 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Masyarakat menanyakan tempat pembuangan limbah ikan	1 Unit	jalan TPI ketapang, Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	✓		diakomodir di tahun 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan
S	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mohon bantuan UMKM yang tepat sasaran		Desa Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	✓			Dinas UMKM
2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	pengajuan pengadaan mesin pengering keripik nanas		Desa badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	✓		Melalui DID	Dinas UMKM
3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diharapkan bantuan pemerintah dalam memperdayakan UMKM yang ada di desa benteng kota dengan memberikan pelatihan – pelatihan dalam mengembangkan keahlian para ibu – ibu dan pemuda- pemuda yang ada didesa benteng kota seperti membuat hasil olahan dari ikan menjadi suatu produk yang dapat di nikmati para konsumen serta mensupport dana untuk mengembangkan UMKM tersebut.		Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur	✓			Dinas UMKM
4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mohon bantuan pelatihan dan pemodalan syariah tanpa riba bagi pelaku UMKM		Desa Karya Makmur, Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur	✓			Dinas UMKM
5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masyarakat meminta untuk pelaku usaha di permudah dalam proses administrasi UMKM		Pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	✓			Dinas UMKM

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlunya Bantuan pemerintah untuk membuka koperasi sehingga di desa cerucuk bisa diberlakukan program plasma kerjasama dengan perusahaan.		JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk	✓			Dinas UMKM
7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Minimnya fasilitas usaha berbasis start up/aplikasi berbentuk server dan laptop		Grimaya, Asak Kreatif Berkarya, Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	✓		Melalui DID	Dinas UMKM
T	Pariwisata / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (Usulan untuk pengembangan daerah wisata di Kawasan Gunung Lalang)	3 unit	Daerah Kawasan Gunung Lalang, Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Buluh Tumbang		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (Pemandian air panas yg masih hutan produksi)	1 unit	Desa Keretak, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (Perlu dibuat sarana dan prasarana siring-siring sebagai sarana penahan abrasi pantai sekaligus sebagai tempat wisata dan bersantai bagi warga dan pengunjung)	1 paket	Kampung Lintang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Air Lintang		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	
4	Pariwisata	masih rendahnya promosi pariwisata bagi industri pariwisata provinsi yang difasilitasi (Bantuan meningkatkan pariwisata pertanian)	1 unit	Desa Karya Makmur, Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur		✓	Bukan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Pariwisata	Masih kurangnya jumlah desa wisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) pada destinasi pariwisata (Masyarakat Tanjung Niur mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan objek wisata yang potensial di desa Tanjung Niur)	1 paket	Tanjung Niur, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tanjung Niur		✓	Tidak ada bantuan berupa uang atau barang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (gerbang wisata di jembatan Kubu (perbatasan desa Air Saga dan Desa Batu Itam))	1 bangunan	Dusun Kubu Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Pariwisata	Rendahnya peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Mengharapkan pemerintah untuk lebih meprioritaskan serta memberdayakan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menunjang keberhasilan program-program destinasi pariwisata seperti memperkerjakan penduduk-penduduk lokal pad sektor perhotelan tempatan)	1 paket	Benteng Kota, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Benteng Kota		✓	Bukan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (bantuan pengembangan Ekowisata Batu Harimau (pembuatan saung, keramba	1 unit	Desa Pemali, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		ikan, pembangunan dermaga, penerangan listrik, dll))					penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada DAK fisik bidang pariwisata.	
9	Pariwisata	Masih rendahnya kompetensi SDM Ekonomi Kreatif (Masyarakat memohon adanya bantuan program dari dinas sosial mengenai pelatihan ekonomi kreatif bagi anak-anak terlantar)	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin		✓	Bukan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Pariwisata	Masih rendahnya kompetensi SDM Ekonomi Kreatif (perwakilan ketua RT meminta adanya bantuan untuk peningkatan ekonomi kreatif dan gerakan hidup sehat bagi kecamatan rangkui)	1 orang	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam		✓	Bukan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (Meminta dukungan,perhatian dan peran dari pemerintah terkait dengan tempat-tempat wisata yang ada di Desa Pemali)	1 kawasan	Dusun Dam Keramat, Kab. Bangka, Pemali, Pemali		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (Pengembangan wisata Pulau Melidang)	1 usulan	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
13	Pariwisata	Sarana prasarana pendukung pariwisata belum memadai (Permohonan bantuan fasilitas di wisata alam Bumi Perkemahan Bumi Tebalu seperti mesin air, pipa paralon, infrastruktur jalan, fasilitas wc, genset, kabel dan lampu)	20000000 rupiah	Jl. Tanjung Kelayang RT.08/RW.03, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata tahun 2022 difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan pariwisata. Pembangunan fisik sarana prasarana diarahkan pada Bantuan Keuangan Provinsi atau DAK fisik bidang pariwisata.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
U	Kebudayaan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	Kebudayaan	masih kurangnya pembinaan lembaga kebudayaan (Masyarakat berharap agar dapat mempertahankan dan melestarikan budaya Belitong)	2 lembaga	Desa Pelempang Jaya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Aik Pelempang Jaya		✓	Tahun 2022 tidak ada sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Kebudayaan	masih rendahnya lembaga kesenian tradisional yang dibina (Kelompok adat meminta bantuan dana acara tujuh likur serta bantuan alat-alat kesenian)	1 paket	Mancung, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung		✓	Tidak ada bantuan berupa uang atau barang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Kebudayaan	masih rendahnya tata kelola kesenian tradisional di tengah masyarakat (Permohonan bantuan speaker wireless untuk menunjang kegiatan kesenian tari di Sanggar Tari Satya Dharma sebagai cara untuk melestarikan kesenian daerah)	1 set	Jl. Tanjung Kelayang RT.013/RW.04, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Tidak ada bantuan berupa uang atau barang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Kebudayaan	masih rendahnya tata kelola kesenian tradisional di tengah masyarakat (Permohonan bantuan seragam tari untuk menunjang kegiatan kesenian tari di Sanggar Tari Satya Dharma sebagai cara untuk melestarikan kesenian daerah)	24 set	Jl. Tanjung Kelayang Rt.13/Rw.04, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	Tidak ada bantuan berupa uang atau barang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Kebudayaan	masih rendahnya lembaga kesenian tradisional yang dibina (masih kurang SDM kesenian lokal)	50000000 Rupiah	Jering, Pelangas, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas		✓	Tidak ada bantuan berupa uang atau barang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
6	Kebudayaan	masih kurangnya pembinaan lembaga kebudayaan (Masyarakat meminta pendampingan dan pembinaan untuk pemberdayaan lembaga adat melayu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	1 buah	Desa Air Kulan, Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	✓		Pembinaan dilakukan oleh LAM Prov. Kep. Babel dalam Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
V	Lingkungan Hidup							
1	Lingkungan Hidup	Perlu adanya penyelesaian dan penyuluhan terhadap perusahaan supaya pengelolaan limbah dari perusahaan tersebut berwawasan lingkungan.	10 Orang	Kabupaten Belitung (Badau)	✓		Jika permasalahan tersebut merupakan kewenangan Provinsi (Izin PPLH diterbitkan oleh Provinsi) maka akan di akomodir melalui sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Lingkungan Hidup
2	DLH	bantuan agar kolong bekas pertambangan untuk tidak dibiarkan begitu saja	20 Kelompok	Kabupaten Belitung (Tanjungpandan)		✓	Belum dapat diakomodir karena kolong bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Lingkungan Hidup

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
3	DLH	Bantuan container sampah	1 Unit	Kabupaten Belitung (Tanjungpandan)		✓	Belum dapat diakomodir karena bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan HidupProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupate/Kota bahwa untuk sub bidang persampahan kewenangan yang ada di Provinsi terbatas pada Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	Lingkungan Hidup
							Usulan ini dapat diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	Lingkungan Hidup
4	DLH	Usulan pembangunan tempat pembuangan sampah akhir didesa buluh tumbang	3 Unit	Kabupaten Belitung (Tanjungpandan)		✓	Belum dapat diakomodir karena bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan HidupProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupate/Kota bahwa untuk sub bidang persampahan kewenangan yang ada di Provinsi terbatas pada Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	Lingkungan Hidup

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							Usulan ini dapat diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	Lingkungan Hidup
W	Perdagangan							
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pangawasan Gas Elpiji 3 Kg			✓		Dilaksanakan pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	Pangan dan Pertanian							
1	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	10000 bibit durian	Desa Tanjung Binga, Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	✓		Diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022, rekomendasi yang diberikan bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
2	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan Pupuk Kandang untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau --- Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	500 Karung	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong	✓		Diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan kapur untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau --- Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	100 Karung	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong	✓		Diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan drum untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau	20 Buah	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	bantuan yang diberikan berupa saprodi, bibit atau sarana pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan
5	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan pupuk NPK mutiara untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau	60 Karung	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong	✓		Diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
6	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan tajar hidup untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau	2000 Batang	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	tidak bisa direalisasikan karena bantuan diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan pasca panen	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan tangki semprot untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau	20 Unit	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	bantuan yang diberikan melalui dana APBD adalah bentuk bibit, saprodi dan pasca panen. Selain daripada itu diusulkan melalui Anggaran APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Solusi untuk turunnya harga lada, karena banyak masyarakat desa Buluh Tumbang merupakan petani lada	2 unit	Desa Buluh Tumbang, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Lesung Batang	✓		diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan fasilitasi UPH	Dinas Pertanian dan Pangan
9	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kelangsungan penyaluran pupuk subsidi untuk petani yang tidak jelas.	100 kg	Desa Terong, Kab. Belitung, Sijuk, Terong	✓		Diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022, masuk ke sub kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk	Dinas Pertanian dan Pangan
10	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Usulan pemberian bantuan bibit ayam terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok peternakan di Dusun Ujung Gersik	100 ekor	Dusun ujung gersik, Kab. Belitung, Membalong, Membalong		✓	Untuk bantuan bibit ayam diusulkan melalui anggaran APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan bibit holtikultura	20000 bibit	Desa Keretak, Kab. Bangka Tengah, Keretak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022. bantuan bibit yang diberiakan yaitu bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
12	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan peningkatan tanaman holtikultura	20000 bibit	Desa Teru, Kab. Bangka Tengah, Teru	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022. bantuan bibit yang diberiakan yaitu bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
13	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan Bibit Sawit	30000 bibit	Desa Keretak, Kab. Bangka Tengah, Keretak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Pertanian/ Dinas Pertanian	Mengakomodir program-program	10 program	Desa Lampur, Kab. Bangka		✓	usulan dimaksud belum	Dinas

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
	dan Ketahanan Pangan	bantuan pertanian		Tengah, Sungai Selan, Lampur			jelas	Pertanian dan Pangan
15	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	bantuan bibit sawit untuk desa sungai padang	1000 batang	desa sungai padang, Kab. Belitung, Sijuk, Sungai Padang	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
16	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Agar dapat menstabilkan dan meingkatkan harga sawit---Resiko perubahan iklim terhadap produksi dan produktivitas pertanian masih tinggi ((OPT, penyakit tanaman)	1 unit	Desa sungai selan, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022, peningkatan kualitas lada dengan fasilitasi UPH	Dinas Pertanian dan Pangan
17	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Jalan Produksi desa Kerakas-lampur-kerantai	10 km	Desa Lampur, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
18	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan Pupuk subsidi dan bibit tanaman pertanian	10000 bibit	Desa Karya Makmur, Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022, bantuan bibit yang diberiakan yaitu bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
19	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan alat pertanian	10 unit	Desa Karya Makmur, Kab. Bangka, Pemali, Karya Makmur	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022. bantuan bibit yang diberiakan yaitu bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
20	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kelompok gapoktan meminta bantuan pemerintah dalam pembangunan irigasi sawah di desa Mancung	1 paket	Mancung, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
21	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat memohon bantuan bibit-bibitan untuk lahan pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Simpang Renggiang seperti sawi, kopi, durian dan lain-lain.	5 Hektar	Desa Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
22	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok tani meminta bantuan bibit sapi potong dan sapi perah untuk dibudidayakan oleh masyarakat kelompok tani	15 Kelompok tani	Desa Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022, direkomomendasikan untuk diberikan bantuan bibit ternak sapi	Dinas Pertanian dan Pangan
23	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kuota pupuk subsidi yang masih kurang dan masalah pendistribusiannya agar tepat sasaran dan sesuai aturan	500 kelompok	kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022, peningkatan kualitas lada dengan fasilitasi UPH	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan untuk bantuan bibit sahang dan bantuan dari dinas agar tanaman sahang yang sakit dapat dikurangi	1000 kelompok	kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
25	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	perbaikan irigasi persawahan	1 km	Desa Ibul, Kab. Belitung, Badau, Ibul	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
26	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat di Kecamatan Tempilang, terkhusus tiga desa tujuan reses yang meliputi Air Lintang, Benteng Kota dan Tempilang mengharapkan adanya program cetak sawah baru serta normalisasi sungai dan pembangunan irigasi penunjang pertanian	3 paket	Air Lintang, Benteng Kota dan Tempilang, Kab. Bangka Barat, Tempilang, Tempilang, Seluruh Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
27	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	kandang sapi	198.000.000	desa cambai RT 001 RW 001, Kab. Bangka Tengah, Namang, Cambai	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
28	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Adanya bantuan bimbingan teknis dan penyuluhan yang berkelanjutan bagi pembudidaya sapi	200.000.000	Desa Namang, Kab. Bangka Tengah, Namang, Namang	✓		diakomodir melalui kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan
29	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan alat pertanian modern seperti traktor roda 4 dan lain-lain serta pembangunan gudang untuk penyimpanan pupuk dan alat-alat pertanian lainnya	15 Kelompok tani	Desa Jangkang, Kab. Belitung Timur, Dendang, Jangkang		✓	tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							diusulkan melalui dana APBN	
30	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan racun rumput untuk kelompok tani Aik Kemang Hijau	50 Liter	Jl. Tanjung Kelayang RT.10/RW.04 Dusun II, Kab. Belitung, Sijuk, Terong		✓	tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
31	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat Desa Ketap mengharapkan bantuan pupuk subsidi dan non subsidi yang sulit didapatkan.	1 paket	Desa Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
32	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat Ketap mengharapkan bantuan bibit pertanian dari pemerintah	1 paket	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap	✓		diakomodir. bibit yang diberikan yaitu bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
33	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	memohon adanya bantuan dibidang pertanian dan peternakan berupa bibit sahang dan sawit	1000 bibit	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
34	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan bibit sahang, sawit dan bebek	1 set	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
35	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Memohon adanya bantuan dibidang Peternakan berupa hewan ternak seperti bebek dan hewan ternak lainnya	1000 ekor	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Kimak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
36	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pupuk subsidi dan non subsidi yang sulit di dapatkan	10000 ton	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
37	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	permohonan bantuan bibit kelapa dan alat produksi teh pucuk dan minyak kelapa VCO	1 set	Desa Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Jada Bahrin	✓		diakomodir. komoditas yang diakomodir dalam APBD untuk tanaman perkebunan adalah sawit, karet, lada dan kopi	Dinas Pertanian dan Pangan
38	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pupuk subsidi dan non subsidi yang sulit di dapatkan	10000 ton	Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
39	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	bantuan bibit jahe putih beserta pupuk	10 kelompok	Kampung Rambak, Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat			tidak diakomodir. komoditas yang diakomodir dalam APBD adalah Cabai, bawang merah dan durian	Dinas Pertanian dan Pangan
40	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	masyarakat meminta bantuan untuk peternakan sapi	5 ekor	pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
41	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau dan mudah di dapat masyarakat	10000 kilogram	JL. Pegantungan, Suangai Samak, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
42	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan bibit untuk warga desa sungai samak	10000 Batang	JL. Pegantungan, Sungai Samak, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022. bantuan bibit yang diberiakan yaitu bibit durian	Dinas Pertanian dan Pangan
43	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan Bantuan Selang Air Kelompok Tani Kemetang Guntong dusun Simpang Rusa	10000 Meter	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
44	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan Bibit Cabai kecil dan besar Untuk kelompok tani kemetang guntong dusun simpang rusa	1500 kilogram	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
45	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan bibit kacang panjang untuk kelompok tani kemetang guntong dusun simpang rusa	1200 kilogram	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa		✓	tidak diakomodir. komoditas yang diakomodir dalam APBD adalah Cabai, bawang merah dan durian	Dinas Pertanian dan Pangan
46	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan bantuan pompa air untuk kelompok tani kemetang guntong dusun simpang rusa	50 Set Pompa Air	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Membalong, Simpang Rusa		✓	tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
47	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Meminta bantuan alat pertanian bajak singkal yang baru dan sesuai dengan standar petani dan diserahkan ke masyarakat yang mengajukan dan membutuhkan	10 unit alat pertanian	JL. Raya Membalong, Kab. Belitung, Badau, Cerucuk		✓	tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
48	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran di bidang perkebunana di desa sempan	100.000.000	Desa Sempan, Kab. Bangka, Pemali, Sempan	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
49	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan fasilitas pengolahan kopi untuk meningkatkan hasil produksi	10 Kelompok tani	Desa Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
50	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Adanya bantuan bimbingan teknis dan penyuluhan yang berkelanjutan untuk para pembudidaya ikan air tawar	1 Usulan	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	✓		diakomodir melalui kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan
51	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan permodalan, pengadaan benih, pakan, sarana dan prasarana serta solusi pemasaran bagi masyarakat yang menekuni kegiatan budidaya sapi	30 Benih Sapi	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
52	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan Bantuan Modal Kebun Cabe Kelompok Tani Air Salak	1 kegiatan	Desa Jelutung, Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
53	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	bantuan modal usaha budidaya ayam	411.750.000	desa air merbau, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Merbau	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
54	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	permintaan bantuan alat cultivator , hand sprayer electrik dan pupuk	71254000 rupiah	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga		✓	tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
55	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pembangunan saluran pembungan air persawahan	200.000.000	Desa Belilik, Kab. Bangka Tengah, Namang, Belilik		✓	tidak diakomodir. bantuan yang difasilitasi di APBD terkait pengairan adalah konstruksi irigasiuntuk selain itu diajukan melalui	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
							dana APBN	
56	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan untuk ternak sapi	2 Kelompok	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
57	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Adanya pembukaan lahan baru	10000 Bibit	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
58	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan bibit tanaman & alat alat pertanian serta pelatihan / pembinaan	5 Kelompok	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
59	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Usulan kelompok tani wanita---Masih rendahnya kapabilitas penyuluh dan petani serta peningkatan kelas kelompok tani	5 Kelompok	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
60	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	usulan kelompok tani milenial---Masih rendahnya kapabilitas penyuluh dan petani serta peningkatan kelas kelompok tani	5 Kelompok	Desa Air Saga dan sekitarnya, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjung Pandan, Seluruh Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
61	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	bantuan bibit kelapa sawit untuk warga bentayan	1 unit	bentayan jaya, Kab. Belitung Timur, Manggar, Bentaian Jaya	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
62	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Perlu diadakan pertemuan antara dinas terkait, perusahaan, koperasi serta masyarakat agar permasalahan plasma ini selesai dan mendapatkan solusi terbaik	20 Orang	JL. Pegantungan, Kab. Belitung, Badau, Sungai Samak	✓		diakomodir melalui kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan
63	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Transparansi modal dan hasil jual produksi dari Plasma	1 Usulan	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan	✓		diakomodir melalui kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan
64	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan bibit dan pakan ayam untuk kelompok anak-anak milenial	2 Kelompok	Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
65	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Usulan kelompok lansia untuk memanfaatkan kolam eks tambang sebagai ternak ikan (lele, nila, patin, gurame)	6 Kelompok	Desa Air Saga, Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Air Saga			tidak diakomodir. mungkin usulan lebih tepat ke dinas perikanan	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
66	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bantuan untuk ternak sapi	3 Kelompok	Dusun Kelekak Datuk Desa Badau, Kab. Belitung, Badau, Badau	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
67	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan penyediaan tambahan alat produksi persawahan Desa Serdang seperti Comben Harvester (Alat Pemanen Padi)	475.000.000	Desa Serdang, Kab. Bangka Selatan, Toboali, Serdang			tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
68	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan bibit sapi bagi pembudidaya ternak sapi di desa Lilangan	5 Kelompok budidaya	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur, Gantung, Lilangan	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
69	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat Desa Telak mengeluhkan harga komuditas pertanian yang melemah	1 paket	Desa Telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak			diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan fasilitasi UPH	Dinas Pertanian dan Pangan
70	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Masyarakat desa telak mengeluhkan harga komuditas pertanian melemah--- Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	1 paket	desa telak, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak			diakomodir dengan membantu peningkatan kualitas lada dengan fasilitasi UPH	Dinas Pertanian dan Pangan
71	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	permohonan pengajuan mesin traktor quick mini untuk memudahkan para pertanian membajak sawah	60 unit	Desa Kimak, Kab. Bangka, Merawang, Merawang, Seluruh Kelurahan/Desa			tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
72	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	1 paket	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
73	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih	1 paket	Ketap, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
		kurang						
74	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	pengajuan permohonan bibit sawit untuk para petani di desa---Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	15000 Bibit	desa Jada Bahrin, Kab. Bangka, Merawang, Merawang, Seluruh Kelurahan/Desa	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
75	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan Peralatan Petani yaitu Mesin Pemintal, Traktor dan Excavator 65---prasarana pertanian (JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim	1 Unit	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang			Rekomendasi : tidak diakomodir. bantuan bibit yang diberikan dalam bentuk bibit, saprodi dan prasarana pasca panen. selain daripada itu diusulkan melalui dana APBN	Dinas Pertanian dan Pangan
76	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pembangunan Bedengan Perkebunan Melon dan Perkebunan Cabai--- prasarana pertanian (JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim	4 Hektar	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
77	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemeliharaan Sawah Kelompok Tani-- prasarana pertanian (JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim	5 Hektar	Desa Batu Betumpang, Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
78	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	bantuan bibit kelapa sawit untuk warga bentayan --Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	1 unit	bentayan jaya, Kab. Belitung Timur, Manggar, Bentaian Jaya	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
79	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum optimalnya saluran bantuan pemerintah atas peternakan sapi guna meningkatkan ekonomi warga--prasarana pertanian (JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim	100.000.000	Desa Tanjung Pura, Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Tanjung Pura	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
80	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan kelompok tani warga, sehingga diajukan tanaman bibit sawit.---Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	70.000.000	Kelompok Tani Puding Jaya 2, Desa Puding Besar, Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
81	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum optimalnya saluran pemerintah atas peternakan sapi guna meningkatknan ekonomi warga---Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	130.000.000	Kelompok Puding Jaya 2, Desa Puding Besar, Kab. Bangka, Puding Besar	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
82	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan kelompok tani warga, sehingga diajukan tanaman bibit sawit. --- Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	50.000.000	Desa Nibung, Kab. Bangka, Puding Besar, Nibung	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan
83	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Permohonan bantuan dana optimalisasi Pengerukan Aliran Air Sungai Pangkalan Tanah dan Sungai Serdang di Persawahan Lisum Petani Gapoktan Terap Berjaya ---prasarana pertanian (JUT, JUP, irigasi, lantai jemur, dll) sub sekotor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih minim	700.000.000	Desa Terap, Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Bukit Terap		✓	untuk optimalisasi pengerukan aliran air sungai bukan kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Urusan/PD	Usulan Permasalahan	Volume/Satuan	Lokasi	Status		Alasan	PD
					Diakomodir	Tidak Diakomodir		
84	Pertanian/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	bantuan bibit padi dan bibit unggul lainya masih kurang --- Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	50.000.000	bangka, Kab. Bangka, Riau Silip, Pangkal Niur	✓		diakomodir apabila terdapat alokasi sumber pendanaan DID tahun 2022	Dinas Pertanian dan Pangan

6.4. Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel VI.2 penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut "*money follow function*" akan tetapi berasaskan "*money follow priority programme*". Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel VI.4
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	BELANJA BARANG/JASA	BELANJA MODAL	HIBAH	BANSOS	BANKEU	TOTAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	DINAS PENDIDIKAN	295,979,853,359	115,178,435,006		11,091,400,000			422,249,688,365
2	DINAS KESEHATAN	21,563,155,587	40,748,764,957	230,000,000	1,784,867,500			64,326,788,044
3	RSUP	51,905,963,153	40,124,217,500					92,030,180,653
4	RSJD	37,765,652,796	18,449,151,009	2,000,000,000				58,214,803,805
5	DINAS PUPR PERKIM	27,446,215,573	34,309,515,915	198,954,875,769				260,710,607,257
6	SATPOL PP	12,213,866,600	7,767,921,629	140,500,000				20,122,288,229
7	BADAN KESBANGPOL	5,648,004,778	4,120,142,706		3,912,290,000			13,680,437,484
8	DINAS SOSIAL PEMDES	20,891,844,226	11,518,152,444			700,000,000		33,109,996,670
9	BPBD	5,864,421,000	6,297,093,877	101,000,000				12,262,514,877
10	DISNAKER	14,201,696,000	4,841,789,887					19,043,485,887
11	DP3ACSKB	7,223,602,885	3,354,424,694	90,980,000				10,669,007,579
12	DLH KEHUTANAN		84,611,068					84,611,068
13	DINAS PER HUBUNGAN	11,224,657,777	6,696,407,731					17,921,065,508
14	DINAS KOMINFO	7,262,960,902	7,592,016,276	1,400,000,000	1,800,000,000			18,054,977,178
15	DINAS KUKM	8,366,889,738	4,808,932,316					13,175,822,054
16	DINAS PMPTSP	8,049,223,417	2,856,196,110					10,905,419,527
17	DIBUDPAR PORA	14,390,200,584	15,939,320,361		7,000,000,000			37,329,520,945
18	DINAS KEARSIPAN DAN PER PUSTAKAAN	10,186,957,723	2,971,985,279	171,033,384				13,329,976,386

NO.	PERANGKAT DAERAH	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	BELANJA BARANG/JASA	BELANJA MODAL	HIBAH	BANSOS	BANKEU	TOTAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
19	DINAS KE LAUTAN DAN PERIKANAN	13,523,531,621	7,793,693,507	7,600,000,000				28,917,225,128
20	DINAS PER TANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	26,159,389,353	24,279,882,501					50,439,271,854
21	DINAS ESDM	17,253,264,592	4,306,976,697					21,560,241,289
22	DINAS PER INDUSTRIAN DAN PER DAGANGAN	13,318,127,164	5,933,439,673	3,396,331,867				22,647,898,704
23	BAPPEDA	10,650,538,055	5,327,495,888	300,000,000				16,278,033,943
24	BAKUDA	51,672,389,335	16,151,416,800	90,073,000			47,965,800,000	115,879,679,135
25	BKPSDM	15,575,732,394	6,356,575,261	2,969,506,000				24,901,813,655
26	SEKRETARIAT DEWAN	49,811,376,323	50,089,717,677	600,000,000				100,501,094,000
27	INSPEKTORAT	13,641,887,028	3,993,391,851	26,000,000				17,661,278,879
28	SEKRETARIAT DAERAH	44,166,626,199	46,752,555,199		45,421,370,000	850,000,000		137,190,551,398
32	BADAN PENG HUBUNG	4,424,621,912	6,339,969,133	165,706,934				10,930,297,979
	TOTAL	**820,382,650,074**	**504,984,192,952**	**218,236,006,954**	**71,009,927,500**	**1,550,000,000**	47,965,800,000	**1,664,128,577,480**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Total belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer sebesar Rp1.664.128.577.480,00 dengan total seluruh belanja daerah sebesar Rp2.066.269.746.680,30, berikut rincian belanja daerah:

a. Belanja Operasi, sebesar Rp1,397,926,770,526.00, yang terdiri dari:

   1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta belanja pengelola keuangan. Belanja Pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp820.382.650.074,00;

   2) Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp504,984,192,952,00. Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

   3) Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp71,009,927,500,00;

   4) Belanja Bantuan Sosial tahun 2022, sebesar Rp1,550,000,000,00;

b. Belanja Modal tahun 2022, sebesar Rp218.236.006.954,00

c. Belanja Tidak Terduga tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00;

d. Belanja Transfer sebesar Rp440.106.969.200,30, yang terdiri dari:

   1) Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp392.141.169.200,30;

2) Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp47.965.800.000,00.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, sebagai berikut:

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator Sasaran Strategik RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini,

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI AKHIR RPJMD
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	1,17	4,17	1,42	3,9	5,97	5,98	5,98
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-3,74	8,11	5,87	3,90	4,42	4,59	5,59
3	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	15,30	2,92	-58,94	2,15	2,20	2,25	2,25
4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	2,22	-1,08	0,87	1,50	1,74	1,76	1,76
5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	7,02	5,36	1,47	2,00	2,70	2,75	2,75
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	3,65	3,62	5,42	5,50	4,05-4,55	4,55
7	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58,83	63,23	63,82	63,95	64,00	64,80	64,80
8	Persentase Angka Kemiskinan	5,30	4,77	4,50	5,77	5,50	4,55-4,99	4,99

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI AKHIR RPJMD
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.120.353	1.214.930	1.271.837	1.334.870	1.409.026	1.479.389	1.479.389
10	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	10	35	45	75	86	100	100
11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	8	10	15	20	25	54	54
12	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	30,25	34,53	39	60	69,45	71,84	71,84
13	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,71	11,83	11.94	11.96	12.5	13.00	13.00
		L=11,35	L=11.70	L=11.78	L=11.80	L=12.5	L=13	L=13
		P= 12,07	P= 12.05	P= 12.11	P= 12.13	P= 12.5	P= 13	P= 13
14	Persentase Sekolah Terakreditasi A	35,66	40,15	43,38	44	44,30	60	60
15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	63,05	65,55	67,85	68,1	68,5	68,5
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,07	2,02	1,98	2,00	2,08	2,08	2,08
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,93	89,15	89	89,01	89,02	89,05	89,05
18	Indeks Pembangunan Pemuda	49	53,67	54,50	55,50	56,50	57,50	57,50
19	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,25	0,26	0,30	0,35	0,40	0,45	0,45
20	Persentase PMKS Sejahtera	44%	62%	63%	64,00%	65,92%	67,00%	67,00%
21	Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	88,35	88,48	82,97	83,21	86,22	86,22
22	Indeks Reformasi Birokrasi	65,49	65,39	66,84	66,97	67	67,50	67,50
23	Nilai Kebebasan Sipil	83,07	80,95	84,12	85,02	87.79	87.82	87.82
24	Nilai Hak-Hak Politik	82,30	73,56	71,71	75,80	81,79	81,85	81,85
25	Nilai Kelembagaan Demokrasi	72,89	63,76	75,48	78,50	80,36	80.,54	80.,54
26	Indeks Kapasitas Terhadap Bencana Daerah	0,10	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	KONDISI AKHIR RPJMD
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85	67,68	63,99	75,51	75,74	75,99	75,99

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
A.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,47	4,46	3,32	4,50	3,50	4,00	4,00
2.	PDRB Per Kapita	48.827.254	50.087.237	50.933.457	51.999.546	52.788.473	53.555.410	53.555.410
3.	Inflasi	3,13	3,18	2,62	3,00	3,01	4,00	4,00
4.	Indeks Gini	0,276	0,272	0,262	0,260	0,258	0,255	0,255
5.	Indeks ketimpangan Williamson	0,1932	0,1993	0,2004	0,2020	0,2030	0,2050	0,2050
6.	Indeks Pembangunan Manusia	69,99	70,67	71,30	71,05	71,20	71,40	71,40
7.	Persentase Penduduk Miskin	5,20	5,25	4,50	5,10	5,00	4,50	4,50
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	3,65	3,62	3,50	5,20	4,50	4,50
B.	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah	7,78	7,84	7,98	8,00	8,02	8,05	8,05
1.2.	Harapan Lama Sekolah	11,71	11,83	11,89	11,93	11,97	12	12
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka usia harapan hidup	69,95	70,18	70.50	70,70	71,00	71,10	71,10
2.2	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	3,11	3,25	3,21	7,160	7,140	7,120	7,120
2.3	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	3,59	3,72	3,21	7	7	7	7
2.3	Prevalensi Kurang Gizi anak balita	27,30	12,05	8,16	7,14	7,80	6,20	6,20
2.4	Angka Kematian ibu (per 100.000 orang)	21	44	36	21	20	19	19
3.	Ketenagakerjaan							
3.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,96	0,96	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
C.	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**							
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	2,50	2,69	2,89	3,08	3,27	3,47	3,47
1.2.	Jumlah gedung	0,0079	0,0080	0,0081	0,0082	0,0083	0,0084	0,0084
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	625	635	640	645	650	660	660
2.2.	Jumlah gedung olahraga	1732	1732	1733	1734	1735	1736	1736
II.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
A.	**Fokus Layanan Urusan Wajib**							
1.	**Pendidikan**							
	APM Sekolah Menengah	49,99	55,24	61,92	62,10	62,85	63,20	63,20
	Akreditasi Sekolah	35,66	40,15	43,38	44,25	44,50	45,10	45,10
2.	**Kesehatan**							
	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1395	1718	2049	2150	2230	2300	2300
	Akreditasi Rumah Sakit	65	70,83	72	73	74	75	75
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	93	93,43	94,21	94,40	94,60	95	95
	Rasio Jaringan Irigasi	1,04	6,5	7	7,6	7,8	80	80
	Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air	10	15	19	25	28	30	30
	Persentase Penyediaan Air Baku	1,11	5,7	6,06	8,03	8,50	8,80	8,80
4.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	68,14	68,83	73,45	74,10	75,25	75,80	75,80

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	83.56	85,64	90,30	90,80	91,40	92	92
5.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang Ditindaklanjuti	417	277	169	115	110	100	100
6.	**Urusan Sosial**							
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	394.681	391.124	398.970	399.030	399.100	399.150	399.150
	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Terbedayakan	1.017	980	962	960	980	990	990
7.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
	Persentase Industri Rumah (IR) Yang Dibina	0.30	0.40	0.66	0.68	0.69	0.70	0.70
8.	**Urusan Tenaga Kerja**							
	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	2.5	1	3	4	5	6	6
9.	**Urusan Pangan**							
	Capaian Skor PPH Ketersediaan	78.78	86.09	87.84	88,03	88,90	89,02	89,02
	Capaian PPH Konsumsi	81.2	80.09	83.01	84,00	85,00	85,50	85,50
	Persentase Penduduk Rawan Pangan	9.66	10.13	7.9	7,5	7,0	6,8	6,8
10.	**Urusan Pertanahan**							
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	100	75	80	80	80	85	85
11.	**Urusan Lingkungan Hidup**							
	Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	60	72	34.11	50	60	75	75

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50	50	85	88	90	92	92
	Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan	126	135	146	160	170	180	180
	Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi	100	85	94	95	98	99	99
12	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	46.41	60.41	74.41	88.41	89,41	90,03	90,03
	Persentase akta pencatatan sipil	55.54	63.32	71.10	79.26	79,50	80,00	80,00
13.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
	Persentase Kampung KB	30	63.63	76.62	76.62	77	78	78
14.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	232	277	289	290	295	230	230
15.	**Urusan Perhubungan**							
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	30	30.25	34.53	35	35,80	36	36
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20	21	38.12	38,50	39	39,30	39,30
16.	**Urusan Penanaman Modal**							
	Nilai Investasi	3.781	3.733	4.246	4.329	4.350	4.400	4.400
17	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**							
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	1,12	1.20	2.50	3.10	4.05	4.16	4.16
	Persentase Angkatan Kerja Pemuda	3,15	4.10	4.50	5.20	5.50	6.01	6.01
	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	50	55	60	65	70	75	75
	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	0.10	0.15	0.17	0.18	0.20	0.21	0.21

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	49	53.67	54,05	54,30	54,70	56,00	56,00
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0.26	0.26	0,28	0,30	0,32	0,35	0,35
18.	**Urusan Komunikasi dan Informasi**							
	Persentase Jumlah layanan infrastruktur teknologi dan Kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	75	85	90	97	98	99	99
19.	**Urusan Statistik**							
	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan	35	90	95	98	99	100	100
20.	**Urusan Persandian**							
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	1	1	2	3	3	4	4
21.	**Urusan Kebudayaan**							
	Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola	5	10	35	45	50	55	55
22.	**Urusan Perpustakaan**							
	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	1.34%	2.69%	9.50%	10%	15%	20%	20%
	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan	23.055	22.379	24.429	26.600	27.000	27.300	27.300
23.	**Urusan Kearsipan**							
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan	30%	36%	40%	45%	50%	55%	55%
	Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	39	45.82	47.76	48,30	48,60	49	49
24.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
	Persentase Koperasi Aktif	72.86	69.42	62.37	62.50	63.05	63.40	63.40
	Jumlah Koperasi Aktif	714	681	654	700	750	780	780
	Jumlah Koperasi	980	981	1.049	1.100	1.150	1.200	1.200
	Jumlah UMKM Yang Diberdayakan	150.87	150.948	161.186	162.172	162.486	163.121	163.121

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
B	**Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan**							
1.	**Urusan Pemerintahan Umum**							
	Nilai Kebebasan Sipil	83.07	80.95	84.12	85,02	87.79	87.82	87.82
	Nilai Kelembagaan Demokrasi	72.89	63.76	75.48	75,80	81,79	81,85	81,85
	Nilai Hak-Hak Politik	82.30	73.56	71.71	78,50	80,36	80.,54	80.,54
2.	**Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**							
	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	78%	80%	85%	100%	100%	100%	100%
3.	**Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Penelitian**							
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	59	62	80.6	80.88	92	95	95
4.	**Urusan Pengawasan Pemerintahan**							
	Nilai SAKIP	66.84	67.16	70.26	80	83	86	86
	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	0.88	0.86	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01
5.	**Urusan Keuangan**							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD	30.09%	35.97%	29.78%				
6.	**Urusan Kesekretariatan Daerah**							
	Indeks Reformasi Birokrasi	65.49	65.39	66.84	66,97	67	67,50	67,50
7.	**Urusan Kesekretariatan DPRD**							
	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD	79%	80%	81%	82%	83%	85%	85%
8.	**Urusan Penghubung**							
	Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
C.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**							
1.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**							
	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-3.24	8.11	5.87	6,20	7,25	8,50	8,50
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	20.57	21.58	19.53	21.50	22.20	23.50	23.50
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	0.25	0.71	0.54	0.72	0.80	0.85	0.85
	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap	0.05	-16.94	-20.66	0.07	0.10	0.15	0.15
	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Budidaya	33	0	25	33	35	40	40
2.	**Urusan Pariwisata**							
	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	15.30	2.92	-58.94	2,15	2,20	2,25	2,25
	Persentase Tenaga Pariwisata yang Tersertifikasi	4	5	9	10	12	15	15
3.	**Urusan Pertanian**							
	Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian	12	13	14	15	16	17	18
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Padi	37.123	45.736	48.812	68.290	69.200	69.780	69.780
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Cabai Rawit	1.729	2.035	2.002	2.546	2.600	2.630	2.630
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Cabai Merah	1.993	2.501	2.468	5.386	5.400	5.420	5.420
	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura Bawang Merah	13	87	170	97.94	110	120	120
	Produksi Lada	59.146	55.625	56.529	56.378	56.400	57.180	57.180
	Produksi Karet	34.278	32.811	33.457	33.92	34.20	37.80	37.80
	Jumlah Populasi Ternak Besar Sapi	10.000	11.500	12.832	11.614	11.732	11.870	11.870
	Jumlah Populasi Ternak Ayam	12.644	13.760	14.743	15.742	16.400	17.257	17.257
4.	**Urusan Kehutanan**							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial	0	52.02	50.49	49.52	50.30	51,80	52
	Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola	0	9.24	32.58	59.19	60,01	60,22	60,22
5.	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**							
	Rasio Elektrifikasi	98.04	100	99.99	100	100	100	100
6.	**Urusan Perdagangan**							
	Perkembangan Ekspor dan Import Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD Juta)	1.140	1.563	1.294	1.310	1.344	1.389	1.465
7.	**Urusan Perindustrian**							
	Laju Pertumbuhan Industri	0.19	0.13	0.09	0.10	0.12	0.18	0,20
8.	**Urusan Transmigrasi**							
	Berkembangnya Satuan Kawasan Transmigrasi	1	2	2	2	2	2	2
D.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**							
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	12.066	12.666	12.959	12..999	13.100	13.200	13.200
2.	Nilai Tukar Petani							
	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	116,43	106,13	103,96	104,20	104,800	108,100	108,100
	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	122,09	125,73	129,05	130,35	130,80	131,25	131,25
3	Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)	0,96	0,84	0,80	0,85	0,90	0,98	0,98
	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	639.949	709.094	758.333	780.200	798.026	799.900	799.900
	Total pengeluaran	1.360.994	1.419.495	1.509.974	1.590.124	1.600.000	1.620.100	1.620.100
4.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	0,470	0,500	0,502	0,505	0,510	0,515	0,515
	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.543	4.512	5.499	6.113	6.300	6.470	6.470
	Jumlah seluruh PMA/PMDN	235	411	633	650	670	680	633
	Rasio daya serap tenaga kerja	15,07	10,97	8,68	10,05	14,20	16,20	16,20

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal 2017	Proyeksi Capaian Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
E.	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**							
1.	Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan							
	Panjang Jalan Provinsi	899,33	850,99	850,99	850,99	850,99	850,99	850,99
	Jumlah Kendaraan	934.354	998.080	1.039.803	1.048.188	1.052.723	1.058.897	1.061.450
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0016	0,0037	0,0038	0,0039	0,0040	0,0041	0,0042
2.	Luas Wilayah Produktif	0,0021	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
	Rasio Luas Wilayah Produktif	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
3.	Infrastruktur							
	Jumlah pelabuhan udara	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Laut	12	13	17	17	17	17	17
	Jumlah Terminal	10	13	13	13	13	13	13
	Jumlah Perbankan	202	247	281	287	290	292	292
	Jumlah Hotel Berbintang/Non Bintang	105	170	220	257	259	262	262
F.	**Fokus Iklim Berinvestasi**							
1.	Angka Kriminalitas							
	Jumlah Kriminalitas	609	331	320	310	280	250	250
	Jumlah Penyelesaian Kasus	374	210	220	230	240	250	250
2.	Jumlah Demo	16	10	6	3	2	1	1
3.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	10	12	13	14	15	16	16
5.	Pengenaan Pajak Daerah							
	Pajak Daerah	629.136	787.235	790.139	850.307	841.315	868.153	868.153
	Retribusi Daerah	5.435	7.613	9.315	16.194	13.621	16.470	16.470
G.	**Fokus Sumber Daya Manusia**							
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	66.678	67.800	68.200	69.400	70.230	71.900	71.900
	Jumlah penduduk	1.430.865	1.459.873	1 488 792	1.517.590	1.588.200	1.590.100	1.590.100
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	465,99	467,20	470,80	478,01	480,22	483,69	483,69

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Tabel VII.3
Sasaran Pokok Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	REALISASI DAN TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Kesejahteraan Rakyat	**1. Kemiskinan (%)**						
	Kepulauan Bangka Belitung	5,20	5,25	4,62	4,53	5,50	4,99
	Pangkalpinang	4,80	4,95	4,25	4,36	4,20	4,10
	Bangka	5,10	5,47	4,92	4,51	4,45	4,25
	Bangka Tengah	6,07	5,81	5,02	4,85	4,00	3,80
	Bangka Barat	2,98	3,05	2,67	2,70	2,65	2,60
	Bangka Selatan	3,92	3,70	3,36	3,52	3,45	3,40
	Belitung	7,77	7,56	6,29	6,27	6,20	6,15
	Belitung Timur	6,81	7,06	6,60	6,52	6,33	6,13
	2. Pengangguran (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,65	3,62	5,25	5,50	4,55
	Pangkalpinang	5,80	4,70	5,01	6,93	7,37	6,27
	Bangka	4,29	4,12	3,80	5,42	4,83	4,42
	Bangka Tengah	3,38	3,93	4,39	5,59	3,50	3,30
	Bangka Barat	4,23	3,11	2,85	4,12	4,10	4,00
	Bangka Selatan	2,74	4,35	3,87	5,42	4,20	4,10
	Belitung	2,57	2,93	2,90	4,82	4,05	3,93
	Belitung Timur	2,62	1,50	1,71	3,93	3,50	2,50
Meningkatnya ekonomi daerah	**3. Pertumbuhan PDRB (%)**						
	Kepulauan Bangka Belitung	4,47	4,45	3,32	-2,30	3,00	3,22
	Pangkalpinang	5,19	5,08	3,29	-3,02	2,90	3,20
	Bangka	5,04	4,52	2,89	-0,73	2,50	2,60
	Bangka Tengah	3,46	3,42	1,23	-2,87	2,00	2,50
	Bangka Barat	5,26	5,20	7,08	-5,43	3,00	3,50

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	REALISASI DAN TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Bangka Selatan	4,57	4,52	2,55	-1,99	2,00	2,55
	Belitung	5,30	5,38	3,36	-2,31	2,25	3,10
	Belitung Timur	4,85	4,22	3,29	-3,02	2,10	2,70
	4. Inflasi (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	2,09	3,83	2,31	2,23	3,00	4,00
	Pangkalpinang	2,27	2,26	2,62	1,71	2,17	2,50
	Tanjung Pandan	1,75	6,73	1,17	1,49	1,40	1,37
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	**5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**						
	Kepulauan Bangka Belitung	69,99	70,67	71,47	70,57	71,35	71,70
	Pangkalpinang	76,86	77,43	77,97	78,22	78,35	78,45
	Bangka	71,09	71,80	72,39	72,40	72,48	72,53
	Bangka Tengah	68,99	69,52	70,33	70,45	70,73	70,80
	Bangka Barat	67,94	68,68	69,05	69,08	70,00	71,10
	Bangka Selatan	65,02	65,98	66,54	66,90	66,94	67,00
	Belitung	70,93	71,70	72,46	72,51	72,57	72,60
	Belitung Timur	69,57	70,22	70,84	70,92	70,98	71,00

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program.* Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, tidak hanya memuat kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program–program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) dan Kebijakan Umum APBD 2022 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2022.

Pangkalpinang, 30 Juni 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

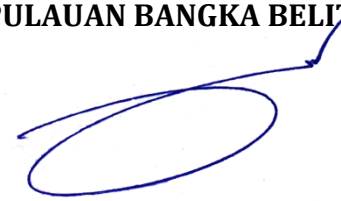

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**318.916.416.567**								**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	%		%	78 %	**299.306.720.088**						78 %	**0**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**250.000.000**							**0**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000.000				Pembangunan Pendidikan	dokumen perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000				Pembangunan Pendidikan	dokumen perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Survey kepuasan pelayanan keuangan	angka		angka	95 angka	**296.179.853.359**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				3000 orang	295,979,853,359				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	3000 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						200.000.000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	survey kepuasan pelayanan umum	angka		angka	95 angka	**1.440.406.500**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.000.000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						36.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	675.506.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						120.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						52.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						530.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	survey kepuasan pelayanan umum	angka		angka	95 angka	**1.073.000.000**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.500.000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum				25 orang	942.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	25 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	survey kepuasan pelayanan umum	angka		angka	95 angka	**363.460.229**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin				12 bulan	276.460.229		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMA (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)	Angka		Angka	42 Angka	**19.409.696.479**						42 Angka	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	terlaksananya pengelolaan pendidikan SMA	sekolah		sekolah	66 sekolah	**8.988.200.000**						66 sekola	**0**	
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	jumlah siswa yang mendapat beasiswa				1000 siswa	1.000.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan SMA serta siswa SMA	1000 sisw	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah pelaksanaan assesment siswa				2 kali	300.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan SMA serta siswa SMA	2 kali	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah lomba kesiswaan SMA				3 jenis	700.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan SMA serta siswa SMA	3 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	jumlah guru SMA yang mendapat beasiswa				6 orang	950.000.000					satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan SMA serta siswa SMA	6 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						6.038.200.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan SMA serta siswa SMA		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Terlaksananya pengelolaan pendidikan SMK	sekolah		sekolah	58 sekolah	**7.585.200.000**						58 sekola	**0**	
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						1.000.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan smk serta siswa SMK		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						300.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan smk serta siswa SMK		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan SMK				3 jenis	700.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan smk serta siswa SMK	3 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						760.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan smk serta siswa SMK		0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						150.000.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan smk serta siswa SMK		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						4.675.200.000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan smk serta siswa SMK		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Terlaksananya pengelolaan pendidikan Khusus	sekolah		sekolah	9 sekolah	**2.836.296.479**						9 sekolah	**0**	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.050.000.000					guru dan tenaga kependidikan, anak berkebutuhan khusus		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						50.000.000				Pembangunan Pendidikan	guru dan tenaga kependidikan, anak berkebutuhan khusus		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah penyediaan Operasional PLA				12 bulan	1.358.296.479		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	guru dan tenaga kependidikan, anak berkebutuhan khusus	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						378.000.000				Pembangunan Pendidikan	guru dan tenaga kependidikan, anak berkebutuhan khusus		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase dokumen kurikulum yg terintegrasi dengan kurikulum nasional	persen		persen	100 perse	**150.000.000**						100 perse	n **0**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**						**100.000.000**							**0**	
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah						100.000.000				Pembangunan Pendidikan	guru dan tenaga kependidikan		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**						**50.000.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus						50.000.000				Pembangunan Pendidikan	guru dan tenaga kependidikan		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	persen		persen	85 persen	**50.000.000**						85 persen	**0**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**						**50.000.000**							**0**	
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						50.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Pendidikan	guru dan tenaga kependidikan		0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**13.272.525.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal	persen		persen	85 persen	**432.925.000**						85 persen	**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**216.700.000**							**0**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor				10 Unit	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	10 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						18.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						114.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**169.100.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa kantor Cabang Dinas				1 Tahun	30.000.000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya PTT				3 Orang	113.100.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	3 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**47.125.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.125.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT & APK PENDIDIKAN MENENGAH di Cabang Dinas pendidikan Wilayah III (CABANG DINAS WILAYAH III KABUPATEN BANGKA BARAT)	Nilai		Nilai	87.23 & 90 Nilai	**12.839.600.000**						87.23 & 90 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**7.409.900.000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba Kesiswaan Siswa				3 Jenis	300.000.000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	3 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah GTT PTT Terlayani				200 Orang	7.109.900.000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	200 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**4.751.100.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya GTT PTT				130 Orang	4.551.100.000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	130 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**678.600.000**							**0**	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus						678.600.000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**10.728.873.277**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survei kepuasan pelayanan internal	Persen		Persen	95 Persen	**447.671.197**						95 Persen	**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	survey kepuasan pelayanan umum	angka		angka	95 angka	**132.367.580**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik				1 paket	2.016.690	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	1 paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	survey kepuasan pelayanan minimal				15000 lem	ar 15,636,000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	15000 lem	ar 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan				12 bulan	2.400.000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan ATK				12 bulan	20.275.890	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	14.500.000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	77.539.000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**270.246.900**								**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.380.000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	46.800.000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	33.566.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum				5 orang	188.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	5 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**45.056.717**								**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan				12 bulan	41.509.330	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	3.547.387		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT & APK PENDIDIKAN MENENGAH di Cabang Dinas pendidikan Wilayah IV (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV KABUPATEN BANGKA SELATAN)	Nilai		Nilai	425 & 90 Nilai	**10.281.202.080**						425 & 90 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Jumlah SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV terlayani	sekolah		sekolah	6 sekolah	**5.012.500.184**						6 sekolah	**0**	
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah GTT dan PTT SMA				125 orang	5.012.500.184	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan , guru dan tenaga kependidikan serta siswa	125 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Jumlah SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV terlayani	sekolah		sekolah	5 sekolah	**4.665.501.896**						5 sekolah	**0**	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT dan PTT SMK				215 orang	4.665.501.896	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	215 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**603.200.000**							**0**	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan				603200000 orang	18 603,200,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	60320000 orang	0 18 0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**522.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**182.875.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**116.169.337**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.490.825		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.113.771				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.574.534				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						49.990.207				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.500.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**63.205.663**							**0**	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						63.205.663							0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**339.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**339.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						209.000.000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						130.625.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**467.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**163.625.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**81.500.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						45.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**62.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**20.125.000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.125.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**303.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**303.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						187.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						116.875.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**467.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**163.625.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**157.835.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.077.172		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.009.514		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						108.948.314		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						19.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.980.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.980.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.810.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.810.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**303.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**303.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						56.301.944		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						130.793.056		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						116.780.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**302.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.875.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**78.555.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.955.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.800.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						38.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25.320.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.320.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**196.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**196.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						121.000.000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						75.625.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**137.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**48.125.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**9.731.188**							**0**	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survey Kepuasan Pelayanan Umum				12 Bulan	8.531.188	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survey Kepuasan Pelayanan Umum				12 Bulan	1.200.000	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24.553.362**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survey Kepuasan Pelayanan Umum				12 Bulan	1.750.000	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.803.362		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**13.840.450**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Survey Kepuasan Pelayanan Umum				12 Bulan	2.440.450	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Survey Kepuasan Pelayanan Umum				12 Bulan	11.400.000	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**89.375.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**89.375.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Minat Bakat Siswa				12 Bulan	55.000.000	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Minat Bakat Siswa				12 Bulan	34.375.000	Kab. Bangka, Bakam, Dalil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**82.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.350.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						16.835.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.440.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						99.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						61.875.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**467.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**163.715.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**119.668.600**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Jumlah Belanja Alat Kebersihan				1 Kegiatan	24.538.100	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Biaya Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2 Kegiatan	3.931.250	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Biaya Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	37.632.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Tahun	4.800.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Belanja Alat Tulis Kantor				2 Kegiatan	31.367.250	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Biaya Belanja Makan Minum Rapat dan Jumlah Belanja Perjalanan Dinas				1 Tahun	17.400.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5.246.400**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Biaya Belanja Materai				1 Kegiatan	4.750.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Biaya Kegiatan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	496.400	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**38.800.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jumlah Belanja Pemeliharaan Kendaraan				3 Kegiatan	38.800.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**303.785.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**204.568.000**							**0**	
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terpenuhinya Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung dan ruang Sekolah				3 Kegiatan	59.568.000	Kab. Bangka, Pemali, Sempan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terpenuhinya Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengantar Studi				1 Kegiatan	30.000.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya Biaya Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa				2 Kegiatan	115.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka, Pemali, Air Duren Kab. Bangka, Pemali, Sempan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		2 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**34.354.000**							**0**	
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Biaya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				2 Kegiatan	34.354.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**64.863.000**							**0**	
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Terpenuhinya rehabilitasi Tempat parkir sekolah selama satu tahun				3 Kegiatan	11.313.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	terpenuhinya penyelenggaraan Belajar dan ujian bagi Peserta didik				2 Kegiatan	53.550.000	Kab. Bangka, Pemali, Air Duren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**47.035.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	1.820.000						12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	belanja peralatan rumah tangga/alat- alat kebersihan				12 bulan	8.560.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	belanja barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	4.500.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	1.020.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	belanja penyediaan bahan/material				12 bulan	18.135.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	belanja penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi				12 bulan	13.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	belanja surat menyurat				12 bulan	2.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**37.590.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	belanja biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				12 bulan	14.190.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 bulan	8.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja pemeliharaan/ rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya				12 bulan	10.400.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				12 bulan	5.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah belanja kegiatan belajar mengajar				12 bulan	99.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						61.875.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**0**							**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	belanja kreativitas siswa / sewa bus				12 bulan	0	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**137.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**48.125.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**34.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Belanja alat listrik				1 tahun	1.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Belanja surat kabar				7 Bulan	1.400.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		7 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Jumlah Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Jumlah Belanja makanan dan minuman rapat Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun	32.225.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**13.500.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai				150 lemba	r 1,500,000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		150 lemba	r 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Listrik				12 bulan	12.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**89.375.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**89.375.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						55.000.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Jumlah Belanja Obat-Obatan Jumlah Belanja pakaian batik tradisional Jumlah Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Jumlah Belanja Sewa Peralatan Studio Audio				1 Tahun 1 Tahun 15 Buah 5 Bus 1 Kegiatan	34.375.000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Penagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 15 Buah 5 Bus 1 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**79.000.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Jumlah Belanja Pengandaan dan Cetak				12 bulan	29.000.000	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.200.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	terpenuhinya Belanja Bahan dan Material				12 bulan	25.800.000	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.100.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya Biaya Jasa Surat Menyurat				12 bulan	2.100.000	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5.525.000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Biaya Peralatan dan Mesin				12 bulan	5.525.000	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah siswa yang terlayani				12 bulan	99.000.000	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah minat dan bakat siswa				12 bulan	61.875.000	Kab. Bangka, Merawang, Batu Rusa			Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**192.500.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**67.375.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**67.375.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	2.915.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	9.000.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	2.500.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	960.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	20.000.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	25.000.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**125.125.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**125.125.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	77.000.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	tersedianya jumlah anggaran				1 tahun	48.125.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Puding Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**82.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.875.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**28.875.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih				1 Tahun	7.088.412	Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Belanja Obat-Obatan				12 Bulan	1.297.736	Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12.968.852	Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas				12 Bulan	7.520.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**53.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	survey kepuasan proses Belajar				12 Bulan	33.000.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Belanja Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				12 Bulan	20.625.000	Kab. Bangka, Puding Besar, Saing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**42.225.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah belanja alat listrik				1 tahun	9.390.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah belanja perlatan kebersihan dan bahan pembersih				1 tahun	15.000.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah belanja obat-obatan				1 tahun	3.000.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah belanja cetak jumlah belanja penggandaan				1 tahun 1 tahun	14.835.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah belanja makanan dan minuman rapat jumlah belanja perjalanan dinas				1 tahun 1 tahun	0	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah belanja materai				1 tahun	3.000.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**41.400.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah belanja pemeliharaan kendaraan				1 tahun	900.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 tahun	6.060.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah belanja pemeliharaan gedung				1 tahun	34.440.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah belanja pengadaan perlengkapan sekolah				1 tahun	0	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	jumlah belanja pengadaan sarana mobilitas sekolah				1 tahun	0	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah belanja pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik				1 tahun	0	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						99.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah belanja pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa				1 tahun	61.875.000	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**0**							**0**	
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah belanja pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik				1 tahun	0	Kab. Bangka, Riau Silip, Riau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**522.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**182.875.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**177.875.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17.875.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**339.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**339.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						130.625.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						209.000.000	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**357.500.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**133.578.396**							**133.578.396**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**73.134.536**							**73.134.536**	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	52.774.536	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	52.774.536	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 tahun	3.600.000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 tahun	3.600.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terlaksananya koordinasi dan konsultasi				1 tahun	16.760.000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	16.760.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**51.990.000**							**51.990.000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				399 Lemba	r 3,990,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		399 Lemb	r 3,990,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komuniskasi, Sumber daya air dan Listrik				1 tahun	48.000.000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**8.453.860**							**8.453.860**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				1 tahun	2.613.860	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	2.613.860	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor				1 tahun	5.840.000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	5.840.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**223.921.604**							**223.921.604**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**223.921.604**							**223.921.604**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Siswi Yang Berprestasi				1 Tahun	223.921.604	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	223.921.604	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**302.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.875.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**104.375.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.282.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.738.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.050.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						43.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.305.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.000.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**500.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**196.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**196.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						15.950.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						27.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						75.625.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						78.050.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**30.477.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor				1 Tahun	8.000.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK				1 Tahun	2.517.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengisian Tabung Gas				1 Tahun	660.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Air Minum				1 Tahun	7.000.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	8.800.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	3.500.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**54.060.000**							**0**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Internet Jumlah Token Listrik				1 Tahun 1 Tahun	54.060.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.088.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan BBM				1 Tahun	2.088.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Alat dan Bahan Kesenian Jumlah Pengadaan Alat dan Bahan Olahraga Jumlah Pengadaan Alat Praktek Pembelajaran				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	21.858.500	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyediaan ATK				1 Tahun	16.341.500	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Kertas Rapor, Sampul Rapor, dan Sampul Ijazah Jumlah Penyediaan Sewa Peralatan Kegiatan Kesiswaan				1 Tahun 1 Tahun	60.800.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Trophy/Bingkisan untuk Siswa Berprestasi Jumlah Uang Saku untuk Kegiatan Siswa Jumlah Uang Saku untuk Pendamping Kegiatan Siswa Jumlah Uang untuk Siswa berprestasi				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	61.875.000	Kab. Bangka Tengah, Namang, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**302.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**222.978.800**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**106.664.800**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.150.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak				1 Tahun	32.514.800	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	67.000.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**84.880.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos				1 Tahun	880.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah token listrik dan penggunaan internet				1 Tahun	84.000.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**31.434.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 Tahun	4.414.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.020.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**79.521.200**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**79.521.200**							**0**	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Bahan Praktek pembelajaran				1 Tahun	12.650.000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa				1 Tahun	66.871.200	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Jeruk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**192.500.000**								**192.500.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**112.500.000**								**112.500.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**82.400.000**								**82.400.000**	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUMLAH CETAK DAN PENGGANDAAN				1 TAHUN	50.000.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JUMLAH SURAT KABAR YANG TERPENUHI				1 TAHUN	1.800.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	1.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 TAHUN	30.600.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	30.600.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**26.100.000**								**26.100.000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUMLAH MATERAI				200 LEMB	AR 2,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		200 LEMB	AR 2,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUMLAH JASA LISTRIK YANG TERPENUHI				1 TAHUN	24.100.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	24.100.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4.000.000**								**4.000.000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				1 TAHUN	4.000.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	4.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**80.000.000**							**80.000.000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**80.000.000**							**80.000.000**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 TAHUN	80.000.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**302.500.000**							**302.500.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.875.000**							**105.875.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**105.875.000**							**105.875.000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik				1 Tahun	10.181.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	10.181.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.130.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			14.130.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	57.955.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	57.955.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 Tahun	2.400.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	2.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah penyediaan bahan/material				1 Tahun	9.209.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	9.209.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Tahun	12.000.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**196.625.000**							**196.625.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**196.625.000**							**196.625.000**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah penyelenggaraan proses mengajar dan ujian peserta didik				1 Tahun	121.000.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	121.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa				1 Tahun	75.625.000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Keretak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	75.625.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**145.125.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**145.125.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	48.000.000	Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus			Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan UMUM				12 Bulan	17.125.000	Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**212.375.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**212.375.000**							**0**	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						63.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						29.375.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**174.607.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**167.757.000**							**0**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMA N 1 Kelapa				12 bulan	21.915.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMA N 1 Kelapa				12 bulan	65.716.500	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMAN 1 Kelapa				12 bulan	7.500.000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMAN 1 Kelapa				12 bulan	72.625.000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.300.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMA N 1 Kelapa				12 bulan	3.300.000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.550.000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMA N 1 Kelapa				12 bulan	3.550.000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**182.893.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**29.500.000**							**0**	
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMA N 1 Kelapa				12 bulan	29.500.000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**153.393.000**							**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya Biaya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di SMA N 1 Kelapa				12 bulan	153.393.000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**412.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**144.375.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**137.765.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	6.892.162	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	43.274.988	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Tahun	2.089.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	9.963.850	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				1 Tahun	3.300.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	72.245.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.000.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	3.000.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.610.000**								**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	3.610.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**268.125.000**								**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**268.125.000**								**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Tersedianya Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar dan Ujian Bagi Peserta Didik				1 Tahun	164.953.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	103.172.000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**302.500.000**								**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.875.000**								**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**96.862.500**								**0**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	44.830.600	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	4.386.900	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Tahun	4.800.000	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	42.845.000	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4.500.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	4.500.000	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4.512.500**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	4.512.500	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**196.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**196.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Tersedianya penyelenggaraan proses belajar mengajar dan ujian bagi peserta didik				1 Tahun	121.358.000	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	75.267.000	Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**192.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**67.375.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**63.211.500**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang diperlukan di SMAN 1 Tempilang				100 perse	25.377.500	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat, konsultasi dan koordinasi				100 perse	37.834.000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.090.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai untuk keperluan surat menyurat dan aktivitas administrasi lainnya				109 lemba	r 1,090,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		109 lemba	r 0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.073.500**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Motor Dinas Terawat				100 perse	3.073.500	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**125.125.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**125.125.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Tersedianya perlengkapan dan kebutuhan dalam proses belajar mengajar di SMAN 1 Tempilang				100 perse	77.000.000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa				100 perse	48.125.000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Sangku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**73.705.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	34.303.010	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyedian bahan logistik				12 Bulan	1.065.800	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	21.977.890	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	3.427.300	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12.931.000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12.920.000**							**0**	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	asi			12 Bulan	12.920.000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik				12 Bulan	99.000.000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa				12 Bulan	61.875.000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Telak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**357.500.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**125.125.000**							**125.125.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**125.125.000**							**125.125.000**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						29.097.000							29.097.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.400.000							2.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.320.000							2.320.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						91.308.000							91.308.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**232.375.000**							**232.375.000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**232.375.000**							**232.375.000**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah penyelenggara proses Belajar dan ujian				1 tahun	143.000.000						1 tahun	143.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						89.375.000							89.375.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**137.500.000**							**0**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**137.500.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**137.500.000**							**0**	
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	7.411.468	Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Jasa Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1 Tahun	40.713.532	Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar				1 Tahun	55.000.000	Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Sekolah				1 Tahun	34.375.000	Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Tanjunglabu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**82.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.875.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**13.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material				1 tahun	4.000.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselengara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	9.625.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**13.500.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 tahun	500.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 tahun	13.000.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.750.000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terselenggara Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 tahun	1.750.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53.625.000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**53.625.000**							**0**	
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terselenggara Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1 tahun	3.200.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Telaksana Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 tahun	50.425.000	Kab. Bangka Selatan, Kepulauan Pongok, Pongok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**302.500.000**								**302.500.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**180.850.000**							**180.850.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**147.050.000**							**147.050.000**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	3.960.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	3.960.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 Tahun	18.503.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	18.503.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan				1 Tahun	29.280.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	29.280.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan dan Material				1 Tahun	41.677.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	41.677.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah				1 Tahun	53.630.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	53.630.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.800.000**							**1.800.000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai				1 Tahun	1.800.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	1.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**32.000.000**							**32.000.000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan operasional				1 Tahun	15.000.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset				1 Tahun	17.000.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	17.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**121.650.000**							**121.650.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**121.650.000**							**121.650.000**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa				1 Tahun	121.650.000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	121.650.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**192.500.000**							**192.500.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**67.375.000**							**67.375.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**50.275.000**							**50.275.000**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	7.165.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	7.165.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyedian bahan logistik				1 Tahun	3.000.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 Tahun	7.120.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	7.120.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 Tahun	4.800.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	4.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				1 Tahun	15.170.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	15.170.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	13.020.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	13.020.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**17.100.000**							**17.100.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat				1 Tahun	1.500.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	1.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Tahun	15.600.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	15.600.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**125.125.000**							**125.125.000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**125.125.000**							**125.125.000**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						77.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			77.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Siswi Berprestasi Dalam Bidangnya masing-masing				1 Tahun	48.125.000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Simpang Rimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	48.125.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**522.500.000**							**596.000.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**182.875.000**							**211.000.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**169.375.000**							**195.000.000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor				1 tahun	15.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 tahun	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 tahun	11.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik				1 tahun	2.400.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				1 tahun	39.130.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 tahun	2.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ Material				1 tahun	94.070.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	5.775.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**9.000.000**							**11.000.000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 tahun	6.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 tahun	3.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun	4.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4.500.000**							**5.000.000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional				1 tahun	4.500.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**339.625.000**							**385.000.000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**209.000.000**							**250.000.000**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1 tahun	209.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**130.625.000**							**135.000.000**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Seni dan Olahraga				1 tahun	130.625.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	135.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**259.500.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.625.000**							**97.500.000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**66.768.000**							**75.000.000**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 tahun	26.430.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan				1 TAHUN	17.498.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bahan Materi				1 TAHUN	22.840.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**7.290.000**							**8.500.000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				1 TAHUN	1.290.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	1.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi sumber daya air				1 TAHUN	6.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12.567.000**							**14.000.000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional				1 TAHUN	3.560.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	4.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor				1 TAHUN	9.007.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160.875.000**							**162.000.000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160.875.000**							**162.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa-Siswi Berprestasi Dalam Bidang Olahraga				1 TAHUN	99.000.000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Rias	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 TAHUN	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						61.875.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			62.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**82.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.875.000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**17.235.000**							**0**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APK PENDIDIKAN MENENGAH				89 %	1.000.000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	meningkatnya kepuasan pelayanan umum				89 %	950.000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	meningkatnya kepuasan pelayanan umum				89 %	1.000.000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya kepuasan pelayanan umum				89 %	14.285.000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**11.640.000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meningkatnya kepuasan pelayanan umum				89 %	2,520,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	meningkatnya kepuasan pelayanan umum				89 %	9,120,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**53,625,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	meningkatnya kepuasan pelayanan umum				89 %	33,000,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		89 %	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						20,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**412.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**144,375,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**43.515.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik				1 Tahun	3,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan peralatan kebersihan				1 Tahun	3,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah obat-obatan				1 Tahun	971,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				1 Tahun	7,500,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 Tahun	8,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum Jumlah perjalanan dinas				1 Tahun 1 Tahun	20,544,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**83,050,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				25 Lembar	250,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		25 Lemba	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet Jumlah tagihan listrik Jumlah tagihan telepon				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	82,800,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**17,810,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Jumlah suku cadang				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	2,810,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin				1 Tahun	13,500,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung dan bangunan				1 Tahun	1,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**268,125,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**268,125,000**							**0**	
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa				1 Tahun	78,200,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba siswa				1 Tahun	189,925,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Tanjungpend	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) m		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**														**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**258,255,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7,500,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3,375,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						79,600,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						63,900,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**69,300,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai dan Benda POS Lainnya				210 Lemba	r 2,100,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan		210 Lemb	r 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						67,200,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**9,580,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin dan Pajak Kendaraan dinas				1 Tahun	4,580,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**99,245,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**99,245,000**							**0**	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						53,995,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						40,250,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**204,975,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**112.050.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						59.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**27,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**65,925,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10,460,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10,965,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						44,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**42,525,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**42,525,000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						23,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						19,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**132,300,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Alat Litrik				5 Jenis	7,200,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		5 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				2 Jenis	6,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	24,400,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Majalah				1 Jenis	3,600,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				10 Jenis	24,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		10 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi SKPD				2 Jenis	26,600,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		2 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**38,400,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai				1 Jenis	2,400,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja Jasa Kantor				4 Jenis	36,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		4 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,100,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan / Motor Dinas				3 Jenis	2,100,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**115,200,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**115,200,000**							**0**	
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan pembersih				10 Jenis	16,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		10 Jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terpeliharanya Gedung dan Ruang Sekolah				4 Paket	24,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		4 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa				3 Mapel	15,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Mapel	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa				4 Kegiatan	52,700,000	Kab. Belitung, Membalong, Membalong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		4 Kegiatan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**148,125,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**82.455.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						54,155,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**40,260,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik dan internet				12 bulan	37,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25,410,000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						23,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**209,375,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**209,375,000**							**0**	
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						89,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**60.825.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan baterai yang tersedia				1 Tahun	7,000,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				1 Tahun	12,000,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah air galon (RO) yang tersedia				150 galon	3,000,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		150 galon	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan bahan fotokopi yang tersedia				1 Tahun	20,000,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang tersedia				1 Tahun	18,825,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25,800,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia				180 lemba	r 1,800,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		180 lemba	r 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya langganan listrik yang tersedia				1 Tahun	24,000,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**160,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**160,875,000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya pelaksanaan proses belajar dan ujian peserta didik				1 Tahun	99,000,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Bakat Siswa yang dilaksanakan				30 kegiata	n 61,875,000	Kab. Belitung Timur, Kelapa Kampit, Mentawak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		30 kegiata	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**183,000,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**62.000.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**117,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300				300 lemba	r 3,000,000				Pembangunan Pendidikan		300 lemba	r 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						114,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**174,500,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**174,500,000**							**0**	
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						74,500,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						100,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**247.500.000**							**20.000.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**168,500,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**129.000.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**33,500,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMA (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)	Angka		Angka	42 Angka	**79,000,000**						42 Angka	**20,000,000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	jumlah lomba siwa	jenis		jenis	3 jenis	**79,000,000**						3 jenis	**20,000,000**	
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	10000000		0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	10000000		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	penilaian siswa				4 jenis	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10000000	4 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	10000000		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						20,000,000					10000000		20,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**192.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**100,400,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**77.000.000**							**0**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6,300,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**18,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5,400,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**92,100,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**92,100,000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						92,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.075.050.000**							**0**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT di Cabang Dinas pendidikan Wilayah I (UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMA OLAHRAGA MUHAMMAD NOER)	Nilai		Nilai	425 Nilai	**3,075,050,000**						425 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	jumlah siswa terlayani	siswa		siswa	69 siswa	**3,075,050,000**						69 siswa	**0**	
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						2,890,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan	guru, tenaga kependidikan dan siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah penyelengaraan proses belajar dan ujian peserta didik				12 bulan	184,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan	guru, tenaga kependidikan dan siswa	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**552.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**193,375,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**82.800.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.100.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32,200,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,200,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						22.300.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**82,600,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						80,100,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**27,975,000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27,975,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**359,125,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**138,125,000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						138,125,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**221,000,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						221,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**942.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**329,875,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**193.875.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						33,750,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						30.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						59,425,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3,500,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						35.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						32,200,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**126,500,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**9,500,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5,500,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya				1 Tahun	4,000,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**612,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**612,625,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						377,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						235,625,000				Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**487.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**170,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**141.175.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	74,125,000				Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.650.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,400,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah belanja alat tulis kantor				12 bulan	50.000.000				Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24,600,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21,600,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,850,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4,850,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT & APK PENDIDIKAN MENENGAH di Cabang Dinas pendidikan Wilayah I (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA PANGKALPINANG DAN KABUPATEN BANGKA TENGAH)	Nilai		Nilai	425 & 90 Nilai	**316,875,000**						425 & 90 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**316,875,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						195,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan	GTK dan siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						121,875,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan	GTK dan siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**487.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**415,500,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**140.500.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						37.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**173,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						170,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**102,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel						5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**72,000,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**72,000,000**							**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						72,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**77.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.900.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7,530,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						40.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6,195,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						91,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						56,875,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**682.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**238,875,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**55.675.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Jumlah Belanja Alat Kebersihan				12 bulan	55,675,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**183,200,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya biaya penyelenggaraan Pendidikan di SMK				12 bulan	2,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pelayanan umum				12 bulan	181,200,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**443,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**273,000,000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa Terlayani				1056 siswa	273,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1056 sisw	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**170,625,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Terlayani				1056 siswa	170,625,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1056 sisw	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**422.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**147,875,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**39.620.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat dan Bahan embersih				12 bulan	5,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Obat-obatan				12 bulan	5,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung			Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bahan Cetak				12 bulan	18,660,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung			Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan				12 bulan	960,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja ATK				12 bulan	10,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**62,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 bulan	2,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi listrik				12 bulan	60,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**46,255,000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	3,610,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						42,645,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**274,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**274,625,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Belanja Belajar Mengajar				12 bulan	169,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung			Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah minat dan bakat siswa				12 bulan	105,625,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sinar Jaya Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**22.830.000**							**0**	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22,830,000	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**31,080,000**							**0**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31,080,000	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25,715,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6,946,250	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18,768,750	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						91,000,000	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						56,875,000	Kab. Bangka, Belinyu, Bukit Ketok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**24.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	belanja alat listrik				1 tahun	1,868,178	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	belanja peralatan kebersihan & bahan pembersih				1 tahun	10,056,822	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja langganan surat kabar				12 bulan	1,200,000	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	belanja makanan & minuman rapat				1 Tahun	11,500,000						1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**55,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	belanja materai				100 lbr	1,000,000	Kab. Bangka, Bakam, Bakam			Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		100 lbr	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja internet,air,listrik				12 bulan	54,000,000	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						91,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah belanja minat bakat siswa				12 bulan	56,875,000	Kab. Bangka, Bakam, Bakam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**162.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**56,875,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**55.885.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BELANJA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR				12 bulan	5,053,386	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	belanja peralatan rumah tangga/ alat kebersihan				12 bulan	4,986,783	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	belanja bahan logistik kantor				12 bulan	4,412,442	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja langganan jurnal/surat kabar majalah				12 bulan	1,200,000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						17.737.389		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22,495,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**990,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	belanja jasa surat menyurat/perangko				12 bulan	990,000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**105,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**105,625,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah belanja KBM kegiatan belajar mengajar				12 bulan	65,000,000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlh belanja kegiatan kesiswaan				12 bulan	40,625,000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Petaling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**292.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**227,225,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**135.056.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						8,456,000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik				1 Tahun	10,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				1 Tahun	12,400,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan				1 Tahun	1,800,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan / Material				1 Tahun	50,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	52,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**39,150,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	3,150,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik				1 Tahun	36,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**53,019,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				1 Tahun	38,019,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	15,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**65,275,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**65,275,000**							**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Bakat, Minat, dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	29,700,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK				1 Tahun	35,575,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Penyak			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**487.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**424,324,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**333.824.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	17,575,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	60,292,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	21,432,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor				1 Tahun	76,780,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	68,200,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Tahun	4,800,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material				1 Tahun	35,945,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	48,800,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**86,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	2,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	84,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,500,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	4,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,176,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**63,176,000**							**0**	
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah				1 Tahun	7,100,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1 Tahun	31,076,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Bakat, Minat, dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Arung Dalam			Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**617.500.000**							**617.500.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**216,125,000**							**216,125,000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**104.325.000**							**104.325.000**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			20,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	siswa				3 Jenis	54,325,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Jenis	54,325,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	siswa				3 jenis	30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 jenis	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**111,800,000**							**111,800,000**	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	siswa				3 Jenis	111,800,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Jenis	111,800,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**401,375,000**							**401,375,000**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**401,375,000**							**401,375,000**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						247,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			247,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa				3 Jenis	154,375,000	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Beluluk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		3 Jenis	154,375,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**617.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**308,485,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**169.705.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						42,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4,200,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						69,305,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,200,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**63,780,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,600,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60,180,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**75,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**309,015,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**309,015,000**							**0**	
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						120,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						30,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						99,015,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						60,000,000	Kab. Bangka Tengah, Simpang Katis, Terak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**97.500.000**							**97.500.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**34,125,000**							**34,125,000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**32.625.000**							**32.625.000**	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/Fotokopi				1 Tahun	5,775,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	5,775,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Alat Tulis Kantor yang tersedia				1 Tahun	20,670,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	20,670,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minuman dan koordinasi serta konsultasi rapat SKPD				1 Tahun	6,180,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	6,180,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,500,000**							**1,500,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				1 Tahun	1,500,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	1,500,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,375,000**							**63,375,000**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**63,375,000**							**63,375,000**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Prose Belajar dan Ujian Peserta Didik				1 Tahun	39,000,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	39,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	24,375,000	Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Lampur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	24,375,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**134,149,275**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**120.642.550**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	4,689,015	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1,326,535	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	3,600,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	111,027,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12,506,725**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas				1 Unit	3,482,450	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan dan mesin lainnya				1 tahun	9,024,275	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**223,350,725**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**223,350,725**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik				1 tahun	134,778,725	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	88,572,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**														
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**109,605,000**							**109,605,000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,296,014	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			5,296,014	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55,577,686		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			55,577,686	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,403,950	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			2,403,950	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,717,350	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			15,717,350	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17,870,000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			17,870,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,400,000**							**2,400,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,400,000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			2,400,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**10,340,000**							**10,340,000**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3,110,000	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			3,110,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7,230,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**182,895,000**							**182,895,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**161,528,828**							**161,528,828**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						161,528,828	Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			161,528,828	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**21,366,172**							**21,366,172**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						21,366,172		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			21,366,172	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**21.700.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**98,829,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**44.829.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,870,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Logistik Kantor				100 Perse	10,331,000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 Perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan kegiatan sekolah				100 Perse	6,828,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 Perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pelayanan penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas guru dan pegawai				100 Perse	22,800,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		100 Perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**54,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK SMK (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)	Angka		Angka	37 Angka	**128,671,000**						37 Angka	**21,700,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**128,671,000**							**21,700,000**	
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						11,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	SISWA		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya prasarana sekolah				100 Perse	15,600,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	SISWA	100 Perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat dan Bahan Praktek Siswa Terpenuhi				100 Perse	80,171,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	SISWA	100 Perse	n 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						21,700,000	Kab. Bangka Barat, Tempilang, Penyampak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	SISWA		21,700,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**487.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**170,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**164.015.000**							**0**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 tahun	69,549,653	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 tahun	10,545,000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 tahun	43,570,347	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	40,350,000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 tahun	3,000,000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,610,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 tahun	3,610,000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**316,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**316,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik				1 tahun	195,000,000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa				1 tahun	121,875,000	Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**422.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**147,875,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**94.475.000**							**0**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik				350 Galon	3,500,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		350 Galon	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	15,510,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 Tahun	2,400,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ Material				1 Tahun	59,345,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	13,720,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**48,900,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	4,500,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Tahun	44,400,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,500,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional				1 Tahun	4,500,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**274,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**274,625,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1 Tahun	169,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Berprestasi Bidang Seni dan Olahraga				1 Tahun	105,625,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Teladan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**78.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	8,000,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	4,625,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	23,000,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Material				12 Bulan	3,000,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	40,000,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Keluaran	Angka		Angka	90 Angka	**1,000,000**						90 Angka	**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Terpenuhi				12 Bulan	1,000,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa				1 Paket	91,000,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Siswi Berprestasi				12 Bulan	56,875,000	Kab. Bangka Selatan, Payung, Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**51.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Suevei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	2,500,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	3,000,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				90 Angka	800,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90 Angka	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	12,925,000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				90 Angka	2,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90 Angka	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				90 Angka	20,000,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90 Angka	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	10,000,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	1,000,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	24,000,000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Survei Kepuasan Pelayanan Umum				1 Tahun	3,000,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rata-Rata Nilai Asasment				1 Tahun	91,000,000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rata-Rata Nilai Asasment				1 Tahun	56,875,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Tukak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**42.175.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**17.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor				1 tahun	8,000,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 tahun	3,925,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				1 tahun	3,300,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baca dan Perundang-undangan				1 tahun	2,400,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**62,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia Jasa Surat Menyurat				1 tahun	2,000,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 tahun	60,000,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**42,175,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**42,175,000**	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1 tahun	56,875,000	Kab. Bangka Selatan, Air Gegas, Ranggas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						42,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			42,175,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						48,825,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**65.000.000**							**65.000.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**22,750,000**							**22,750,000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**16.750.000**							**16.750.000**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga				1 Tahun	3,410,200	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	3,410,200	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	499,800	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	499,800	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material kebutuhan kantor				1 Tahun	4,700,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	4,700,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	8,140,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	8,140,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,000,000**							**6,000,000**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah sumberdaya rekening listrik				1 Tahun	6,000,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	6,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**42,250,000**							**42,250,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**42,250,000**							**42,250,000**	
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	jumlah perlengkapan obat-obatan sekolah				1 Tahun	953,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	953,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	jumlah pemeliharaan gedung sekolah				1 Tahun	5,000,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	5,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah pemeliharaan sarana prasarana				1 Tahun	1,420,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	1,420,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1 Tahun	19,717,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	19,717,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah kegiatan minat, bakat dan kreativitas siswa				1 Tahun	12,300,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	12,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah pengembangan karier pendidik f]dan tenaga kependidikan				1 Tahun	2,860,000	Kab. Bangka Selatan, Pulaubesar, Batu Betumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	2,860,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**65.000.000**							**65.000.000**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**48,750,000**							**48,750,000**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**22.750.000**							**22.750.000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	6,525,000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	6,525,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik				1 Tahun	3,925,000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	3,925,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	7,300,000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	7,300,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	5,000,000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	5,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**26,000,000**							**26,000,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	2,000,000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	2,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			24,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**16,250,000**							**16,250,000**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**16,250,000**							**16,250,000**	
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Penyediaan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa				1 Tahun	16,250,000	Kab. Bangka Selatan, Simpang Rimba, Permis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	16,250,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**552.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**380,500,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**219.450.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik				1 Tahun	12,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Pembersih				1 Tahun	14,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Obat-obatan				1 Tahun	3,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan				1 Tahun	37,030,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Tahun	4,200,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 Tahun	65,595,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum dan perjalanan dinas				1 Tahun	83,625,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**157,200,000**								**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				1 Tahun	2,400,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah alat listrik				1 Tahun	154,800,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,850,000**								**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas				1 Tahun	3,850,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**172,000,000**								**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**142,500,000**								**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga siswa				1 Tahun	42,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Pemeliharan Gedung Kantor				1 Tahun	40,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba Siswa				1 Tahun	60,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**29.500.000**							**0**	
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas sekolah				1 Tahun	29,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**487.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**170,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**101.325.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.900.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**67,010,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.010.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						66,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,290,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2,290,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**316,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**316,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						24,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						72,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**357.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**125,125,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**35.645.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik				1 Tahun	500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan				1 Tahun	5,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Obat-obatan				1 Tahun	500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				1 Tahun	3,650,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar				1 Tahun	1,680,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 Tahun	8,815,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum serta jumlah perjalanan dinas				1 Tahun	15,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**61,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Paket Pengiriman				1 Tahun 1 Tahun	1,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Internet Jumlah Tagihan Listrik				1 Tahun 1 Tahun	60,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28,480,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Alat dan Kantor Lainnya Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jumlah Pemeliharaan Servis Komputer				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	28,480,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**232,375,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**232,375,000**							**0**	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Alat Peraga Peserta Didik				1 Tahun	28,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Biaya Personil				1 Tahun	115,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						89,375,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**79,625,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**45.275.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik				1 tahun	3,000,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan peralatan kebersihan				1 tahun	2,500,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah obat-obatan				1 tahun	3,000,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				1 tahun	5,000,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				1 tahun	3,720,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 tahun	5,000,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum Jumlah perjalanan dinas				1 tahun 1 tahun	23,055,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**33,130,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai Jumlah paket pengiriman				1 tahun 1 tahun	550,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet Jumlah tagihan listrik Jumlah tagihan telepon				1 tahun 1 tahun 1 tahun	31,140,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan				1 tahun	1,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,220,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Jumlah suku cadang kendaraan				1 tahun 1 tahun 1 tahun	1,220,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**147,875,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**147,875,000**							**0**	
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						3,560,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa				1 tahun	87,440,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba siswa				1 tahun	56,875,000	Kab. Belitung, Badau, Badau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**97.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**34,125,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**9.665.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik				1 tahun	1,000,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah bahan peralatan kebersihan				1 tahun	865,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan				1 tahun	1,500,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah ATK				1 tahun	1,500,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan dan minum jumlah perjalanan dinas				1 tahun 1 tahun	4,500,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24,460,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				1 tahun	100,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan air jumlah tagihan kawat/faksimile/interne berlangganan jumlah tagihan listrik jumlah tagihan telpon	t/TV			1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	24,360,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,375,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**63,375,000**							**0**	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah alat/bahan praktik dan peraga siswa				1 tahun	39,000,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah biaya personil peserta didik				1 tahun	6,000,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah lomba siswa				1 tahun	18,375,000	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**487.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**225,260,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**182.040.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah belanja				1 tahun	20,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah belanja				1 tahun	3,612,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah belanja				1 tahun	23,560,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah belanja				1 tahun	12,768,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah belanja				1 tahun	35,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah belanja				1 tahun	87,100,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah belanja tagihan	tahun		tahun	1 tahun	**32,620,000**						1 tahun	**0**	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah belanja				1 tahun	32,620,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Pembangunan Pendidikan	Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa	1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**10,600,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah belanja				1 tahun	10,600,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**262,240,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**262,240,000**							**0**	
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah belanja				1 tahun	30,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah belanja				1 tahun	136,740,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah belanja				1 tahun	80,500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah belanja				1 tahun	15,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.500.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**184,708,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**178.308.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.008.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						64,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,400,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**42,792,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**25,200,000**							**0**	
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						10,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**17,592,000**							**0**	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						17,592,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**214.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**185,485,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**18,075,000**							**0**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						18,075,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**140.000.000**							**0**	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3,500,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3,600,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah makan dan minum kegiatan tersedia				12 Bulan 12 Bulan	132,900,000				Pembangunan Pendidikan		12 Bulan 12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25,760,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25,260,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,650,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,650,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**28,515,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**28,515,000**							**0**	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						2,515,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						10,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						16,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**97.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**34,125,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**18.500.000**							**0**	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makan dan minum jumlah perjalanan dinas				1 tahun 1 tahun	18,500,000	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**15,625,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,000,000	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pulsa internet Jumlah tagihan listrik				1 tahun 1 tahun	14,625,000	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		1 tahun 1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,375,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**63,375,000**							**0**	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah alat/bahan praktik				1 tahun	39,000,000	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah biaya personil peserta didik				1 tahun	10,000,000	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah lomba				1 tahun	14,375,000	Kab. Belitung Timur, Simpang Renggiang, Renggiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**97.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**34,125,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**9.625.000**							**0**	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 tahun	1,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	8,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24,500,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 tahun	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 tahun	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**63,375,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**63,375,000**							**0**	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						39,000,000				Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						24,375,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**162.500.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**56,875,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**39.997.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik				1 Paket	2,000,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan/Alat Kebersihan				1 Paket	3,000,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik				1 Paket	1,400,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 Paket	10,000,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan, Minum, Perjalanan Dinas				1 Paket	23,597,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**16,878,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bahan Bacaan				1 Paket	1,800,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Tagihan Internet				1 Paket	15,078,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**105,625,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**105,625,000**							**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa				1 Paket	40,625,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik				1 Paket	65,000,000	Kab. Belitung, Sijuk, Tanjung Binga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.004.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**351,400,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**241.600.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						30,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						60.760.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.760.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						34,480,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3,400,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						67.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,200,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**49,800,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46,800,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**60,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**652,600,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**652.600.000**							**0**	
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						401,600,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						251,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**600.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**210,000,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**113.888.500**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja alat listrik				1 Tahun	8,000,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				1 Tahun	45,000,500				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah belanja penggandaan				1 Tahun	3,500,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah belanja langganan surat kabar				1 Tahun	900,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah belanja alat tulis kantor				1 Tahun	40.000.000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah belanja makanan, minuman rapat dan perjalanan dinas				1 Tahun	16,488,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**56,000,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai				1 Tahun	2.000.000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja tagihan air, tagihan listrik dan tagihan internet				1 Tahun	54,000,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**40,111,500**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan				1 Tahun	40,111,500				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**390,000,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**390.000.000**							**0**	
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Belanja Bahan Praktek Peserta Didik				1 Tahun	50,000,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah belanja makanan dan minuman Siswa Asrama				1 Tahun	240,000,000						1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Belanja Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 Tahun	100,000,000				Pembangunan Pendidikan		1 Tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**400.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**140,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**52.080.000**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.080.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**22,920,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya biaya penyelengaraan pendidikan				12 bulan	6,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba			Pembangunan Pendidikan		12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16,920,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**65,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**260,000,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**260.000.000**							**0**	
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						160,000,000							0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						100,000,000				Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**400.000.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**140,339,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**3,300,000**							**0**	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						3,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**15.064.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,044,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**18,000,000**							**0**	
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						18.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**62,625,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						27.625.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						11,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**41,350,000**							**0**	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						41,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**259,661,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**259.661.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						23,848,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						235,812,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan			0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**400.000.000**							**500.000.000**	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**400,000,000**							**500,000,000**	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**400.000.000**							**500.000.000**	
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus				1 Tahun	400,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**400.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**204,850,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**135.470.000**							**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik				1 tahun	6,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Kebersihan				1 tahun	10,000,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik				1 tahun	2,260,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan Cetakan				1 tahun	23,100,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 tahun	35,760,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum dan perjalanan dinas				1 tahun	58,350,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**14,800,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				1 tahun	1,800,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik kantor, Internet dan paket pengiriman				1 tahun	13,000,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**54,580,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan				1 tahun	35,580,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana				1 tahun	19,000,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**195,150,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**80,150,000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba siswa				1 tahun	80,150,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**115.000.000**							**0**	
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik				1 tahun	42,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				1 tahun	73,000,000	Kab. Belitung Tanjung Pandan, Pangkallalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**400.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**385,000,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**307.196.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penerangan Kantor				12 Bulan	6,000,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih				12 Bulan	9,000,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman				12 Bulan	188,000,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				12 Bulan	9,096,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				12 Bulan	4,800,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedia Bahan Praktek Siswa				12 Bulan	77,800,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi Antar SKPD				12 Bulan	12,500,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24,600,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				300 Lemba	r 3,000,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		300 Lemb	r 0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik, air, dan Internet yang Dibayarkan				12 Bulan	21,600,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**53,204,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional yang Dipelihara				12 Bulan	50,204,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki				12 Bulan	3,000,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**15,000,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**15,000,000**							**0**	
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Gedung Sekolah yang Dipelihara				12 Bulan	15,000,000	Kab. Belitung Timur, Damar, Sukamandi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**													**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survei kepuasan pelayanan internal	Persen		Persen	95 Persen	**812,815,861**						95 Persen	**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**139.415.861**							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan ATK				12 bulan	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	121,415,861		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**217,000,000**							**0**	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	217,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**426,400,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	151,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	75,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**30,000,000**							**0**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**55.000.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**45,355,000**							**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**													**0**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Kantor				1 tahun	150,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				1 tahun	300,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				1 tahun	200,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan				1 tahun	5,945,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material				1 tahun	3,500,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggara Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun	22,160,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**13,100,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia Jasa Surat Menyurat				1 tahun	500,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 tahun	12,600,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**9,645,000**							**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**9,645,000**							**0**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				1 tahun	1,050,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggara Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 tahun	8,595,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Jeriji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan		1 tahun	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**19.195.390.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	survey kepuasan pelayanan internal (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I PANGKALPINANG DAN BANGKA TENGAH))	Nilai		Nilai	95 Nilai	**393,490,000**						95 Nilai	**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	survey kepuasan pelayanan umum	angka		angka	95 angka	**155.190.000**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12,190,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK				12 Bulan	37,000,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	12 Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						106,000,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	survey kepuasan pelayanan umum	angka		angka	95 angka	**191,700,000**						95 angka	**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,000,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33,600,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42,000,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum				3 Orang	113,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	3 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**46,600,000**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40,600,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6,000,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT & APK PENDIDIKAN MENENGAH di Cabang Dinas pendidikan Wilayah I (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA PANGKALPINANG DAN KABUPATEN BANGKA TENGAH)	Nilai		Nilai	425 & 90 Nilai	**18,801,900,000**						425 & 90 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	Jumlah SMA di CABANG DINAS wilayah 1 terlayani	sekolah		sekolah	11 sekolah	**7,932,800,000**						11 sekola	**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						420,000,000	Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan				261 orang	7,512,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	261 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Jumlah SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I terlayani	sekolah		sekolah	10 sekolah	**9,419,100,000**						10 sekola	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						280,000,000				Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan				284 Orang	9,139,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	284 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Jumlah SLB di CABANG DINAS wilayah 1 terlayani	sekolah		sekolah	2 sekolah	**1,450,000,000**						2 sekolah	**0**	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan				39 Orang	1,450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	39 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						12.363.173.660							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	survey kepuasan pelayanan internal (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KABUPATEN BANGKA)	Nilai		Nilai	95 Nilai	**397,373,660**						95 Nilai	**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						[illegible]							**0**	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14,290,000				Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**195,800,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						150,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**47,983,660**							**0**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41,983,660		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT & APK PENDIDIKAN MENENGAH di Cabang Dinas pendidikan Wilayah II (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KABUPATEN BANGKA)	Nilai		Nilai	425 & 90 Nilai	**11,965,800,000**						425 & 90 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**6,557,300,000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						420,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						6,137,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	Jumlah SMK di Cabang Dinas Pendidikan wilayah II terlayani	sekolah		sekolah	5 sekolah	**4,956,100,000**						5 sekolah	**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah GTT dan PTT SMK				130 Orang	4,676,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	130 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	Jumlah SLB di Cabang Dinas Pendidikan wilayah II terlayani	sekolah		sekolah	1 sekolah	**452,400,000**						1 sekolah	**0**	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah GTT dan PTT SLB				14 Orang	452,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	14 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**15.627.444.000**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survei kepuasan pelayanan internal	Persen		Persen	95 Persen	**455,444,000**						95 Persen	**0**	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**176.920.000**							**0**	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						148,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**233,524,000**							**0**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41,184,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum				5 orang	188,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah	5 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**45,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Pendidikan	aparatur perangkat daerah		0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	RATA-RATA NILAI ASSESMENT & APK PENDIDIKAN MENENGAH di Cabang Dinas pendidikan Wilayah V (CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR)	Nilai		Nilai	425 & 90 Nilai	**15,172,000,000**						425 & 90 Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**5,741,200,000**							**0**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan				3 jenis	387,800,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	3 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan				142 orang	5,353,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	142 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**8,563,700,000**							**0**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba kesiswaan				3 jenis	260,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	3 jenis	0	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan				212 orang	8,303,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	212 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**867.100.000**							**0**	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan				23 orang	867,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Pembangunan Pendidikan	satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan serta siswa	23 orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**64.326.788.044**							**65.934.957.746**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	NILAI SAKIP PD (Dinas Kesehatan)	persen		persen	77,5 perse	n **28,039,990,587**						77,5 perse	n **28,740,990,352**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	dokumen		dokumen	4 dokume	n **175,000,000**						4 dokume	n **179,375,000**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi				2 dokume 4 dokume 1 dokume	n n 150,000,000 n	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas	2 dokume 4 dokume 1 dokume	n n 153,750,000 n	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD				3 dokume 1 dokume	n 25,000,000 n	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas	3 dokume 1 dokume	n 25,625,000 n	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	laporan		laporan	14 laporan	**21,588,155,587**						14 laporan	**22,127,859,477**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				139 orang	21,563,155,587	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	139 orang	22,102,234,477	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja				27 orang	10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27 orang	10,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran				14 laporan	15,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14 laporan	15,375,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis penyediaan bahan/material	jenis		jenis	1 jenis	**450,000,000**						1 jenis	**461,250,000**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				5 jenis 10 jenis	10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 jenis 10 jenis	10,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				7 unit 11 unit	205,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 unit 11 unit	210,125,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah penggandaan Jumlah penggandaan				2802 ekse 14000 lem 71428 lem	lar ar 50,000,000 ar	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2802 ekse 14000 lem 71428 lem	mplar ar 51,250,000 ar	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis penyediaan bahan/material Jumlah jenis penyediaan bahan/material				1 jenis 2 jenis	15,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 jenis 2 jenis	15,375,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia				200 pax 480 oax 480 pax	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200 pax 480 oax 480 pax	20,500,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dilaksanakan				5 kali 53 kali 3 kali 18 kali	150,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 kali 53 kali 3 kali 18 kali	153,750,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tagihan rekening listrik, telepon/fax, virtual meeting yang dibayarkan	bulan		bulan	12 bulan	**2,567,300,000**						12 bulan	**2,631,482,500**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim Jumlah Surat/Barang yang dikirim Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan				150 lemba 400 lemba 40 surat/b dikirim 410 surat/ dikirim 16 orang	r r rang 10,000,000 barang	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	150 lemba 400 lemba 40 surat/b dikirim 410 surat/ dikirim 16 orang	r r rang 10,250,000 barang	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, telepon/fax, virtual meeting yang dibayarkan Tagihan rekening listrik, telepon/fax yang dibayarkan				12 bulan 12 bulan	710,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan 12 bulan	727,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan				20 jenis 12 orang	1,847,300,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 jenis 12 orang	1,893,482,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit		unit	130 unit	**356,932,000**						130 unit	**365,855,300**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional yang dipeliharas Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan				2 unit 6 unit 7 unit 2 unit 7 orang	206,932,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit 6 unit 7 unit 2 unit 7 orang	212,105,300	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara				168 unit	75,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	168 unit	76,875,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit 1 unit	50,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 unit 1 unit	51,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah BBM Genset Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				100 liter 130 unit	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Upt. Balai Labkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100 liter 130 unit	25,625,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						2.902.603.000							2.975.168.075	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Jumlah honorarium PNS dan Non PNS				1 tahun 1 tahun	2,902,603,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Pendapatan dari BLUD		Pembangunan Kesehatan		1 tahun 1 tahun	2,975,168,075	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	persen		persen	88,61 pers	en **35,196,697,457**						88,61 pers	en **36,076,614,894**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah pengadaan alat kesehatan	unit		unit	13 unit	**2,506,129,957**						13 unit	**2,568,783,206**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi Jumlah pengadaan alat kesehatan				10 unit 13 unit	200,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	10 unit 13 unit	205,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis pengadaan bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)				7 jenis	2,196,129,957	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	7 jenis	2,251,033,206	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhabilitasi Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial Jumlah puskesmas yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial (DAK)				1 banguna 64 puskes 64 puskes	n s 10,000,000 s	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	1 banguna 64 puskes 64 puskes	n mas 10,250,000 mas	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembelian obat buffer stock				3 jenis	100,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	3 jenis	102,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah ibu hamil yang mengikuti pengembangan kelas ibu dalam penerapan penggunaan buku kia yang telah memutuskan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan	orang		orang	3764 oran	g **32,365,267,500**						3764 oran	g **33,174,399,188**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				6 kali	801,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	6 kali	821,025,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat ditanggulangi				15 kejadia	n 130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	15 kejadia	n 133,250,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah fasilitas kesehatan yang dikuatkan dalam Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan bayi baru lahir Jumlah ibu hamil yang mengikuti pengembangan kelas ibu dalam penerapan penggunaan buku kia yang telah memutuskan bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Bayi yg teridentifikasi penyebab kematian Jumlah peserta 8 pertemuan DAK Jumlah petugas kesehatan yang terorientasi MTBS				7 puskesm 3764 oran 224 kasus kematian 2465 oran 40 orang	s g 100,000,000 g	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	7 puskesm 3764 oran 224 kasus kematian 2465 oran 40 orang	s g 102,500,000 g	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan Jumlah balita terkonfirmasi masalah gizi yang mendapatkan makanan tambahan lokal Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan Jumlah peserta 3 pertemuan DAK Jumlah peserta pencanangan bulan timbang Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan surveilans gizi melalui e-PPGBM				13748 bali 525 balita 6529 ibu hamil 2658 oran 400 orang 64 puskes	ta 100,000,000 g s	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	13748 bali 525 balita 6529 ibu hamil 2658 oran 400 orang 64 puskes	ta 102,500,000 g mas	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah peserta Seminar Kesehatan Lingkungan Jumlah sampel makanan, sampel limbah, sampel air yang diperiksa				300 orang 510 samp	75,000,000 l	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	300 orang 510 samp	76,875,000 l	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah bahan habis pakai penyakit menular dan tidak menular Jumlah peserta workshop dan deteksi dini penyakit tidak menular Jumlah peserta workshop intensifikasi penemuan kasus dalam rangka peringatan Hari Tuberculosis Sedunia (HTBS) Jumlah peserta workshop layanan HIV-AIDS dan IMS Jumlah puskesmas yang dibina penyakit menular dan tidak menular				3050 test 400 orang 55 orang 60 orang 64 puskes	336,800,000 s	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	3050 test 400 orang 55 orang 60 orang 64 puskes	345,220,000 mas	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jemaah Haji yang mendapatkan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji				500 orang	140,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	500 orang	143,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan baik mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah				1130000 ji	wa 27,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	1130000 ji	wa 27,675,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan koordinasi program surveilans, PIE dan kekarantinaan kesehatan Jumlah puskesmas yang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 80 persen				36 orang 58 puskes	110,000,000 s	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	36 orang 58 puskes	112,750,000 mas	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota				1 dokume	n 10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	1 dokume	n 10,250,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah lembaga yang diberikan bantuan Jumlah puskesmas yang melakukan upaya perubahan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Puskesmas Ramah Anak				1 lembaga 64 puskes	1,784,867,500 s	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	1 lembaga 64 puskes	1,829,489,188 mas	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah investigasi kasus KIPI yang dilakukan				6 kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	6 kali	51,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah pasien yang dilayani di klinik kesehatan Jumlah tenaga kesehatan				1200 oran 35 orang	g 1,717,600,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	1200 oran 35 orang	g 1,760,540,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional untuk konfirmasi laboratorium				20 spesim	n 10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	20 spesim	n 10,250,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan	dokumen		dokumen	3 dokume	n **50,000,000**						3 dokume	n **51,250,000**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah laporan data dan informasi yang dihasilkan				3 dokume	n 25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Pengelola SIK Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Pengelola Program Provinsi	3 dokume	n 25,625,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang fasilitas pelayanan kesehatannya melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang disyaratkan				5 kabupat	en/kota 25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Pengelola SIK Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Pengelola Program Provinsi	5 kabupat	en/kota 25,625,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah rumah sakit yang mengimplementasikan tata kelola rumah sakit sesuai standar akreditasi	rumah sakit		rumah sakit	19 rumah sakit	**275,300,000**						19 rumah sakit	**282,182,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan				19 rumah sakit	29,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Bangka Belitung	19 rumah sakit	29,827,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah peserta pertemuan Penguatan Peran BPRS dalam Pengawasan RS Jumlah rumah sakit yang mengimplementasikan tata kelola rumah sakit sesuai standar akreditasi				56 orang 19 rumah sakit	246,200,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Bangka Belitung	56 orang 19 rumah sakit	252,355,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	persen		persen	85 persen	**950,100,000**						85 persen	**973,852,500**	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar	orang		orang	8 orang	**950,100,000**						8 orang	**973,852,500**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan tugas belajar Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui uji kompetensi				8 orang 250 orang	950,100,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Bangka Belitung	8 orang 250 orang	973,852,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	persen		persen	85 persen	**40,000,000**						85 persen	**41,000,000**	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	sarana		sarana	14 sarana	**20,000,000**						14 sarana	**20,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan				14 sarana	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	14 sarana	20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	UMKM Batra		UMKM Batra	100 UMKM Batra	**20,000,000**						100 UMKM Batra	**20,500,000**	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan				100 UMKM Batra	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	Masyarakat Bangka Belitung	100 UMKM Batra	20,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	persen		persen	87 persen	**100,000,000**						87 persen	**102,500,000**	
1	**02**	**05**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Pelaksanaan Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru	tatanan		tatanan	3 tatanan	**100,000,000**						3 tatanan	**102,500,000**	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media KIE Jumlah Pelaksanaan Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru				4 media infokes 3 tatanan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Kesehatan	Lintas sektor (OPD), organisasi masyarakat, SBH, PKK dan masyarakat umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 media infokes 3 tatanan	102,500,000	DINAS KESEHATAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**92.030.180.653**							**19.000.000.000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77,386,251,653**							**4,000,000,000**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**41,691,651,653**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				291 orang	41,691,651,653	Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				291 orang	0	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,694,600,000**							**4,000,000,000**	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pramubakti Jumlah Tenaga Keamanan/Satpam Kantor jumlah tenaga sopir				57 Orang 26 orang 15 orang	3,694,600,000	Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		57 Orang 26 orang 15 orang	4,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**32.000.000.000**							**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah operasional RS yang dibiayai dana BLUD jumlah pegawai yag dibiayai dana BLUD Jumlah sarana dan prasaran yang dibiayai dana BLUD				3 jenis 215 orang 2 unit	32,000,000,000	Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		3 jenis 215 orang 2 unit	0	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**812,271,611**							**0**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**812,271,611**							**0**	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	persentase pemeliharaan prasarana RS				80 persen	812,271,611	Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		80 persen	0	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**13,831,657,389**							**15,000,000,000**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**						**13,831,657,389**							**15,000,000,000**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Rumah Sakit				213 orang	13,831,657,389	Kab. Bangka, Merawang, Air Anyir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		213 orang	15,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**58.214.803.805**							**58.214.803.805**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**49,458,553,805**							**49,458,553,805**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**20,000,000**							**20,000,000**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, RKA dan DPA yang disusun				4 Dokume	n 10,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		4 Dokume	n 10,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP, DALEV)				4 Dokume	n 10,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		4 Dokume	n 10,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**34,775,652,796**							**34,775,652,796**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya				220 orang	34,765,652,796		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		220 orang	34,765,652,796	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dibuat				14 Lapora	n 10,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		14 Lapora	n 10,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	survei kepuasan pelayanan pegawai	persen		persen	78 persen	**200,000,000**						78 persen	**200,000,000**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan dan pendidika				30 Orang	200,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan	0	30 Orang	200,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli				10 Jenis	50,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		10 Jenis	50,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli				2 Jenis	80,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		2 Jenis	80,000,000	RUMAH SAKIT JIWA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan				250000 Ek	emplar 230,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		250000 Ek	emplar 230,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia				2570 Ekse	lar 24,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		2570 Ekse	mplar 24,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu				10 kunjun	gan 16,500,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		10 kunjun	gan 16,500,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang teresedia, jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang teresedia, jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				100 kali 40 kali	300,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		100 kali 40 kali	300,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan arsip yang tersedia				12 Lapora	n 20,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		12 Lapora	n 20,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50,000,000**							**50,000,000**	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan				10 unit	50,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		10 unit	50,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,441,980,000**							**3,441,980,000**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli, jumlah surat yang dikirim Jumlah materai yang dibeli, jumlah surat yang dikirim				48 surat 1000 lemb	10,000,000 r	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		48 surat 1000 lemb	10,000,000 r	RUMAH SAKIT JIWA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan			600,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				6 Jenis	31,980,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		6 Jenis	31,980,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kontrak yang disediakan				1 penyedi 39 orang	2,800,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 penyedi 39 orang	a 2,800,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**250,421,009**							**250,421,009**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara				9 kendara roda 4	an 194,580,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		9 kendara roda 4	an 194,580,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara Jumlah peralatan mesin yang dipelihara Jumlah peralatan mesin yang dipelihara Jumlah peralatan mesin yang dipelihara				50 Printer 50 unit AC 50 unit Komputer 50 UPS	55,841,009	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Kesehatan		50 Printer 50 unit AC 50 unit Komputer 50 UPS	55,841,009	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						10.000.000.000							10.000.000.000	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	CRR (Cost recovery rate) parsial				20 %	10,000,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	Pendapatan dari BLUD		Pembangunan Kesehatan		20 %	10,000,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase masyarakat/perorangan yang mendapat upaya kesehatan	persen		persen	85 persen	**938,250,000**						85 persen	**938,250,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan yang disediakan	%		%	85 %	**320,000,000**						85 %	**320,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang direhabilitasi				10 bangunrrawat ina	anp 80,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	10 bangunrrawat ina	anp 80,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang terkalibrasi				10 unit	80,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	10 unit	80,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Sprei, handuk, dan pakaian habis pakai yang dibeli				5 Jenis	75,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	5 Jenis	75,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan				10 jenis	85,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	10 jenis	85,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase pelayanan kesehatan terrhadap upaya kesehatan masyarakat, perrorangan dan rujjukan pada rumah sakit jiwa	%		%	80 %	**388,250,000**						80 %	**388,250,000**	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah limbah rumah sakit yang dikelola selama 1 tahun				1 tahun	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	1 tahun	80,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah sekolah mendapat penyuluhan Jumlah terapi supportif pada keluarga pasien				30 sekolah 2 kali	100,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	30 sekola 2 kali	100,000,000	RUMAH SAKIT JIWA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah kunjungan ke keluarga pasien (home visite) Jumlah kunjungan ke keluarga pasien sebelum pasien pulang (discharge planning Jumlah pasien dengan bebas pasung Jumlah sertifikasi (family gathering pasien dengan keluarga penderita skizofrenia)				20 kunjun 15 kunjun 20 ODGJ 20 sertifika	gann gan 94,850,000 t	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Kesehatan	0	20 kunjun 15 kunjun 20 ODGJ 20 sertifik	gann gan 94,850,000 t	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kunjungan pasien ke rehabilitasi psikososial				2000 kunju	ngan 113,400,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Kesehatan	0	2000 kunj	ungan 113,400,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase peningkatan layanan rumah sakit	%		%	83 %	**230,000,000**						83 %	**230,000,000**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen formularium yang disusun jumlah dokumen panduan praktik klinis Jumlah dokumen standar pelayanan minimum Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat Jumlah SOP tingkat kelulusan akreditasi				1 dokume 1 dokume 4 dokume 2 dokume 3 dokume 1 sertiikat	n n n 230,000,000 n n	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Kesehatan	0	1 dokume 1 dokume 4 dokume 2 dokume 3 dokume 1 sertiikat	n n n 230,000,000 n n	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persen		persen	90 persen	**7,818,000,000**						90 persen	**7,818,000,000**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	persentase sumber daya manusia kesehatan yang tersedia untuk UKM dan UKP provinsi	%		%	90 %	**7,450,000,000**						90 %	**7,450,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar rumah sakit kelas A				160 orang	7,450,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	160 orang	7,450,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan tingkat daerah provinsi	%		%	85 %	**368,000,000**						85 %	**368,000,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah perawat yang mendapat pelatihan BTCLS Jumlah SDM yang mendapat peningkatan kompetensi				35 orang 30 orang	358,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Parit Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Pembangunan Kesehatan	0	35 orang 30 orang	358,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah laporan audit keperawatan				1 laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pembangunan Kesehatan	0	1 laporan	10,000,000	RUMAH SAKIT JIWA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**255.960.607.257**							**0**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**34,012,255,573**							**0**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**985,184,332**							**0**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						770,000,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						215,184,332				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**27,468,695,291**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						27,446,215,573		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						22,479,718							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**70,000,000**							**0**	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**505.490.589**							**0**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						14,992,886							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23,350,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						57,999,703							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						25,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						61,500,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						322,648,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**786,258,209**							**0**	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						150,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						336,258,209							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,982,187,812**							**0**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						134,587,812							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						359,400,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2,488,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,214,439,340**							**0**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						400,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						130,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						657,440,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						26,999,340							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**117,344,000,000**							**0**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**96,050,000,000**							**0**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						38,300,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi						1,000,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai						25,500,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi						53,500,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai						15,761,700,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi						250,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**21,294,000,000**							**0**	
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						20,000,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa						344,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						400,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						250,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi						300,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**6,750,000,000**							**0**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**						**6,750,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan						6,750,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**600,000,000**							**0**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**						**600,000,000**							**0**	
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk						600,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**1,200,000,000**							**0**	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**1,200,000,000**							**0**	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan						1,200,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**92,504,351,684**							**0**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**						92.504.351.684							**0**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						965,165,685							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						1,105,465,220							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar						31,101,524,374							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan						15,000,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan						8,372,309,941							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan						24,713,306,850							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan						100,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan						7,687,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan						3,459,579,614							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**1,250,000,000**							**0**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**						**997,874,524**							**0**	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						997,874,524							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**						**252,125,476**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi						252,125,476							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**2,300,000,000**							**0**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**						**1,850,000,000**							**0**	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi						1,850,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**						**450,000,000**							**0**	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						150,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						300,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						3.400.000.000							**0**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**450,000,000**							**0**	
1	**04**	**02**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**						**450,000,000**							**0**	
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi						450,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**2,950,000,000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**						**2,950,000,000**							**0**	
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman						2,950,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**600.000.000**							**0**	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**600,000,000**							**0**	
2	**10**	**05**	1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**						**600,000,000**							**0**	
2	10	05	1.01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						600,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**750.000.000**							**0**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**750,000,000**							**0**	
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						[illegible]							**0**	
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1,320,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23,250,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						17,500,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48,357,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**476,050,000**							**0**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,650,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						86,400,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						387,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**183,523,000**							**0**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						113,523,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40,000,000							0	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**20.122.288.229**							**12.300.000.000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP perangkat daerah (SATPOL PP)	Nilai		Nilai	80 Nilai	**13,548,153,815**						80 Nilai	**12,300,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen		Dokumen	7 Dokume	n **45,000,000**						7 Dokume	n **0**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD				2 Dokume	n 25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokume	n 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan Data Sektoral)				4 Dokume	n 20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokume	n 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Survey kepuasan pelayanan keuangan	persen		persen	92 persen	**12,223,014,326**						92 persen	**12,300,000,000**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				78 Orang	12,213,866,600				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi keuangan perangkat daerah	78 Orang	12,300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen verifikasi keuangan SKPD				60 Dokum	n 5,997,926	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi keuangan perangkat daerah	60 Dokum	n 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan PD				4 Dokume	n 3,149,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dokume	n 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stel		stel	226 stel	**0**						226 stel	**0**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan				226 stel	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	226 stel	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	persen		persen	90 persen	.....						90 persen	**0**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				10 jenis	9,999,986	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi umum perangkat peraturan daerah	10 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19,434,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Administrasi umum perangkat peraturan daerah		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah cetak spanduk Jumlah cetak umbul-umbul Jumlah penggandaan				10 eksemp 12 meter 30 buah 36000 lem	ar 17,647,755 ar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi umum perangkat peraturan daerah	10 eksemp 12 meter 30 buah 36000 lem	lar 0 ar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				3960 ekse	lar 16,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi umum perangkat peraturan daerah	3960 ekse	mplar 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor Jumlah materai Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih				20 jenis 600 lemba 10 jenis	r 105,398,348	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi umum perangkat peraturan daerah	20 jenis 600 lemba 10 jenis	r 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia				480 pax	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi umum perangkat peraturan daerah	480 pax	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan Jumlah makan dan minum rapat				100 kali 30 kali 480 pax	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Administrasi umum perangkat peraturan daerah	100 kali 30 kali 480 pax	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah barang milik daerah yang diadakan	jenis		jenis	9 jenis	**40,500,000**						9 jenis	**0**	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel				2 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin				5 jenis	24,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	5 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor				2 jenis	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah jasa penunjang urusan pemda yang disediakan	jenis		jenis	7 jenis	**545,599,500**						7 jenis	**0**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah barang yang dikirim jumlah surat yang dikirim				12 barang 56 surat	3,699,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 barang 56 surat	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik, kawat/faximili/internet				36 bulan	89,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan				3 orang 9 orang	452,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 orang 9 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	70 unit	**300,999,900**						70 unit	**0**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				20 unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC Jumlah pemeliharaan barang inventaris Jumlah pemeliharaan komputer dan laptop Jumlah pemeliharaan printer				10 unit 76 pegawa 13 unit 9 unit	i 25,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	10 unit 76 pegawa 13 unit 9 unit	i 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak (Satuan Polisi Pamong Praja)	persentas	e	persentase	100 perse	tase **6,049,050,000**						100 perse	ntase **0**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	kali		kali	1548 kali	**5,764,050,000**						1548 kali	**0**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	jumlah deteksi dini pelanggaran tibumtranmas jumlah patroli jumlah pengamanan aset/piket Jumlah pengawalan				12 kali 360 kali 360 hari 30 kali	5,582,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	12 kali 360 kali 360 hari 30 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Jumlah pengamanan demo				11 kali 12 kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	11 kali 12 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan Rakor				1 kali	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	1 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta satlinmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas				50 orang satlinmas	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	50 orang satlinmas	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah latihan fisik Jumlah pembinaan pejabat fungsional satpol pp Jumlah peserta pembinaan mental dan spiritual Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya jumlah rakor pembinaan jabatan fungsional satpol pp				20 kali 4 kali 0 orang 0 orang 0 kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	20 kali 4 kali 0 orang 0 orang 0 kali	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana				5 jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	5 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang terdampak penegakan perda dan perkada yang dilayani				5 orang	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	5 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**						**285,000,000**							**0**	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah razia ASN Penindakan pelanggar perda secara non yustisial (masyarakat/badan hukum)				20 kali 250 orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	20 kali 250 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penyelidikan pelanggar perda/perkada Penyidikan pelanggar perda/perkada				12 kasus 1 kasus	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	12 kasus 1 kasus	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan	PPNS		PPNS	30 PPNS	**0**						30 PPNS	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah kapasitas PPNS dan karir PPNS yang dikembangkan				30 PPNS	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	PPNS Provinsi	30 PPNS	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota	Persen		Persen	0,39 Perse	n **525,084,414**						0,39 Perse	n **0**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	dokumen		dokumen	1 dokume	n **525,084,414**						1 dokume	n **0**	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran				1 Dokume	n 0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	dokumen peta daerah rawan kebakaran	1 Dokume	n 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah relawan kebakaran yang mampu menanggulangi kebakaran				10 orang	475,084,414	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	dokumen peta daerah rawan kebakaran	10 orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran				10 jenis	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	dokumen peta daerah rawan kebakaran	10 jenis	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen standarisasi sarana dan prasarana kebakaran dan alat pelindung diri				1 Dokume	n 0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	dokumen peta daerah rawan kebakaran	1 Dokume	n 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						12.262.514.877							16.884.746.400	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8,412,664,877**							**9,123,376,400**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**96,842,811**							**101,000,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja PD				3 Dokume	n 51,821,811		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 Dokume	n 55,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45,021,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			46,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,899,421,000**							**6,046,532,000**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan				43 orang	5,864,421,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		43 orang	6,011,032,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						35,000,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			35,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15,000,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			29,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			24,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20,000,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			23,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,200,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			7,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Dan Minum Rapat Yang Tersedia				1 Tahun	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		1 Tahun	62,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**797,095,000**							**822,100,000**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						244,695,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			244,700,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			125,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						263,900,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			263,900,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						188,500,000				Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			188,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,137,106,066**							**1,397,744,400**	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						48,564,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			48,600,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						859,144,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			859,144,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			160,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						154,397,516		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			330,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	0		0	0 0	**3,849,850,000**						0 0	**7,761,370,000**	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	dokumen		dokumen	7 dokume	n **82,000,000**						7 dokume	n **85,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra/Renja PD				8 dokume	n 82,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	PD	8 dokume	n 85,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**						**3,267,850,000**							**6,727,370,000**	
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LKPJ,LAKIP,LPPD) dan Dokumen evaluasi PD				4 Dokume	n 350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		4 Dokume	n 377,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah				1 Kegiatan	1,509,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		1 Kegiatan	2,866,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			180,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana						73,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			73,870,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			138,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi						300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			3,092,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peserta pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana				100 orang	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		100 orang	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**500,000,000**							**949,000,000**	
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah TRC				70 Orang	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		70 Orang	394,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5 Jenis	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		5 Jenis	555,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**28.664.409.025**							**28.132.505.906**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**24,386,335,810**							**23,480,099,823**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**168,247,035**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				4 dokume	n 30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 dokume	n 123,311,642	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				3 dokume	n 20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 dokume	n 44,935,393	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20,891,844,226**							**20,962,670,879**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan				142 pegaw	ai 20,891,844,226		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		142 pegaw	ai 20,962,670,879	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**461.508.549**							**484.188.094**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik				10 Jenis	20,000,000				Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 Jenis	20,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				5 Jenis	18,167,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 Jenis	18,167,500	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				90 eksemp 15000 lem	ar 7,868,049 ar		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		90 eksemp 15000 lem	lar 7,878,049 ar	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				37 Jenis	106,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		37 Jenis	129,169,545	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu				459 Pax	22,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		459 Pax	22,950,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah				33 kali 22 kali	286,023,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		33 kali 22 kali	286,023,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,757,303,035**							**1,539,313,815**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				890 Lemba 2500 Pcs	r 17,089,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		890 Lemb 2500 Pcs	r 17,089,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	228,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12 Bulan	150,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan Jumlah tenaga pramu bakti yang dipekerjakan Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan				5 Orang 6 Orang 51 Orang 3 Orang	2,512,214,035		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 Orang 6 Orang 51 Orang 3 Orang	1,372,224,815	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**225,680,000**							**325,680,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara				1 Unit	35,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Unit	35,450,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil operasional yang dipelihara				6 Unit	190,230,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6 Unit	190,230,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di pelihara				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Unit	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				20 Jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 Jenis	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**1,542,453,100**							**1,560,815,600**	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**						**1,542,453,100**							**1,560,815,600**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang di tingkatkan kemampuannya				416 PSM	1,226,458,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		416 PSM	1,244,820,600	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang di tingkatkan kemampuannya				47 TKSK	315,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		47 TKSK	315,995,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**20,000,000**							**20,000,000**	
1	**06**	**03**	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**						**20,000,000**							**20,000,000**	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang difasilitasi				2 orang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2 orang	20,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**													1.173.709.000	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**						**195,010,000**							**235,010,000**	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah disabilitas dalam panti non pemerintah yang mendapatkan sandang				10 orang	34,193,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 orang	34,193,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial disabilitas di dalam panti non pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas				30 orang	122,431,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30 orang	162,431,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga dalam panti non pemerintah				5 orang	19,193,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 orang	19,193,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga dalam panti non pemerintah				5 orang	19,193,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 orang	19,193,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**						**327,000,000**							**432,000,000**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah Pengasuh anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat bimtek pembekalan standar nasional pengasuhan anak				150 anak	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		150 anak	200,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam Panti Non Pemerintah				90 orang	92,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		90 orang	192,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah klien anak di dalam panti non pemerintah yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga				10 orang	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 orang	40,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**						**130,600,000**							**271,699,000**	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti non pemerintah yang mendapatkan sandang				11 orang	27,488,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		11 orang	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan alat bantu				5 orang	17,488,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 orang	17,488,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti				10 orang	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 orang	10,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Jumlah tenaga profesional pekerja sosial yang memberi bimbingan sosial lanjut usia di dalam panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas				10 orang 43 orang	61,431,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 orang 43 orang	134,211,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga dalam panti non pemerintah				5 orang	19,193,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 orang	60,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**	1.04		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**						**65,000,000**							**65,000,000**	
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal				5 orang	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 orang	35,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti				1 kegiatan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 kegiatan	30,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**						**167,576,483**							**170,000,000**	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke daerah asal				20 orang	137,576,483		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 orang	140,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				1 kegiatan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 kegiatan	30,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**973,233,632**							**656,607,500**	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**						**43,392,500**							**50,000,000**	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang di angkat (adopsi) dan memperoleh perlindungan sosial				3 Orang	20,392,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 Orang	25,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah calon orang tua angkat (COTA) yang mendapatkan perizinan				3 Orang	23,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 Orang	25,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**						**929,841,132**							**606,607,500**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan				400 Orang	73,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		400 Orang	73,480,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola				7 Kab/Kota	43,392,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		7 Kab/Kot a	400,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir Miskin yang di Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				50 KK	812,968,632		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		50 KK	133,127,500	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**757,200,000**							**787,248,000**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**						**757,200,000**							**787,248,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang mendapat bantuan permakanan Jumlah petugas posko dan bencana yang mengelola posko dan gudang logistik bencana				50 Orang 208 Orang	613,060,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		50 Orang 208 Orang	643,108,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bahan Bangunan Rumah kepada korban kebakaran yang tersedia				1 Tahun	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	50,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana alam yang mendapat BBR Jumlah petugas yang melaksanakan assement BBR Jumlah petugas yang melaksanakan assement BBR				6 Orang 7 Orang	44,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6 Orang 7 Orang	44,450,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah pemulangan keluarga rentan tempat asalnya luar dan dalam daerah yang tersedia				10 Jiwa	49,690,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 Jiwa	49,690,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**100,000,000**							**454,025,983**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**						**100,000,000**							**454,025,983**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Prosentase TMP yang dikelola				1 TMP	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 TMP	454,025,983	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						2.080.000.000							2.900.000.000	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**						**175,000,000**							**250,000,000**	
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**						**175,000,000**							**250,000,000**	
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Identifikasi Pru Kades Lintas Kabupaten				6 Kab	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6 Kab	150,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Kerjasama dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Kerja Sama	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2 Kerja Sama	100,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**1,905,000,000**							**2,650,000,000**	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**1,905,000,000**							**2,650,000,000**	
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi perkembangannya Jumlah LAD yang mendapat pelatihan Jumlah LKD yang mendapat Pembinaan				12 Desa/K 10 LAD 50 LKD	el 405,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12 Desa/K 10 LAD 50 LKD	el 650,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			450,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna				3 Alat	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 Alat	350,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pkk Provinsi, Kab, Kecamatan dan Desa yang dibina				7 Kab/Kota	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		7 Kab/Kot	a 1,200,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						1.364.797.546							1.395.286.021	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**638,053,979**							**647,463,398**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**12,668,581**							**16,516,000**	
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di PSBL				10 orang	7,668,581		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 orang	11,193,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di PSBL				10 orang	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 orang	5,323,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan di PSBL				17 jenis	7,771,124		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		17 jenis	7,771,124	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan di PSBL				17 jenis	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		17 jenis	6,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				17 jenis	16,659,837		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		17 jenis	16,659,837	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri				12 bulan	13,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	13,210,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**547,712,000**							**547,712,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan dalam panti pemerintah Jumlah surat/berkas yang dikirim				225 lembar 437 berkas	r 7,494,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		225 lembar 437 berkas	r 7,494,000 s	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia di PSBL				12 bulan	20,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	20,400,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia di PSBL				5 unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 unit	4,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pramubakti yang dipekerjakan di PSBL Jumlah jasa tenaga juru masak yang dipekerjakan di PSBL Jumlah jasa tenaga keamanan yang dipekerjakan di PSBL Jumlah jasa tenaga kebersihan yang dipekerjakan di PSBL				4 orang 2 orang 4 orang 2 orang	515,818,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 orang 2 orang 4 orang 2 orang	515,818,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**34,032,437**							**39,594,437**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diservis di PSBL				2 unit	34,032,437		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 unit	39,594,437	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**														
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**						**726,743,567**							**747,742,623**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah kebutuhan permakanan yang disediakan dalam Panti Pemerintah				20 orang	232,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 orang	232,450,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan sandang yang disediakan dalam Panti Pemerintah				20 orang	39,998,439		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 orang	39,998,439	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan dalam Panti Pemerintah				20 orang	29,995,128		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 orang	29,995,128	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial yang disediakan dalam Panti Pemerintah				20 orang	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 orang	105,999,056	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Jasa Tenaga Perawat yang disediakan panti pemerintah Jumlah Jasa Tenaga Teknis Lainnya yang disediakan dalam panti pemerintah				4 orang 5 orang	339,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4 oran g 5 oran g	339,300,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.000.790.099**							**1.051.649.599**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**850,973,255**							**854,932,755**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**255.519.005**							**255.519.005**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,000,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			2,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4,000,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			4,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16,499,934		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			16,499,934	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						182,799,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			182,799,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			1,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						18,879,071		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			18,879,071	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,341,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			25,341,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**563,098,000**							**567,057,500**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,698,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			1,698,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			37,559,500	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						527,800,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			527,800,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**32,356,250**							**32,356,250**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32,356,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					32,356,250	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						[illegible]							[illegible]	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**						**63,946,277**							**110,846,277**	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang						8,636,992				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			8,636,992	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						4,109,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			4,109,980	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						37,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			69,600,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari						8,499,305		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			8,499,305	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			20,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**						**85,870,567**							**85,870,567**	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang						12,548,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			12,548,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						24,972,567		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			24,972,567	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						40,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			40,350,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			5,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan						3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			3,000,000	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**592.939.628**							**592.939.628**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi	Persen		Persen	4 Persen	**592,939,628**						4 Persen	**592,939,628**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi	Paket		Paket	20 Paket	**592,939,628**						20 Paket	**592,939,628**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pedidikan dan pelatihan bagi pencari kerjaberdasarkan klaster Kompetensi				20 Paket	521,064,826		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan Kerja	20 Paket	521,064,826	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kerjasama dengan sektor swasta				5 kerjasam	71,874,802		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan Kerja	5 kerjasam	71,874,802	DINAS TENAGA KERJA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**18.400.546.259**							**18.373.633.810**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17,642,241,326**							**17,615,328,877**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**79,722,877**							**79,722,877**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				5 Dokume	n 48,179,877		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		5 Dokume	n 48,179,877	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah				3 Dokume	n 31,543,000				Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 Dokume	n 31,543,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**14,201,696,000**							**14,201,696,000**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN				103 ASN	14,201,696,000				Peningkatan Ekonomi Masyarakat		103 ASN	14,201,696,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan				1 Paket	22,593,498						1 Paket	0	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	77,231,332				Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				1 Tahun	20,087,619		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah brang cetakan dan pengandaan				1 Paket	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Paket	20,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				1 Paket	7,000,000				Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Paket	7,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas kunjungan tamu				1 Tahun	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	6,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				1 Paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Paket	150,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,892,800,000**							**2,985,800,000**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah surat/barang yang dikirm				1 Paket 1 Tahun	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Paket 1 Tahun	5,000,000	DINAS TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik				1 Tahun	475,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	568,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				64 orang	2,412,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		64 orang	2,412,800,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**165,110,000**							**165,110,000**	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit) (mobil) jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit) Roda 2				4 unit 3 unit	4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4 unit 3 unit	4,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				1 Tahun	161,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	161,110,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**50,000,000**							**50,000,000**	
2	**07**	**03**	1.04		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**						**50,000,000**							**50,000,000**	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Produktif				15 perusa	haan 50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat		15 perusa	haan 50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**193,328,375**							**193,328,375**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**82,079,514**							**82,079,514**	
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Angka Pencaker secara online				30 Orang	37,464,514		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30 Orang	37,464,514	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kompetensi Pencari Kerja				70 Orang	44,615,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat		70 Orang	44,615,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**						**50,000,000**							**50,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Angka Pencaker secara online				2000 oran	g 50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2000 oran	g 50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**04**	1.05		**Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**61,248,861**							**61,248,861**	
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	RPTKA Perusahaan				25 Perusa	haan 61,248,861		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25 Perusa	haan 61,248,861	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**328,517,268**							**328,517,268**	
2	**07**	**05**	1.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**						**74,440,980**							**74,440,980**	
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				12 perusa	haan 74,440,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12 perusa	haan 74,440,980	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penyelenggaraan Pedataan dan Iformasi Sarana Hubungan Hindusrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusaha	an	Perusahaan	12 Perusa	haan **134,076,288**						12 Perusa	haan **134,076,288**	
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Jumlah rekomen terkait permasalahanketenaga di Provinsi Kepualauan BangkaBelitung	dasi kerjaan			8 Laporan	134,076,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan di Provisi kepulauan Bangka belitung	8 Laporan	134,076,288	DINAS TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**07**	**05**	1.03		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**						**120,000,000**							**120,000,000**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum Provinsi				1 rekomen	dasi 120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 rekomen	dasi 120,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**186,459,290**							**186,459,290**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**						**186,459,290**							**186,459,290**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase kepatuhan norma kerja di perusahaan				19 persen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		19 persen	100,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang inkrah di pengadilan				80 Persen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		80 Persen	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perentase pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di UMKM				85 persen	36,459,290		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		85 persen	36,459,290	DINAS TENAGA KERJA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**50.000.000**							**50.000.000**	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**50,000,000**							**50,000,000**	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**						**50,000,000**							**50,000,000**	
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	terlaksananya Peningkatan SDM di kawasantransmigrasi				30 orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30 orang	50,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**9.385.122.579**							**9.688.300.376**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD	Nilai		Nilai	74 (B) Nilai	**8,597,032,579**						74 (B) Nilai	**8,753,143,026**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	11 Dokum	n **57,394,590**						11 Dokum	n **75,179,590**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja PD Jumlah RKA/DPA				2 Dokume 2 Dokume	n 14,215,000 n	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Bappeda Provinsi, Bakuda Prov, Inspektorat Prov, Biro Organisasi SETDA Prov, Biro Pemerintahan SETDA Prov, OPD PPPA, DUKCAPIl dan PPKB di Kab/Kota	2 Dokume 2 Dokume	n 22,000,000 n	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dalev PD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD				4 Laporan 3 Laporan	43,179,590	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Bappeda Provinsi, Bakuda Prov, Inspektorat Prov, Biro Organisasi SETDA Prov, Biro Pemerintahan SETDA Prov, OPD PPPA, DUKCAPIl dan PPKB di Kab/Kota	4 Laporan 3 Laporan	53,179,590	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Survei kepuasan pelayan adm keuangan	%		%	100 %	**7,223,602,885**						100 %	**7,223,602,885**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani				45 orang	7,223,602,885	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial	ASN DP3ACSKB	45 orang	7,223,602,885	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survei Kepuasaan Pelayanan Adm Umum	%		%	100 %	**402,810,104**						100 %	**486,568,051**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia				10 Jenis	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	10 Jenis	22,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Jumlah Penggandaan				110 eksem 36000 lem	lar 31,800,000 ar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	110 eksem 36000 lem	lar 32,118,000 ar	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				7 eksempl	ar 12,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	7 eksempl	ar 13,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat kebersihan jumlah ATK Jumlah Materai				20 Jenis 79 Jenis 800 Lemba	108,965,000 r	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	20 Jenis 79 Jenis 800 Lemb	150,177,500 r	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum Tamu				1 Tahun	30,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	33,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Jumlah Perjalanan dinas				800 pack 1 Tahun	200,045,104	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	800 pack 1 Tahun	236,072,551	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Survei Kepuasaan Pelayanan mum	%		%	100 %	**90,980,000**							100 %	**105,400,000**	
2	08	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 Jenis	90,980,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	7 Jenis	105,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survei Kepuasaan Pelayanan mum	%		%	100 %	**658,100,000**							100 %	**674,300,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat				1 Tahun	2,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	2,200,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Kawat/Faksimili/Interne Berlangganan Tagihan Listrik	t/TV			1 Tahun 1 Tahun	156,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun 1 Tahun	171,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan kantor				1 Tahun	10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	11,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	490,100,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	490,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survei Kepuasaan Pelayanan mum	%		%	100 %	**164,145,000**						100 %	**188,092,500**	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah kendaraan roda 4				7 unit 4 unit	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	7 unit 4 unit	24,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	93,175,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	102,492,500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	asi			1 Tahun	36,500,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	44,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	asi			1 Tahun	14,470,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	ASN dan PHL di DP3ACSKB	1 Tahun	17,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	persen		persen	91 persen	**72,930,000**						91 persen	**105,450,000**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP	orang		orang	90 orang	**49,190,000**						90 orang	**65,450,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE PUG dan PKHP				90 orang	49,190,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial Pembangunan Sosial	OPD Provinsi dan Kab/kota	90 orang	65,450,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**	Jumlah kab/kota yang dibina	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**23,740,000**						7 Kab/kot	**40,000,000**	
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembentukan Fasilitator Pendidikan Politik untuk perempuan				75 orang	23,740,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Tokoh Perempuan	75 orang	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan	persen		persen	0,040 pers	en **82,147,000**						0,040 pers	en **92,428,350**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peserta Advokasi	Orang		Orang	70 Orang	**82,147,000**						70 Orang	**92,428,350**	
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi				70 Orang	82,147,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial	Dinas PPPA Kab/Kota, UPTD PPA Kab/Kota, instansi, lembaga serta kelompok masyarakat	70 Orang	92,428,350	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase IR yang di bina	persen		persen	0,74 perse	n **196,190,000**						0,74 perse	n **245,000,000**	
2	**08**	**04**	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah Kab/Kota yang di bina	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**172,450,000**						7 Kab/kot	**205,000,000**	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sekolah Perempuan				200 orang	75,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Peserta Sekolah Perempuan	200 orang	90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Kegiatan Perempuan Indonesia dan Jumlah Peserta Pembinaan IR				250 orang	97,450,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Peserta Sekolah Perempuan	250 orang	115,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah Pembinaan	kali		kali	1 kali	**23,740,000**							1 kali	**40,000,000**	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Kewenangan Provinsi				40 orang	23,740,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Anggota PUSPA	40 orang	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Capaian OPD yang Menyediakan Data Pilah Gender dan Anak	persen		persen	90,62 persen	**25,000,000**						90,62 persen	**40,000,000**	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah profil data gender dan anak yang tersedia	profil		profil	1 profil	**25,000,000**						1 profil	**40,000,000**	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Profil dan data gender dan anak yang tersedia				1 profil	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	OPD Provinsi dan Kab/kota	1 profil	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi Anak	persen		persen	0,189 persen	**320,436,000**						0,189 persen	**355,000,000**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	Jumlah Kab/kota yang dilibatkan dalam Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kab/Kota		Kab/Kota	7 Kab/Kota	**121,966,000**						7 Kab/Kota	**135,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang di monev				7 Kab/Kot	121,966,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				OPD Provinsi dan Kab/Kota, LSM, Dunia Usaha	7 Kab/Kot	a 135,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	Jumlah kab/kota yang dibina	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**198,470,000**						7 Kab/kot	**220,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Forum Anak dan HAN				595 Pesert	a 198,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial	Forum Anak Provinsi dan Kab/Kota	595 Peser	a 220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase SDM Perlindungan Anak	persen		persen	0,30 perse	n **91,387,000**						0,30 perse	n **97,279,000**	
2	**08**	**07**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	laporan		laporan	1 laporan	**91,387,000**						1 laporan	**97,279,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta TOT aktivis PATBM				70 Orang	91,387,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial	Aktivis PATBM dan ormas peduli anak	70 Orang	97,279,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**														
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP, KIA)	persen		persen	79,66 pers	en **447,500,000**						79,66 pers	en **475,000,000**	
2	**12**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK, KIA)	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**447,500,000**						7 Kab/kot	**475,000,000**	
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah ADM Jumlah Peserta Rapat				1 unit 42 Peserta	447,500,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Dukcapil Kab/Kota	1 unit 42 Peserta	475,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Masyarakat yang Memiliki Data Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	persen		persen	75,83 pers	en **0**						75,83 pers	en **110,000,000**	
2	**12**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target akta pencatatan sipil (akta lahit, akta kematian, akta perkawinan)	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**0**						7 Kab/kot	**110,000,000**	
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Rapat				42 Peserta	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial	Dukcapil Kab/Kota	42 Peserta	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Penyediaan Penyajian Data Base Kependudukan Tingkat Provinsi yang Akurat	persen		persen	100 perse	**47,480,000**						100 perse	n **55,000,000**	
2	**12**	**05**	1.01		**Penyediaan Profil Kependudukan**	Jumlah jenis profil	jenis		jenis	2 jenis	**47.480.000**						2 jenis	**55.000.000**	
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil				100 buku	47,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	OPD Prov, dan Kab/Kota	100 buku	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**493.085.000**							**575.000.000**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Kab/Kota yang memiliki Dokumen Pengendalian Penduduk	persen		persen	100 perse	**43,740,000**						100 perse	n **60,000,000**	
2	**14**	**02**	1.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	jumlah dokumen laporan pengendalian penduduk	Dokumen		Dokumen	1 Dokume	n **43,740,000**						1 Dokume	n **60,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				50 buku	43,740,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	BKKBN Perwakilan dan OPD PPKB di Kab/Kota	50 buku	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Kab/Kota yang dibina	persen		persen	100 perse	**102,480,000**						100 perse	n **135,000,000**	
2	**14**	**03**	1.01		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan advokasi dan KIE sesuai kearifan budaya lokal	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**58,740,000**						7 Kab/kot	**75,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah kategori Perlombaan hari Keluarga				1 kategori	58,740,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	BKKBN dan OPD PPKB di Kab/Kota	1 kategori	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**14**	**03**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	jml kab/kota yang melaksanakan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesertaan ber-KB	Kab/Kota		Kab/Kota	7 Kab/Kota	**43,740,000**						7 Kab/Kot	a **60,000,000**	
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah peserta kegiatan penguatan jejaring kemitraan dalam program KKBPK				300 orang	43,740,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				BKKBN dan Dinas PPKB Kab/Kota	300 orang	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Kampung KB	persen		persen	85 persen	**346,865,000**						85 persen	**380,000,000**	
2	**14**	**04**	1.01		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	jumlah kab/kota yang melaksanakan pengelolaan program pembangunan keluarga	Kab/kota		Kab/kota	7 Kab/kota	**273,125,000**						7 Kab/kot	**290,000,000**	
2	14	04	1.01	08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah Peserta				25 peserta	273,125,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	PIK Remaja di Kampung KB	25 peserta	290,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**14**	**04**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	Kampung KB		Kampung KB	20 Kampu KB	ng **73,740,000**						20 Kampu KB	ng **90,000,000**	
2	14	04	1.02	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Peserta				100 pesert	a 73,740,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	OPD Kab/Kota	100 peser	a 90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**														
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan	persen		persen	0,040 pers	en **122,860,000**						0,040 pers	en **137,500,000**	
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	JUmlah jenis layanan	jenis		jenis	2 jenis	**122,860,000**						2 jenis	**137,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan				1 Laporan	122,860,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sosial	Dinas, lembaga dan instansi terkait penanganan kasus dan Kelompok masyarakat	1 Laporan	137,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase SDM Perlindungan Anak	persen		persen	0,30 perse	n **172,960,000**							0,30 perse	n **192,500,000**	
2	**08**	**07**	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	JUmlah jenis layanan	jenis		jenis	2 jenis	**172,960,000**							2 jenis	**192,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi				1 Laporan	172,960,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Sosial	Dinas, lembaga dan instansi terkait penanganan kasus dan Kelompok masyarakat	1 Laporan	192,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						35.027.238.960							1.289.415.000	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD (Pertanian)	%		%	80,39 %	**34,222,108,353**						80,39 %	**241,915,000**	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen		Dokumen	14 Dokum	n **300,000,000**						14 Dokum	n **150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD Jumlah RKA/DPA yang tersusun				1 Dokume 4 Dokume 4 Dokume	n n 150,000,000 n	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	1 Dokume 4 Dokume 4 Dokume	n n 150,000,000 n	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok evaluasi PD (LAKIP, LPPD, LKPJ ATA dan Dokumen/Buku Statistik) Jumlah dok Evalusi kinerja PD (DALEV)				4 Dokume 1 Dokume	n 150,000,000 n	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	4 Dokume 1 Dokume	n 0 n	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	%		%	80 %	**26,176,304,353**						80 %	**16,915,000**	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				201 orang	26,159,389,353	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	201 orang	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran				14 dokum	n 15,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	14 dokum	n 15,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				1 Dokume	n 1,915,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	1 Dokume	n 1,915,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	%		%	80 %	**50,000,000**						80 %	**0**	
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal				135 orang	30,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	135 orang	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan				135 orang	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	135 orang	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Umum	%		%	80 %	1.046.000.000						80 %	[illegible]	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				15 Jenis	80,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	15 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				20 Jenis	75,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	20 Jenis	75,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				33 Jenis	80,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	33 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah barang penggandaan Jumlah barang penjilidan				300 Eksem 5713 Lemb 80 Buku	lar ar 31,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	300 Eksem 5713 Lem 80 Buku	lar ar 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				132 eksem	lar 10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	132 eksem	lar 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				50 Jenis	90,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	50 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat Jumlah makan dan minum tamu				1500 pax 1260 pax	80,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	1500 pax 1260 pax	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah				143 kali 83 kali	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	143 kali 83 kali	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	%		%	80 %	**0**						80 %	**0**	
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebeleur				4 Unit	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	4 Unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan				10 Jenis	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	10 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	80 %	**5,842,900,000**						80 %	**0**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				1000 lemb	r 10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	1000 lemb	r 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	235,900,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PHL				147 Orang	5,597,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	147 Orang	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	%		%	80 %	**806,904,000**						80 %	**0**	
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan Jumlah mobil operasional yang dipelihara				28300 Lite 35 Unit	r 506,904,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	28300 Lite 35 Unit	r 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				34 unit	100,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	34 unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				1 gedung	200,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	1 gedung	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	%		%	18 %	**135,000,000**						18 %	**190,000,000**	
2	**09**	**02**	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**	Jumlah ketersediaan pangan utama	produk		produk	1 produk	**135,000,000**						1 produk	**190,000,000**	
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan				1 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	Masyarakat	1 Unit	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Panga				1 peta	35,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	Masyarakat	1 peta	40,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi- Padian b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan 3) Klompok pangan buah dan sayuran	Point		Point	a) 24,3 b) 10 c) 27 Point	**570,130,607**						a) 24,3 b) 10 c) 27 Point	**707,500,000**	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Coefisien varian harga pangan (a. pokok/beras b. Hortikultura/cabe merah c. hewani/ayam)	%		%	5 %	**165,000,000**						5 %	**200,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Dokume	n 40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Dokume	n 45,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi				5 Gapokta	n 100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	0	5 Gapokta	n 125,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen stok dan pasokan				3 Dokume	n 25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	0	3 Dokume	n 30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**03**	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**	Persentase tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi	%		%	100 %	**280,130,607**						100 %	**327,500,000**	
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi				4 Dokume	n 25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	0	4 Dokume	n 27,500,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi				50 Ton	255,130,607		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	0	50 Ton	300,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**	Persentase meningkatnya pemahaman masyaraka akan pola pangan yang B2SAt	%		%	100 %	**125,000,000**						100 %	**180,000,000**	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah orang yang mengikuti event				150 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Kesehatan	0	150 Orang	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Konsumsi Perkapita pertahun				1 Dokume	n 25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Kesehatan	0	1 Dokume	n 30,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	%		%	70 %	**100,000,000**						70 %	**150,000,000**	
2	**09**	**04**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi	dokumen		dokumen	3 dokume	n **100,000,000**						3 dokume	n **150,000,000**	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta FSVA, Dokumen SKPG dan Akses Pangan				3 Dokume	n 100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Kesehatan	0	3 Dokume	n 150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						13.741.590.655								
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, dan alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	%		%	100 %	**12,503,684,000**						100 %	**0**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Dokumen pengawasan dan peredaran pupuk, pestisida, alsitan dan sarana pendukung peningkatan produksi	Dokumen		Dokumen	1 Dokume	n **50,000,000**						1 Dokume	n **0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah laporan/dokumen pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian				1 laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	Kelompok tani	1 laporan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah luasan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura yang tersedia	Ha		Ha	120 Ha	**10,353,684,000**						120 Ha	**0**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah luasan Benih/Bibit hortikultura yang tersedia				65 Ha	1,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	65 Ha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah luasan benih/bibit tanaman pangan yang tersedia (padi, jagung)				70 Ha	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	70 Ha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah luasan bantuan bibit dan/atau saprodi tanaman tahunan dan penyegar (sawit, kopi)				185 Ha	9,303,684,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	185 Ha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**02**	1.07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	Jumlah bantuan bibit ternak	ekor		ekor	80 ekor	**2,100,000,000**						80 ekor	**0**	
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	jumlah pengadaan bibit ternak				120 ekor	2,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	120 ekor	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Rasio Ketersediaan Prasarana Prapanen Pertanian (%)	%		%	15 %	**400,000,000**						15 %	**0**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**	Ratio ketersediaan prasarana pertanian pra panen	%		%	15 %	**400,000,000**						15 %	**0**	
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah luasan jalan usaha tani				5.6 km	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas		Kelompok tani	5.6 km	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan irigasi tersier atau jaringan tingkat usaha tani yang terbangun				760 m3	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	Kelompok tani	760 m3	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	Persentas	e	Persentase	100 Persentase	**275,000,000**						100 Perse	ntase **0**	
3	**27**	**04**	1.0 1		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Terkendalinya keamanan 7 Kab/kota di wilayah Babel terhadap penyakit-penyakit zoonosis	Laporan		Laporan	7 Laporan	**150,000,000**						7 Laporan	**0**	
3	27	04	1.0 1	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pengendalian risiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis				2 zoonosis	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	2 zoonosis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**04**	1.0 3		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	Tersertifikasinya unit usaha produk peternakan di bangka belitung	NKV		NKV	1 NKV	**125,000,000**						1 NKV	**0**	
3	27	04	1.0 3	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit yang dipenuhi				1 unit usaha	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	1 unit usaha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	dok		dok	1 dok	**92,906,655**						1 dok	**0**	
3	**27**	**05**	1.0 1		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Dokumen pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**92,906,655**						4 Dokume	n **0**	
3	27	05	1.0 1	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Polis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)				3500 Ha	52,856,427		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	3500 Ha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	05	1.0 1	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)				2010 Ekor	40,050,228		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	2010 Ekor	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%		%	80 %	**20,000,000**						80 %	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**06**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Usaha pertanian yang diterbitkan izin usaha	dokumen		dokumen	1 dokumen	**20,000,000**						1 dokumen	0	
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian				1 dokumen	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	Kelompok tani	1 dokumen	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%		%	80 %	**450,000,000**						80 %	**450,000,000**	
3	**27**	**07**	1.01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah penyuluh yang dilatih	orang		orang	204 orang	**150,000,000**						204 orang	**0**	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang dilatih				204 orang	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	Penyuluh pertanian	204 orang	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang dibina	bpp		bpp	32 bpp	**300,000,000**						32 bpp	**450,000,000**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang menerima informasi teknis dan inovasi pertanian				32 bpp	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	32 bpp	250,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pembinaan penyuluhan pertanian				32 bpp	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	32 bpp	200,000,000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**158.662.602**							**0**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal	persen		persen	85 persen	**158,662,602**						85 persen	**0**	
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Umum	%		%	80 %	**61.162.602**						80 %	**0**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				11 Jenis	4,998,986		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor				11 Jenis	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				33 Jenis	7,705,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	33 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tahun penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	4,524,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	1 tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material				11 Jenis	14,785,122		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tahun penyediaan fasilitasi tamu				1 tahun	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi				12 bulan	23,148,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**91,500,000**							**0**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				150 lembar	1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	150 lembar	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,000,000**							**0**	
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara				4 unit	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**75.000.000**							**0**	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	dok		dok	1 dok	**75,000,000**						1 dok	**0**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	Dokumen pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**75,000,000**						4 Dokumen	0	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	rasio aeal pengendalian OPT terhadap luas pertanaman				3 %	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	3 %	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**296.392.171**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal	persen		persen	85 persen	**296,392,171**						85 persen	**0**	
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Umum	%		%	80 %	**91,500,000**						80 %	**0**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				150 Lembar	1,500,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	150 Lembar	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	90,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 Bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	80 %	**204,892,171**						80 %	**0**	
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan alat berat pertanian yang terpelihara				4 unit	199,995,800	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				2 unit	4,896,371	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**574.062.262**							**0**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal	persen		persen	85 persen	**61,162,602**						85 persen	**0**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Umum	%		%	80 %	**61.162.602**						80 %	**0**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,998,986				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN		0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor				12 Jenis	3,000,000					ASN	12 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				11 Jenis	7,705,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	4,524,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material				37 Jenis	14,785,122		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	37 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu				1 Tahun	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	1 Tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah				1 Tahun	23,148,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	1 Tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)	%		%	50,00 %	**512,899,660**						50,00 %	**0**	
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**						**512,899,660**							**0**	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan pakan ternak (sapi dan ayam)				1 paket	512,899,660		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	1 paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**128.662.602**							**0**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal	persen		persen	85 persen	**128,662,602**						85 persen	**0**	
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**61.162.602**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				11 Jenis	4,998,986		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor				20 Jenis	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	20 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				4 unit	7,705,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	4,524,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang dibeli				11 Jenis	14,785,122		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tahun penyediaan fasilitasi tamu				1 tahun	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23,148,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN		0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	80 %	**61,500,000**						80 %	**0**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				150 lemba	r 1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	150 lemba	r 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,000,000**							**0**	
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara				4 unit	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	4 unit	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**100.000.000**							**0**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat	Persentas	e	Persentase	5 Persentase	**100,000,000**						5 Persentase	0	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	Jumlah sertifikat benih/bibit pertanian yang dikeluarkan	bibit		bibit	3075000 bibit	**100,000,000**						3075000 bibit	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih/bibit perkebunan yang dikeluarkan				47 sertifikat	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	47 sertifikat	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah/Luasan benih holtikultura yang diawasi mutu dan peredarannya				750 Ha	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	750 Ha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah/Luasan benih/bibit tanaman pangan yang diawasi mutu dan peredarannya				175 Ha	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	175 Ha	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah luasan bantuan bibit dan/atau saprodi tanaman tahunan dan penyegar (sawit, kopi, karet)				1570 batang	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pengembangan Pembangunan Agropolitan.	0	1570 batang	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**337.662.602**							**0**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal	persen		persen	85 persen	**152,662,602**						85 persen	**0**	
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Umum	%		%	80 %	**61.162.602**						80 %	**0**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik				11 Jenis	4,998,986	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	11 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Paket	3,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	2 Paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				33 Jenis	7,705,644	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	33 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	4,524,850	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang dibeli				37 Jenis	14,785,122	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	37 Jenis	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tahun Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	3,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah tahun rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				1 Tahun	23,148,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	1 Tahun	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**91,500,000**							**0**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				150 lemba	r 1,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	150 lemba	r 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	12 bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%		%	90 %	**185,000,000**						90 %	**0**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**185,000,000**							**0**	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumkah sertifikat Prima 3				25 sertifika	t 75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		Masyarakat	25 sertifik	t 0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Register PSAT				5 sertifikat	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Masyarakat	5 sertifika	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk PSAT yang terawasi				25 produk	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Masyarakat	25 produk	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**42.587.9**								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**37.740.452.375**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**75.233.375**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai sakip perangkat daerah				4 dokumen	64.645.848		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		4 dokumen	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD				5 Dokumen	10.587.527		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		5 Dokumen	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**33.982.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	JumlahASN yang terima Gaji dan Tunjangan				264 orang	33.982.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		264 orang	35.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	Jumlah laporan keuangan bulan/ triwulan/ semesteran				12 laporan	10.000.0000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		12 laporan	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**586.124.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi litrik yang tersedia				10 jenis	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		10 jenis	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan Bahan logistic kantor	Jumlah jenis bahan logistik				30 jenis	27.035.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		30 jenis	30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	66.380.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		20 eksplar 30.000 lembar	75.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				3 bacaan	10.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		3 bacaan	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	35.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		50 jenis	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah paket makan minum tamu Jumlah paket makan minum rapat				1 paket	51.480.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		1 paket	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	208.829.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		250 kali	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**2.387.380.041**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim Jumlah materai Jumlah ATK				6 jenis 100 lembar 1paket	125.770.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		4 dokumen	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tagihan listrik Jumlah tagihan komunikas				12 Bulan	315.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		5 Dokumen	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	umlah jenis penyediaan jasa kebersihan Jumlah Sopir Jumlah tenaga jasa kebersihan Jumlah Tenaga pengamanan				13 jenis	1.946.610.041		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						655.065						264 orang	**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara Eselon II				1 unit	42.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup		12 laporan	15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan yang dipeliharan kendaraan operaional				12 unit	249.380.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Pemeliharaan peralatan dan mesinlainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin				1 paket	54.649.9590		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung				5 unit	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan bahan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sarana dan prasarana gedung				5 unit	155.465.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN**						**1.000.000.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Provinsi**						500.000.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH				1 dokumen	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**						500.000.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang				1 dokumen	500.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						1.751.937.000							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**						1.751.937.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen prasyarat Akreditasi laborraorium Jumlah tenaga analis				4 dokumen 23 orang	1.751.937.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						60.000.000							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah**						60.000.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/ kegiatan yang diawasi				15usaha	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						74.658.000							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah**						74.658.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok swadaya masyarakat yang terbina				14 KSM	74.658.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						60.000.000							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah**						60.000.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah aduan masyarakat yang diverifikasi				100 persen	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**85.700.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**						**85.700.000**							**200.000.000**	
2	11	01	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Jumlah koordinasi dan sinronisasi izin usaha di Hutan Produsi Jumlah Tenaga GIS				12 izin 1 orang	60.700.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	Jumlah koordinasi dan sinronisasi izin usaha di Hutan Lindung				12 izin	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**58.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRHL				1 dokumen	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah rekomendasi pembinaan dan/atau pengawasan RHL				1 Rekomendasi	33.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**1.302.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah penanganan aktivitas perusakan hutan Jumlah tenaga pembantu Polhut				2 perkara 30 orang	1.172.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi				1 kali	65.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Luas penurunan kebakaran hutan dan lahan				1582 hetar	65.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <**						**25.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industry primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi < 6000 m3/tahun melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi izin usaha insutri primer hasil hutan kayu				I unit	25.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Perbenihan Tanaman Hutan**						**53.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penetapan Pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	Jumlah pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar				4 pengada/ pengedar	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Sertifikasi sumber benih	Luas sumber benih yang disertfikasi				10 Ha	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Jumlah rekomendasi pengawasan peredaran benih dana tau bibit				1 rekomendasi	15.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**28**	**01**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**96.000.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convension In International Trade In Endrangered Spesies)untuk Kewenangan Daerah Provinsi**						**48.000.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	01	Pengendaliandan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang dikendalikandan diawasi				5 jenis	48.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pengelolaan kawasan bernilai Ekosistem penting, daerah, penyangga kawasan suaka alam dan kawasanpelestarian alam**						**48.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai	Jumlah kelompok masyarkat yang dikuatkan kapasitas dan keberdayaannya				1 kelompok	48.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
					ekosistem penting kewenangan daerah provinsi														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**34,611,068**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**102.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Komptensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitas dan kompetensinya				32 orang dan 4 kategori	32.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				30 KTH	35.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok usaha perhutanan social dan Luas perhutanan sosial				3 unit 47582 hektar	35.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Persentase pengelolaan DAS				1.64 Persen	**147,000,000**							**60,000,000**	
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Luas DAS yang dikelola				27.000 hektar	**147,000,000**							**60,000,000**	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS				27.000 hektar	25,000,000				Pengendalian Lingkungan Hidup			30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah pemegang IPPKH yang menerapkan teknik KTA DAS				6 izin IPPKH	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	06	1.01	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pemgelolaan DAS				5 kelompok	72,000,000				Pengendalian Lingkungan Hidup			30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	06	1.01	03	Pengembangan Kelembagaan pengelolaan DAS	Jumnlah kelembagaan pengelolaan DAS Provinsi				1 Forum DAS	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						126.580.00								
2	**11**	**01**			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey kepuasan pelayanan internal UPTD KPHP Rambat Menduyung Kabupaten Bangka Barat					**85.080.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum PD					**23.100.000**								
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
															Hidup				KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	18.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**14.900.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 bulan	13.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				3 unit	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian				12.500 bibit	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				25 kali	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				3 KTH	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial					5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						126.580.000								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal UPTD KPHP Jebu Bembang Antan Kabupaten Bangka					**85.080.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah					**23.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1,06	01	Penyediaan Brang cetak dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	18.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**14.900.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 laporan	13.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian				B	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan**						**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				B	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan**						**14.000.000**							**45,000,000**	
					Masyarakat di Bidang Kehutanan														
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				60	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				889 Ha	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						126.580.000								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal UPTD KPHP Bubus Panca Kabupaten Bangka					**85.080.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah					**23.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	18.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**14.900.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 laporan	13.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersediaan di persemaian				1,000	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				7	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**14.000.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				49	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				665 Ha	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						122.080.000								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin					80.580.000							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah					**23.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	18.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**10.400.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 laporan	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**														
											27.500.000							**20**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian				1,000	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				7	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				78	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				1,400	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						132.080.000								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal UPTD KPHP Sungai Sembulan Kabupaten Bangka Tengah					85.080.000							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat daerah					**23.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	20.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**14.900.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 laporan	13.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian				1,000	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				7	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				80	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				1,500	7.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						124.580.000								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal UPTD KPHP Muntai Palas					**88.080.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat daerah					**25.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	20.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**14.900.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 laporan	13.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian				800	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				7 Kali	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**14.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				B	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				B	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						159.580.000								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal UPTD KPHL Belantu Mendanau					**80.080.000**							**45,000,000**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat daerah					**25.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	20.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**14.900.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis bahan material				12 laporan	13.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah					**47.080.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Jumlah barang yang dikirim					**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon					**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi						23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan					**4.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**35.000.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem penting, Daerah Penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam**	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian					**35.000.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah						35.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI**	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH					**16.500.000**							**45,000,000**	
					BIDANG KEHUTANAN														
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**16.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				101	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				1,600	7.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						131.580.000								
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Internal UPTD KPHP Gunung Duren					**87.580.000**							**45,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum Perangkat daerah					**25.100.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Brang cetaka dan penggandaan	Jumlah lembar barang yang dicetak dan jumlah barang yang digandakan				20 eksplar 30.000 lembar	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan bahan/ material	Jumlah jenis bahan material				50 jenis	2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	11	01	1.06	01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah				250 kali	20.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						**15.400.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah barang yang dikirim				10 jenis	1.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	11	01	1.02	07	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan listri dan komunikasi/ tepon				12 laporan	14.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**						47.080.000							**45,000,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dipeliharan				10 jenis	47.080.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**27.500.000**							**200.000.000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23.500.000**							**45,000,000**	
2	11	01	1.01	01	Pengembangan perbenihan tanaman Rehabilitasi	Jumlah bibit yang tersedian di persemaian				1,550	23.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15,000,000	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**4.000.000**							**45.000.000**	
2	11	01	1.01	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah patrol yang dilakukan oleh KPH				7 kali	4.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15.000.000	
2	**11**	**01**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**16.500.000**							**45.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	01	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani hutan yang terbentuk dan/atau meningkat kelasnya				120	9.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	1.01	01	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pengembangan perhutanan sosial				1,100	7.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengendalian Lingkungan Hidup			15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**17.921.065.508**							**22.435.512.452**	**22.435.512.452**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD	0		0	85	**14.723.673.508**						85 0	**17.665.887.452**	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	**160.000.000**						10 Dokum	**491.411.452**	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						65.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan		315.411.452	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokume	95.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan	3 Dokume	176.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang		orang	83 orang	**11.224.657.777**						83 orang	**11.505.275.000**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				83 orang	11.224.657.777	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	83 orang	11.505.275.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan; Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	orang		orang	6 orang	**59.094.000**						6 orang	**428.000.000**	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				3 orang	29.547.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 orang	214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis				3 orang	29.547.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 orang	214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	**786.971.731**						8 Kegiatan	**1.343.000.000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik				9 jenis	44.994.312	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9 jenis	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor				1 jenis	40.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 jenis	85.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik				17 jenis	246.421.077	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17 jenis	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah lembar penggandaan				30 cetakan 15000 lem	34.562.476	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 cetakan 15000 lem	45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				35 jenis	90.993.866	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35 jenis	98.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu				400 pax	30.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	400 pax	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa				1 Tahun	300.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun	735.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	**1.473.800.000**						4 Jenis	**1.828.500.000**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				750 buah	7.500.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	750 buah	8.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	800.400.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan	850.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	25.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun	27.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan jasa Kantor yang bekerja				17 orang	640.900.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17 orang	942.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis BMD yang Dipelihara	Jenis		Jenis	8 Jenis	**1.019.150.000**						8 Jenis	**2.069.701.000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipeliharan				17 unit	379.530.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17 unit	453.596.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kapal PELRA yang dipelihara Jumlah peralatan kerja yang dipelihara				1 unit 57 unit	229.620.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 unit 57 unit	480.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 unit	410.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit	1.615.625.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persen		persen	26,47 pers	**2.852.392.000**						26,47 pers	**4.219.625.000**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**						**1.457.250.000**							**1.850.000.000**	
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						1.457.250.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Penggunaan Angkutan Jalan Raya		1.850.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	Jumlah taruna/i Sekolah tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibiayai.	orang		orang	24 orang	**1.251.522.000**						24 orang	**1.615.625.000**	
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah taruna/i Sekolah tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibiayai.				13 orang	1.251.522.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Penggunaan Angkutan Jalan Raya	13 orang	1.615.625.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**25.000.000**						1 Dokume	**90.000.000**	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas				1 Dokumen	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Penggunaan Angkutan Jalan Raya	1 Dokume	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah angkutan umum (penumpang dan barang) yang diperiksa surat laik jalannya, kendaraan yang di ramp check,	unit		unit	1150 unit	**118.620.000**						1150 unit	**664.000.000**	
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah angkutan umum (penumpang dan barang) yang diperiksa surat laik jalannya, kendaraan yang di ramp check,				1150 unit	118.620.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Penggunaan Angkutan Jalan Raya	1150 unit	664.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	persen		persen	67 persen	**345.000.000**						67 persen	**550.000.000**	
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah SBNP yang dipelihara	unit		unit	2 unit	**100.000.000**						2 unit	**400.000.000**	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah SBNP yang dipelihara				2 unit	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Penggunaan Jasa Kepelabuhan	2 unit	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	1.10		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Dokumen Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen		Dokumen	1 Dokume	**200.000.000**						1 Dokume	**0**	
2	15	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan				1 dokumen	200,000,000	Kab. Bangka Selatan, Lepar Pongok, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan Pelayanan Dasar	Penggunaan Jasa Kepelabuhan	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**03**	1.11		**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di fasilitasi	perusahaan		perusahaan	30 perusahaan	**45,000,000**	**45,000,000**					30 perusahaan	150.000.000	
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di fasilitasi				30 perusahaan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Pengguna Jasa Angkutan Pelayaran	30 perusahaan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						17.591.702.377							**76.054.231**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD	nilai		nilai	95 nilai	**10,088,952,716**						95 nilai	**76.054.231**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**119,905,966**						12 Dokumen	**76.054.231**	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				5 Dokumen	75,089,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 Dokumen	76.054.231	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD				7 Dokumen	44,816,166		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjungan	Orang		Orang	60 Orang	**7,264,960,902**						60 Orang	**0**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				60 ASN	7,262,960,902		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		60 ASN	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan				5 Laporan	2.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan		5 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Meningkatnya Disiplin serta kompetensi SDM Aparatur	%		%	100 %	**40.000.000**						100 %	**0**	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti kursus/Diklat				8 Orang	40.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		8 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**401.055.000**								
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				1 Paket	9.055.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				6 jenis	45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		6 jenis	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah barang cetak digiotal printing				5000 eksemplar 160 meter	25.000.000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5000 ekse 160 meter		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						48.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia				474 pax	24.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		474 pax	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan				60 kali 9 kali 700 Orang	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60 kali 9 kali 700 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	Pegawai		Pegawai	60 Pegawai	**1.900.400.000**						60 Pegawai	**0**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia Jumlah Surat yang dikirim				700 lembar 12 bulan	8.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				700 lembar 12 bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel				12 bulan	459.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terlayani				37 Pegawai	1.432.600.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan		37 Pegawai	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**362.630.848**							**0**	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				5 unit	115.214.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan		5 unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis peralatan dan mesin yang dipelihara				5 Jenis	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 Jenis	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 unit	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <baleho, genset>				2 Jenis	87.416.848		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 Jenis	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**4.925.249.661**							**0**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**						**4.925.249.661**							**0**	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dimutakhirkan dan dikembangkan.					2.346.249.661		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 web 4 medsos 236 video	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						460.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi dan Publikasi PD yang dikelola Jumlah Lembaga Informasi non struktural yang dikelola					1.919.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34 PD 2 lembaga	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.577.500.000**							**0**	
2	**16**	**03**	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**						**95.000.000**							**0**	
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi						45.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**						**2.482.500.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Infrastruktur dan Teknologi				4 layanan	2.350.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 layanan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikas dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik				2 Aplikasi	82.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Aplikasi	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**20**				**URUSAN**						**300.000.000**								
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**300.000.000**								
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**						**300.000.000**								
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kebutuhan data Statistik Sektoral Daerah (OPD); serta jumlah kompilasi statistik sektoral				300.1 elem data OPD,ebook	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		300.1 ele data OPD,ebook		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral						125.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**163.274.801**	**163.274.801**								
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**163.274.801**		**163.274.801**					**0**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**						**105.000.000**		**105.000.000**					**0**	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						55.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**						**58.274.801**							**0**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi						58.274.801		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**17**				**URUSAN**						**13.175.822.054**							**0**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.760.387.589**							**0**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**50.931.726**							**0**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50.931.726		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4 Dokume	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8.366.889.738**							**0**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				53 Orang	8.366.889.738		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		53 Orang	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100.000.000**							**0**	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				6 Orang	100.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6 Orang	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.043.363.535**							**0**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik				1 Tahun	44.985.511		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik				1 Tahun	26.422.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan Jumlah Penjilidan				1 Tahun 1 Tahun Tahun	128.917.794		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun 1 Tahun Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				1 Tahun	20.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah peralatan rumah tangga				1 Tahun	177.859.230		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum				1 Tahun	69.625.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	575.154.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.816.594.500**							**0**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				1707 Lemb 1 Tahun	29.794.500	ar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1707 Lembar 1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi dan listrik				12 Bulan	272.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12 Bulan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pakaian atau perlengkapan biasa yang dilaundry				600 Kg	6.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		600 Kg	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Pramubakti Jumlah Jasa Tenaga Sopir				10 Orang 8 Orang 21 Orang 1 Orang	1.508.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 Orang 8 Orang 21 Orang 1 Orang	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**382.608.090**							**0**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan opersional dinas yang dipelihara				6 Unit	127.740.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		6 Unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan perawatan				3 unit	200.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 unit	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat				1 Tahun	54.868.090		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Tahun	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**35.000.000**							**0**	
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)Daerah Provinsi**						**35.000.000**							**0**	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta	Jumlah Koperasi Provinsi yang mematuhi peraturan perundang-undangan				20 Koperasi	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 Koperasi	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**90.000.000**							**0**	
2	**17**	**04**	1.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Kabupaten/KotaLintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**90.000.000**							**0**	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya				10 Koperasi	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 Koperasi	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berprestasi Jumlah Tokoh Penggerak Koperasi berprestasi				3 Koperasi 2 Orang	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 Koperas 2 Orang	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN**						**50.000.000**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**05**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**50.000.000**							**0**	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Resertifikasi ISO 9001-2019				1 Sertifikat	50.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Sertifika	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**165.480.000**							**0**	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**165.480.000**							**0**	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah tenaga penyuluh yang diberdayakan				30 Orang	165.480.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30 Orang	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**676.152.000**							**0**	
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**						**676.152.000**							**0**	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembang kan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan	Jumlah Kecamatan di Kab/Kota yang melakukan pendataan UMKM Jumlah Pendamping yang memberdayakan UMKM Jumlah Temu Mitra				47 Kecamatan 7 Pendamping 1 Lokasi	676,152,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		47 Kecamatan 7 Pendamping 1 Lokasi	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**398.802.465**							**0**	
2	**17**	**08**	1.01		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**						**398.802.465**							**0**	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Jumlah Sertifikat Halal Jumlah Sosialisasi Pembiayaan UMKM				4 Kali 34 Sertifikat 7 Kab/Kota	398.802.465		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4 Kali 34 Sertifikat 7 Kab/Kota		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**10.433.169.527**							**0**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9.478.166.581**							**0**	
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**39.795.441**							**0**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen (Renstra PD dan Renja PD)				7 Dokumen	27.727.941	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		7 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD (Dalev triwulan I, Dalev Triwulan II, Dalev Triwulan III, Dalev Triwulan IV, LKPJ, LPPD, LAKIP)				7 Dokumen	12.067.500	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		7 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8.049.223.417**							**0**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu				2 laporan	8.049.223.417	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2 laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**407.607.723**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				30 jenis	15.380.545	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30 jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				1043 unit	12.180.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1043 unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak Jumlah Penggandaan				10000 Eksemplar 100000 lembar	53,996,394	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10000 Eksemplar 100000 lembar	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				4000 Eksemplar	24,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		4000 Eksemplar	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				80 jenis	90.750.784	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		80 jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia				1004 pax 1800 pax	51.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1004 pax 1800 pax	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan				70 kali 70 kali	160.300.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		70 kali 70 kali	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**853.430.000**							**0**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai Jumlah surat/barang yang dikirim				495 lembar 500 surat/barang	13,950,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		495 lembar 500 surat/barang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	127.200.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan				100 jenis 18 orang	712.280.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		100 jenis 18 orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**128.110.000**							**0**	
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				4 unit	77.590.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				15 Unit/Jenis	37.320.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Unit/Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara				1 unit	10.000.000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah BBM Genset Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				400 liter 0 unit/jenis/set	3,200,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400 liter 0 unit/jenis/set	0 s/set	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**126.910.000**							**0**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**54.160.000**							**0**	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						0							0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**177.011.296**							**0**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan strategi promosi penanaman modal			1 Laporan	1 Laporan	37.296.059	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Terlaksana			1 Pameran Promosi	1 Pameran Promosi	139.715.237		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**461.831.665**							**0**	
2	**18**	**04**	1.01		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**58.383.657**							**0**	
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah peserta rapat koordinasi forum Jumlah rapat koordinasi forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				50 peserta 1 rakor forum	58.383.657		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**403.448.008**							**0**	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi pendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				1 aplikasi	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan					403,448,008	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1250 izin	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**145,000,000**								**0**
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**145,000,000**								**0**
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau				50 perusahaan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		50 perusa	haan 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti workshop				50 perusahaan aparatur	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		50 perusa aparatur	haan, 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kasus/permasalahan perusahaan yang terselesaikan				2 kasus/permasalahan	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		2 kasus/p	rmasalahan 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**44,249,985**								**0**
2	**18**	**06**	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**						**44,249,985**								**0**
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik				1 Dokumen	44,249,985	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**472.250.000**								**0**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						472.250.000								**0**
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**102.300.000**								**0**
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				20 jenis	9,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		20 jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				130 unit	2.300.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		130 unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak Jumlah Penggandaan Jumlah penjilidan				10000 Eksemplar 90000 lembar 0 0	18,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10000 Eksempar 90000 lembar	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				1040 Eksemplar	3.000.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1040 Eksemplar	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				80 jenis	12.000.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		80 jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia				200 pax 200 pax	8.000.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		200 pax 200 pax	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan				30 kali 30 kali	50.000.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		30 kali 30 kali	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**10.000.000**							**0**	
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				10 Unit/Jen	10.000.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		10 Unit/Je	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**310.800.000**							**0**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.198.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	25.200.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan				25 jenis 7 orang	278.402.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		25 jenis 7 orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**49.150.000**							**0**	
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				3 unit	39.150.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		3 unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara				1 unit	10.000.000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		1 unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**28.133.333.466**							**28.307.833.466**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18.208.333.466**							**18.218.333.466**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**105.000.000**							**105.000.000**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD				7 dokumen	80,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		7 dokume	80.000.000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)				5 dokumen	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		5 dokume	25.000.000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**14.390.200.584**							**14.390.200.584**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.390.200.584		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata			14.390.200.584	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**35,000,000**							**35,000,000**	
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti DIKLAT				8 orang	35,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		8 orang	35,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						299.246.965								
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik (paket)				1 paket	9,995,765	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	9,995,765	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor (paket)				1 paket	3,731,200	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	3,731,200	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak (paket) / Jumlah penggandaan (paket)				1 paket	26,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	26,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan (paket)				1 paket	30,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	30,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah material yang tersedia				1 paket	60,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	60,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas untuk tamu				1 paket	28,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	28,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (paket)				1 paket	141,520,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	141,520,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**10,000,000**	
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin				1 paket	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 paket	10,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,190,426,876**							**3,190,426,876**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim				24 paket	8,050,676	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		24 paket	8,050,676	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik/air/internet				1 tahun	426,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 tahun	426,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2,756,376,200	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata			2,756,376,200	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**188,459,041**							**188,459,041**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional				1 tahun	160,109,041	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 tahun	160,109,041	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang terpelihara				1 tahun	2,500,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 tahun	2,500,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				1 tahun	25,850,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 tahun	25,850,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1,800,000,000**							**1,802,000,000**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**						**1,240,000,000**							**1,242,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda pelopor				7 pemuda	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Pendidikan		7 pemuda	22,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Peserta Pemilihan Pemuda Pelopor				5 pemuda	30,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		5 pemuda	30,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah peserta pemilihan PPAN, KPN, PEPELINGASIH, AIESEC, JPD, KIPAN				136 pemu	340,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		136 pemu	da 340,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta pemilihan Pasukan Pengibar Bendera dan jumlah peserta Pasukan Pengibar Bendera				90 pemud	850,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		90 pemud	850,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**02**	1.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**						**560,000,000**							**560,000,000**	
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda				35 pemud	60,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 pemud	60,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi						500,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata			500,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**6,625,000,000**							**6,787,500,000**	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**						1.325.000.000							1.457.500.000	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan				10 Cabor	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		10 Cabor	550,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah peserta yang ikut serta dalam pengiriman kontingen				208 Pesert	a 825,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		208 Peser	a 907,500,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**						**300,000,000**							**330,000,000**	
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta yang ikut dalam Training Camp				159 Pesert	a 300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		159 Peser	a 330,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**						**5,000,000,000**							**5,000,000,000**	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi				80 Atlet	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan		80 Atlet	5,000,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**1,500,000,000**							**1,500,000,000**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**						**1,500,000,000**							**1,500,000,000**	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Keorganisasian Kepramukaan				1 tahun	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		Pengembangan Pariwisata		1 tahun	1,500,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						6.437.561.650							5.672.938.363	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**164,000,000**							**187,500,000**	
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**164,000,000**							**187,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah lembaga dan pranata adat yang dibina				1 lembaga	164,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 lembaga	187,500,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**1,083,561,650**							**247,939,563**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**1,083,561,650**							**247,939,563**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang dipilih				50 orang	983,561,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		50 orang	122,939,563	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian yang dibina				70 lembag	a 100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		70 lembag	a 125,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**5,125,000,000**							**5,156,250,000**	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**						**125,000,000**							**156,250,000**	
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi				5 cahar budaya	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		5 cahar budaya	31,250,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan sebagai peringkat provinsi				15 cagar budaya	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		15 cagar budaya	125,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**						**5,000,000,000**							**5,000,000,000**	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya peringkat provinsi yang dilindungi				1 cagar budaya	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 cagar budaya	5,000,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**65,000,000**							**81,250,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**						**65.000.000**							**81.250.000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum Wisma Ranggam				20 Jenis	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 Jenis	81,250,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**2.617.406.149**							**3.344.790.007**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**700,000,000**							**914,409,813**	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**						**250.000.000**							**321.500.000**	
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah dokumen rencana dan rancangan daya tarik wisata unggulan				1 dokumen	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 dokume	n 321,500,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**						**350,000,000**							**437,500,000**	
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen rencana kawasan strategis pariwisata provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 Dokume	n 437,500,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**						**100,000,000**							**155,409,813**	
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				30 orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		30 orang	155,409,813	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**1,376,983,655**							**1,696,229,569**	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**						**1,376,983,655**							**1,696,229,569**	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata				1 media	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		1 media	100,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah fasilitasi promosi pariwisata bagi industri pariwisata provinsi				4 Event	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		4 Event	250,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan promosi pariwisata Jumlah Data dan sebaran informasi pariwisata Jumlah pusat informasi Destinasi Pariwisasta Bangka Belitung				4 Event 5 media 4 Bahan Promosi	1,076,983,655		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		4 Event 5 media 4 Bahan Promosi	1,346,229,569	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**540,422,494**							**734,150,625**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**						**540,422,494**							**734,150,625**	
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pemandu wisata yang terlatih				40 orang	310,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		40 orang	421,650,625	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang terlatih				40 orang	230.422.494		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata		40 orang	312,500,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**141.219.680**							**141.219.680**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**141,219,680**							**141,219,680**	
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**141.219.680**							**141.219.680**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik				1 tahun	5,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata		1 tahun	5,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						71,219,680	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata			71,219,680	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi				1 tahun	65,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata		1 tahun	65,000,000	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**12.969.444.618**							**13.316.964.438**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD (DKPUS)	%		%	78 %	**12,554,667,890**						78 %	**13,008,071,537**	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**49,250,000**						2 Dokume	n **6,720,638**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Renstra/Renja PD				2 Dokumen	49,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	PD DKPUS	2 Dokume	n 0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD				7 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PD DKPUS	7 Dokume	n 6,720,638	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan PD tepat waktu	laporan		laporan	2 laporan	**10,186,957,723**						2 laporan	**8,762,650,000**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				64 Orang	10,186,957,723	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	64 Orang	8,750,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokume	n 5,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan semesteran				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Dokume	n 7,150,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian PD	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**20,500,000**						1 kegiatan	**22,550,000**	
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal				10 orang	20,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	10 orang	22,550,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	**604,159,326**						7 kegiatan	**711,559,681**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fake, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	36,263,369	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	12 Bulan	39,889,706	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan kantor				10 jenis	29,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	10 jenis	31,900,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				5 jenis	24,995,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	5 jenis	27,494,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak Jumlah Penggandaan				50 eksemplar 85715 Lembar	97,914,534	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	50 eksemplar 85715 Lembar	107,705,987	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				850 eksemplar	24,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	850 eksemplar	4,840,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah BBM jumlah jenis ATK yang dibeli				7 unit 50 jenis	138,270,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	7 unit 50 jenis	220,641,423	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia				1000 pax	33,075,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	1000 pax	36,382,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan Jumlah makan dan minum rapat tersedia				33 kali 40 kali 800 pax	220,641,423	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN	33 kali 40 kali 800 pax	242,705,565	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	jenis		jenis	3 jenis	**171,033,384**						3 jenis	**1,834,906,722**	
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 jenis	171,033,384	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	5 jenis	1,834,906,722	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	**1,310,535,000**						3 Jenis	**1,441,588,500**	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				165 lembar 50 surat/barang	16,560,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	165 lembar 50 surat/barang	18,216,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				25 jenis	30,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	25 jenis	33,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Keamanan/Satpam kantor yang diperkerjakan Jumlah tenaga kebersihan yang di pekerjakan Jumlah tenaga Pramubakti yang diperkerjakan Jumlah tenaga supir yang diperkerjakan				6 Orang 4 Orang 18 Orang 5 Orang	1,263,975,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	6 Orang 4 Orang 18 Orang 5 Orang	1,390,372,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	jenis		jenis	4 jenis	**212,232,457**						4 jenis	**228,095,996**	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran oprasional yang dipelihara				5 kendaraan	72,412,133	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	5 kendaraan	79,653,346	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaran oprasional yang dipelihara				15 unit/jenis	48,444,591	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	15 unit/jenis	53,289,050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	91,375,733	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	1 unit	95,153,600	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Perpustakaan yang dibina (DKPUS)	%		%	60 %	**356,107,973**						60 %	**238,857,270**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	%		%	60 %	**47,000,000**						60 %	**55,000,000**	
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	jumlah perpustakaan yang memenuhi standart nasional				7 perpustakaan	47,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perpustakaan dan Pengelola perpustakaan	7 perpustakaan	55,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	pengunjung		pengunjung	10000 pengunjung	**309,107,973**						10000 pengunjung	**183,857,270**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling				4000 pengunjung	277,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN dan Masyarakat	4000 pengunjung	149,050,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta pelatihan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial				50 0rang	31,642,973	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN dan Masyarakat	50 0rang	34,807,270	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (DKPUS)	dokumen		dokumen	9 dokumen	**58,668,755**						9 dokumen	**70,035,631**	
2	**23**	**03**	1.02		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**	jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	**58,668,755**						1 dokumen	**70,035,631**	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	jumlah dokumen katalog induk daerah yang dicetak				1 dokumen	58,668,755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN, Perpustakaan dan Masyarakat	1 dokumen	70,035,631	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**														
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan sesuai dengan Standard Baku Kearsipan (DKPUS)	%		%	20 %	**252,989,581**						20 %	**302,488,540**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	Persentase PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD yang mengelola arsip dinamis yang sesuai dengan standard baku kearsipan dan berbasis TIK	%		%	40 %	**49,699,015**						40 %	**58,518,917**	
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah unit kearsipan PD/UPTD, LKD, SMA/SMK/MA, SLB dan BUMD pencipta dan penggunaan arsip dinamis yang memenuhi standard baku kearsipan dan berbasis TIK				16 Unit	49,699,015		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	16 Unit	58,518,917	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	Persentase layanan arsip statis yang autentik dan dipecaya serbagai memori kolektif dan jati diri bangsa	%		%	5 %	**102,248,249**						5 %	**128,973,074**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah penambahan salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang diterima dan disimpan LKD Provinsi				20 Naskah	42,683,769	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	20 Naskah	57,952,146	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah unit depo arsip Provinsi yang dikelola				1 unit	59,564,480	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	1 unit	71,020,928	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	Persentase PD dan LKD yang mengelola Simpul Jaringan dalam SIKN Daerah Provinsi	%		%	50 %	**101,042,317**							50 %	**114,996,549**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah PD dan LKd yang memanfaatkan simpul jaringan dalam penyediaan informasi, akses layanan kearsipan				1 PD/LKD	26,972,521	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	PD dan LKD	1 PD/LKD	29,669,773	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah LKD Kab/Kota yang memperoleh pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas (lake)				7 LKD Kab/kota	74,069,796		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	PD dan LKD	7 LKD Kab/kota	85,326,776	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Berkas Arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan (DKPUS)	%		%	20 %	**107,542,187**							20 %	**130,731,255**	
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	Persentase peningkatan unit kearsipan PD dan LKD yang melakukan pemusnahan berkas arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	%		%	10 %	**44,699,472**							10 %	**51,644,419**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah unit kearsipan PD dan LKD yang melakukan penilaian berkas arsip retensi dibawah 10 tahun untuk dimusnahkan				8 unit kearsipan	44,699,472	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	8 unit kearsipan	40,199,217	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	03	1.01	02	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit kearsipan perangkat daerah yang melakukan pemusnahan arsip retensi dibawah 10 tahun				8 unit kearsipan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	8 unit kearsipan	11,445,202	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**	1.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Arsip PD yang digabung/bubar yang diselamatkan	%		%	50 %	**21,250,000**						50 %	**27,500,000**	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah daftar Arsip/dokumen PD yang digabung				3 daftar arsip/dokumen	21,250,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	3 daftar arsip/dokumen	27,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	**24**	**03**	1.04		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	Persentase berkas arsip statis hasil autentifikasi arsip dan arsip hasil alih media yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	%		%	20 %	**41,592,715**						20 %	**51,586,836**	
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang diautentifikasi dan arsip hasil alih media yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip Jumlah Berita Acara penilaian dan penetapan hasil autentifikasi arsip statis yang sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip				300 arsip statis 2 Berita Acara	41,592,715	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	300 arsip statis 2 Berita Acara	49,927,156	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	subkegiatan penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip				2 daftar arsip	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	OPD	2 daftar arsip	1,659,680	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						26.806.039.318							29.434.800.000	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD DKP	0		0	82 0	**15,097,111,621**						82 0	**3,334,800,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dok perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD	Laporan		Laporan	10 Laporan	**85,000,000**						10 Laporan	**85,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP		500,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok evaluasi PD				1 Laporan	35,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Laporan	50,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	Orang		Orang	93 Orang	**13,523,531,621**						93 Orang	**0**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				93 Orang	13,523,531,621	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	0	93 Orang	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	eksempla	r	eksemplar	1800 eksemplar	**376,880,000**						1800 eksemplar	**656,100,000**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				1 Tahun	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun	11,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang tersedia				1 Tahun	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun	10,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor				1 Tahun	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun	25,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah penggandaan				1 Tahun 1 Tahun	10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun 1 Tahun	25,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				1800 eksemplar	5,100,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1800 eksemplar	5,100,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis ATK yang dibeli				1 Tahun	67,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun	150,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu				1 Tahun	9,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun	30,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah makan dan minum rapat				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	400,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**0**	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Surat/Barang yang dikirim dan Materai	Paket		Paket	1 Paket	**961,700,000**						1 Paket	**978,700,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				1 Tahun 1 Paket	10,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun 1 Paket	12,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik				1 Tahun	150,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKP	1 Tahun	165,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Peralatan kebersihan kantor Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah tenaga pramubakti Jumlah tenaga sopir				1 Tahun 52 bulan 52 bulan 26 bulan 117 26 bulan	801,700,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai DKP	1 Tahun 52 bulan 52 bulan 26 bulan 117 26 bulan	801,700,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tahun		Tahun	1 Tahun	**150,000,000**						1 Tahun	**1,150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan jumlah kendaraan operasional yang dipelihara Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayar				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	125,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	600,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				1 Tahun	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	0	1 Tahun	50,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Tahun	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Tahun	500,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**160,400,000**							**1,700,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**85,400,000**							**750,000,000**	
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			100,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang terkelola				2 Kawasan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		2 Kawasan	500,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Layanan Mitigasi/BOOST Center				1 Tahun	85,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		1 Tahun	150,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**75,000,000**							**250,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi izin lokasi dan izin Pengelolaan ruang Laut di Bawah 12 Mil				10 Rekom	ndasi 75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		10 Rekom	ndasi 250,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**0**							**700,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Dilakukan Pembinaan				2 kelompo Masyaraka	k o t	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		2 kelompo Masyaraka	k 350,000,000 t	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir Yang Dilakukan Pembinaan				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	350,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**10,162,108,697**							**20,200,000,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**						**7,275,000,000**							**15,000,000,000**	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Tambat Labuh yang dibangun/direhab				3 Unit	7,275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		3 Unit	15,000,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**0**							**350,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	jumlah rekomendasi izin usaha perikanan tangkap				100 Rekom	ndasi 0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		100 Rekom	ndasi 350,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**						**2,887,108,697**							**4,850,000,000**	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan						1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			350,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasaranampelabuhan perikanan yang direhab/dibangun				7 Paket	0	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai Kab. Bangka Tengah, Koba, Kurau (Timur) Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Kab. Belitung Timur, Manggar, Baru Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		7 Paket	2,000,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang dilayani Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor Jumlah tenaga kebersihan Jumlah tenaga pramubakti				12 Bulan 195 Bulan 195 Bulan 91 Bulan	1,887,108,697	Kab. Belitung, Selat Nasik, Selat Nasik Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Sadai Kab. Bangka Tengah, Koba, Kurau (Timur) Kab. Bangka Tengah, Sungai Selan, Sungai Selan Kab. Belitung Timur, Manggar, Baru Kab. Belitung Timur, Gantung, Gantung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		12 Bulan 195 Bulan 195 Bulan 91 Bulan	2,500,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**922,519,000**							**2,250,000,000**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**0**							**250,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	jumlah rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembuddayaan ikan yang dikeluarkan				5 Rekome	ndasi 0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		5 Rekome	ndasi 250,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**						**922,519,000**							**2,000,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			1,000,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih yang diserahkan ke masyarakat Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan				7 Paket 7 Paket	722,519,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		7 Paket 7 Paket	1,000,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**463,900,000**							**1,200,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang diawasi dan Jumlah Tenaga Teknis Kapal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**463,900,000**						1 Tahun	**1,100,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			100,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil yang diawasi Jumlah Tenaga Teknis Kapal				1 Tahun 1 Tahun	463,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.		1 Tahun 1 Tahun	1,000,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**	1.02		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**0**							**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			100,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**0**							**750,000,000**	
3	**25**	**06**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**0**							**750,000,000**	
3	25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi				20 Rekom	ndasi 0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		20 Rekom	ndasi 250,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.			500,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						1.703.540.000							5.358.990.000	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal UPTD Balai Pemuliaan DKP	%		%	100 %	**618,740,000**						100 %	**758,900,000**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	**136,500,000**						8 Kegiatan	**221,000,000**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				1 Tahun	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun	10,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor				1 Tahun	25,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun	45,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah penggandaan				1 Tahun 1 Tahun	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun 1 Tahun	6,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis ATK yang dibeli				1 Tahun	15,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun	30,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu				1 Tahun	7,500,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun	10,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah makan dan minum rapat				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	80,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	120,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**331,530,000**						1 Tahun	**342,900,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				1 Tahun 1 Tahun	6,130,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun 1 Tahun	7,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik				1 Tahun	240,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun	250,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis Peralatan kebersihan kantor Jumlah tenaga pramubakti				1 Tahun 26 Tahun	85,400,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun 26 Tahun	85,400,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	**150,710,000**						1 Tahun	**195,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM kendaraan jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				1 Tahun 1 Tahun	115,710,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun 1 Tahun	150,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				1 Tahun	35,000,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pembangunan Bahari.	Pegawai Balai Pemuliaan Ikan	1 Tahun	45,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%		%	4.20 %	**1,084,800,000**						4.20 %	**4,600,000,000**	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih yang di Adakan	Paket		Paket	5 Paket	**1,084,800,000**						5 Paket	**4,600,000,000**	
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Tenaga Teknis Pengadaan Sarana Budidaya Tersedianya benih yang diserahkan ke masyarakat				182 Bulan 1 Paket 1 Tahun	617,800,000	Kab. Belitung, Membalong, Tanjungrusa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pelaku Usaha Perikanan Buddiaya	182 Bulan 1 Paket 1 Tahun	2,300,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Budidaya yang diadakan Jumlah Tenaga Teknis				1 Tahun 130 Tahun	467,000,000	Kab. Bangka Selatan, Tukak Sadai, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Bahari.	Pelaku Usaha Perikanan Buddiaya	1 Tahun 130 Tahun	2,300,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**407.645.810**							**705.500.000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal UPTD LPPMHP DKP	%		%	100 %	**377,645,810**						100 %	**555,500,000**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	**71,895,810**						8 Kegiatan	**220,500,000**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				1 Tahun	911,280	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	2,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor				1 Tahun	1,400,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	5,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga				1 Paket	2.572.180		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Paket	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor				1 Tahun	20,069,250	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	60,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan				1 Tahun	972,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	1,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis ATK yang dibeli				1 Tahun	4,690,100	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	7,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah				1 Tahun	41,281,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	140,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kegiatan administrasi umum PD	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	**266,000,000**						8 Kegiatan	**270,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				50 lembar	500,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	50 lembar	1,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air Jumlah tagihan komunikasi Jumlah tagihan listrik				12 bulan 12 Bulan 12 bulan	77,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	12 bulan 12 Bulan 12 bulan	80,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						188,500,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP		188,500,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis BMD yang dipelihara	unit		unit	3 unit	**39,750,000**						3 unit	**65,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				1 Tahun	12,500,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	20,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				1 Tahun	27,250,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Pembangunan Bahari.	Pegawai LPPMHP	1 Tahun	45,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**30,000,000**							**150,000,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**						**30,000,000**							**150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah sampel di uji dlm rangka pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi thd mutu dan keamanan hasil perikanan				350 Samp	I 30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Bahari.		350 Samp	I 150,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						19.539.651.289							20.151.000.000	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip Perangkat Daerah				80 - 90	**19,214,651,289**						80 - 90	**19,761,000,000**	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	**85,000,000**						11 Dokumen	**105,000,000**	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				11 Dokumen	35,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	11 Dokumen	45,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun				7 Dokumen	50,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Perangkat Daerah	7 Dokumen	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	Pegawai		Pegawai	130 Pegawai	**17,253,264,592**						130 Pegawai	**17,365,000,000**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				130 Pegawai	17,253,264,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	130 Pegawai	17,305,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang tersusun				2 Dokumen	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pegawai		Pegawai	60 Pegawai	0						60 Pegawai	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengkuti pendidikan dan pelatihan				60 Pegawai	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Apratur Perangkat Daearah	60 Pegawai	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**755,586,697**						12 Bulan	**1,000,000,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli				8 Jenis	15,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	8 Jenis	20,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang dibeli				5 Buah	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Buah	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cet yang dibeli Jumlah Spanduk /Baliho/Backdrop/Umbu umbul	ak l-			2 Buah 250 Meter	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Buah 250 Meter	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan dibayarkan				2 Jenis	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	25,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				5 Jenis	135,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Jenis	150,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang dibeli Jumlah penyediaan makan dan minum Rapat				12 Bulan 3200 Pax	85,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 3200 Pax	95,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah & luar daerah				12 Bulan	450,586,697	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	650,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Unit		Unit	3 Unit	**0**						3 Unit	**0**	
3	29	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas				3 Unit	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,006,200,000**						12 Bulan	**1,081,000,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli Jumlah surat barang yang dikirimkan				2000 Lembar 12 Bulan	23,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2000 Lem 12 Bulan	ar 25,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	240,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	280,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga kemanan yang dipekerjakan				4 Orang	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	4 Orang	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan				12 Bulan 19 Orang	743,200,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 19 Orang	776,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**114,600,000**						12 Bulan	**210,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan				1 Unit	45,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Unit	50,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional				3 Unit	44,600,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	130,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki				20 Peralatan	25,000,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	20 Peralatan	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				1 Gedung	0	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Gedung	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	Persentase kepatuhan penataan izin air tanah	%		%	75 %	**75,000,000**						75 %	**80,000,000**	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Laporan pengawasan Perizinan Air Tanah	Laporan		Laporan	1 Laporan	**75,000,000**						1 Laporan	**80,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat dan Badan Usaha yang memfaatkan Air Tanah		0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	2	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembendalian dan pengawasan perizinan air tanah				1 Laporan	75,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Masyarakat dan Badan Usaha yang memfaatkan Air Tanah	1 Laporan	80,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase Pertambangan Yang Good Mining Practices	%		%	80 %	**100,000,000**						80 %	**150,000,000**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	WIUP		WIUP	300 WIUP	**100,000,000**						300 WIUP	**150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Peta yang dicetak Jumlah Rekon PNBP MINERBA				125 Peta 4 Kali	0	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	125 Peta 4 Kali	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP yang dikendalikan dan diawasi				300 WIUP	100,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	300 WIUP	150,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	%		%	10,94 %	**75,000,000**						10,94 %	**80,000,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konservasi Energi	Dokumen		Dokumen	1 Dokume	n **75,000,000**						1 Dokume	n **80,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan konservasi energi				1 Laporan	75,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	1 Laporan	80,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase rasio elektrifikasi	%		%	99,99 %	**75,000,000**						99,99 %	**80,000,000**	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Badan Usaha yang di awasi	Badan Usaha		Badan Usaha	50 Badan Usaha	**75,000,000**						50 Badan Usaha	**80,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan				50 Lapora	n 75,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	50 Lapora	n 80,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Jumlah Desa yang di Data	Desa		Desa	35 Desa	**0**						35 Desa	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang tersusun Jumlah Laporan pengumpulan dan pengolahan data				1 Dokume 0 Laporan	n 0	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	1 Dokume 0 Laporan	n 0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur	%		%	95 %	**298,200,000**						95 %	**362,500,000**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**25,000,000**						1 Laporan	**30,000,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan				3 Orang	25,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Orang	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**101,500,000**						12 Bulan	**128,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli				8 Jenis	3,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	8 Jenis	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang dibeli				5 Buah	2,500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Buah	3,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy Jumlah jenis barang cetak yang dibeli Jumlah penjilidan yang dibayarkan				14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 7,500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli				2 Jenis	6,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	7,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				5 Jenis	20,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Jenis	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minuman tamu Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat				200 Pax 330 Pax	12,500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	200 Pax 330 Pax	15,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				12 Bulan	50,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**74,200,000**						12 Bulan	**86,000,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli				500 Lemba	r 500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	500 Lemb	r 1,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	30,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	35,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan				12 Bulan 1 Orang	43,700,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 1 Orang	50,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**97,500,000**						12 Bulan	**118,500,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional				3 Unit	50,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki				20 Peralat	an 7,500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	20 Peralat	an 8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				1 Gedung	40,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Gedung	50,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase pertambangan yang good mining practices pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur	%		%	80 %	**20,000,000**						80 %	**30,000,000**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	WIUP		WIUP	20 WIUP	**20,000,000**						20 WIUP	**30,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi				20 WIUP	20,000,000	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	20 WIUP	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase rasio elektrifikasi	%		%	99,99 %	**20,000,000**						99,99 %	**30,000,000**	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Badan Usaha yang diawasi	Badan Usaha		Badan Usaha	20 Badan Usaha	**20,000,000**						20 Badan Usaha	**30,000,000**	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan				12 Lapora	n 20,000,000	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	12 Lapora	n 30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	survey kepuasan pelayanan internal	%		%	90 %	**339,640,000**						90 %	**387,600,000**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**25,000,000**						1 Laporan	**30,000,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan				3 Orang	25,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Orang	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**91,100,000**						12 Bulan	**108,600,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli				8 Jenis	3,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	8 Jenis	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang dibeli				5 Buah	2,500,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Buah	3,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah fotocopy Jumlah jenis barang cetak Jumlah penjilidan yang dibayarkan				14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 6,600,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 7,600,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli				2 Jenis	6,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	7,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				5 Jenis	18,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Jenis	20,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat dan makan dan minuman tamu				200 Pax	10,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	200 Pax	12,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				12 Bulan	45,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	55,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**170,700,000**						12 Bulan	**191,000,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli				500 Lembar	600.000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	500 Lembar	1,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	51,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga kemanan yang dipekerjakan				1 Orang	0	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Orang	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan				12 Bulan 3 Orang	119,100,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 3 Orang	130,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**52,840,000**						12 Bulan	**58,000,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional				3 Unit	45,340,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	50,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki				20 Peralat	an 7,500,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	20 Peralatan	8,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				1 Gedung	0	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Gedung	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase pertambangan yang good mining practices pada Cabang Dinas Dinas ESDM Wilayah Bangka	%		%	80 %	**20,000,000**						80 %	**30,000,000**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	WIUP		WIUP	20 WIUP	**20,000,000**						20 WIUP	**30,000,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP yang diawasi				20 WIUP	20,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	20 WIUP	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase rasio elektrifikasi	%		%	99,99 %	**20,000,000**						99,99 %	**30,000,000**	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Badan Usaha yang diawasi	Badan Usaha		Badan Usaha	20 Badan Usaha	**20,000,000**						20 Badan Usaha	**30,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan				12 Laporan	20,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	12 Lapora	n 30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat	%		%	95 %	**447,350,000**						95 %	**497,500,000**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**25,000,000**						1 Laporan	**30,000,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan				3 Orang	25,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Orang	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**95,750,000**						12 Bulan	**113,000,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli				8 Jenis	3,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	8 Jenis	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang dibeli				5 Buah	2,500,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Buah	3,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy Jumlah jenis barang cetak Jumlah penjilidan yang dibayarkan				14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 8,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 9,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli				2 Jenis	6,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	7,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				5 Jenis	18,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan		Aparatur Perangkat Daerah	5 Jenis	20,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat dan makan dan minuman tamu				200 Pax	13,250,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	200 Pax	15,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				12 Bulan	45,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	55,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**269,100,000**						12 Bulan	**291,000,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli				500 Lemba	r 600,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	500 Lemb	r 1,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	35,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	40,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga kemanan yang dipekerjakan				2 Orang	0	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Orang	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan				12 Bulan 6 Orang	233,500,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 6 Orang	250,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**57,500,000**						12 Bulan	**63,500,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasiona				3 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	55,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki				20 Peralatan	7,500,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	20 Peralatan	8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				1 Gedung	0	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Gedung	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase pertambangan yang good mining practices pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat	%		%	80 %	**20,000,000**						80 %	**30,000,000**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	WIUP		WIUP	20 WIUP	**20,000,000**						20 WIUP	**30,000,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi				20 WIUP	20,000,000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	20 WIUP	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase rasio elektrifikasi	%		%	99,99 %	**20,000,000**						99,99 %	**30,000,000**	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Badan Usaha yang diawasi	Badan Usaha		Badan Usaha	20 Badan Usaha	**20,000,000**						20 Badan Usaha	**30,000,000**	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan				12 Lapora	n 20,000,000	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah	12 Lapora	n 30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**														
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	%		%	95 %	**402,700,000**						95 %	**457,000,000**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**25,000,000**						1 Laporan	**30,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan				3 Orang	25,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Orang	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**94,500,000**						12 Bulan	**107,500,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli				8 Jenis	3,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	8 Jenis	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang dibeli				5 Buah	2,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Buah	3,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy Jumlah jenis barang cetak yang dibeli Jumlah Penjilidan yang dibayarkan				14000 Lembar 2 Jenis 200 Buah	7,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	14000 Lembar 2 Jenis 200 Buah	8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yang dibeli				2 Jenis	6,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	7,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				5 Jenis	18,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Jenis	20,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat dan makan dan minuman tamu				200 Pax	12,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	200 Pax	15,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				12 Bulan	45,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	50,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**185,700,000**						12 Bulan	**211,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli				500 Lembar	600,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	500 Lembar	1,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	27,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga kemanan yang dipekerjakan				1 Orang	0	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Orang	0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan				12 Bulan 4 Orang	158,100,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 4 Orang	180,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**97,500,000**						12 Bulan	**108,500,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional				3 Unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	55,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki				20 Peralat	an 7,500,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	20 Peralat	an 8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara				1 Gedung	40,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	1 Gedung	45,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase pertambangan yang good mining practices pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	%		%	80 %	**25,000,000**						80 %	**35,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	WIUP		WIUP	20 WIUP	**25,000,000**						20 WIUP	**35,000,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi				25 WIUP	25,000,000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	25 WIUP	35,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase rasio elektrifikasi	%		%	99,99 %	**25,000,000**						99,99 %	**35,000,000**	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Badan Usaha yang diawasi	Badan Usaha		Badan Usaha	20 Badan Usaha	**25,000,000**						20 Badan Usaha	**35,000,000**	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan				12 Lapora	n 25,000,000	Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	12 Lapora	n 35,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						[illegible]							[illegible]	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey kepuasan pelayanan internal Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung	%		%	95 %	**322,700,000**						95 %	**389,000,000**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**25,000,000**						1 Laporan	**30,000,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola administrasi keuangan				3 Orang	25,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Orang	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**104,000,000**						12 Bulan	**132,500,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli				8 Jenis	3,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	8 Jenis	4,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang dibeli				5 Buah	2,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Buah	3,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy Jumlah jenis barang cetak yang dibeli Jumlah Penjilidan yang dibayar				14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 7,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	14000 Lem 2 Jenis 200 Buah	ar 8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan dibayarkan				2 Jenis	6,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	2 Jenis	7,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dibeli				5 Jenis	20,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	5 Jenis	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat dan makan dan minuman tamu				200 Pax	15,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	200 Pax	20,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				12 Bulan	50,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**136,200,000**						12 Bulan	**158,000,000**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibeli				500 Lemba	r 600,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	500 Lemb	r 1,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	15,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan	17,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembelian bahan Kebersihan kantor Jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan				12 Bulan 3 Orang	120,600,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	12 Bulan 3 Orang	140,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**57,500,000**						12 Bulan	**68,500,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa dan biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional				3 Unit	50,000,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	3 Unit	60,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki				20 Peralat	an 7,500,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Aparatur Perangkat Daerah	20 Peralat	an 8,500,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	Persentase pertambangan yang good mining pratices pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung	%		%	80 %	**20,000,000**						80 %	**30,000,000**	
3	**29**	**03**	1.01		**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi	WIUP		WIUP	20 WIUP	**20,000,000**						20 WIUP	**30,000,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah WIUP aktif diawasi				20 WIUP	20,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Tata Kelola Pertambangan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan Pertambangan	20 WIUP	30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase rasio elektrifikasi	%		%	99,99 %	**20,000,000**						99,99 %	**30,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**	Jumlah Badan Usaha yang diawasi	Badan Usaha		Badan Usaha	20 Badan Usaha	**20,000,000**						20 Badan Usaha	**30,000,000**	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan izin operasi ketenagalistrikan				12 Lapora	n 20,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Aparatur Perangkat Daerah, Perusahaan dan Steakholder	12 Lapora	n 30,000,000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**16.540.652.077**							**16.763.286.454**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	%		%	82 %	**15,594,556,577**						82 %	**15,773,440,000**	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	12 Dokum	n **79,400,000**						12 Dokum	n **91,500,000**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD				5 Dokume	n 75,300,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5 Dokume	n 85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evalusi kinerja PD				7 Dokume	n 4,100,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	7 Dokume	n 6,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13,318,127,164**							**13,415,525,000**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja				98 Orang 20 Orang	13,318,127,164	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keuangan	98 Orang 20 Orang	13,415,525,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Laporan	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keuangan	1 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**149.400.000**						80 Persen	**198.615.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				10 Jenis	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	10 Jenis	5,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli				10 Jenis	12,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	10 Jenis	12,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia				10 Jenis	7,600,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	10 Jenis	7,715,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				6 Unit	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	6 Unit	5,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				50 Eksemp 40000 Lem	ar 12,000,000 ar	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	50 Eksemp 40000 Lem	lar 13,250,000 ar	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				108 Eksem	lar 1,800,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	108 Eksem	lar 1,950,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia				516 Pax 450 Pax	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	516 Pax 450 Pax	7,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan				77 Orang 7 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	77 Orang 7 Orang	145,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,972,300,000**							**1,987,800,000**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				952 buah 127 buah	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	952 buah 127 buah	5,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	120,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	135,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan Kantor Jasa Perlengkapan Kantor				0 Jasa 0 Jasa	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Jasa 0 Jasa	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pramubakti Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan Jumlah tenaga supir				29 Orang 8 Orang 9 Orang 3 Orang	1,847,300,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 Orang 8 Orang 9 Orang 3 Orang	1,847,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**75,329,413**							**80,000,000**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				4 Unit	28,468,312	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	4 Unit	30,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				2 Unit	36,861,101	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	2 Unit	39,550,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				1 Paket	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Paket	5,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor yag terpelihara				0 Gedung	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	0 Gedung	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara				1 paket	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 paket	5,150,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya	persentas	e	persentase	100 perse	tase **41,000,000**						100 perse	ntase **45,500,000**	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**						**41,000,000**							**45,500,000**	
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Distributor/ Pengecer				3 Distribut	or/Pengecer 20,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3 Distribut	or/Pengecer 22,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Produk bahan berbahaya				1 Produk	20,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	1 Produk	22,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Barang terdistribusi	persentas	e	persentase	65 persent	ase **209,700,000**						65 persen	t ase **225,000,000**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	Jumlah Komoditas yang dikelola	TON		TON	200 TON	**209,700,000**						200 TON	**225,000,000**	
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pengelolaan yang dibina				3 lokasi	209,700,000	Kab. Bangka, Mendo Barat, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Toboali, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Komoditas yang dikelola	3 lokasi	225,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas						0					Tersedianya Komoditas yang dikelola		0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase ketersedian Bapokting	persentas	e	persentase	85 persent	ase **224,895,500**						85 persen	t ase **235,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**						**33,000,000**							**35,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasion	Daerah				
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok				8 Distribut	or/Sub 33,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	8 Distribut	or/Sub 35,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**						**152,300,000**							**156,500,000**	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan stok				84 Lapora	n 37,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tercapainya Nilai Koefisien Variasi	84 Lapora	n 40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar				14 lokasi	114,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tercapainya Nilai Koefisien Variasi	14 lokasi	116,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**						**39,595,500**							**44,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan				2 Laporan	21,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pengawasan Pelaku Usaha	2 Laporan	23,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi				11 Dokum	n 18,595,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pengawasan Pelaku Usaha	11 Dokum	n 20,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	USD Juta		USD Juta	1000 USD Juta	**235,000,000**						1000 USD Juta	**240,000,000**	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	Jumlah Eksportir/Calon Eksportir	SDM		SDM	45 SDM	**235,000,000**						45 SDM	**240,000,000**	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Produk Dagang				6 Produk	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Akses Pasar Ekspor	6 Produk	122,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir/Calon Eksportir				45 SDM	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Akses Pasar Ekspor	45 SDM	117,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Indeks Keberdayaan Konsumen	mampu		mampu	42 mampu	**170,500,000**						42 mampu	**176,346,454**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Responden	Responde	n	Responden	100 Respo	nden **100,500,000**						100 Respo	nden **104,346,454**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Responden				100 Respo	nden 40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen;Meningkatnya Konsumen yang teredukasi	100 Respo	nden 41,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang Beroperasional				3 LPK	20,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen;Meningkatnya Konsumen yang teredukasi	3 LPK	21,846,454	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)				40 Pengad	an 40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen;Meningkatnya Konsumen yang teredukasi	40 Pengad	an 41,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	%		%	100 %	**70,000,000**						100 %	**72,000,000**	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Jenis Barang yang diawasi				11 barang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	11 barang	72,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	persentas	e	persentase	60 persent	ase **65,000,000**						60 persen	ase **67,500,000**	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**						**65,000,000**							**67,500,000**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang				8 Produk	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Permintaan Dagang	8 Produk	67,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						1.015.500.000							5.647.750.000	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertumbuhan jumlah industri	persentas	e	persentase	3 persenta	se **900,000,000**						3 persenta	se **5,527,750,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**						**900,000,000**							**5,527,750,000**	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina				26 IKM	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan industri	26 IKM	121,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI				200 Produ	k 280,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan industri	200 Produ	k 281,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna				0 Kelompo	k 0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan industri	0 Kelompo	k 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda Jumlah SDM Indutsri yang terlatih				350 Pelaku Industri 80 SDM Industri	500,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan industri	350 Pelak Industri 80 SDM Industri	5,125,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	persentas	e	persentase	80 persent	ase **115,500,000**						80 persen	t ase **120,000,000**	
3	**31**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**						**115,500,000**							**120,000,000**	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IUPI yang dipantau				5 Komitme	n 32,500,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpantaunya Industri	5 Komitme	n 35,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah IUI yang diawasi				50 IUI	83,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpantaunya Industri	50 IUI	85,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**0**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**						**0**							**0**	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS				0 industri	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		0 industri	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**551.746.627**							**574.010.000**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD BPSMB)	%		%	80 %	**321,746,627**						80 %	**336,410,000**	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**0**							**0**	
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keuangan	0 Laporan	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**13,500,000**	
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal				18 ASN	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat		18 ASN	13,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**131.900.000**							**135.660.000**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				10 Jenis	1,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	10 Jenis	1,325,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	1 Paket	5,750,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				2 Eksempl 30000 Lem	ar 15,000,000 ar	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	2 Eksempl 30000 Lem	ar 15,525,000 ar	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				125 Eksem	lar 900,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	125 Eksem	lar 955,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	umlah makan dan minum Tamu yang tersedia ; Jumlah makan dan minum Rapat yang tersedia				200 Pax	15,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	200 Pax	15,855,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan				149 Orang 63 Orang	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	149 Orang 63 Orang	96,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**0**						80 Persen	**0**	
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia				0 Paket	0	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	0	0 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**146,000,000**						80 Persen	**150,500,000**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				100 buah 30 buah	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 buah 30 buah	21,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	126,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	129,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**33,846,627**							**36,750,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				3 Unit	30,046,627		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Mililk Daerah	3 Unit	32,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia				2 Paket	3,800,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Mililk Daerah	2 Paket	4,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				0 Gedung	0	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Mililk Daerah	0 Gedung	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				0 Paket	0	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpeliharanya Barang Mililk Daerah	0 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Layanan Terstandarisasi (UPTD BPSMB)	%		%	100 %	**230,000,000**						100 %	**237,600,000**	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**						**230,000,000**							**237,600,000**	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi yang di verifikasi				4 Komodit	i 90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk diseluruh daerah kabupaten kota	4 Komodit	i 92,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sample yang di uji				250 Samp	I 70,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk diseluruh daerah kabupaten kota	250 Samp	I 72,550,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi				10 Alat	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk diseluruh daerah kabupaten kota	10 Alat	72,550,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	%		%	60 %	**189,220,000**						60 %	**190,120,000**	
3	**30**	**07**	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**						**189,220,000**							**190,120,000**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitasi Produk				20 Produk	189,220,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Produk yang Siap dipasarkan	20 Produk	190,120,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**4.350.780.000**							**4.606.260.000**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD RPK)	%		%	80 %	**273,200,000**						80 %	**281,260,000**	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	Persen		Persen	80 Persen	**31,938,010**						80 Persen	**32,350,000**	
3	31	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Laporan	31,938,010	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keuangan	1 Laporan	32,350,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**148.161.990**						80 Persen	**151.895.000**	
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				10 Jenis	3,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	10 Jenis	3,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	22,200,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	1 Paket	23,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia				10 Jenis	7,131,990	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	10 Jenis	7,355,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				5 Eksempl 10000 Lem	ar 12,900,000 ar	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	5 Eksempl 10000 Lem	ar 13,325,000 ar	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				0 Eksempl	ar 0	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	0 Eksempl	ar 0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia				80 Pax 12 Pax	7,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	80 Pax 12 Pax	8,215,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan				24 Orang 10 Orang	95,130,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Umum	24 Orang 10 Orang	96,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**5,000,000**						80 Persen	**5,250,000**	
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia				2 Jenis	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	0	2 Jenis	5,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**82,100,000**						80 Persen	**85,215,000**	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				200 Lemba 73 Paket	r 4,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	200 Lemb 73 Paket	r 5,215,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	77,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	80,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey kepuasan pelayanan umum	Persen		Persen	80 Persen	**6,000,000**						80 Persen	**6,550,000**	
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				0 Gedung	0	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	0 Gedung	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				4 Unit	6,000,000	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	4 Unit	6,550,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertumbuhan jumlah industri (UPTD RPK)	%		%	5 %	**4,077,580,000**						5 %	**4,325,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**						**4,077,580,000**							**4,325,000,000**	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk				200 Fasilit	asi 4,077,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Fasilitasi Produk	200 Fasilit	asi 4,325,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**6.656.296.064**							**1.735.000.000**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**6,656,296,064**							**1,735,000,000**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**						**89.151.717**							**335.000.000**	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						40,000,000							150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						15.625.921							35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah						33.525.796							150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**						**342.144.347**							**950.000.000**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						111,568,488							250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						120,194,410							250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						110,381,449							450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**						**6.225.000.000**							**450.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah						6,025,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						100.000.000							150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						100.000.000							150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**49.976.370.000**							**1.735.000.000**	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	%		%	80 %	**49,976,370,000**						80 %	**1,735,000,000**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	Persentase Rekomendasi Bidang Bina Mental Spiritual yang dibuat	%		%	80 %	**9,038,514,058**						80 %	**1,400,000,000**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Sarana dan Prasarana Spiritual				5 Berkas	7,938,514,058		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual	5 Berkas	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Kelembagaan Bina Spiritual				7 Berkas	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual	7 Berkas	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dibuat	%		%	80 %	**40,787,855,942**						80 %	**210,000,000**	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pendidikan				2 Berkas	506,485,942		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kebijakan Pelayanan Dasar	2 Berkas	55,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kesehatan				2 Berkas	585,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Kebijakan Pelayanan Dasar	2 Berkas	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Sosial				2 Berkas	39,696,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kebijakan Pelayanan Dasar	2 Berkas	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**04**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	Persentase Rekomendasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dibuat	%		%	80 %	**150,000,000**						80 %	**125,000,000**	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan				1 Berkas	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kebijakan Non Pelayanan Dasar	1 Berkas	55,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Bahan Usulan Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Berkas	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kebijakan Non Pelayanan Dasar	1 Berkas	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**													1.250.000.000	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**691,505,838**							**1,250,000,000**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**						**532,255,994**							**850,000,000**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Raperda				35 Pergub 10 Raperd	285,883,141		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		35 Pergub 10 Raperd	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Gubernur				500 Kepgu	b 48,484,515		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		500 Kepgu	b 150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Bahan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Bahan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Bahan Penyusunan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Bahan Produk Hukum Daerah yang dipublikasi				100 NHL 100 PHD 100 NHL 100 PHD	135,545,130		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 NHL 100 PHD 100 NHL 100 PHD	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III Jumlah Bahan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III				7 Raperda 7 Raperka 7 Raperda 7 Raperka 7 Raperda 7 Raperka	62,343,208		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 Raperda 7 Raperka 7 Raperda 7 Raperka 7 Raperda 7 Raperka	da 150,000,000 da da	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**						**159.249.844**							**400.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bahan Penyelesaian Sengketa Hukum untuk Proses Persidangan Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Kasus 1 Laporan	115,857,029				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 Kasus 1 Laporan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Bahan Pelaporan RANHAM Jumlah Bahan Usulan Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin				1 Laporan 45 Orang	43,392,815		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 Laporan 45 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**413.872.133**							**3.395.000.000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**95,478,336**							**545,000,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**95,478,336**							**545,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (DOKREN)				4 Dokume	n 60,311,794		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 Dokume	n 345,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD (DALEV)				8 Dokume	n 35,166,542		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		8 Dokume	n 200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**149,298,058**							**2,350,000,000**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**						**34,401,216**							**1,050,000,000**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						22,682,826		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			800,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						11,718,390		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**						**84,665,994**							**750,000,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						11,705,349		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						44,450,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						28,510,385		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**						**30,230,848**							**550,000,000**	
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						20,230,848		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**169,095,739**							**500,000,000**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**108,736,530**							**250,000,000**	
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						108,736,530		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**60,359,209**							**250,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						60,359,209		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						1.307.785.975							5.100.000.000	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	Pengadaan Barang dan Jasa	0		0	100 0	**1,307,785,975**						100 0	**5,100,000,000**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	%		%	50 %	**570,000,000**						50 %	**2,400,000,000**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa				1 Resume	50,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Resume	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tindaklanjut usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa				100 %	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100 %	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pemantauan monev pemantauan barang/jasa				1 Laporan	20,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%		%	50 %	**570,000,000**						50 %	**2,400,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik				1 Laporan	500,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	SPSE	1 Laporan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah sistem PBJ yang dikembangkan				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	SPSE	1 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi PBJ				1 Laporan	20,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	SPSE	1 Laporan	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	%		%	50 %	**167,785,975**						50 %	**300,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pembinaan SDM PBJ				1 Laporan	57,785,975	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	SDM dan Kelembagaan UKPBJ	1 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah lembaga UKPBJ yang dibina				1 Laporan	55,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	SDM dan Kelembagaan UKPBJ	1 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan tentang pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek Pengadaan Barang/Jasa				1 Laporan	55,000,000	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	SDM dan Kelembagaan UKPBJ	1 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**														
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	persentase kebijakan Manajemen Perubahan, Penataan Dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang tersusun	Persen		Persen	80 Persen	**573,608,500**						80 Persen	**150,000,000**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**						**190,000,000**							**150,000,000**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Usulan PD yang menyusun kebijakan evaluasi terhadap Organisasinya				32 PD	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	32 PD	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang menyusun kebijakan Penataan Organisasi berdasarkan hasil evaluasi				7 Kab/kota	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	7 Kab/kot	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisa Jabatan, evaluasi jabatan dan peta jabatannya				32 PD	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	0	32 PD	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**						**383,608,500**							**0**	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan tugas Tim dan Dokumen Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai standar RB				32 PD	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		32 PD	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja				32 PD	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		32 PD	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah PD yang menyusun kebijakan laporan Evaluasi Implementasi perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai standar RB				32 PD	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		32 PD	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun kebijakan Peta Proses Bisnis dan SOP				1 Probis dan SOP	40,608,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 Probis dan SOP	0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan standar pelayanan, pelayanan prima, pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan teknologi informasi untuk pelayanan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat				10 PD 10 PD	153,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 PD 10 PD	0	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**77.571.112.888**							**77.571.112.888**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Survei kepuasan pelayanan internal	Persen		Persen	95 Persen	**77,571,112,888**						95 Persen	**77,571,112,888**	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**42,671,579,982**							**42,671,579,982**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				274 orang	42,671,579,982		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Keuangan Perangkat Daerah	274 orang	42,671,579,982	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan atas Pemenuhan Kewajiban Pelunasan PBB	%		%	95 %	**175,000,000**						95 %	**175,000,000**	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembayaran PBB Gedung Pemerintah				44 Unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas pemenuhan kewajiban pelunasan	44 Unit	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**15,850,000**							**15,850,000**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya yang di adakan				6 stel	15,850,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas pemenuhan kebutuhan kepegawaian	6 stel	15,850,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas pemenuhan kebutuhan kepegawaian		0	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Survey Kepuasan atas Pelayanan Umum	%		%	80 %	**8.803.932.010**						80 %	**8.803.932.010**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah capaian penyediaan alat listrik dan elektronik				12 bulan	169,592,970		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	169,592,970	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	40,066,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	40,066,300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah capaian penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan				12 bulan	37,043,420					Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	37,043,420	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah capaian penyediaan bahan logistik kantor				12 bulan	65,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	65,065,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Capaian Penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	357,378,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	357,378,320	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dilingkungan setda				12 bulan	84,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	84,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Capaian Penyediaan alat tulis kantor				12 bulan	400,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Capaian fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	5,366,535,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	5,366,535,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah capaian penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	2,284,251,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Umum	12 bulan	2,284,251,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0**							**0**	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan ats Pengadaan Barang bagi Pengguna		0	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan ats Pengadaan Barang bagi Pengguna		0	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	80 %	**12,849,493,680**						80 %	**12,849,493,680**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah capaian benda pos yang di beli dan jasa pengiriman surat/barang				12 bulan	40,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang	12 bulan	40,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan,rekening listrik,air,telepon/Fax,TV kabel,Virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	3,543,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang	12 bulan	3,543,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah capaian penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	1,537,493,680		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang	12 bulan	1,537,493,680	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PHL yang di pekerjakan				205 orang	7,728,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Penyediaan Jasa	205 orang	7,728,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Survey Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	%		%	80 %	**7,333,911,527**						80 %	**7,333,911,527**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				18 unit	897,705,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	18 unit	897,705,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara				83 unit	2,467,219,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	83 unit	2,467,219,150	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang di pelihara				3 jenis	43,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	3 jenis	43,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara				7 jenis	409,338,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	7 jenis	409,338,300	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi				11 jenis	2,618,939,421		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	11 jenis	2,618,939,421	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara				9 jenis	897,709,156					Kepuasan atas Pelayanan Pemeliharaan Barang	9 jenis	897,709,156	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Survey Kepuasan atas pemenuhan hak KDH dan WKDH	%		%	90 %	**1,585,496,217**						90 %	**1,585,496,217**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						245,046,217		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			Kepuasan atas Pemenuhan hak KDh dan WKDH		245,046,217	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KDH dan WKDH				10 pasang	/pcs 34,200,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pemenuhan hak KDh dan WKDH	10 pasang	/pcs 34,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah yang melaksanakan medical Check UP				6 orang	56,250,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			Kepuasan atas Pemenuhan hak KDh dan WKDH	6 orang	56,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1,250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pemenuhan hak KDh dan WKDH		1,250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Survey Kepuasan atas Pelayanan Kerumahtanggaan	%		%	95 %	**2,002,992,296**						95 %	**2,002,992,296**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah capaian penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH				12 bulan	879,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas pelayanan Kerumahtanggaan	12 bulan	879,008,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah capaian penyediaan kebutuhan rumah tangga WKDH				12 bulan	608,137,296		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas pelayanan Kerumahtanggaan	12 bulan	608,137,296	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah capaian penyediaan kebutuhan rumah tangga setda				12 bulan	515,847,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas pelayanan Kerumahtanggaan	12 bulan	515,847,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	Survey Kepuasan atas Pelayanan Komunikasi Pimpinan	%		%	95 %	**1,246,309,925**						95 %	**1,246,309,925**	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah capaian fasilitasi komunikasi pimpinan				12 bulan	1,246,309,925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Komunikasi Pimpinan	12 bulan	1,246,309,925	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**	Kepuasan atas Pelayanan Keprotokolan	%		%	95 %	**886,547,251**						95 %	**886,547,251**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah capaian fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara				12 bulan	59,634,251		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Keprotokolan	12 bulan	59,634,251	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah capaian pengelolaan hubungan keprotokolan				12 bulan	826,913,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kepuasan atas Pelayanan Keprotokolan	12 bulan	826,913,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						100.501.094.000							**0**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai SAKIP PD (SETWAN)	Nilai		Nilai	80 Nilai	**64,179,059,224**						80 Nilai	**0**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokum	n **128,855,327**						11 Dokum	n **0**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				11 Dokum	n 128,855,327		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 Dokum	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,055,026,738**							**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan				80 Orang	11,055,026,738	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		80 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang		orang	20 orang	**164,320,000**						20 orang	**0**	
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai ASN yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan Formal				20 orang	82,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai ASN yang ikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				20 Orang	82,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Jenis		Jenis	2 Jenis	**1,795,209,661**						2 Jenis	**0**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia				1 Jenis	31,994,922		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Jenis	21,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia				2 Jenis	7,395,568		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan jumlah penggandaan				3 Jenis 125000 Le	317,251,151 mbar		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 Jenis 125000 Le	0 mbar	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia				44148 Eks	emplar 276,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44148 Eks	emplar 0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan / material yang tersedia				2 Jenis	470,772,020		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				100 kali	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100 kali	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan				24 kali	440,286,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24 kali	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	**600,000,000**						4 Jenis	**0**	
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan				4 Jenis	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jenis		Jenis	9 Jenis	**8,828,607,913**						9 Jenis	**0**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				9000 Lemb 200 paket	ar 60,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9000 Lem 200 paket	ar 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/ Fax , TV Kabel, Virtual Meeting yang dibayarkan				12 bulan	723,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 Jenis	35,902,913		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				9 Jenis	8,008,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit		Unit	17 Unit	**1,902,990,000**						17 Unit	**0**	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				17 Unit	555,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan				3 Jenis	347,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	Nilai		Nilai	92 Nilai	**39,704,049,585**						92 Nilai	**0**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani				45 Orang	38,756,349,585	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Atribut DPRD yang Tersedia jumlah pakaian dinas DPRD yang tersedia				45 Atribut 225 Stel	497,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45 Atribut 225 Stel	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi Medical Chek UP				45 Orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentase meningkatnya fungsi lembaga DPRD (SETWAN)	Persen		Persen	82 Persen	**36,322,034,776**						82 Persen	**0**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	Jumlah produk hukum yang dikaji	Produk hukum		Produk hukum	5 Produk hukum	6.920.934.800						5 Produk hukum	**0**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan kegiatan Bapemperda Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Laporan 1 Dokume	814,579,600 n		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Laporan 1 Dokume	0 n	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas				7 Raperda	/Raprokum5,608,830,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Raperda	/Raprokum 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah produk hukum yang dikaji				2 Produk hukum	119,174,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Produk hukum	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteranga n dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Naskah Akademik	378,351,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 Naskah Akademik	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Dibahas	Dokumen		Dokumen	1 Dokume	n **933,865,195**						1 Dokume	n **0**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang Dibahas				1 Dokume	n 159,209,523		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokume	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Dibahas				1 Dokume	n 159,209,523		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokume	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah APBD yang Dibahas				1 Dokume	n 159,209,523		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokume	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Perubahan APBD yang Dibahas				1 Dokume	n 159,209,523		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokume	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Semester yang Dibahas				1 Laporan	137,817,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas				1 Dokume	n 159,209,523		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokume	n 0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		Laporan	20 Lapora	n **14,403,678,572**						20 Lapora	n **0**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum				78 laporan	7,421,390,572		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	78 laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				40 Lapora	n 1,540,723,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	40 Lapora	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				60 Lapora	n 2,173,022,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	60 Lapora	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				60 Lapora	n 2,280,066,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	60 Lapora	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				20 Lapora	n 633,412,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	20 Lapora	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Laporan	106,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Laporan	248,692,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Kegiatan Dewan yang Dipublikasikan dan Didokumentasikan	Publikasi		Publikasi	200 Publik	si **2,373,296,431**						200 Publik	si **0**	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Bimbingan Teknis				90 kali	550,223,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	90 kali	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan Dewan yang Dipublikasikan dan Didokumentasikan				200 Publik	si 887,073,231	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200 Publik	si 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Tersedia				7 Orang	500,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Tersedia				7 Orang	435,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Reses yang Dilaksanakan	Kali		Kali	3 Kali	**5,583,815,984**						3 Kali	**0**	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang Dilaksanakan				2 Kali	5,583,815,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Kali	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan	Peraturan		Peraturan	2 Peratura	n **176,907,794**						2 Peratura	n **0**	
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang Ditetapkan				2 Peratura	n 128,907,794		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Peratura	n 0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Kinerja Bidang Pengawasan DPRD yang Dipublikasikan				6 Laporan	48,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	Tugas		Tugas	240 Tugas	**5,929,536,000**						240 Tugas	**0**	
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Tugas Badan Musyawarah				6 Laporan	413,740,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi				240 Tugas	5,515,795,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240 Tugas	0	SEKRETARIAT DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**01**				**PERENCANAAN**						15.856.534.501							18.333.900.000	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD (Bappeda)	Angka		Angka	83,27 Angk	**14,174,938,400**						83,27 Ang	**16,423,900,000**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	Dokumen		Dokumen	2 Dokume	n **40,582,432**						2 Dokume	n **75,000,000**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD				2 Dokume	n 30,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder	2 Dokume	n 50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evalusi kinerja PD				4 Dokume	n 10,382,432	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder	4 Dokume	n 25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang menrima gaji dan tunjangan dan pengelola adminitrasi keuangan	Pegawai		Pegawai	78 Pegawa	i **10,650,538,055**						78 Pegaw	i **13,015,000,000**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menrima gaji dan tunjangan dan pengelola adminitrasi keuangan				78 Pegawa	i 10,650,538,055	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	78 Pegaw	i 13,000,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran				2 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	2 Laporan	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikkan dan pelatihan formal	ASN		ASN	10 ASN	**143,775,000**						10 ASN	**180,000,000**	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikkan dan pelatihan formal				10 ASN	143,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	10 ASN	180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis		Jenis	5 Jenis	**1,077,899,793**						5 Jenis	**1,440,000,000**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersediia				7 Jenis	30,328,265	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	7 Jenis	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Jenis	128,801,951	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	6 Jenis	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				5 Jenis	54,998,470	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	5 Jenis	65,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia				4 Jenis 6500 Kota	178,666,000 h	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	4 Jenis 6500 Kota	220,000,000 h	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				1300 Ekse 100000 Le	ar 68,400,413 mbar	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	1300 Ekse 100000 Le	plar 75,000,000 mbar	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				276 Eksem	lar 39,600,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	276 Eksem	lar 45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan				120 Pegaw	ai 46,255,344	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	120 Pegaw	ai 50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah				141 Kali 71 Kali	530,849,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	141 Kali 71 Kali	750,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	**300,000,000**						6 Jenis	**0**	
5	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Jenis	300,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	6 Jenis	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di bayarkana	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,266,488,000**						12 Bulan	**1,273,900,000**	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan Jumlah Surat/Barang yang dikirim				2500 Buah 1 Tahun	34,988,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	2500 Buah 1 Tahun	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, TV Kkabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	207,600,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	12 Bulan	210,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di bayarkana				12 Bulan	1,023,900,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	12 Bulan	1,023,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Jenis		Jenis	10 Jenis	**695,655,120**						10 Jenis	**440,000,000**	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				5 Unit	123,210,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	5 Unit	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset Tetap Lainnya yang dipelihara				10 Jenis	9,600,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	10 Jenis	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						317,878,700	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah BBM Genset Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kant atau Bangunan Lainnya yang di Pemeliharaan/Rehabilit	or asi			8100 Liter 7 Jenis	244,966,420	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Pegawai Bappeda	8100 Liter 7 Jenis	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	%		%	100 %	**904,098,218**						100 %	**990,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokume	n **536,092,918**						2 Dokume	n **640,000,000**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						187,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat		200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik				1 Dokume	n 35,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Dokume	n 80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Forum PD/ForumLintas PD				1 Dokume	n 95,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Dokume	n 130,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang				1 Dokume	n 59,092,918	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Dokume	n 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumenperencanaan pembangunan daerah				1 Laporan	160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	230,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah data PD yang diverifikasi dan dianalisis	Data		Data	500 Data	**96,833,300**						500 Data	**170,000,000**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data PD yang diverifikasi dan dianalisis				500 Data	30,450,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	500 Data	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan data update dalam Aplikasi yang disusun				1 Laporan	66,383,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	90,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah laporan pengendaian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Laporan		Laporan	21 Lapora	n **271,172,000**						21 Lapora	n **180,000,000**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat		120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi/evaluasi perencanaankabupaten yang dilaksanakan	/kota			7 Laporan	46,172,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	7 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100/90 %	**777,497,883**						100/90 %	**920,000,000**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang disusun	Laporan		Laporan	2 Laporan	**364,547,150**						2 Laporan	**450,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyusunandokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahanyang disusun				2 Laporan	50,415,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan yang disusun				4 Laporan	38,564,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	4 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun				1 Laporan	56,453,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang disusun				2 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangka Daerah Bidang Pembangunan Manusiayang disusun	t			4 Laporan	44,114,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	4 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaanSinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun				2 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	170,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun	Laporan		Laporan	2 Laporan	**227,089,300**						2 Laporan	**300,000,000**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJMD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun				2 Laporan	41,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang tersusun				4 Laporan	23,499,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	4 Laporan	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang tersusun				1 Laporan	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun				2 Laporan	23,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitorin dan Evaluasi Penyusuna Dokumen PerencanaanPembangu Daerah Bidang SDA ya tersusun	g n nan g			4 Laporan	49,778,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	4 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang tersusun				1 Laporan	52,938,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dilakasanakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	**185,861,433**						4 Laporan	**170,000,000**	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Laporan	67,804,330	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang dilakasanakan				4 Laporan	36,302,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	4 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Laporan	52,553,103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	2 Laporan	65,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	JumlahLaporanHasil Monitoring dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang dilakasanakan				4 Laporan	29,202,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	4 Laporan	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	%		%	80 %	**421,499,442**						80 %	**585,000,000**	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah laporan pengelolaan data penelitian dan pengembangan dan peraturan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**70,000,000**						1 Laporan	**85,000,000**	
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan pengelolaan data penelitian dan pengembangan dan peraturan				1 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	1.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**120,000,000**						1 Laporan	**170,000,000**	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial				1 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan				1 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**120,000,000**						1 Laporan	**170,000,000**	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Laporan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**111,499,442**						1 Laporan	**160,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Laporan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	41,499,442	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Stakeholder dan Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						111.482.415.135							57.190.507.135	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**60,406,670,135**							**54,051,956,135**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**115,560,000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			53,359,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			62,201,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**51,722,389,335**							**51,722,389,335**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				273 orang	51,672,389,335				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		273 orang	51,672,389,335	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50,000,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			50,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**50,000,000**	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			50,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek				10 orang	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 orang	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						1.679.700.000							1.679.700.000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15 jenis	12,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 jenis	12,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor				7 jenis	18,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 jenis	18,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan				18 jenis	600,500,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		18 jenis	600,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan				15 jenis	30,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 jenis	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				480 orang	31,200,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		480 orang	31,200,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi BAKUDA				68 kali	250,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		68 kali	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah asistensi penatausahaan arsip BAKUDA				12 kali	0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 kali	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE yang beropersional dengan baik pada BAKUDA				4 sistem	738,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 sistem	738,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,627,274,000**							**257,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang dibeli jumlah pengiriman surat/barang				350 lemba 556 paket	r 40,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		350 lemba 556 paket	r 40,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan rekening				24 bulan	217,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		24 bulan	217,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis ATK dan bahan pembersih jumlah tenaga honorer				64 jenis 161 orang	6,370,274,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		64 jenis 161 orang	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**227,306,800**							**227,306,800**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	40,497,200	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	40,497,200	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				4 unit	81,809,600	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 unit	81,809,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara				2 unit	5,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 unit	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah BMD peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				170 unit	50,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		170 unit	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor berserta halamannya yang dipelihara				8 unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		8 unit	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**451.800.925.200.3**							**1,722,562,000**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**						**796,366,000**							**796,366,000**	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS				2 dokume	n 61,708,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 dokume	n 61,708,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA dan Perubahan PPAS				2 dokume	n 61,708,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 dokume	n 61,708,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan tersusun				2 peratura	n 289,250,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 peratura	n 289,250,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						295,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			295,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah peraturan tersusun				3 peratura	n 88,700,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 peratura	n 88,700,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**						**211,050,000**							**211,050,000**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Gubernur ttg Evaluasi Perda ttg Pajak & Retribusi Kabupaten/Kota				7 keputusa	n 35,463,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 keputus	an 35,463,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Gubernur ttg evaluasi APBD Kabupaten/Kota				7 keputusa	n 37,612,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 keputus	an 37,612,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur ttg evaluasi perubahan APBD Kabupaten/Kota				7 keputusa	n 37,329,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 keputus	an 37,329,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Gubernur ttg evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				7 keputus	n 38,541,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 keputus	an 38,541,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi permasalahan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten/Kota				7 asistensi	62,105,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 asistensi	62,105,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**						**257,068,000**							**257,068,000**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah data rekonsiliasi atas register SP2D, BKU. Lap.posisi kas				12 dokum	n 48,967,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 dokum	n 48,967,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan anggaran kas yang diterbitkan				12 dokum	n 24,462,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 dokum	n 24,462,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah peraturan tersusun				1 peratura	n 37,650,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 peratura	n 37,650,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Prosentase administrasi penyaluran dana transfer				100 perse	25,487,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 perse	n 25,487,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai di kabupaten / kota				7 kab/kota	38,346,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 kab/kota	38,346,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan rekonsiliasi dengan instansi terkait				12 dokum	n 82,156,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 dokum	n 82,156,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**						**429,472,000**							**458,078,000**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah				12 dokum	n 0	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 dokum	n 28,606,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD				34 asisten	si 47,188,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		34 asisten	si 47,188,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						78,606,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			78,606,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah raperda pertanggungjawaban APBD				1 peratura	n 144,432,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 peratura	n 144,432,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian daerah				5 masalah	100,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 masalah	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan tentang regulasi / kebijakan bidang akuntansi				1 peratura	n 28,693,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 peratura	n 28,693,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan tentang sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah				2 peratura	n 30,553,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 peratura	n 30,553,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**						**450,106,969,200.3**								**0**	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase realisasi bantuan keuangan				95 persen	47,965,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		95 persen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan				95 persen	10,000,000,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		95 persen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase realisasi belanja dana bagi hasil pajak daerah				95 persen	392,141,169,200.30	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		95 persen	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**587,488,000**								**587,488,000**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**															
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah keputusan gubernur tentang penetapan standar harga				1 keputusa	n 63,585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 keputus	an 63,585,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah keputusan Gubernur tentang penetapan RKBMD dan RKPBMDdan				2 keputusa	n 58,076,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 keputus	an 58,076,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersajinya data BMD yang terupdate pada sistem informasi pengelolaan BMD				12 dokum	n 49,027,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 dokum	n 49,027,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen inventarisasi BMD				1 dokume	n 84,764,000	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 dokume	n 84,764,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan BMD				1 dokume	n 78,738,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 dokume	n 78,738,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Keputusan gubernur tentang penetapan penilaian barang milik daerah				3 dokume	n 95,895,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 dokume	n 95,895,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD				1 laporan	45,871,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 laporan	45,871,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan keputusan gubernur terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD				2 dokume	n 48,777,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 dokume	n 48,777,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi BMD				34 dokum	n 37,393,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		34 dokum	n 37,393,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD				2 laporan	25,362,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 laporan	25,362,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**828,501,000**							**828,501,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**828,501,000**							**828,501,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah				2 Peratura	n 66,242,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		2 Peratura	n 66,242,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Spot Sosialisasi pada Media Masa				30 Kali	120,548,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		30 Kali	120,548,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						314,210,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			314,210,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah						124,839,000				Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			124,839,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Target Pendapatan Pajak Daerah				100 Perse	55,750,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 Perse	n 55,750,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				10 OPD	146,912,000	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 OPD	146,912,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**479.404.000**							**479.404.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**352,404,000**							**352,404,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**49.611.000**							**49.611.000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				15 jenis	3,635,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 jenis	3,635,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia				3 jenis 12 jenis	21,229,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 jenis 12 jenis	21,229,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak jumlah penggandaan				10 jenis 5000 lemb	2,107,000 r	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 jenis 5000 lemb	2,107,000 r	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				4 jenis	3,640,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 jenis	3,640,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu				12 bulan	3,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	3,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 bulan	16,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	16,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**185,572,000**							**185,572,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen surat menyurat				12 bulan	1,243,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	1,243,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				36 bulan	117,600,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		36 bulan	117,600,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis ATK yang dibeli				38 jenis	66,729,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		38 jenis	66,729,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**117,221,000**							**117,221,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan				12 bulan	50,738,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	50,738,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	50,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	belanja pemeliharaan A Belanja pemeliharaan komputer PC/Laptop/PrinterBelan pemeliharaan kompute	C ja r			1 unit 12 bulan	16,483,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit 12 bulan	16,483,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**127,000,000**							**127,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**127,000,000**							**127,000,000**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	data kendaraan roda 2 dan roda 4				4500 data	27,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4500 data	27,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah bulan pelayanan dan konsultasi pajak daerah				12 bulan	100,000,000	Kab. Bangka Tengah, Koba, Koba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**604.401.000**							**494.401.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**440,561,000**							**330,561,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**159.000.000**							**49.000.000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik				20 jenis	5,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		20 jenis	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli				100 jenis	80,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 jenis	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor				6 jenis	30,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		6 jenis	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				15 jenis	5,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 jenis	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	2,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	2,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di fasilitasi				300 orang	12,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		300 orang	12,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang mengikuti rapat koordinasi				12 orang	25,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 orang	25,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**86,561,000**							**86,561,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/barang yang dikirim				700 paket	5,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		700 paket	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	81,561,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	81,561,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**195,000,000**							**195,000,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				15 unit	85,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 unit	85,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				34 unit	40,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		34 unit	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	70,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	70,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**163,840,000**							**163,840,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**163,840,000**							**163,840,000**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data kendaraan roda 2 dan roda 4				1000 data	10,000,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1000 data	10,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase realisasi target PAD pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan				100 perse	153,840,000	Kab. Bangka Selatan, Toboali, Toboali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 perse	n 153,840,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**				**KEUANGAN**						**559.350.000**								**569.817.500**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**424,350,000**								**434,817,500**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**92.728.000**								**97.364.400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang komponen listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	2,667,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	2,800,350	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	48,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	50,400,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				12 Bulan	11,986,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	12,585,300	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak				12 Bulan	6,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	6,300,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				12 Bulan	4,800,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	5,040,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ material				12 Bulan	9,100,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	9,555,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu ke UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat				12 Bulan	3,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	3,150,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat				12 Bulan	7,175,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	7,533,750	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**215,000,000**								**215,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/ Barang dikirim				12 Bulan 12 Bulan	40,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan 12 Bulan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan rekening				12 bulan	175,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	175,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**116,622,000**							**122,453,100**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				6 Unit	79,500,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		6 Unit	83,475,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				12 Bulan	26,142,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	27,449,100	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	10,980,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 Unit	11,529,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**135,000,000**							**135,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**135,000,000**							**135,000,000**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak daerah				910 Data	10,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		910 Data	10,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah bulan Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah				12 Bulan	125,000,000	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	125,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**925.620.000**							**925.620.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**730,620,000**							**730,620,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**192.807.000**							**192.807.000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,063,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			6,063,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor				3 jenis	11,163,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 jenis	11,163,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	17,594,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	17,594,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,912,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			2,912,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya jumlah bahan/material				12 bulan	131,160,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	131,160,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti				12 kali	23,915,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 kali	23,915,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**90,073,000**							**90,073,000**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya peratan meubelair kantor				10 unit	62,159,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 unit	62,159,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan gedung kantor				20 unit	27,914,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		20 unit	27,914,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**170,449,000**							**170,449,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim				100 paket	2,273,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 paket	2,273,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang				48 bulan	168,176,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		48 bulan	168,176,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**277,291,000**							**277,291,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara				5 unit	48,666,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 unit	48,666,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				70 unit	46,618,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		70 unit	46,618,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	182,007,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	182,007,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**195,000,000**							**195,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**195,000,000**							**195,000,000**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data kendaraan roda 2 dan roda 4				4000 data	20,000,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4000 data	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya pelayanan dan konsultasi pajak daerah				12 bulan	175,000,000	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	175,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**550.300.000**							**550.300.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**419,780,000**							**419,780,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**128.280.000**							**128.280.000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				17 jenis	8,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		17 jenis	8,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						53,629,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			53,629,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan bahan logistik kantor				12 bulan	25,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	25,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan				15 jenis 10 lembar	5,651,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 jenis 10 lembar	5,651,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				5 jenis	6,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 jenis	6,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan fasilitas tamu				12 bulan	5,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	5,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				8 orang	25,000,000	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		8 orang	25,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**130,000,000**							**130,000,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				625 lemba	r 14,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		625 lemba	r 14,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air telepon, fax,internet,tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	104,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	104,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor				12 kali	12,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 kali	12,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**161,500,000**							**161,500,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						96,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan			96,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				79 unit	8,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan		79 unit	8,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	57,500,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	57,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**130,520,000**							**130,520,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**130,520,000**							**130,520,000**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah				12 bulan	15,000,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	15,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah bulan pelayanan dan konsultasi pajak daerah				12 bulan	115,520,000	Kab. Belitung Timur, Manggar, Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	115,520,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**604.945.000**							**604.945.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**604,945,000**							**604,945,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**275.504.000**							**275.504.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				10 jenis	6,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		10 jenis	6,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia				12 Jenis	104,804,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Jenis	104,804,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah logistik kantor				12 Bulan	106,500,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	106,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				12 Jenis 12000 Lem	23,000,000 ar	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Jenis 12000 Lem	23,000,000 ar	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				3 Jenis	5,200,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 Jenis	5,200,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan	30,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**212,141,000**							**212,141,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim				88 Paket	3,033,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		88 Paket	3,033,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	208,500,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	208,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	608,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	608,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**117,300,000**							**117,300,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara				7 unit	32,300,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		7 unit	32,300,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	85,000,000	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 Bulan	85,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	0	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**0**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**0**							**0**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data kendaraan roda 2 dan roda 4				5000 Data	0	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5000 Data	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	persentase realisasi target PAD pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka				1 Kegiatan	0	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 Kegiatan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**673.244.000**							**673.244.000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**521,144,000**							**521,144,000**	
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0**							**0**	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai				4 orang	0	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 orang	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai				5 orang	0	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas			Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 orang	0	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai				4 orang	0	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		4 orang	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**246.059.000**							**246.059.000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				15 jenis	7,278,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		15 jenis	7,278,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli				58 jenis	132,013,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		58 jenis	132,013,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis BBM, bahan-bahan lainnya dan makanan minuman kegiatan kantor yang tersedia				27 jenis	31,117,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		27 jenis	31,117,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak Jumlah penggandaan				5 jenis 15000 lem	13,422,000 ar	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 jenis 15000 lem	13,422,000 ar	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				3 jenis	5,096,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3 jenis	5,096,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Tamu dan peserta rapat				300 orang	9,182,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		300 orang	9,182,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				12 bulan	47,951,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	47,951,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**121,035,000**							**121,035,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai Jumlah Surat/Barang yang dikirim				420 lemba 500 paket	r 13,468,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		420 lemba 500 paket	r 13,468,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, internet, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 bulan	98,285,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	98,285,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa layanan umum kantor				12 bulan	9,282,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		12 bulan	9,282,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**154,050,000**							**154,050,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara				6 unit	55,591,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		6 unit	55,591,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin kantor yang dipelihara				5 unit	6,449,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		5 unit	6,449,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	92,010,000	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Perawas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		1 unit	92,010,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**152,100,000**							**152,100,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**152,100,000**							**152,100,000**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	data kendaraan roda 2(dua) dan roda 4(empat)				3200 data	32,100,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		3200 data	32,100,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase realisasi target PAD pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung				100 perse	120,000,000	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik		100 perse	n 120,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**24.516.176.068**							**28.593.445.024**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	survey kepuasan pelayanan internal (BKPSDM)	nilai		nilai	98 nilai	**23,304,900,894**						98 nilai	**25,635,390,983**	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	Orang		Orang	97 Orang	**15,575,732,394**						97 Orang	**17,133,305,633**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan				97 Orang	15,575,732,394	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	97 Orang	17,133,305,633	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia	Kompone	n	Komponen	20 Kompo	nen **702,000,000**						20 Kompo	nen **772,200,000**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia				35 Kompo	nen 25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	35 Kompo	nen 27,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				20 Barang Cetakan	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	20 Barang Cetakan	40,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang Dibeli Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia				5 Jenis 2 Jenis	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	5 Jenis 2 Jenis	264,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Tersedia				100 Pax	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	100 Pax	22,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Tersedia				36 Kali 36 Kali 1150 Pax	380,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	36 Kali 36 Kali 1150 Pax	418,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dipekerjakan	Orang		Orang	81 Orang	**3,575,700,000**						81 Orang	**3,933,270,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Jumlah Surat/Barang Yang Dikirim				3000 Lemb 2 Jenis	ar 15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	3000 Lem 2 Jenis	ar 16,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, TV Kabel, Virtual Meeting Yang Dibayarkan				12 Bulan	507,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	12 Bulan	557,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dipekerjakan				81 Orang	3,053,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	81 Orang	3,359,070,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	Unit		Unit	3 Unit	**3,451,468,500**						3 Unit	**3,796,615,350**	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara				7 Unit	161,056,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	7 Unit	177,162,370	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara				3 Unit	3,188,235,653	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	3 Unit	3,507,059,218	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara				2 Jenis	102,176,147	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung	2 Jenis	112,393,762	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indikator 1. Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi (BKPSDMD)	persen		persen	73 persen	**1,211,275,174**						73 persen	**2,958,054,041**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah Pegawai yang Terpenuhi Sesuai Formasi	Orang		Orang	176 Orang	**257,602,587**						176 Orang	**341,514,195**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan dan Formasi ASN				1 Dokume	n 26,518,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Dokume	n 33,147,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CASN/IPDN yang Lulus Seleksi				139 Orang	83,147,337	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	139 Orang	91,462,070	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang diterbitkan SK Pensiun, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun				97 SK	20,005,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	97 SK	25,006,250	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kelembagaan Profesi ASN Jumlah Pemberian Bantuan Hukum/LKBH KORPRI Jumlah peserta penyegaran rohani				1 LKBH 10 Kasus 600 orang	41,656,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LKBH 10 Kasus 600 orang	62,484,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Yang Dikelola				1 Sistem	62,895,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Sistem	94,342,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang Dikelola Datanya				1185 Oran	g 23,381,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1185 Oran	g 35,071,875	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah ASN yang Dipromosi dan Mutasi	Orang		Orang	325 Orang	[illegible]						325 Orang	[illegible]	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN Yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi				325 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	325 Orang	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Diterbitkan SK Kenaikan Pangkat				1175 Oran	g 50,637,587	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1175 Oran	g 55,701,346	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang Dipetakan Kompetensinya				350 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	350 Orang	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah Pegawai ASN Tugas Belajar yang Menerima Beasiswa	Orang		Orang	11 Orang	**568,035,000**						11 Orang	**580,838,500**	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang Diassesment				1444 Oran	g 128,035,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1444 Oran	g 140,838,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang menerima Beasiswa				11 Orang	440,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11 Orang	440,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah ASN yang Terbina	Orang		Orang	5469 Oran	g **135,000,000**						5469 Oran	g **1,760,000,000**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	ASN Berprestasi Jumlah ASN yang Diukur Nilai Indeks Profesionalitasnya				7 Orang 5469 Oran	50,000,000 g	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 Orang 5469 Oran	440,000,000 g	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah penerbitan satya lencana				500 Satya Lencana	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500 Satya Lencana	440,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang DIbina Disiplinnya				3700 Oran	g 25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3700 Oran	g 440,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani				8 Kasus	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8 Kasus	440,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**													6.159.257.286	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya (BKPSDMD)	persen		persen	83 persen	**385,637,587**						83 persen	**6,159,257,286**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis	Persen		Persen	76 Persen	**91,637,587**						76 Persen	**2,500,000,000**	
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis				1000 Oran	g 91,637,587	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1000 Oran	g 2,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen		Persen	0 Persen	**294,000,000**						0 Persen	**3,659,257,286**	
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Mutu Pengembangan Kompetensi Nilai Akreditasi Diklat				6 Dokume 81 Nilai	n 97,903,117	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Dokume 81 Nilai	n 107,693,429	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Prajabatan Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Pimpinan Daerah yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				80 Orang 30 Orang 80 Orang	149,220,649	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80 Orang 30 Orang 80 Orang	3,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Teknis				10 Lapora	n 46,876,234	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	ASN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 Lapora	51,563,857	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						10.930.297.979							**0**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	indeks kepuasan pelayanan badan penghubung (BADAN PENGHUBUNG)	persen		persen	100 perse	**9,992,396,332**						100 perse	n **0**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	dokumen		dokumen	14 dokum	n **6,671,900**						14 dokum	n **0**	
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD				4 dokume	n 2,921,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	4 dokume	n 0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi PD				4 dokume	n 3,750,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	4 dokume	n 0	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan	%		%	85 %	**4,424,621,912**						85 %	**0**	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				30 orang	4,424,621,912		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	30 orang	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah		0	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	%		%	85 %	**40,000,000**						85 %	**0**	
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				30 orang	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	30 orang	0	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	bulan		bulan	12 bulan	**1,125,062,520**						12 bulan	**0**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia				215 buah	7,599,587		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	215 buah	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				12 bulan	148,156,934		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				12 bulan	4,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				12 bulan	61,465,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan jilid				4014 lemb 131 buah	r 13,521,482		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	4014 lemb 131 buah	r 0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia				12 bulan	1,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah racun rumput, tanki semprot, ATK, Ketas & Cover, Materai, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Obat-obatan, dan alat pembersih				12 bulan	175,992,517		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia				12 bulan	158,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan				12 bulan	554,127,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	%		%	100 %	**2,965,960,000**						100 %	**0**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai jumlah surat/barang yang dikirim				1000 lemb 1 tahun	r 132,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	1000 lemb 1 tahun	r 0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan				12 BULAN	448,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 BULAN	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				12 bulan	27,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				12 bulan	2,358,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	%		%	100 %	**1,430,080,000**						100 %	**0**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				12 BULAN	317,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 BULAN	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				12 bulan	788,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah mesin operasional yang dipelihara				12 bulan	23,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				12 bulan	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	12 bulan	0	BADAN PENGHUBUNG
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	indeks kepuasan pelayanan badan penghubung (BADAN PENGHUBUNG)	persen		persen	100 perse	**937,901,647**						100 perse	n **0**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	tes	persen		persen	0 persen	**937,901,647**						0 persen	**0**	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Indeks Kelembagaan Organisasi berkinerja				100 % 5 organisa	123,799,890 si		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya Pelayanan Badan Penghubung	100 % 5 organisa	0 si	BADAN PENGHUBUNG
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kunjungan masyarakat ke pameran & pagelaran seni budaya Persentase peningkatan jumlah peserta pameran & seni budaya yang difasilitas oleh Badan Penghubung				3000 oran 25 orang	g 431,163,757		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya Pelayanan Badan Penghubung	3000 oran 25 orang	g 0	BADAN PENGHUBUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	jumlah kegiatan pemprov yang dikoordinasi dan sinkronisasi oleh Badan Penghubung jumlah kegiatan pemprov yang dikoordinasi dan sinkronisasi oleh Badan Penghubung				20 koordin 50 kali keprotoko	asi 382,938,000 a n		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Meningkatnya Pelayanan Badan Penghubung	20 koordin 50 kali keprotoko	asi 0 lan	BADAN PENGHUBUNG
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						17.661.278.879							19.688.667.133	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD (Inspektorat)	nilai		nilai	80 nilai	**15,511,175,529**						80 nilai	**15,915,656,864**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**9,515,000**							**112,520,000**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7,305,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah		8,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah		104,520,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13,641,887,028**							**13,500,000,000**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13,641,887,028		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			13,500,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**152,753,000**							**250,000,000**	
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				10 orang	152,753,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik	Perangkat Daerah	10 orang	250,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			20,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			50,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1,924,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			2,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			30,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			20,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			20,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						92,880,501		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			120,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						64,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			120,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						216,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			220,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**26,000,000**							**91,950,000**	
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						26,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			91,950,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**906,300,000**							**967,186,864**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			24,570,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			150,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			76,316,864	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						716,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			716,300,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**294,320,000**							**391,500,000**	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						124,320,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			135,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			31,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			225,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1,993,713,350**							**3,160,928,000**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**						**1.771.450.000**							**2.910.928.000**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			552,753,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			954,410,000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja						21,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat			27,960,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan						75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			231,130,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			719,520,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			425,155,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**						**222,263,350**							**250,000,000**	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						222,263,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**156,390,000**							**612,082,269**	
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**						**156.390.000**							**612.082.269**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						13,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			250,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						23,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			67,630,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik			294,452,269	INSPEKTORAT DAERAH
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**13.680.437.484**							**17.989.544.236**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Nilai Sakip PD	Nilai		Nilai	74 (B) Nilai	**7,075,837,095**						74 (B) Nilai	**8,780,549,113**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen		Dokumen	9 Dokume	n **120,948,452**						9 Dokume	n **168,023,728**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 Dokume	n 78,445,899	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesbangpol dan Badan/Kantor Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 Dokume	n 107,994,812	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kineja PD				5 Dokume	n 42,502,553	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesbangpol dan Badan/Kantor Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5 Dokume	n 60,028,916	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,668,004,778**							**7,135,693,286**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				40 Orang	5,648,004,778		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40 Orang	7,113,693,286	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran				14 Dokum	n 10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14 Dokum	n 11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokume	n **280,172,565**						1 Dokume	n **416,664,669**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				8 jenis	5,721,491		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 jenis	6,293,640	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan bahan logistic kantor				3 jenis	15,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 jenis	16,709,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis yang barang cetak Jumlah penggandaan				2 Jenis 100000 Le	12,012,286 mbar		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Jenis 100000 Le	13,213,515 mbar	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan				3 jenis	27,963,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 jenis	30,759,905	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah ATK kantor jumlah bahan pembersih jumlah materai				52 jenis 31 jenis 900 lemba	77,626,008 r		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52 jenis 31 jenis 900 lemba	85,388,609 r	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi				260 org	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	260 org	14,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				260 org 20 kali 300 px	128,659,230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	260 org 20 kali 300 px	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	**823,900,000**						3 Jenis	**860,075,000**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan jasa surat menyurat				60 surat	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60 surat	1,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel,virtual meeting yang dibayarkan				12 Bulan	144,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	180,375,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				18 Orang	678,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18 Orang	678,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	**182,811,300**						3 Jenis	**200,092,430**	
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				2 Unit Mobil 2 Unit Motor	87,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Unit Mobil 2 Unit Motor	94,700,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah BBM Genset Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				650 liter 3 Jenis	60,811,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	650 liter 3 Jenis	66,892,430	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yg di pelihara				3 Jenis	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Jenis	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 gedung	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 gedung	16,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg di pelihara				3 Jenis	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Jenis	11,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol-simbol negara				0	**1,748,360,040**						0	**3,450,000,000**	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						**1,748,360,040**							**3,450,000,000**	
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah laporan pelaksanaan BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. jumlah laporan pelaksanaan kebijakan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				1 Laporan 1 Laporan	1,524,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan 1 Laporan	3,000,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah Rekomendasi BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. jumlah Rekomendasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				2 Rekome 2 Rekome	ndasi 120,180,020 ndasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	2 Rekome 2 Rekome	ndasi 200,000,000 ndasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang BelaNegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				4 Laporan 4 Laporan	104,180,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan 4 Laporan	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada	persen		persen	15 persen	**3,917,290,000**						15 persen	**4,002,290,000**	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**3,917,290,000**					4 Dokumen	**4,002,290,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik				1 Laporan 1 Laporan	3,776,790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan 1 Laporan	3,847,740,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Jumlah Rekomendasi Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik				1 Dokume 1 Dokume	n 25,500,000 n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokume 1 Dokume	n 28,050,000 n	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan 4 Laporan	115,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan 4 Laporan	126,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Indeks Kinerja Ormas	skor		skor	180 skor	**51,036,600**						180 skor	**475,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokume	n **51,036,600**						2 Dokume	n **475,000,000**	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2 Dokume	n 17,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	2 Dokume	n 200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2 Dokume	n 13,928,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	2 Dokume	n 75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2 Dokume	n 19,468,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Berdemokrasi	Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	2 Dokume	n 200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Jumlah angka kriminalitas menurun	Kasus		Kasus	150 Kasus	**450,000,000**						150 Kasus	**800,000,000**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen		Dokumen	2 Dokume	n **450,000,000**						2 Dokume	n **800,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rekomendasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Dokume	n 378,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokume	n 600,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rekomendasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Dokume	n 31,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokume	n 100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rekomendasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Dokume	n 39,908,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokume	n 100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah konflik sosial menurun	Kasus		Kasus	10 Kasus	**437,913,749**						10 Kasus	**481,705,123**	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**						**437,913,749**							**481,705,123**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan 1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan 1 Laporan	55,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Jumlah Rekomendasi Penanganan Konflik di Daerah				2 Rekome 2 Rekome	ndasi 62,000,000 ndasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	2 Rekome 2 Rekome	ndasi 68,200,000 ndasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Jumlah laporan Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan 4 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan 4 Laporan	137,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum KoordinasiPimpinan Daerah Provinsi				1 Laporan	200,913,749	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Berdemokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	221,005,123	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										TOTAL	**2.109.875.634**							822.159.885.333	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung